LEMBARAN NEGARA REPUBLIK INDONESIA

No.56, 2015 KEUANGAN. Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara. TA 2015. Rincian. Pencabutan.

PERATURAN PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA
NOMOR 36 TAHUN 2015
TENTANG
RINCIAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA NEGARA
TAHUN ANGGARAN 2015

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA,

Menimbang : a. bahwa dengan diundangkannya Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2015 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2014 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Tahun Anggaran 2015, perlu mengganti Peraturan Presiden Nomor 162 Tahun 2014 tentang Rincian Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Tahun Anggaran 2015;

b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a, dan untuk melaksanakan ketentuan Pasal 4 ayat (11), Pasal 5 ayat (7), Pasal 8 ayat (5), Pasal 12, Pasal 13 ayat (6), Pasal 17 ayat (3), dan Pasal 18 ayat (5) Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2014 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Tahun Anggaran 2015 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2015 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2014 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Tahun Anggaran 2015, perlu menetapkan Peraturan Presiden tentang Rincian

www.peraturan.go.id

Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Tahun Anggaran 2015;

Mengingat :

1. Pasal 4 ayat (1) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
2. Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2014 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Tahun Anggaran 2015 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 259, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5593) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2015 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2014 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Tahun Anggaran 2015 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 44, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5669);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN PRESIDEN TENTANG RINCIAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA NEGARA TAHUN ANGGARAN 2015.

Pasal 1

Rincian Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara terdiri atas:

a. rincian Anggaran Pendapatan Negara;
b. rincian Anggaran Belanja Negara; dan
c. rincian Pembiayaan Anggaran.

Pasal 2

Rincian Anggaran Pendapatan Negara sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 huruf a terdiri atas:

a. rincian Penerimaan Perpajakan sebagaimana tercantum dalam Lampiran I yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Presiden ini; dan
b. rincian Penerimaan Negara Bukan Pajak sebagaimana tercantum dalam Lampiran II yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Presiden ini.

Pasal 3

Rincian Anggaran Belanja Negara sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 huruf b terdiri atas:

www.peraturan.go.id

a. rincian Anggaran Belanja Pemerintah Pusat; dan

b. rincian Anggaran Transfer ke Daerah dan Dana Desa.

Pasal 4

(1) Rincian Anggaran Belanja Pemerintah Pusat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 huruf a terdiri atas:

a. rincian Anggaran Belanja Pemerintah Pusat pada Bagian Anggaran Kementerian Negara/Lembaga; dan

b. rincian Anggaran Belanja Pemerintah Pusat pada Bagian Anggaran Bendahara Umum Negara.

(2) Rincian Anggaran Belanja Pemerintah Pusat pada Bagian Anggaran Kementerian Negara/Lembaga sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a dirinci menurut organisasi/bagian anggaran, unit organisasi, fungsi, program, dan kegiatan sebagaimana tercantum dalam Lampiran III yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Presiden ini.

(3) Rincian Anggaran Belanja Pemerintah Pusat pada Bagian Anggaran Bendahara Umum Negara sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b dirinci menurut organisasi, unit organisasi, fungsi, subfungsi, program, dan kegiatan, termasuk anggaran program pengelolaan subsidi, sebagaimana tercantum dalam Lampiran IV yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Presiden ini.

Pasal 5

(1) Rincian Anggaran Transfer ke Daerah dan Dana Desa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 huruf b terdiri atas:

a. rincian Anggaran Transfer ke Daerah dan Dana Desa sebagaimana tercantum dalam Lampiran V yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Presiden ini;

b. rincian Dana Bagi Hasil terdiri atas:

1. rincian Dana Bagi Hasil Pajak Penghasilan Pasal 25, dan Pasal 29 Wajib Pajak orang pribadi dalam negeri dan Pajak Penghasilan Pasal 21 menurut Provinsi/Kabupaten/Kota sebagaimana tercantum dalam Lampiran VI;

2. rincian Dana Bagi Hasil Pajak Bumi dan Bangunan menurut Provinsi/Kabupaten/Kota sebagaimana tercantum dalam Lampiran VII;

3. rincian Dana Bagi Hasil Cukai Hasil Tembakau menurut Provinsi sebagaimana tercantum dalam Lampiran VIII;

www.peraturan.go.id

4. rincian Dana Bagi Hasil Sumber Daya Alam Pertambangan Minyak Bumi dan Gas Bumi menurut Provinsi/Kabupaten/Kota sebagaimana tercantum dalam Lampiran IX;
5. rincian Dana Bagi Hasil Sumber Daya Alam Pertambangan Umum menurut Provinsi/ Kabupaten/Kota sebagaimana tercantum dalam Lampiran X;
6. rincian Dana Bagi Hasil Sumber Daya Alam Hasil Kehutanan menurut Provinsi/Kabupaten/Kota sebagaimana tercantum dalam Lampiran XI;
7. rincian Dana Bagi Hasil Sumber Daya Alam Perikanan menurut Kabupaten/Kota sebagaimana tercantum dalam Lampiran XII; dan
8. rincian Dana Bagi Hasil Sumber Daya Alam Pengusahaan Panas Bumi menurut Provinsi/Kabupaten/Kota sebagaimana tercantum dalam Lampiran XIII,

yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Presiden ini;

c. rincian Dana Alokasi Umum menurut Provinsi/ Kabupaten/Kota sebagaimana tercantum dalam Lampiran XIV yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Presiden ini;
d. rincian Dana Alokasi Khusus menurut Provinsi/ Kabupaten/Kota sebagaimana tercantum dalam Lampiran XV yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Presiden ini;
e. rincian Dana Alokasi Khusus Tambahan terdiri atas:
    1. rincian Dana Alokasi Khusus Tambahan Afirmasi kepada Kabupaten/Kota daerah tertinggal dan perbatasan yang memiliki kemampuan keuangan relatif rendah menurut Kabupaten/Kota sebagaimana tercantum dalam Lampiran XVI;
    2. rincian Dana Alokasi Khusus Tambahan Pendukung Program Prioritas Kabinet Kerja (P3K2) dan Rincian Dana Alokasi Khusus Tambahan Usulan Daerah yang disetujui oleh DPR-RI menurut Provinsi/Kabupaten/Kota sebagaimana tercantum dalam Lampiran XVII;

    yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Presiden ini;
f. rincian Tunjangan Profesi Guru Pegawai Negeri Sipil Daerah menurut Provinsi/Kabupaten/Kota sebagaimana tercantum

www.peraturan.go.id

dalam Lampiran XVIII yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Presiden ini;

g. rincian Dana Tambahan Penghasilan Guru Pegawai Negeri Sipil Daerah menurut Provinsi/Kabupaten/Kota sebagaimana tercantum dalam Lampiran XIX yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Presiden ini;

h. rincian Bantuan Operasional Sekolah menurut Provinsi sebagaimana tercantum dalam Lampiran XX yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Presiden ini;

i. rincian Dana Insentif Daerah menurut Provinsi/Kabupaten/Kota sebagaimana tercantum dalam Lampiran XXI yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Presiden ini; dan

j. rincian Dana Desa menurut Kabupaten/Kota, sebagaimana tercantum dalam Lampiran XXII yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Presiden ini.

(2) Rincian lebih lanjut Anggaran Transfer ke Daerah dan Dana Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a berupa:

a. rincian kurang bayar dan lebih bayar Dana Bagi Hasil menurut Provinsi/Kabupaten/Kota; dan

b. rincian Dana Proyek Pemerintah Daerah dan Desentralisasi menurut Provinsi/Kabupaten/Kota,

ditetapkan dengan Peraturan Menteri Keuangan.

(3) Rincian Dana Alokasi Khusus dan Dana Alokasi Khusus Tambahan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d dan huruf e menjadi dasar bagi menteri teknis/pimpinan lembaga terkait untuk menetapkan petunjuk teknis Dana Alokasi Khusus pada masing-masing bidang atau subbidang paling lama 2 (dua) minggu setelah Peraturan Presiden ini diundangkan.

(4) Perubahan rincian Transfer ke Daerah dan Dana Desa sebagai akibat dari:

a. perubahan data; dan/atau

b. kesalahan hitung,

ditetapkan dengan Peraturan Menteri Keuangan.

Pasal 6

Rincian Anggaran Pendidikan sebagaimana tercantum dalam Lampiran XXIII merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Presiden ini.

www.peraturan.go.id

Pasal 7

Rincian Pembiayaan Anggaran sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 huruf c tercantum dalam Lampiran XXIV merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Presiden ini.

Pasal 8

(1) Perubahan rincian dari Anggaran Belanja Pemerintah Pusat berupa:

a. perubahan anggaran belanja yang bersumber dari Penerimaan Negara Bukan Pajak termasuk Badan Layanan Umum;

b. perubahan pinjaman dan hibah luar negeri dan pinjaman dan hibah dalam negeri;

c. pergeseran Bagian Anggaran 999.08 (Bendahara Umum Negara Pengelola Belanja Lainnya) ke Bagian Anggaran Kementerian Negara/Lembaga, atau antar subbagian anggaran dalam Bagian Anggaran Bendahara Umum Negara, termasuk yang terkait dengan pemberian penghargaan dan pengenaan sanksi atas pelaksanaan anggaran belanja kementerian/ lembaga;

d. perubahan anggaran belanja yang bersumber dari Surat Berharga Syariah Negara *Project Based Sukuk*;

e. pergeseran anggaran antarkegiatan dalam 1 (satu) program sepanjang pergeseran tersebut tidak mengurangi volume keluaran (*output*) yang telah direncanakan untuk hal yang bersifat prioritas, mendesak, darurat, atau yang tidak dapat ditunda;

f. pergeseran anggaran dalam 1 (satu) Bagian Anggaran yang bersumber dari rupiah murni untuk memenuhi kebutuhan biaya operasional; dan

g. pergeseran anggaran antarlokasi dan/atau antarkewenangan,

ditetapkan oleh Menteri Keuangan.

(2) Ketentuan mengenai tata cara perubahan Anggaran Belanja Pemerintah Pusat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dengan Peraturan Menteri Keuangan.

Pasal 9

(1) Perubahan rincian dari Pembiayaan Anggaran yang berasal dari perubahan pagu Penerusan Pinjaman kepada Badan Usaha Milik Negara/Pemerintah Daerah sebagai akibat dari:

a. penambahan pagu Penerusan Pinjaman kepada Badan Usaha Milik Negara/Pemerintah Daerah karena percepatan atau lanjutan penarikan;

www.peraturan.go.id

b. penambahan pagu Penerusan Pinjaman kepada Badan Usaha Milik Negara/Pemerintah Daerah yang bersumber dari pagu Penerusan Pinjaman kepada Badan Usaha Milik Negara/Pemerintah Daerah di tahun anggaran 2014 yang tidak terserap; dan/atau

d. pengurangan pagu Penerusan Pinjaman kepada Badan Usaha Milik Negara/Pemerintah Daerah,

ditetapkan oleh Menteri Keuangan.

(2) Ketentuan mengenai tata cara perubahan pagu Penerusan Pinjaman kepada Badan Usaha Milik Negara/Pemerintah Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dengan Peraturan Menteri Keuangan.

Pasal 10

Rincian Anggaran Belanja Pemerintah Pusat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (2) dan ayat (3), rincian Anggaran Transfer ke Daerah dan Dana Desa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (1), dan rincian Pembiayaan Anggaran sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 menjadi dasar penyusunan dan pengesahan masing-masing Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran Tahun Anggaran 2015.

Pasal 11

Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran dan Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran Revisi pada masing-masing Bagian Anggaran Kementerian Negara/Lembaga dan Bagian Anggaran Bendahara Umum Negara yang telah disahkan sebelum Peraturan Presiden ini berlaku, dinyatakan masih tetap berlaku sampai dengan disahkannya revisi Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran masing-masing Bagian Anggaran Kementerian Negara/Lembaga dan Bagian Anggaran Bendahara Umum Negara berdasarkan Peraturan Presiden ini.

Pasal 12

Ketentuan lebih lanjut pelaksanaan Peraturan Presiden ini diatur dengan Peraturan Menteri Keuangan.

Pasal 13

Pada saat Peraturan Presiden ini mulai berlaku, semua peraturan perundang-undangan yang merupakan peraturan pelaksanaan dari Peraturan Presiden Nomor 162 Tahun 2014 tentang Rincian Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Tahun Anggaran 2015 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 334) dinyatakan masih tetap berlaku sepanjang tidak bertentangan dengan ketentuan dalam Peraturan Presiden ini.

www.peraturan.go.id

Pasal 14

Pada saat Peraturan Presiden ini mulai berlaku, Peraturan Presiden Nomor 162 tahun 2014 tentang Rincian Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Tahun Anggaran 2015 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 334), dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

Pasal 15

Peraturan Presiden ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Presiden ini dengan penempatannya dalam Lembaran Negara Republik Indonesia.

Ditetapkan di Jakarta
pada tanggal 17 Maret 2015

PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA,

JOKO WIDODO

Diundangkan di Jakarta
pada tanggal 17 Maret 2015

MENTERI HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA
REPUBLIK INDONESIA,

YASONNA H. LAOLY

www.peraturan.go.id

LAMPIRAN I

PERATURAN PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA
NOMOR 36 TAHUN 2015

TENTANG
RINCIAN ANGGARAN
PENDAPATAN DAN BELANJA NEGARA
TAHUN ANGGARAN 2015

RINCIAN PENERIMAAN PERPAJAKAN

www.peraturan.go.id

LAMPIRAN I
RINCIAN PENERIMAAN PERPAJAKAN

(Dalam Ribuan Rupiah)

NO	URAIAN	JUMLAH
1.	**Pendapatan Pajak Dalam Negeri**	**1.439.998.598.239**
1.1	Pendapatan Pajak Penghasilan (PPh)	679.370.136.164
1.1.1	Pendapatan PPh Migas	49.534.791.000
1.1.1.1	Pendapatan PPh Minyak Bumi	13.653.926.000
1.1.1.2	Pendapatan PPh Gas Bumi	35.880.865.000
1.1.2	Pendapatan PPh Nonmigas	629.835.345.164
1.1.2.1	Pendapatan PPh Pasal 21	126.848.266.457
1.1.2.2	Pendapatan PPh Pasal 22	9.646.439.742
1.1.2.3	Pendapatan PPh Pasal 22 Impor	57.123.734.286
1.1.2.4	Pendapatan PPh Pasal 23	33.478.947.416
1.1.2.5	Pendapatan PPh Pasal 25/29 Orang Pribadi	5.215.079.428
1.1.2.6	Pendapatan PPh Pasal 25/29 Badan	220.873.588.605
1.1.2.7	Pendapatan PPh Pasal 26	49.778.953.224
1.1.2.8	Pendapatan PPh Final	126.804.500.517
1.1.2.9	Pendapatan PPh Nonmigas Lainnya	65.835.489
1.2	Pendapatan Pajak Pertambahan Nilai dan Pajak Penjualan Barang Mewah	576.469.166.972
1.2.1	Pendapatan PPN Dalam Negeri	338.192.387.381
1.2.2	Pendapatan PPN Impor	207.509.791.824
1.2.3	Pendapatan PPN Lainnya	499.863.983
1.2.4	Pendapatan PPnBM Dalam Negeri	19.348.563.829
1.2.5	Pendapatan PPnBM Impor	10.751.938.627
1.2.6	Pendapatan PPnBM Lainnya	166.621.328
1.3	Pendapatan Pajak Bumi dan Bangunan	26.689.881.492
1.3.1	Pendapatan PBB Perkebunan	1.292.958.019
1.3.2	Pendapatan PBB Perhutanan	339.633.304
1.3.3	Pendapatan PBB Pertambangan	1.115.121.008
1.3.4	Pendapatan PBB Migas	23.942.169.161
1.4	Pendapatan Cukai	145.739.923.240
1.4.1	Pendapatan Cukai Hasil Tembakau	139.117.757.500
1.4.2	Pendapatan Cukai Ethyl Alkohol	165.500.000
1.4.3	Pendapatan Minuman Mengandung Ethyl Alkohol	6.456.665.740
1.5	Pendapatan Pajak Lainnya	11.729.490.371

www.peraturan.go.id

LAMPIRAN I
RINCIAN PENERIMAAN PERPAJAKAN

(Dalam Ribuan Rupiah)

NO	URAIAN	JUMLAH
2.	**Pendapatan Pajak Perdagangan Internasional**	**49.256.889.890**
2.1	Pendapatan Bea Masuk	37.203.870.000
2.2	Pendapatan Bea Keluar	12.053.019.890
TOTAL		**1.489.255.488.129**
Memorandum Item:		
Pajak Ditanggung Pemerintah (DTP) terdiri atas:		
1. Pajak Penghasilan (PPh)		8.180.000.000
a.	PPh Panas Bumi	2.190.000.000
b.	PPh atas bunga, imbal hasil, dan penghasilan pihak ketiga atas jasa yang diberikan kepada Pemerintah dalam Penerbitan dan/atau pembelian kembali/penukaran SBN di pasar internasional, tetapi tidak termasuk jasa konsultan hukum lokal	5.990.000.000
2. Bea Masuk		1.000.000.000

PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA,

JOKO WIDODO

www.peraturan.go.id

LAMPIRAN II

PERATURAN PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA
NOMOR 36 TAHUN 2015

TENTANG
RINCIAN ANGGARAN
PENDAPATAN DAN BELANJA NEGARA
TAHUN ANGGARAN 2015

RINCIAN PENERIMAAN NEGARA BUKAN PAJAK

www.peraturan.go.id

LAMPIRAN II

RINCIAN PENERIMAAN NEGARA BUKAN PAJAK

(dalam ribuan rupiah)

BAS	URAIAN	JUMLAH
421	**PENERIMAAN SUMBER DAYA ALAM**	**118.919.130.259**
	PENERIMAAN SDA MIGAS	**81.364.880.000**
42111	**Pendapatan Minyak Bumi**	**61.584.010.000**
421111	Pendapatan Minyak Bumi	61.584.010.000
42121	**Pendapatan Gas Alam**	**19.780.870.000**
421211	Pendapatan Gas Alam	19.780.870.000
	PENERIMAAN SDA NON MIGAS	37.554.250.259
42131	**Pendapatan Pertambangan Mineral dan Batu Bara**	**31.678.476.000**
421311	Pendapatan Iuran Tetap Pertambangan dan Energi	2.071.826.000
421312	Pendapatan Produksi/Royalti Pertambangan Mineral dan Batubara	29.606.650.000
4214	**Pendapatan Kehutanan**	**4.713.300.000**
42141	**Pendapatan Dana Reboisasi**	**2.630.161.620**
421411	Pendapatan Dana Reboisasi	2.630.161.620
42142	**Pendapatan Provisi Sumber Daya Hutan**	**1.071.550.000**
421421	Pendapatan Provisi Sumber Daya Hutan	1.071.550.000
42143	**Pendapatan IIUPH (IHPH)**	**162.000.000**
421431	Pendapatan IIUPH (IHPH) Tanaman Industri	162.000.000
421432	Pendapatan IIUPH (IHPH) Bambu	0
421433	Pendapatan IIUPH (IHPH) Tanaman Rotan	0
421434	Pendapatan IIUPH (IHPH) Hutan Alam	0
42144	**Pendapatan Penggunaan Kawasan Hutan**	**849.588.380**
421441	Pendapatan Penggunaan Kawasan Hutan untuk Kepentingan Pembangunan di Luar Kegiatan Kehutanan	849.588.380
42151	**Pendapatan Perikanan**	**578.796.050**
421511	Pendapatan Perikanan	578.796.050
421512	Pendapatan Penerimaan Dana Kompensasi Pelestarian Sumber Daya Alam Kelautan	0
42161	**Pendapatan Pertambangan Panas Bumi**	**583.678.209**
421611	Pendapatan Pertambangan Panas Bumi	564.792.993
421612	Pendapatan Royalti Pertambangan Panas Bumi	18.885.216
422	**PENDAPATAN BAGIAN LABA BUMN**	**36.956.500.000**
42211	**Pendapatan Laba BUMN Perbankan**	**8.751.780.000**
422111	Pendapatan Laba BUMN Perbankan	8.751.780.000
42212	**Pendapatan Laba BUMN Non - Perbankan**	**28.204.720.000**
422121	Pendapatan Laba BUMN Non - Perbankan	28.204.720.000
423	**PENDAPATAN PNBP LAINNYA**	**90.109.584.375**
4231	**Pendapatan dari Pengelolaan BMN (Pemanfaatan dan Pemindahtanganan) serta Pendapatan dari Penjualan**	**31.061.498.485**
42311	**Pendapatan Penjualan Hasil Produksi/Sitaan**	**21.909.099.042**
423111	Pendapatan Penjualan Hasil Pertanian, Kehutanan, dan Perkebunan	9.715.950
423112	Pendapatan Penjualan Hasil Peternakan dan Perikanan	24.339.146
423113	Pendapatan Penjualan Hasil Tambang	20.534.184.810
423114	Pendapatan Penjualan Hasil Sitaan/Rampasan dan Harta Peninggalan	99.309.039
423115	Pendapatan Penjualan Obat-obatan dan Hasil Farmasi Lainnya	0
423116	Pendapatan Penjualan Informasi, Penerbitan, Film, Survey, Pemetaan dan Hasil Cetakan Lainnya	15.679.539
423117	Pendapatan Penjualan Dokumen-dokumen Pelelangan	74.606
423118	Pendapatan Penjualan Cadangan Beras Pemerintah Dalam Rangka Operasasi Pasar Murni	1.200.000.000
423119	Pendapatan Penjualan Lainnya	25.795.952
42312	**Pendapatan dari Pemindahtanganan BMN**	**107.846.890**
423121	Pendapatan Penjualan Rumah, Gedung, Bangunan dan Tanah	104.406
423122	Pendapatan dan Penjualan Peralatan dan Mesin	2.213.212
423123	Pendapatan Penjualan Sewa Beli	0
423124	Pendapatan Penjualan Aset Bekas Milik Asing/Cina	0
423125	Pendapatan dari Tukar Menukar Tanah, Gedung dan Bangunan	0
423126	Pendapatan dari Tukar Menukar Peralatan dan Mesin	0
423127	Pendapatan dari Tukar Menukar Jalan, Irigasi dan Jaringan	0
423128		0
423129	Pendapatan dari Pemindahtanganan BMN Lainnya	105.529.272
42313	**Pendapatan Penjualan dari Kegiatan Hulu Migas**	**8.644.380.000**
423131	Pendapatan Bersih Hasil Penjualan Bahan Bakar Minyak	0
423132	Pendapatan Minyak Mentah (DMO)	8.474.820.000
423139	Pendapatan Lainnya dari kegiatan Hulu Migas	169.560.000
42314	**Pendapatan dari Pemanfaatan BMN**	**400.172.553**
423141	Pendapatan Sewa Tanah, Gedung dan Bangunan	202.676.204
423142	Pendapatan Sewa Peralatan dan Mesin	14.072.461
423143	Pendapatan Sewa Jalan, Irigasi dan Jaringan	12.500
423144	Pendapatan dari KSP Tanah, Gedung dan Bangunan	0
423145	Pendapatan dari KSP Peralatan dan Mesin	0
423146	Pendapatan dari KSP Jalan, Irigasi dan Jaringan	0
423147	Pendapatan dari Bangun, Guna, Serah (BGS)	0
423148	Pendapatan dari Bangun, Serah, Guna (BSG)	0
423149	Pendapatan Sewa dari Pemanfaatan BMN Lainnya	183.411.388

www.peraturan.go.id

LAMPIRAN II

RINCIAN PENERIMAAN NEGARA BUKAN PAJAK

(dalam ribuan rupiah)

BAS	URAIAN	JUMLAH
4232	**Pendapatan Jasa**	**32.410.602.456**
42321	**Pendapatan Jasa I**	**21.672.209.228**
423211	Pendapatan Rumah Sakit dan Instansi Kesehatan Lainnya	30.725.672
423212	Pendapatan Tempat Hiburan/Taman/Museum dan Pungutan Usaha Pariwisata Alam (PUPA)	1.111.133
423213	Pendapatan Surat Keterangan, Visa dan Paspor	3.326.253.910
423214	Pendapatan Hak dan Perijinan	12.897.446.005
423215	Pendapatan Sensor/Karantina, Pengawasan/Pemeriksaan	257.409.062
423216	Pendapatan Jasa Tenaga, Pekerjaan, Informasi, Pelatihan, dan Teknologi Sesuai Dengan Tugas Dan Fungsi Masing-Masing Kementerian Dan Pendapatan DJBC	916.667.367
423217	Pendapatan Jasa Kantor Urusan Agama	1.156.054.620
423218	Pendapatan Jasa Bandar Udara, Kepelabuhan, dan Kenavigasian	1.154.921.546
423219	Pendapatan Pelayanan Pertanahan	1.931.619.913
42322	**Pendapatan Jasa II**	**1.221.565.926**
423221	Pendapatan Jasa Lembaga Keuangan (Jasa Giro)	58.998.127
423222	Pendapatan Jasa Penyelenggaraan Telekomunikasi	907.176.034
423223	Pendapatan Iuran Lelang Untuk Fakir Miskin	0
423224	Pendapatan Jasa Catatan Sipil	0
423225	Pendapatan Biaya Penagihan Pajak Negara dengan Surat Paksa	4.026.275
423226	Pendapatan Uang Pewarganegaraan	624.000
423227	Pendapatan Bea Lelang	210.001.425
423228	Pendapatan Biaya Pengurusan Piutang dan Lelang Negara	34.669.640
423229	Pendapatan Registrasi Dokter dan Dokter Gigi	6.070.425
42323	**Pendapatan Jasa Luar Negeri**	**692.029.977**
423231	Pendapatan dari Pemberian Surat Perjalanan RI	488.971.770
423232	Pendapatan dari Jasa Pengurusan Dokumen Konsuler	154.907.360
423239	Pendapatan Rutin Lainnya dari Luar Negeri	48.150.847
42324	**Pendapatan Layanan Jasa Perbankan**	**0**
423241	Pendapatan Layanan Jasa Perbankan	0
42325	**Pendapatan atas Pengelolaan Rekening Tunggal Perbendaharaan (Treasury Single Account) dan/atau Jasa Penempatan Uang Negara**	**2.735.781.500**
423251	Pendapatan atas Penerbitan SP2D Dalam Rangka TSA	0
423252	Pendapatan atas Penempatan Uang Negara pada Bank Umum	10.000.000
423253	Pendapatan dari Pelaksanaan Treasury National Pooling	118.860.000
423254	Pendapatan dari Penempatan Uang Negara di Bank Indonesia	2.606.921.500
42326	**Pendapatan Jasa Kepolisian I**	**4.167.928.480**
423261	Pendapatan Surat Izin Mengemudi (SIM)	1.090.648.040
423262	Pendapatan Surat Tanda Nomor Kendaraan (STNK)	1.074.179.750
423263	Pendapatan Surat Tanda Coba Kendaraan (STCK)	67.531.825
423264	Pendapatan Buku Pemilik Kendaraan Bermotor (BPKB)	1.219.769.720
423265	Pendapatan Tanda Nomor Kendaraan Bermotor (TNKB)	681.598.770
423266	Pendapatan Ujian Keterampilan Mengemudi melalui Simulator	31.473.250
423267	Pendapatan Penerbitan Surat Izin Senjata Api dan Bahan Peledak	2.727.125
42327	**Pendapatan Jasa Pelayanan Tol**	**213.000.000**
423271	Pendapatan Jasa Pelayanan Tol Suramadu	213.000.000
42328	**Pendapatan Jasa Kepolisian II**	**128.159.017**
423281	Pendapatan Penerbitan Surat Mutasi Kendaraan ke Luar Daerah	61.415.025
423282	Pendapatan Penerbitan Surat Keterangan Catatan Kepolisian	65.223.740
423283	Pendapatan Penerbitan Surat Keterangan Lapor Diri	0
423284	Pendapatan Penerbitan Kartu Sidik Jari (Inafis Card)	0
423285	Pendapatan Denda Pelanggaran Lalu Lintas	1.520.252
42329	**Pendapatan Jasa Lainnya**	**1.579.928.328**
423291	Pendapatan Jasa Lainnya	1.579.928.328
423292	Pendapatan Bea Lelang oleh Balai Lelang/ Pejabat Lelang Kelas II	0
423293	Pendapatan Bea Lelang Pegadaian	0
4233	**Pendapatan Bunga**	**5.825.134.386**
42331	**Pendapatan Bunga**	**1.418.648.100**
423311	Pendapatan Bunga atas Investasi dalam Obligasi	0
423312	Pendapatan PPA atas Bunga Obligasi	0
423313	Pendapatan Bunga dari Piutang dan Penerusan Pinjaman	1.418.648.100
423314	Pengembalian Pendapatan Bunga dari Pemberian Kredit Pemerintah	0
423315	Pendapatan Bunga dari Rekening Pembangunan Hutan	0
423319	Pendapatan Bunga Lainnya	0
42333	**Pendapatan Premium atas Obligasi Negara**	**4.359.190.000**
423331	Pendapatan Premium Obligasi Negara Dalam Negeri/Rupiah	4.359.190.000
423332	Pendapatan Premium Obligasi Negara Dalam Valuta Asing	0
423333	Pendapatan Fee atas Securities Lending SUN	0
42336	**Pendapatan Imbal Jasa Penjaminan Pemerintah**	**47.296.286**
423361	Pendapatan Imbal Jasa Penjaminan Infrastruktur	47.296.286
4234	**Pendapatan Kejaksaan dan Peradilan dan Hasil Tindak Pidana Korupsi**	**110.580.714**
42341	**Pendapatan Kejaksaan dan Peradilan dan Hasil Tindak Pidana Korupsi**	**110.580.714**
423411	Pendapatan Legalisasi Tanda Tangan	4.012.880
423412	Pendapatan Pengesahan Surat Dibawah Tangan	458.805
423413	Pendapatan Uang Meja (Leges) dan Upah Pada Panitera Badan Pengadilan (Peradilan)	2.651.724
423414	Pendapatan Hasil Denda dan sebagainya	62.193.686
423415	Pendapatan Ongkos Perkara	19.214.284
423416	Pendapatan Penjualan Hasil Lelang Tindak Pidana Korupsi	2.000.000
423417	Pendapatan Penjualan Hasil Lelang Gratifikasi	0
423419	Pendapatan kejaksaan dan Peradilan Lainnya	20.049.335
4235	**Pendapatan Pendidikan**	**3.218.244.624**
42351	**Pendapatan Pendidikan**	**3.218.244.624**
423511	Pendapatan Uang Pendidikan	2.091.288.258
423512	Pendapatan Uang Ujian Masuk, Kenaikan Tingkat, dan Akhir Pendidikan	112.748.657
423513	Pendapatan Uang Ujian untuk Menjalankan Praktek	68.561.329
423519	Pendapatan Pendidikan lainnya	945.646.380

www.peraturan.go.id

LAMPIRAN II

RINCIAN PENERIMAAN NEGARA BUKAN PAJAK

(dalam ribuan rupiah)

BAS	URAIAN	JUMLAH
4236	**Pendapatan Gratifikasi dan Uang Sitaan Hasil Korupsi**	**71.838.129**
42361	**Pendapatan Gratifikasi dan Uang Sitaan Hasil Korupsi**	**71.838.129**
423611	Pendapatan Uang Sitaan Hasil Korupsi yang Telah Ditetapkan Pengadilan	29.527.328
423612	Pendapatan Gratifikasi yang Ditetapkan KPK Menjadi Milik Negara	3.200.000
423613	Pendapatan dari Pengembalian Penyalahgunaan Penyelenggaraan Keuangan	0
423614	Pendapatan Uang Pengganti Tindak Pidana Korupsi yang Ditetapkan di Pengadilan	39.110.801
423615	Pendapatan Hasil Pengembalian Uang Negara	0
4237	**Pendapatan Iuran dan Denda**	**689.945.691**
42371	**Pendapatan Iuran Badan Usaha**	**636.423.024**
423711	Pendapatan Iuran Badan Usaha dari Kegiatan Usaha Penyediaan dan Pendistribusian BBM	484.844.144
423712	Pendapatan Iuran Badan Usaha dari Kegiatan Usaha Pengangkutan Gas Bumi Melalui Pipa	151.578.880
423713	Iuran Badan Usaha di Bidang Pasar Modal dan Lembaga Keuangan	0
42372	**Pendapatan Dana Pengamanan Hutan**	**0**
423721	Pendapatan Dana Pengamanan Hutan	0
42373	**Pendapatan dari Perlindungan Hutan dan Konversi Alam**	**43.908.051**
423731	Pendapatan Iuran Menangkap/Mengambil/Mengangkut Satwa Liar/Mengambil/Mengangkut Tumbuhan Alam Hidup	5.220.844
423732	Pungutan Izin Pengusahaan Pariwisata Alam (PIPPA)	2.500.700
423733	Pungutan Izin Pengusahaan Taman Buru (PIPTB)	0
423734	Pungutan Izin Berburu di Taman Buru dan Areal Buru (PIB)	0
423735	Pungutan Masuk Obyek Wisata Alam	35.794.468
423736	Iuran Hasil Usaha Pengusahaan Pariwisata Alam (IHUPA)	392.039
423737	Iuran Hasil Usaha Perburuan di Taman buru (IHUPTB)	0
423738	Pendapatan Penggantian Nilai Tegakan	0
42374	**Pendapatan Penerimaan dana Kompensasi Pelestarian Sumber Daya Alam Kelautan**	**0**
423741	Pendapatan Penerimaan dana Kompensasi Pelestarian Sumber Daya Alam Kelautan	0
42375	**Pendapatan Denda I**	**9.614.616**
423751	Pendapatan Denda Pelanggaran Eksploitasi Hutan	0
423752	Pendapatan Denda Keterlambatan Penyelesaian Pekerjaan Pemerintah	9.509.616
423753	Pendapatan Denda Administrasi BPHTB	0
423754	Pendapatan Denda Pelanggaran di Bidang Pasar Modal	0
423755	Pendapatan Denda Pelanggaran di Bidang Persaingan Usaha	105.000
423756	Pendapatan Denda Pelaksanaan Rekening Pengeluaran Bersaldo Nihil dalam Rangka TSA	0
423757	Pendapatan Denda atas Pelaksanaan Penempatan Uang Negara di Bank Umum dan Bank Indonesia	0
423758	Pendapatan Denda atas Pelaksanaan Treasury National Pooling	0
423759	Pendapatan Denda atas Kekurangan/Keterlambatan Penyetoran Penerimaan Negara oleh Bank/ Pos Persepsi	0
42376	**Pendapatan Denda II**	**0**
423761	Pendapatan Denda atas Kekurangan/Keterlambatan Pelimpahan Saldo BO II ke BO I	0
423762	Pendapatan Denda atas Kekurangan/KeterlambatanPembagian PBB/BPHTB oleh BO III PBB/BPHTB	0
4239	**Pendapatan Lain-lain**	**16.721.739.890**
42391	**Pendapatan dari Penerimaan kembali Belanja TAYL**	**14.622.636.424**
423911	Penerimaan Kembali Belanja Pegawai Pusat TAYL	11.646.181
423912	Penerimaan Kembali Belanja Pensiun TAYL	6.687
423913	Penerimaan Kembali Belanja Lainnya TAYL	14.610.983.556
423914	Penerimaan Kembali Belanja Lainnya Pinj. LN TAYL	0
423915	Penerimaan Kembali Belanja Lainnya Hibah TAYL	0
423916	Penerimaan Kembali Belanja Swadana TAYL	0
423917	Penerimaan Kembali Transfer ke Daerah TAYL	0
42392	**Pendapatan Pelunasan Piutang**	**3.415.958**
423921	Pendapatan Pelunasan Piutang Non Bendahara	108.200
423922	Pendapatan Pelunasan Ganti Rugi Atas Kerugian yang di Derita Oleh Negara (Masuk TP/TGR)	3.307.758
42393	**Pendapatan dari Penutupan Rekening**	**0**
423931	Pendapatan dari Penutupan Rekening	0
42394	**Pendapatan dari Selisih Kurs**	**450.000.000**
423941	Pendapatan dari Selisih Kurs dalam Pengelolaan Rek milik BUN	450.000.000
423942	Pendapatan dari Untung Selisih Kurs UP Satker Perwakilan RI di Luar Negeri	0
42399	**Pendapatan Lain-lain**	**1.645.687.508**
423991	Penerimaan Kembali Persekot / Uang Muka Gaji	10.874.283
423992	Penerimaan Premi Penjaminan Perbankan Nasional	0
423993	Pendapatan dari Gerakan Nasional Rehabilitasi Hutan dan Lahan	0
423994	Pendapatan dari Biaya Pengawasan HET Minyak Tanah	0
423995	Pendapatan Bagian Pemerintah dari Sisa Surplus Bank Indonesia	0
423997	Pendapatan Kelebihan Pelimpahan Pajak/PNBP dari Bank/Pos Persepsi	0
423998	Pendapatan Penyetoran Kelebihan Hasil Bersih Lelang yang Tidak diambil oleh yang berhak	15.460
423999	Pendapatan Anggaran Lain-lain	1.634.797.765
424	**PENDAPATAN BADAN LAYANAN UMUM**	**23.090.210.525**
4241	**Pendapatan Jasa Layanan Umum**	**20.822.764.880**
42411	**Pendapatan Penyediaan Barang dan Jasa kepada Masyarakat**	**17.595.755.070**
424111	Pendapatan Jasa Pelayanan Rumah Sakit	8.349.769.635
424112	Pendapatan Jasa Pelayanan Pendidikan	6.576.397.176
424113	Pendapatan Jasa Pelayanan Tenaga, Pekerjaan, Informasi, Pelatihan dan Teknologi	124.291.986
424114	Pendapatan Jasa Pencetakan	2.324.086
424115	Pendapatan Jasa Bandar Udara, Kepelabuhan dan Kenavigasian	3.300.000
424116	Pendapatan Jasa Penyelenggaraan Telekomunikasi	1.981.888.932
424117	Pendapatan Jasa Layanan Pemasaran	1.575.030
424118	Pendapatan Penyediaan Barang	0
424119	Pendapatan Jasa Penyediaan Barang dan Jasa Lainnya	556.208.225

www.peraturan.go.id

LAMPIRAN II

RINCIAN PENERIMAAN NEGARA BUKAN PAJAK

(dalam ribuan rupiah)

BAS	URAIAN	JUMLAH
42412	**Pendapatan dan Pengelolaan Wilayah/Kawasan Tertentu**	**939.800.311**
424121	Pendapatan Pengelolaan Kawasan Otorita	758.972.000
424122	Pendapatan Pengelolaan Kawasan Pengembangan Ekonomi Terpadu	0
424123	Pendapatan Pengelolaan Fasilitas Umum Milik Pemerintah	0
424129	Pendapatan dan Pengelolaan Kawasan Lainnya	180.828.311
42413	**Pengelolaan Dana Khusus untuk Masyarakat**	**2.287.209.499**
424133	Pendapatan Program Modal Ventura	2.672.000
424134	Pendapatan Program Dana Bergulir Sektoral	325.702.899
424135	Pendapatan Program Dana Bergulir Syariah	27.252.000
424136	Pendapatan Investasi	629.908.000
424139	Pendapatan Pengelolaan Dana Khusus lainnya	1.301.674.600
4242	**Pendapatan Hibah Badan Layanan Umum**	**53.402.063**
42421	**Pendapatan Hibah Terikat**	**22.915.934**
424211	Pendapatan Hibah Terikat Dalam Negeri - Perorangan	615.934
424212	Pendapatan Hibah Terikat Dalam Negeri - Lembaga/Badan Usaha	22.300.000
424213	Pendapatan Hibah Terikat Dalam Negeri - Pemda	0
424214	Pendapatan Hibah Terikat Luar Negeri - Perorangan	0
424215	Pendapatan Hibah Terikat Luar Negeri - Lembaga/Badan Usaha	0
424216	Pendapatan Hibah Terikat Luar Negeri - Negara	0
424219	Pendapatan Hibah Terikat Lainnya	0
42422	**Pendapatan Hibah Tidak Terikat**	**30.486.129**
424221	Pendapatan Hibah Tidak Terikat Dalam Negeri - Perorangan	17.500.000
424222	Pendapatan Hibah Tidak Terikat Dalam Negeri - Lembaga/Badan Usaha	12.986.129
424223	Pendapatan Hibah Tidak Terikat Dalam Negeri - Pemda	0
424224	Pendapatan Hibah Tidak Terikat Luar Negeri - Perorangan	0
424225	Pendapatan Hibah Tidak Terikat Luar Negeri - Lembaga/Badan Usaha	0
424226	Pendapatan Hibah Tidak Terikat Luar Negeri - Negara	0
424229	Pendapatan Hibah Tidak Terikat Lainnya	0
42431	**Pendapatan Hasil Kerjasama BLU**	**2.214.043.582**
42431	**Pendapatan Hasil Kerjasama BLU**	**738.298.955**
424311	Pendapatan Hasil Kerjasama Perorangan	15.740.127
424312	Pendapatan Hasil Kerjasama Lembaga/Badan Usaha	657.789.228
424313	Pendapatan Hasil Kerjasama Pemerintah Daerah	64.769.600
42491	**Pendapatan BLU Lainnya**	**1.475.744.627**
424911	Pendapatan Jasa Layanan Perbankan BLU	1.475.744.627
424912	Pendapatan Jasa Layanan Perbankan BLU yang Dibatasi Penggunaannya	0
	Total	**269.075.425.159**

PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA,

JOKO WIDODO

www.peraturan.go.id

LAMPIRAN III

PERATURAN PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA
NOMOR 36 TAHUN 2015

TENTANG
RINCIAN ANGGARAN
PENDAPATAN DAN BELANJA NEGARA
TAHUN ANGGARAN 2015

RINCIAN ANGGARAN BELANJA PEMERINTAH PUSAT PADA BAGIAN ANGGARAN KEMENTERIAN NEGARA/LEMBAGA

www.peraturan.go.id

LAMPIRAN III

RINCIAN ANGGARAN BELANJA PEMERINTAH PUSAT PADA BAGIAN ANGGARAN KEMENTERIAN NEGARA/LEMBAGA

K/L : MAJELIS PERMUSYAWARATAN RAKYAT

(dalam ribuan rupiah)

UNIT ORGANISASI	FUNGSI/PROGRAM/KEGIATAN	ALOKASI ANGGARAN
1	2	3
MAJELIS PERMUSYAWARATAN RAKYAT		**977.261.761**
SEKRETARIAT JENDERAL		**106.262.247**
PELAYANAN UMUM		**106.262.247**
Program Dukungan Manajemen dan Pelaksanaan Tugas Teknis Lainnya MPR		**53.136.092**
	Pengelolaan Administrasi MPR dan Sekretariat Jenderal	14.507.455
	Penyelenggaraan Kehumasan	3.656.938
	Pengelolaan Administrasi Keuangan Sekretariat Jenderal	27.504.879
	Dukungan Teknis dan Administrasi Persidangan MPR dan Alat Kelengkapannya	625.000
	Pelaksanaan Tugas Kesekretariatan Pimpinan	6.480.780
	Dukungan Pengkajian Kemajelisan	361.040
Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur MPR		**53.126.155**
	Pembangunan, Pengadaan, Peningkatan dan Pengelolaan Sarana dan Prasarana MPR	53.126.155
M A J E L I S		**870.999.514**
PELAYANAN UMUM		**870.999.514**
Program Pelaksanaan Tugas Konstitusional MPR dan Alat Kelengkapannya		**870.999.514**
	Pelaksanaan Tugas Pimpinan MPR	48.620.723
	Pelaksanaan Sosialisasi Melalui Media Massa	89.194.650
	Pelaksanaan Sosialisasi Dengan Berbagai Metode	519.832.616
	Pengkajian Kemajelisan	191.638.474
	Pengelolaan Administrasi Keuangan MPR	21.713.051

www.peraturan.go.id

LAMPIRAN III

RINCIAN ANGGARAN BELANJA PEMERINTAH PUSAT PADA BAGIAN ANGGARAN KEMENTERIAN NEGARA/LEMBAGA

K/L : DEWAN PERWAKILAN RAKYAT

(dalam ribuan rupiah)

UNIT ORGANISASI	FUNGSI/PROGRAM/KEGIATAN	ALOKASI ANGGARAN
1	2	3
DEWAN PERWAKILAN RAKYAT		**5.191.668.688**
SEKRETARIAT JENDERAL		**1.425.563.516**
PELAYANAN UMUM		**1.425.563.516**
	Program Dukungan Manajemen dan Pelaksanaan Tugas Teknis Lainnya DPR RI	**678.461.302**
	Dukungan Persidangan dan Kegiatan Dewan	5.046.960
	Penyelenggaraan Kehumasan, Pemberitaan dan Keprotokolan	230.354.323
	Dukungan Data dan Informasi	57.991.372
	Manajemen Sumber Daya Manusia	33.925.720
	Perencanaan dan Pengawasan	8.004.724
	Penyelenggaraan Administrasi Keuangan Pengelolaan Barang Milik Negara dan Perjalanan Dinas	324.005.326
	Dukungan PUU Bidang Ekkuindag	2.861.227
	Dukungan PUU Bidang Polhukhamkes	2.793.060
	Dukungan Hukum dan Pemantauan Pelaksanaan UU	2.364.303
	Dukungan Analisa Anggaran dan Pelaksanaan APBN	1.970.425
	Dukungan Pengawasan Legislatif	588.147
	Dukungan Pelaksanaan Kegiatan Pimpinan	8.261.159
	Dukungan Pelaksanaan KSAP	294.556
	Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur DPR RI	**747.102.214**
	Pengadaan Perlengkapan Sarana dan Prasarana Kantor	233.677.064
	Pemeliharaan dan Penatausahaan Sarana dan Prasarana Gedung	513.425.150
D E W A N		**3.766.105.172**
PELAYANAN UMUM		**3.766.105.172**
	Program Pelaksanaan Fungsi Legislasi DPR RI	**430.507.143**
	Perancangan Undang-Undang	394.791.128
	Administrasi Hukum dan Litigasi DPR RI	6.963.725
	Harmonisasi Undang-Undang	28.752.290
	Program Pelaksanaan Fungsi Anggaran DPR RI	**72.995.527**
	Pembahasan RAPBN	19.968.193
	Pembahasan Anggaran K/L Oleh Komisi	53.027.334
	Program Pelaksanaan Fungsi Pengawasan DPR RI	**378.549.451**
	Akuntabilitas Keuangan Negara	
	Pengawasan Pelaksanaan UU dan Pengawasan Kebijakan Pemerintah	378.549.451
	Program Penguatan Kelembagaan DPR RI	**2.884.053.051**
	Pelaksanaan Tugas-Tugas Pimpinan DPR RI	66.936.985
	Pelaksanaan Tugas-Tugas Kerumahtanggaan DPR RI	30.584.750
	Pelaksanaan Kerja Sama Antar Parlemen/Hubungan Internasional	129.013.410
	Pelaksanaan Tugas-Tugas Badan Kehormatan	12.995.932
	Pengelolaan Hak Keuangan dan Administrasi Dewan	2.644.521.974

www.peraturan.go.id

LAMPIRAN III

RINCIAN ANGGARAN BELANJA PEMERINTAH PUSAT PADA BAGIAN ANGGARAN KEMENTERIAN NEGARA/LEMBAGA

K/L : BADAN PEMERIKSA KEUANGAN

(dalam ribuan rupiah)

UNIT ORGANISASI	FUNGSI/PROGRAM/KEGIATAN	ALOKASI ANGGARAN
1	2	3
BADAN PEMERIKSA KEUANGAN		3.015.523.798
SEKRETARIAT JENDERAL		2.227.054.919
PELAYANAN UMUM		2.227.054.919
	Program Dukungan Manajemen dan Pelaksanaan Tugas Teknis Lainnya BPK	1.402.957.719
	Pelayanan Kesekretariatan, Kehumasan dan Kerja Sama Luar Negeri	178.203.554
	Manajemen SDM	1.155.978.923
	Pengelolaan dan Pertanggung-Jawaban Keuangan Negara	68.775.242
	Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur BPK	803.276.200
	Pengelolaan Sarana dan Prasarana serta Pelayanan Umum	803.276.200
	Program Pengawasan dan Peningkatan Akuntabilitas Aparatur BPK	20.821.000
	Pengawasan Oleh Inspektorat	20.821.000
B P K PUSAT		788.468.879
PELAYANAN UMUM		788.468.879
	Program Kepaniteraan Kerugian Negara/Daerah, Pengembangan dan Pelayanan Hukum Di Bidang Pemeriksaan Keuangan Negara	18.526.500
	Pelayanan Konsultasi Hukum dan Kepaniteraan Kerugian Negara/Daerah	8.457.795
	Pelayanan Legislasi, Analisis dan Bantuan Hukum	10.068.705
	Program Peningkatan Mutu Kelembagaan, Aparatur dan Pemeriksaan Keuangan Negara	91.942.379
	Perencanaan Strategis dan Manajemen Kinerja	16.061.705
	Pengevaluasian dan Pelaporan Hasil Pemeriksaan	9.265.511
	Penelitian dan Pengembangan Pemeriksaan Keuangan Negara	12.197.813
	Pendidikan dan Pelatihan Pemeriksaan Keuangan Negara	54.417.350
	Program Pemeriksaan Keuangan Negara	678.000.000
	Pemeriksaan Keuangan Negara dan Pemantauan Penyelesaian Kerugian Negara	678.000.000

www.peraturan.go.id

LAMPIRAN III

RINCIAN ANGGARAN BELANJA PEMERINTAH PUSAT PADA BAGIAN ANGGARAN KEMENTERIAN NEGARA/LEMBAGA

K/L : MAHKAMAH AGUNG

(dalam ribuan rupiah)

UNIT ORGANISASI	FUNGSI/PROGRAM/KEGIATAN	ALOKASI ANGGARAN
1	2	3
MAHKAMAH AGUNG		**8.575.705.073**
BADAN URUSAN ADMINISTRASI		**8.071.456.173**
	KETERTIBAN DAN KEAMANAN	**8.071.456.173**
	Program Dukungan Manajemen dan Pelaksanaan Tugas Teknis Lainnya Mahkamah Agung	**7.097.757.773**
	Peningkatan Pelayanan Informasi pada Mahkamah Agung dan Pengadilan Semua Lingkungan Peradilan	8.518.415
	Pembinaan Administrasi Pengelolaan Kepegawaian dan Pengembangan SDM	5.728.465
	Pembinaan Administrasi dan Pengelolaan Keuangan Badan Urusan Administrasi	6.975.847.212
	Pelaksanaan Penyusunan Perencanaan dan Anggaran serta Penataan Organisasi Mahkamah Agung	9.241.255
	Pembinaan Administrasi Pengelolaan Perlengkapan Sarana dan Prasarana di Lingkungan Mahkamah Agung dan Badan Peradilan yang Berada di Bawahnya	4.001.077
	Dukungan Pelayanan Pimpinan Mahkamah Agung dan Tugas Teknis Lainnya	8.867.787
	Pelaksanaan Pembinaan Keamanan, Urusan Tata Usaha, Rumah Tangga, Bina Sikap Mental di Lingkungan Mahkamah Agung	85.553.562
	Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur Mahkamah Agung	**973.698.400**
	Pengadaan Sarana dan Prasarana di Lingkungan Mahkamah Agung	973.698.400
KEPANITERAAN		**164.772.400**
	KETERTIBAN DAN KEAMANAN	**164.772.400**
	Program Penyelesaian Perkara Mahkamah Agung	**164.772.400**
	Percepatan Peningkatan Penyelesaian Perkara	7.775.800
	Dukungan Manajemen dan Dukungan Teknis Lainnya Kepaniteraan	156.996.600
DIREKTORAT JENDERAL BADAN PERADILAN UMUM		**121.619.500**
	KETERTIBAN DAN KEAMANAN	**121.619.500**
	Program Peningkatan Manajemen Peradilan Umum	**121.619.500**
	Pengembangan Tenaga Teknis Peradilan Umum	31.845.328
	Peningkatan Ketatalaksanaan Perkara Perdata Kasasi dan Peninjauan Kembali (PK)	791.000
	Peningkatan Ketatalaksanaan Perkara Pidana Kasasi, Peninjauan Kembali dan Grasi	830.200
	Peningkatan Manajemen Peradilan Umum	57.479.512
	Pengembangan Kebijakan Peradilan Umum	197.000
	Dukungan Manajemen dan Dukungan Teknis Lainnya Ditjen Badan Peradilan Umum	30.476.460
DIREKTORAT JENDERAL BADAN PERADILAN AGAMA		**74.979.500**
	KETERTIBAN DAN KEAMANAN	**74.979.500**
	Program Peningkatan Manajemen Peradilan Agama	**74.979.500**
	Peningkatan Manajemen Peradilan Agama	27.162.148
	Pengembangan Tenaga Teknis Peradilan Agama	17.976.331
	Peningkatan Ketatalaksanaan Perkara Kasasi dan Peninjauan Kembali (PK) serta Kesyariahan	1.520.128
	Dukungan Manajemen dan Dukungan Teknis Lainnya Ditjen Badan Peradilan Agama (Badilag)	28.320.893
DIREKTORAT JENDERAL BADAN PERADILAN MILITER DAN PERADILAN TATA USAHA NEGARA		**23.249.700**
	KETERTIBAN DAN KEAMANAN	**23.249.700**
	Program Peningkatan Manajemen Peradilan Militer dan Tata Usaha Negara (TUN)	**23.249.700**
	Peningkatan Manajemen Peradilan Militer	4.001.520

www.peraturan.go.id

LAMPIRAN III

RINCIAN ANGGARAN BELANJA PEMERINTAH PUSAT PADA BAGIAN ANGGARAN KEMENTERIAN NEGARA/LEMBAGA

K/L : MAHKAMAH AGUNG

(dalam ribuan rupiah)

UNIT ORGANISASI	FUNGSI/PROGRAM/KEGIATAN	ALOKASI ANGGARAN
1	2	3
	Peningkatan Manajemen Peradilan Tata Usaha Negara	4.389.502
	Peningkatan Ketatalaksanaan Perkara Kasasi, Peninjauan Kembali (PK) dan Grasi Pidana Militer	337.465
	Peningkatan Ketatalaksanaan Perkara Kasasi, Peninjauan Kembali (PK), Hak Uji Materiil dan Sengketa Pajak Tata Usaha Negara (Tun)	386.769
	Dukungan Manajemen dan Dukungan Teknis Lainnya Ditjen Badan Peradilan Militer dan Tata Usaha Negara (Badilmiltun)	14.134.444
BADAN PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN PENDIDIKAN & PELATIHAN HUKUM & PERADILAN		**89.555.200**
KETERTIBAN DAN KEAMANAN		**89.555.200**
Program Pendidikan dan Pelatihan Aparatur Mahkamah Agung		**89.555.200**
	Peningkatan Profesionalitas Tenaga Teknis Peradilan dan Aparatur Peradilan	28.779.300
	Penelitian dan Pengembangan Hukum dan Peradilan	6.100.000
	Dukungan Manajemen dan Dukungan Teknis Lainnya Badan Penelitian dan Pengembangan Pendidikan dan Pelatihan Hukum dan Peradilan	37.029.900
	Peningkatan Profesional Aparatur Peradilan di Bidang Manajemen dan Kepemimpinan	17.646.000
BADAN PENGAWASAN MAHKAMAH AGUNG		**30.072.600**
KETERTIBAN DAN KEAMANAN		**30.072.600**
Program Pengawasan dan Peningkatan Akuntabilitas Aparatur Mahkamah Agung RI		**30.072.600**
	Pengawasan Pelaksanaan Teknis, Administrasi Peradilan, Administrasi Umum, Penanganan Pengaduan Inspektur Wilayah I	3.923.902
	Pengawasan Pelaksanaan Teknis, Administrasi Peradilan, Administrasi Umum, Penanganan Pengaduan Inspektur Wilayah II	3.314.553
	Dukungan Manajemen dan Dukungan Teknis Lainnya Badan Pengawasan Mahkamah Agung	9.959.789
	Pengawasan Pelaksanaan Teknis, Administrasi Peradilan, Administrasi Umum, Penanganan Pengaduan Inspektur Wilayah III	4.157.433
	Pengawasan Pelaksanaan Teknis, Administrasi Peradilan, Administrasi Umum, Penanganan Pengaduan Inspektur Wilayah IV	2.685.567
	Tindak Lanjut Hasil Pemeriksaan/Monitoring	6.031.356

www.peraturan.go.id

LAMPIRAN III

RINCIAN ANGGARAN BELANJA PEMERINTAH PUSAT PADA BAGIAN ANGGARAN KEMENTERIAN NEGARA/LEMBAGA

K/L : KEJAKSAAN REPUBLIK INDONESIA

(dalam ribuan rupiah)

UNIT ORGANISASI	FUNGSI/PROGRAM/KEGIATAN	ALOKASI ANGGARAN
1	2	3
KEJAKSAAN REPUBLIK INDONESIA		**4.735.186.691**
KEJAKSAAN REPUBLIK INDONESIA		**4.735.186.691**
PELAYANAN UMUM		**3.375.703.835**
	Program Dukungan Manajemen dan Pelaksanaan Tugas Teknis Lainnya Kejaksaan RI	**3.211.349.784**
	Pelayanan Penyusunan Peraturan Perundang-Undangan dan Kerja Sama Hukum	9.560.319
	Pembinaan dan Pengelolaan Kepegawaian di Kejagung, Kejati, Kejari dan Cabjari	30.572.169
	Pembinaan Pengelolaan Keuangan dan Penerimaan Negara Bukan Pajak Kejaksaan RI	389.204.589
	Perencanaan, Pengembangan Manajemen, Organisasi dan Tata Laksana, Pengolahan Data serta Pemantauan dan Penilaian	5.639.050
	Pembinaan dan Pengelolaan Perlengkapan Kejaksaan RI	25.990.156
	Pelayanan Ketatausahaan Kejaksaan RI, Pimpinan, Kerumahtanggaan, Keamanan dan Bina Kesejahteraan Pegawai	62.762.062
	Penyajian Data Statistik Kriminal dan Teknologi Informasi	35.348.310
	Penelitian dan Pengembangan Kejaksaan Republik Indonesia	2.788.573
	Dukungan Manajemen dan Dukungan Teknis Lainnya Jaksa Agung Muda Pembinaan di Kejagung, Kejati, Kejari dan Cabjari	2.649.484.556
	Program Pengawasan dan Peningkatan Akuntabilitas Aparatur Kejaksaan RI	**8.235.766**
	Dukungan Manajemen dan Dukungan Teknis Lainnya Jaksa Agung Muda Pengawasan	8.235.766
	Program Pendidikan dan Pelatihan Aparatur Kejaksaan	**130.031.800**
	Penyelenggaraan Pendidikan dan Pelatihan Teknis Fungsional	54.660.923
	Penyelenggaraan Pendidikan dan Pelatihan Manajemen dan Kepemimpinan	11.237.400
	Dukungan Manajemen Teknis Lainnya Badan Pendidikan dan Pelatihan Kejaksaan	64.133.477
	Program Penyelidikan/Pengamanan/Penggalangan Permasalahan Hukum di Bidang IPOLEKSOSBUD Hukum dan Hankam	**8.575.600**
	Dukungan Manajemen Teknis Lainnya Jaksa Agung Muda Intelijen	8.575.600
	Program Penanganan dan Penyelesaian Perkara Pidana Umum	**9.255.780**
	Dukungan Manajemen dan Dukungan Teknis Lainnya Jaksa Agung Muda Tindak Pidana Umum	9.255.780
	Program Penanganan dan Penyelesaian Perkara Pidana Khusus Pelanggaran Ham yang Berat dan Perkara Tindak Pidana Korupsi	**6.915.295**
	Dukungan Manajemen dan Dukungan Teknis Lainnya Jaksa Agung Muda Tindak Pidana Khusus	6.915.295
	Program Penanganan dan Penyelesaian Perkara Perdata dan Tata Usaha Negara	**1.339.810**
	Dukungan Manajemen dan Dukungan Teknis Lainnya Jaksa Agung Muda Perdata dan Tata Usaha Negara	1.339.810
KETERTIBAN DAN KEAMANAN		**1.359.482.856**
	Program Dukungan Manajemen dan Pelaksanaan Tugas Teknis Lainnya Kejaksaan RI	**7.407.832**
	Penanganan dan Penyelesaian Pemulihan Aset yang terkait perkara	7.407.832
	Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur Kejaksaan RI	**355.035.980**
	Pembangunan/Pengadaan/ Peningkatan Sarana dan Prasarana Kejaksaan RI	355.035.980
	Program Pengawasan dan Peningkatan Akuntabilitas Aparatur Kejaksaan RI	**15.202.634**
	Peningkatan Pengawasan Pelaksanaan Tugas Pokok dan Wewenang di Wilayah I	693.000
	Peningkatan Pengawasan Pelaksanaan Tugas Pokok dan Wewenang di Wilayah II	693.000
	Peningkatan Pengawasan Pelaksanaan Tugas Pokok dan Wewenang di Wilayah III	693.000
	Peningkatan Pengawasan Pelaksanaan Tugas Pokok dan Wewenang di Wilayah IV	693.000
	Peningkatan Pengawasan Pelaksanaan Tugas Pokok dan Wewenang di Wilayah V	693.000
	Peningkatan Pengawasan Aparatur Kejaksaan di Daerah Baik di Kejati, Kejari dan Cabjari dan Jajaran Pengawasan di Daerah	11.737.634

www.peraturan.go.id

LAMPIRAN III

RINCIAN ANGGARAN BELANJA PEMERINTAH PUSAT PADA BAGIAN ANGGARAN KEMENTERIAN NEGARA/LEMBAGA

K/L : KEJAKSAAN REPUBLIK INDONESIA

(dalam ribuan rupiah)

UNIT ORGANISASI			FUNGSI/PROGRAM/KEGIATAN		ALOKASI ANGGARAN
1			2		3
			Program Penyelidikan/Pengamanan/Penggalangan Permasalahan Hukum di Bidang IPOLEKSOSBUD Hukum dan Hankam		**140.850.620**
				Pelaksanaan Kegiatan Penyelamatan Keuangan Negara dan Penanggulangan Tindak Pidana	4.957.600
				Pelaksanaan Kegiatan Sandi dan Produksi Intelijen	5.206.880
				Pelaksanaan Kegiatan Politik Sosial Budaya dan Sumber Daya Organisasi	1.212.402
				Penanganan Penyelidikan/Pengamanan/Penggalangan di Kejati, Kejari dan Cabjari	69.915.408
				Penerangan dan Penyuluhan Hukum	59.558.330
			Program Penanganan dan Penyelesaian Perkara Pidana Umum		**476.972.695**
				Penanganan Perkara Tindak Pidana Terhadap Orang dan Harta Benda	717.923
				Penanganan Perkara Tindak Pidana terhadap Keamanan Negara dan Ketertiban Umum	638.172
				Penanganan Perkara Tindak Pidana Umum Lainnya	7.149.650
				Penanganan Perkara Pidana Umum di Kejaksaan Tinggi/Kejaksaan Negeri dan Cabang Kejaksaan Negeri	468.466.950
			Program Penanganan dan Penyelesaian Perkara Pidana Khusus, Pelanggaran Ham yang Berat dan Perkara Tindak Pidana Korupsi		**340.474.205**
				Penanganan Penyelidikan dan Penyidikan Tindak Pidana Korupsi di Kejaksaan Agung RI	11.958.620
				Peningkatan Pra-Penuntutan dan Penuntutan di Kejaksaan Agung	8.338.415
				Peningkatan Upaya Hukum, Eksekusi dan Eksaminasi (Pidana Korupsi)	1.891.450
				Penanganan Perkara Tindak Pidana Korupsi dan Tindak Pidana Khusus Lainnya di Kejati, Kejari dan Cabjari	318.285.720
			Program Penanganan dan Penyelesaian Perkara Perdata dan Tata Usaha Negara		**23.538.890**
				Penanganan Pemulihan dan Perlindungan Hak	1.272.435
				Penanganan dan Penyelesaian Perkara Perdata	942.300
				Peningkatan Penanganan Perkara Tata Usaha Negara	637.960
				Penanganan dan Penyelesaian Perkara Perdata dan Tata Usaha Negara di Kejati, Kejari dan Cabjari	20.686.195

www.peraturan.go.id

LAMPIRAN III

RINCIAN ANGGARAN BELANJA PEMERINTAH PUSAT PADA BAGIAN ANGGARAN KEMENTERIAN NEGARA/LEMBAGA

K/L : KEMENTERIAN SEKRETARIAT NEGARA

(dalam ribuan rupiah)

UNIT ORGANISASI	FUNGSI/PROGRAM/KEGIATAN		ALOKASI ANGGARAN
1	2		3
KEMENTERIAN SEKRETARIAT NEGARA			2.083.881.294
SEKRETARIAT NEGARA			1.110.281.754
	PELAYANAN UMUM		1.110.281.754
		Program Dukungan Manajemen dan Pelaksanaan Tugas Teknis Lainnya Kementerian Sekretariat Negara	613.184.685
		Pembinaan Sumber Daya Manusia dan Pelayanan Administrasi Kepegawaian	3.627.223
		Pelaksanaan Akuntabilitas Pengelolaan Administrasi Keuangan di Lingkungan Kementerian Sekretariat Negara	311.955.665
		Penataan Kelembagaan, Ketatalaksanaan serta Pengembangan Sistem Akuntabilitas Kinerja Kementerian Sekretariat Negara	743.363
		Penyelenggaraan Pengawasan Kementerian Sekretariat Negara	2.223.180
		Pelaksanaan Manajemen Perencanaan dan Penganggaran	1.475.534
		Penyelenggaraan Acara/Keprotokolan, Kehumasan, Ketatausahaan, dan Kearsipan di Lingkungan Kementerian Sekretariat Negara	2.765.467
		Pengelolaan dan Penatausahaan Keuangan di Lingkungan Ppkgbk	56.591.094
		Dukungan Manajemen Kawasan Kemayoran	77.631.292
		Peningkatan Pembangunan dan Pengembangan Usaha di Lingkungan Ppkgbk	47.176.581
		Pengusahaan Kawasan Kemayoran	12.170.642
		Pengelolaan dan Penatausahaan Kepegawaian, Hukum, Humas dan Kerumahtangaan di Lingkungan PPKGBK	48.955.751
		Penyusunan Desain Rencana Pembaharuan Hukum KHN	12.342.200
		Penyelenggaraan Pendidikan dan Pelatihan SDM Kementerian Sekretariat Negara	13.836.448
		Penerapan dan Pengembangan Sistem Informasi Kementerian Sekretariat Negara	7.461.265
		Pengembangan Kawasan Kemayoran	14.228.980
		Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur Kementerian Sekretariat Negara	428.318.086
		Penyelenggaraan Dukungan Sarana dan Prasarana serta Pelayanan Umum Lainnya Kementerian Sekretariat Negara	428.318.086
		Program Penyelenggaraan Pelayanan Dukungan Kebijakan Kepada Presiden dan Wakil Presiden	68.778.983
		Penanganan Pengaduan Masyarakat	484.534
		Dukungan Kebijakan Dalam Negeri	496.480
		Dukungan Kebijakan Hubungan Internasional	853.518
		Pelaksanaan Hubungan Dengan Lembaga Daerah dan Organisasi Politik	412.013
		Pelaksanaan Hubungan Dengan Lembaga Negara dan Lembaga Non Struktural	595.749
		Pelaksanaan Hubungan Dengan Organisasi Kemasyarakatan dan Lembaga Swadaya Masyarakat (LSM)	659.482
		Pelaksanaan Analisis dan Administrasi di Bidang Permasalahan Hukum, Ratifikasi, Prerogatif dan Naturalisasi, serta Penyelenggaraan Administrasi Perundang-Undangan	1.637.367
		Penyelenggaraan Koordinasi Kerja Sama Teknik Luar Negeri	61.575.776
		Dukungan Penyiapan Penerjemahan dan Pencatatan Naskah/Surat/Produk Resmi Kenegaraan dan Pengelolaan Jabatan Fungsional Penerjemah	1.244.795
		Pelaksanaan Analisis dan Penyelesaian RUU, RPerpu dan RPP serta Evaluasi Pelaksanaan UU, Perpu, dan PP Bidang Ekonomi, Keuangan dan Industri	334.346
		Pelaksanaan Analisis dan Penyelesaian RUU, RPerpu dan RPP serta Evaluasi Pelaksanaan UU, Perpu, dan PP Bidang Politik dan Kesejahteraan Rakyat	279.039
		Penyelenggaraan Pelayanan Administrasi Pejabat Negara serta Administrasi Lainnya yang berkaitan Dengan Pejabat Negara	205.884
	SEKRETARIAT PRESIDEN		489.189.700

www.peraturan.go.id

LAMPIRAN III

RINCIAN ANGGARAN BELANJA PEMERINTAH PUSAT PADA BAGIAN ANGGARAN KEMENTERIAN NEGARA/LEMBAGA

K/L : KEMENTERIAN SEKRETARIAT NEGARA

(dalam ribuan rupiah)

UNIT ORGANISASI	FUNGSI/PROGRAM/KEGIATAN	ALOKASI ANGGARAN
1	2	3
	PELAYANAN UMUM	**489.189.700**
	Program Dukungan Manajemen dan Pelaksanaan Tugas Teknis Lainnya Kementerian Sekretariat Negara	**355.241.757**
	Pelaksanaan Tugas Administrasi Kesekretariatan	114.365.359
	Penyelenggaraan Pengelolaan Istana Kepresidenan Jakarta	70.976.539
	Penyelenggaraan Pengelolaan Istana Kepresidenan Bogor	26.896.000
	Penyelenggaraan Pengelolaan Istana Kepresidenan Cipanas	19.898.000
	Penyelenggaraan Pengelolaan Istana Kepresidenan Yogjakarta	27.832.000
	Penyelenggaraan Pengelolaan Istana Kepresidenan Tampaksiring Bali	20.284.000
	Pengelolaan dan Pengembangan Sarana Prasarana Istana Kepresidenan	74.989.859
	Program Penyelenggaraan Pelayanan Dukungan Kebijakan Kepada Presiden dan Wakil Presiden	**133.947.943**
	Penyelenggaraan Dukungan Pers Media dan Informasi	12.333.943
	Penyelenggaraan Keprotokolan	121.614.000
SEKRETARIAT WAKIL PRESIDEN		**170.266.000**
	PELAYANAN UMUM	**170.266.000**
	Program Dukungan Manajemen dan Pelaksanaan Tugas Teknis Lainnya Kementerian Sekretariat Negara	**41.203.032**
	Penyelenggaraan Dukungan Perencanaan Anggaran dan Keuangan	25.808.550
	Penyelenggaraan Dukungan Tata Usaha dan Kepegawaian	8.227.472
	Penyelenggaraan Dukungan Tim Nasional Percepatan Penanggulangan Kemiskinan	7.167.010
	Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur Kementerian Sekretariat Negara	**50.937.568**
	Penyelenggaraan Dukungan Sarana Prasarana Sekretariat Wakil Presiden	50.937.568
	Program Penyelenggaraan Pelayanan Dukungan Kebijakan Kepada Presiden dan Wakil Presiden	**78.125.400**
	Penyelenggaraan Dukungan Keprotokolan dan Kerumahtanggaan Wakil Presiden	67.915.810
	Penyelenggaraan Dukungan Kebijakan Wakil Presiden Bidang Peningkatan Kesejahteraan Rakyat Berbasis Keluarga	741.460
	Penyelenggaraan Dukungan Kebijakan Wakil Presiden Bidang Penyelenggaraan Pengawasan Intern Pemerintah	649.330
	Penyelenggaraan Dukungan Kebijakan Wakil Presiden Bidang Hubungan Internasional	516.520
	Penyelenggaraan Dukungan Kebijakan Wakil Presiden Bidang Komunikasi Politik	538.000
	Penyelenggaraan Dukungan Kebijakan Wakil Presiden Bidang Peningkatan Kesejahteraan Rakyat Berbasis Usaha	742.460
	Penyelenggaraan Dukungan Kebijakan Wakil Presiden Bidang Dokumentasi dan Diseminasi Informasi	782.970
	Penyelenggaraan Dukungan Kebijakan Wakil Presiden Bidang Infrastruktur dan Energi	853.490
	Penyelenggaraan Dukungan Kebijakan Wakil Presiden Bidang Penyelenggaraan Reformasi Birokrasi	649.330
	Penyelenggaraan Dukungan Kebijakan Wakil Presiden Bidang Pemerintahan dan Politik dalam Negeri	605.720
	Penyelenggaraan Dukungan Kebijakan Wakil Presiden Bidang Peningkatan Kesejahteraan Rakyat Berbasis Komunitas	772.750
	Penyelenggaraan Dukungan Kebijakan Wakil Presiden Bidang Penyelenggaraan Pelayanan Publik	649.330
	Penyelenggaraan Dukungan Kebijakan Wakil Presiden Bidang Industri dan Sumber Daya Alam	699.300
	Penyelenggaraan Dukungan Kebijakan Wakil Presiden Bidang Kebijakan Hukum dan HAM	462.720
	Penyelenggaraan Dukungan Kebijakan Wakil Presiden Bidang Program Ekonomi Khusus	755.510
	Penyelenggaraan Dukungan Kebijakan Wakil Presiden Bidang Perdagangan, Pariwisata dan Kerja Sama Internasional	790.700
SEKRETARIAT MILITER PRESIDEN		**31.427.240**
	PELAYANAN UMUM	**31.427.240**

www.peraturan.go.id

LAMPIRAN III

RINCIAN ANGGARAN BELANJA PEMERINTAH PUSAT PADA BAGIAN ANGGARAN KEMENTERIAN NEGARA/LEMBAGA

K/L : KEMENTERIAN SEKRETARIAT NEGARA

(dalam ribuan rupiah)

UNIT ORGANISASI	FUNGSI/PROGRAM/KEGIATAN	ALOKASI ANGGARAN
1	2	3
	Program Dukungan Manajemen dan Pelaksanaan Tugas Teknis Lainnya Kementerian Sekretariat Negara	**7.639.483**
	Dukungan Manajemen dan Dukungan Teknis Lainnya Sekretariat Militer Presiden	7.639.483
	Program Penyelenggaraan Pelayanan Dukungan Kebijakan Kepada Presiden dan Wakil Presiden	**23.787.757**
	Penyelenggaraan Dukungan Teknis dan Administrasi Personel TNI dan Polri	1.982.507
	Pengkoordinasian Pengamanan Fisik dan Non Fisik bagi VVIP	3.625.270
	Penyelenggaraan Administrasi Penganugerahan Gelar, Tanda Jasa, dan Tanda Kehormatan	18.179.980
PASUKAN PENGAMANAN PRESIDEN		**32.800.000**
PELAYANAN UMUM		**32.800.000**
Program Dukungan Manajemen dan Pelaksanaan Tugas Teknis Lainnya Kementerian Sekretariat Negara		**32.800.000**
Perencanaan dan Penganggaran Paspampres		553.516
Pengawasan Internal Paspampres		247.376
Intelijen Paspampres		621.020
Operasi dan Latihan Paspampres		1.143.979
Personil Pengamanan Paspampres		7.666.242
Dukungan Umum Logistik Paspampres		22.567.867
DEWAN PERTIMBANGAN PRESIDEN		**41.000.000**
PELAYANAN UMUM		**41.000.000**
Program Dukungan Manajemen dan Pelaksanaan Tugas Teknis Lainnya Kementerian Sekretariat Negara		**41.000.000**
Pengelolaan Data dan Penyajian Informasi		1.546.787
Penyelenggaraan Dukungan Manajemen Dewan Pertimbangan Presiden		39.453.213
UNIT KERJA PRESIDEN BDPENGAWASAN & PENGENDALIAN PEMBANGUNAN (UKP)		**60.916.600**
PELAYANAN UMUM		**60.916.600**
Program Dukungan Manajemen dan Pelaksanaan Tugas Teknis Lainnya Kementerian Sekretariat Negara		**60.916.600**
Pengawasan dan Pengendalian Pembangunan Sehingga Mencapai Sasaran Pembangunan Nasional Dengan Penyelesaian Penuh UKP-PPP		60.916.600
LEMBAGA PERLINDUNGAN SAKSI DAN KORBAN (LPSK)		**148.000.000**
PELAYANAN UMUM		**148.000.000**
Program Dukungan Manajemen dan Pelaksanaan Tugas Teknis Lainnya Kementerian Sekretariat Negara		**148.000.000**
Pemberian Perlindungan Saksi dan Korban dan Dukungan Lainnya di Lingkungan LPSK		148.000.000

www.peraturan.go.id

LAMPIRAN III

RINCIAN ANGGARAN BELANJA PEMERINTAH PUSAT PADA BAGIAN ANGGARAN KEMENTERIAN NEGARA/LEMBAGA

K/L : KEMENTERIAN DALAM NEGERI

(dalam ribuan rupiah)

UNIT ORGANISASI	FUNGSI/PROGRAM/KEGIATAN	ALOKASI ANGGARAN
1	2	3
KEMENTERIAN DALAM NEGERI		6.110.662.276
SEKRETARIAT JENDERAL		1.065.056.965
	PELAYANAN UMUM	425.525.209
	Program Dukungan Manajemen dan Pelaksanaan Tugas Teknis Lainnya Kementerian Dalam Negeri	392.546.209
	Penataan Produk Hukum dan Pelayanan Bantuan Hukum	8.000.000
	Pembinaan Dan Pengelolaan Sumber Daya Manusia	15.050.000
	Penataan Kelembagaan, Ketatalaksanaan, dan Reformasi Birokrasi	6.445.000
	Perencanaan Program dan Anggaran	14.024.000
	Pengelolaan Ketatausahaan, Rumah Tangga, serta Sarana dan Prasarana Perkantoran	80.137.012
	Penataan Administrasi Kerja Sama	7.776.800
	Pengelolaan Administrasi Keuangan dan Aset	184.311.781
	Pengelolaan Teknologi Informasi dan Komunikasi	47.690.000
	Pengelolaan Administrasi Pimpinan	12.876.616
	Pengelolaan Kehumasan	10.235.000
	Layanan Pengadaan Barang dan Jasa	6.000.000
	Program Pendidikan Kepamongprajaan	32.979.000
	Penyelenggaraan Pendidikan Kepamongprajaan di Daerah	32.979.000
	PENDIDIKAN	639.531.756
	Program Pendidikan Kepamongprajaan	639.531.756
	Penyelenggaraan Administrasi Akademik Perencanaan dan Kerja Sama Pendidikan Kepamongprajaan	52.761.541
	Penyelenggaraan Administrasi Keprajaan dan Kemahasiswaan	36.309.134
	Pengelolaan Administrasi Umum dan Keuangan Pendidikan Kepamongprajaan	341.343.382
	Penyelenggaraan Pendidikan Kepamongprajaan di Daerah	209.117.699
INSPEKTORAT JENDERAL		69.562.075
	PELAYANAN UMUM	69.562.075
	Program Pengawasan Internal Kemendagri dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemda	69.562.075
	Pengawasan Fungsional Akuntabilitas Keuangan Kementerian Dalam Negeri	4.214.494
	Pengawasan Fungsional Akuntabilitas Kinerja Kementerian Dalam Negeri	4.098.979
	Pengawasan Fungsional Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah Wilayah I	5.549.752
	Pengawasan Fungsional Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah Wilayah II	5.530.020
	Dukungan Manajemen dan Dukungan Teknis Lainnya Itjen	46.465.630
	Pengawasan Fungsional Penegakan Integritas, Kasus dan Pengaduan Khusus	3.703.200
DITJEN POLITIK DAN PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN UMUM		230.045.735
	PELAYANAN UMUM	230.045.735
	Program Pembinaan Politik dan Penyelenggaraan Pemerintahan Umum	230.045.735
	Pembinaan dan Pemberdayaan Organisasi Kemasyarakatan	40.200.000
	Fasilitasi Politik Dalam Negeri	43.496.326
	Fasilitasi Ketahanan Ekonomi, Sosial dan Budaya	29.300.000

www.peraturan.go.id

LAMPIRAN III

RINCIAN ANGGARAN BELANJA PEMERINTAH PUSAT PADA BAGIAN ANGGARAN KEMENTERIAN NEGARA/LEMBAGA

K/L : KEMENTERIAN DALAM NEGERI

(dalam ribuan rupiah)

UNIT ORGANISASI	FUNGSI/PROGRAM/KEGIATAN	ALOKASI ANGGARAN
1	2	3
	Fasilitasi Kewaspadaan Nasional	30.939.852
	Bina Ideologi, Karakter dan Wawasan Kebangsaan	31.249.500
	Dukungan Manajemen dan Dukungan Teknis Lainnya Ditjen Politik dan Penyelenggaraan Pemerintahan Umum	54.860.057
DITJEN BINA ADMINISTRASI KEWILAYAHAN		**365.224.467**
PELAYANAN UMUM		**307.988.733**
Program Bina Administrasi Kewilayahan		**307.988.733**
	Penyelenggaraan Hubungan Pusat dan Daerah serta Kerja Sama Daerah	62.954.581
	Pembinaan dan pengembangan kawasan khusus, batas negara, dan pulau-pulau terluar	66.572.221
	Fasilitasi Pencegahan Penanggulangan Bencana dan Kebakaran	72.956.037
	Penataan Wilayah Administrasi, Toponimi, Dan Batas Daerah	31.634.775
	Dukungan Manajemen dan Dukungan Teknis Lainnya Ditjen Bina Administrasi Kewilayahan	73.871.119
KETERTIBAN DAN KEAMANAN		**57.235.734**
Program Bina Administrasi Kewilayahan		**57.235.734**
	Pembinaan Ketenteraman Ketertiban dan Perlindungan Masyarakat	57.235.734
DITJEN BINA PEMERINTAHAN DESA		**1.388.399.564**
PELAYANAN UMUM		**1.388.399.564**
Program Bina Pemerintahan Desa		**1.388.399.564**
	Peningkatan Keberdayaan Masyarakat dan Desa Lingkup Regional	82.895.448
	Fasilitasi Penataan Desa	110.250.000
	Pembinaan Kelembagaan dan Kerjasama Desa	130.000.000
	Peningkatan Kapasitas Pengelolaan Keuangan dan Aset Pemerintahan Desa	76.500.000
	Pengembangan Kapasitas Aparatur dan Kader Desa	662.754.552
	Evaluasi Perkembangan Desa	61.000.000
	Dukungan Manajamen dan Dukungan Teknis Lainnya Ditjen Bina Pemerintahan Desa	264.999.564
DITJEN BINA PEMBANGUNAN DAERAH		**547.911.211**
PELAYANAN UMUM		**547.911.211**
Program Bina Pembangunan Daerah		**547.911.211**
	Pembinaan Penyelenggaraan dan Pembangunan Urusan Pemerintahan Daerah I	72.080.000
	Pembinaan Penyelenggaraan dan Pembangunan Urusan Pemerintahan Daerah III	84.637.231
	Pembinaan Penyelenggaraan dan Pembangunan Urusan Pemerintahan Daerah II	133.294.582
	Fasilitasi Perencanaan dan Evaluasi Rencana Pembangunan Daerah	55.559.732
	Pembinaan Penyelenggaraan dan Pembangunan Urusan Pemerintahan Daerah IV	64.300.000
	Dukungan Manajemen dan Dukungan Teknis Lainnya Ditjen Bina Bangda	138.039.666
DITJEN OTONOMI DAERAH		**164.416.399**
PELAYANAN UMUM		**164.416.399**
Program Bina Otonomi Daerah		**164.416.399**
	Fasilitasi KDH DPRD dan Hubungan Antar Lembaga	20.500.000
	Penataan Daerah Otonom dan Otonomi Khusus dan DPOD	22.000.000
	Evaluasi Kinerja Daerah Dan Peningkatan Kapasitas	23.000.000

www.peraturan.go.id

LAMPIRAN III

RINCIAN ANGGARAN BELANJA PEMERINTAH PUSAT PADA BAGIAN ANGGARAN KEMENTERIAN NEGARA/LEMBAGA

K/L : KEMENTERIAN DALAM NEGERI

(dalam ribuan rupiah)

UNIT ORGANISASI	FUNGSI/PROGRAM/KEGIATAN	ALOKASI ANGGARAN
1	2	3
	Fasilitasi Kelembagaan dan Kepegawaian Perangkat Daerah	27.500.000
	Dukungan Manajemen dan Dukungan Teknis Lainnya Ditjen Otonomi Daerah	49.416.399
	Fasilitasi Penataan Produk Hukum Daerah	22.000.000
DITJEN KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL		**1.848.212.739**
PELAYANAN UMUM		**1.848.212.739**
Program Penataan Administrasi Kependudukan dan Pencatatan Sipil		**1.848.212.739**
	Pengembangan Sistem Administrasi Kependudukan (SAK) Terpadu	1.702.071.000
	Pengelolaan Informasi Kependudukan	41.819.005
	Pembinaan Administrasi Pencatatan Sipil	16.050.248
	Pembinaan Administrasi Pendaftaran Penduduk	8.315.071
	Pembinaan Aparatur Kependudukan Dan Pencatatan Sipil	7.441.389
	Pemanfaatan Data Dan Dokumen Kependudukan	8.511.617
	Dukungan Manajemen dan Dukungan Teknis Lainnya Ditjen Kependudukan dan Pencatatan Sipil	64.004.409
DITJEN BINA KEUANGAN DAERAH		**98.930.526**
PELAYANAN UMUM		**98.930.526**
Program Peningkatan Kapasitas Keuangan Pemerintah Daerah		**98.930.526**
	Pembinaan Perencanaan Anggaran Daerah	10.072.000
	Pembinaan Pengelolaan Pendapatan Daerah	9.500.000
	Pembinaan Dan Fasilitasi Dana Perimbangan Dan Pinjaman Daerah	9.925.000
	Pembinaan Pelaksanaan dan Pertanggungjawaban Keuangan Daerah	14.264.554
	Dukungan Manajemen dan Dukungan Teknis Lainnya Ditjen Bina Keuangan Daerah	46.168.972
	Pembinaan Pengelolaan BUMD, BLUD Dan Barang Milik Daerah	9.000.000
BADAN PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN		**64.870.740**
PELAYANAN UMUM		**64.870.740**
Program Penelitian dan Pengembangan Kementerian Dalam Negeri		**64.870.740**
	Penelitian Dan Pengembangan Pembangunan Dan Keuangan Daerah	4.249.898
	Penelitian Dan Pengembangan Otonomi Daerah, Politik, Dan Pemerintahan Umum	4.249.898
	Penelitian Dan Pengembangan Administrasi Kewilayahan, Pemerintahan Desa, Kependudukan Dan Pencatatan Sipil	4.266.399
	Penelitian Dan Pengembangan Inovasi Daerah Dan Aparatur	4.669.698
	Dukungan Manajemen dan Dukungan Teknis Lainnya Badan Penelitian dan Pengembangan Kementerian Dalam Negeri	47.434.847
BADAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA		**268.031.855**
PELAYANAN UMUM		**268.031.855**
Program Pengembangan Sumber Daya Manusia Aparatur Kementerian Dalam Negeri		**268.031.855**
	Pengembangan dan Pelaksanaan Standarisasi dan Sertifikasi	14.578.567
	Pengembangan Kompetensi Kemendagri dan Pemda	19.817.249
	Pengembangan Kompetensi Kepamongprajaan dan Manajemen Kepemimpinan	23.886.549
	Pengembangan Kompetensi Fungsional dan Teknis	12.127.674
	Pendidikan dan Pelatihan Regional	113.545.034
	Dukungan Manajemen dan Teknis Lainnya Badan Pengembangan Sumber Daya Manusia	84.076.782

www.peraturan.go.id

LAMPIRAN III

RINCIAN ANGGARAN BELANJA PEMERINTAH PUSAT PADA BAGIAN ANGGARAN KEMENTERIAN NEGARA/LEMBAGA

K/L : KEMENTERIAN LUAR NEGERI

(dalam ribuan rupiah)

UNIT ORGANISASI	FUNGSI/PROGRAM/KEGIATAN	ALOKASI ANGGARAN
1	2	3
KEMENTERIAN LUAR NEGERI		**6.251.765.216**
SEKRETARIAT JENDERAL		**5.174.029.609**
PELAYANAN UMUM		**5.174.029.609**
	Program Dukungan Manajemen dan Pelaksanaan Tugas Teknis Lainnya Kementerian Luar Negeri	**4.835.338.909**
	Pelayanan Administrasi dan Dukungan Teknis Lainnya Kementerian dan Perwakilan	17.313.700
	Pelayanan Administrasi dan Dukungan Teknis Lainnya Menteri Luar Negeri	17.833.400
	Pengelolaan Sumber Daya Manusia Kementerian Luar Negeri	259.002.400
	Pengelolaan Keuangan Kementerian Luar Negeri	155.012.317
	Penyusunan Perencanaan dan Penguatan Organisasi Kementerian Luar Negeri	12.050.342
	Pengelolaan Perlengkapan serta Urusan Rumah Tangga Kementerian Luar Negeri	52.148.893
	Penyelenggaraan Diplomasi dan Kerja Sama Internasional Perwakilan RI	4.173.045.852
	Dukungan Sistem Informasi dan Komunikasi Kementerian Luar Negeri	93.652.205
	Peningkatan Kualitas Sumber Daya Manusia Kementerian Luar Negeri dan Kerja Sama Pendidikan dan Pelatihan Diplomatik	55.279.800
	Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur Kementerian Luar Negeri	**338.690.700**
	Peningkatan Sarana dan Prasarana Kementerian Luar Negeri	33.519.600
	Peningkatan Sarana dan Prasarana Perwakilan RI di Luar Negeri	305.171.100
DIREKTORAT JENDERAL ASIA PASIFIK DAN AFRIKA		**132.707.243**
PELAYANAN UMUM		**132.707.243**
	Program Pemantapan Hubungan dan Politik Luar Negeri Serta Optimalisasi Diplomasi di Kawasan Asia Pasifik dan Afrika	**132.707.243**
	Pemantapan Hubungan dan Politik Luar Negeri di Kawasan Sub Sahara Afrika	4.098.872
	Pemantapan Hubungan dan Politik Luar Negeri di Kawasan Asia Selatan dan Tengah	3.919.124
	Pemantapan Hubungan dan Politik Luar Negeri di Kawasan Asia Timur dan Pasifik	7.077.784
	Pemantapan Hubungan dan Politik Luar Negeri Melalui Kerja Sama Intra Kawasan Asia Pasifik dan Afrika	85.365.745
	Pemantapan Hubungan dan Politik Luar Negeri di Kawasan Timur Tengah	3.629.959
	Dukungan Manajemen dan Dukungan Teknis Lainnya Ditjen Asia Pasifik dan Afrika	28.615.759
DIREKTORAT JENDERAL AMERIKA DAN EROPA		**44.345.059**
PELAYANAN UMUM		**44.345.059**
	Program Pemantapan Hubungan dan Politik LN Serta Optimalisasi Diplomasi di Kawasan Amerika dan Eropa	**44.345.059**
	Pemantapan Hubungan dan Politik Luar Negeri di Kawasan Amerika Selatan dan Karibia	2.644.730
	Pemantapan Hubungan dan Politik Luar Negeri di Kawasan Amerika Utara dan Tengah	4.017.810
	Pemantapan Hubungan dan Politik Luar Negeri di Kawasan Eropa Barat	2.756.836
	Pemantapan Hubungan dan Politik Luar Negeri di Kawasan Eropa Tengah dan Timur	2.764.395
	Pemantapan Hubungan dan Politik Luar Negeri Melalui Kerja Sama Intrakawasan Amerika dan Eropa	3.173.057
	Dukungan Manajemen dan Dukungan Teknis Lainnya Ditjen Amerika dan Eropa	28.978.231
DIREKTORAT JENDERAL KERJA SAMA ASEAN		**60.203.987**
PELAYANAN UMUM		**60.203.987**
	Program Peningkatan Hubungan dan Politik Luar Negeri Melalui Kerjasama ASEAN	**60.203.987**
	Kerja Sama Asean Bidang Ekonomi	6.273.790

www.peraturan.go.id

LAMPIRAN III

RINCIAN ANGGARAN BELANJA PEMERINTAH PUSAT PADA BAGIAN ANGGARAN KEMENTERIAN NEGARA/LEMBAGA

K/L : KEMENTERIAN LUAR NEGERI

(dalam ribuan rupiah)

UNIT ORGANISASI	FUNGSI/PROGRAM/KEGIATAN	ALOKASI ANGGARAN
1	2	3
	Kerja Sama Asean Bidang Fungsional	5.554.600
	Kerja Sama Asean Dengan Mitra Wicara dan Antar Kawasan	5.081.971
	Kerja Sama Asean Bidang Politik dan Keamanan	10.551.626
	Dukungan Manajemen dan Dukungan Teknis Lainnya Ditjen Kerja Sama Asean	32.742.000
DIREKTORAT JENDERAL MULTILATERAL		**544.584.669**
PELAYANAN UMUM		**544.584.669**
Program Peningkatan Peran dan Diplomasi Indonesia di Bidang Multilateral		**544.584.669**
	Kerja Sama Multilateral dalam Rangka Pemajuan dan Perlindungan HAM serta Penanganan Isu Kemanusiaan	6.386.353
	Kerja Sama Multilateral Terkait Isu Keamanan Internasional, Senjata Pemusnah Massal dan Senjata Konvensional, Penanggulangan Kejahatan Lintas Negara dan Terorisme	11.867.115
	Kerja Sama Multilateral Terkait Isu Pembangunan Ekonomi, Keuangan, dan Lingkungan Hidup	4.097.105
	Kerja Sama Multilateral Terkait Isu Perdagangan, Perindustrian, Investasi, dan Haki	3.769.994
	Kerja Sama Multilateral Terkait Isu Sosial Budaya dan Organisasi Internasional Negara Berkembang	5.296.843
	Dukungan Manajemen dan Dukungan Teknis Lainnya Ditjen Multilateral	513.167.259
DIREKTORAT JENDERAL INFORMASI DAN DIPLOMASI PUBLIK		**66.467.918**
PELAYANAN UMUM		**66.467.918**
Program Optimalisasi Informasi dan Diplomasi Publik		**66.467.918**
	Penguatan Citra Indonesia Melalui Diplomasi Publik	20.200.366
	Penguatan Citra Indonesia Melalui Informasi dan Pelayanan Media	5.578.000
	Pengamanan Diplomatik Bidang Informasi, Personalia dan Kerja Sama Pengamanan	2.736.665
	Penguatan Citra Indonesia Melalui Kerja Sama Teknik	8.301.630
	Dukungan Manajemen dan Dukungan Teknis Lainnya Ditjen Informasi dan Diplomasi Publik	29.651.257
DIREKTORAT JENDERAL HUKUM DAN PERJANJIAN INTERNASIONAL		**39.117.444**
PELAYANAN UMUM		**39.117.444**
Program Optimalisasi Diplomasi Terkait Dengan Pengelolaan Hukum dan Perjanjian Internasional		**39.117.444**
	Penguatan Diplomasi Melalui Pelaksanaan Hukum	2.764.852
	Optimalisasi Diplomasi Terkait Dengan Perjanjian Ekonomi dan Sosial Budaya serta Pengelolaan Naskah Perjanjian Internasional	6.068.637
	Optimalisasi Diplomasi Terkait Dengan Perjanjian Politik, Keamanan Kewilayahan dan Kelautan	10.918.163
	Dukungan Manajemen dan Dukungan Teknis Lainnya Ditjen Hukum dan Perjanjian Internasional	19.365.792
DIREKTORAT JENDERAL PROTOKOL DAN KONSULER		**136.196.300**
PELAYANAN UMUM		**136.196.300**
Program Peningkatan Kualitas Pelayanan Keprotokolan dan Kekonsuleran		**136.196.300**
	Pelayanan Fasilitas Diplomatik	4.099.200
	Pelayanan Kekonsuleran	18.497.500
	Peningkatan Perlindungan dan Pelayanan WNI/BHI di Luar Negeri	81.000.000
	Pelayanan Keprotokolan	3.100.000
	Dukungan Manajemen dan Dukungan Teknis Lainnya Ditjen Protokol dan Konsuler	29.499.600
INSPEKTORAT JENDERAL		**25.491.900**

www.peraturan.go.id

LAMPIRAN III

RINCIAN ANGGARAN BELANJA PEMERINTAH PUSAT PADA BAGIAN ANGGARAN KEMENTERIAN NEGARA/LEMBAGA

K/L : KEMENTERIAN LUAR NEGERI

(dalam ribuan rupiah)

UNIT ORGANISASI	FUNGSI/PROGRAM/KEGIATAN	ALOKASI ANGGARAN
1	2	3
	PELAYANAN UMUM	**25.491.900**
	Program Pengawasan dan Peningkatan Akuntabilitas Aparatur Kementerian Luar Negeri	**25.491.900**
	Pengawasan Perwakilan RI Wilayah Asia dan Kementerian Luar Negeri I	1.144.871
	Pengawasan Perwakilan RI Wilayah Eropa dan Kementerian Luar Negeri II	1.413.567
	Pengawasan Perwakilan RI Wilayah Afrika dan Timur Tengah dan Kementerian Luar Negeri III	1.311.979
	Pengawasan Perwakilan RI Wilayah Amerika, Karibia dan Pasifik dan Kementerian Luar Negeri IV	1.496.042
	Dukungan Manajemen dan Dukungan Teknis Lainnya Inspektorat Jenderal Kementerian Luar Negeri	20.125.441
BADAN PENGKAJIAN DAN PENGEMBANGAN KEBIJAKAN		**28.621.087**
	PELAYANAN UMUM	**28.621.087**
	Program Pengkajian dan Pengembangan Kebijakan Luar Negeri	**28.621.087**
	Pengkajian dan Pengembangan Kebijakan Luar Negeri di Kawasan Amerika dan Eropa	2.700.264
	Pengkajian dan Pengembangan Kebijakan Luar Negeri di Kawasan Asia Pasifik Timur Tengah dan Afrika	2.848.934
	Pengkajian dan Pengembangan Kebijakan Luar Negeri pada Organisasi Internasional dan Regional Sesuai Prioritas Kajian	2.628.041
	Dukungan Manajemen dan Dukungan Teknis Lainnya Badan Pengkajian dan Pengembangan Kebijakan	20.443.848

www.peraturan.go.id

LAMPIRAN III

RINCIAN ANGGARAN BELANJA PEMERINTAH PUSAT PADA BAGIAN ANGGARAN KEMENTERIAN NEGARA/LEMBAGA

K/L : KEMENTERIAN PERTAHANAN

(dalam ribuan rupiah)

UNIT ORGANISASI	FUNGSI/PROGRAM/KEGIATAN	ALOKASI ANGGARAN
1	2	3
KEMENTERIAN PERTAHANAN		102.283.294.699
KEMENTERIAN PERTAHANAN		24.560.716.908
PERTAHANAN		24.388.175.229
	Program Dukungan Manajemen dan Pelaksanaan Tugas Teknis Lainnya Kementerian Pertahanan	1.226.843.322
	Pengelolaan Sistem Informasi Pertahanan Negara	251.893.646
	Pelayanan dan Pembinaan Keuangan Pertahanan	28.574.139
	Pelayanan Bantuan Hukum	15.294.314
	Pelayanan Rehabilitasi dan Perumahsakitan	67.422.344
	Dukungan Pelayanan Umum UO Kemhan	283.947.732
	Dukungan Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur UO Kemhan	108.284.252
	Dukungan Pembinaan dan Pengelolaan Pegawai UO Kemhan	128.817.558
	Dukungan Perencanaan dan Penganggaran Program Kerja UO Kemhan	269.567.784
	Dukungan Administrasi Pelayanan Pimpinan UO Kemhan	53.747.682
	Pelayanan Komunikasi Publik	19.293.871
	Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur Kementerian Pertahanan	18.558.815.351
	Pengelolaan Barang Milik Negara (BMN)	25.575.422
	Kelaikan Sarana Pertahanan	4.849.851
	Kodifikasi Materiil Pertahanan	5.795.221
	Pengadaan Jasa Konstruksi Pertahanan	498.502.123
	Pembangunan Sarana dan Prasarana Pertahanan di Wilayah Perbatasan	186.151.644
	Pengadaan Barang dan Jasa Militer	17.787.739.841
	Dukungan Manajemen dan Pelaksanaan Tugas Teknis Lainnya Badan Ranahan	50.201.249
	Program Pengawasan dan Peningkatan Akuntabilitas Aparatur Kementerian Pertahanan	53.655.275
	Dukungan Manajemen dan Pelaksanaan Tugas Teknis Lainnya	48.451.075
	Pengawasan Umum Kemhan/TNI	1.301.050
	Pengawasan Pengadaan Kemhan/TNI	1.301.050
	Pengawasan Keuangan Kemhan/TNI	1.301.050
	Pengawasan Logistik Kemhan/TNI	1.301.050
	Program Penelitian dan Pengembangan Kementerian Pertahanan	1.575.968.962
	Penelitian dan Pengembangan Strategi Pertahanan	3.730.607
	Penelitian dan Pengembangan Alat Peralatan Pertahanan	41.844.969
	Penelitian dan Pengembangan Iptek Pertahanan	1.290.668.204
	Penelitian dan Pengembangan Sumber Daya Pertahanan	202.521.577
	Dukungan Manajemen dan Pelaksanaan Tugas Teknis Lainnya Balitbang	37.203.605
	Program Pendidikan dan Pelatihan Kemhan/TNI	78.813.338
	Pendidikan dan Pelatihan Bahasa	10.045.921
	Pendidikan dan Pelatihan Manajemen Pertahanan	9.042.132
	Pendidikan dan Pelatihan Teknis Fungsional Pertahanan	7.608.917
	Dukungan Manajemen dan Pelaksanaan Tugas Teknis Lainnya Badiklat	52.116.368

www.peraturan.go.id

LAMPIRAN III

RINCIAN ANGGARAN BELANJA PEMERINTAH PUSAT PADA BAGIAN ANGGARAN KEMENTERIAN NEGARA/LEMBAGA

K/L : KEMENTERIAN PERTAHANAN

(dalam ribuan rupiah)

UNIT ORGANISASI	FUNGSI/PROGRAM/KEGIATAN	ALOKASI ANGGARAN
1	2	3
	Program Strategi Pertahanan	**120.422.787**
	Analisa Strategis	7.575.406
	Perumusan Kebijakan Strategis dan Kebijakan Implementatif	7.136.176
	Kerja Sama Internasional	14.780.380
	Perumusan Kebijakan Pengerahan Komponen Pertahanan Negara	6.619.446
	Perumusan Hukum Strategi Pertahanan	10.166.040
	Pengelolaan Wilayah Pertahanan	5.269.907
	Dukungan Manajemen dan Pelaksanaan Tugas Teknis Lainnya Ditjen Strahan	68.875.432
	Program Perencanaan Umum dan Penganggaran Pertahanan	**73.704.069**
	Administrasi dan Pelaksanaan Anggaran	2.356.827
	Pengendalian dan Program Anggaran	5.576.658
	Perencanaan Pembangunan Pertahanan	5.967.928
	Perencanaan Program dan Anggaran	7.112.748
	Dukungan Manajemen dan Pelaksanaan Tugas Teknis Lainnya Ditjen Renhan Kemhan	52.689.908
	Program Pengembangan Teknologi dan Industri Pertahanan	**2.100.000.000**
	Produksi Alutsista Industri dalam Negeri dan Pengembangan Pinak Industri Pertahanan	2.100.000.000
	Program Potensi Pertahanan	**349.837.628**
	Pembinaan Keveteranan	19.078.448
	Pembinaan Kesadaran Bela Negara	66.941.066
	Pembentukan dan Pembinaan Komponen Cadangan	13.721.700
	Penataan dan Pembinaan Komponen Pendukung	11.099.539
	Pembinaan Potensi Teknologi dan Industri Pertahanan	192.590.666
	Dukungan Manajemen dan Pelaksanaan Tugas Teknis Lainnya Ditjen Pothan Kemhan	46.406.209
	Program Kekuatan Pertahanan	**250.114.497**
	Pembinaan Fasilitas dan Jasa Pertahanan	133.962.258
	Pembinaan Kesehatan Pertahanan	56.780.536
	Pembinaan Materiill Pertahanan	4.670.631
	Pembinaan Sumber Daya Manusia	8.030.934
	Dukungan Manajemen dan Pelaksanaan Tugas Teknis Lainnya Ditjen Kuathan Kemhan	46.670.138
	PENDIDIKAN	**172.541.679**
	Program Pendidikan dan Pelatihan Kemhan/TNI	**172.541.679**
	Penyelenggaraan Pendidikan Tinggi Pertahanan	172.541.679
MARKAS BESAR TNI		**8.798.320.944**
	PERTAHANAN	**8.798.320.944**
	Program Penggunaan Kekuatan Pertahanan Integratif	**2.203.779.192**
	Operasi Militer Untuk Perang (OMP)	1.363.906.815
	Operasi Militer Selain Perang (OMSP)	722.548.607
	Ops Gaktib dan Ops Yustisi	23.076.300

www.peraturan.go.id

LAMPIRAN III

RINCIAN ANGGARAN BELANJA PEMERINTAH PUSAT PADA BAGIAN ANGGARAN KEMENTERIAN NEGARA/LEMBAGA

K/L : KEMENTERIAN PERTAHANAN

(dalam ribuan rupiah)

UNIT ORGANISASI	FUNGSI/PROGRAM/KEGIATAN	ALOKASI ANGGARAN
1	2	3
	Operasi Intelijen Strategis	39.674.770
	Operasi Sar TNI	7.020.375
	Operasi Bantuan TNI	12.541.925
	Operasi Pemberdayaan Wilayah Pertahanan	17.510.400
	Pemeliharaan Alut Integratif	11.000.000
	Pemeliharaan Non-Alut Integratif	6.500.000
	Program Modernisasi Alutsista/Non-Alutsista/ Sarpras Integratif	**2.876.294.360**
	Pengadaan Rantis, Sucad Ranpur dan Sucad Rantis	21.971.364
	Pengadaan Non-Alutsista/Senjata	45.435.000
	Pengadaan MKK	106.900.000
	Pengadaan Munisi Khusus	25.000.000
	Pengadaan Materiil Khusus	279.800.000
	Pengadaan MKB	626.380.000
	Pengadaan Senjata	39.343.192
	Pengadaan Non-Alut	73.718.800
	Pembangunan Sarpras Pendukung	68.746.004
	Pengadaan Alutsista Strategis Integratif	1.589.000.000
	Program Profesionalisme Prajurit Integratif	**361.260.980**
	Pendidikan Pertama (Dikma) dan Penerimaan (Werving) TNI/PNS	153.013.485
	Pendidikan Pengembangan/Spesialisasi	80.060.340
	Latihan Kesiapsiagaan Operasi/Latgab/Latma Internasional	51.025.680
	Latihan Pembinaan Balakpus TNI	7.349.760
	Latihan Pratugas Operasi	4.198.446
	Pembangunan Sarana Prasarana Profesionalisme Personel Integratif	65.613.269
	Program Penyelenggaraan Manajemen dan Operasional Integratif	**3.356.986.412**
	Penyelenggaraan Administrasi dan Perawatan Personel Integratif	1.815.838.062
	Penyelenggaraan Operasional Perkantoran	1.229.309.127
	Penyelenggaraan Pemeliharaan/Perawatan Perkantoran Integratif	281.572.533
	Perawatan Sarana dan Prasarana	20.766.690
	Pengembangan Sistem dan Evaluasi Kinerja Integratif	9.500.000
MARKAS BESAR TNI AD		**40.660.409.951**
PERTAHANAN		**40.660.409.951**
	Program Dukungan Kesiapan Matra Darat	**3.136.704.400**
	Penyelenggaraan Intelijen dan Pengamanan Matra Darat	264.116.303
	Kerja Sama Internasional Matra Darat	9.737.720
	Penyelenggaraan Survei dan Pemetaan	4.229.399
	Pemeliharaan/Perawatan Ranpur	150.000.000
	Pemeliharaan/Perawatan Pesawat Terbang	330.000.000
	Pemeliharaan/Perawatan Alat Angkut Air	40.000.000

www.peraturan.go.id

LAMPIRAN III

RINCIAN ANGGARAN BELANJA PEMERINTAH PUSAT PADA BAGIAN ANGGARAN KEMENTERIAN NEGARA/LEMBAGA

K/L : KEMENTERIAN PERTAHANAN

(dalam ribuan rupiah)

UNIT ORGANISASI	FUNGSI/PROGRAM/KEGIATAN	ALOKASI ANGGARAN
1	2	3
	Pemeliharaan/Perawatan Senjata dan Munisi/Alpal	1.264.469.527
	Pemeliharaan/Perawatan Non Alutsista	512.757.938
	Penyelenggaraan Kegiatan Teritorial Matra Darat	283.374.259
	Pengembangan Sistem dan Evaluasi Kinerja Matra Darat	15.302.253
	Penelitian dan Pengembangan Pertahanan Matra Darat	33.934.193
	Pemeliharaan dan Perawatan Kesatriaan dan Fasilitas Latihan/Tempur	11.170.000
	Penyelenggaraan Pembinaan Potensi Nasional Menjadi Kekuatan Pertahanan	186.324.673
	Penyelenggaraan OMSP	31.288.135
	Program Modernisasi Alutsista dan Non Alutsista/Sarana dan Prasarana Matra Darat	**4.645.014.050**
	Pengadaan/Penggantian Kendaraan Tempur	247.433.910
	Pengadaan/Penggantian Pesawat Terbang (Sabang)	275.283.946
	Pengadaan/Penggantian Alat Angkut Air	146.470.000
	Pengadaan/Penggantian Senjata dan Munisi	328.125.108
	Pengadaan/Penggantian Material Alutsista	110.345.771
	Pengadaan/Penggantian Material Non Alutsista	745.726.244
	Pengembangan Failitas Sarana dan Prasarana Matra Darat	869.110.384
	Pengadaan Alutsista Strategis Matra Darat	1.922.518.687
	Program Peningkatan Profesionalisme Personel Matra Darat	**1.404.220.460**
	Latihan Matra Darat	433.858.515
	Latihan Bersama Internasional	30.424.480
	Pendidikan Pertama Matra Darat	487.528.545
	Pendidikan Pembentukan Matra Darat	167.028.830
	Pendidikan Pengembangan Umum/Rutin Matra Darat	53.303.374
	Pendidikan Pengembangan Spesialisasi Matra Darat	100.308.392
	Pendidikan Profesi dan Keahlian Matra Darat	96.768.324
	Pembangunan Sarana Prasarana Profesionalisme Personel Matra Darat	35.000.000
	Program Penyelenggaraan Manajemen dan Operasional Matra Darat	**31.474.471.041**
	Penyelenggaraan Perawatan Personel Matra Darat	27.110.479.095
	Penggiatan Fungsi Matra Darat	411.719.799
	Penyelenggaraan Kepolisian Militer Matra Darat	9.580.067
	Penyelenggaraan Pembinaan Hukum	19.793.775
	Penyelenggaraan Administrasi Personel	236.925.312
	Pemeliharaan/Perawatan Peralatan Fungsional, Fasilitas dan Sarpras Perkantoran	749.755.432
	Penyelenggaraan Administrasi Perbekalan dan Dukungan Bekal	2.277.962.175
	Penyelenggaraan Penpas dan Penum	39.629.912
	Penyelenggaraan Administrasi Umum	598.730.111
	Penyelenggaraan Administrasi Pembinaan, Perencanaan, Penganggaran dan Keuangan	16.495.363
	Penyelenggaraan Pengawasan dan Pemeriksaan	3.400.000
MARKAS BESAR TNI AL		**15.244.117.780**

www.peraturan.go.id

LAMPIRAN III

RINCIAN ANGGARAN BELANJA PEMERINTAH PUSAT PADA BAGIAN ANGGARAN KEMENTERIAN NEGARA/LEMBAGA

K/L : KEMENTERIAN PERTAHANAN

(dalam ribuan rupiah)

UNIT ORGANISASI	FUNGSI/PROGRAM/KEGIATAN	ALOKASI ANGGARAN
1	2	3
	PERTAHANAN	**15.244.117.780**
	Program Dukungan Kesiapan Matra Laut	**2.492.163.000**
	Penyelenggaraan Surta Hidros	16.500.000
	Pengembangan Sistem dan Evaluasi Kinerja Matra Laut	16.500.000
	Penyelenggaraan Uji Kelaikan Materiil dan Fasilitas Matra Laut	12.875.000
	Pemeliharaan/Perawatan Peralatan Komlek Matra Laut	67.000.000
	Pemeliharaan/Perawatan Peralatan Senlek dan Amonisi Matra Laut	65.000.000
	Pemeliharaan/Perawatan Alpung, KAL, KRI dan Ranpur/Rantis	1.980.000.000
	Penyelenggaraan Operasi Militer Selain Perang Matra Laut dan Penegakan Hukum serta Penjagaan Keamanan di Wilayah Laut Yuridiksi Nasional	126.383.000
	Litbanghan Matra Laut	23.000.000
	Penyelenggaraan Intelijen dan Pengamanan Matra Laut	44.905.000
	Penyelenggaraan Pemberdayaan Wilayah Pertahanan Laut	15.000.000
	Pemeliharaan/Perawatan Pesud	125.000.000
	Program Modernisasi Alutsista (Alat Utama Sistem Pertahanan) dan Non Alutsista Serta Pengembangan Fasilitas dan Sarana Prasarana Matra Laut	**3.910.408.818**
	Peningkatan/Pengadaan Fasilitas dan Sarpras Matra Laut	1.050.770.000
	Peningkatan/Pengadaan Peralatan Surta Hidros Matra Laut	17.500.000
	Peningkatan/Pengadaan Peralatan Komlek Matra Laut	78.050.000
	Peningkatan/Pengadaan Senlek dan Amonisi Matra Laut	135.075.000
	Peningkatan/Pengadaan Alpung, Kri, Kal dan Ranpur/Rantis Matra Laut	1.539.650.000
	Peningkatan/Pengadaan Peralatan Passusla dan Materiil Non Alutsista Matra Laut	999.363.818
	Peningkatan/Pengadaan Pesud dan Sarana Prasarana Penerbangan Matra Laut	90.000.000
	Program Peningkatan Profesionalisme Personel Matra Laut	**430.014.400**
	Werving dan Seleksi	6.511.050
	Pembangunan Fasilitas dan Sarana-Prasarana Profesionalisme Personel Matra Laut	120.000.000
	Penyelenggaraan Latihan Operasi Matra Laut	80.504.300
	Pendidikan Pertama, Pengembangan Umum, Spesialisasi, Profesi dan Ketrampilan serta Pendidikan Pembentukan Matra Laut	219.049.050
	Penyelenggaraan Psychologi Matra Laut	3.950.000
	Program Penyelenggaraan Manajemen dan Operasional Matra Laut	**8.411.531.562**
	Penyelenggaran Administrasi Personel Matra Laut	19.000.000
	Pemeliharaan/Perawatan Peralatan Fungsional, Fasilitas, Sarana Prasarana dan Pengelolaan LTGA	452.033.846
	Penyelenggaraan Pelayanan Kesehatan Matra Laut	69.561.450
	Penyelenggaraan Pembinaan Hukum Matra Laut	2.500.000
	Penyelenggaraan Admin Perencanaan, Penganggaran, dan Keuangan Matra Laut	25.000.000
	Penyelenggaraan Administrasi Perbekalan dan Dukungan Bekal Matra Laut	1.534.219.557
	Penyelenggaraan Penerangan Pasukan (Penpas) dan Penerangan Umum (Penum) Matra Laut	12.450.000
	Penyelenggaraan Administrasi Perawatan Personel Matra Laut	6.199.506.709
	Penyelenggaraan Pengawasan dan Pemeriksaan Matra Laut	8.000.000
	Penyelenggaraan Kepolisian Militer Matra Laut	5.260.000
	Penyelenggaraan Administrasi Umum Matra Laut	84.000.000

www.peraturan.go.id

LAMPIRAN III

RINCIAN ANGGARAN BELANJA PEMERINTAH PUSAT PADA BAGIAN ANGGARAN KEMENTERIAN NEGARA/LEMBAGA

K/L : KEMENTERIAN PERTAHANAN

(dalam ribuan rupiah)

UNIT ORGANISASI	FUNGSI/PROGRAM/KEGIATAN	ALOKASI ANGGARAN
1	2	3
MARKAS BESAR TNI AU		13.019.729.116
	PERTAHANAN	13.019.729.116
	Program Dukungan Kesiapan Matra Udara	3.130.658.772
	Penyelenggaraan OMSP Matra Udara	5.000.000
	Pemeliharaan/Perawatan Pesawat Udara, Senjata dan Almatsus Lainnya	2.078.517.904
	Penyelenggaraan Dukungan Operasi Penerbangan	17.264.700
	Pengembangan Sistem dan Evaluasi Kinerja Matra Udara	42.193.904
	Pemeliharaan/Perawatan Radar, Psu, dan Altmatsus Komlek Lainnya	900.000.000
	Penyelenggaraan Uji Kelaikan Materiil dan Fasilitas Matra Udara	20.019.770
	Litbanghan Matra Udara	16.500.000
	Penyelenggaraan Intelijen dan Pengamanan Matra Udara	29.000.000
	Penyelenggaraan Pemberdayaan Wilayah Pertahanan Matra Udara	9.162.494
	Penyelenggaraan Surta	13.000.000
	Program Modernisasi Alutsista Dan Non Alutsista Serta Pengembangan Fasilitas Dan Sarpras Matra Udara	4.957.067.110
	Pengadaan Alutsista Strategis Matra Udara	689.772.101
	Peningkatan/Pengadaan Pesawat Udara	1.812.235.640
	Peningkatan/Pembangunan Fasilitas dan Sarpras Matra Udara	457.480.620
	Peningkatan/Pengadaan Radar, Psu dan Alat Komlek Lainnya	890.000.000
	Peningkatan/Pengadaan Senri/Senrat	723.989.389
	Pengadaan Peralatan Non Alutsista	383.589.360
	Program Peningkatan Profesionalisme Personel Matra Udara	485.476.201
	Latihan Matra Udara	80.000.000
	Penyelenggaraan Pendidikan Matra Udara	158.523.600
	Pembangunan Sarana-Prasarana Kesejahteraan Personel Matra Udara	235.981.400
	Werving	5.473.101
	Penyelenggaraan Psikologi Matra Udara	5.498.100
	Program Penyelenggaraan Manajemen dan Operasional Matra Udara	4.446.527.033
	Penyelenggaraan Kepolisian Militer Matra Udara	9.948.004
	Penyelenggaraan Pengawasan dan Pemeriksaan	4.575.000
	Pemeliharaan/Perawatan Peralatan Fungsional, Fasilitas dan Sarana Prasarana serta Pengelolaan LTGA	154.798.555
	Penyelenggaraan Pelayanan Kesehatan	47.241.936
	Penyelenggaraan Administrasi Perencanaan, Penganggaran dan Keuangan	46.582.623
	Penyelenggaraan Pembinaan Hukum	2.176.114
	Penyelenggaraan Adiministrasi Perbekalan Umum dan Pemeliharaan dan Perawatan Perkantoran	786.228.765
	Penyelenggaran Administrasi Personel Matra Udara	1.450.000
	Penyelenggaraan Penerangan Pasukan (Penpas) dan Penerangan Umum (Penum) Matra Udara	8.500.000
	Penyelenggaraan Perawatan Personel Matra Udara	3.369.391.136
	Penyelenggaraan Adiministrasi Umum Matra Udara	15.634.900

www.peraturan.go.id

LAMPIRAN III

RINCIAN ANGGARAN BELANJA PEMERINTAH PUSAT PADA BAGIAN ANGGARAN KEMENTERIAN NEGARA/LEMBAGA

K/L : KEMENTERIAN HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA RI

(dalam ribuan rupiah)

UNIT ORGANISASI	FUNGSI/PROGRAM/KEGIATAN	ALOKASI ANGGARAN
1	2	3
KEMENTERIAN HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA RI		**11.178.587.701**
SEKRETARIAT JENDERAL		**2.705.163.686**
PELAYANAN UMUM		**2.619.707.539**
	Program Dukungan Manajemen dan Pelaksanaan Tugas Teknis Lainnya Kementerian Hukum dan HAM	**2.619.707.539**
	Hubungan Masyarakat dan Hubungan Luar Negeri Kementerian Hukum dan HAM	5.068.944
	Pengelolaan dan Pembinaan Kepegawaian Kementerian Hukum dan HAM	30.127.122
	Pengelolaan Keuangan dan Pelaksanaan Anggaran Kementerian Hukum dan HAM	10.453.276
	Perencanaan, Penganggaran dan Pelaksanaan Program dan dalam Kerangka Pengeluaran Jangka Menengah dan Berbasis Kinerja	15.878.588
	Pengelolaan Barang Milik Negara Kementerian Hukum dan HAM	47.616.541
	Pelayanan Ketatausahaan dan Kerumah Tanggaan Kementerian Hukum dan HAM	2.091.718.967
	Pengelolaan Administratif dan Fasilitatif Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan HAM	412.243.578
	Pengkajian dan Pengembangan Kebijakan Kementerian Hukum dan HAM	6.600.523
KETERTIBAN DAN KEAMANAN		**85.456.147**
	Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur Kementerian Hukum dan HAM	**85.456.147**
	Pembangunan/Pengadaan/Peningkatan Sarana dan Prasarana Pusat	45.239.501
	Pembangunan/Pengadaan/Peningkatan Sarana dan Prasarana Kanwil	40.216.646
INSPEKTORAT JENDERAL		**35.425.493**
PELAYANAN UMUM		**21.925.146**
	Program Pengawasan dan Peningkatan Akuntabilitas Aparatur Kementerian Hukum dan HAM	**21.925.146**
	Dukungan Manajemen dan Dukungan Teknis Lainnya ITJEN Kementerian Hukum dan HAM	21.925.146
KETERTIBAN DAN KEAMANAN		**13.500.347**
	Program Pengawasan dan Peningkatan Akuntabilitas Aparatur Kementerian Hukum dan HAM	**13.500.347**
	Pengawasan Kinerja Inspektorat Wilayah I	2.185.297
	Pengawasan Kinerja Inspektorat Wilayah II	2.167.377
	Pengawasan Kinerja Inspektorat Wilayah III	2.622.821
	Pengawasan Kinerja Inspektorat Wilayah IV	2.180.337
	Pengawasan Kinerja Inspektorat Wilayah V	2.173.937
	Pengawasan Kinerja Inspektorat Wilayah VI	2.170.578
DITJEN ADMINISTRASI HUKUM UMUM		**538.958.411**
PELAYANAN UMUM		**369.529.661**
	Program Administrasi Hukum Umum	**369.529.661**
	Dukungan Manajemen dan Dukungan Teknis Lainnya Ditjen AHU	369.529.661
KETERTIBAN DAN KEAMANAN		**169.428.750**
	Program Administrasi Hukum Umum	**169.428.750**
	Administrasi Hukum Daktiloskopi	2.341.410
	Administrasi Hukum Internasional dan Otoritas Pusat	17.469.752
	Administrasi Hukum Perdata	25.553.932
	Administrasi Hukum Pidana	3.227.063
	Administrasi Hukum Tata Negara	2.462.543

www.peraturan.go.id

LAMPIRAN III

RINCIAN ANGGARAN BELANJA PEMERINTAH PUSAT PADA BAGIAN ANGGARAN KEMENTERIAN NEGARA/LEMBAGA

K/L : KEMENTERIAN HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA RI

(dalam ribuan rupiah)

UNIT ORGANISASI	FUNGSI/PROGRAM/KEGIATAN	ALOKASI ANGGARAN
1	2	3
	Penyelenggaraan Administrasi Hukum Umum di Wilayah	118.374.050
DITJEN PEMASYARAKATAN		**4.331.451.047**
PELAYANAN UMUM		**266.559.761**
Program Pembinaan dan Penyelenggaraan Pemasyarakatan		**266.559.761**
	Dukungan Pelayanan Teknis dan Administratif di Lingkungan Ditjen Pemasyarakatan	266.559.761
KETERTIBAN DAN KEAMANAN		**4.064.891.286**
Program Pembinaan dan Penyelenggaraan Pemasyarakatan		**4.064.891.286**
	Penyelenggaraan Kegiatan di Bidang Bimbingan Kemasyarakatan dan Pengentasan Anak	3.941.947
	Penyelenggaraan Kegiatan di Bidang Informasi dan Komunikasi	4.475.750
	Penyelenggaraan Kegiatan di Bidang Kesehatan dan Perawatan	1.703.700
	Penyelenggaraan Kegiatan di Bidang Pembinaan Narapidana dan pelayanan Tahanan	2.627.700
	Penyelenggaraan Kegiatan di Bidang Pengelolaan Benda Sitaan Negara dan Barang Rampasan Negara	1.557.900
	Penyelenggaraan Kegiatan di Bidang Keamanan dan Ketertiban	2.336.800
	Penyelenggaraan Pemasyarakatan di Wilayah	4.048.247.489
DITJEN IMIGRASI		**3.054.317.164**
PELAYANAN UMUM		**463.694.941**
Program Peningkatan Pelayanan dan Penegakan Hukum Keimigrasian		**463.694.941**
	Dukungan Manajemen dan Dukungan Teknis Lainnya Ditjen Imigrasi	463.694.941
KETERTIBAN DAN KEAMANAN		**2.590.622.223**
Program Peningkatan Pelayanan dan Penegakan Hukum Keimigrasian		**2.590.622.223**
	Pelayanan Dokumen Perjalanan, Visa dan Fasilitas Keimigrasian	946.163.876
	Pendeteksian Pelanggaran Atau Kejahatan Keimigrasian	12.618.900
	Persetujuan Izin Tinggal dan Status Keimigrasian	13.800.200
	Pelaksanaan Fungsi Keimigrasian di Wilayah Perbatasan Dengan Negara Lain, perwakilan RI dan tempat lainnya di luar negeri serta kerjasama luar negeri	44.600.435
	Penyidikan dan Penindakan Pelaku Tindak Pidana Keimigrasian	11.297.304
	Penyelenggaraan Sistem Informasi Manajemen Keimigrasian	371.161.871
	Penyelenggaraan Fungsi Pengkoordinasian, Pelayanan dan Pengawasan Keimigrasian di Wilayah	1.190.979.637
DITJEN HAK ATAS KEKAYAAN INTELEKTUAL		**146.343.103**
PELAYANAN UMUM		**109.257.903**
Program Pembinaan/Penyelenggaraan HKI		**109.257.903**
	Dukungan Manajemen dan Dukungan Teknis Lainnya Ditjen HKI	109.257.903
KETERTIBAN DAN KEAMANAN		**37.085.200**
Program Pembinaan/Penyelenggaraan HKI		**37.085.200**
	Penyelenggaraan Sistem Hak Cipta, Desain Industri, Desain Tata Letak Sirkuit Terpadu dan Rahasia Dagang	2.530.000
	Penyelenggaraan Kerja Sama dan Promosi HKI	6.076.684
	Penyelenggaraan Sistem Merek dan Indikasi Geografis	6.842.516
	Penyelenggaraan Sistem Paten	3.599.000

www.peraturan.go.id

LAMPIRAN III

RINCIAN ANGGARAN BELANJA PEMERINTAH PUSAT PADA BAGIAN ANGGARAN KEMENTERIAN NEGARA/LEMBAGA

K/L : KEMENTERIAN HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA RI

(dalam ribuan rupiah)

UNIT ORGANISASI	FUNGSI/PROGRAM/KEGIATAN	ALOKASI ANGGARAN
1	2	3
	Penyelenggaraan Penyidikan di Bidang HKI	2.380.000
	Penyelenggaraan Sistem Teknologi Informasi HKI	12.357.000
	Penyelenggaraan HKI di Wilayah	3.300.000
DITJEN PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN		**60.594.384**
	PELAYANAN UMUM	**34.175.259**
	Program Pembentukan Hukum	**34.175.259**
	Dukungan Manajemen dan Pelaksanaan Tugas Teknis Lainnya Ditjen PP	34.175.259
	KETERTIBAN DAN KEAMANAN	**26.419.125**
	Program Pembentukan Hukum	**26.419.125**
	Fasilitasi Perancangan Peraturan Daerah	1.708.432
	Harmonisasi Peraturan Perundang-Undangan	3.707.260
	Litigasi Peraturan Perundang-Undangan	715.475
	Perancangan Peraturan Perundang-Undangan	12.980.130
	Pengundangan, Publikasi, dan Kerja Sama Peraturan Perundang-Undangan	1.624.157
	Penyelenggaraan Fasilitasi Pembentukan Hukum di Wilayah	5.683.671
DITJEN HAK ASASI MANUSIA		**42.886.037**
	PELAYANAN UMUM	**23.055.184**
	Program Pemajuan HAM	**23.055.184**
	Dukungan Manajemen dan Dukungan Teknis Lainnya Sekretariat Ditjen HAM	23.055.184
	KETERTIBAN DAN KEAMANAN	**19.830.853**
	Program Pemajuan HAM	**19.830.853**
	Diseminasi HAM	2.100.000
	Informasi HAM	1.258.100
	Kerja Sama dan Instrumen HAM	2.246.626
	Pelayanan Komunikasi Masyarakat	1.600.000
	Penguatan HAM	2.750.000
	Penyelenggaraan Pemajuan HAM di Wilayah	9.876.127
BADAN PEMBINAAN HUKUM NASIONAL		**114.585.347**
	PELAYANAN UMUM	**35.802.271**
	Program Pembinaan Hukum Nasional	**35.802.271**
	Dukungan Manajemen dan Pelaksanaan Tugas Teknis Lainnya BPHN	35.802.271
	KETERTIBAN DAN KEAMANAN	**78.783.076**
	Program Pembinaan Hukum Nasional	**78.783.076**
	Dokumentasi dan Jaringan Informasi Hukum Nasional	2.411.157
	Penelitian dan Pengembangan Sistem Hukum Nasional	3.761.780
	Peningkatan Kesadaran Hukum Masyarakat	6.365.940
	Perencanaan Pembangunan Hukum Nasional	3.969.660
	Penyelenggaraan Pembinaan Hukum di Wilayah	62.274.539
BADAN PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN HAM		**26.701.832**

www.peraturan.go.id

LAMPIRAN III

RINCIAN ANGGARAN BELANJA PEMERINTAH PUSAT PADA BAGIAN ANGGARAN KEMENTERIAN NEGARA/LEMBAGA

K/L : KEMENTERIAN HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA RI

(dalam ribuan rupiah)

UNIT ORGANISASI	FUNGSI/PROGRAM/KEGIATAN	ALOKASI ANGGARAN
1	2	3
	PELAYANAN UMUM	**18.299.118**
	Program Penelitian dan Pengembangan Kementerian Hukum dan HAM	**18.299.118**
	Dukungan Manajemen dan Pelaksanaan Tugas Teknis Lainnya Badan Penelitian dan Pengembangan HAM	18.299.118
	KETERTIBAN DAN KEAMANAN	**8.402.714**
	Program Penelitian dan Pengembangan Kementerian Hukum dan HAM	**8.402.714**
	Penelitian, Evaluasi dan Pengembangan Hak-Hak Ekonomi Sosial dan Budaya	1.502.980
	Penelitian, Evaluasi dan Pengembangan Hak-Hak Kelompok Khusus	1.502.980
	Penelitian Evaluasi dan Pengembangan Hak-Hak Sipil dan Politik	1.502.980
	Penelitian, Evaluasi dan Pengembangan Transformasi Konflik	1.502.980
	Penyelenggaraan Penelitian dan Pengembangan HAM di Wilayah	2.390.794
	BADAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA	**122.161.197**
	PELAYANAN UMUM	**35.195.994**
	Program Pendidikan dan Pelatihan Aparatur Kementerian Hukum dan HAM	**35.195.994**
	Dukungan Manajemen dan Dukungan Teknis Lainnya BPSDM Hukum dan HAM	35.195.994
	KETERTIBAN DAN KEAMANAN	**62.403.441**
	Program Pendidikan dan Pelatihan Aparatur Kementerian Hukum dan HAM	**62.403.441**
	Penyelenggaraan Pendidikan dan Pelatihan Fungsional HAM	6.711.490
	Penyelenggaraan Pendidikan dan Pelatihan Kepemimpinan dan Manajemen	14.785.314
	Penyelenggaraan Pendidikan dan Pelatihan Teknis	10.207.049
	Penyelenggaraan Diklat Aparatur di Wilayah	30.699.588
	PENDIDIKAN	**24.561.762**
	Program Pendidikan dan Pelatihan Aparatur Kementerian Hukum dan HAM	**24.561.762**
	Pendidikan Kedinasan	24.561.762

www.peraturan.go.id

LAMPIRAN III

RINCIAN ANGGARAN BELANJA PEMERINTAH PUSAT PADA BAGIAN ANGGARAN KEMENTERIAN NEGARA/LEMBAGA

K/L : KEMENTERIAN KEUANGAN

(dalam ribuan rupiah)

UNIT ORGANISASI	FUNGSI/PROGRAM/KEGIATAN	ALOKASI ANGGARAN
1	2	3
KEMENTERIAN KEUANGAN		25.686.296.004
SEKRETARIAT JENDERAL		8.904.759.708
	PELAYANAN UMUM	8.188.219.763
	Program Dukungan Manajemen dan Pelaksanaan Tugas Teknis Lainnya Kementerian Keuangan	8.188.219.763
	Pembinaan dan Koordinasi Pemberian Bantuan Hukum	7.226.499
	Membangun Kepercayaan dan Meningkatkan Dukungan Publik Terhadap Kebijakan di Bidang Keuangan Negara	25.705.642
	Pembinaan dan Koordinasi Perumusan Peraturan Perundang-Undangan	3.425.476
	Pembinaan dan Penataan Organisasi, Tata Laksana dan Jabatan Fungsional	5.381.496
	Koordinasi Penyusunan Rencana Kerja, Pembinaan dan Pengelolaan Anggaran	83.111.903
	Pembinaan Administrasi dan Pengelolaan Perlengkapan	8.490.677
	Pembinaan dan Koordinasi Pengelolaan SDM	25.696.004
	Pembinaan Administrasi dan Dukungan Pelayanan Pelaksanaan Tugas Kantor Pusat Kementerian	7.231.139.182
	Koordinasi dan Harmonisasi Pelaksanaan Kebijakan Menteri Keuangan	10.628.133
	Koordinasi dan Pengembangan Sistem Informasi dan Teknologi Keuangan	431.274.623
	Pengelolaan Investasi Pemerintah	39.787.696
	Pembinaan Teknis dan Layanan Pengadaan Secara Elektronik	19.861.772
	Pembinaan dan Pengawasan Profesi Akuntan Publik dan Penilai Publik	19.741.070
	Dukungan Pelayanan Pelaksanaan Tugas Kantor-Kantor Vertikal di Daerah yang Berkantor di GKN	216.846.482
	Penyelesaian Sengketa Pajak	53.074.452
	Dukungan Manajemen dan Dukungan Teknis Pelaksanaan Tugas Komite Pengawas Perpajakan	6.828.656
	PENDIDIKAN	716.539.945
	Program Dukungan Manajemen dan Pelaksanaan Tugas Teknis Lainnya Kementerian Keuangan	716.539.945
	Pengelolaan Dana Pengembangan Pendidikan Nasional	716.539.945
INSPEKTORAT JENDERAL		110.491.562
	PELAYANAN UMUM	110.491.562
	Program Pengawasan dan Peningkatan Akuntabilitas Aparatur Kementerian Keuangan	110.491.562
	Pelaksanaan Audit Investigasi dan Edukasi Anti KKN	3.413.157
	Perumusan Kebijakan dan Pelaksanaan Pengawasan serta Peningkatan Akuntabilitas Aparatur Kementerian Keuangan	29.753.019
	Pelaksanaan Program Transformasi Pengawasan	3.130.117
	Dukungan Manajemen dan Dukungan Teknis Lainnya Inspektorat Jendral	74.195.269
DITJEN ANGGARAN		156.441.709
	PELAYANAN UMUM	156.441.709
	Program Pengelolaan Anggaran Negara	156.441.709
	Pengelolaan Anggaran Belanja Pemerintah Pusat (ABPP)	7.458.400
	Penyusunan dan Penyampaian Laporan Keuangan Belanja Subsidi dan Belanja Lain-Lain (BSBL)	998.100
	Penyusunan Rancangan APBN	5.210.352
	Pengelolaan PNBP dan Subsidi	5.785.396
	Pengembangan Sistem Penganggaran	7.201.353
	Dukungan Manajemen dan Dukungan Teknis Lainnya Ditjen Anggaran	127.436.318

www.peraturan.go.id

LAMPIRAN III

RINCIAN ANGGARAN BELANJA PEMERINTAH PUSAT PADA BAGIAN ANGGARAN KEMENTERIAN NEGARA/LEMBAGA

K/L : KEMENTERIAN KEUANGAN

(dalam ribuan rupiah)

UNIT ORGANISASI	FUNGSI/PROGRAM/KEGIATAN	ALOKASI ANGGARAN
1	2	3
	Harmonisasi Peraturan Penganggaran	2.351.790
DITJEN PAJAK		**9.112.565.327**
	PELAYANAN UMUM	**9.112.565.327**
	Program Peningkatan dan Pengamanan Penerimaan Pajak	**9.112.565.327**
	Peningkatan Kualitas Pelayanan serta Efektivitas Penyuluhan dan Kehumasan	128.194.575
	Pembinaan Pemantauan dan Dukungan Teknis di Bidang Teknologi, Komunikasi dan Informasi Perpajakan	404.658.101
	Pelaksanaan Reformasi Proses Bisnis	3.108.836
	Peningkatan Pelaksanaan Ekstensifikasi Perpajakan	20.964.710
	Peningkatan Kegiatan Intelijen dan Efektivitas Penyidikan Perpajakan	19.886.881
	Peningkatan Pelayanan di Bidang Penyelesaian Keberatan dan Banding	8.083.192
	Peningkatan, Pembinaan dan Pengawasan SDM, dan Pengembangan Organisasi	23.849.364
	Peningkatan Efektivitas Pemeriksaan, dan Optimalisasi Pelaksanaan Penagihan	31.482.036
	Perumusan Kebijakan, Standardisasi dan Bimbingan Teknis, Evaluasi dan Pelaksanaan di Bidang Analisis dan Evaluasi Penerimaan Perpajakan	14.091.087
	Perumusan Kebijakan di Bidang PPN, PBB, KUP, PPSP, dan Bea Meterai	11.754.411
	Perumusan Kebijakan di Bidang PPh dan Perjanjian Kerja Sama Perpajakan Internasional	18.806.152
	Perencanaan, Pengembangan, dan Evaluasi di Bidang Teknologi, Komunikasi dan Informasi	1.117.472.726
	Pembinaan Penyelenggaraan Perpajakan dan Penyelesaian Keberatan di Bidang Perpajakan di Daerah	648.590.161
	Pelaksanaan Penyuluhan, Pelayanan, Pengawasan dan Konsultasi Perpajakan di Daerah	3.754.235.600
	Pengelolaan Data dan Dokumen Perpajakan	130.537.216
	Dukungan Manajemen dan Dukungan Teknis Lainnya DJP	2.723.252.427
	Pelaksanaan Kegiatan Layanan Informasi Umum Perpajakan dan Pengelolaan Pengaduan	53.587.852
DITJEN BEA DAN CUKAI		**3.956.161.867**
	PELAYANAN UMUM	**3.956.161.867**
	Program Pengawasan Pelayanan dan Penerimaan di Bidang Kepabeanan dan Cukai	**3.956.161.867**
	Peningkatan Pelayanan Kepabeanan dan Cukai di Daerah	23.435.176
	Pelaksanaan Audit Bidang Kepabeanan dan Cukai	38.158.237
	Perumusan Kebijakan dan Bimbingan Teknis Bidang Cukai	352.298.205
	Perumusan Kebijakan dan Bimbingan Teknis Fasilitas Kepabeanan	1.729.030
	Perumusan Kebijakan dan Pengembangan Teknologi Informasi Kepabeanan dan Cukai	196.613.743
	Perumusan Kebijakan dan Evaluasi Pelaksanaan Kerja Sama Internasional	3.627.561
	Perumusan Kebijakan dan Peningkatan Pengelolaan Penerimaan Bea dan Cukai	21.834.352
	Pelaksanaan Pengawasan dan Penindakan Atas Pelanggaran Peraturan Perundangan, Intelijen dan Penyidikan Tindak Pidana Kepabeanan dan Cukai	1.419.323.130
	Perumusan Kebijakan dan Bimbingan Teknis Bidang Kepabeanan	3.154.290
	Pembinaan Penyelenggaraan Kepabeanan dan Cukai di Daerah	255.170.286
	Peningkatan Pengawasan dan Pelayanan Kepabeanan dan Cukai di Daerah	812.595.926
	Pembinaan Penyelenggaraan Kepabeanan dan Cukai Utama	150.709.617
	Peningkatan Pelayanan Pangkalan Sarana Operasi	112.641.920

www.peraturan.go.id

LAMPIRAN III

RINCIAN ANGGARAN BELANJA PEMERINTAH PUSAT PADA BAGIAN ANGGARAN KEMENTERIAN NEGARA/LEMBAGA

K/L : KEMENTERIAN KEUANGAN

(dalam ribuan rupiah)

UNIT ORGANISASI	FUNGSI/PROGRAM/KEGIATAN	ALOKASI ANGGARAN
1	2	3
	Peningkatan Pengawasan dan Pelayanan Kepabeanan dan Cukai pada Perwakilan Luar Negeri	6.714.477
	Perumusan Kebijakan di Bidang Kepatuhan Internal	3.680.669
	Dukungan Manajemen dan Dukungan Teknis Lainnya DJBC	554.475.248
DITJEN PERIMBANGAN KEUANGAN		**165.163.319**
PELAYANAN UMUM		**165.163.319**
Program Peningkatan Pengelolaan Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah		**165.163.319**
	Perumusan Kebijakan, Bimbingan Teknis, dan Pengelolaan Transfer ke Daerah	57.675.766
	Perumusan Kebijakan, Pemantauan dan Evaluasi di Bidang Pendanaan Daerah dan Ekonomi Daerah, Penyusunan Laporan Keuangan Transfer ke Daerah, serta Pengembangan Sistem Informasi Keuangan Daerah	8.368.319
	Perumusan Kebijakan, Bimbingan Teknis, Monitoring dan Evaluasi di Bidang PDRD	3.140.600
	Perumusan Kebijakan, Bimbingan Teknis, Monitoring dan Evaluasi di Bidang Pembiayaan dan Kapasitas Daerah	14.994.041
	Dukungan Manajemen dan Dukungan Teknis Lainnya Ditjen Perimbangan Keuangan	80.984.593
DITJEN PENGELOLAAN UTANG		**87.254.495**
PELAYANAN UMUM		**87.254.495**
Program Pengelolaaan Pembiayaan dan Risiko		**87.254.495**
	Pelaksanaan Evaluasi, Akuntansi dan Setelmen Utang	1.339.500
	Pengelolaan Pembiayaan Syariah	4.593.330
	Pengelolaan Pinjaman	3.128.992
	Pengelolaan Strategi dan Portofolio Utang	3.882.744
	Pengelolaan Surat Utang Negara	5.870.210
	Dukungan Manajemen dan Dukungan Teknis Lainnya Ditjen Pengelolaan Utang	59.979.119
	Pengelolaan Risiko Keuangan Negara	4.224.796
	Pengelolaan Dukungan Pemerintah dan Pembiayaan Infrastruktur	4.235.804
DITJEN PERBENDAHARAAN		**1.794.022.006**
PELAYANAN UMUM		**1.794.022.006**
Program Pengelolaan Perbendaharaan Negara		**1.794.022.006**
	Penyelenggaraan Pertanggungjawaban Pelaksanaan Anggaran	22.971.642
	Pembinaan Pelaksanaan Anggaran	7.793.200
	Pembinaan Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum	5.949.364
	Peningkatan Pengelolaan Kas Negara	219.103.157
	Manajemen Investasi dan Penerusan Pinjaman	66.124.180
	Pembinaan Sistem dan Dukungan Teknis Perbendaharaan	15.165.051
	Pengembangan Sistem Perbendaharaan	129.425.400
	Penyelenggaraan Kuasa Bendahara Umum Negara	619.647.718
	Pembinaan Pelaksanaan Perbendaharaan di Wilayah	311.323.423
	Dukungan Manajemen dan Dukungan Teknis Lainnya Ditjen Perbendaharaan	396.518.871
DITJEN KEKAYAAN NEGARA		**646.380.965**
PELAYANAN UMUM		**646.380.965**
Program Pengelolaan Kekayaan Negara Penyelesaian Pengurusan Piutang Negara dan Pelayanan Lelang		**646.380.965**

www.peraturan.go.id

LAMPIRAN III

RINCIAN ANGGARAN BELANJA PEMERINTAH PUSAT PADA BAGIAN ANGGARAN KEMENTERIAN NEGARA/LEMBAGA

K/L : KEMENTERIAN KEUANGAN

(dalam ribuan rupiah)

UNIT ORGANISASI	FUNGSI/PROGRAM/KEGIATAN	ALOKASI ANGGARAN
1	2	3
	Perumusan Kebijakan, Standardisasi, Bimbingan Teknis dan Evaluasi di Bidang Barang Milik Negara	5.362.202
	Perumusan Kebijakan, Standardisasi, Bimbingan Teknis, Evaluasi, dan Pengelolaan Kekayaan Negara Dipisahkan	4.512.459
	Perumusan Peraturan Perundangan, Pemberian Bantuan Hukum serta Penyediaan Informasi	4.226.574
	Pelaksanaan Kebijakan dan Standardisasi Teknis di Bidang Pengelolaan Kekayaan Negara dan Sistem Informasi	25.689.447
	Perumusan Kebijakan, Standardisasi, Bimbingan Teknis, Evaluasi dan Pengawasan Pelaksanaan Lelang	3.208.105
	Perumusan Kebijakan, Standardisasi, Bimbingan Teknis, Analisis, Supervisi, Evaluasi dan Rekomendasi Penilaian	3.804.966
	Perumasan Kebijakan, Standardisasi, Bimbingan Teknis, Perencanaan, dan Evaluasi Atas Pelaksanaan Pengurusan Piutang Negara dan Pengelolaan Kekayaan Negara Lain-lain	4.264.400
	Pengelolaan Kekayaan Negara, Penyelesaian Pengurusan Piutang Negara dan Pelayanan Lelang di Wilayah Kerja Kanwil DJKN	135.178.708
	Pengelolaan Kekayaan Negara, Penyelesaian Pengurusan Piutang Negara dan Pelayanan Lelang di Wilayah Kerja KPKNL	321.438.338
	Dukungan Manajemen dan Dukungan Teknis Lainnya Ditjen Kekayaan Negara	138.695.766
BADAN PENDIDIKAN DAN PELATIHAN KEUANGAN		**619.543.304**
PELAYANAN UMUM		**619.543.304**
Program Pendidikan dan Pelatihan Aparatur di Bidang Keuangan Negara		**619.543.304**
	Pengembangan SDM Melalui Penyelenggaraan Pendidikan dan Pelatihan Keuangan Negara di Daerah	103.558.088
	Pengembangan SDM Melalui Penyelenggaraan Diklat Teknis dan Fungsional di Bidang Anggaran dan Perbendaharaan	23.144.096
	Pengembangan SDM Melalui Penyelenggaraan Diklat Teknis dan Fungsional di Bidang Kepabeanan dan Cukai	25.029.742
	Pengembangan SDM Melalui Penyelenggaraan Diklat Teknis dan Fungsional di Bidang Kekayaan Negara dan Perimbangan Keuangan	18.088.548
	Pengembangan SDM Melalui Penyelenggaraan Diklat Teknis dan Fungsional di Bidang Selain Anggaran, Perbendaharaan, Perpajakan, Kepabeanan, Cukai, Kekayaan Negara dan Perimbangan Keuangan	19.660.906
	Pengembangan SDM Melalui Penyelenggaraan Diklat Teknis dan Fungsional di Bidang Perpajakan	106.159.294
	Pengembangan SDM Melalui Penyelenggaraan Diklat Kepemimpinan dan Manajemen serta Pendidikan Pasca Sarjana Bagi Pegawai Kementerian Keuangan	190.676.398
	Pengembangan SDM Melalui Penyelenggaraan Pendidikan Program Diploma Keuangan	86.105.600
	Penyelenggaraan Dukungan Manajemen dan Dukungan Teknis Lainnya Bagi Unit Kerja di Lingkungan BPPK	47.120.632
PENDIDIKAN		**86.105.600**
Program Pendidikan dan Pelatihan Aparatur di Bidang Keuangan Negara		**86.105.600**
	Pengembangan SDM Melalui Penyelenggaraan Pendidikan Program Diploma Keuangan	86.105.600
BADAN KEBIJAKAN FISKAL		**133.511.742**
PELAYANAN UMUM		**133.511.742**
Program Perumusan Kebijakan Fiskal		**133.511.742**
	Perumusan Kebijakan APBN	7.604.410
	Perumusan Kebijakan Ekonomi	9.755.278
	Perumusan Kebijakan Pembiayaan Perubahan Iklim dan Multilateral	13.685.253
	Perumusan Kebijakan Pajak, Kepabeanan, Cukai dan PNBP	8.843.449
	Pengelolaan Risiko Fiskal dan Sektor Keuangan	3.507.090
	Dukungan Manajemen dan Dukungan Teknis Lainnya Badan Kebijakan Fiskal	79.253.153

www.peraturan.go.id

LAMPIRAN III

RINCIAN ANGGARAN BELANJA PEMERINTAH PUSAT PADA BAGIAN ANGGARAN KEMENTERIAN NEGARA/LEMBAGA

K/L : KEMENTERIAN KEUANGAN

(dalam ribuan rupiah)

UNIT ORGANISASI	FUNGSI/PROGRAM/KEGIATAN	ALOKASI ANGGARAN
1	2	3
	Perumusan Kebijakan dan Pelaksanaan Kerja Sama Keuangan Regional dan Bilateral	10.863.109

www.peraturan.go.id

LAMPIRAN III

RINCIAN ANGGARAN BELANJA PEMERINTAH PUSAT PADA BAGIAN ANGGARAN KEMENTERIAN NEGARA/LEMBAGA

K/L : KEMENTERIAN PERTANIAN

(dalam ribuan rupiah)

UNIT ORGANISASI	FUNGSI/PROGRAM/KEGIATAN	ALOKASI ANGGARAN
1	2	3
KEMENTERIAN PERTANIAN		32.797.980.657
SEKRETARIAT JENDERAL		1.314.272.088
	PELAYANAN UMUM	1.314.272.088
	Program Dukungan Manajemen dan Pelaksanaan Tugas Teknis Lainnya Kementerian Pertanian	1.314.272.088
	Pembinaan Hukum dan Pengelolaan Informasi Publik Bidang Pertanian	17.087.900
	Pengembangan Kerja Sama Luar Negeri Untuk Bidang Pangan dan Pertanian dalam Kerangka Bilateral, Regional dan Multilateral	29.957.400
	Pengelolaan Keuangan, Perlengkapan dan Kearsipan Kementerian Pertanian	809.661.737
	Peningkatan Kualitas Kelembagaan, Ketatalaksanaan dan Kepegawaian	22.122.500
	Koordinasi dan Pembinaan Perencanaan Kementerian Pertanian	71.587.600
	Pengembangan Perstatistikan dan Sistem Informasi Pertanian	55.793.300
	Penyelenggaraan Ketatausahaan Kementerian Pertanian, Kerumahtanggaan dan Pelaksanaan Hubungan Masyarakat di Bidang Pertanian	281.036.400
	Perlindungan Varietas Tanaman dan Perizinan Pertanian	27.025.251
INSPEKTORAT JENDERAL		115.528.200
	PELAYANAN UMUM	78.978.460
	Program Pengawasan dan Peningkatan Akuntabilitas Aparatur Kementerian Pertanian	78.978.460
	Dukungan Manajemen dan Dukungan Teknis Lainnya pada Inspektorat Jenderal	78.978.460
	EKONOMI	36.549.740
	Program Pengawasan dan Peningkatan Akuntabilitas Aparatur Kementerian Pertanian	36.549.740
	Peningkatan Pelaksanaan Pengawasan pada Satker Lingkup Setjen, Ditjen Hortikultura, dan Badan Penyuluhan dan Pengembangan SDM Pertanian	8.025.203
	Peningkatan Pelaksanaan Pengawasan pada Satker Lingkup Ditjen Tanaman Pangan, Ditjen Prasarana dan Sarana Pertanian Serta Badan Ketahanan Pangan	7.970.777
	Peningkatan Pelaksanaan Pengawasan pada Satker Lingkup Ditjen Perkebunan, Ditjen P2Hp, dan Badan Litbang Pertanian	7.481.093
	Peningkatan Pelaksanaan Pengawasan pada Satker Lingkup Inspektorat Jenderal, Ditjen Peternakan dan Kesehatan Hewan, Badan Karantina Pertanian	7.403.093
	Peningkatan Pelaksanaan Pengawasan Tujuan Tertentu pada Satker Lingkup Kementerian Pertanian	5.669.574
DITJEN TANAMAN PANGAN		2.833.204.375
	PELAYANAN UMUM	233.296.837
	Program Peningkatan Produksi Produktivitas dan Mutu Hasil Tanaman Pangan	233.296.837
	Dukungan Manajemen dan Teknis Lainnya pada Ditjen Tanaman Pangan	233.296.837
	EKONOMI	2.599.907.538
	Program Peningkatan Produksi Produktivitas dan Mutu Hasil Tanaman Pangan	2.599.907.538
	Pengelolaan Produksi Tanaman Aneka Kacang dan Umbi	957.500.205
	Pengelolaan Produksi Tanaman Serealia	1.344.060.399
	Pengelolaan Sistem Penyediaan Benih Tanaman Pangan	95.142.546
	Penguatan Perlindungan Tanaman Pangan Dari Gangguan OPT dan DPI	103.998.736
	Penanganan Pasca Panen Tanaman Pangan	78.498.554
	Pengembangan Metode Pengujian Mutu Benih dan Penerapan Sistem Mutu Laboratorium Pengujian Benih	7.522.818
	Pengembangan Peramalan Serangan Organisme Pengganggu Tumbuhan	13.184.280
DITJEN HORTIKULTURA		1.129.094.900

www.peraturan.go.id

LAMPIRAN III

RINCIAN ANGGARAN BELANJA PEMERINTAH PUSAT PADA BAGIAN ANGGARAN KEMENTERIAN NEGARA/LEMBAGA

K/L : KEMENTERIAN PERTANIAN

(dalam ribuan rupiah)

UNIT ORGANISASI	FUNGSI/PROGRAM/KEGIATAN	ALOKASI ANGGARAN
1	2	3
	PELAYANAN UMUM	**165.812.027**
	Program Peningkatan Produksi dan Produktivitas Hortikultura Ramah Lingkungan	**165.812.027**
	Dukungan Manajemen dan Teknis Lainnya pada Ditjen Hortikultura	165.812.027
	EKONOMI	**963.282.873**
	Program Peningkatan Produksi dan Produktivitas Hortikultura Ramah Lingkungan	**963.282.873**
	Peningkatan Produksi dan Produktivitas Produk Buah Ramah Lingkungan	115.693.860
	Peningkatan Produksi dan Produktivitas Produk Florikultura Ramah Lingkungan	48.964.178
	Peningkatan Produksi dan Produktivitas Produk Sayuran dan Tanaman Obat Ramah Lingkungan	614.865.505
	Pengembangan Sistem Perbenihan Hortikultura	90.706.399
	Pengembangan Sistem Perlindungan Tanaman Hortikultura Ramah Lingkungan	93.052.931
DITJEN PERKEBUNAN		**4.754.153.234**
	PELAYANAN UMUM	**194.583.299**
	Program Peningkatan Produksi dan Produktivitas Tanaman Perkebunan Berkelanjutan	**194.583.299**
	Dukungan Manajemen dan Dukungan Teknis Lainnya Ditjen Perkebunan	194.583.299
	EKONOMI	**4.559.569.935**
	Program Peningkatan Produksi dan Produktivitas Tanaman Perkebunan Berkelanjutan	**4.559.569.935**
	Peningkatan Produksi dan Produktivitas Tanaman Rempah dan Penyegar	1.921.251.405
	Peningkatan Produksi dan Produktivitas Tanaman Semusim	1.953.609.130
	Peningkatan Produksi dan Produktivitas Tanaman Tahunan	392.155.550
	Dukungan Penanganan Pasca Panen dan Pembinaan Usaha	47.777.599
	Dukungan Perlindungan Perkebunan	174.404.758
	Dukungan Pengujian dan Pengawasan Mutu Benih serta Penyiapan Teknologi Proteksi Tanaman Perkebunan	70.371.493
DITJEN PETERNAKAN DAN KESEHATAN HEWAN		**3.330.256.794**
	PELAYANAN UMUM	**293.797.198**
	Program Pemenuhan Pangan Asal Ternak dan Agribisnis Peternakan Rakyat	**293.797.198**
	Dukungan Manajemen dan Dukungan Teknis Lainnya Ditjen Peternakan	293.797.198
	EKONOMI	**3.036.459.596**
	Program Pemenuhan Pangan Asal Ternak dan Agribisnis Peternakan Rakyat	**3.036.459.596**
	Peningkatan Produksi Ternak	1.209.654.574
	Peningkatan Produksi Pakan Ternak	887.632.188
	Pengendalian dan Penanggulangan Penyakit Hewan Menular Strategis dan Penyakit Zoonosis	389.479.900
	Peningkatan Kuantitas dan Kualitas Benih dan Bibit	370.789.262
	Penjaminan Produk Hewan yang ASUH dan Berdaya Saing	178.903.672
DITJEN PENGOLAHAN DAN PEMASARAN HASIL PERTANIAN		**653.276.200**
	PELAYANAN UMUM	**182.958.183**
	Program Peningkatan Nilai Tambah Daya Saing Mutu Pemasaran Hasil dan Investasi Pertanian	**182.958.183**
	Dukungan Manajemen dan Dukungan Teknis Lainnya Ditjen Pengolahan dan Pemasaran Hasil Pertanian	182.958.183
	EKONOMI	**470.318.017**
	Program Peningkatan Nilai Tambah Daya Saing Mutu Pemasaran Hasil dan Investasi Pertanian	**470.318.017**

www.peraturan.go.id

LAMPIRAN III

RINCIAN ANGGARAN BELANJA PEMERINTAH PUSAT PADA BAGIAN ANGGARAN KEMENTERIAN NEGARA/LEMBAGA

K/L : KEMENTERIAN PERTANIAN

(dalam ribuan rupiah)

UNIT ORGANISASI	FUNGSI/PROGRAM/KEGIATAN	ALOKASI ANGGARAN
1	2	3
	Pengembangan Mutu dan Standardisasi	43.696.252
	Pengembangan Pemasaran Domestik	79.810.016
	Pengembangan Pemasaran Internasional	13.944.792
	Pengembangan Usaha dan Investasi	33.835.075
	Pengembangan Pengolahan Hasil Pertanian	299.031.882
DITJEN PRASARANA DAN SARANA PERTANIAN		**14.004.237.306**
PELAYANAN UMUM		**1.534.442.909**
	Program Penyediaan dan Pengembangan Prasarana dan Sarana Pertanian	**1.534.442.909**
	Dukungan Manajemen dan Dukungan Teknis Lainnya Ditjen Prasarana dan Sarana Pertanian	1.076.108.979
	Fasilitas Pupuk dan Pestisida	458.333.930
EKONOMI		**12.469.794.397**
	Program Penyediaan dan Pengembangan Prasarana dan Sarana Pertanian	**12.469.794.397**
	Pengelolaan Air Irigasi Untuk Pertanian	5.010.660.350
	Perluasan Areal dan Pengelolaan Lahan Pertanian	3.927.571.466
	Pengelolaan Sistem Penyediaan dan Pengawasan Alat Mesin Pertanian	2.907.891.881
	Pelayanan Pembiayaan Pertanian dan Pengembangan Usaha Agribisnis Perdesaan (PUAP)	623.670.700
BADAN PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN PERTANIAN		**1.990.046.908**
PELAYANAN UMUM		**419.083.429**
	Program Penciptaan Teknologi dan Inovasi Pertanian Bio-Industri Berkelanjutan	**419.083.429**
	Dukungan Manajemen, Fasilitasi dan Instrumen Teknis dalam Pelaksanaan Kegiatan Litbang Pertanian	419.083.429
EKONOMI		**1.570.963.479**
	Program Penciptaan Teknologi dan Inovasi Pertanian Bio-Industri Berkelanjutan	**1.570.963.479**
	Penelitian dan Pengembangan Bioteknologi dan Sumber Daya Genetik Pertanian	40.432.930
	Penelitian dan Pengembangan Pasca Panen Pertanian	32.568.907
	Penelitian dan Pengembangan Sumber Daya Lahan Pertanian	147.348.056
	Pengkajian dan Percepatan Diseminasi Inovasi Teknologi Pertanian	746.781.760
	Penelitian/Perekayasaan dan Pengembangan Mekanisasi Pertanian	34.031.896
	Penelitian/Analisis Sosial Ekonomi dan Kebijakan Pertanian	33.450.678
	Penelitian dan Pengembangan Tanaman Hortikultura	103.730.073
	Penelitian dan Pengembangan Tanaman Perkebunan	119.101.167
	Penelitian dan Pengembangan Peternakan	115.336.833
	Penelitian dan Pengembangan Tanaman Pangan	165.837.896
	Pengembangan Perpustakaan dan Penyebaran Teknologi Pertanian	32.343.283
BADAN PENYULUHAN DAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA PERTANIAN		**1.293.608.002**
PELAYANAN UMUM		**62.915.116**
	Program Peningkatan Penyuluhan Pendidikan dan Pelatihan Pertanian	**62.915.116**
	Dukungan Manajemen dan Dukungan Teknis Lainnya Badan Penyuluhan dan Pengembangan SDM Pertanian	62.915.116
EKONOMI		**1.171.089.867**
	Program Peningkatan Penyuluhan Pendidikan dan Pelatihan Pertanian	**1.171.089.867**

www.peraturan.go.id

LAMPIRAN III

RINCIAN ANGGARAN BELANJA PEMERINTAH PUSAT PADA BAGIAN ANGGARAN KEMENTERIAN NEGARA/LEMBAGA

K/L : KEMENTERIAN PERTANIAN

(dalam ribuan rupiah)

UNIT ORGANISASI	FUNGSI/PROGRAM/KEGIATAN	ALOKASI ANGGARAN
1	2	3
	Pemantapan Sistem Pelatihan Pertanian	299.451.146
	Revitalisasi Pendidikan Pertanian serta Pengembangan Standardisasi dan Sertifikasi Profesi SDM Pertanian	191.010.423
	Pemantapan Sistem Penyuluhan Pertanian	680.628.298
	PENDIDIKAN	**59.603.019**
	Program Peningkatan Penyuluhan Pendidikan dan Pelatihan Pertanian	**59.603.019**
	Pendidikan Menengah Pertanian	59.603.019
	BADAN KETAHANAN PANGAN	**632.384.900**
	PELAYANAN UMUM	**285.752.050**
	Program Peningkatan Diversifikasi dan Ketahanan Pangan Masyarakat	**285.752.050**
	Dukungan Manajemen dan Teknis Lainnya Badan Ketahanan Pangan	285.752.050
	EKONOMI	**346.632.850**
	Program Peningkatan Diversifikasi dan Ketahanan Pangan Masyarakat	**346.632.850**
	Pengembangan Sistem Distribusi dan Stabilitas Harga Pangan	105.002.573
	Pengembangan Ketersediaan dan Penanganan Rawan Pangan	111.609.248
	Pengembangan Penganekaragaman Konsumsi dan Keamanan Pangan	130.021.029
	BADAN KARANTINA PERTANIAN	**747.917.750**
	PELAYANAN UMUM	**118.707.832**
	Program Peningkatan Kualitas Pengkarantinaan Pertanian dan Pengawasan Keamanan Hayati	**118.707.832**
	Dukungan Manajemen dan Dukungan Teknis Lainnya pada Badan Karantina Pertanian	118.707.832
	EKONOMI	**629.209.918**
	Program Peningkatan Kualitas Pengkarantinaan Pertanian dan Pengawasan Keamanan Hayati	**629.209.918**
	Peningkatan Kepatuhan, Kerja Sama dan Pengembangan Sistem Informasi Perkarantinaan	10.484.178
	Peningkatan Sistem Karantina Hewan dan Keamanan Hayati Hewani	8.161.222
	Peningkatan Sistem Karantina Tumbuhan dan Keamanan Hayati Nabati	9.851.793
	Peningkatan Kualitas Penyelenggaraan Laboratorium Uji Standar dan Uji Terap Teknik dan Metoda Karantina Pertanian	35.348.060
	Peningkatan Kualitas Pelayanan Karantina Pertanian dan Pengawasan Keamanan Hayati	565.364.665

www.peraturan.go.id

LAMPIRAN III

RINCIAN ANGGARAN BELANJA PEMERINTAH PUSAT PADA BAGIAN ANGGARAN KEMENTERIAN NEGARA/LEMBAGA

K/L : KEMENTERIAN PERINDUSTRIAN

(dalam ribuan rupiah)

UNIT ORGANISASI	FUNGSI/PROGRAM/KEGIATAN	ALOKASI ANGGARAN
1	2	3
KEMENTERIAN PERINDUSTRIAN		4.548.315.143
SEKRETARIAT JENDERAL		1.115.007.396
	PELAYANAN UMUM	611.868.368
	Program Pengembangan SDM Industri dan Dukungan Manajemen Kementerian Perindustrian	591.563.085
	Pelayanan Hukum dan Penataan Organisasi	22.562.826
	Peningkatan Pelayanan Administrasi dan Manajemen Perkantoran Berbasis Teknologi	35.728.578
	Pengembangan SDM Industri	11.127.383
	Peningkatan Sistem Tata Kelola Keuangan dan Barang Milik Negara yang Profesional	130.205.970
	Peningkatan Kualitas Perencanaan dan Pelaporan	26.396.532
	Pembangunan Sistem Informasi Industri yang Terintegrasi dan Handal	31.296.253
	Peningkatan Pengelolaan Pelayanan dan Komunikasi Publik	304.703.888
	Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur Kementerian Perindustrian	29.541.655
	Pembangunan, Pengadaan, Perbaikan dan Peningkatan Sarana dan Prasarana Kerja	20.305.283
	PENDIDIKAN	20.305.283
	Program Pengembangan SDM Industri dan Dukungan Manajemen Kementerian Perindustrian	503.139.028
	Peningkatan Kualitas SDM Industri	503.139.028
	Peningkatan Kualitas Pendidikan Vokasi Industri	503.139.028
DIREKTORAT JENDERAL INDUSTRI AGRO		354.789.761
	EKONOMI	354.789.761
	Program Penumbuhan dan Pengembangan Industri Berbasis Agro	354.789.761
	Revitalisasi dan Penumbuhan Industri Hasil Hutan dan Perkebunan	48.249.623
	Revitalisasi dan Penumbuhan Industri Minuman dan Tembakau	39.511.200
	Revitalisasi dan Penumbuhan Industri Makanan, Hasil Laut dan Perikanan	186.155.511
	Penyusunan dan Evaluasi Program Revitalisasi dan Penumbuhan Industri Agro	80.873.427
DIREKTORAT JENDERAL BASIS INDUSTRI MANUFAKTUR		354.575.743
	EKONOMI	354.575.743
	Program Penumbuhan dan Pengembangan Industri Logam Kimia Tekstil dan Aneka	354.575.743
	Revitalisasi dan Penumbuhan Industri Tekstil dan Aneka	181.657.476
	Revitalisasi dan Penumbuhan Industri Kimia Hilir	33.217.074
	Revitalisasi dan Penumbuhan Industri Kimia Dasar	24.628.316
	Revitalisasi dan Penumbuhan Industri Material Dasar Logam	32.708.600
	Penyusunan dan Evaluasi Program Revitalisasi dan Penumbuhan Basis Industri Manufaktur	82.364.277
DIREKTORAT JENDERAL INDUSTRI UNGGULAN BERBASIS TEKNOLOGI TINGGI		369.035.768
	EKONOMI	369.035.768
	Program Penumbuhan dan Pengembangan Industri Alat Transportasi Mesin Elektronika dan Alat Pertahanan	369.035.768
	Penumbuhan Industri Alat Transportasi Darat	35.500.000
	Penumbuhan Industri Maritim dan Kedirgantaraan dan Alat Pertahanan	25.450.000
	Penumbuhan Industri Elektronika dan Telematika	33.651.000
	Penyusunan dan Evaluasi Program Penumbuhan Industri Unggulan Berbasis Teknologi Tinggi	199.644.768

www.peraturan.go.id

LAMPIRAN III

RINCIAN ANGGARAN BELANJA PEMERINTAH PUSAT PADA BAGIAN ANGGARAN KEMENTERIAN NEGARA/LEMBAGA

K/L : KEMENTERIAN PERINDUSTRIAN

(dalam ribuan rupiah)

UNIT ORGANISASI	FUNGSI/PROGRAM/KEGIATAN	ALOKASI ANGGARAN
1	2	3
	Penumbuhan Industri Permesinan dan Alat Mesin Pertanian	74.790.000
DIREKTORAT JENDERAL INDUSTRI KECIL DAN MENENGAH		**622.945.133**
	EKONOMI	**622.945.133**
	Program Penumbuhan dan Pengembangan Industri Kecil dan Menengah	**622.945.133**
	Penyebaran dan Penumbuhan Industri Kecil dan Menengah Wilayah I	163.335.000
	Penyebaran dan Penumbuhan Industri Kecil dan Menengah Wilayah II	213.118.000
	Penyebaran dan Penumbuhan Industri Kecil dan Menengah Wilayah III	164.897.000
	Penyusunan dan Evaluasi Program Revitalisasi dan Penumbuhan Industri Kecil Menengah	81.595.133
INSPEKTORAT JENDERAL		**46.179.969**
	EKONOMI	**46.179.969**
	Program Pengawasan dan Peningkatan Akuntabilitas Aparatur Kementerian Perindustrian	**46.179.969**
	Peningkatan Pengawasan dan Akuntabilitas Pelaksanaan Program Pengembangan Industri Inspektorat I	3.376.517
	Peningkatan Pengawasan dan Akuntabilitas Pelaksanaan Program Pengembangan Industri Inspektorat II	3.533.052
	Peningkatan Pengawasan dan Akuntabilitas Pelaksanaan Program Pengembangan Industri Inspektorat III	3.442.642
	Peningkatan Pengawasan dan Akuntabilitas Pelaksanaan Program Pengembangan Industri Inspektorat IV	3.626.179
	Dukungan Manajemen, Pembinaan, Pemantauan Tindak Lanjut Hasil Pengawasan serta Dukungan Teknis Lainnya Inspektorat Jenderal	32.201.579
BADAN PENGKAJIAN KEBIJAKAN IKLIM DAN MUTU INDUSTRI		**564.028.674**
	EKONOMI	**564.028.674**
	Program Pengembangan Teknologi dan Kebijakan Industri	**564.028.674**
	Pengkajian Kebijakan dan Iklim Usaha Industri	6.797.000
	Perencanaan Kebijakan Standardisasi Industri	17.975.400
	Pengkajian Industri Hijau dan Lingkungan Hidup	13.489.000
	Penyusunan Rencana dan Evaluasi Program Kebijakan Iklim Usaha dan Mutu Industri	38.567.949
	Pengkajian Teknologi dan Hak Kekayaan Intelektual	14.315.653
	Penelitian dan Pengembangan Teknologi Kimia dan Kemasan	24.303.784
	Penelitian dan Pengembangan Teknologi Tekstil	22.394.826
	Penelitian dan Pengembangan Teknologi Kulit Karet dan Plastik	24.404.302
	Penelitian dan Pengembangan Teknologi Industri Agro	44.790.480
	Penelitian dan Pengembangan Teknologi Pulp dan Kertas	21.658.970
	Penelitian dan Pengembangan Teknologi Hasil Perkebunan	16.989.949
	Penelitian dan Pengembangan Teknologi Logam dan Mesin	28.051.665
	Penelitian dan Pengembangan Teknologi Keramik	25.328.897
	Penelitian dan Pengembangan Teknologi Bahan dan Barang Teknik	46.617.622
	Penelitian dan Pengembangan Teknologi Pencegahan Pencemaran Industri	27.956.438
	Penelitian dan Pengembangan Teknologi Kerajinan dan Batik	22.288.218
	Riset dan Standardisasi Bidang Industri	168.098.521
DIREKTORAT JENDERAL PENGEMBANGAN PERWILAYAHAN INDUSTRI		**1.071.892.000**
	EKONOMI	**1.071.892.000**
	Program Penumbuhan dan Pengembangan Perwilayahan Persebaran Industri	**1.071.892.000**

www.peraturan.go.id

LAMPIRAN III

RINCIAN ANGGARAN BELANJA PEMERINTAH PUSAT PADA BAGIAN ANGGARAN KEMENTERIAN NEGARA/LEMBAGA

K/L : KEMENTERIAN PERINDUSTRIAN

(dalam ribuan rupiah)

UNIT ORGANISASI	FUNGSI/PROGRAM/KEGIATAN	ALOKASI ANGGARAN
1	2	3
	Pengembangan Fasilitasi Industri Wilayah I	376.818.000
	Pengembangan Fasilitasi Industri Wilayah II	19.750.000
	Pengembangan Fasilitasi Industri Wilayah III	642.350.000
	Penyusunan dan Evaluasi Program Pengembangan Perwilayahan Industri	32.974.000
DIREKTORAT JENDERAL KERJASAMA INDUSTRI INTERNASIONAL		**49.860.699**
EKONOMI		**49.860.699**
	Program Pengamanan Industri dan Kerjasama Internasional	**49.860.699**
	Peningkatan Ketahanan Industri	6.736.000
	Pengembangan Kerja Sama Industri Internasional Wilayah I dan Multilateral	8.447.600
	Pengembangan Kerja Sama Industri Internasional Wilayah II dan Regional	9.485.000
	Peningkatan Dukungan Fasilitasi dan Koordinasi Kerja Sama Industri Internasional	25.192.099

www.peraturan.go.id

LAMPIRAN III

RINCIAN ANGGARAN BELANJA PEMERINTAH PUSAT PADA BAGIAN ANGGARAN KEMENTERIAN NEGARA/LEMBAGA

K/L : KEMENTERIAN PERINDUSTRIAN

(dalam ribuan rupiah)

UNIT ORGANISASI	FUNGSI/PROGRAM/KEGIATAN	ALOKASI ANGGARAN
1	2	3
KEMENTERIAN PERINDUSTRIAN		**4.548.315.143**
SEKRETARIAT JENDERAL		**1.115.007.396**
PELAYANAN UMUM		**611.868.368**
	Program Pengembangan SDM Industri dan Dukungan Manajemen Kementerian Perindustrian	**591.563.085**
	Pelayanan Hukum dan Penataan Organisasi	22.562.826
	Peningkatan Pelayanan Administrasi dan Manajemen Perkantoran Berbasis Teknologi	35.728.578
	Pengembangan SDM Industri	11.127.383
	Peningkatan Sistem Tata Kelola Keuangan dan Barang Milik Negara yang Profesional	130.205.970
	Peningkatan Kualitas Perencanaan dan Pelaporan	26.396.532
	Pembangunan Sistem Informasi Industri yang Terintegrasi dan Handal	31.296.253
	Peningkatan Pengelolaan Pelayanan dan Komunikasi Publik	304.703.888
	Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur Kementerian Perindustrian	**29.541.655**
	Pembangunan, Pengadaan, Perbaikan dan Peningkatan Sarana dan Prasarana Kerja	20.305.283
PENDIDIKAN		**20.305.283**
	Program Pengembangan SDM Industri dan Dukungan Manajemen Kementerian Perindustrian	**503.139.028**
	Peningkatan Kualitas SDM Industri	503.139.028
	Peningkatan Kualitas Pendidikan Vokasi Industri	503.139.028
DIREKTORAT JENDERAL INDUSTRI AGRO		**354.789.761**
EKONOMI		**354.789.761**
	Program Penumbuhan dan Pengembangan Industri Berbasis Agro	**354.789.761**
	Revitalisasi dan Penumbuhan Industri Hasil Hutan dan Perkebunan	48.249.623
	Revitalisasi dan Penumbuhan Industri Minuman dan Tembakau	39.511.200
	Revitalisasi dan Penumbuhan Industri Makanan, Hasil Laut dan Perikanan	186.155.511
	Penyusunan dan Evaluasi Program Revitalisasi dan Penumbuhan Industri Agro	80.873.427
DIREKTORAT JENDERAL BASIS INDUSTRI MANUFAKTUR		**354.575.743**
EKONOMI		**354.575.743**
	Program Penumbuhan dan Pengembangan Industri Logam Kimia Tekstil dan Aneka	**354.575.743**
	Revitalisasi dan Penumbuhan Industri Tekstil dan Aneka	181.657.476
	Revitalisasi dan Penumbuhan Industri Kimia Hilir	33.217.074
	Revitalisasi dan Penumbuhan Industri Kimia Dasar	24.628.316
	Revitalisasi dan Penumbuhan Industri Material Dasar Logam	32.708.600
	Penyusunan dan Evaluasi Program Revitalisasi dan Penumbuhan Basis Industri Manufaktur	82.364.277
DIREKTORAT JENDERAL INDUSTRI UNGGULAN BERBASIS TEKNOLOGI TINGGI		**369.035.768**
EKONOMI		**369.035.768**
	Program Penumbuhan dan Pengembangan Industri Alat Transportasi Mesin Elektronika dan Alat Pertahanan	**369.035.768**
	Penumbuhan Industri Alat Transportasi Darat	35.500.000
	Penumbuhan Industri Maritim dan Kedirgantaraan dan Alat Pertahanan	25.450.000
	Penumbuhan Industri Elektronika dan Telematika	33.651.000
	Penyusunan dan Evaluasi Program Penumbuhan Industri Unggulan Berbasis Teknologi Tinggi	199.644.768

www.peraturan.go.id

LAMPIRAN III

RINCIAN ANGGARAN BELANJA PEMERINTAH PUSAT PADA BAGIAN ANGGARAN KEMENTERIAN NEGARA/LEMBAGA

K/L : KEMENTERIAN PERINDUSTRIAN

(dalam ribuan rupiah)

UNIT ORGANISASI	FUNGSI/PROGRAM/KEGIATAN	ALOKASI ANGGARAN
1	2	3
	Penumbuhan Industri Permesinan dan Alat Mesin Pertanian	74.790.000
DIREKTORAT JENDERAL INDUSTRI KECIL DAN MENENGAH		**622.945.133**
	EKONOMI	**622.945.133**
	Program Penumbuhan dan Pengembangan Industri Kecil dan Menengah	**622.945.133**
	Penyebaran dan Penumbuhan Industri Kecil dan Menengah Wilayah I	163.335.000
	Penyebaran dan Penumbuhan Industri Kecil dan Menengah Wilayah II	213.118.000
	Penyebaran dan Penumbuhan Industri Kecil dan Menengah Wilayah III	164.897.000
	Penyusunan dan Evaluasi Program Revitalisasi dan Penumbuhan Industri Kecil Menengah	81.595.133
INSPEKTORAT JENDERAL		**46.179.969**
	EKONOMI	**46.179.969**
	Program Pengawasan dan Peningkatan Akuntabilitas Aparatur Kementerian Perindustrian	**46.179.969**
	Peningkatan Pengawasan dan Akuntabilitas Pelaksanaan Program Pengembangan Industri Inspektorat I	3.376.517
	Peningkatan Pengawasan dan Akuntabilitas Pelaksanaan Program Pengembangan Industri Inspektorat II	3.533.052
	Peningkatan Pengawasan dan Akuntabilitas Pelaksanaan Program Pengembangan Industri Inspektorat III	3.442.642
	Peningkatan Pengawasan dan Akuntabilitas Pelaksanaan Program Pengembangan Industri Inspektorat IV	3.626.179
	Dukungan Manajemen, Pembinaan, Pemantauan Tindak Lanjut Hasil Pengawasan serta Dukungan Teknis Lainnya Inspektorat Jenderal	32.201.579
BADAN PENGKAJIAN KEBIJAKAN IKLIM DAN MUTU INDUSTRI		**564.028.674**
	EKONOMI	**564.028.674**
	Program Pengembangan Teknologi dan Kebijakan Industri	**564.028.674**
	Pengkajian Kebijakan dan Iklim Usaha Industri	6.797.000
	Perencanaan Kebijakan Standardisasi Industri	17.975.400
	Pengkajian Industri Hijau dan Lingkungan Hidup	13.489.000
	Penyusunan Rencana dan Evaluasi Program Kebijakan Iklim Usaha dan Mutu Industri	38.567.949
	Pengkajian Teknologi dan Hak Kekayaan Intelektual	14.315.653
	Penelitian dan Pengembangan Teknologi Kimia dan Kemasan	24.303.784
	Penelitian dan Pengembangan Teknologi Tekstil	22.394.826
	Penelitian dan Pengembangan Teknologi Kulit Karet dan Plastik	24.404.302
	Penelitian dan Pengembangan Teknologi Industri Agro	44.790.480
	Penelitian dan Pengembangan Teknologi Pulp dan Kertas	21.658.970
	Penelitian dan Pengembangan Teknologi Hasil Perkebunan	16.989.949
	Penelitian dan Pengembangan Teknologi Logam dan Mesin	28.051.665
	Penelitian dan Pengembangan Teknologi Keramik	25.328.897
	Penelitian dan Pengembangan Teknologi Bahan dan Barang Teknik	46.617.622
	Penelitian dan Pengembangan Teknologi Pencegahan Pencemaran Industri	27.956.438
	Penelitian dan Pengembangan Teknologi Kerajinan dan Batik	22.288.218
	Riset dan Standardisasi Bidang Industri	168.098.521
DIREKTORAT JENDERAL PENGEMBANGAN PERWILAYAHAN INDUSTRI		**1.071.892.000**
	EKONOMI	**1.071.892.000**
	Program Penumbuhan dan Pengembangan Perwilayahan Persebaran Industri	**1.071.892.000**

www.peraturan.go.id

LAMPIRAN III

RINCIAN ANGGARAN BELANJA PEMERINTAH PUSAT PADA BAGIAN ANGGARAN KEMENTERIAN NEGARA/LEMBAGA

K/L : KEMENTERIAN PERINDUSTRIAN

(dalam ribuan rupiah)

UNIT ORGANISASI	FUNGSI/PROGRAM/KEGIATAN	ALOKASI ANGGARAN
1	2	3
	Pengembangan Fasilitasi Industri Wilayah I	376.818.000
	Pengembangan Fasilitasi Industri Wilayah II	19.750.000
	Pengembangan Fasilitasi Industri Wilayah III	642.350.000
	Penyusunan dan Evaluasi Program Pengembangan Perwilayahan Industri	32.974.000
DIREKTORAT JENDERAL KERJASAMA INDUSTRI INTERNASIONAL		**49.860.699**
EKONOMI		**49.860.699**
	Program Pengamanan Industri dan Kerjasama Internasional	**49.860.699**
	Peningkatan Ketahanan Industri	6.736.000
	Pengembangan Kerja Sama Industri Internasional Wilayah I dan Multilateral	8.447.600
	Pengembangan Kerja Sama Industri Internasional Wilayah II dan Regional	9.485.000
	Peningkatan Dukungan Fasilitasi dan Koordinasi Kerja Sama Industri Internasional	25.192.099

www.peraturan.go.id

LAMPIRAN III

RINCIAN ANGGARAN BELANJA PEMERINTAH PUSAT PADA BAGIAN ANGGARAN KEMENTERIAN NEGARA/LEMBAGA

K/L : KEMENTERIAN ENERGI DAN SUMBER DAYA MINERAL

(dalam ribuan rupiah)

UNIT ORGANISASI	FUNGSI/PROGRAM/KEGIATAN	ALOKASI ANGGARAN
1	2	3
KEMENTERIAN ENERGI DAN SUMBER DAYA MINERAL		**15.070.477.722**
SEKRETARIAT JENDERAL		**565.861.149**
	PELAYANAN UMUM	**565.861.149**
	Program Dukungan Manajemen dan Pelaksanaan Tugas Teknis Lainnya Kementerian ESDM	**524.971.444**
	Pembinaan Administrasi Hukum KESDM	13.648.304
	Pengelolaan SDM Aparatur dan Pengembangan Organisasi KESDM	224.231.234
	Pengelolaan Administrasi Keuangan Kementerian ESDM	28.989.439
	Pembinaan dan Koordinasi Perencanaan dan Kerja Sama KESDM	74.169.195
	Pengelolaan Administrasi Perlengkapan, Kearsipan dan Rumah Tangga KESDM	103.525.613
	Pengelolaan Data dan Teknologi Informasi Kementerian ESDM	28.036.828
	Pengelolaan Barang Milik Negara Kementerian ESDM	23.147.958
	Pengelolaan Informasi Publik Kementerian ESDM	29.222.873
	Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur Kementerian ESDM	**40.889.705**
	Pengelolaan Sarana dan Prasarana Aparatur KESDM	40.889.705
INSPEKTORAT JENDERAL		**107.461.164**
	PELAYANAN UMUM	**73.737.611**
	Program Pengawasan dan Peningkatan Akuntabilitas Aparatur Kementerian ESDM	**73.737.611**
	Dukungan Manajemen dan Dukungan Teknis Lainnya Itjen Kementerian ESDM	73.737.611
	EKONOMI	**33.723.553**
	Program Pengawasan dan Peningkatan Akuntabilitas Aparatur Kementerian ESDM	**33.723.553**
	Penyelenggaraan Pemeriksaan dan Pengawasan Lingkup Ditjen. Ketenagalistrikan, Ditjen. Energi Baru Terbarukan dan Konsevasi Energi, dan Satuan Kerja PT. Perusahaan Listrik Negara (Persero)	7.671.837
	Penyelenggaraan Pemeriksaan dan Pengawasan Lingkup Setjen, Ditjen. Mineral Batubara, Dekonsentrasi dan Tugas Perbantuan	11.140.674
	Penyelenggaraan Pemeriksaan dan Pengawasan Lingkup Itjen, Badan Geologi dan Badan Penelitian dan Pengembangan Energi dan Sumber Daya Mineral dan Setjen Dewan Energi Nasional (DEN)	6.845.542
	Penyelenggaraan Pemeriksaan dan Pengawasan Lingkup Ditjen. Minyak dan Gas, Badan Pendidikan dan Pelatihan Energi dan Sumber Daya Mineral, BPH Migas	8.065.500
DITJEN MINYAK DAN GAS BUMI		**4.249.582.356**
	PELAYANAN UMUM	**189.610.794**
	Program Pengelolaan dan Penyediaan Minyak dan Gas Bumi	**189.610.794**
	Dukungan Manajemen dan Teknis Ditjen Migas	189.610.794
	EKONOMI	**4.059.971.562**
	Program Pengelolaan dan Penyediaan Minyak dan Gas Bumi	**4.059.971.562**
	Penyiapan Kebijakan dan Peningkatan Kerja Sama Bilateral dan Multilateral dalam Rangka Optimasi Penerimaan Negara dan Peningkatan Investasi Kegiatan	51.358.578
	Pembinaan dan Penyelenggaraan Usaha Hilir Minyak dan Gas Bumi	1.924.591.626
	Pembinaan dan Penyelenggaraan Usaha Hulu Minyak dan Gas Bumi	41.720.673
	Pembinaan Lindungan Lingkungan, Keselamatan Operasi dan Usaha Penunjang Bidang Migas	2.042.300.685
DITJEN KETENAGALISTRIKAN		**4.481.296.998**
	PELAYANAN UMUM	**121.617.274**

www.peraturan.go.id

LAMPIRAN III

RINCIAN ANGGARAN BELANJA PEMERINTAH PUSAT PADA BAGIAN ANGGARAN KEMENTERIAN NEGARA/LEMBAGA

K/L : KEMENTERIAN ENERGI DAN SUMBER DAYA MINERAL

(dalam ribuan rupiah)

UNIT ORGANISASI	FUNGSI/PROGRAM/KEGIATAN	ALOKASI ANGGARAN
1	2	3
	Program Pengelolaan Ketenagalistrikan	**121.617.274**
	Dukungan Manajemen dan Pelaksanaan Tugas Teknis Lainnya Ditjen Listrik	121.617.274
	EKONOMI	**4.359.679.724**
	Program Pengelolaan Ketenagalistrikan	**4.359.679.724**
	Pembinaan Pengaturan dan Pengawasan Usaha Penyediaan Tenaga Listrik dan Pengembangan Usaha Penyediaan Tenaga Listrik	23.723.952
	Penyusunan Kebijakan dan Program serta Evaluasi Pelaksanaan Kebijakan Ketenagalistrikan	4.307.914.809
	Pembinaan Keselamatan dan Lindungan Lingkungan Ketenagalistrikan serta Usaha Jasa Penunjang Tenaga Listrik	28.040.963
DITJEN MINERAL DAN BATUBARA		**368.344.585**
	PELAYANAN UMUM	**168.076.772**
	Program Pembinaan dan Pengusahaan Mineral dan Batubara	**168.076.772**
	Dukungan Manajemen dan Teknis Ditjen Mineral dan Batubara	168.076.772
	EKONOMI	**200.267.813**
	Program Pembinaan dan Pengusahaan Mineral dan Batubara	**200.267.813**
	Penyusunan Kebijakan dan Program serta Evaluasi Pelaksanaan Kebijakan di Bidang Mineral dan Batubara	76.556.121
	Pembinaan Keteknikan Lindungan Lingkungan dan Usaha Penunjang Bidang Mineral dan Batubara	30.182.082
	Pembinaan dan Pengusahaan Batubara	69.252.805
	Pembinaan dan Pengusahaan Mineral	24.276.805
DEWAN ENERGI NASIONAL		**101.864.397**
	EKONOMI	**101.864.397**
	Program Dukungan Manajemen dan Pelaksanaan Tugas Teknis Lainnya Dewan Energi Nasional	**101.864.397**
	Fasilitasi dalam Rangka Perumusan Kebijakan Energi yang Bersifat Lintas Sektor dan Penyusunan Perencanaan Energi, Serta Penyelenggaraan Hubungan Kemasyarakatan dan Persidangan Den	21.811.672
	Fasilitasi dalam Rangka Penetapan Langkah-Langkah Penanggulangan Krisis dan Darurat Energi, serta Pengawasan Pelaksanaan Kebijakan Energi Lintas Sektor	13.543.167
	Pengelolaan dan Penyelenggaraan Bidang Personil, Pendanaan, Peralatan dan Dokumen (P3D)	66.509.558
BADAN PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN ENERGI DAN SUMBER DAYA MINERAL		**893.533.847**
	PELAYANAN UMUM	**139.891.741**
	Program Penelitian dan Pengembangan Kementerian ESDM	**139.891.741**
	Dukungan Manajemen dan Dukungan Teknis Lainnya Badan Penelitian dan Pengembangan Energi dan Sumber Daya Mineral	139.891.741
	EKONOMI	**753.642.106**
	Program Penelitian dan Pengembangan Kementerian ESDM	**753.642.106**
	Penelitian dan Pengembangan Geologi Kelautan	129.661.498
	Penelitian dan Pengembangan Teknologi Ketenagalistrikan, Energi Baru, Terbarukan dan Konservasi Energi	105.579.151
	Penelitian dan Pengembangan Teknologi Mineral dan Batubara	157.343.191
	Penelitian dan Pengembangan Teknologi Minyak dan Gas Bumi	361.058.266
BADAN DIKLAT ENERGI DAN SUMBER DAYA MINERAL		**796.402.789**
	PELAYANAN UMUM	**92.721.284**
	Program Pendidikan dan Pelatihan ESDM	**92.721.284**
	Dukungan Manajemen dan Dukungan Teknis Lainnya Badan Pendidikan dan Pelatihan ESDM	92.721.284

www.peraturan.go.id

LAMPIRAN III

RINCIAN ANGGARAN BELANJA PEMERINTAH PUSAT PADA BAGIAN ANGGARAN KEMENTERIAN NEGARA/LEMBAGA

K/L : KEMENTERIAN ENERGI DAN SUMBER DAYA MINERAL

(dalam ribuan rupiah)

UNIT ORGANISASI	FUNGSI/PROGRAM/KEGIATAN	ALOKASI ANGGARAN
1	2	3
	EKONOMI	**538.337.344**
	Program Pendidikan dan Pelatihan ESDM	**538.337.344**
	Pendidikan dan Pelatihan Geologi	81.058.346
	Pendidikan dan Pelatihan Ketenagalistrikan dan Energi Baru Terbarukan, dan Konservasi Energi	77.346.613
	Pendidikan dan Pelatihan Minyak dan Gas Bumi	193.575.082
	Pendidikan dan Pelatihan Tambang Bawah Tanah	70.045.883
	Pendidikan dan Pelatihan Teknologi Mineral, Batubara dan Panas Bumi	116.311.420
	PENDIDIKAN	**165.344.161**
	Program Pendidikan dan Pelatihan ESDM	**165.344.161**
	Pendidikan Tinggi Energi dan Mineral	165.344.161
BADAN GEOLOGI		**1.074.387.556**
	PELAYANAN UMUM	**90.386.210**
	Program Penelitian Mitigasi dan Pelayanan Geologi	**90.386.210**
	Manajemen, Dukungan Teknis, dan Pelayanan Sekretariat Badan Geologi	90.386.210
	EKONOMI	**984.001.346**
	Program Penelitian Mitigasi dan Pelayanan Geologi	**984.001.346**
	Riset dan Pengembangan Teknologi Kebencanaan Geologi	49.850.000
	Dokumentasi Koleksi dan Pelayanan Museum Geologi	53.180.000
	Penelitian dan Pelayanan Geologi Lingkungan dan Air Tanah	168.715.750
	Penyelidikan dan Pelayanan Sumber Daya Geologi	190.055.000
	Survei dan Pelayanan Geologi	342.200.596
	Mitigasi dan Pelayanan Kebencanaan Geologi	180.000.000
BPH MIGAS		**371.797.700**
	EKONOMI	**371.797.700**
	Program Pengaturan dan Pengawasan Penyediaan dan Pendistribusian Bahan Bakar Minyak dan Pengangkutan Gas Bumi Melalui Pipa	**371.797.700**
	Pengaturan, Penetapan dan Pelaksanaan Pengawasan Penyediaan dan Pendistribusian Bbm	85.510.968
	Pengaturan, Penetapan dan Pengawasan pada Kegiatan Usaha Pengangkutan Gas Bumi Melalui Pipa	31.196.469
	Dukungan Manajemen dan Dukungan Pelaksanaan Tugas Tekhnis BPH Migas	255.090.263
DITJEN ENERGI BARU TERBARUKAN DAN KONSERVASI ENERGI		**2.059.945.181**
	EKONOMI	**2.059.945.181**
	Program Pengelolaan Energi Baru Terbarukan Dan Konservasi Energi	**2.059.945.181**
	Pembinaan, Pengawasan dan Pengusahaan Bioenergi	169.663.578
	Pembinaan, Pengawasan dan Pengusahaan Aneka Energi Baru Terbarukan	1.678.017.226
	Perencanaan Energi, Penerapan Konservasi Energi dan Teknologi Energi Bersih	48.845.345
	Pembinaan Pengawasan dan Pengusahaan Panas Bumi	34.153.677
	Dukungan Manajemen dan Pelaksanaan Tugas Teknis Lainnya Ditjen Energi Baru Terbarukan dan Konservasi Energi	129.265.355

www.peraturan.go.id

LAMPIRAN III

RINCIAN ANGGARAN BELANJA PEMERINTAH PUSAT PADA BAGIAN ANGGARAN KEMENTERIAN NEGARA/LEMBAGA

K/L : KEMENTERIAN PERHUBUNGAN

(dalam ribuan rupiah)

UNIT ORGANISASI	FUNGSI/PROGRAM/KEGIATAN	ALOKASI ANGGARAN
1	2	3
KEMENTERIAN PERHUBUNGAN		64.954.091.734
SEKRETARIAT JENDERAL		887.221.672
	PELAYANAN UMUM	887.221.672
	Program Dukungan Manajemen dan Pelaksanaan Tugas Teknis Lainnya Kementerian Perhubungan	887.221.672
	Pembinaan dan Koordinasi Penyusunan Produk dan Pelayanan Hukum serta Kerja Sama Luar Negeri	40.828.380
	Pembinaan dan Pengelolaan Kepegawaian	39.684.362
	Pembinaan dan Pengelolaan Administrasi Keuangan dan Perlengkapan di Lingkungan Kementerian Perhubungan	39.795.867
	Penyusunan Dokumen Rencana, Program, Evaluasi serta Penetapan Kebijakan Pentarifan di Sektor Perhubungan	30.420.723
	Pembinaan Administrasi dan Pengelolaan Pelayanan Penunjang Pelaksanaan Tugas Biro Umum Setjen Kementerian Perhubungan	540.066.085
	Pelayanan Pemeriksaan Lanjutan Kecelakaan Moda Transportasi	38.232.090
	Penegakan Hukum di Bidang Keselamatan Pelayaran	22.885.194
	Pengelolaan Data dan Informasi Perhubungan	44.454.771
	Pemanfaatan Kajian Kemitraan Pelayanan Jasa Transportasi	33.204.008
	Pengelolaan Komunikasi Publik dan Pemberian Informasi di Bidang Perhubungan	57.650.192
INSPEKTORAT JENDERAL		100.311.699
	PELAYANAN UMUM	61.698.724
	Program Pengawasan dan Peningkatan Akuntabilitas Aparatur Kementerian Perhubungan	61.698.724
	Dukungan Manajemen dan Dukungan Teknis Lainnya	61.698.724
	EKONOMI	38.612.975
	Program Pengawasan dan Peningkatan Akuntabilitas Aparatur Kementerian Perhubungan	38.612.975
	Pelaksanaan Pengawasan Oleh Inspektorat I	10.111.442
	Pelaksanaan Pengawasan Oleh Inspektorat II	8.062.605
	Pelaksanaan Pengawasan Oleh Inspektorat III	6.726.596
	Pelaksanaan Pengawasan Oleh Inspektorat IV	6.968.699
	Pelaksanaan Pengawasan Oleh Inspektorat V	6.743.633
DITJEN PERHUBUNGAN DARAT		6.077.124.600
	PELAYANAN UMUM	303.654.980
	Program Pengelolaan dan Penyelenggaraan Transportasi Darat	303.654.980
	Dukungan Manjemen dan Dukungan Teknis Lainnya Ditjen Perhubungan Darat	303.654.980
	EKONOMI	5.773.469.620
	Program Pengelolaan dan Penyelenggaraan Transportasi Darat	5.773.469.620
	Pembinaan dan Pengembangan Sistem Transportasi Perkotaan	1.598.840.652
	Manajemen dan Peningkatan Keselamatan Transportasi Darat	57.759.000
	Pembangunan dan Pengelolaan Prasarana dan Fasilitas Lalu Lintas Angkutan Jalan	1.089.602.402
	Pembangunan Sarana dan Prasarana Transportasi ASDP dan Pengelolaan Prasarana Lalulintas SDP	3.027.267.566
DITJEN PERHUBUNGAN LAUT		22.842.956.017
	PELAYANAN UMUM	4.484.535.519
	Program Pengelolaan dan Penyelenggaraan Transportasi Laut	4.484.535.519

www.peraturan.go.id

LAMPIRAN III

RINCIAN ANGGARAN BELANJA PEMERINTAH PUSAT PADA BAGIAN ANGGARAN KEMENTERIAN NEGARA/LEMBAGA

K/L : KEMENTERIAN PERHUBUNGAN

(dalam ribuan rupiah)

UNIT ORGANISASI	FUNGSI/PROGRAM/KEGIATAN	ALOKASI ANGGARAN
1	2	3
	Dukungan Manjemen dan Dukungan Teknis Lainnya Ditjen Perhubungan Laut	4.484.535.519
	EKONOMI	**18.358.420.498**
	Program Pengelolaan dan Penyelenggaraan Transportasi Laut	**18.358.420.498**
	Pengelolaan dan Penyelenggaraan Kegiatan di Bidang Kenavigasian	2.226.572.529
	Pengelolaan dan Penyelenggaraan Kegiatan di Bidang Penjagaan Laut dan Pantai	2.716.273.292
	Pengelolaan dan Penyelenggaraan Kegiatan di Bidang Lalu Lintas dan Angkutan Laut	4.773.818.000
	Pengelolaan dan Penyelenggaraan Kegiatan di Bidang Pelabuhan dan Pengerukan	8.641.756.677
DITJEN PERHUBUNGAN UDARA		**11.745.875.901**
	EKONOMI	**11.745.875.901**
	Program Pengelolaan dan Penyelenggaraan Transportasi Udara	**11.745.875.901**
	Pelayanan Angkutan Udara Perintis	489.867.418
	Pembangunan, Rehabilitasi dan Pemeliharaan Prasarana Bandar Udara	7.762.917.787
	Pembangunan, Rehabilitasi dan Pemeliharaan Prasarana Keamanan Penerbangan	604.049.475
	Pengawasan dan Pembinaan Kelaikan Udara dan Pengoperasian Pesawat Udara	330.460.238
	Pembangunan, Rehabilitasi dan Pemeliharaan Prasarana Navigasi Penerbangan	313.064.052
	Dukungan Manajemen dan Dukungan Teknis Lainnya Ditjen Perhubungan Udara	2.245.516.931
DIREKTORAT JENDERAL PERKERETAAPIAN		**18.670.757.514**
	PELAYANAN UMUM	**283.607.488**
	Program Pengelolaan dan Penyelenggaraan Transportasi Perkeretaapian	**283.607.488**
	Dukungan Manajemen dan Dukungan Teknis Lainnya Ditjen Perkeretaapian	116.226.529
	Pembangunan dan Pengelolaan Bidang Keselamatan Perkeretaapian	167.380.959
	EKONOMI	**18.387.150.026**
	Program Pengelolaan dan Penyelenggaraan Transportasi Perkeretaapian	**18.387.150.026**
	Pembangunan dan Pengelolaan Bidang Sarana Perkeretaapian	332.107.289
	Pembangunan dan Pengelolaan Bidang Lalu Lintas dan Angkutan Kereta Api	186.738.268
	Pembangunan dan Pengelolaan Prasarana dan Fasilitas Pendukung Kereta Api	17.868.304.469
BADAN PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN PERHUBUNGAN		**228.259.100**
	EKONOMI	**228.259.100**
	Program Penelitian dan Pengembangan Kementerian Perhubungan	**228.259.100**
	Penelitian dan Pengembangan Manajemen Transportasi Multimoda	39.095.800
	Penelitian dan Pengembangan Perhubungan Darat dan Perkeretaapian	51.109.563
	Penelitian dan Pengembangan Perhubungan Laut	32.257.400
	Penelitian dan Pengembangan Perhubungan Udara	40.244.412
	Dukungan Manajemen dan Dukungan Teknis Lainnya Sekretariat Badan Litbang Kementerian Pergubungan	65.551.925
BADAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA PERHUBUNGAN		**4.401.585.231**
	PELAYANAN UMUM	**305.164.311**
	Program Pengembangan Sumber Daya Manusia Perhubungan	**305.164.311**
	Dukungan Manajemen dan Dukungan Teknis Lainnya Sekretariat Badan Pengembangan Sumber Daya Manusia Perhubungan	236.488.916

www.peraturan.go.id

LAMPIRAN III

RINCIAN ANGGARAN BELANJA PEMERINTAH PUSAT PADA BAGIAN ANGGARAN KEMENTERIAN NEGARA/LEMBAGA

K/L : KEMENTERIAN PERHUBUNGAN

(dalam ribuan rupiah)

UNIT ORGANISASI	FUNGSI/PROGRAM/KEGIATAN	ALOKASI ANGGARAN
1	2	3
	Pengembangan Sumber Daya Manusia Aparatur Perhubungan	68.675.395
	EKONOMI	**913.900.394**
	Program Pengembangan Sumber Daya Manusia Perhubungan	**913.900.394**
	Pengembangan Sumber Daya Manusia Perhubungan Darat	236.248.251
	Pengembangan Sumber Daya Manusia Perhubungan Laut	391.981.711
	Pengembangan Sumber Daya Manusia Perhubungan Udara	285.670.432
	PENDIDIKAN	**3.182.520.526**
	Program Pengembangan Sumber Daya Manusia Perhubungan	**3.182.520.526**
	Pendidikan Perhubungan Darat	449.563.747
	Pendidikan Perhubungan Laut	1.465.067.168
	Pendidikan Perhubungan Udara	1.267.889.611

www.peraturan.go.id

LAMPIRAN III

RINCIAN ANGGARAN BELANJA PEMERINTAH PUSAT PADA BAGIAN ANGGARAN KEMENTERIAN NEGARA/LEMBAGA

K/L : KEMENTERIAN PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN

(dalam ribuan rupiah)

UNIT ORGANISASI	FUNGSI/PROGRAM/KEGIATAN	ALOKASI ANGGARAN
1	2	3
KEMENTERIAN PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN		53.278.549.097
SEKRETARIAT JENDERAL		4.576.555.000
	PENDIDIKAN	4.576.555.000
	Program Dukungan Manajemen dan Pelaksanaan Tugas Teknis Lainnya Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan	4.576.555.000
	Peningkatan Layanan Prima Dalam Menunjang Fungsi Pelayanan Umum Kementerian	2.328.701.649
	Peningkatan Layanan Prima Dalam Pengadaan Dan Penataan BMN Serta Sarana Dan Prasarana Kementerian	74.687.545
	Peningkatan Pelayanan Prima Dalam Perencanaan, Penganggaran, serta Pengelolaan Anggaran dan Akuntabilitas	274.483.770
	Peningkatan Pengelolaan Dan Pembinaan Kepegawaian Yang Andal	59.447.354
	Peningkatan Layanan Prima Di Bidang Hukum Dan Organisasi	26.868.036
	Pengembangan dan Peningkatan Analisis Dan Strategi Kebijakan	32.451.680
	Penyediaan Data Dan Statistik Pendidikan dan Kebudayaan	55.875.000
	Pengembangan Teknologi Informasi Dan Komunikasi (TIK) Untuk Pendayagunaan E-Pembelajaran Dan E-Administrasi	270.658.596
	Pengembangan Pendidikan terbuka dan Jarak Jauh (PTJJ), Matematika, Bahasa Asing, Bio Teknologi, Gizi, dan IPA di Asia Tenggara	87.450.020
	Peningkatan Layanan Prima Di Bidang Kerjasama, Informasi, Dan Kehumasan	516.259.224
	Peningkatan Layanan Masyarakat	26.002.876
	Peningkatan Layanan Pendidikan Dan Pelatihan Pegawai	64.276.702
	Pengembangan Film Indonesia dan Peningkatan Sensor Film dan Iklan Film	60.519.786
	Pengembangan Layanan Pengembangan Penjaminan Mutu Pendidikan	698.872.762
INSPEKTORAT JENDERAL		212.002.000
	PENDIDIKAN	212.002.000
	Program Pengawasan dan Peningkatan Akuntabilitas Aparatur Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan	212.002.000
	Dukungan Manajemen dan Pelaksanaan Tugas Teknis Lainnya Itjen Kemendikbud	99.963.176
	Penguatan Pengawasan Inspektorat I	22.282.870
	Penguatan Pengawasan Inspektorat II	22.117.006
	Penguatan Pengawasan Inspektorat III	27.896.379
	Penguatan Audit Investigasi	17.762.590
	Penguatan Pengawasan Inspektorat IV	21.979.979
DITJEN PENDIDIKAN DASAR DAN MENENGAH		31.031.757.000
	PENDIDIKAN	31.031.757.000
	Program Pendidikan Dasar dan Menengah	31.031.757.000
	Pembinaan Sekolah Dasar	6.871.000.000
	Pembinaan Sekolah Menengah Pertama	5.843.000.000
	Pembinaan Sekolah Menengah Atas	8.010.000.000
	Pembinaan Sekolah Menengah Kejuruan	9.009.000.000
	Pembinaan Pendidikan Khusus dan Layanan Khusus	912.000.000
	Dukungan Manajemen Dan Pelaksanaan Tugas Teknis Lainnya	386.757.000
DITJEN PENDIDIKAN ANAK USIA DINI DAN PENDIDIKAN MASYARAKAT		2.073.693.000
	PENDIDIKAN	2.073.693.000

www.peraturan.go.id

LAMPIRAN III

RINCIAN ANGGARAN BELANJA PEMERINTAH PUSAT PADA BAGIAN ANGGARAN KEMENTERIAN NEGARA/LEMBAGA

K/L : KEMENTERIAN PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN

(dalam ribuan rupiah)

UNIT ORGANISASI	FUNGSI/PROGRAM/KEGIATAN	ALOKASI ANGGARAN
1	2	3
	Program Pendidikan Anak Usia Dini dan Pendidikan Masyarakat	**2.073.693.000**
	Dukungan Manajemen Dan Pelaksanaan Tugas Teknis Lainnya Ditjen Pendidikan Anak Usia Dini, dan Pendidikan Masyarakat	147.018.274
	Penyediaan Layanan PAUD	713.570.000
	Penyediaan Layanan Pendidikan Keluarga	270.970.000
	Penyediaan Layanan Pendidikan Masyarakat	517.272.700
	Penyediaan Layanan Kursus Dan Pelatihan	220.420.214
	Layanan Pengkajian, Pengembangan dan Pengendalian Mutu PAUD-NI	204.441.812
BADAN PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN		**1.342.788.000**
PENDIDIKAN		**1.342.788.000**
	Program Penelitian dan Pengembangan Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan	**1.342.788.000**
	Dukungan Manajemen Dan Pelaksanaan Tugas Teknis Lainnya Penelitian Dan Pengembangan Kemendikbud	61.859.462
	Penyediaan Informasi Untuk Perumusan Kebijakan Pendidikan dan Kebudayaan	62.461.100
	Penyempurnaan Kurikulum, Sistem Pembelajaran Dan Perbukuan	100.857.914
	Penyediaan Informasi Hasil Penilaian Pendidikan	67.551.614
	Fasilitasi Standar Mutu dan Pelaksanaan Akreditasi	980.806.098
	Penelitian Dan Pengembangan Bidang Arkeologi	69.251.812
BADAN PENGEMBANGAN DAN PEMBINAAN BAHASA		**501.263.800**
PENDIDIKAN		**501.263.800**
	Program Pengembangan dan Pembinaan Bahasa dan Sastra	**501.263.800**
	Dukungan Manajemen dan Pelaksanaan Tugas Teknis Lainnya Pengembangan dan Pembinaan Bahasa dan Sastra	130.431.637
	Pengembangan dan Pelindungan Bahasa dan Sastra	25.000.000
	Pembinaan Bahasa dan Sastra	29.633.490
	Pengembangan Strategi dan Diplomasi Kebahasaan	54.381.199
	Pelaksanaan Tugas Teknis Pengembangan, Pembinaan, dan Pelindungan Bahasa dan Sastra di Daerah	261.817.474
DITJEN GURU DAN TENAGA KEPENDIDIKAN		**11.817.832.297**
PENDIDIKAN		**11.817.832.297**
	Program Guru dan Tenaga Kependidikan	**11.817.832.297**
	Dukungan Manajemen Dan Pelaksanaan Tugas Lainnya Ditjen Guru Dan Tenaga Kependidikan	8.084.167.944
	Pembinaan Tenaga Kependidikan Dikdasmen	96.264.345
	Pembinaan Guru Pendidikan Dasar	2.627.308.371
	Pembinaan Guru Pendidikan Menengah	667.442.460
	Pembinaan Guru dan Tenaga Kependidikan PAUD dan DIKMAS	342.649.177
DITJEN KEBUDAYAAN		**1.722.658.000**
PENDIDIKAN		**1.722.658.000**
	Program Pelestarian Budaya	**1.722.658.000**
	Pengembangan Galeri Nasional	24.000.000
	Pengelolaan Permuseuman	210.229.043
	Pelestarian Sejarah dan Nilai Tradisional	91.080.000

www.peraturan.go.id

LAMPIRAN III

RINCIAN ANGGARAN BELANJA PEMERINTAH PUSAT PADA BAGIAN ANGGARAN KEMENTERIAN NEGARA/LEMBAGA

K/L : KEMENTERIAN PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN

(dalam ribuan rupiah)

UNIT ORGANISASI				FUNGSI/PROGRAM/KEGIATAN	ALOKASI ANGGARAN
1				2	3
				Dukungan Manajemen Dan Pelaksanaan Tugas Teknis Lainnya Ditjen Kebudayaan	219.646.348
				Peletarian dan Pengelolan Peninggalan Purbakala	299.010.000
				Pelestarian Cagar Budaya Dan Permuseuman	231.736.685
				Pembinaan Kesenian	235.646.213
				Pembinaan Kepercayaan Terhadap Tuhan YME Dan Tradisi	153.863.563
				Pengembangan Sejarah	67.116.148
				Pengembangan Diplomasi Budaya	190.330.000

www.peraturan.go.id

LAMPIRAN III

RINCIAN ANGGARAN BELANJA PEMERINTAH PUSAT PADA BAGIAN ANGGARAN KEMENTERIAN NEGARA/LEMBAGA

K/L : KEMENTERIAN PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN

(dalam ribuan rupiah)

UNIT ORGANISASI	FUNGSI/PROGRAM/KEGIATAN	ALOKASI ANGGARAN
1	2	3
KEMENTERIAN PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN		53.278.549.097
SEKRETARIAT JENDERAL		4.576.555.000
	PENDIDIKAN	4.576.555.000
	Program Dukungan Manajemen dan Pelaksanaan Tugas Teknis Lainnya Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan	4.576.555.000
	Peningkatan Layanan Prima Dalam Menunjang Fungsi Pelayanan Umum Kementerian	2.328.701.649
	Peningkatan Layanan Prima Dalam Pengadaan Dan Penataan BMN Serta Sarana Dan Prasarana Kementerian	74.687.545
	Peningkatan Pelayanan Prima Dalam Perencanaan, Penganggaran, serta Pengelolaan Anggaran dan Akuntabilitas	274.483.770
	Peningkatan Pengelolaan Dan Pembinaan Kepegawaian Yang Andal	59.447.354
	Peningkatan Layanan Prima Di Bidang Hukum Dan Organisasi	26.868.036
	Pengembangan dan Peningkatan Analisis Dan Strategi Kebijakan	32.451.680
	Penyediaan Data Dan Statistik Pendidikan dan Kebudayaan	55.875.000
	Pengembangan Teknologi Informasi Dan Komunikasi (TIK) Untuk Pendayagunaan E-Pembelajaran Dan E-Administrasi	270.658.596
	Pengembangan Pendidikan terbuka dan Jarak Jauh (PTJJ), Matematika, Bahasa Asing, Bio Teknologi, Gizi, dan IPA di Asia Tenggara	87.450.020
	Peningkatan Layanan Prima Di Bidang Kerjasama, Informasi, Dan Kehumasan	516.259.224
	Peningkatan Layanan Masyarakat	26.002.876
	Peningkatan Layanan Pendidikan Dan Pelatihan Pegawai	64.276.702
	Pengembangan Film Indonesia dan Peningkatan Sensor Film dan Iklan Film	60.519.786
	Pengembangan Layanan Pengembangan Penjaminan Mutu Pendidikan	698.872.762
INSPEKTORAT JENDERAL		212.002.000
	PENDIDIKAN	212.002.000
	Program Pengawasan dan Peningkatan Akuntabilitas Aparatur Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan	212.002.000
	Dukungan Manajemen dan Pelaksanaan Tugas Teknis Lainnya Itjen Kemendikbud	99.963.176
	Penguatan Pengawasan Inspektorat I	22.282.870
	Penguatan Pengawasan Inspektorat II	22.117.006
	Penguatan Pengawasan Inspektorat III	27.896.379
	Penguatan Audit Investigasi	17.762.590
	Penguatan Pengawasan Inspektorat IV	21.979.979
DITJEN PENDIDIKAN DASAR DAN MENENGAH		31.031.757.000
	PENDIDIKAN	31.031.757.000
	Program Pendidikan Dasar dan Menengah	31.031.757.000
	Pembinaan Sekolah Dasar	6.871.000.000
	Pembinaan Sekolah Menengah Pertama	5.843.000.000
	Pembinaan Sekolah Menengah Atas	8.010.000.000
	Pembinaan Sekolah Menengah Kejuruan	9.009.000.000
	Pembinaan Pendidikan Khusus dan Layanan Khusus	912.000.000
	Dukungan Manajemen Dan Pelaksanaan Tugas Teknis Lainnya	386.757.000
DITJEN PENDIDIKAN ANAK USIA DINI DAN PENDIDIKAN MASYARAKAT		2.073.693.000
	PENDIDIKAN	2.073.693.000

www.peraturan.go.id

LAMPIRAN III

RINCIAN ANGGARAN BELANJA PEMERINTAH PUSAT PADA BAGIAN ANGGARAN KEMENTERIAN NEGARA/LEMBAGA

K/L : KEMENTERIAN PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN

(dalam ribuan rupiah)

UNIT ORGANISASI	FUNGSI/PROGRAM/KEGIATAN	ALOKASI ANGGARAN
1	2	3
	Program Pendidikan Anak Usia Dini dan Pendidikan Masyarakat	**2.073.693.000**
	Dukungan Manajemen Dan Pelaksanaan Tugas Teknis Lainnya Ditjen Pendidikan Anak Usia Dini, dan Pendidikan Masyarakat	147.018.274
	Penyediaan Layanan PAUD	713.570.000
	Penyediaan Layanan Pendidikan Keluarga	270.970.000
	Penyediaan Layanan Pendidikan Masyarakat	517.272.700
	Penyediaan Layanan Kursus Dan Pelatihan	220.420.214
	Layanan Pengkajian, Pengembangan dan Pengendalian Mutu PAUD-NI	204.441.812
BADAN PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN		**1.342.788.000**
PENDIDIKAN		**1.342.788.000**
	Program Penelitian dan Pengembangan Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan	**1.342.788.000**
	Dukungan Manajemen Dan Pelaksanaan Tugas Teknis Lainnya Penelitian Dan Pengembangan Kemendikbud	61.859.462
	Penyediaan Informasi Untuk Perumusan Kebijakan Pendidikan dan Kebudayaan	62.461.100
	Penyempurnaan Kurikulum, Sistem Pembelajaran Dan Perbukuan	100.857.914
	Penyediaan Informasi Hasil Penilaian Pendidikan	67.551.614
	Fasilitasi Standar Mutu dan Pelaksanaan Akreditasi	980.806.098
	Penelitian Dan Pengembangan Bidang Arkeologi	69.251.812
BADAN PENGEMBANGAN DAN PEMBINAAN BAHASA		**501.263.800**
PENDIDIKAN		**501.263.800**
	Program Pengembangan dan Pembinaan Bahasa dan Sastra	**501.263.800**
	Dukungan Manajemen dan Pelaksanaan Tugas Teknis Lainnya Pengembangan dan Pembinaan Bahasa dan Sastra	130.431.637
	Pengembangan dan Pelindungan Bahasa dan Sastra	25.000.000
	Pembinaan Bahasa dan Sastra	29.633.490
	Pengembangan Strategi dan Diplomasi Kebahasaan	54.381.199
	Pelaksanaan Tugas Teknis Pengembangan, Pembinaan, dan Pelindungan Bahasa dan Sastra di Daerah	261.817.474
DITJEN GURU DAN TENAGA KEPENDIDIKAN		**11.817.832.297**
PENDIDIKAN		**11.817.832.297**
	Program Guru dan Tenaga Kependidikan	**11.817.832.297**
	Dukungan Manajemen Dan Pelaksanaan Tugas Lainnya Ditjen Guru Dan Tenaga Kependidikan	8.084.167.944
	Pembinaan Tenaga Kependidikan Dikdasmen	96.264.345
	Pembinaan Guru Pendidikan Dasar	2.627.308.371
	Pembinaan Guru Pendidikan Menengah	667.442.460
	Pembinaan Guru dan Tenaga Kependidikan PAUD dan DIKMAS	342.649.177
DITJEN KEBUDAYAAN		**1.722.658.000**
PENDIDIKAN		**1.722.658.000**
	Program Pelestarian Budaya	**1.722.658.000**
	Pengembangan Galeri Nasional	24.000.000
	Pengelolaan Permuseuman	210.229.043
	Pelestarian Sejarah dan Nilai Tradisional	91.080.000

www.peraturan.go.id

LAMPIRAN III

RINCIAN ANGGARAN BELANJA PEMERINTAH PUSAT PADA BAGIAN ANGGARAN KEMENTERIAN NEGARA/LEMBAGA

K/L : KEMENTERIAN PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN

(dalam ribuan rupiah)

UNIT ORGANISASI		FUNGSI/PROGRAM/KEGIATAN			ALOKASI ANGGARAN
1				2	3
				Dukungan Manajemen Dan Pelaksanaan Tugas Teknis Lainnya Ditjen Kebudayaan	219.646.348
				Peletarian dan Pengelolan Peninggalan Purbakala	299.010.000
				Pelestarian Cagar Budaya Dan Permuseuman	231.736.685
				Pembinaan Kesenian	235.646.213
				Pembinaan Kepercayaan Terhadap Tuhan YME Dan Tradisi	153.863.563
				Pengembangan Sejarah	67.116.148
				Pengembangan Diplomasi Budaya	190.330.000

www.peraturan.go.id

LAMPIRAN III

RINCIAN ANGGARAN BELANJA PEMERINTAH PUSAT PADA BAGIAN ANGGARAN KEMENTERIAN NEGARA/LEMBAGA

K/L : KEMENTERIAN KESEHATAN

(dalam ribuan rupiah)

UNIT ORGANISASI	FUNGSI/PROGRAM/KEGIATAN	ALOKASI ANGGARAN
1	2	3
KEMENTERIAN KESEHATAN		51.277.282.484
SEKRETARIAT JENDERAL		24.288.900.137
PELAYANAN UMUM		24.288.900.137
	Program Dukungan Manajemen dan Pelaksanaan Tugas Teknis Lainnya Kementerian Kesehatan	24.288.900.137
	Perumusan Peraturan Perundang-Undangan dan Organisasi	22.000.000
	Pembinaan Administrasi Kepegawaian	100.000.000
	Pembinaan Pengelolaan Administrasi Keuangan dan Barang Milik Negara	41.000.000
	Perencanaan dan Penganggaran Program Pembangunan Kesehatan	119.951.800
	Pengelolaan Urusan Tata Usaha, Keprotokolan, Rumah Tangga, Keuangan, dan Gaji	2.840.427.087
	Pengelolaan Data dan Informasi	74.000.000
	Peningkatan Kerja Sama Luar Negeri	20.000.000
	Peningkatan Kesehatan Jemaah Haji	200.000.000
	Pengelolaan Komunikasi Publik	41.000.000
	Pembinaan, Pengembangan Pembiayaan dan Jaminan Pemeliharaan Kesehatan	20.479.200.000
	Penanggulangan Krisis Kesehatan	75.000.000
	Pemberdayaan Masyarakat dan Promosi Kesehatan	221.321.250
	Peningkatan Manajemen Konsil Kedokteran Indonesia	35.000.000
	Peningkatan Intelegensia Kesehatan	20.000.000
INSPEKTORAT JENDERAL		102.971.000
PELAYANAN UMUM		56.286.857
	Program Pengawasan dan Peningkatan Akuntabilitas Aparatur Kementerian Kesehatan	56.286.857
	Dukungan Manajemen dan Pelaksanaan Tugas Teknis Lainnya pada Program Peningkatan Pengawasan dan Akuntabilitas Aparatur Kementerian Kesehatan	56.286.857
KESEHATAN		46.684.143
	Program Pengawasan dan Peningkatan Akuntabilitas Aparatur Kementerian Kesehatan	46.684.143
	Pengawasan kebijakan, program dan kegiatan di lingkungan Sekretariat Jenderal dan Ditjen Bina Upaya Kesehatan	12.150.872
	Pengawasan kebijakan, program dan kegiatan di lingkungan Ditjen Bina Gizi dan KIA dan Inspektorat Jenderal	5.060.177
	Pengawasan dan Pembinaan Pelaksanaan Kebijakan Ditjen PP dan PL dan Balitbangkes	9.063.601
	Pengawasan dan Pembinaan Pelaksanaan Kebijakan Ditjen Kefarmasian dan Alkes dan Badan PPSDMK	9.244.412
	Pengusutan dan Investigasi kasus-kasus yang beridikasi merugikan negara dan menghambat kelancaran tugas dan fungsi Kementerian Kesehatan	11.165.081
DITJEN BINA GIZI DAN KESEHATAN IBU DAN ANAK		2.682.576.400
PELAYANAN UMUM		207.907.158
	Program Bina Gizi dan Kesehatan Ibu dan Anak	207.907.158
	Dukungan Manajemen dan Pelaksanaan Tugas Teknis Lainnya pada Program Bina Gizi dan Kesehatan Ibu dan Anak	207.907.158
KESEHATAN		2.474.669.242
	Program Bina Gizi dan Kesehatan Ibu dan Anak	2.474.669.242
	Pembinaan Gizi Masyarakat	500.293.810

www.peraturan.go.id

LAMPIRAN III

RINCIAN ANGGARAN BELANJA PEMERINTAH PUSAT PADA BAGIAN ANGGARAN KEMENTERIAN NEGARA/LEMBAGA

K/L : KEMENTERIAN KESEHATAN

(dalam ribuan rupiah)

UNIT ORGANISASI	FUNGSI/PROGRAM/KEGIATAN	ALOKASI ANGGARAN
1	2	3
	Pembinaan Pelayanan Kesehatan Anak	161.900.000
	Pembinaan Pelayanan Kesehatan Ibu dan Reproduksi	252.100.000
	Pembinaan Upaya Kesehatan kerja dan Olahraga	87.095.800
	Pembinaan Pengembangan dan Pengawasan Program Pelayanan Kesehatan Tradisional Komplementer dan Alternatif	62.815.432
	Bantuan Operasional Kesehatan (BOK)	1.410.464.200
DITJEN BINA UPAYA KESEHATAN		**16.507.752.116**
PELAYANAN UMUM		**3.271.504.362**
Program Pembinaan Upaya Kesehatan		**3.271.504.362**
Pembinaan Upaya Penunjang Medik dan Sarana Kesehatan		148.196.853
Dukungan Manajemen dan Pelaksanaan Tugas Teknis Lainnya Sekretariat Ditjen Bina Upaya Kesehatan		3.123.307.509
KESEHATAN		**13.236.247.754**
Program Pembinaan Upaya Kesehatan		**13.236.247.754**
Pembinaan Pelayanan Keperawatan dan Ketehnisian Medis		31.195.208
Pembinaan Upaya Kesehatan Dasar		757.107.214
Pembinaan Upaya Kesehatan Rujukan		12.423.925.009
Pembinaan Pelayanan Kesehatan Jiwa		24.020.323
DITJEN PENGENDALIAAN PENYAKIT DAN PENYEHATAN LINGKUNGAN		**2.201.978.361**
PELAYANAN UMUM		**700.581.859**
Program Pengendalian Penyakit dan Penyehatan Lingkungan		**700.581.859**
Dukungan Manajemen dan Pelaksanaan Tugas Teknis Lainnya pada Program Pengendalian Penyakit dan Penyehatan Lingkungan		700.581.859
KESEHATAN		**1.501.396.502**
Program Pengendalian Penyakit dan Penyehatan Lingkungan		**1.501.396.502**
Pembinaan Surveilans, Imunisasi, Karantina dan Kesehatan Matra		292.831.380
Pengendalian Penyakit Bersumber Binatang		239.976.000
Pengendalian Penyakit Menular Langsung		260.000.000
Pengendalian Penyakit Tidak Menular		324.997.000
Penyehatan Lingkungan		383.592.122
DITJEN BINA KEFARMASIAN DAN ALAT KESEHATAN		**1.747.852.800**
PELAYANAN UMUM		**98.826.681**
Program Kefarmasian dan Alat Kesehatan		**98.826.681**
Dukungan Manajemen dan Pelaksanaan Tugas Teknis Lainnya pada Program Kefarmasian dan Alat Kesehatan		98.826.681
KESEHATAN		**1.649.026.119**
Program Kefarmasian dan Alat Kesehatan		**1.649.026.119**
Peningkatan Pelayanan Kefarmasian		32.762.533
Peningkatan Ketersediaan Obat Publik dan Perbekalan Kesehatan		1.500.151.344
Peningkatan Pembinaan Produksi dan Distribusi Alat Kesehatan		35.754.692
Peningkatan Pembinaan Produksi dan Distribusi Kefarmasian		80.357.550
BADAN PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN KESEHATAN		**744.683.100**

www.peraturan.go.id

LAMPIRAN III

RINCIAN ANGGARAN BELANJA PEMERINTAH PUSAT PADA BAGIAN ANGGARAN KEMENTERIAN NEGARA/LEMBAGA

K/L : KEMENTERIAN KESEHATAN

(dalam ribuan rupiah)

UNIT ORGANISASI	FUNGSI/PROGRAM/KEGIATAN	ALOKASI ANGGARAN
1	2	3
	PELAYANAN UMUM	**195.570.000**
	Program Penelitian dan Pengembangan Kesehatan	**195.570.000**
	Dukungan Manajemen dan Dukungan Pelaksanaan Tugas Teknis Lainnya pada Program Penelitian dan Pengembangan Kesehatan	195.570.000
	KESEHATAN	**549.113.100**
	Program Penelitian dan Pengembangan Kesehatan	**549.113.100**
	Penelitian dan Pengembangan Biomedis dan Teknologi Dasar Kesehatan	135.274.100
	Penelitian dan Pengembangan Teknologi Intervensi Kesehatan Masyarakat	84.132.000
	Penelitian dan Pengembangan Teknologi Terapan Kesehatan dan Epidemiologi Klinik	38.132.000
	Penelitian dan Pengembangan Humaniora Kebijakan Kesehatan dan Pemberdayaan Masyarakat	69.667.000
	Penelitian dan Pengembangan Tanaman Obat dan Obat Tradisional	113.635.000
	Penelitian dan Pengembangan Vektor dan Reservoir Penyakit	108.273.000
BADAN PENGEMBANGAN DAN PEMBERDAYAAN SDM KESEHATAN		**3.000.568.570**
	PELAYANAN UMUM	**1.315.450.700**
	Program Pengembangan dan Pemberdayaan Sumber Daya Manusia Kesehatan (PPSDMK)	**1.315.450.700**
	Dukungan Manajemen dan Pelaksanaan Tugas Teknis Lainnya pada Program Pengembangan dan Pemberdayaan Sumber Daya Manusia Kesehatan	1.315.450.700
	KESEHATAN	**235.117.870**
	Program Pengembangan dan Pemberdayaan Sumber Daya Manusia Kesehatan (PPSDMK)	**235.117.870**
	Standardisasi, Sertifikasi dan Pendidikan Berkelanjutan bagi SDM Kesehatan	23.028.750
	Pendidikan dan Pelatihan Aparatur	173.368.620
	Pendidikan dan Pelatihan Tenaga Kesehatan	20.000.000
	Perencanaan dan Pendayagunaan SDM Kesehatan	18.720.500
	PENDIDIKAN	**1.450.000.000**
	Program Pengembangan dan Pemberdayaan Sumber Daya Manusia Kesehatan (PPSDMK)	**1.450.000.000**
	Pendidikan Tinggi dan Peningkatan Mutu SDM Kesehatan	446.000.000
	Pengelolaan Mutu Pendidikan Tinggi	24.000.000
	Pembinaan dan Pengelolaan Pendidikan Tinggi	730.000.000
	Pelaksanaan Internship Tenaga Kesehatan	250.000.000

www.peraturan.go.id

LAMPIRAN III

RINCIAN ANGGARAN BELANJA PEMERINTAH PUSAT PADA BAGIAN ANGGARAN KEMENTERIAN NEGARA/LEMBAGA

K/L : KEMENTERIAN AGAMA

(dalam ribuan rupiah)

UNIT ORGANISASI	FUNGSI/PROGRAM/KEGIATAN	ALOKASI ANGGARAN
1	2	3
KEMENTERIAN AGAMA		60.284.391.333
SEKRETARIAT JENDERAL		3.086.557.710
	PELAYANAN UMUM	2.932.931.497
	Program Dukungan Manajemen dan Pelaksanaan Tugas Teknis Lainnya Kementerian Agama	2.804.731.497
	Pembinaan Administrasi Hukum dan KLN	57.429.573
	Pembinaan Administrasi Kepegawaian	125.137.850
	Pembinaan Administrasi Keuangan dan BMN	1.631.017.494
	Pembinaan Administrasi Organisasi dan Tata Laksana	61.251.766
	Pembinaan Administrasi Perencanaan	158.048.821
	Pembinaan Administrasi Umum	679.716.028
	Pembinaan Administrasi Informasi Keagamaan dan Kehumasan	92.129.965
	Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur Kementerian Agama	128.200.000
	Penyediaan Sarana dan Prasarana Aparatur Kementerian Agama	128.200.000
	AGAMA	147.126.213
	Program Dukungan Manajemen dan Pelaksanaan Tugas Teknis Lainnya Kementerian Agama	147.126.213
	Pembinaan Kerukunan Hidup Umat Beragama	131.535.926
	Pembinaan Administrasi Kerukunan Hidup Umat Beragama	15.590.287
	PENDIDIKAN	6.500.000
	Program Dukungan Manajemen dan Pelaksanaan Tugas Teknis Lainnya Kementerian Agama	6.500.000
	Pembinaan Pendidikan Agama dan Pendidikan Keagamaan Khonghucu	6.500.000
INSPEKTORAT JENDERAL		166.505.829
	PELAYANAN UMUM	166.505.829
	Program Pengawasan dan Peningkatan Akuntabilitas Aparatur Kementerian Agama	166.505.829
	Pengawasan Fungsional Inspektorat Wilayah I	15.414.250
	Pengawasan Fungsional Inspektorat Wilayah II	14.705.233
	Pengawasan Fungsional Inspektorat Wilayah III	16.560.374
	Pengawasan Fungsional Inspektorat Wilayah IV	19.292.186
	Pengawasan Fungsional Inspektorat Investigasi	7.163.216
	Dukungan Manajemen dan Pelaksanaan Tugas Teknis Lainnya Itjen Kementerian Agama	93.370.570
DITJEN BIMBINGAN MASYARAKAT ISLAM		5.266.427.653
	AGAMA	5.266.427.653
	Program Bimbingan Masyarakat Islam	5.266.427.653
	Pengelolaan dan Pembinaan Pemberdayaan Wakaf	88.365.389
	Pengelolaan dan Pembinaan Pemberdayaan Zakat	75.264.315
	Pengelolaan dan Pembinaan Penerangan Agama Islam	413.482.380
	Pengelolaan Urusan Agama Islam dan Pembinaan Syariah	1.533.962.283
	Dukungan Manajemen dan Pelaksanaan Tugas Teknis Lainnya Bimas Islam	3.155.353.286
DITJEN PENDIDIKAN ISLAM		46.398.938.290

www.peraturan.go.id

LAMPIRAN III

RINCIAN ANGGARAN BELANJA PEMERINTAH PUSAT PADA BAGIAN ANGGARAN KEMENTERIAN NEGARA/LEMBAGA

K/L : KEMENTERIAN AGAMA

(dalam ribuan rupiah)

UNIT ORGANISASI	FUNGSI/PROGRAM/KEGIATAN	ALOKASI ANGGARAN
1	2	3
	PENDIDIKAN	**46.398.938.290**
	Program Pendidikan Islam	**46.398.938.290**
	Peningkatan Akses, Mutu, Kesejahteraan dan Subsidi Pendidikan Agama Islam	746.494.000
	Peningkatan Akses, Mutu, Kesejahteraan dan Subsidi Pendidikan Keagamaan Islam	1.149.754.689
	Peningkatan Akses, Mutu, Kesejahteraan dan Subsidi RA/BA dan Madrasah	16.256.164.386
	Peningkatan Akses, Mutu, Kesejahteraan dan Subsidi Pendidikan Tinggi Islam	4.197.361.357
	Dukungan Manajemen Pendidikan dan Pelayanan Tugas Teknis Lainnya Pendidikan Islam	24.049.163.858
DITJEN BIMBINGAN MASYARAKAT KRISTEN		**1.749.501.102**
	PELAYANAN UMUM	**167.551.703**
	Program Bimbingan Masyarakat Kristen	**167.551.703**
	Dukungan Manajemen dan Pelaksanaan Tugas Teknis Lainnya Bimas Kristen	167.551.703
	AGAMA	**125.356.286**
	Program Bimbingan Masyarakat Kristen	**125.356.286**
	Pengelolaan dan Pembinaan Urusan Agama Kristen	125.356.286
	PENDIDIKAN	**1.456.593.113**
	Program Bimbingan Masyarakat Kristen	**1.456.593.113**
	Pengelolaan dan Pembinaan Pendidikan Agama Kristen	177.920.968
	Penyelenggaraan Administrasi Perkantoran Pendidikan Bimas Kristen	1.175.823.013
	Peningkatan Akses, Mutu, Kesejahteraan dan Subsidi Pendidikan Tinggi Agama Kristen	102.849.132
DITJEN BIMBINGAN MASYARAKAT KATOLIK		**914.764.143**
	PELAYANAN UMUM	**207.848.785**
	Program Bimbingan Masyarakat Katolik	**207.848.785**
	Dukungan Manajemen dan Pelaksanaan Tugas Teknis Lainnya Bimas Katolik	207.848.785
	AGAMA	**62.505.000**
	Program Bimbingan Masyarakat Katolik	**62.505.000**
	Pengelolaan dan Pembinaan Urusan Agama Katolik	62.505.000
	PENDIDIKAN	**644.410.358**
	Program Bimbingan Masyarakat Katolik	**644.410.358**
	Pengelolaan dan Pembinaan Pendidikan Agama Katolik	180.243.392
	Penyelenggaraan Administrasi Perkantoran Pendidikan Bimas Katolik	464.166.966
DITJEN BIMBINGAN MASYARAKAT HINDU		**752.282.674**
	PELAYANAN UMUM	**77.301.177**
	Program Bimbingan Masyarakat Hindu	**77.301.177**
	Dukungan Manajemen dan Pelaksanaan Tugas Teknis Lainnya Bimas Hindu	77.301.177
	AGAMA	**96.118.750**
	Program Bimbingan Masyarakat Hindu	**96.118.750**
	Pengelolaan dan Pembinaan Urusan Agama Hindu	96.118.750
	PENDIDIKAN	**578.862.747**

www.peraturan.go.id

LAMPIRAN III

RINCIAN ANGGARAN BELANJA PEMERINTAH PUSAT PADA BAGIAN ANGGARAN KEMENTERIAN NEGARA/LEMBAGA

K/L : KEMENTERIAN AGAMA

(dalam ribuan rupiah)

UNIT ORGANISASI	FUNGSI/PROGRAM/KEGIATAN	ALOKASI ANGGARAN
1	2	3
	Program Bimbingan Masyarakat Hindu	**578.862.747**
	Pengelolaan dan Pembinaan Pendidikan Agama Hindu	52.565.658
	Penyelenggaraan Administrasi Perkantoran Pendidikan Bimas Hindu	439.750.579
	Peningkatan Akses, Mutu, Kesejahteraan dan Subsidi Pendidikan Tinggi Agama Hindu	86.546.510
DITJEN BIMBINGAN MASYARAKAT BUDDHA		**340.202.348**
PELAYANAN UMUM		**54.184.094**
	Program Bimbingan Masyarakat Buddha	**54.184.094**
	Dukungan Manajemen dan Pelaksanaan Tugas Teknis Lainnya Bimas Budha	54.184.094
AGAMA		**65.712.340**
	Program Bimbingan Masyarakat Buddha	**65.712.340**
	Pengelolaan dan Pembinaan Urusan Agama Budha	65.712.340
PENDIDIKAN		**220.305.914**
	Program Bimbingan Masyarakat Buddha	**220.305.914**
	Pengelolaan dan Pembinaan Pendidikan Agama Budha	111.391.495
	Penyelenggaraan Administrasi Perkantoran Pendidikan Bimas Budha	83.485.206
	Peningkatan Akses, Mutu, Kesejahteraan dan Subsidi Pendidikan Tinggi Agama Budha	25.429.213
DITJEN PENYELENGGARAAN HAJI DAN UMRAH		**1.084.686.899**
AGAMA		**1.084.686.899**
	Program Penyelenggaraan Haji Dan Umrah	**1.084.686.899**
	Pelayanan Haji Dalam Negeri	443.621.594
	Pembinaan Haji dan Umrah	222.443.417
	Pengelolaan Dana Haji	12.849.978
	Dukungan Manajemen dan Pelaksanaan Tugas Teknis Lainnya Penyelenggaraan Haji dan Umrah	402.886.049
	Pelayanan Atase Haji di Jeddah	1.500.000
	Pelayanan Misi Haji Indonesia di Arab Saudi	1.385.861
BADAN PENELITIAN PENGEMBANGAN DAN PENDIDIKAN PELATIHAN		**524.524.685**
PELAYANAN UMUM		**347.704.315**
	Program Penelitian Pengembangan dan Pendidikan Pelatihan Kementerian Agama	**347.704.315**
	Pendidikan dan Pelatihan Tenaga Administrasi	44.889.168
	Dukungan Manajemen dan Pelaksanaan Tugas Teknis Lainnya Badan Litbang dan Diklat	302.815.147
AGAMA		**72.579.770**
	Program Penelitian Pengembangan dan Pendidikan Pelatihan Kementerian Agama	**72.579.770**
	Pembinaan Administrasi dan Tugas Teknis Lainnya Lajnah Pentashihan Mushaf Al-Qur'an	11.359.699
	Pendidikan dan Pelatihan Tenaga Teknis Keagamaan	15.293.960
	Penelitian dan Pengembangan Kehidupan Keagamaan	24.189.231
	Penelitian dan Pengembangan Lektur dan Khazanah Keagamaan	21.736.880
PENDIDIKAN		**104.240.600**
	Program Penelitian Pengembangan dan Pendidikan Pelatihan Kementerian Agama	**104.240.600**

www.peraturan.go.id

LAMPIRAN III

RINCIAN ANGGARAN BELANJA PEMERINTAH PUSAT PADA BAGIAN ANGGARAN KEMENTERIAN NEGARA/LEMBAGA

K/L : KEMENTERIAN AGAMA

(dalam ribuan rupiah)

UNIT ORGANISASI	FUNGSI/PROGRAM/KEGIATAN	ALOKASI ANGGARAN
1	2	3
	Penelitian dan Pengembangan Pendidikan Agama dan Keagamaan	31.690.494
	Pendidikan dan Pelatihan Tenaga Teknis Pendidikan	72.550.106

www.peraturan.go.id

LAMPIRAN III

RINCIAN ANGGARAN BELANJA PEMERINTAH PUSAT PADA BAGIAN ANGGARAN KEMENTERIAN NEGARA/LEMBAGA

K/L : KEMENTERIAN KETENAGAKERJAAN

(dalam ribuan rupiah)

UNIT ORGANISASI	FUNGSI/PROGRAM/KEGIATAN	ALOKASI ANGGARAN
1	2	3
KEMENTERIAN KETENAGAKERJAAN		4.223.138.585
SEKRETARIAT JENDERAL		327.533.870
	PELAYANAN UMUM	327.533.870
	Program Dukungan Manajemen dan Pelaksanaan Tugas Teknis Lainnya Kementerian Tenaga Kerja dan Transmigrasi	327.533.870
	Pembentukan Pembaruan dan Penyelesaian Masalah Hukum	12.562.200
	Peningkatan Pengelolaan dan Pelaporan Keuangan	97.374.072
	Peningkatan Pengelolaan Organisasi, Ketatalaksanaan dan Kepegawaian	17.637.590
	Peningkatan Perencanaan Program dan Anggaran	17.060.682
	Peningkatan Pengelolaan Urusan Tata Usaha dan Pelayanan Umum	107.460.787
	Peningkatan dan Pengelolaan Kerja Sama Luar Negeri	19.822.829
	Peningkatan dan Pengelolaan Hubungan Masyarakat	23.585.300
	Peningkatan Kualitas Sumber Daya Manusia (SDM) Aparatur	32.030.410
INSPEKTORAT JENDERAL		55.186.290
	PELAYANAN UMUM	55.186.290
	Program Pengawasan dan Peningkatan Akuntabilitas Aparatur Kementerian Tenaga Kerja dan Transmigrasi	55.186.290
	Pengawasan Inspektorat I	3.862.630
	Pengawasan Inspektorat II	3.862.630
	Pengawasan Inspektorat III	3.857.630
	Pengawasan Inspektorat IV	3.828.530
	Dukungan Manajemen dan Dukungan Teknis Lainnya Inspektorat Jenderal	39.774.870
DITJEN PEMBINAAN PENEMPATAN TENAGA KERJA		1.073.208.025
	EKONOMI	1.073.208.025
	Program Penempatan dan Perluasan Kesempatan Kerja	1.073.208.025
	Pengembangan Model dan Inkubasi Bisnis Perluasan Kesempatan Kerja	140.406.971
	Penempatan Tenaga Kerja dalam Negeri	69.076.919
	Pembinaan Penempatan dan Perlindungan TKI Luar Negeri	156.879.266
	Pengembangan dan Peningkatan Perluasan Kesempatan Kerja	497.830.776
	Peningkatan Pengembangan Pasar Kerja	101.366.461
	Peningkatan Pengendalian Penggunaan Tenaga Kerja Asing	13.062.141
	Dukungan Manajemen dan Dukungan Teknis Lainnya Ditjen Pembinaan Penempatan Tenaga Kerja dan Perluasan Kesempatan Kerja	94.585.491
DITJEN PEMBINAAN HUBUNGAN INDUSTRIAL & JAMINAN SOSIAL TENAGA KERJA		366.966.740
	EKONOMI	366.966.740
	Program Pengembangan Hubungan Industrial dan Peningkatan Jaminan Sosial Tenaga Kerja	366.966.740
	Pengelolaan Kelembagaan dan Kerja Sama Hubungan Industrial	80.189.929
	Peningkatan Penerapan Pengupahan	56.944.568
	Konsolidasi Pelaksanaan Peningkatan Intensitas Pencegahan dan Penyelesaian Perselisihan Hubungan Industrial	62.846.152
	Pengelolaan Persyaratan Kerja, Kesejahteraan dan Analisis Diskriminasi	41.896.271
	Dukungan Manajemen dan Dukungan Teknis Lainnya Ditjen Pembinaan Hubungan Industrial dan Jaminan Sosial Tenaga Kerja	118.804.091

www.peraturan.go.id

LAMPIRAN III

RINCIAN ANGGARAN BELANJA PEMERINTAH PUSAT PADA BAGIAN ANGGARAN KEMENTERIAN NEGARA/LEMBAGA

K/L : KEMENTERIAN KETENAGAKERJAAN

(dalam ribuan rupiah)

UNIT ORGANISASI	FUNGSI/PROGRAM/KEGIATAN	ALOKASI ANGGARAN
1	2	3
	Penyempurnaan Peraturan Ketenagakerjaan	6.285.729
DITJEN PEMBINAAN PENGAWASAN KETENAGAKERJAAN DAN KESELAMATAN DAN KESEHATAN KERJA		**690.473.361**
	EKONOMI	**690.473.361**
	Program Perlindungan Tenaga Kerja dan Pengembangan Sistem Pengawasan Ketenagakerjaan	**690.473.361**
	Peningkatan Kualitas Teknis Pemeriksaan dan Penyidikan Norma Ketenagakerjaan	52.042.894
	Peningkatan Perlindungan Pekerja Perempuan dan Penghapusan Pekerja Anak	110.006.785
	Peningkatan Penerapan Norma Keselamatan dan Kesehatan Kerja	94.923.542
	Peningkatan Penerapan Norma Kerja dan Jaminan Sosial Tenaga Kerja	21.254.590
	Dukungan Manajemen dan Dukungan Teknis Lainnya Ditjen Pembinaan Pengawasan Ketenagakerjaan dan Keselamatan dan Kesehatan Kerja	220.501.951
	Peningkatan Kualitas dan Pengelolaan Keselamatan dan Kesehatan Kerja (K3)	191.743.599
BADAN PERENCANAAN DAN PENGEMBANGAN KETENAGAKERJAAN		**76.957.476**
	PELAYANAN UMUM	**76.957.476**
	Program Penelitian dan Pengembangan Kementerian Tenaga Kerja dan Transmigrasi	**76.957.476**
	Pengelolaan Data dan Informasi Ketenagakerjaan	5.188.940
	Penelitian dan Pengembangan Ketenagakerjaan	6.404.318
	Dukungan Manajemen dan Dukungan Teknis Lainnya Badan Perencanaan dan Pengembangan Ketenagakerjaan	34.190.000
	Penyusunan Perencanaan Tenaga Kerja	8.191.500
	Pengembangan Sistem Informasi	22.982.718
DITJEN PEMBINAAN PELATIHAN DAN PRODUKTIVITAS		**1.632.812.823**
	EKONOMI	**1.195.768.919**
	Program Peningkatan Kompetensi Tenaga Kerja dan Produktivitas	**1.195.768.919**
	Pengembangan Sistem dan Pelaksanaan Sertifikasi Kompetensi Profesi	182.721.707
	Peningkatan Kompetensi Tenaga Kerja dan Pengembangan Program Pelatihan Bidang Industri	56.891.064
	Pengembangan dan Peningkatan Kompetensi Instruktur dan Tenaga Kerja Orientasi Pasar Kerja Luar Negeri	25.799.191
	Pengembangan dan Peningkatan Kompetensi Instruktur dan Tenaga Kerja Orientasi Pasar Kerja dalam Negeri	25.332.577
	Pelaksanaan dan Peningkatan Produktivitas	8.634.432
	Peningkatan Kompetensi Tenaga Kerja Bidang Industri	109.943.178
	Peningkatan Kompetensi Instruktur dan Tenaga Pelatihan	28.327.340
	Peningkatan Kapasitas Kelembagaan, Pelatihan Kerja dan Produktivitas	633.934.069
	Pengembangan dan Peningkatan Penyelenggaraan Pemagangan dalam dan Luar Negeri	1.609.877
	Pengembangan dan Peningkatan Produktivitas	9.221.538
	Pengembangan Standardisasi Kompetensi Kerja dan Pelatihan Kerja	57.920.794
	Dukungan Manajemen dan Dukungan Teknis Lainnya Direktorat Jenderal Pembinaan Pelatihan dan Produktivitas (Ditjen Binalattas)	55.433.152
	PENDIDIKAN	**437.043.904**
	Program Peningkatan Kompetensi Tenaga Kerja dan Produktivitas	**437.043.904**
	Pengembangan Sistem dan Pelaksanaan Sertifikasi Kompetensi Profesi Binalattas	19.154.347
	Peningkatan Kompetensi Instruktur dan Tenaga Kepelatihan Binalattas	23.862.273
	Peningkatan Penyelenggaraan Pemagangan dalam dan Luar Negeri Binalattas	53.300.049

www.peraturan.go.id

LAMPIRAN III

RINCIAN ANGGARAN BELANJA PEMERINTAH PUSAT PADA BAGIAN ANGGARAN KEMENTERIAN NEGARA/LEMBAGA

K/L : KEMENTERIAN KETENAGAKERJAAN

(dalam ribuan rupiah)

UNIT ORGANISASI	FUNGSI/PROGRAM/KEGIATAN	ALOKASI ANGGARAN
1	2	3
	Pengembangan dan Peningkatan Produktivitas Binalattas	23.477.368
	Pengembangan Standardisasi Kompetensi Kerja dan Program Pelatihan Binalattas	317.749.867

www.peraturan.go.id

LAMPIRAN III

RINCIAN ANGGARAN BELANJA PEMERINTAH PUSAT PADA BAGIAN ANGGARAN KEMENTERIAN NEGARA/LEMBAGA

K/L : KEMENTERIAN SOSIAL

(dalam ribuan rupiah)

UNIT ORGANISASI	FUNGSI/PROGRAM/KEGIATAN	ALOKASI ANGGARAN
1	2	3
KEMENTERIAN SOSIAL		**22.421.764.535**
SEKRETARIAT JENDERAL		**234.028.539**
	PELAYANAN UMUM	**234.028.539**
	Program Dukungan Manajemen dan Pelaksanaan Tugas Teknis Lainnya Kementerian Sosial	**234.028.539**
	Hubungan Masyarakat	21.479.352
	Tata Kelola Keuangan	67.288.733
	Tata Kelola Organisasi dan Kepegawaian	14.807.200
	Perencanaan dan Penganggaran	23.724.817
	Peningkatan Sarana dan Prasarana	81.609.212
	Penyuluhan Sosial	17.310.080
	Penyusunan, Kajian Perundang-Undangan dan Bantuan Hukum	7.809.145
INSPEKTORAT JENDERAL		**29.303.790**
	PELAYANAN UMUM	**29.303.790**
	Program Pengawasan dan Peningkatan Akuntabilitas Aparatur Kementerian Sosial	**29.303.790**
	Pengawasan dan Pemeriksaan Bidang Pemberdayaan Sosial dan Penanggulangan Kemiskinan	1.767.225
	Pengawasan dan Pemeriksaan Bidang Rehabilitasi Sosial	2.002.602
	Pengawasan dan Pemeriksaan Bidang Perlindungan dan Jaminan Sosial	1.731.970
	Pengawasan dan Pemeriksaan Bidang Penunjang	1.846.078
	Dukungan Manajemen dan Pelaksanaan Tugas Teknis Lainnya Itjen Kementerian Sosial	21.955.915
DITJEN PEMBERDAYAAN SOSIAL DAN PENANGGULANGAN KEMISKINAN		**1.596.309.794**
	PELAYANAN UMUM	**82.241.329**
	Program Pemberdayaan Sosial dan Penanggulangan Kemiskinan	**82.241.329**
	Dukungan Manajemen dan Pelaksanaan Tugas Teknis Lainnya Kementerian Sosial Ditjen Pemberdayaan Sosial dan Penanggulangan Kemiskinan	82.241.329
	PERLINDUNGAN SOSIAL	**1.514.068.465**
	Program Pemberdayaan Sosial dan Penanggulangan Kemiskinan	**1.514.068.465**
	Pelestarian Kepahlawanan, Keperintisan, dan Kesetiakawanan Sosial	140.978.800
	Penanggulangan Kemiskinan Perdesaan	751.474.974
	Pemberdayaan Keluarga dan Kelembagaan Sosial Masyarakat	80.465.516
	Pemberdayaan Komunitas Adat Terpencil (KAT)	126.144.700
	Penanggulangan Kemiskinan Perkotaan	415.004.475
DITJEN REHABILITASI SOSIAL		**1.731.679.110**
	PELAYANAN UMUM	**68.055.256**
	Program Rehabilitasi Sosial	**68.055.256**
	Dukungan Manajemen dan Pelaksanaan Tugas Teknis Lainnya Kementerian Sosial Ditjen Rehabilitasi Sosial	68.055.256
	PERLINDUNGAN SOSIAL	**1.663.623.854**
	Program Rehabilitasi Sosial	**1.663.623.854**
	Rehabilitasi Sosial Korban Penyalahgunaan Napza	306.292.825

www.peraturan.go.id

LAMPIRAN III

RINCIAN ANGGARAN BELANJA PEMERINTAH PUSAT PADA BAGIAN ANGGARAN KEMENTERIAN NEGARA/LEMBAGA

K/L : KEMENTERIAN SOSIAL

(dalam ribuan rupiah)

UNIT ORGANISASI	FUNGSI/PROGRAM/KEGIATAN	ALOKASI ANGGARAN
1	2	3
	Rehabilitasi Sosial Orang Dengan Kecacatan	566.697.638
	Rehabilitasi Sosial Tuna Sosial	111.345.430
	Rehabilitasi dan Perlindungan Sosial Anak	472.175.136
	Pelayanan Sosial Lanjut Usia	207.112.825
DITJEN PERLINDUNGAN DAN JAMINAN SOSIAL		**17.665.545.316**
PELAYANAN UMUM		**52.148.339**
Program Perlindungan dan Jaminan Sosial		**52.148.339**
	Dukungan Manajemen dan Pelaksanaan Tugas Teknis Lainnya Kementerian Sosial Ditjen Perlindungan dan Jaminan Sosial	52.148.339
PERLINDUNGAN SOSIAL		**17.613.396.977**
Program Perlindungan dan Jaminan Sosial		**17.613.396.977**
	Perlindungan Sosial Korban Bencana Alam	551.678.600
	Perlindungan Sosial Korban Bencana Sosial	10.391.912.227
	Perlindungan Sosial Korban Tindak Kekerasan dan Pekerja Migran	133.923.250
	Jaminan Kesejahteraan Sosial (Bantuan Tunai Bersyarat/Program Keluarga Harapan)	6.457.161.700
	Pengumpulan dan Pengelolaan Sumber Dana Sosial	59.852.500
	Asuransi Kesejahteraan Sosial (Askesos)	18.868.700
BADAN PENDIDIKAN DAN PENELITIAN KESEJAHTERAAN SOSIAL		**1.164.897.986**
PELAYANAN UMUM		**300.513.294**
Program Pendidikan, Pelatihan, Penelitian, dan Pengembangan Kesejahteraan Sosial		**300.513.294**
	Pendidikan dan Pelatihan Kesejahteraan Sosial Regional (I-VI)	246.310.506
	Pendidikan dan Pelatihan Kesejahteraan Sosial Pusat	33.502.505
	Dukungan Manajemen dan Pelaksanaan Tugas Teknis Lainnya Kementerian Sosial Badiklit Kesos	20.700.283
PENDIDIKAN		**89.822.665**
Program Pendidikan, Pelatihan, Penelitian, dan Pengembangan Kesejahteraan Sosial		**89.822.665**
	Pendidikan Tinggi Kesejahteraan Sosial	89.822.665
PERLINDUNGAN SOSIAL		**774.562.027**
Program Pendidikan, Pelatihan, Penelitian, dan Pengembangan Kesejahteraan Sosial		**774.562.027**
	Penelitian Terapan Kebijakan Pembangunan Kesejahteraan Sosial	49.411.386
	Pengembangan Sistem Informasi Kesejahteraan Sosial	665.032.032
	Penelitian Kebijakan Pembangunan Kesejahteraan Sosial	38.643.010
	Pembinaan Jabatan Fungsional Pekerja Sosial dan Penyuluh Sosial	21.475.599

www.peraturan.go.id

LAMPIRAN III

RINCIAN ANGGARAN BELANJA PEMERINTAH PUSAT PADA BAGIAN ANGGARAN KEMENTERIAN NEGARA/LEMBAGA

K/L : KEMENTERIAN LINGKUNGAN HIDUP DAN KEHUTANAN

(dalam ribuan rupiah)

UNIT ORGANISASI	FUNGSI/PROGRAM/KEGIATAN	ALOKASI ANGGARAN
1	2	3
KEMENTERIAN LINGKUNGAN HIDUP DAN KEHUTANAN		**6.667.837.974**
SEKRETARIAT JENDERAL		**1.120.316.835**
FUNGSI PELAYANAN UMUM		**1.120.316.835**
Program Dukungan Manajemen dan Pelaksanaan Tugas Teknis Lainnya Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan		**1.120.316.835**
	Penyiaran dan Penyebarluasan Informasi Pembangunan LHK	18.590.075
	Penyelenggaraan Data dan Informasi KLHK	14.000.000
	Koordinasi Kegiatan Perencanaan dan Evaluasi	351.323.517
	Penyelenggaraaan Ketatausahaan Kerumahtanggaan dan Pengelolaan Perlengkapan Kementerian LHK	403.192.830
	Pembiayaaan Pembangunan Lingkungan Hidup dan Kehutanan	100.839.647
	Pembinaan dan Koordinasi Kerjasama Luar Negeri	12.593.658
	Pengendalian Ekoregion Jawa	22.995.600
	Pengendalian Ekoregion Bali-Nusra	16.899.700
	Pengendalian Ekoregion Kalimantan	19.894.131
	Pengendalian Ekoregion Sulawesi	15.791.800
	Pengendalian Ekoregion Maluku	6.000.000
	Pengendalian Ekoregion Papua	11.669.800
	Pengendalian Ekoregion Sumatera	27.923.400
	Penyelenggaraaan Administrasi Keuangan Kementerian LHK	52.813.138
	Penyelenggaraaan Administrasi dan Penataan Kepegawaian Kementerian LHK	20.163.335
	Pembinaan Standarisasi Pengelolaan Lingkungan Hidup dan Kehutanan	11.391.548
	Pengembangan Telaahan Kebijakan, Perundang-undangan Bidang Lingkungan Hidup dan Kehutanan	14.234.656
INSPEKTORAT JENDERAL		**63.634.941**
FUNGSI PELAYANAN UMUM		**63.634.941**
Program Pengawasan dan Peningkatan Akuntabilitas Aparatur Bidang Lingkungan Hidup dan Kehutanan		**63.634.941**
	Kegiatan Pengawasan yang Profesional Guna Menjamin Mutu Kinerja Kementerian LHK pada Wilayah Kerja Itwil I	3.541.300
	Kegiatan Pengawasan yang Profesional Guna Menjamin Mutu Kinerja Kementerian LHK pada Wilayah Kerja Itwil II	3.603.998
	Kegiatan Pengawasan yang Profesional Guna Menjamin Mutu Kinerja Kementerian LHK pada Wilayah Kerja Itwil III	3.762.650
	Kegiatan Pengawasan yang Profesional Guna Menjamin Mutu Kinerja Kementerian LHK pada Wilayah Kerja Itwil IV	3.985.465
	Kegiatan Pengawasan Terhadap Kasus Pelanggaran yang Berindikasi KKN	2.915.008
	Kegiatan Dukungan Manajemen dan Pelaksanaan Tugas Teknis Lainnya Itjen Kementerian LHK	45.826.320
DIREKTORAT JENDERAL PLANOLOGI KEHUTANAN DAN TATA LINGKUNGAN		**510.525.297**
FUNGSI PELAYANAN UMUM		**100.352.049**
Program Planologi dan Tata Lingkungan		**100.352.049**
	Dukungan Manajemen dan Pelaksanaan Tugas Teknis Lainnya	100.352.049
FUNGSI EKONOMI		**353.597.042**
Program Planologi dan Tata Lingkungan		**353.597.042**
	Pengukuhan dan Penatagunaan Kawasan Hutan	12.526.640
	Penggunaan Kawasan Hutan	14.552.162

www.peraturan.go.id

LAMPIRAN III

RINCIAN ANGGARAN BELANJA PEMERINTAH PUSAT PADA BAGIAN ANGGARAN KEMENTERIAN NEGARA/LEMBAGA

K/L : KEMENTERIAN LINGKUNGAN HIDUP DAN KEHUTANAN

(dalam ribuan rupiah)

UNIT ORGANISASI	FUNGSI/PROGRAM/KEGIATAN	ALOKASI ANGGARAN
1	2	3
	Pemantapan Kawasan Hutan	326.518.240
	FUNGSI LINGKUNGAN HIDUP	**56.576.206**
	Program Planologi dan Tata Lingkungan	**56.576.206**
	Inventarisasi dan Pemantauan Sumber Daya Hutan	11.143.772
	Perencanaan Pengelolaan SDA dan LH serta KPH	39.237.274
	Instrumentasi dan Analisis Lingkungan	6.195.160
DIREKTORAT JENDERAL KONSERVASI SUMBER DAYA ALAM DAN EKOSISTEM		**1.547.011.816**
	FUNGSI LINGKUNGAN HIDUP	**1.547.011.816**
	Program Konservasi Sumber Daya Alam dan Ekosistem	**1.547.011.816**
	Pengelolaan Kawasan Pelestarian Alam	8.000.000
	Pengelolaan Kawasan Suaka Alam dan Taman Buru	19.211.689
	Konservasi Spesies dan Genetik	25.199.448
	Pemanfaatan Jasa Lingkungan Kawasan Konservasi	20.137.667
	Pembinaan Konservasi Kawasan Ekosistem Esensial	18.764.923
	Konservasi Sumber Daya Alam Hayati	643.369.018
	Pengelolaan Taman Nasional	772.109.975
	Dukungan Manajemen dan Pelaksanaan Tugas Teknis Lainnya Ditjen KSDAE	40.219.096
DIREKTORAT JENDERAL PENGENDALIAN DAERAH ALIRAN SUNGAI DAN HUTAN LINDUNG		**1.088.273.984**
	FUNGSI PELAYANAN UMUM	**59.130.028**
	Program Pengendalian DAS dan Hutan Lindung	**59.130.028**
	Dukungan Manajemen dan Pelaksanaan Tugas Teknis Lainnya Ditjen Pengendalian DAS dan Hutan Lindung	59.130.028
	FUNGSI LINGKUNGAN HIDUP	**1.029.143.956**
	Program Pengendalian DAS dan Hutan Lindung	**1.029.143.956**
	Pembinaan Rehabilitasi dan Reklamasi Hutan, Rehabilitasi Lahan serta Konservasi Tanah dan Air	9.727.055
	Pembinaan Kesatuan Pengelolaan Hutan Lindung	6.050.000
	Pembinaan Penyelenggaraan Pengelolaan DAS	7.123.124
	Pembinaan Pengembangan Perbenihan Tanaman Hutan	6.960.870
	Pembinaan Pengendalian Kerusakan Perairan Darat	23.563.185
	Penyelenggaraan Rehabilitasi dan Reklamasi Hutan, Rehabilitasi Lahan, Perencanaan DAS, serta Pengendalian Kerusakan Perairan Darat	884.889.340
	Penyelenggaraan Perbenihan Tanaman Hutan	65.394.526
	Penyelenggaraan Pengelolaan Hutan Mangrove	14.782.702
	Penyelenggaraan Pengembangan Persuteraan Alam	10.653.154
DIREKTORAT JENDERAL PENGELOLAAN HUTAN PRODUKSI LESTARI		**570.449.173**
	FUNGSI PELAYANAN UMUM	**50.831.420**
	Program Pengelolaan Hutan Produksi Lestari dan Usaha Kehutanan	**50.831.420**
	Dukungan Manajemen dan Pelaksanaan Tugas Teknis Lainnya Ditjen Pengelolaan Hutan Produksi Lestari	50.831.420
	FUNGSI EKONOMI	**519.617.753**
	Program Pengelolaan Hutan Produksi Lestari dan Usaha Kehutanan	**519.617.753**

www.peraturan.go.id

LAMPIRAN III

RINCIAN ANGGARAN BELANJA PEMERINTAH PUSAT PADA BAGIAN ANGGARAN KEMENTERIAN NEGARA/LEMBAGA

K/L : KEMENTERIAN LINGKUNGAN HIDUP DAN KEHUTANAN

(dalam ribuan rupiah)

UNIT ORGANISASI	FUNGSI/PROGRAM/KEGIATAN	ALOKASI ANGGARAN
1	2	3
	Peningkatan Perencanaan Pengelolaan Hutan Produksi	10.659.862
	Peningkatan Usaha Hutan Produksi	20.228.357
	Peningkatan Tertib Penatausahaan Hasil Hutan dan Iuran Kehutanan	8.487.643
	Peningkatan Usaha Jasa Lingkungan Hutan Produksi	5.863.879
	Peningkatan Usaha Industri Kehutanan	16.000.000
	Pembinaan Pengelolaan Hutan Produksi dan Industri Hasil Hutan	458.378.012
DIREKTORAT JENDERAL PENGENDALIAN PENCEMARAN DAN KERUSAKAN LINGKUNGAN		**126.009.571**
	FUNGSI LINGKUNGAN HIDUP	**126.009.571**
	Program Pengendalian Pencemaran dan Kerusakan Lingkungan	**126.009.571**
	Pengendalian Pencemaran Udara	25.283.474
	Pengendalian Pencemaran Air	26.500.000
	Pengendalian Pencemaran dan Kerusakan Pesisir dan Laut	25.250.000
	Pemulihan Kerusakan Lahan Akses Terbuka	17.157.800
	Pengendalian Pencemaran dan Kerusakan Lahan Gambut	27.000.000
	Dukungan Manajemen Pelaksanaan Tugas Teknis Lainnya Ditjen Pengendalian Pencemaran dan Kerusakan Lingkungan hidup	4.818.297
DIREKTORAT JENDERAL PENGELOLAAN SAMPAH, LIMBAH DAN B3		**133.290.342**
	FUNGSI LINGKUNGAN HIDUP	**133.290.342**
	Program Pengelolaan Sampah, Limbah dan B3	**133.290.342**
	Pengelolaan B3	15.500.000
	Pengelolaan Limbah B3	26.000.000
	Bina Usaha Limbah B3 dan Non B3	15.500.000
	Pemulihan Kontaminasi Limbah B3	26.000.000
	Pengelolaan Sampah	40.000.000
	Dukungan Manajemen Pelaksanaan Tugas Teknis Lainnya Ditjen Pengelolaan Sampah, Limbah dan B3	10.290.342
DIREKTORAT JENDERAL PENGENDALIAN PERUBAHAN IKLIM		**153.483.331**
	FUNGSI LINGKUNGAN HIDUP	**153.483.331**
	Program Pengendalian Perubahan Iklim	**153.483.331**
	Adaptasi Perubahan Iklim	6.442.120
	Mitigasi Perubahan Iklim	19.090.835
	Inventarisasi Gas Rumah Kaca serta Monitoring, Pelaporan dan Verifikasi	4.000.000
	Pengembangan Insentif dan Kerjasama Perubahan Iklim	6.500.000
	Pengendalian Kebakaran Hutan dan Lahan	111.042.213
	Dukungan Manajemen dan Pelaksanaan Tugas Teknis Lainnya Ditjen Pengendalian Perubahan Iklim	6.408.163
DIREKTORAT JENDERAL PERHUTANAN SOSIAL DAN KEMITRAAN LINGKUNGAN		**308.158.941**
	FUNGSI PELAYANAN UMUM	**147.958.941**
	Program Perhutanan Sosial dan Kemitraan Lingkungan	**147.958.941**
	Dukungan Manajemen dan Pelaksanaan Tugas Teknis Lainnya Ditjen Perhutanan Sosial dan Kemitraan Lingkungan	147.958.941
	FUNGSI LINGKUNGAN HIDUP	**160.200.000**

www.peraturan.go.id

LAMPIRAN III

RINCIAN ANGGARAN BELANJA PEMERINTAH PUSAT PADA BAGIAN ANGGARAN KEMENTERIAN NEGARA/LEMBAGA

K/L : KEMENTERIAN LINGKUNGAN HIDUP DAN KEHUTANAN

(dalam ribuan rupiah)

UNIT ORGANISASI	FUNGSI/PROGRAM/KEGIATAN	ALOKASI ANGGARAN
1	2	3
	Program Perhutanan Sosial dan Kemitraan Lingkungan	**160.200.000**
	Penyiapan Areal Perhutanan Sosial	51.550.000
	Pengembangan Usaha Perhutanan Sosial	86.344.400
	Kemitraan Lingkungan dan Peran Serta Masyarakat	7.950.000
	Penanganan Konflik	7.950.000
	Penanganan Tenurial dan Hutan Adat	6.405.600
DIREKTORAT JENDERAL PENEGAKAN HUKUM LINGKUNGAN HIDUP DAN KEHUTANAN		**212.431.280**
	FUNGSI LINGKUNGAN HIDUP	**212.431.280**
	Program Penegakan Hukum Lingkungan Hidup dan Kehutanan	**212.431.280**
	Pencegahan Pelanggaran Hukum Lingkungan dan Kehutanan	50.838.633
	Fasilitasi dan Dukungan Penegakan Hukum dan Lingkungan Kehutanan	26.649.147
	Penanganan Hukum Administrasi dan Hukum Perdata	15.550.000
	Penanganan Tindak Pidana Lingkungan Hidup dan Kehutanan	96.536.391
	Dukungan Manajemen dan Pelaksanaan Tugas Teknis Lainnya Ditjen Penegakan Hukum Lingkungan Hidup dan Kehutanan	22.857.109
BADAN PENYULUHAN DAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA		**444.447.325**
	FUNGSI PELAYANAN UMUM	**63.060.552**
	Program Peningkatan Penyuluhan dan Pengembangan SDM	**63.060.552**
	Dukungan Manajemen dan Pelaksanaan Tugas Teknis Lainnya Badan Penyuluhan dan Pengembangan SDM	63.060.552
	FUNGSI LINGKUNGAN HIDUP	**110.431.974**
	Program Peningkatan Penyuluhan dan Pengembangan SDM	**110.431.974**
	Perencanaan dan Pengembangan SDM	57.109.080
	Penyelenggaraan Pelatihan Masyarakat dan Pengembangan Generasi Lingkungan Hidup	23.745.568
	Peningkatan Penyuluhan	29.577.326
	FUNGSI PENDIDIKAN	**270.954.799**
	Program Peningkatan Penyuluhan dan Pengembangan SDM	**270.954.799**
	Penyelenggaraan Diklat Aparatur LHK	210.592.347
	Penyelenggaraan Pendidikan Menengah Kejuruan Kehutanan	60.362.452
BADAN PENELITIAN, PENGEMBANGAN DAN INOVASI		**389.805.138**
	FUNGSI PELAYANAN UMUM	**389.805.138**
	Program Penelitian dan Pengembangan Lingkungan Hidup dan Kehutanan	**389.805.138**
	Penelitian Pengelolaan Hutan	49.610.058
	Penelitian Peningkatan Nilai Tambah Hasil Hutan	28.868.059
	Penelitian Kualitas Lingkungan dan Pengelolaan Laboratorium Lingkungan	30.034.242
	Penelitian Sosekjak serta Pengembangan Hasil Penelitian	29.601.561
	Pelaksanaan Kegiatan Penelitian Tematik Unit Litbang LHK di Daerah	213.585.832
	Dukungan Manajemen dan Pelaksanaan Tugas Teknis Lainnya Badan Litbang LHK	38.105.386

www.peraturan.go.id

LAMPIRAN III

RINCIAN ANGGARAN BELANJA PEMERINTAH PUSAT PADA BAGIAN ANGGARAN KEMENTERIAN NEGARA/LEMBAGA

K/L : KEMENTERIAN KELAUTAN DAN PERIKANAN

(dalam ribuan rupiah)

UNIT ORGANISASI	FUNGSI/PROGRAM/KEGIATAN	ALOKASI ANGGARAN
1	2	3
KEMENTERIAN KELAUTAN DAN PERIKANAN		10.597.807.865
SEKRETARIAT JENDERAL		398.946.700
	PELAYANAN UMUM	398.946.700
	Program Dukungan Manajemen dan Pelaksanaan Tugas Teknis Lainnya KKP	398.946.700
	Pembinaan dan Koordinasi Penyiapan Produk Hukum dan Penataan Organisasi KKP	10.380.061
	Pembinaan dan Pengelolaan Kepegawaian KKP	15.782.404
	Pembinaan Pelaksanaan dan Koordinasi Pengelolaan Keuangan KKP	16.134.455
	Pembinaan dan Koordinasi Perencanaan, Penganggaran dan Monev Pembangunan KKP	34.231.347
	Pembinaan Administrasi dan Pengelolaan Pelayanan Penunjang Pelaksanaan Tugas KKP	254.052.955
	Perumusan dan Pengembangan Kebijakan Kelautan	15.847.226
	Pengembangan dan Pembinaan Kerja Sama Internasional dan Antar Lembaga Bidang Kelautan Perikanan	17.380.524
	Pengembangan Data Satistik dan Informasi Kelautan Perikanan	29.030.408
	Pengelolaan Modal Usaha Kelautan dan Perikanan	6.107.320
INSPEKTORAT JENDERAL		73.209.000
	PELAYANAN UMUM	73.209.000
	Program Pengawasan dan Peningkatan Akuntabilitas Aparatur KKP	73.209.000
	Pengawasan Akuntabilitas Aparatur pada Unit Kerja Mitra Inspektorat I dan Pelaksana Pembangunan KP	5.588.789
	Pengawasan Akuntabilitas Aparatur pada Unit Kerja Mitra Inspektorat II dan Pelaksana Pembangunan KP	5.801.392
	Pengawasan Akuntabilitas Aparatur pada Unit Kerja Mitra Inspektorat III dan Pelaksana Pembangunan KP	5.580.489
	Pengawasan Akuntabilitas Aparatur pada Unit Kerja Mitra Inspektorat IV dan Pelaksana Pembangunan KP	5.481.298
	Pengawasan Akuntabilitas Aparatur Dengan Tujuan Tertentu pada Pelaksana Pembangunan KP dan Pengawasan pada unit kerja Mitra Inspektorat V	5.764.679
	Dukungan Manajemen dan Pelaksanaan Tugas Teknis Lainnya Itjen Kementerian Kelautan dan Perikanan	44.992.353
DITJEN PERIKANAN TANGKAP		2.684.153.040
	PELAYANAN UMUM	268.259.801
	Program Pengembangan dan Pengelolaan Perikanan Tangkap	268.259.801
	Peningkatan Dukungan Manajemen dan Pelaksanaan Tugas Teknis Lainnya Ditjen Perikanan Tangkap	268.259.801
	EKONOMI	2.415.893.239
	Program Pengembangan dan Pengelolaan Perikanan Tangkap	2.415.893.239
	Pembinaan dan Pengembangan Kapal Perikanan, Alat Penangkap Ikan, dan Pengawakan Kapal Perikanan	491.705.425
	Pengembangan Pembangunan dan Pengelolaan Pelabuhan Perikanan	1.285.698.543
	Pelayanan Usaha Perikanan Tangkap	39.420.376
	Pengembangan Usaha Penangkapan Ikan dan Pemberdayaan Nelayan	437.451.633
	Pengelolaan Sumber Daya Ikan (SDI)	161.617.262
DITJEN PERIKANAN BUDIDAYA		1.360.771.200
	PELAYANAN UMUM	285.908.087
	Program Pengelolaan Sumber Daya Perikanan Budidaya	285.908.087
	Peningkatan Dukungan Manajemen dan Pelaksanaan Tugas Teknis Lainnya Ditjen Perikanan Budidaya	285.908.087

www.peraturan.go.id

LAMPIRAN III

RINCIAN ANGGARAN BELANJA PEMERINTAH PUSAT PADA BAGIAN ANGGARAN KEMENTERIAN NEGARA/LEMBAGA

K/L : **KEMENTERIAN KELAUTAN DAN PERIKANAN**

(dalam ribuan rupiah)

UNIT ORGANISASI	FUNGSI/PROGRAM/KEGIATAN	ALOKASI ANGGARAN
1	2	3
	EKONOMI	**1.074.863.113**
	Program Pengelolaan Sumber Daya Perikanan Budidaya	**1.074.863.113**
	Pengelolaan Sistem Kesehatan Ikan dan Lingkungan Pembudidayaan Ikan	107.660.918
	Pengelolaan Sistem Perbenihan Ikan	150.811.653
	Pengelolaan Sistem Prasarana dan Sarana Pembudidayaan Ikan	451.706.364
	Pengelolaan Sistem Produksi Pembudidayaan Ikan	249.240.563
	Pengelolaan Sistem Usaha Pembudidayaan Ikan	115.443.615
DITJEN PENGAWASAN SUMBERDAYA KELAUTAN DAN PERIKANAN		**1.529.542.518**
	PELAYANAN UMUM	**170.540.693**
	Program Pengawasan Pemanfaatan Sumber Daya Kelautan dan Perikanan	**170.540.693**
	Dukungan Manajemen dan Pelaksanaan Tugas Teknis Lainnya Ditjen PSDKP	170.540.693
	EKONOMI	**1.359.001.825**
	Program Pengawasan Pemanfaatan Sumber Daya Kelautan dan Perikanan	**1.359.001.825**
	Operasional dan Pemeliharaan Kapal Pengawas	497.202.763
	Penyelesaian Tindak Pidana Kelautan dan Perikanan	27.774.380
	Operasional Pengawasan Pemanfaatan Sumber Daya Kelautan	22.985.921
	Operasional Pengawasan Pemanfaatan Sumber Daya Perikanan	42.190.478
	Operasional Pemantauan Pemanfaatan SDKP dan Pengembangan Infrastruktur Pengawasan	768.848.283
DITJEN PENGOLAHAN DAN PEMASARAN HASIL PERIKANAN (PHP)		**1.008.866.500**
	PELAYANAN UMUM	**155.949.490**
	Program Peningkatan Daya Saing Usaha dan Produk Kelautan dan Perikanan	**155.949.490**
	Dukungan Manajemen dan Pelaksanaan Tugas Teknis di Bidang Pasca Panen dan Pemasaran Hasil Kelautan dan Perikanan	155.949.490
	EKONOMI	**852.917.010**
	Program Peningkatan Daya Saing Usaha dan Produk Kelautan dan Perikanan	**852.917.010**
	Peningkatan Serapan Pasar Domestik Hasil Kelautan dan Perikanan	199.070.258
	Penguatan dan Perluasan Akses Pasar Luar Negeri Hasil Kelautan dan Perikanan	35.571.945
	Pengembangan Produk dan Usaha Pengolahan Hasil Kelautan dan Perikanan	356.526.007
	Pengembangan Produk dan Usaha Pasca Panen Non Pangan Hasil Perikanan	118.557.081
	Peningkatan Investasi dan Perluasan Usaha Pasca Panen Kelautan dan Perikanan	119.491.467
	Pengembangan Uji Terap Produk dan Alat Pasca Panen dan Pemasaran Hasil Kelautan dan Perikanan	23.700.252
DITJEN KELAUTAN PESISIR DAN PULAU-PULAU KECIL (KPK)		**1.382.359.292**
	PELAYANAN UMUM	**207.016.192**
	Program Pengelolaan Sumber Daya Laut Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil	**207.016.192**
	Peningkatan Dukungan Manajemen dan Pelaksanaan Tugas Teknis Lainnya Ditjen KPK	207.016.192
	EKONOMI	**595.000.000**
	Program Pengelolaan Sumber Daya Laut Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil	**595.000.000**
	Pemberdayaan Masyarakat Pesisir dan Pengembangan Usaha	405.000.000
	Pendayagunaan Pesisir dan Lautan	190.000.000

www.peraturan.go.id

LAMPIRAN III

RINCIAN ANGGARAN BELANJA PEMERINTAH PUSAT PADA BAGIAN ANGGARAN KEMENTERIAN NEGARA/LEMBAGA

K/L : KEMENTERIAN KELAUTAN DAN PERIKANAN

(dalam ribuan rupiah)

UNIT ORGANISASI	FUNGSI/PROGRAM/KEGIATAN	ALOKASI ANGGARAN
1	2	3
	LINGKUNGAN HIDUP	**580.343.100**
	Program Pengelolaan Sumber Daya Laut Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil	**580.343.100**
	Pengelolaan dan Pengembangan Konservasi Kawasan dan Jenis	216.689.930
	Pendayagunaan Pulau-Pulau Kecil	213.000.000
	Penataan Ruang dan Perencanaan Pengelolaan Wilayah Laut, Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil	150.653.170
BADAN PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN KELAUTAN DAN PERIKANAN		**762.223.345**
	EKONOMI	**762.223.345**
	Program Penelitian dan Pengembangan Iptek Kelautan dan Perikanan	**762.223.345**
	Penelitian dan Pengembangan Iptek Pengolahan Produk dan Bioteknologi Kelautan dan Perikanan	66.159.447
	Penelitian Sosial Ekonomi Kelautan dan Perikanan	35.698.062
	Penelitian dan Pengembangan Iptek Perikanan Budidaya	208.758.390
	Penelitian Pengelolaan Perikanan dan Konservasi Sumber Daya Ikan	162.178.167
	Pengkajian dan Perekayasaan Teknologi Kelautan dan Perikanan	159.219.233
	Penelitian dan Pengembangan Iptek Kewilayahan, Dinamika dan Sumber Daya Laut dan Pesisir	67.985.964
	Peningkatan Dukungan Manajemen dan Pelaksanaan Tugas Teknis Lainnya Badan Penelitian dan Pengembangan Kelautan dan Perikanan	62.224.082
BADAN PENGEMBANGAN SDM KELAUTAN DAN PERIKANAN		**906.388.544**
	PELAYANAN UMUM	**66.714.144**
	Program Pengembangan SDM Kelautan dan Perikanan	**66.714.144**
	Dukungan Manajemen dan Pelaksanaan Tugas Teknis Lainnya BPSDM KP	66.714.144
	EKONOMI	**320.484.400**
	Program Pengembangan SDM Kelautan dan Perikanan	**320.484.400**
	Pelatihan Kelautan dan Perikanan	214.125.836
	Penyuluhan Kelautan dan Perikanan	106.358.564
	PENDIDIKAN	**519.190.000**
	Program Pengembangan SDM Kelautan dan Perikanan	**519.190.000**
	Pendidikan Kelautan dan Perikanan	519.190.000
BADAN KARANTINA IKAN PENGENDALIAN MUTU DAN KEAMANAN HASIL PERIKANAN		**491.347.726**
	PELAYANAN UMUM	**265.648.492**
	Program Pengembangan Karantina Ikan, Pengendalian Mutu dan Keamanan Hasil Perikanan	**265.648.492**
	Peningkatan Dukungan Manajemen dan Pelaksanaan Tugas Teknis Lainnya BKIPM	265.648.492
	EKONOMI	**225.699.234**
	Program Pengembangan Karantina Ikan, Pengendalian Mutu dan Keamanan Hasil Perikanan	**225.699.234**
	Pengembangan dan Pembinaan Perkarantinaan Ikan	159.849.033
	Pengembangan Sistem Jaminan Mutu dan Keamanan Hasil Perikanan	36.253.970
	Pengembangan Sistem Manajemen Karantina Ikan, Mutu dan Keamanan Hasil Perikanan	29.596.231

www.peraturan.go.id

LAMPIRAN III

RINCIAN ANGGARAN BELANJA PEMERINTAH PUSAT PADA BAGIAN ANGGARAN KEMENTERIAN NEGARA/LEMBAGA

K/L : KEMENTERIAN PEKERJAAN UMUM DAN PERUMAHAN RAKYAT

(dalam ribuan rupiah)

UNIT ORGANISASI	FUNGSI/PROGRAM/KEGIATAN	ALOKASI ANGGARAN
1	2	3
KEMENTERIAN PEKERJAAN UMUM DAN PERUMAHAN RAKYAT		118.546.078.701
SEKRETARIAT JENDERAL		625.555.019
	PELAYANAN UMUM	625.555.019
	Program Dukungan Manajemen dan Pelaksanaan Tugas Teknis Lainnya Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat	262.455.019
	Penyusunan Perencanaan, Pemrograman, Penganggaran, Pemantauan dan Evaluasi, serta Pembinaan PHLN	122.284.019
	Pengelolaan dan Pengembangan SDM dan Organisasi Tatalaksana	45.671.000
	Pembinaan dan Pengelolaan Keuangan Kementerian	30.500.000
	Pembinaan Perencanaan Harmonisasi dan Publikasi Peraturan Perundang-Undangan serta Bantuan Hukum	29.000.000
	Penyelenggaraan Pengelolaan Barang Milik Negara Kementerian PU	35.000.000
	Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat	363.100.000
	Pembangunan Infrastruktur	134.427.740
	Penyelenggaraan dan Pembinaan Informasi Publik	52.407.800
	Dukungan Manajemen dan Pelaksanaan Tugas Teknis Lainnya Kementerian PU	105.247.200
	Penyelenggaraan dan Pengembangan Data dan Sistem Informasi Bidang Pekerjaan Umum dan Permukiman	71.017.260
BADAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA		568.542.965
	PELAYANAN UMUM	568.542.965
	Program Pengembangan Sumber Daya Manusia	568.542.965
	Penyusunan Perencanaan Program, Penganggaran, Pembinaan, Monev serta SIM	256.951.444
	Perencanaan Pengembangan, Pembinaan dan Monev Karir, Kompetensi dan Kinerja SDM PU PR	70.880.060
	Perencanaan Pengembangan, Penyelenggaraan dan Monev Kompetensi Teknis SDA dan Konstruksi	87.875.699
	Perencanaan Pengembangan, Penyelenggaraan dan Monev Kompetensi Teknis Jalan, Perumahan Permukiman dan Pengembangan Wilayah	80.835.478
	Penyelenggaraan Pendidikan dan Pelatihan Bidang Manajemen dan Pengembangan Jabatan Fungsional	72.000.284
INSPEKTORAT JENDERAL		105.200.000
	EKONOMI	105.200.000
	Program Pengawasan dan Peningkatan Akuntabilitas Aparatur Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat	105.200.000
	Pengelolaan Hasil Pelaksanaan Pengawasan Pemantauan dan Pemeriksaan	67.009.000
	Pelaksanaan Koordinasi Pemantauan Evaluasi dan Pemeriksaan Penyelenggaraan Bidang PUPR di Wilayah I	9.159.400
	Pelaksanaan Koordinasi Pemantauan Evaluasi dan Pemeriksaan Penyelenggaraan Bidang PUPR di Wilayah II	6.755.400
	Pelaksanaan Koordinasi Pemantauan Evaluasi dan Pemeriksaan Penyelenggaraan Bidang PUPR di Wilayah III	10.008.400
	Pelaksanaan Koordinasi Pemantauan Evaluasi dan Pemeriksaan Penyelenggaraan Bidang PUPR di Wilayah IV	7.839.400
	Pelaksanaan Koordinasi Pemantauan Evaluasi dan Pemeriksaan Penyelenggaraan Bidang PUPR di Inspektorat Khusus	4.428.400
BADAN PENGEMBANGAN INFRASTRUKTUR WILAYAH		525.000.000
	EKONOMI	525.000.000
	Program Pengembangan Infrastruktur Wilayah	525.000.000
	Dukungan Manajemen Pengembangan Infrastruktur Wilayah	140.342.287
	Perencanaan Infrastruktur Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat	72.380.000
	Pemrograman dan Evaluasi Keterpaduan Infrastruktur Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat	89.664.446
	Pengembangan Kawasan Strategis	110.709.500

www.peraturan.go.id

LAMPIRAN III

RINCIAN ANGGARAN BELANJA PEMERINTAH PUSAT PADA BAGIAN ANGGARAN KEMENTERIAN NEGARA/LEMBAGA

K/L : KEMENTERIAN PEKERJAAN UMUM DAN PERUMAHAN RAKYAT

(dalam ribuan rupiah)

UNIT ORGANISASI	FUNGSI/PROGRAM/KEGIATAN	ALOKASI ANGGARAN
1	2	3
	Pengembangan Kawasan Perkotaan	111.903.767
DITJEN BINA MARGA		56.974.815.858
	PELAYANAN UMUM	868.858.878
	Program Penyelenggaraan Jalan	868.858.878
	Dukungan Manajemen, Koordinasi, Pengaturan, Pembinaan dan Pengawasan	868.858.878
	EKONOMI	56.105.956.980
	Program Penyelenggaraan Jalan	56.105.956.980
	Pengaturan, Pembinaan, Pengembangan Sistem Jaringan dan Manajemen Jalan, Pemrograman Penyelenggaraan Jalan termasuk aspek lingkungannya	117.843.017
	Penyusunan dan Pembinaan Pelaksanaan Standar, Pembinaan Teknik dan Pelaksanaan Pembangunan Jalan	46.975.000
	Penyusunan dan Pembinaan Pelaksanaan Standar, Pembinaan Teknik dan Pelaksanaan Preservasi Jalan	35.829.000
	Penyusunan dan Pembinaan Pelaksanaan Standar dan Sistem Manajemen Jembatan, Pelaksanaan Perencanaan Teknis Jembatan/Terowongan/Jembatan	30.145.000
	Manajemen dan Evaluasi Jalan Daerah, Pembinaan Teknik Pelaksanaan dan Perencanaan Jalan Daerah, Jalan Metropolitan dan Kota Besar, Jalan Bebas	4.148.474.000
	Pelaksanaan Preservasi dan Peningkatan Kapasitas Jalan Nasional	51.662.078.963
	Pengaturan, Pengusahaan, Pengawasan Jalan Tol	64.612.000
DITJEN CIPTA KARYA		19.612.517.206
	PELAYANAN UMUM	318.737.628
	Program Pembinaan dan Pengembangan Infrastruktur Permukiman	318.737.628
	Pelayanan Manajemen	256.974.828
	Dukungan Pengembangan Sistem Penyediaan Air Minum Sanitasi dan Persampahan	61.762.800
	LINGKUNGAN HIDUP	3.835.403.193
	Program Pembinaan dan Pengembangan Infrastruktur Permukiman	3.835.403.193
	Pembinaan dan Pengembangan Penyehatan Lingkungan Permukiman	3.835.403.193
	PERUMAHAN DAN FASILITAS UMUM	15.458.376.385
	Program Pembinaan dan Pengembangan Infrastruktur Permukiman	15.458.376.385
	Pembinaan dan Pengembangan Kawasan Permukiman	7.017.778.910
	Pembinaan dan Pengembangan Penataan Bangunan	1.369.084.492
	Pembinaan dan Pengembangan Air Minum	6.792.032.004
	Penyusunan Kebijakan Program dan Anggaran Kerja Sama Luar Negeri Data Informasi dan Evaluasi Kinerja	279.480.979
DITJEN SUMBER DAYA AIR		30.562.502.254
	PELAYANAN UMUM	535.664.784
	Program Pengelolaan Sumber Daya Air	535.664.784
	Dukungan Manajemen dan Pelaksanaan Tugas Teknis Lainnya Ditjen Sumber Daya Air	535.664.784
	EKONOMI	30.026.837.470
	Program Pengelolaan Sumber Daya Air	30.026.837.470
	Fasilitasi Pelaksanaan Tugas Pokok dan Fungsi Dewan Sumber Daya Air Nasional (DSDAN)	12.906.002
	Pembinaan Program Ditjen SDA	68.695.054
	Pembinaan Penatagunaan Sumber Daya Air	99.549.638
	Pembinaan Irigasi Rawa Tambak Air Baku dan Air Tanah	154.351.180

www.peraturan.go.id

LAMPIRAN III

RINCIAN ANGGARAN BELANJA PEMERINTAH PUSAT PADA BAGIAN ANGGARAN KEMENTERIAN NEGARA/LEMBAGA

K/L : KEMENTERIAN PEKERJAAN UMUM DAN PERUMAHAN RAKYAT

(dalam ribuan rupiah)

UNIT ORGANISASI	FUNGSI/PROGRAM/KEGIATAN	ALOKASI ANGGARAN
1	2	3
	Pembinaan Operasi dan Pemeliharaan Sumber Daya Air serta Penanggulangan Darurat Akibat Bencana	944.506.773
	Pembinaan Sungai Danau Waduk Pengendalian Lahar dan Pengamanan Pantai	119.966.285
	Pembinaan Keamanan Bendungan	17.180.000
	Pengembangan dan Pengelolaan Jaringan Irigasi Rawa dan Jaringan Pengairan Lainnya	10.056.810.701
	Pengendalian Banjir Lahar Gunung Berapi dan Pengamanan Pantai	8.359.560.308
	Peningkatan Kualitas Pengelolaan SDA Terpadu	1.160.299.801
	Pengelolaan dan Konservasi Waduk Embung Situ serta Bangunan Penampung Air Lainnya	6.227.801.035
	Penyediaan dan Pengelolaan Air Baku	2.805.210.693
BADAN PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN		**519.500.049**
PELAYANAN UMUM		**33.500.049**
Program Penelitian dan Pengembangan Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat		**33.500.049**
	Dukungan Manajemen dan Dukungan Teknis Lainnya Badan Litbang	33.500.049
EKONOMI		**486.000.000**
Program Penelitian dan Pengembangan Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat		**486.000.000**
	Penelitian dan Pengembangan Bidang Sumber Daya Air	148.500.000
	Penelitian dan Pengembangan Bidang Jalan dan Jembatan	171.500.000
	Penelitian dan Pengembangan Bidang Permukiman	124.000.000
	Penelitian dan Pengembangan Kebijakan dan Penerapan Teknologi	42.000.000
DITJEN BINA KONSTRUKSI		**722.899.986**
EKONOMI		**722.899.986**
Program Pembinaan Konstruksi		**722.899.986**
	Penyelenggaraan Pelayanan Teknis dan Administrasi Pembinaan Jasa Konstruksi	125.332.966
	Pembinaan Kelembagaan dan Sistem Konstruksi	50.064.870
	Pembinaan Penyelenggaraan Konstruksi	60.176.273
	Pembinaan Investasi Konstruksi	47.550.080
	Pembinaan Kompetensi dan Produktivitas Sumber Daya Konstruksi	91.811.213
	Pemberdayaan	347.964.584
DIREKTORAT JENDERAL PENYEDIAAN PERUMAHAN		**7.768.028.035**
PERUMAHAN DAN FASILITAS UMUM		**7.768.028.035**
Program Pengembangan Perumahan		**7.768.028.035**
	Dukungan Manajemen Penyelenggaraan Penyediaan Perumahan	**220.141.035**
	Penyusunan Perencanaan Penyediaan Perumahan	103.507.000
	Pembinaan dan Pengembangan Rumah Umum dan Komersial	394.340.000
	Pemberdayaan Perumahan Swadaya	1.515.800.000
	Penyediaan Rumah Khusus dan Pembinaan Rumah Negara	1.499.240.000
	Penyediaan Rumah Susun	4.035.000.000
DIREKTORAT JENDERAL PEMBIAYAAN PERUMAHAN		**561.517.329**
PERUMAHAN DAN FASILITAS UMUM		**561.517.329**

www.peraturan.go.id

LAMPIRAN III

RINCIAN ANGGARAN BELANJA PEMERINTAH PUSAT PADA BAGIAN ANGGARAN KEMENTERIAN NEGARA/LEMBAGA

K/L : **KEMENTERIAN PEKERJAAN UMUM DAN PERUMAHAN RAKYAT**

(dalam ribuan rupiah)

UNIT ORGANISASI			FUNGSI/PROGRAM/KEGIATAN		ALOKASI ANGGARAN
1			2		3
			Program Pengembangan Pembiayaan Perumahan dan Kawasan Permukiman		**561.517.329**
				Dukungan manajemen penyelenggaraan pembiayaan perumahan	**81.183.250**
				Penyusunan Kebijakan, Program dan Anggaran, Kerjasama, Data Informasi serta Evaluasi Kinerja Pembiayaan Perumahan	11.057.450
				Pengembangan Pola Pembiayaan Perumahan	228.904.650
				Pendayagunaan Sumber Pembiayaan Perumahan	11.800.000
				Pembinaan Sistem Pembiayaan Perumahan	11.504.650
				Pengendalian Kemudahan dan Bantuan Pembiayaan Perumahan	16.250.000
				Dukungan penyaluran bantuan pembiayaan perumahan	200.817.329

www.peraturan.go.id

LAMPIRAN III

RINCIAN ANGGARAN BELANJA PEMERINTAH PUSAT PADA BAGIAN ANGGARAN KEMENTERIAN NEGARA/LEMBAGA

K/L : KEMENTERIAN KOORDINATOR BIDANG POLITIK, HUKUM DAN KEAMANAN

(dalam ribuan rupiah)

UNIT ORGANISASI	FUNGSI/PROGRAM/KEGIATAN	ALOKASI ANGGARAN
1	2	3
KEMENTERIAN KOORDINATOR BIDANG POLITIK, HUKUM DAN KEAMANAN		**519.573.524**
KEMENTERIAN KOORDINATOR BIDANG POLITIK, HUKUM DAN KEAMANAN		**519.573.524**
	PELAYANAN UMUM	**26.360.100**
	Program Dukungan Manajemen dan Pelaksanaan Tugas Teknis Lainnya Kemenko Polhukam	**26.360.100**
	Dukungan Manajemen dan Pelaksanaan Tugas Teknis Lainnya Komisi Kepolisian Nasional (Kompolnas)	16.817.500
	Dukungan Manajemen dan Pelaksanaan Tugas Teknis Lainnya Komisi Kejaksaan RI	9.542.600
	KETERTIBAN DAN KEAMANAN	**493.213.424**
	Program Dukungan Manajemen dan Pelaksanaan Tugas Teknis Lainnya Kemenko Polhukam	**85.177.642**
	Penyusunan dan Pengembangan Rencana Kerja, Evaluasi, Organisasi dan Tata Laksana, Perpustakaan dan Data	2.764.844
	Penyelenggaraan Pelayanan Persidangan dan Hubungan Antar Lembaga	415.530
	Pengelolaan Administrasi Umum, Kepegawaian, Perlengkapan dan Rumah Tangga, Keuangan, Protokol dan Keamanan	79.402.298
	Pengelolaan Pengawasan Internal	1.428.070
	Telaahan dan Rekomendasi Kebijakan Bidang Polhukam	1.166.900
	Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur Kemenko Polhukam	**7.073.300**
	Peningkatan Sarana dan Prasarana	7.073.300
	Program Peningkatan Koordinasi Bidang Politik Hukum dan Keamanan	**67.873.400**
	Koordinasi Pendayagunaan Aparatur	609.000
	Koordinasi Potensi Pertahanan dan Integritas Nasional	644.375
	Koordinasi Pengembangan Sistem, Doktrin dan Strategi Pertahanan Negara	962.106
	Koordinasi Harmonisasi Sosial	569.900
	Koordinasi Hubungan Multilateral	1.235.500
	Koordinasi Hukum Internasional	659.000
	Koordinasi Intelijen dan Pembinaan Masyarakat	869.500
	Koordinasi Intelijen Pertahanan Negara	816.132
	Koordinasi Kerja Sama Amerika dan Eropa	1.210.363
	Koordinasi Kerja Sama Asean	1.334.324
	Koordinasi Kerja Sama Asia Pasifik dan Afrika	1.250.928
	Koordinasi Pengelolaan Masyarakat Kawasan Tertinggal	659.000
	Koordinasi Materi Hukum	739.800
	Koordinasi Informasi Publik dan Kehumasan	827.700
	Koordinasi Informasi Media Massa	726.086
	Koordinasi Telekomunikasi dan Telematika	2.534.900
	Koordinasi Program dan Reformasi Birokrasi	1.266.000
	Koordinasi Organisasi Masyarakat Sipil	1.110.625
	Koordinasi Pemajuan dan Perlindungan HAM	1.663.200
	Koordinasi Pemantapan Demokratisasi dan Kelembagaan	9.996.475
	Koordinasi Pemantapan Desentralisasi dan Otonomi Daerah	929.300
	Koordinasi Pemantapan Otonomi Khusus	12.307.063

www.peraturan.go.id

LAMPIRAN III

RINCIAN ANGGARAN BELANJA PEMERINTAH PUSAT PADA BAGIAN ANGGARAN KEMENTERIAN NEGARA/LEMBAGA

K/L : KEMENTERIAN KOORDINATOR BIDANG POLITIK, HUKUM DAN KEAMANAN

(dalam ribuan rupiah)

UNIT ORGANISASI			FUNGSI/PROGRAM/KEGIATAN		ALOKASI ANGGARAN
1			2		3
				Koordinasi Pemberdayaan Aparatur Hukum	609.000
				Koordinasi Pemberdayaan Masyarakat	569.900
				Koordinasi Pembinaan Keamanan dan Kerja Sama Keamanan	606.812
				Koordinasi Penanganan Daerah Rawan Konflik dan Kontijensi	8.837.417
				Koordinasi Penanganan Kejahatan Konvensional dan Kejahatan Terhadap Kekayaan Negara	1.223.500
				Koordinasi Penanganan Kejahatan Transnasional dan Kejahatan Luar Biasa (Terorisme)	1.540.200
				Koordinasi Penegakan Hukum	2.002.700
				Koordinasi Pengelolaan Pemilu	2.575.522
				Koordinasi Pengelolaan Wilayah Khusus	569.900
				Koordinasi Kekuatan, Kemampuan dan Kerja Sama Pertahanan	1.203.650
				Koordinasi Strategi Politik Luar Negeri	799.180
				Koordinasi Wawasan Kebangsaan	1.987.800
				Koordinasi Wilayah Negara dan Tata Ruang Pertahanan	2.426.542
			Program Peningkatan Koordinasi Keamanan dan Keselamatan Di Laut		**333.089.082**
				Koordinasi Informasi dan Penegakan Hukum di Laut	14.579.946
				Peningkatan Koordinasi Pengawasan Keamanan Laut	165.637.501
				Peningkatan Operasi Bersama Keamanan Laut	98.594.775
				Penyiapan Kebijakan Keamanan Laut	3.893.362
				Dukungan Manajemen dan Pelaksanaan Teknis Keamanan Laut	50.383.498

www.peraturan.go.id

LAMPIRAN III

RINCIAN ANGGARAN BELANJA PEMERINTAH PUSAT PADA BAGIAN ANGGARAN KEMENTERIAN NEGARA/LEMBAGA

K/L : KEMENTERIAN KOORDINATOR BIDANG PEREKONOMIAN

(dalam ribuan rupiah)

UNIT ORGANISASI	FUNGSI/PROGRAM/KEGIATAN	ALOKASI ANGGARAN
1	2	3
KEMENTERIAN KOORDINATOR BIDANG PEREKONOMIAN		**326.684.514**
KEMENTERIAN KOORDINATOR BIDANG PEREKONOMIAN		**326.684.514**
	PELAYANAN UMUM	**166.812.429**
	Program Dukungan Manajemen dan Pelaksanaan Tugas Teknis Lainnya Kemenko Perekonomian	**130.499.429**
	Peningkatan Pelayanan Perencanaan	5.150.000
	Peningkatan dan Pengelolaan Layanan Persidangan Hukum dan Humas	9.150.000
	Peningkatan dan Pengelolaan Pelayanan Umum (Manajemen)	113.099.429
	Pengawasan Inspektorat	600.000
	Penelaahan Kebijakan Bidang Perekonomian	2.500.000
	Program Koordinasi Kebijakan Bidang Perekonomian	**36.313.000**
	Koordinasi Kebijakan Bidang Ekonomi dan Keuangan Daerah	2.500.000
	Koordinasi Kebijakan Kawasan Ekonomi Khusus	14.500.000
	Koordinasi Percepatan dan Perluasan Pembangunan Ekonomi Indonesia	11.313.000
	Koordinasi Kebijakan Bidang Pengembangan Industri Kreatif dan Industri Strategis	2.000.000
	Koordinasi Kebijakan Bidang Inovasi Teknologi dan Rekayasa Industri	2.000.000
	Koordinasi Kebijakan Bidang Pengembangan Kawasan Ekonomi	2.000.000
	Koordinasi Kebijakan Bidang Ketenagakerjaan	2.000.000
	EKONOMI	**150.472.085**
	Program Koordinasi Kebijakan Bidang Perekonomian	**150.472.085**
	Koordinasi Kebijakan Bidang Moneter, Neraca Pembayaran, dan Perluasan Kesempatan Kerja	2.000.000
	Koordinasi Pengembangan dan Penerapan Sistem Nasional Single Windows dan Integrasi ke dalam Sistem ASW	3.000.000
	Koordinasi Penataan Kelembagaan Pengembangan UKM Berbasis Teknologi	2.000.000
	Koordinasi Pembiayaan Kredit, Asuransi, dan Remitansi Untuk Pekerja Migran	1.000.000
	Koordinasi Kebijakan Bidang BUMN	2.000.000
	Koordinasi Kebijakan Bidang Persaingan Usaha dan Perlindungan Konsumen	2.000.000
	Koordinasi Kebijakan Sistem Logistik dan Fasilitasi Perdagangan	5.500.000
	Koordinasi Kebijakan Bidang Ketenagalistrikan	2.500.000
	Koordinasi Kebijakan Bidang Fiskal	2.000.000
	Koordinasi Kebijakan Bidang Energi Baru dan Terbarukan	3.000.000
	Koordinasi Kebijakan Bidang Pengembangan Industri Manufaktur	2.000.000
	Koordinasi Kebijakan Bidang Infrastruktur Sumber Daya Air	7.500.000
	Koordinasi Kebijakan Infrastruktur Transportasi	7.300.000
	Koordinasi Kebijakan Bidang Kehutanan	2.200.000
	Koordinasi Kebijakan Bidang Geologi	9.365.585
	Koordinasi Kebijakan Bidang Kerja Sama Ekonomi Amerika dan Pasifik	2.000.000
	Koordinasi Kebijakan Bidang Kerja Sama Ekonomi Asia	2.700.000
	Koordinasi Kebijakan Bidang Kerja Sama Ekonomi Eropa, Afrika dan Timur Tengah	2.700.000
	Koordinasi Kebijakan Bidang Kerja Sama Ekonomi Multilateral dan Pembiayaan	2.000.000

www.peraturan.go.id

LAMPIRAN III

RINCIAN ANGGARAN BELANJA PEMERINTAH PUSAT PADA BAGIAN ANGGARAN KEMENTERIAN NEGARA/LEMBAGA

K/L : KEMENTERIAN KOORDINATOR BIDANG PEREKONOMIAN

(dalam ribuan rupiah)

UNIT ORGANISASI	FUNGSI/PROGRAM/KEGIATAN	ALOKASI ANGGARAN
1	2	3
	Koordinasi Kebijakan Bidang Kerja Sama Ekonomi Regional dan Sub Regional	2.500.000
	Koordinasi Kebijakan Minyak dan Gas Bumi	2.500.000
	Koordinasi Kebijakan Pangan	2.700.000
	Koordinasi Kebijakan Kredit Usaha Rakyat (KUR)	1.000.000
	Koordinasi Kebijakan Bidang Pasar Modal dan Lembaga Keuangan	2.000.000
	Koordinasi Kebijakan Bidang Pengembangan Kewirausahaan, Koperasi, dan UKM	2.000.000
	Koordinasi Kebijakan Bidang Perdagangan LN dan Kepariwisataan	2.000.000
	Koordinasi Kebijakan Pengembangan Iklim Investasi	3.500.000
	Koordinasi Kebijakan Kelautan Perikanan dan Peternakan	2.300.000
	Koordinasi Kebijakan Perkebunan dan Hortikultura	2.300.000
	Koordinasi Kebijakan Bidang Mineral dan Batubara	2.500.000
	Koordinasi Kebijakan Bidang Pengembangan Prasarana, Sarana Pangan, dan Sumber Daya Hayati	2.100.000
	Koordinasi Kebijakan Bidang Telematika dan Utilitas	3.900.000
	Koordinasi Kebijakan Percepatan Penyediaan Infrastruktur Prioritas	56.406.500
	PERUMAHAN DAN FASILITAS UMUM	**9.400.000**
	Program Koordinasi Kebijakan Bidang Perekonomian	**9.400.000**
	Koordinasi Kebijakan Penataan Ruang dan Pembangunan Daerah Tertinggal	5.400.000
	Koordinasi Kebijakan Bidang Perumahan, Pertanahan, dan Kerja Sama Pemerintah Swasta	4.000.000

www.peraturan.go.id

LAMPIRAN III

RINCIAN ANGGARAN BELANJA PEMERINTAH PUSAT PADA BAGIAN ANGGARAN KEMENTERIAN NEGARA/LEMBAGA

K/L : KEMENTERIAN KOORDINATOR BIDANG PEREKONOMIAN

(dalam ribuan rupiah)

UNIT ORGANISASI	FUNGSI/PROGRAM/KEGIATAN	ALOKASI ANGGARAN
1	2	3
KEMENTERIAN KOORDINATOR BIDANG PEREKONOMIAN		**326.684.514**
KEMENTERIAN KOORDINATOR BIDANG PEREKONOMIAN		**326.684.514**
	PELAYANAN UMUM	**166.812.429**
	Program Dukungan Manajemen dan Pelaksanaan Tugas Teknis Lainnya Kemenko Perekonomian	**130.499.429**
	Peningkatan Pelayanan Perencanaan	5.150.000
	Peningkatan dan Pengelolaan Layanan Persidangan Hukum dan Humas	9.150.000
	Peningkatan dan Pengelolaan Pelayanan Umum (Manajemen)	113.099.429
	Pengawasan Inspektorat	600.000
	Penelaahan Kebijakan Bidang Perekonomian	2.500.000
	Program Koordinasi Kebijakan Bidang Perekonomian	**36.313.000**
	Koordinasi Kebijakan Bidang Ekonomi dan Keuangan Daerah	2.500.000
	Koordinasi Kebijakan Kawasan Ekonomi Khusus	14.500.000
	Koordinasi Percepatan dan Perluasan Pembangunan Ekonomi Indonesia	11.313.000
	Koordinasi Kebijakan Bidang Pengembangan Industri Kreatif dan Industri Strategis	2.000.000
	Koordinasi Kebijakan Bidang Inovasi Teknologi dan Rekayasa Industri	2.000.000
	Koordinasi Kebijakan Bidang Pengembangan Kawasan Ekonomi	2.000.000
	Koordinasi Kebijakan Bidang Ketenagakerjaan	2.000.000
	EKONOMI	**150.472.085**
	Program Koordinasi Kebijakan Bidang Perekonomian	**150.472.085**
	Koordinasi Kebijakan Bidang Moneter, Neraca Pembayaran, dan Perluasan Kesempatan Kerja	2.000.000
	Koordinasi Pengembangan dan Penerapan Sistem Nasional Single Windows dan Integrasi ke dalam Sistem ASW	3.000.000
	Koordinasi Penataan Kelembagaan Pengembangan UKM Berbasis Teknologi	2.000.000
	Koordinasi Pembiayaan Kredit, Asuransi, dan Remitansi Untuk Pekerja Migran	1.000.000
	Koordinasi Kebijakan Bidang BUMN	2.000.000
	Koordinasi Kebijakan Bidang Persaingan Usaha dan Perlindungan Konsumen	2.000.000
	Koordinasi Kebijakan Sistem Logistik dan Fasilitasi Perdagangan	5.500.000
	Koordinasi Kebijakan Bidang Ketenagalistrikan	2.500.000
	Koordinasi Kebijakan Bidang Fiskal	2.000.000
	Koordinasi Kebijakan Bidang Energi Baru dan Terbarukan	3.000.000
	Koordinasi Kebijakan Bidang Pengembangan Industri Manufaktur	2.000.000
	Koordinasi Kebijakan Bidang Infrastruktur Sumber Daya Air	7.500.000
	Koordinasi Kebijakan Infrastruktur Transportasi	7.300.000
	Koordinasi Kebijakan Bidang Kehutanan	2.200.000
	Koordinasi Kebijakan Bidang Geologi	9.365.585
	Koordinasi Kebijakan Bidang Kerja Sama Ekonomi Amerika dan Pasifik	2.000.000
	Koordinasi Kebijakan Bidang Kerja Sama Ekonomi Asia	2.700.000
	Koordinasi Kebijakan Bidang Kerja Sama Ekonomi Eropa, Afrika dan Timur Tengah	2.700.000
	Koordinasi Kebijakan Bidang Kerja Sama Ekonomi Multilateral dan Pembiayaan	2.000.000

www.peraturan.go.id

LAMPIRAN III

RINCIAN ANGGARAN BELANJA PEMERINTAH PUSAT PADA BAGIAN ANGGARAN KEMENTERIAN NEGARA/LEMBAGA

K/L : KEMENTERIAN KOORDINATOR BIDANG PEREKONOMIAN

(dalam ribuan rupiah)

UNIT ORGANISASI	FUNGSI/PROGRAM/KEGIATAN	ALOKASI ANGGARAN
1	2	3
	Koordinasi Kebijakan Bidang Kerja Sama Ekonomi Regional dan Sub Regional	2.500.000
	Koordinasi Kebijakan Minyak dan Gas Bumi	2.500.000
	Koordinasi Kebijakan Pangan	2.700.000
	Koordinasi Kebijakan Kredit Usaha Rakyat (KUR)	1.000.000
	Koordinasi Kebijakan Bidang Pasar Modal dan Lembaga Keuangan	2.000.000
	Koordinasi Kebijakan Bidang Pengembangan Kewirausahaan, Koperasi, dan UKM	2.000.000
	Koordinasi Kebijakan Bidang Perdagangan LN dan Kepariwisataan	2.000.000
	Koordinasi Kebijakan Pengembangan Iklim Investasi	3.500.000
	Koordinasi Kebijakan Kelautan Perikanan dan Peternakan	2.300.000
	Koordinasi Kebijakan Perkebunan dan Hortikultura	2.300.000
	Koordinasi Kebijakan Bidang Mineral dan Batubara	2.500.000
	Koordinasi Kebijakan Bidang Pengembangan Prasarana, Sarana Pangan, dan Sumber Daya Hayati	2.100.000
	Koordinasi Kebijakan Bidang Telematika dan Utilitas	3.900.000
	Koordinasi Kebijakan Percepatan Penyediaan Infrastruktur Prioritas	56.406.500
	PERUMAHAN DAN FASILITAS UMUM	**9.400.000**
	Program Koordinasi Kebijakan Bidang Perekonomian	**9.400.000**
	Koordinasi Kebijakan Penataan Ruang dan Pembangunan Daerah Tertinggal	5.400.000
	Koordinasi Kebijakan Bidang Perumahan, Pertanahan, dan Kerja Sama Pemerintah Swasta	4.000.000

www.peraturan.go.id

LAMPIRAN III

RINCIAN ANGGARAN BELANJA PEMERINTAH PUSAT PADA BAGIAN ANGGARAN KEMENTERIAN NEGARA/LEMBAGA

K/L : KEMENTERIAN KOORDINATOR BIDANG PEMBANGUNAN MANUSIA DAN KEBUDAYAAN

(dalam ribuan rupiah)

UNIT ORGANISASI	FUNGSI/PROGRAM/KEGIATAN	ALOKASI ANGGARAN
1	2	3
KEMENTERIAN KOORDINATOR BIDANG PEMBANGUNAN MANUSIA DAN KEBUDAYAAN		444.836.298
KEMENTERIAN KOORDINATOR BIDANG PEMBANGUNAN MANUSIA DAN KEBUDAYAAN		444.836.298
	PELAYANAN UMUM	142.497.274
	Program Dukungan Manajemen dan Pelaksanaan Tugas Teknis Lainnya Kemenko PMK	142.497.274
	Peningkatan dan Pengelolaan Urusan Informasi dan Persidangan	6.602.000
	Penyelenggaraan Penyusunan Program dan Anggaran Penyusunan Data Pelaporan dan Administrasi KLN	8.293.000
	Peningkatan dan Pengelolaan Pelayanan Umum	94.835.298
	Pengawasan dan Peningkatan Akuntabilitas Kemenko PMK	720.000
	Penyelenggaraan Pembinaan Korpri Kemenko PMK	526.000
	Koordinasi Kajian Bidang PMK	2.785.000
	Pembangunan/Pengadaan/Peningkatan Sarana dan Prasarana	28.735.976
	PERLINDUNGAN SOSIAL	302.339.024
	Program Koordinasi Pengembangan Kebijakan Pembangunan Manusia dan Kebudayaan	302.339.024
	Koordinasi Kebijakan Urusan Adaptasi dan Mitigasi Perubahan Iklim	3.762.000
	Koordinasi Kebijakan Urusan Lingkungan	4.862.000
	Koordinasi Pemberdayaan dan Kerukunan Umat Beragama	1.280.000
	Koordinasi Kebijakan Bimbingan Umat Beragama Pendidikan Agama dan Keagamaan	1.515.000
	Koordinasi Kebijakan Urusan Bencana	2.365.000
	Koordinasi Pengembangan Regulasi Sistem Jaminan Sosial	2.589.000
	Koordinasi Kebijakan Bidang Kebudayaan	134.689.000
	Koordinasi Kebijakan Kelembagaan dan Kemitraan	14.797.000
	Sekretariat Koordinasi Kebijakan Penguatan Kelembagaan Penanggulangan Kemiskinan	1.440.000
	Koordinasi Kebijakan Peningkatan Keluarga dan Kesejahteraan Anak	1.900.000
	Koordinasi Kebijakan Kependudukan dan KB	1.834.000
	Koordinasi Kebijakan Peningkatan Kesempatan Kerja Perempuan dan Ekonomi Keluarga	2.050.000
	Koordinasi Kebijakan Keuangan Mikro dan Penguatan TTG	2.227.000
	Koordinasi Urusan Kompensasi Sosial	4.923.000
	Koordinasi Kebijakan Urusan Konflik Sosial	4.223.000
	Koordinasi Kebijakan Peningkatan Kualitas Hidup Perempuan	8.900.000
	Koordinasi Kebijakan Penguatan Ketahan Gizi dan Kesehatan Lingkungan	1.744.000
	Koordinasi Kebijakan Bidang Olahraga	1.801.000
	Koordinasi Kebijakan Pengembangan Dampak Pariwisata	8.634.000
	Koordinasi Kebijakan Penguatan Pelayanan Kesehatan	1.690.000
	Koordinasi Pemberdayaan Penyandang Cacat dan Lansia	1.708.000
	Koordinasi Kebijakan Pembinaan Generasi Muda	1.305.024
	Koordinasi Kebijakan Pendidikan Dasar Paud dan Pendidikan Masyarakat	8.962.000
	Koordinasi Kebijakan Pendidikan Menengah dan Tinggi	1.405.000
	Koordinasi Kebijakan Pengarusutamaan Kebijakan dan Anggaran Penanggulangan Kemiskinan	2.536.000

www.peraturan.go.id

LAMPIRAN III

RINCIAN ANGGARAN BELANJA PEMERINTAH PUSAT PADA BAGIAN ANGGARAN KEMENTERIAN NEGARA/LEMBAGA

K/L : KEMENTERIAN KOORDINATOR BIDANG PEMBANGUNAN MANUSIA DAN KEBUDAYAAN

(dalam ribuan rupiah)

UNIT ORGANISASI				FUNGSI/PROGRAM/KEGIATAN	ALOKASI ANGGARAN
1				2	3
				Koordinasi Kebijakan Penguatan Masyarakat dan Kawasan	2.402.000
				Koordinasi Kebijakan Penguatan Pencegahan dan Penanggulangan Penyakit	5.718.000
				Pencegahan dan Penanggulangan Hiv/Aids	19.000.000
				Koordinasi Kebijakan Perlindungan Perempuan dan Anak	1.754.000
				Koordinasi Kebijakan Pembangunan Perumahan dan Permukiman	2.115.000
				Koordinasi Penanganan Masalah-Masalah Strategis Bidang Kesra	28.625.000
				Penataan Kelembagaan Jaminan Sosial (SJSN)	19.584.000

www.peraturan.go.id

LAMPIRAN III

RINCIAN ANGGARAN BELANJA PEMERINTAH PUSAT PADA BAGIAN ANGGARAN KEMENTERIAN NEGARA/LEMBAGA

K/L : KEMENTERIAN PARIWISATA

(dalam ribuan rupiah)

UNIT ORGANISASI	FUNGSI/PROGRAM/KEGIATAN	ALOKASI ANGGARAN
1	2	3
KEMENTERIAN PARIWISATA		2.415.781.240
SEKRETARIAT KEMENTERIAN		300.167.843
	PARIWISATA DAN EKONOMI KREATIF	300.167.843
	Program Dukungan Manajemen dan Pelaksanaan Tugas Teknis Lainnya Kementerian Pariwisata	264.451.587
	Peningkatan Layanan Administrasi Kepegawaian, Organisasi dan Umum	218.803.393
	Pengembangan Perencanaan dan Keuangan	19.987.174
	Peningkatan Layanan Hukum dan Komunikasi Publik	11.210.645
	Pengawasan dan Peningkatan Akuntabilitas Kinerja Kementerian Pariwisata	14.450.375
	Program Sarana dan Prasarana Aparatur Kementerian Pariwisata	35.716.256
	Pembangunan/Pengadaan/Peningkatan Sarana dan Prasarana	35.716.256
DEPUTI BIDANG PENGEMBANGAN DESTINASI DAN INDUSTRI PARIWISATA		351.535.245
	PARIWISATA DAN EKONOMI KREATIF	351.535.245
	Program Pengembangan Kepariwisataan	351.535.245
	Pengembangan Infrastruktur dan Ekosistem	170.121.542
	Pengembangan Destinasi Wisata Budaya	18.044.049
	Pengembangan Destinasi Wisata Alam dan Buatan	18.774.109
	Peningkatan Kemitraan Industri Pariwisata	36.603.471
	Peningkatan Tata Kelola Destinasi dan Pemberdayaan Masyarakat	96.451.526
	Dukungan Manajemen dan Dukungan Teknis Lainnya Deputi bidang Pengembangan Destinasi dan Industri Pariwisata	11.540.548
DEPUTI BIDANG PENGEMBANGAN PEMASARAN PARIWISATA MANCANEGARA		1.015.154.740
	PARIWISATA DAN EKONOMI KREATIF	1.015.154.740
	Program Pengembangan Kepariwisataan	1.015.154.740
	Pengembangan Strategi Pemasaran Pariwisata Mancanegara	38.500.000
	Pengembangan Komunikasi Pemasaran Pariwisata Mancanegara	534.000.000
	Pengembangan Pasar Asia Tenggara	170.778.113
	Peningkatan dan Pengembangan Pasar Asia Pasifik	122.170.530
	Peningkatan dan Pengembangan Pasar Eropa, Timteng, Afrika dan Amerika	128.156.298
	Dukungan Manajemen dan Dukungan Teknis Lainnya Deputi Pengembangan Pemasaran Mancanegara	21.549.799
DEPUTI BIDANG PENGEMBANGAN PEMASARAN PARIWISATA NUSANTARA		344.711.360
	PARIWISATA DAN EKONOMI KREATIF	344.711.360
	Program Pengembangan Kepariwisataan	344.711.360
	Peningkatan Analisis Data Pasar Pariwisata Nusantara	29.000.000
	Pengembangan Strategi Pemasaran Pariwisata Nusantara	22.712.518
	Pengembangan Komunikasi Pemasaran Pariwisata Nusantara	138.468.658
	Pengembangan Segmen Pasar Personal	96.192.037
	Pengembangan Segmen Pasar Bisnis dan Pemerintah	41.834.417
	Dukungan Manajemen dan Dukungan Teknis Lainnya Deputi Pengembangan Pemasaran Nusantara	16.503.730
DEPUTI BIDANG PENGEMBANGAN KELEMBAGAAN PARIWISATA		404.212.052

www.peraturan.go.id

LAMPIRAN III

RINCIAN ANGGARAN BELANJA PEMERINTAH PUSAT PADA BAGIAN ANGGARAN KEMENTERIAN NEGARA/LEMBAGA

K/L : KEMENTERIAN PARIWISATA

(dalam ribuan rupiah)

UNIT ORGANISASI		FUNGSI/PROGRAM/KEGIATAN			ALOKASI ANGGARAN
1		2			3
		PARIWISATA DAN EKONOMI KREATIF			**404.212.052**
			Program Pengembangan Kepariwisataan		**404.212.052**
				Peningkatan Litbang dan Kebijakan Kepariwisataan	18.196.225
				Pengembangan Kompetensi SDM Kepariwisataan	70.630.103
				Peningkatan Pendidikan dan Pelatihan SDM Aparatur	9.200.000
				Pengembangan Pendidikan Tinggi Bidang Pariwisata	271.201.085
				Peningkatan Hubungan Kelembagaan Kepariwisataan	8.640.882
				Peningkatan Pengendalian Transformasi	11.025.705
				Dukungan Manajemen dan Dukungan Teknis Lainnya Deputi Pengembangan Kelembagaan Kepariwisataan	15.318.052

www.peraturan.go.id

LAMPIRAN III

RINCIAN ANGGARAN BELANJA PEMERINTAH PUSAT PADA BAGIAN ANGGARAN KEMENTERIAN NEGARA/LEMBAGA

K/L : KEMENTERIAN BADAN USAHA MILIK NEGARA

(dalam ribuan rupiah)

UNIT ORGANISASI	FUNGSI/PROGRAM/KEGIATAN	ALOKASI ANGGARAN
1	2	3
KEMENTERIAN BADAN USAHA MILIK NEGARA		**148.072.303**
KEMENTERIAN BADAN USAHA MILIK NEGARA		**148.072.303**
	EKONOMI	**148.072.303**
	Program Dukungan Manajemen dan Pelaksanaan Tugas Teknis Lainnya Kementerian BUMN	**119.269.503**
	Peningkatan Kualitas Perencanaan Sumber Daya Manusia dan Organisasi	50.482.598
	Penyusunan Peraturan Perundang-Undangan, Pelayanan dan Bantuan Hukum	5.194.528
	Peningkatan Sarana dan Prasarana Kerja, Layanan Administrasi, Rumah Tangga dan Protokol	59.671.220
	Pengawasan dan Pemeriksaan Akuntabilitas Kementerian Bumn	2.606.169
	Penelaahan Kebijakan Pimpinan	1.314.988
	Program Pembinaan BUMN	**28.802.800**
	Pembinaan BUMN Sektor Perkebunan dan Kehutanan	825.673
	Pembinaan BUMN Sektor Pertanian, Perikanan dan Aneka Industri	881.199
	Pembinaan BUMN Sektor Industri Strategis	1.358.815
	Pembinaan BUMN Sektor Energi, Pertambangan, Percetakan dan Pariwisata	1.165.639
	Pembinaan BUMN Sektor Perdagangan, Logistik dan Kawasan Industri	1.717.788
	Pembinaan BUMN Sektor Sarana dan Prasarana Perhubungan	1.075.802
	Pembinaan BUMN Sektor Perbankan dan Asuransi	1.171.393
	Pembinaan BUMN Sektor Jasa Pembiayaan dan Jasa Lain	1.006.730
	Pembinaan BUMN Sektor Jasa Konstruksi	939.337
	Restrukturisasi BUMN	2.802.753
	Penatakelolaan Manajemen SDM Eksekutif BUMN	2.674.720
	Penatakelolaan Informasi dan Komunikasi Publik	13.182.951

www.peraturan.go.id

LAMPIRAN III

RINCIAN ANGGARAN BELANJA PEMERINTAH PUSAT PADA BAGIAN ANGGARAN KEMENTERIAN NEGARA/LEMBAGA

K/L : KEMENTERIAN RISTEK DAN PENDIDIKAN TINGGI

(dalam ribuan rupiah)

UNIT ORGANISASI	FUNGSI/PROGRAM/KEGIATAN	ALOKASI ANGGARAN
1	2	3
KEMENTERIAN RISET, TEKNOLOGI DAN PENDIDIKAN TINGGI		43.570.297.769
	PELAYANAN UMUM	862.533.162
	Program Dukungan Manajemen dan Pelaksanaan Tugas Teknis Lainnya KRT	159.932.308
	Penyelenggaraan Pengawasan dan Pemeriksaan Akuntabilitas Krt	2.309.635
	Pembinaan dan Pengembangan Humas dan Hukum	13.677.764
	Peningkatan Kualitas Perencanaan Kegiatan dan Anggaran Penjalinan Kerja Sama dan Evaluasi Pencapaian Kinerja	16.242.104
	Peningkatan dan Pengelolaan Urusan Umum	127.702.805
	Program Peningkatan Kemampuan Iptek untuk Penguatan Sistem Inovasi Nasional	702.600.854
	Arah Pengembangan Kelembagaan Sistem Inovasi	2.776.656
	Pengelolaan Data dan Informasi Iptek	5.468.250
	Pengembangan Hubungan Lembaga Regulasi Dengan Penyedia Iptek	1.794.865
	Peningkatan Investasi Litbang	1.017.603
	Pengembangan Jaringan Penyedia Dengan Pengguna Iptek	792.397
	Pengembangan Jaringan Penyedia Iptek	2.225.879
	Pengembangan Jaringan Penyedia Iptek Dengan Internasional	4.522.731
	Pengembangan Jaringan Penyedia Iptek Pusat Dengan Daerah	3.718.746
	Pengembangan Kebijakan Riset Iptek Nasional	1.215.908
	Pengelolaan Kekayaan Intelektual dan Standardisasi	3.732.813
	Penguatan Kompetensi Lembaga Litbang	10.654.981
	Peningkatan Litbang Iptek Unggulan di Bidang Kesehatan Obat-Obatan dan Instrumentasi Medis	23.418.978
	Pengembangan Sistem Legislasi Iptek	1.945.954
	Pengembangan Budaya dan Etika Iptek	3.374.203
	Penataan Kelembagaan Litbang	3.537.159
	Pendayagunaan dan Kebutuhan Iptek Institusi Pemerintah	2.093.020
	Pendayagunaan dan Kebutuhan Iptek Industri Besar	20.672.585
	Insentif Riset SINas	85.152.882
	Pendayagunaan dan Kebutuhan Iptek Industri Kecil dan Menengah (IKM)	16.042.623
	Pendayagunaan dan Kebutuhan Iptek Masyarakat	779.900
	Peningkatan Promosi dan Diseminasi Iptek	21.419.859
	Pendayagunaan dan Kebutuhan Iptek Strategis	2.220.326
	Pengembangan Riset Iptek Industri	6.385.867
	Pengembangan Riset Iptek Masyarakat	1.891.337
	Pengembangan Riset Iptek Strategis Nasional	9.686.093
	Pengembangan Program Riset Iptek Nasional	798.698
	Peningkatan Sarana dan Prasarana Litbang	1.828.423
	Peningkatan SDM Iptek	262.019.743
	Pengembangan Kawasan Penelitian Ilmu Pengetahuan dan Teknologi	81.967.649
	Pendayagunaan dan Pemanfaatan Agrotechnopark	4.444.726

www.peraturan.go.id

LAMPIRAN III

RINCIAN ANGGARAN BELANJA PEMERINTAH PUSAT PADA BAGIAN ANGGARAN KEMENTERIAN NEGARA/LEMBAGA

K/L : KEMENTERIAN RISTEK DAN PENDIDIKAN TINGGI

(dalam ribuan rupiah)

UNIT ORGANISASI	FUNGSI/PROGRAM/KEGIATAN	ALOKASI ANGGARAN
1	2	3
	Pengembangan Science Techno Park (STP) untuk Penguatan Sistem Inovasi Nasional	115.000.000
	PENDIDIKAN	**42.707.764.607**
	Program Pendidikan Tinggi	**42.707.764.607**
	Penyediaan Layanan Kelembagaan dan Kerja Sama	875.818.193
	Penyediaan Dosen dan Tenaga Kependidikan Bermutu	8.935.378.917
	Pengembangan Penelitian dan Pengabdian Kepada Masyarakat	1.407.504.786
	Dukungan Manajemen dan Pelaksanaan Tugas Teknis Lainnya Ditjen Pendidikan Tinggi	16.379.359.881
	Penyediaan Layanan Pembelajaran dan Kompetensi Mahasiswa	6.191.628.576
	Layanan Tridharma di Perguruan Tinggi	8.918.074.254

www.peraturan.go.id

LAMPIRAN III

RINCIAN ANGGARAN BELANJA PEMERINTAH PUSAT PADA BAGIAN ANGGARAN KEMENTERIAN NEGARA/LEMBAGA

K/L : KEMENTERIAN KOPERASI DAN PENGUSAHA KECIL DAN MENENGAH

(dalam ribuan rupiah)

UNIT ORGANISASI	FUNGSI/PROGRAM/KEGIATAN	ALOKASI ANGGARAN
1	2	3
KEMENTERIAN KOPERASI DAN PENGUSAHA KECIL DAN MENENGAH		**1.633.124.627**
KEMENTERIAN KOPERASI DAN PENGUSAHA KECIL DAN MENENGAH		**1.418.124.627**
EKONOMI		**1.418.124.627**
	Program Dukungan Manajemen dan Pelaksanaan Tugas Teknis Lainnya Kementerian Koperasi dan UKM	**213.429.827**
	Penyusunan Perencanaan Program/Kegiatan Kementerian Koperasi dan UKM	12.885.497
	Monitoring, Evaluasi/Pelaporan dan Pengelolaan Data dan Informasi Koperasi dan Umkm	16.406.901
	Pelaksanaan, Penatausahaan dan Pelaporan Anggaran dan BMN	124.381.847
	Penyelenggaraan Pemeriksaan dan Pengawasan Pelaksanaan Anggaran Pusat dan Daerah	9.345.340
	Peningkatan Kompetensi SDM Aparatur dan Administrasi Kepegawaian	23.074.502
	Penyelenggaraan Ketatausahaan	7.339.640
	Penyelenggaraan Kehumasan	19.996.100
	Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur Kementerian Koperasi dan UKM	**66.637.500**
	Pengadaan Sarana Prasarana Kantor Kementerian Koperasi dan Koperasi	52.337.500
	Sarana dan Prasarana Lembaga Layanan Pemasaran KUKM	14.300.000
	Program Peningkatan Daya Saing UMKM	**861.462.919**
	Dukungan Pemberdayaan KUMKM di Daerah	124.685.000
	Pemberdayaan Usaha KUMKM di Bidang Pertanian Pangan dan Hortikultura	6.519.400
	Pemberdayaan Usaha KUMKM di Bidang Kehutanan dan Perkebunan	10.567.200
	Pemberdayaan Usaha KUMKM di Bidang Perikanan dan Peternakan	6.791.300
	Pemberdayaan Usaha KUMKM di Bidang Industri Kerajinan dan Pertambangan	8.275.779
	Pemberdayaan Usaha KUMKM di Bidang Ketenagalistrikan dan Aneka Usaha	19.593.600
	Pengembangan dan Pemantapan Program Pendanaan Bagi Koperasi dan UMKM	12.118.400
	Peningkatan dan Perluasan Akses Permodalan bagi Koperasi dan UMKM	130.852.344
	Pengembangan Asuransi, Jasa Keuangan dan Perpajakan Bagi Koperasi dan UMKM	2.303.756
	Pengembangan Pembiayaan dan Penjaminan Kredit bagi Koperasi dan UMKM	5.360.500
	Penataan Peraturan Perundang Undangan di Bidang Koperasi dan UMKM	9.027.674
	Peningkatan Kualitas Ketatalaksanaan Koperasi dan Umkm	11.090.426
	Perluasan dan Penguatan Akses Pemasaran Koperasi dan UMKM di Dalam Negeri	18.544.342
	Pengembangan Akses Koperasi dan UKM ke Pasar Ekspor dan Fasilitasi Impor	10.303.236
	Pengembangan Sarana Usaha Pemasaran Koperasi dan UMKM	65.650.661
	Pengembangan Kemitraan Koperasi dan UMKM	6.983.016
	Pengembangan Promosi Produk Koperasi dan UMKM	12.720.145
	Pemasyarakatan dan Pengembangan Kewirausahaan	16.643.960
	Peningkatan Kapasitas dan Kompetensi serta Advokasi SDM KUMKM	4.652.400
	Peningkatan Peran Serta Masyarakat dalam Pengembangan SDM KUMKM	14.089.040
	Monitoring dan Evaluasi Pengembangan SDM KUMKM	2.255.000
	Peningkatan Produktivitas dan Mutu KUMKM	12.206.489
	Perluasan KUR	14.919.700

www.peraturan.go.id

LAMPIRAN III

RINCIAN ANGGARAN BELANJA PEMERINTAH PUSAT PADA BAGIAN ANGGARAN KEMENTERIAN NEGARA/LEMBAGA

K/L : KEMENTERIAN KOPERASI DAN PENGUSAHA KECIL DAN MENENGAH

(dalam ribuan rupiah)

UNIT ORGANISASI	FUNGSI/PROGRAM/KEGIATAN	ALOKASI ANGGARAN
1	2	3
	Pengembangan Restrukturisasi Usaha	14.250.600
	Pemberdayaan Layanan Pengembangan Bisnis	6.001.476
	Pengembangan Fasilitasi Investasi KUKM	6.483.020
	Pengembangan Sistem Bisnis	11.151.715
	Penelitian Kebijakan UMKM	5.977.600
	Penelitian Kebijakan Sumber Daya	10.730.500
	Penelitian Pengembangan Perkaderan UMKM	12.083.100
	Pengelolaan Dana Bergulir	115.365.000
	Layanan Pemasaran Bagi KUKM	58.686.940
	Pengembangan Pusat Layanan Usaha Terpadu (PLUT) Bagi KUMKM	94.579.600
	Program Penguatan Kelembagaan Koperasi	**191.604.381**
	Pengembangan, Pengendalian dan Pengawasan KSP, KSP Syariah dan LKM	47.191.800
	Peningkatan Kualitas Organisasi dan Badan Hukum Koperasi	10.760.600
	Pengembangan Keanggotaan Koperasi	114.463.300
	Peningkatan Pengendalian dan Akuntabilitas Koperasi	6.420.700
	Pengembangan Pendidikan dan Pelatihan Perkoperasian	7.490.381
	Penelitian Kebijakan Koperasi	5.277.600
	Program Peningkatan Penghidupan Berkelanjutan Berbasis Usaha Mikro	**84.990.000**
	Penguatan Kelembagaan usaha Mikro dibidang Pertanian, Perikanan, Industri Pengolahan, Perdagangan dan Jasa	7.900.000
	Penguatan Kapasitas Koperasi dan Sentra Usaha Mikro dalam rangka Mendukung Pengembangan Produk Unggulan melalui Pemanfaatan Sumberdaya Lokal	53.950.000
	Penataan Usaha Informal/Pedagang Kaki Lima di Perkotaan dan Daerah Tujuan Wisata	14.000.000
	Penguatan Usaha Sosial (Social Enterprises) dalam mendukung Pengembangan dan Penghidupan Berkelanjutan dari Kegiatan Ekonomi Produktif Masyarakat	9.140.000
	PENDIDIKAN	**215.000.000**
	Program Peningkatan Daya Saing UMKM	**215.000.000**
	Revitalisasi dan Pengembangan Lembaga Pendidikan dan Pelatihan Koperasi dan UMKM	215.000.000

www.peraturan.go.id

LAMPIRAN III

RINCIAN ANGGARAN BELANJA PEMERINTAH PUSAT PADA BAGIAN ANGGARAN KEMENTERIAN NEGARA/LEMBAGA

K/L : KEMENTERIAN PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK

(dalam ribuan rupiah)

UNIT ORGANISASI	FUNGSI/PROGRAM/KEGIATAN	ALOKASI ANGGARAN
1	2	3
KEMENTERIAN PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK		217.719.899
KEMENTERIAN PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK		217.719.899
	PELAYANAN UMUM	20.000.000
	Program Kesetaraan Gender dan Pemberdayaan Perempuan	10.000.000
	Penguatan Kelembagaan PUG di Provinsi	10.000.000
	Program Perlindungan Anak	10.000.000
	Penguatan Kelembagaan Pemenuhan hak anak di provinsi	10.000.000
	PERLINDUNGAN SOSIAL	197.719.899
	Program Dukungan Manajemen dan Pelaksanaan Tugas Teknis Lainnya Kementerian PP&PA	92.367.499
	Koordinasi Bantuan Hukum dan Hubungan Masyarakat	11.000.000
	Koordinasi Perencanaan, Pelaksanaan dan Pelaporan Program dan Anggaran	8.000.000
	Pengembangan SDM, administrasi, dan pengelolaan penunjang pelaksana tugas Kementerian PP dan PA	66.617.499
	Pengawasan dan peningkatan akuntabilitas aparatur KPP dan PA	2.000.000
	Telaahan PP dan PA	4.750.000
	Program Kesetaraan Gender dan Pemberdayaan Perempuan	57.466.600
	Penyusunan dan Harmonisasi Kebijakan Penyusunan Data Gender	3.450.000
	Penyusunan dan Harmonisasi Kebijakan Bidang Hukum yang Responsif Gender	3.150.000
	Penyusunan dan Harmonisasi Kebijakan Bidang Infrastruktur yang Responsif Gender	3.690.000
	Penyusunan dan Harmonisasi Kebijakan Bidang Iptek dan Sumber Daya Ekonomi yang Responsif Gender	3.150.000
	Penyusunan dan Harmonisasi Kebijakan Perlindungan Perempuan Dari Tindak Kekerasan	4.445.000
	Penyusunan dan Harmonisasi Kebijakan Bidang Kesehatan yang Responsif Gender	3.300.000
	Penyusunan dan Harmonisasi Kebijakan Bidang Ketenagakerjaan yang Responsif Gender	4.300.000
	Penyusunan dan Harmonisasi Kebijakan Koperasi, Usaha Mikro dan Kecil, Industri, dan Perdagangan yang Responsif Gender	4.905.000
	Penyusunan dan Harmonisasi Kebijakan Perlindungan Masalah Sosial Perempuan	3.890.000
	Penyusunan dan Harmonisasi Kebijakan Bidang Pendidikan yang Responsif Gender	3.240.000
	Penyusunan dan Harmonisasi Kebijakan Perlindungan Korban Perdagangan Orang	3.750.000
	Penyusunan dan Harmonisasi Kebijakan Perlindungan Tenaga Kerja Perempuan	3.650.000
	Penyusunan dan Harmonisasi Kebijakan Bidang Pertanian, Kehutanan, Perikanan, Kelautan, Ketahanan Pangan, dan Agrobisnis yang Responsif Gender	3.693.600
	Penyusunan dan Harmonisasi Kebijakan Partisipasi Perempuan di Bidang Politik dan Pengambilan Keputusan	2.853.000
	Penyusunan dan Harmonisasi Kebijakan Bidang Sumber Daya Alam dan Lingkungan yang Responsif Gender	6.000.000
	Program Perlindungan Anak	47.885.800
	Pengawasan Pelaksanaan Perlindungan Anak (KPAI)	12.000.000
	Penyusunan dan Harmonisasi Kebijakan Untuk Penanganan Anak yang Berhadapan Dengan Hukum	4.730.000
	Penyusunan dan Harmonisasi Kebijakan Perlindungan Bagi Anak yang Berkebutuhan Khusus	2.550.000
	Penyusunan dan Harmonisasi Kebijakan Hak Sipil Anak	4.350.000
	Penyusunan dan Harmonisasi Kebijakan Penghapusan Kekerasan pada Anak	4.300.000
	Penyusunan dan Harmonisasi Kebijakan Pemenuhan Hak Kesehatan Anak	2.601.000

www.peraturan.go.id

LAMPIRAN III

RINCIAN ANGGARAN BELANJA PEMERINTAH PUSAT PADA BAGIAN ANGGARAN KEMENTERIAN NEGARA/LEMBAGA

K/L : KEMENTERIAN PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK

(dalam ribuan rupiah)

UNIT ORGANISASI	FUNGSI/PROGRAM/KEGIATAN	ALOKASI ANGGARAN
1	2	3
	Penyusunan dan Harmonisasi Kebijakan Lingkungan Penanaman Nilai-Nilai Luhur	3.025.000
	Penyusunan dan Harmonisasi Kebijakan Tentang Masalah Sosial Anak	2.900.000
	Penyusunan dan Harmonisasi Kebijakan Pemenuhan Hak Partisipasi Anak	2.600.000
	Penyusunan dan Harmonisasi Kebijakan Pemenuhan Hak Pendidikan Anak	3.050.000
	Penyusunan dan Harmonisasi Kebijakan Pengembangan Kabupaten/Kota Layak Anak (Kla)	5.779.800

www.peraturan.go.id

LAMPIRAN III

RINCIAN ANGGARAN BELANJA PEMERINTAH PUSAT PADA BAGIAN ANGGARAN KEMENTERIAN NEGARA/LEMBAGA

K/L : KEMENTERIAN PENDAYAGUNAAN APARATUR NEGARA DAN REFORMASI BIROKRASI

(dalam ribuan rupiah)

UNIT ORGANISASI	FUNGSI/PROGRAM/KEGIATAN	ALOKASI ANGGARAN
1	2	3
KEMENTERIAN PENDAYAGUNAAN APARATUR NEGARA DAN REFORMASI BIROKRASI		195.925.924
KEMENTERIAN PENDAYAGUNAAN APARATUR NEGARA DAN REFORMASI BIROKRASI		195.925.924
	PELAYANAN UMUM	195.925.924
	Program Dukungan Manajemen dan Pelaksanaan Tugas Teknis Lainnya Kementerian PAN dan RB	111.952.224
	Pengelolaan dan Pembinaan Hukum, Komunikasi Publik dan Sistem Informasi	7.500.000
	Pengelolaan dan Pembinaan Manajemen Kinerja dan Penganggaran, Kerja Sama Lembaga dan Pelaporan	2.750.700
	Pengelolaan dan Pembinaan Sumber Daya Manusia, Keuangan dan Perkantoran	97.596.424
	Pembinaan dan Pengawasan Intern dan Quality Assurance	2.855.100
	Pelaksanaan Dukungan Perumusan Kebijakan PAN dan RB	1.250.000
	Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur Kementerian PAN dan RB	10.583.700
	Pengelolaan Sarana dan Prasarana Kementerian	10.583.700
	Program Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi	73.390.000
	Koordinasi Kebijakan, Penyusunan dan Evaluasi Program Reformasi Birokrasi, Akuntabilitas Aparatur, dan Pengawasan	5.673.028
	Perumusan Kebijakan Reformasi Birokrasi dan Akuntabilitas Aparatur, dan Pengawasan	5.286.352
	Koordinasi Penanganan Pengaduan Masyarakat dan Aparatur	3.899.260
	Koordinasi Pelaksanaan, Pemantauan, dan Evaluasi Reformasi Birokrasi Akuntabilitas Aparatur dan Pengawasan I	3.361.900
	Koordinasi Pelaksanaan, Pemantauan, dan Evaluasi Reformasi Birokrasi Akuntabilitas Aparatur dan Pengawasan II	3.248.542
	Koordinasi Pelaksanaan, Pemantauan, dan Evaluasi Reformasi Birokrasi Akuntabilitas Aparatur dan Pengawasan III	3.487.708
	Pengembangan Sistem Evaluasi Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi	1.873.310
	Koordinasi Kebijakan, Penyusunan, dan Evaluasi Program Kelembagaan dan Tata Laksana	3.736.079
	Perumusan Kebijakan Sistem Kelembagaan dan Tata Laksana	1.695.546
	Perumusan dan Koordinasi Pelaksanaan Kebijakan E-Government	1.506.462
	Asesmen dan Koordinasi Pelaksanaan Kebijakan Kelembagaan I	1.621.334
	Asesmen dan Koordinasi Pelaksanaan Kebijakan Kelembagaan II	2.661.391
	Asesmen dan Koordinasi Pelaksanaan Kebijakan Kelembagaan III	1.485.988
	Koordinasi Kebijakan Penyusunan Evaluasi Program dan Pembinaan Integritas Sumber Daya Manusia Aparatur	3.786.600
	Perencanaan dan Pengembangan Sistem Informasi Sumber Daya Manusia Aparatur	2.213.020
	Perumusan Kebijakan Pengadaan Sumber Daya Manusia Aparatur	8.035.400
	Standardisasi Jabatan dan Pengembangan Kompetensi Sumber Daya Manusia Aparatur	2.127.530
	Pengembangan Kesejahteraan Sumber Daya Manusia Aparatur	2.587.450
	Koordinasi Kebijakan, Penyusunan dan Evaluasi Program Pelayanan Publik	2.654.587
	Perumusan Kebijakan Inovasi dan Sistem Informasi Pelayanan Publik	5.244.188
	Koordinasi Pelaksanaan, Pemantauan dan Evaluasi Pelayanan Publik I	2.251.014
	Koordinasi Pelaksanaan, Pemantauan dan Evaluasi Pelayanan Publik II	2.476.190
	Koordinasi Pelaksanaan, Pemantauan dan Evaluasi Pelayanan Publik III	2.477.121

www.peraturan.go.id

LAMPIRAN III

RINCIAN ANGGARAN BELANJA PEMERINTAH PUSAT PADA BAGIAN ANGGARAN KEMENTERIAN NEGARA/LEMBAGA

K/L : BADAN INTELIJEN NEGARA

(dalam ribuan rupiah)

UNIT ORGANISASI	FUNGSI/PROGRAM/KEGIATAN	ALOKASI ANGGARAN
1	2	3
BADAN INTELIJEN NEGARA		2.616.596.577
BADAN INTELIJEN NEGARA		2.616.596.577
	KETERTIBAN DAN KEAMANAN	2.616.596.577
	Program Dukungan Manajemen dan Pelaksanaan Tugas Teknis Lainnya Intelijen Negara	1.194.743.577
	Penyelenggaraan Dukungan Administrasi dan Sumber Daya Manusia	1.151.543.577
	Penyelenggaraan Dukungan Administrasi Operasi Intelijen	43.200.000
	Program Pengawasan dan Peningkatan Akuntabilitas Aparatur Intelijen Negara	3.333.000
	Peningkatan Pemeriksaan dan Pengawasan	3.333.000
	Program Pengembangan Penyelidikan Pengamanan dan Penggalangan Keamanan Negara	1.418.520.000
	Operasi Intelijen Luar Negeri	194.400.000
	Operasi Intelijen dalam Negeri	678.000.000
	Operasi Kontra Intelijen	324.000.000
	Operasi Intelijen Ekonomi	87.120.000
	Operasi Intelijen Teknologi	43.800.000
	Operasi Intelijen Komunikasi dan Informasi	61.200.000
	Analisis dan Produksi Intelijen	30.000.000

www.peraturan.go.id

LAMPIRAN III

RINCIAN ANGGARAN BELANJA PEMERINTAH PUSAT PADA BAGIAN ANGGARAN KEMENTERIAN NEGARA/LEMBAGA

K/L : LEMBAGA SANDI NEGARA

(dalam ribuan rupiah)

UNIT ORGANISASI	FUNGSI/PROGRAM/KEGIATAN	ALOKASI ANGGARAN
1	2	3
LEMBAGA SANDI NEGARA		
	LEMBAGA SANDI NEGARA	**1.656.562.559**
	PELAYANAN UMUM	**1.656.562.559**
	Program Dukungan Manajemen dan Pelaksanaan Tugas Teknis Lainnya Lembaga Sandi Negara	**262.048.359**
	Dukungan Administratif Bidang Perencanaan, Hukum, Organisasi Tata Laksana, Kepegawaian, dan Hubungan Masyarakat	30.145.677
	Dukungan Administratif Umum Bidang Keuangan dan Persuratan	111.326.089
	Peningkatan Sarana dan Prasarana Perkantoran	119.071.428
	Pengawasan dan Peningkatan Akuntabilitas Aparatur Lemsaneg	1.505.165
	KETERTIBAN DAN KEAMANAN	**1.254.069.989**
	Program Pengembangan Persandian Nasional	**1.254.069.989**
	Operasi Analisa Sinyal	610.151.685
	Penyelenggaraan Fasilitasi Operasional Sistem Keamanan Informasi Berklasifikasi	165.456.037
	Perumusan Kebijakan Penyelenggaraan dan Pembinaan Persandian Negara	11.419.925
	Pengembangan Infrastruktur dan Pengelolaan Sistem Keamanan Informasi Berklasifikasi	307.831.168
	Pengawasan dan Pengendalian Penyelenggaraan Persandian Negara	11.423.358
	Pengkajian dan Rancang Bangun Pengamanan Infrastruktur Jaringan dan Teknologi Komunikasi Sandi	8.045.188
	Pengkajian dan Rancang Bangun Algoritma dan Manajemen Kunci	3.090.686
	Pengkajian dan Rancang Bangun Perangkat Keras dan Perangkat Lunak Peralatan Sandi	136.651.942
	PENDIDIKAN	**140.444.211**
	Program Pengembangan Persandian Nasional	**140.444.211**
	Penyelenggaraan Pendidikan dan Pelatihan Bidang Persandian	42.798.034
	Penyelenggaraan Pendidikan Profesional di Bidang Persandian	97.646.177

www.peraturan.go.id

LAMPIRAN III

RINCIAN ANGGARAN BELANJA PEMERINTAH PUSAT PADA BAGIAN ANGGARAN KEMENTERIAN NEGARA/LEMBAGA

K/L : DEWAN KETAHANAN NASIONAL

(dalam ribuan rupiah)

UNIT ORGANISASI	FUNGSI/PROGRAM/KEGIATAN	ALOKASI ANGGARAN
1	2	3
DEWAN KETAHANAN NASIONAL		144.307.962
SETJEN DEWAN KETAHANAN NASIONAL		144.307.962
	PERTAHANAN	144.307.962
	Program Dukungan Manajemen dan Pelaksanaan Tugas Teknis Lainnya Wantanas	51.904.482
	Pengelolaan Perencanaan dan Keuangan	19.559.347
	Pengelolaan Persidangan dan Humas	470.555
	Pengelolaan Internal Perkantoran dan Kepegawaian	31.874.580
	Program Pengembangan Kebijakan Ketahanan Nasional	92.403.480
	Perumusan Kebijakan Sistem Nasional	4.329.200
	Pengembangan Sistem Informasi Wantannas	72.910.000
	Perumusan Kebijakan Politik dan Strategi	5.186.140
	Perumusan Kebijakan Penginderaan dan Perdiran Ancaman	4.156.762
	Perumusan Kebijakan Evaluasi Implementasi dan Risiko Pembangunan	4.260.570
	Perumusan Pertimbangan dan Saran Kebijakan	1.560.808

www.peraturan.go.id

LAMPIRAN III

RINCIAN ANGGARAN BELANJA PEMERINTAH PUSAT PADA BAGIAN ANGGARAN KEMENTERIAN NEGARA/LEMBAGA

K/L : BADAN PUSAT STATISTIK

(dalam ribuan rupiah)

UNIT ORGANISASI	FUNGSI/PROGRAM/KEGIATAN	ALOKASI ANGGARAN
1	2	3
BADAN PUSAT STATISTIK		
BADAN PUSAT STATISTIK		5.030.757.447
	PELAYANAN UMUM	5.030.757.447
	Program Dukungan Manajemen dan Pelaksanaan Tugas Teknis Lainnya BPS	**4.976.672.766**
	Penyusunan Pengembangan dan Evaluasi Program dan Anggaran	2.078.441.163
	Pelayanan Publik, Hubungan Masyarakat dan Hukum	171.242.241
	Pengelolaan dan Pengembangan Administrasi Kepegawaian	6.952.576
	Pengelolaan dan Pengembangan Administrasi Keuangan	17.798.183
	Dukungan Manajemen BPS Lainnya	153.613.651
	Dukungan Manajemen dan Pelaksanaan Tugas Teknis Lainnya BPS Provinsi	44.963.488
	Penyelenggaraan Pendidikan dan Pelatihan Aparatur Negara (BPS)	1.640.445.850
	Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur BPS	43.425.174
	Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur Negara BPS serta Operasional Perkantoran Lainnya	**386.427.800**
	Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur Negara BPS Provinsi	82.866.204
	Program Pengawasan dan Peningkatan Akuntabilitas Aparatur BPS	303.561.596
	Pengawasan dan Peningkatan Akuntabilitas Inspektorat I	**7.096.100**
	Pengawasan dan Peningkatan Akuntabilitas Inspektorat II	2.370.840
	Pengawasan dan Peningkatan Akuntabilitas Inspektorat III	2.381.034
	Program Penyediaan dan Pelayanan Informasi Statistik	2.344.226
	Penyediaan dan Pelayanan Informasi Statistik BPS Provinsi	**2.504.707.703**
	Pengembangan dan Analisis Statistik	1.786.902.052
	Pelayanan dan Pengembangan Diseminasi Informasi Statistik	4.700.116
	Penyediaan dan Pengembangan Statistik Neraca Pengeluaran	7.470.114
	Penyediaan dan Pengembangan Statistik Neraca Produksi	4.768.099
	Pengembangan Metodologi Sensus dan Survei	4.716.207
	Pengembangan Sistem Informasi Statistik	1.886.234
	Penyediaan dan Pengembangan Statistik Distribusi	205.990.908
	Penyediaan dan Pengembangan Statistik Harga	316.437.578
	Penyediaan dan Pengembangan Statistik Industri, Pertambangan dan Penggalian, Energi, dan Konstruksi	8.127.530
	Penyediaan dan Pengembangan Statistik Kependudukan dan Ketenagakerjaan	7.582.440
	Penyediaan dan Pengembangan Statistik Kesejahteraan Rakyat	43.091.798
	Penyediaan dan Pengembangan Statistik Ketahanan Sosial	40.405.612
	Penyediaan dan Pengembangan Statistik Keuangan, Teknologi Informasi, dan Pariwisata	43.091.162
	Penyediaan dan Pengembangan Statistik Peternakan, Perikanan, dan Kehutanan	4.787.506
	Penyediaan dan Pengembangan Statistik Tanaman Pangan, Hortikultura, dan Perkebunan	1.531.125
	PENDIDIKAN	23.219.222
	Program Dukungan Manajemen dan Pelaksanaan Tugas Teknis Lainnya BPS	**54.084.681**
	Penyelenggaraan Sekolah Tinggi Ilmu Statistik (STIS)	54.084.681

www.peraturan.go.id

LAMPIRAN III

RINCIAN ANGGARAN BELANJA PEMERINTAH PUSAT PADA BAGIAN ANGGARAN KEMENTERIAN NEGARA/LEMBAGA

K/L : KEMENTERIAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN NASIONAL/BAPPENAS

(dalam ribuan rupiah)

UNIT ORGANISASI	FUNGSI/PROGRAM/KEGIATAN	ALOKASI ANGGARAN
1	2	3
KEMENTERIAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN NASIONAL		1.088.112.864
KEMENTERIAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN NASIONAL		1.088.112.864
PELAYANAN UMUM		1.088.112.864
	Program Dukungan Manajemen dan Pelaksanaan Tugas Teknis Lainnya Bappenas	604.279.964
	Pelayanan Kehumasan, Keprotokolan/Persidangan, dan Ketatausahaan Pimpinan	8.140.000
	Pembinaan dan Pelayanan Hukum	1.500.000
	Penyusunan Perencanaan, Analisis Organisasi, dan Tata Laksana	53.122.161
	Penyusunan Kebijakan dan Pelayanan Kepegawaian	5.021.062
	Pelayanan Umum dan Keuangan	230806.441
	Pengelolaan Data dan Informasi Perencanaan Pembangunan Nasional	7360.300
	Pembinaan Perencana dan Penyelenggaraan Diklat Perencanaan	294.830.000
	Dukungan Penyusunan Perencanaan Kebijakan Pembangunan	3.500.000
	Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur Bappenas	40.000.000
	Peningkatan Kualitas Sarana dan Prasarana Pendukung Pelayanan Umum dan Operasional	40.000.000
	Program Pengawasan dan Peningkatan Akuntabilitas Aparatur Bappenas	5.000.000
	Pembinaan dan Pengawasan Bidang Administrasi Umum	3.000.000
	Pembinaan dan Pengawasan Bidang Kinerja Kelembagaan	2.000.000
	Program Perencanaan Pembangunan Nasional	438.832.900
	Perencanaan Pembangunan Terkait Lingkup Pendidikan	2.670.000
	Perencanaan Pembangunan Bidang Alokasi Pendanaan Pembangunan	3.772.803
	Analisis Peraturan Perundang-Undangan yang Berkaitan Dengan Pelaksanaan Tugas dan Fungsi di Bidang Perencanaan Pembangunan	1.620.000
	Perencanaan Pembangunan Terkait Lingkup Aparatur Negara	2.750.000
	Perencanaan Pembangunan Terkait Lingkup Energi, Telekomunikasi, dan Informatika	4.700.000
	Evaluasi Kinerja Pembangunan Daerah	9.300.000
	Evaluasi Kinerja Pembangunan Sektoral	2.670.000
	Perencanaan Pembangunan Terkait Lingkup Hukum dan Hak Asasi Manusia	3.700.000
	Perencanaan Pembangunan Terkait Lingkup Industri, Iptek, Pariwisata dan Ekonomi Kreatif	2.558.000
	Perencanaan Pembangunan Terkait Lingkup Jasa Keuangan dan BUMN	2.258.000
	Perencanaan Pembangunan Terkait Lingkup Kawasan Khusus dan Daerah Tertinggal	4.230.000
	Perencanaan Pembangunan Terkait Lingkup Agama, Kebudayaan, Pemuda dan Olahraga	3.450.000
	Perencanaan Pembangunan Terkait Lingkup Kehutanan dan Konservasi Sumber Daya Air	3.140.000
	Perencanaan Pembangunan Terkait Lingkup Kelautan dan Perikanan	5.000.000
	Perencanaan Pembangunan Terkait Lingkup Kependudukan, Pemberdayaan Perempuan, dan Perlindungan Anak	3.845.000
	Perencanaan Pembangunan Terkait Lingkup Kesehatan dan Gizi Masyarakat	9.739.500
	Perencanaan Pembangunan Terkait Lingkup Keuangan Negara dan Analisa Moneter	3.274.000
	Perencanaan Pembangunan Terkait Lingkup Lingkungan Hidup	19.250.000
	Perencanaan Pembangunan Terkait Lingkup Otonomi Daerah	4.955.281
	Perencanaan Pembangunan Terkait Lingkup Pangan dan Pertanian	3.720.000

www.peraturan.go.id

LAMPIRAN III

RINCIAN ANGGARAN BELANJA PEMERINTAH PUSAT PADA BAGIAN ANGGARAN KEMENTERIAN NEGARA/LEMBAGA

K/L : KEMENTERIAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN NASIONAL/BAPPENAS

(dalam ribuan rupiah)

UNIT ORGANISASI				FUNGSI/PROGRAM/KEGIATAN	ALOKASI ANGGARAN
1				2	3
				Perencanaan Pembangunan Terkait Lingkup Pemberdayaan Koperasi dan Usaha Kecil Menengah	4.350.000
				Perencanaan Pembangunan Terkait Lingkup Penanggulangan Kemiskinan	3.250.000
				Perencanaan Pembangunan Bidang Pendanaan Luar Negeri Bilateral	1.816.844
				Perencanaan Pembangunan Bidang Pendanaan Luar Negeri Multilateral	2.690.309
				Perencanaan Pembangunan Terkait Lingkup Pengairan dan Irigasi	15.274.000
				Perencanaan Pembangunan Terkait Lingkup Pengembangan Kerja Sama Pemerintah dan Swasta	33.195.140
				Perencanaan Pembangunan Terkait Lingkup Pengembangan Wilayah	10.554.719
				Perencanaan Pembangunan Terkait Lingkup Perdagangan, Investasi, dan Kerja Sama Ekonomi Internasional	2.750.000
				Perencanaan Pembangunan Bidang Perencanaan dan Pengembangan Pendanaan Pembangunan	2.666.059
				Perencanaan Pembangunan Terkait Lingkup Perencanaan Makro	2.650.000
				Perencanaan Pembangunan Terkait Lingkup Perkotaan dan Perdesaan	4.350.000
				Perencanaan Pembangunan Terkait Lingkup Perlindungan dan Kesejahteraan Masyarakat	8.650.000
				Perencanaan Pembangunan Terkait Lingkup Permukiman dan Perumahan	4.540.860
				Perencanaan Pembangunan Terkait Lingkup Pertahanan dan Keamanan	1.950.000
				Perencanaan Pembangunan Terkait Lingkup Politik dan Komunikasi	3.670.000
				Pengembangan Kebijakan dalam Bidang Sistem dan Pelaporan Evaluasi Kinerja Pembangunan	2.370.000
				Perencanaan Pembangunan Terkait Lingkup Sumber Daya Energi, Mineral, dan Pertambangan	3.120.000
				Perencanaan Pembangunan Terkait Lingkup Tata Ruang dan Pertanahan	4.510.000
				Perencanaan Pembangunan Terkait Lingkup Tenaga Kerja dan Pengembangan Kesempatan Kerja	2.950.000
				Perencanaan Pembangunan Terkait Lingkup Transportasi	33.411.000
				Pengelolaan Hibah MCC Indonesia	123.000.000
				Perencanaan Pembangunan Bidang Kerja Sama Pembangunan Internasional	4.113.985
				Perencanaan Pembangunan Nasional Lintas Bidang	66.397.405

www.peraturan.go.id

LAMPIRAN III

RINCIAN ANGGARAN BELANJA PEMERINTAH PUSAT PADA BAGIAN ANGGARAN KEMENTERIAN NEGARA/LEMBAGA

K/L : KEMENTERIAN AGRARIA DAN TATA RUANG/BPN

(dalam ribuan rupiah)

UNIT ORGANISASI	FUNGSI/PROGRAM/KEGIATAN	ALOKASI ANGGARAN
1	2	3
KEMENTERIAN AGRARIA DAN TATA RUANG/BADAN PERTANAHAN NASIONAL		
SEKRETARIAT JENDERAL		5.623.939.770
	PELAYANAN UMUM	2.902.767.159
	Program Dukungan Manajemen dan Pelaksanaan Tugas Teknis Lainnya Kementerian ATR/BPN	2.874.273.968
	Pembinaan Administrasi dan pengelolaan Keuangan dan Barang Milik Negara Kementerian ATR/BPN	2.288.074.783
	Pembinaan Organisasi dan Pengelolaan Kepegawaian Kementerian ATR/BPN	111.007.568
	Perencanaan, Pemantauan dan Evaluasi Program dan Anggaran Serta Administrasi Kerjasama Kementerian ATR/BPN	11.486.166
	Penyelenggaraan Urusan Komunikasi Publik dan Protokol	14.249.738
	Pengelolaan Administrasi Umum Kementerian ATR/BPN	9.479.679
	Pengelolaan Informasi Agraria dan Tata Ruang	46.323.063
	Pengembangan dan pengelolaan adminitrasi Hukum dan Bantuan Hukum Kementerian ATR/BPN	53.414.502
	Penyelenggaraan Pendidikan dan Pelatihan Kementerian ATR/BPN	24.140.277
	Penyelenggaraan Penelitian dan Pengembangan Kementerian ATR/BPN	21.959.751
	Pengelolaan Informasi Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan Kementerian ATR/BPN	2.540.673
	Penyelenggaraan Dukungan Manajemen dan Pelaksanaan Tugas Teknis Lainnya di Daerah	1.650.000
	Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur Kementerian ATR/BPN	1.991.823.366
	Pengelolaan Sarana dan Prasarana Pusat	586.199.185
	Pengelolaan Sarana dan Prasarana Daerah	149.164.229
	PENDIDIKAN	437.034.956
	Program Dukungan Manajemen dan Pelaksanaan Tugas Teknis Lainnya	28.493.191
	Dukungan Manajemen dan Pelaksanaan Tugas Pendidikan STPN	28.493.191
INSPEKTORAT JENDERAL		28.493.191
	PELAYANAN UMUM	10.000.000
	Program Pengawasan dan Peningkatan Akuntabilitas Aparatur Kementerian ATR/BPN	10.000.000
	Penyelenggaraan Pengawasan dan Peningkatan Akuntabilitas Aparatur Kementerian ATR/BPN Wilayah I	10.000.000
	Penyelenggaraan Pengawasan dan Peningkatan Akuntabilitas Aparatur Kementerian ATR/BPN Wilayah II	1.893.990
	Penyelenggaraan Pengawasan dan Peningkatan Akuntabilitas Aparatur Kementerian ATR/BPN Wilayah IIII	1.726.475
	Penyelenggaraan Pengawasan dan Peningkatan Akuntabilitas Aparatur Kementerian ATR/BPN Wilayah IV	1.679.809
	Penyelenggaraan Pengawasan dan Peningkatan Akuntabilitas Aparatur Kementerian ATR/BPN Wilayah V	2.380.116
DIREKTORAT JENDERAL TATA RUANG		2.319.610
	LINGKUNGAN HIDUP	527.282.600
	Program Perencanaan dan Pemanfaatan Ruang	527.282.600
	Pengembangan Sistem Perencanaan Tata Ruang dan Pemanfaatan Ruang	527.282.600
	Perencanaan Tata Ruang	25.700.000
	Pemanfaatan Ruang	233.400.000
	Pengembangan Kawasan	55.300.000
	Pembinaan Perencanaan Tata Ruang dan Pemanfaatan Ruang Daerah	100.882.600
DEIREKTORAT JENDERAL INFRASTRUKTUR KEAGRARIAAN		112.000.000
		299.202.602

www.peraturan.go.id

LAMPIRAN III

RINCIAN ANGGARAN BELANJA PEMERINTAH PUSAT PADA BAGIAN ANGGARAN KEMENTERIAN NEGARA/LEMBAGA

K/L : KEMENTERIAN AGRARIA DAN TATA RUANG/BPN

(dalam ribuan rupiah)

UNIT ORGANISASI	FUNGSI/PROGRAM/KEGIATAN	ALOKASI ANGGARAN
1	2	3
	LINGKUNGAN HIDUP	**299.202.602**
	Program Pengembangan Infrastruktur Agraria	**299.202.602**
	Pengukuran dan Pemetaan Dasar	111.569.439
	Pengukuran dan Pemetaan Kadastral	27.949.196
	Survei Dan Pemetaan Tematik	115.470.961
	Pembinaan Sureyor dan Peralatan	9.259.409
	Penyelenggaraan Pengembangan Infrastruktur di Daerah	34.953.597
	DIREKTORAT JENDERAL HUBUNGAN HUKUM KEAGRARIAAN	**1.192.336.114**
	LINGKUNGAN HIDUP	**1.192.336.114**
	Program Penataan Hubungan Hukum Agraria	**1.192.336.114**
	Pengaturan dan Penetapan Hak Tanah	2.000.000
	Pengaturan Tanah Badan Sosial/ Keagamaan dan Tanah Negara	116.215
	Pendaftaran Hak dan PPAT	3.609.084
	Pemberdayaan Masyarakat	1.984.787
	Penyelenggaraan Penataan Hubungan Hukum Agraria di Daerah	1.184.626.028
	DIREKTORAT JENDERAL PENATAAN AGRARIA	**142.258.886**
	LINGKUNGAN HIDUP	**142.258.886**
	Program Penataan Agraria	**142.258.886**
	Penyelenggaraan Penatagunaan Tanah	5.008.780
	Penataan Wilayah Pesisir, Pulau-pulau Kecil, Perbatasan dan Wilayah Tertentu	5.006.379
	Penyelenggaraan Konsolidasi Tanah	2.801.850
	Penyelenggaraan Landreform	4.106.661
	Penyelengaraan Penataan Agraria di Daerah	125.335.216
	DIREKTORAT JENDERAL PENGADAAN TANAH	**30.299.980**
	LINGKUNGAN HIDUP	**30.299.980**
	Program Pengadaan Tanah	**30.299.980**
	Pembinaan Pengadaan Tanah	182.854
	Pengadaan Dan Penetapan Tanah Pemerintah	2.000.000
	Pemanfaatan Tanah Pemerintah	500.000
	Penilaian Tanah	500.000
	Penyelenggaraan Pengadaan Tanah di Daerah	27.117.126
	DIREKTORAT JENDERAL PENGENDALIAN PEMANFAATAN RUANG DAN PENGUASAAN TANAH	**329.962.715**
	LINGKUNGAN HIDUP	**329.962.715**
	Program Pengendalian Pemanfaatan Ruang dan Penguasaan Tanah	**329.962.715**
	Pengembangan Sistem Pengendalian Pemanfaatan	98.350.000
	Pengendalian Pemanfaatan Ruang Dan Penguasaan Tanah Wilayah I	68.479.986
	Pengendalian Pemanfaatan Ruang Dan Penguasaan Tanah Wilayah II	52.331.652
	Pengendalian Pemanfaatan Ruang Dan Penguasaan Tanah Wilayah III	72.338.362

www.peraturan.go.id

LAMPIRAN III

RINCIAN ANGGARAN BELANJA PEMERINTAH PUSAT PADA BAGIAN ANGGARAN KEMENTERIAN NEGARA/LEMBAGA

K/L : KEMENTERIAN AGRARIA DAN TATA RUANG/BPN

(dalam ribuan rupiah)

UNIT ORGANISASI	FUNGSI/PROGRAM/KEGIATAN	ALOKASI ANGGARAN
1	2	3
	Penertiban dan Pengendalian Tanah Terlantar	38.462.715
DIREKTORAT JENDERAL PENANGANAN MASALAH AGRARIA, PEMANFAATAN RUANG DAN TANAH		189.829.714
LINGKUNGAN HIDUP		189.829.714
	Program Penanganan Masalah Agraria dan Tata Ruang	189.829.714
	Penanganan Sengketa dan Konflik Wilayah I	4.237.398
	Penanganan Sengketa dan Konflik Wilayah II	2.000.000
	Penanganan Sengketa dan Konflik Wilayah IIII	820.827
	Penanganan Perkara	2.389.720
	Penyelenggaraan Penanganan Masalah Agraria dan Tata Ruang di Daerah	180.381.769

www.peraturan.go.id

LAMPIRAN III

RINCIAN ANGGARAN BELANJA PEMERINTAH PUSAT PADA BAGIAN ANGGARAN KEMENTERIAN NEGARA/LEMBAGA

K/L : PERPUSTAKAAN NASIONAL REPUBLIK INDONESIA

(dalam ribuan rupiah)

UNIT ORGANISASI	FUNGSI/PROGRAM/KEGIATAN	ALOKASI ANGGARAN
1	2	3
PERPUSTAKAAN NASIONAL REPUBLIK INDONESIA		473.487.587
PERPUSTAKAAN NASIONAL		473.487.587
	PELAYANAN UMUM	142.406.286
	Program Dukungan Manajemen dan Pelaksanaan Tugas Teknis Lainnya Perpustakaan Nasional	138.942.386
	Perencanaan, Hukum, Humas dan Pengawasan Perpustakaan Nasional	18.372.541
	Pengelolaan Administrasi Keuangan, Kepegawaian dan Operasional Perkantoran Perpustakaan Nasional	115.919.445
	Pengawasan Intern Perpustakaan Nasional	4.650.400
	Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur Perpustakaan Nasional	3.463.900
	Pembangunan/Pengadaan/Peningkatan Sarana dan Prasarana Biro Umum Perpustaa	3.463.900
	PENDIDIKAN	331.081.301
	Program Pengembangan Perpustakaan	331.081.301
	Pengelolaan Deposit Terbitan Nasional	7.463.500
	Peningkatan Layanan Jasa Perpustakaan dan Informasi	41.845.600
	Pendidikan dan Pelatihan Perpustakaan	10.171.300
	Pengembangan Koleksi Perpustakaan Nasional	15.492.000
	Pengembangan Perpustakaan dan Pembudayaan Gemar Membaca	220.528.000
	Pengembangan Pustakawan	7.000.000
	Preservasi dan Konservasi Bahan Pustaka dan Naskah Kuno	13.309.509
	Pengelolaan Perpustakaan Proklamator Bung Karno	8.517.900
	Pengelolaan Perpustakaan Proklamator Bung Hatta	6.753.501

www.peraturan.go.id

LAMPIRAN III

RINCIAN ANGGARAN BELANJA PEMERINTAH PUSAT PADA BAGIAN ANGGARAN KEMENTERIAN NEGARA/LEMBAGA

K/L : KEMENTERIAN KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA

(dalam ribuan rupiah)

UNIT ORGANISASI	FUNGSI/PROGRAM/KEGIATAN	ALOKASI ANGGARAN
1	2	3
KEMENTERIAN KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA		4.929.820.819
SEKRETARIAT JENDERAL		313.958.207
	PELAYANAN UMUM	306.503.199
	Program Dukungan Manajemen dan Pelaksanaan Tugas Teknis Lainnya Kementerian Komunikasi dan Informatika	291.503.199
	Koordinasi Pembinaan Kepegawaian dan Penataan Organisasi Kementerian Komunikasi dan Informatika	13.447.650
	Koordinasi Pembinaan dan Pengelolaan Keuangan dan Penatausahaan Barang Milik Negara Kementerian Komunikasi dan Informatika	80.630.707
	Koordinasi Penyusunan Program, Kegiatan dan Anggaran, Lintas Sektoral dan Daerah serta Evaluasi dan Laporan Kementerian Komunikasi dan Informatika	12.202.471
	Koordinasi Pembinaan dan Pengelolaan Administrasi, Pengadaan Barang/Jasa serta Pelayanan Penunjang Pelaksanaan Tugas Kementerian Komunikasi dan Informatika	58.936.615
	Pelayanan, Pengelolaan, Pengembangan, dan Pemanfaatan Data dan Informasi serta Sarana Informatika Kementerian Komunikasi dan Informatika	8.753.865
	Pelayanan Informasi Promosi Penyediaan Akses Informasi dan Dokumentasi Kementerian Komunikasi dan Informatika	8.281.900
	Pelayanan Ketatalaksanaan dan Penyusunan Naskah Kerja Sama Internasional Kementerian Komunikasi dan Informatika	10.689.200
	Pelaksanaan dan Pengembangan Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Kementerian Komunikasi dan Informatika	9.412.492
	Dukungan Manajemen dan Dukungan Teknis Lainnya Komisi Informasi (KI) Pusat	21.698.499
	Dukungan Manajemen dan Dukungan Teknis Lainnya Komisi Penyiaran Indonesia (KPI) Pusat	48.182.400
	Dukungan Manajemen dan Dukungan Teknis Lainnya Dewan Pers	19.267.400
	Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur Kementerian Komunikasi dan Informatika	15.000.000
	Pelaksanaan Pembangunan dan Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Kementerian Komunikasi dan Informatika	15.000.000
	PARIWISATA DAN EKONOMI KREATIF	7.455.008
	Program Dukungan Manajemen dan Pelaksanaan Tugas Teknis Lainnya Kementerian Komunikasi dan Informatika	7.455.008
	Koordinasi Perumusan Peraturan Perundang-Undangan, Penelaahan dan Evaluasi Produk Hukum dan Bantuan Hukum Kementerian Komunikasi dan Informatika	7.455.008
INSPEKTORAT JENDERAL		28.600.000
	PELAYANAN UMUM	28.600.000
	Program Pengawasan dan Peningkatan Akuntabilitas Aparatur Kementerian Komunikasi dan Informatika	28.600.000
	Pengawasan Terhadap Pelaksanaan Tugas di Lingkungan Direktorat Jenderal Sumber Daya dan Perangkat Pos dan Informatika	2.511.392
	Pengawasan Terhadap Pelaksanaan Tugas di Lingkungan Direktorat Jenderal Penyelenggaraan Pos dan Informatika	1.514.760
	Pengawasan Terhadap Pelaksanaan Tugas di Lingkungan Direktorat Jenderal Aplikasi Informatika dan Direktorat Jenderal Informasi dan Komunikasi Publik	1.040.717
	Pengawasan Terhadap Pelaksanaan Tugas di Lingkungan Sekretariat Jenderal Inspektorat Jenderal dan Badan Litbang SDM	1.543.354
	Dukungan Manajemen dan Dukungan Teknis Lainnya Inspektorat Jenderal	21.989.777
DITJEN SUMBER DAYA DAN PERANGKAT POS DAN INFORMATIKA		1.084.163.800
	PELAYANAN UMUM	264.689.739
	Program Pengelolaan Sumber Daya dan Perangkat Pos dan Informatika	264.689.739
	Dukungan Manajemen dan Dukungan Teknis Lainnya Ditjen Sumber Daya dan Perangkat Pos dan Informatika	264.689.739
	EKONOMI	819.474.061
	Program Pengelolaan Sumber Daya dan Perangkat Pos dan Informatika	819.474.061

www.peraturan.go.id

LAMPIRAN III

RINCIAN ANGGARAN BELANJA PEMERINTAH PUSAT PADA BAGIAN ANGGARAN KEMENTERIAN NEGARA/LEMBAGA

K/L : KEMENTERIAN KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA

(dalam ribuan rupiah)

UNIT ORGANISASI	FUNGSI/PROGRAM/KEGIATAN	ALOKASI ANGGARAN
1	2	3
	Pelaksanaan Layanan Pengujian dan Kalibrasi Perangkat Pos dan Informatika	104.233.463
	Pelaksanaan Monitoring, Validasi dan Penertiban Pemanfaatan Sumber Daya Pos dan Informatika	435.509.293
	Pelaksanaan Layanan Pemanfaatan Spektrum Frekuensi Radio dan Orbit Satelit	31.374.770
	Pengendalian Pemanfaatan Sumber Daya dan Perangkat Pos dan Informatika	183.893.644
	Perencanaan dan Rekayasa Spektrum Frekuensi Radio dan Orbit Satelit	27.487.521
	Penetapan dan Pengembangan Standardisasi Perangkat dan Layanan Pos dan Informatika	36.975.370
DITJEN APLIKASI INFORMATIKA		**111.400.000**
PELAYANAN UMUM		**42.859.303**
Program Pengembangan Aplikasi Informatika		**42.859.303**
Dukungan Manajemen dan Dukungan Teknis Lainnya Ditjen Aplikasi Informatika		42.859.303
EKONOMI		**68.540.697**
Program Pengembangan Aplikasi Informatika		**68.540.697**
Pembinaan dan Pengembangan E-Bisnis		11.066.179
Pembinaan dan Pengembangan E-Government		17.463.265
Pembinaan Pengembangan dan Kemitraan Industri Informatika		7.696.817
Pembinaan dan Pengembangan Tik Untuk Pemberdayaan Masyarakat		13.773.668
Pembinaan dan Pengembangan Sistem Keamanan Informasi		18.540.768
DITJEN PENYELENGGARAAN POS DAN INFORMATIKA		**2.945.946.712**
PELAYANAN UMUM		**188.676.374**
Program Penyelenggaraan Pos dan Informatika		**188.676.374**
Dukungan Manajemen dan Dukungan Teknis Lainnya Ditjen Penyelenggaraan Pos dan Informatika		188.676.374
EKONOMI		**2.757.270.338**
Program Penyelenggaraan Pos dan Informatika		**2.757.270.338**
Pelaksanaan Pengamanan Jaringan Internet		22.000.000
Penyediaan Infrastruktur dan Layanan Telekomunikasi dan Penyiaran		2.236.656.338
Pembinaan dan Pengembangan Layanan Khusus Informatika		383.464.000
Pengendalian Penyelenggaraan Pos dan Informatika		28.181.500
Pembinaan dan Pengembangan Penyelenggaraan Pos		27.996.000
Pembinaan dan Pengembangan Penyelenggaraan Telekomunikasi		32.235.000
Pembinaan dan Pengembangan Penyelenggaraan Penyiaran		26.737.500
BADAN PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA		**269.752.100**
PELAYANAN UMUM		**42.778.370**
Program Penelitian dan Pengembangan Komunikasi dan Informatika		**42.778.370**
Dukungan Manajemen dan Dukungan Teknis Lainnya Badan Penelitian dan Pengembangan SDM		42.778.370
EKONOMI		**176.508.630**
Program Penelitian dan Pengembangan Komunikasi dan Informatika		**176.508.630**
Penelitian dan Pengembangan Komunikasi dan Informatika dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Komunikasi dan Informatika, 2 Lokasi B2P2KI		32.456.220
Penelitian dan Pengembangan Komunikasi dan Informatika dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Komunikasi dan Informatika, 6 Lokasi B2P2KI		34.766.984

www.peraturan.go.id

LAMPIRAN III

RINCIAN ANGGARAN BELANJA PEMERINTAH PUSAT PADA BAGIAN ANGGARAN KEMENTERIAN NEGARA/LEMBAGA

K/L : KEMENTERIAN KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA

(dalam ribuan rupiah)

UNIT ORGANISASI	FUNGSI/PROGRAM/KEGIATAN	ALOKASI ANGGARAN
1	2	3
	Penelitian dan Pengembangan Aplikasi Informatika, Informasi dan Komunikasi Publik	4.330.047
	Penelitian dan Pengembangan Literasi dan Profesi, serta Pengembangan SDM Komunikasi dan Informatika	79.324.730
	Penelitian dan Pengembangan Penyelenggaraan Pos dan Informatika	5.439.483
	Penelitian dan Pengembangan Sumber Daya dan Perangkat Pos dan Informatika	4.870.000
	Pelatihan dan Pengembangan Teknologi Informasi dan Komunikasi	15.321.166
PENDIDIKAN		**50.465.100**
	Program Penelitian dan Pengembangan Komunikasi dan Informatika	**50.465.100**
	Penyelenggaraan Tri Dharma Perguruan Tinggi di STMM Yogyakarta	50.465.100
DITJEN INFORMASI DAN KOMUNIKASI PUBLIK		**176.000.000**
PELAYANAN UMUM		**65.031.903**
	Program Pengembangan Informasi dan Komunikasi Publik	**65.031.903**
	Dukungan Manajemen dan Dukungan Teknis Lainnya Direktorat Jenderal Informasi dan Komunikasi Publik	65.031.903
EKONOMI		**110.968.097**
	Program Pengembangan Informasi dan Komunikasi Publik	**110.968.097**
	Pembinaan dan Pengembangan Kebijakan Komunikasi Nasional	14.964.697
	Pengelolaan dan Penyediaan Informasi	18.612.000
	Pelayanan Informasi Kenegaraan Melalui Media Publik	30.299.000
	Pembinaan dan Pengembangan Kemitraan Lembaga Komunikasi	18.492.400
	Pengembangan Kemitraan, Pelayanan Informasi Internasional	16.320.000
	Pelayanan Informasi dan Pelestarian Benda-Benda Bersejarah di Bidang Pers	6.740.000
	Pelayanan Informasi dan Pelestarian Benda-Benda Bersejarah di Bidang Komunikasi dan Informasi	5.540.000

www.peraturan.go.id

LAMPIRAN III

RINCIAN ANGGARAN BELANJA PEMERINTAH PUSAT PADA BAGIAN ANGGARAN KEMENTERIAN NEGARA/LEMBAGA

K/L : KEPOLISIAN NEGARA REPUBLIK INDONESIA

(dalam ribuan rupiah)

UNIT ORGANISASI	FUNGSI/PROGRAM/KEGIATAN	ALOKASI ANGGARAN
1	2	3
KEPOLISIAN NEGARA REPUBLIK INDONESIA		57.100.356.208
KEPOLISIAN NEGARA REPUBLIK INDONESIA		57.100.356.208
	PELAYANAN UMUM	27.330.966.462
	Program Dukungan Manajemen dan Pelaksanaan Tugas Teknis Lainnya Polri	27.330.966.462
	Pelayanan Administrasi Keuangan Polri	7.886.756
	Penerangan Masyarakat	1.056.710
	Penyelenggaraan Teknologi Informasi	6.086.618
	Pelayanan Kesehatan Polri	663.802.307
	Dukungan Pelayanan Internal Perkantoran Polri	26.652.134.071
	KETERTIBAN DAN KEAMANAN	29.769.389.746
	Program Dukungan Manajemen dan Pelaksanaan Tugas Teknis Lainnya Polri	45.639.933
	Penyusunan Kebijakan Polri	2.368.361
	Penataan Kelembagaan dan Ketatalaksanaan Polri	2.756.174
	Reformasi Birokrasi Polri	8.917.696
	Manajemen Anggaran	7.484.237
	Teknologi Komunikasi	251.980
	Pengelola Informasi dan Dokumentasi	1.055.829
	Penyelenggaraan Kesejarahan, Museum dan Perpustakan Polri	1.408.261
	Perencanaan dan Penganggaran Kewilayahan	21.397.395
	Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur Polri	15.370.340.070
	Pengembangan Peralatan Polri	11.128.574.130
	Dukungan Manajemen dan Teknik Sarpras	2.980.658.922
	Pengkajian dan Strategi Sarpras	477.169.896
	Pengembangan Perbekalan Umum	286.171.366
	Pengembangan Fasilitas dan Kontruksi Polri	25.781.858
	Pengembangan Sarana dan Prasarana Kewilayahan	471.983.898
	Program Pengawasan dan Peningkatan Akuntabilitas Aparatur Polri	369.791.776
	Dukungan Manajemen dan Teknis Pengawasan Umum dan Pemuliaan Profesi dan Pengamanan	300.311.160
	Pertanggungjawaban Profesi	1.763.188
	Penyelenggaraan Pengamanan Internal Polri	2.316.034
	Penegakan Tata tertib dan Disiplin Polri	1.545.398
	Penyelenggaraan Pemeriksaan dan Pengawasan	9.523.845
	Penyelenggaraan Pengawasan dan Akuntabilitas Aparatur Kewilayahan	27.048.459
	Penyelenggaraan Propam Kewilayahan	27.283.692
	Program Penelitian dan Pengembangan Polri	15.063.349
	Dukungan Manajemen Teknis Litbang	7.392.142
	Penyelenggaraan Penelitian dan Pengembangan Polri	7.671.207
	Program Pendidikan dan Latihan Aparatur Polri	1.134.443.117

www.peraturan.go.id

LAMPIRAN III

RINCIAN ANGGARAN BELANJA PEMERINTAH PUSAT PADA BAGIAN ANGGARAN KEMENTERIAN NEGARA/LEMBAGA

K/L : KEPOLISIAN NEGARA REPUBLIK INDONESIA

(dalam ribuan rupiah)

UNIT ORGANISASI	FUNGSI/PROGRAM/KEGIATAN	ALOKASI ANGGARAN
1	2	3
	Dukungan Manajemen dan Teknis Pengembangan Didik Polri	498.392.630
	Sekolah Staf dan Pimpinan Pertama Polri	3.134.680
	Pendidikan Tinggi Ilmu Kepolisian	13.766.705
	Sekolah Staf dan Pimpinan Menengah Polri	5.997.429
	Penyelenggaraan Pendidikan dan Latihan Polri	536.602.623
	Pengadaan Pengembangan Pendidikan dan Latihan Polri	1.536.332
	Pembinaan Pendidikan dan Latihan Polri	6.095.300
	Penyelenggaraan Kurikulum Pendidikan dan Latihan Polri	907.270
	Sekolah Staf dan Pimpinan Tinggi Polri	4.489.600
	Pendidikan AKPOL	69.520.549
	Program Pemberdayaan Sumber Daya Manusia Polri	**364.977.265**
	Dukungan Manajemen dan Teknis Pengembangan SDM Polri	237.147.225
	Pengkajian dan Strategi SDM Polri	2.615.182
	Pengembangan Administrasi Perawatan Pegawai Polri	2.245.164
	Pengendalian Pegawai Polri	118.564.609
	Pembinaan Karier Personel Polri	2.823.665
	Pelayanan Psikologi Anggota Polri	1.571.420
	Program Pengembangan Strategi Keamanan dan Ketertiban	**626.132.640**
	Dukungan Manajemen dan Teknis Strategi Keamanan dan Ketertiban	353.509.491
	Analisis Keamanan	1.354.484
	Penyelenggaraan Strategi Keamanan dan Ketertiban Bidang Politik	5.038.000
	Penyelenggaraan Strategi Keamanan dan Ketertiban Bidang Ekonomi	2.516.124
	Penyelenggaraan Strategi Keamanan dan Ketertiban Bidang Sosial Budaya	2.562.950
	Penyelenggaraan Strategi Keamanan dan Ketertiban Bidang Keamanan Negara	2.720.400
	Strategi Keamanan dan Ketertiban Kewilayahan	258.431.191
	Program Kerjasama Keamanan dan Ketertiban	**113.491.436**
	Kerja Sama Keamanan dan Ketertiban K/L	8.673.223
	Kerja Sama Keamanan dan Ketertiban Luar Negeri	13.918.194
	Dukungan Manajemen dan Teknis Kerja sama dan Ketertiban	60.662.595
	Misi Internasional	30.677.424
	Program Pemberdayaan Potensi Keamanan	**773.778.835**
	Dukungan Manajemen dan Teknis Potensi Keamanan	110.960.789
	Pembinaan Potensi Keamanan	**662.818.046**
	Program Pemeliharaan Keamanan dan Ketertiban Masyarakat	6.634.821.217
	Pembinaan Pemeliharaan Keamanan dan Ketertiban Kewilayahan	1.562.034.926
	Dukungan Manajemen dan Teknis Pemeliharaan Keamanan dan Ketertiban Masyarakat	2.539.635.219
	Pembinaan Pelayanan Fungsi Sabhara	20.092.231
	Penyelenggaraan Pengamanan Objek Vital	10.814.794

www.peraturan.go.id

LAMPIRAN III

RINCIAN ANGGARAN BELANJA PEMERINTAH PUSAT PADA BAGIAN ANGGARAN KEMENTERIAN NEGARA/LEMBAGA

K/L : KEPOLISIAN NEGARA REPUBLIK INDONESIA

(dalam ribuan rupiah)

UNIT ORGANISASI				FUNGSI/PROGRAM/KEGIATAN	ALOKASI ANGGARAN
1				2	3
				Peningkatan Pelayanan Keamanan dan Keselamatan Masyarakat di Bidang Lantas	2.315.216.397
				Penyelenggaraan Kepolisian Perairan	108.223.589
				Penyelenggaraan Kepolisian Udara	66.665.935
				Pembinaan Operasional Pemeliharaan Keamanan	1.026.778
				Penjabaran dan Strategi Operasi Kepolisian	514.976
				Pembinaan Operasi Kepolisian	5.104.450
				Pengendalian Operasi Kepolisian	607.977
				Pelacakan dan Penanggulangan Keamanan dan Ketertiban	4.893.935
				Program Penyelidikan dan Penyidikan Tindak Pidana	1.945.279.741
				Penyelidikan dan Penyidikan Tindak Pidana Kewilayahan	144.074.223
				Dukungan Manajemen dan Teknis Penyelidikan dan Penyidikan Tindak Pidana	883.749.832
				Penyelenggaraan Identifikasi Penyelidikan dan Penyidikan Tindak Pidana	24.088.707
				Penyelenggaraan Laboratrium Forensik	10.938.091
				Penindakan Tindak Pidana Umum	445.016.418
				Penindakan Tindak Pidana Terorisme	97.607.545
				Penindakan Tindak Pidana Narkoba	108.728.890
				Penindakan Tindak Pidana Ekonomi Khusus	20.070.753
				Penindakan Tindak Pidana Korupsi	190.930.725
				Pembinaan Operasional Penyelidikan dan Penyidikan Tindak Pidana	3.388.952
				Penindakan Tindak Pidana Tertentu	12.191.888
				Penyelenggaraan Informasi Kriminal nasional	1.446.810
				Koordinasi dan Pengawasan PPNS	1.681.715
				Pengawasan Penyidikan	1.365.192
				Program Penanggulangan Gangguan Keamanan Dalam Negeri Berkadar Tinggi	2.347.509.554
				Penanggulangan Keamanan dalam Negeri Kewilayahan	27.499.434
				Dukungan Teknis Manajemen Penanggulangan Keamanan dalam Negeri	2.311.164.513
				Penanggulangan Keamanan dalam Negeri	8.845.607
				Program Pengembangan Hukum Kepolisian	27.680.813
				Pemberian Bantuan dan Nasehat Hukum	12.346.584
				Penyusunan dan Penyuluhan Hukum	3.158.757
				Dukungan Manajemen dan Teknis Hukum Kepolisian	12.175.472

www.peraturan.go.id

LAMPIRAN III

RINCIAN ANGGARAN BELANJA PEMERINTAH PUSAT PADA BAGIAN ANGGARAN KEMENTERIAN NEGARA/LEMBAGA

K/L : BADAN PENGAWAS OBAT DAN MAKANAN

(dalam ribuan rupiah)

UNIT ORGANISASI	FUNGSI/PROGRAM/KEGIATAN	ALOKASI ANGGARAN
1	2	3
BADAN PENGAWAS OBAT DAN MAKANAN		
BADAN PENGAWAS OBAT DAN MAKANAN		1.221.594.280
KESEHATAN		1.221.594.280
	Program Dukungan Manajemen dan Pelaksanaan Tugas Teknis Lainnya BPOM	1.221.594.280
	Koordinasi Kegiatan Penyusunan Rancangan Peraturan Peraturan Perundang-undangan Bantuan Hukum Layanan Pengaduan Konsumen dan Hubungan Masyarakat	339.222.142
	Peningkatan Penyelenggaraan Hubungan dan Kerja Sama Luar Negeri Badan POM	9.500.000
	Koordinasi Perumusan Renstra dan Pengembangan Organisasi, Penyusunan Program dan Anggaran, Keuangan serta Evaluasi dan Pelaporan	5.600.000
	Pengembangan Tenaga dan Manajemen Pengawasan Obat dan Makanan	45.700.000
	Pengawasan dan Peningkatan Akuntabilitas Aparatur Badan Pengawas Obat dan Makanan	251.702.432
	Pelayanan Informasi Obat dan Makanan, Informasi Keracunan dan Teknologi Informasi	8.108.208
	Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur BPOM	18.611.502
	Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur Badan POM	28.916.300
	Pengadaan, Pemeliharaan dan Pembinaan Pengelolaan Sarana dan Prasarana Penunjang Aparatur Badan POM	6.000.000
	Program Pengawasan Obat dan Makanan	22.916.300
	Pengawasan Obat dan Makanan di 31 Balai Besar/Balai POM	853.455.838
	Inspeksi dan Sertifikasi Obat Tradisional, Kosmetik dan Produk Komplemen	637.343.335
	Inspeksi dan Sertifikasi Pangan	19.765.000
	Pengembangan Obat Asli Indonesia	16.900.000
	Pengawasan Distribusi Produk Terapetik dan PKRT	4.756.400
	Pengawasan Narkotika, Psikotropika, Prekursor, dan Zat Adiktif	9.800.000
	Pengawasan Produk dan Bahan Berbahaya	11.500.000
	Pengawasan Produksi Produk Terapetik dan Perbekalan Kesehatan Rumah Tangga (PKRT)	6.667.313
	Penilaian Makanan	13.500.000
	Penilaian Obat dan Produk Biologi	10.340.000
	Penilaian Obat Tradisional, Kosmetik dan Produk Komplemen	15.000.000
	Standardisasi Obat Tradisional Kosmetik dan Produk Komplemen	12.850.000
	Standardisasi Makanan	3.342.592
	Standardisasi Produk Terapetik dan PKRT	9.110.000
	Surveilan dan Penyuluhan Keamanan Makanan	6.221.498
	Pemeriksaan Secara Laboratorium, Pengujian dan Penilaian Keamanan, Manfaat dan Mutu Obat dan Makanan serta Pembinaan Laboratorium Pom	14.870.000
	Investigasi Awal dan Penyidikan Terhadap Pelanggaran Bidang Obat dan Makanan	44.234.782
	Riset Keamanan, Khasiat dan Mutu Obat dan Makanan	10.996.606
		6.258.312

www.peraturan.go.id

LAMPIRAN III

RINCIAN ANGGARAN BELANJA PEMERINTAH PUSAT PADA BAGIAN ANGGARAN KEMENTERIAN NEGARA/LEMBAGA

K/L : LEMBAGA KETAHANAN NASIONAL

(dalam ribuan rupiah)

UNIT ORGANISASI	FUNGSI/PROGRAM/KEGIATAN	ALOKASI ANGGARAN
1	2	3
LEMBAGA KETAHANAN NASIONAL		378.938.114
LEMBAGA KETAHANAN NASIONAL RI		378.938.114
PELAYANAN UMUM		355.406.514
	Program Dukungan Manajemen dan Pelaksanaan Tugas Teknis Lainnya Lembhannas	295.760.514
	Pengelolaan Hubungan Masyarakat Lembhannas	7.626.840
	Pengelolaan Hubungan Kerja Sama Lembhannas	2.698.842
	Penyusunan Rencana Kerja, Pembinaan, Pengelolaan Anggaran dan Laporan Keuangan Lembhannas	2.546.280
	Koordinasi dan Pengembangan Sistem Informasi Lembhannas	93.498.602
	Pembinaan Administrasi dan Pengelolaan Pelayanan Penunjang Pelaksanaan Tugas Lembhannas	189.479.950
	Program Pengawasan dan Peningkatan Akuntabilitas Aparatur Lembhannas	**1.421.000**
	Pengawasan dan Pemeriksaan Kinerja Pelaksanaan Tugas Pokok dan Fungsi Kelembagaan Lembhannas	1.421.000
	Program Pengembangan Ketahanan Nasional	58.225.000
	Penyusunan Perencanaan dan Pelaksanaan Pendidikan Tingkat Nasional di Bidang Program Pendidikan	7.990.597
	Penyusunan Perencanaan dan Pelaksanaan Pendidikan Tingkat Nasional di Bidang Materi Pendidikan	3.132.678
	Penyusunan Perencanaan dan Pelaksanaan Pendidikan Tingkat Nasional di Bidang Operasi Pendidikan	24.790.742
	Penyusunan Perencanaan dan Pelaksanaan Pendidikan Tingkat Nasional di Bidang Evaluasi Pendidikan	5.684.993
	Penyusunan Rencana dan Pelaksanaan Pengkajian Strategik di Bidang Politik	3.091.000
	Penyusunan Rencana dan Pelaksanaan Pengkajian Strategik di Bidang Ekonomi	2.841.000
	Penyusunan Rencana dan Pelaksanaan Pengkajian Strategik di Bidang Sosial Budaya	3.751.000
	Penyusunan Rencana dan Pelaksanaan Pengkajian Strategik di Bidang Pertahanan Keamanan	2.541.000
	Penyusunan Rencana dan Pelaksanaan Pengkajian Strategik di Bidang Internasional	4.401.990
PERTAHANAN		23.531.600
	Program Pengembangan Ketahanan Nasional	23.531.600
	Penyusunan Rencana dan Pelaksanaan Penantapan Nilai-Nilai Ideologi dan Kewaspadaan Nasional	2.937.000
	Penyusunan Rencana dan Pelaksanaan Penantapan Nilai-Nilai Konstitusi dan Sistem Nasional	2.946.000
	Penyusunan Rencana dan Pelaksanaan Pemantapan Semangat Bela Negara	2.937.000
	Penyusunan Rencana dan Pelaksanaan Pemantapan Transformasi Nilai-Nilai Universal	2.937.000
	Penyusunan Rencana dan Pelaksanaan Pemantapan Nilai-Nilai Kebangsaan	11.774.600

www.peraturan.go.id

LAMPIRAN III

RINCIAN ANGGARAN BELANJA PEMERINTAH PUSAT PADA BAGIAN ANGGARAN KEMENTERIAN NEGARA/LEMBAGA

K/L : BADAN KOORDINASI PENANAMAN MODAL

(dalam ribuan rupiah)

UNIT ORGANISASI	FUNGSI/PROGRAM/KEGIATAN	ALOKASI ANGGARAN
1	2	3
BADAN KOORDINASI PENANAMAN MODAL		635.922.699
BADAN KOORDINASI PENANAMAN MODAL		635.922.699
	PELAYANAN UMUM	635.922.699
	Program Dukungan Manajemen dan Pelaksanaan Tugas Teknis Lainnya BKPM	211.405.509
	Pengawasan/Pemeriksaan Fungsional Terhadap Pelaksanaan Tugas di Lingkungan BKPM	194.505.799
	Peningkatan Kapasitas Kelembagaan Penanaman Modal	3.950.000
	Pengembangan Sistem Pelayanan Informasi dan Perizinan Investasi Secara Elektronik (SPIPISE)	140.189.116
	Pengelolaan Data dan Informasi Penanaman Modal	20.882.900
	Pengembangan Sumber Daya Manusia	1.883.783
	Peningkatan Pelayanan Hukum Penanaman Modal	13.800.000
	Perencanaan dan Evaluasi Program dan Anggaran BKPM	3.400.000
	Penyempurnaan Produk Hukum Penanaman Modal serta Peningkatan Pelayanan Hubungan Masyarakat, Keprotokolan dan Tata Usaha Pimpinan	3.400.000
	Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur BKPM	7.000.000
	Pembangunan/Pengadaan/Peningkatan Sarana dan Prasarana	7.232.400
	Program Peningkatan Daya Saing Penanaman Modal	7.232.400
	Peningkatan Kualitas Pelayanan Persetujuan Penanaman Modal	9.667.310
	Peningkatan Kualitas Pelayanan Perizinan Penanaman Modal	3.256.310
	Peningkatan Kualitas Pelayanan Fasilitas Penanaman Modal	2.919.000
	EKONOMI	3.492.000
	Program Peningkatan Daya Saing Penanaman Modal	424.517.190
	Peningkatan Deregulasi Kebijakan Penanaman Modal	424.517.190
	Pengembangan Potensi Penanaman Modal Daerah	11.479.500
	Pemberdayaan Usaha Nasional	7.188.900
	Peningkatan Kualitas Strategi Promosi di Bidang Penanaman Modal	8.749.800
	Promosi Penanaman Modal Sektoral Terpadu dan Terintegrasi di dalam dan Luar Negeri	65.141.000
	Fasilitasi Daerah dalam Rangka Kegiatan Promosi Penanaman Modal	176.827.100
	Penyelenggaraan Pameran dan Penyediaan Sarana Promosi Penanaman Modal Untuk Kegiatan di dalam dan Luar Negeri	15.430.500
	Kerja Sama Bilateral dan Multilateral di Bidang Penanaman Modal	26.721.120
	Kerja Sama Regional di Bidang Penanaman Modal	11.925.000
	Kerja Sama Dengan Dunia Usaha Asing di dalam dan di Luar Negeri di Bidang Penanaman Modal	6.645.300
	Pengendalian Pelaksanaan Penanaman Modal Wilayah I	3.290.370
	Pengendalian Pelaksanaan Penanaman Modal Wilayah II	7.355.300
	Pengendalian Pelaksanaan Penanaman Modal Wilayah III	9.793.800
	Pengendalian Pelaksanaan Penanaman Modal Wilayah IV	8.947.900
	Perencanaan Pengembangan Penanaman Modal Sektor Industri Agribisnis dan Sumber Daya Alam Lainnya	30.390.400
	Perencanaan Pengembangan Penanaman Modal Sektor Industri Manufaktur	6.000.000
	Perencanaan Pengembangan Penanaman Modal di Bidang Jasa dan Kawasan	7.000.000
		4.932.193

www.peraturan.go.id

LAMPIRAN III

RINCIAN ANGGARAN BELANJA PEMERINTAH PUSAT PADA BAGIAN ANGGARAN KEMENTERIAN NEGARA/LEMBAGA

K/L : BADAN KOORDINASI PENANAMAN MODAL

(dalam ribuan rupiah)

UNIT ORGANISASI				FUNGSI/PROGRAM/KEGIATAN	ALOKASI ANGGARAN
1				2	3
				Pengembangan Penanaman Modal Kawasan Ekonomi Khusus (KEK)	1.567.807
				Pasilitasi Percepatan Investasi Kerja Sama Pemerintah Swasta	12.016.500
				Pengembangan Pelayanan Terpadu Satu Pintu (PTSP) Nasional	750.000
				Perencanaan Pengembangan Penanaman Modal di Bidang Infrastrukur	2.364.700

www.peraturan.go.id

LAMPIRAN III

RINCIAN ANGGARAN BELANJA PEMERINTAH PUSAT PADA BAGIAN ANGGARAN KEMENTERIAN NEGARA/LEMBAGA

K/L : BADAN NARKOTIKA NASIONAL

(dalam ribuan rupiah)

UNIT ORGANISASI	FUNGSI/PROGRAM/KEGIATAN	ALOKASI ANGGARAN
1	2	3
BADAN NARKOTIKA NASIONAL		**1.403.155.357**
BADAN NARKOTIKA NASIONAL		**1.403.155.357**
PELAYANAN UMUM		**377.169.495**
Program Dukungan Manajemen dan Pelaksanaan Tugas Teknis Lainnya BNN		**377.169.495**
	Pembinaan Administrasi dan Pengelolaan Keuangan	273.897.009
	Pengembangan Organisasi, Tatalaksana, dan Sumber Daya Manusia	8.447.040
	Penyusunan dan Pengembangan Rencana Program dan Anggaran BNN	8.259.991
	Pembinaan dan Pelaksanaan Kehumasan, Tata Usaha, Rumah Tangga, dan Pengelolaan Sarana Prasarana	47.653.297
	Pengawasan dan Pengembangan Akuntabilitas Kinerja	7.166.400
	Penyelenggaran Penelitian, Data, dan Informasi P4GN	12.706.100
	Pembinaan dan Pelayanan Laboratorium Uji Narkoba	6.737.000
	Pembinaan dan Pengelolaan Pendidikan dan Pelatihan	12.302.658
KETERTIBAN DAN KEAMANAN		**1.025.985.862**
Program Pencegahan dan Pemberantasan Penyalahgunaan dan Peredaran Gelap Narkoba (P4GN)		**1.025.985.862**
	Pelaksanaan dan Peningkatan Kapasitas P4GN di Daerah	404.156.746
	Penyelenggaraan Advokasi	8.900.000
	Penyelenggaraan Pemberdayaan Alternatif	6.000.000
	Penyelenggaraan Desiminasi Informasi P4GN	16.516.000
	Penataan Produk Hukum dan Pelayanan Bantuan Hukum	4.500.000
	Pelaksanaan Intelijen Berbasis Teknologi	51.230.533
	Pelaksanaan Interdiksi Wilayah Udara, Laut, Darat dan Lintas Darat	13.500.000
	Penyelenggaraan Kerja Sama dalam dan Luar Negeri	5.445.031
	Penyidikan Jaringan Peredaran Gelap Narkotika Alami	5.500.000
	Penyidikan Jaringan Peredaran Gelap Narkotika Sintetis	5.000.000
	Pascarehabilitasi Penyalah guna dan/atau Pecandu Narkoba	37.691.768
	Pemberdayaan Peran serta Masyarakat	22.999.204
	Pengawasan Tahanan, Barang Bukti, dan Penyidikan dan Pengelolaan Aset	5.109.054
	Penguatan Lembaga Rehabilitasi Instansi Pemerintah	303.935.973
	Penguatan Lembaga Rehabilitasi Komponen Masyarakat	52.555.234
	Pelaksanaan Penindakan dan Pengejaran	7.669.300
	Penyidikan Jaringan Peredaran Gelap Psikotropika dan Prekursor	3.500.000
	Pelaksanaan Rehabilitasi Penyalah guna dan/atau Pecandu Narkoba	71.777.019

www.peraturan.go.id

LAMPIRAN III

RINCIAN ANGGARAN BELANJA PEMERINTAH PUSAT PADA BAGIAN ANGGARAN KEMENTERIAN NEGARA/LEMBAGA

K/L : KEMENTERIAN DESA, PDT DAN TRANSMIGRASI

(dalam ribuan rupiah)

UNIT ORGANISASI	FUNGSI/PROGRAM/KEGIATAN	ALOKASI ANGGARAN
1	2	3
KEMENTERIAN DESA, PDT DAN TRANSMIGRASI		9.027.995.131
SEKRETARIAT JENDERAL KEMENTERIAN DESA, PEMBANGUNAN DAERAH TERTINGGAL dan TRANSMIGRASI		544.092.287
	PELAYANAN UMUM	544.092.287
	Program Dukungan Manajemen dan Pelaksanaan Tugas Teknis Lainnya Kementerian Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi	544.092.287
	Penyelenggaraan Hukum dan Organisasi Tata Laksana	24.793.577
	Penyelenggaraan Humas dan Kerjasama	106.000.000
	Penyelenggaraan Perencanaan	59.228.156
	Penyelenggaraan Pengelolaan Sumber Daya Manusia dan Pelayanan Umum	186.365.419
	Penyelenggaraan Keuangan dan Barang Milik Negara (BMN)	167.705.135
INSPEKTORAT JENDERAL		55.000.000
	PELAYANAN UMUM	55.000.000
	Program Pengawasan dan Peningkatan Akuntabilitas Aparatur Kementerian Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi	55.000.000
	Dukungan Manajemen dan Dukungan Teknis Lainnya Inspektorat Jenderal Kementerian Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi	22.654.266
	Penyelenggaraan Pengawasan dan Akuntabilitas Pembangunan Desa, Daerah Tertinggal dan Transmigrasi Lingkup Kerja Inspektorat I	5.835.004
	Penyelenggaraan Pengawasan dan Akuntabilitas Pembangunan Desa, Daerah Tertinggal dan Transmigrasi Lingkup Kerja Inspektorat II	6.655.004
	Penyelenggaraan Pengawasan dan Akuntabilitas Pembangunan Desa, Daerah Tertinggal dan Transmigrasi Lingkup Kerja Inspektorat III	7.152.004
	Penyelenggaraan Pengawasan dan Akuntabilitas Pembangunan Desa, Daerah Tertinggal dan Transmigrasi Lingkup Kerja Inspektorat IV	6.861.004
	Penyelenggaraan Pengawasan dan Akuntabilitas Pembangunan Desa, Daerah Tertinggal dan Transmigrasi Lingkup Kerja Inspektorat V	5.842.718
DIREKTORAT JENDERAL PEMBANGUNAN dan PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA		2.758.520.001
	PELAYANAN UMUM	2.758.520.001
	Program Pembangunan dan Pemberdayaan Masyarakat Desa	2.758.520.001
	Dukungan Manajemen dan Dukungan Tugas Teknis Lainnya Ditjen Pembangunan dan Pemberdayaan Masyarakat Desa	40.376.055
	Pemberdayaan Masyarakat Desa	1.852.343.946
	Peningkatan Pelayanan Sosial Dasar	600.000.000
	Pembangunan Sarana dan Prasarana Desa	85.000.000
	Peningkatan Pendayagunaan Sumber Daya Alam dan Teknologi Tepat Guna	71.000.000
	Pengembangan Usaha Ekonomi Desa	109.800.000
DIREKTORAT JENDERAL PEMBANGUNAN KAWASAN PERDESAAN		1.302.125.000
	PELAYANAN UMUM	1.302.125.000
	Program Pembangunan Kawasan Perdesaan	1.302.125.000
	Dukungan Manajemen dan Dukungan Teknis Lainnya Ditjen Pembangunan Kawasan Perdesaan	35.000.000
	Penyelenggaraan Perencanaan Pembangunan Kawasan Perdesaan	35.000.000
	Pembangunan Ekonomi Kawasan Perdesaan	536.000.000
	Pengembangan Sarana dan Prasarana Kawasan Perdesaan	470.125.000
	Pengembangan Sumber Daya Alam Kawasan Perdesaan	187.000.000
	Peningkatan Kerjasama dan Pengembangan Kapasitas	39.000.000
DIREKTORAT JENDERAL PENGEMBANGAN DAERAH TERTENTU		1.496.665.000
	PELAYANAN UMUM	1.496.665.000

www.peraturan.go.id

LAMPIRAN III

RINCIAN ANGGARAN BELANJA PEMERINTAH PUSAT PADA BAGIAN ANGGARAN KEMENTERIAN NEGARA/LEMBAGA

K/L : KEMENTERIAN KOORDINATOR BIDANG KEMARITIMAN

(dalam ribuan rupiah)

UNIT ORGANISASI	FUNGSI/PROGRAM/KEGIATAN	ALOKASI ANGGARAN
1	2	3
KEMENTERIAN KOORDINATOR BIDANG KEMARITIMAN		**125.000.000**
	SEKRETARIAT	**67.000.000**
	PELAYANAN UMUM	**67.000.000**
	Program Dukungan Manajemen dan Pelaksanaan Tugas Teknis Lainnya Kemenko Bidang Kemaritiman	**67.000.000**
	Dukungan manajemen dan pelaksanaan tugas teknis lainnya	50.000.000
	Fasilitasi koordinasi dan sinkronisasi penyusunan arah kebijakan bidang kemaritiman	17.000.000
	DEPUTI BIDANG KOORDINASI KEDAULATAN MARITIM	**14.500.000**
	PELAYANAN UMUM	**14.500.000**
	Program Dukungan Manajemen dan Pelaksanaan Tugas Teknis Lainnya Kemenko Bidang Kemaritiman	**1.500.000**
	Fasilitasi koordinasi dan sinkronisasi penyusunan arah kebijakan bidang kemaritiman	1.500.000
	Program Koordinasi Pengembangan Kebijakan Bidang Kemaritiman	**13.000.000**
	Peningkatan koordinasi kebijakan bidang kedaulatan maritim	13.000.000
	DEPUTI BIDANG KOORDINASI SUMBERDAYA ALAM DAN JASA	**14.500.000**
	PELAYANAN UMUM	**14.500.000**
	Program Dukungan Manajemen dan Pelaksanaan Tugas Teknis Lainnya Kemenko Bidang Kemaritiman	**1.500.000**
	Fasilitasi koordinasi dan sinkronisasi penyusunan arah kebijakan bidang sumberdaya alam dan jasa	1.500.000
	Program Koordinasi Pengembangan Kebijakan Bidang Kemaritiman	**13.000.000**
	Peningkatan koordinasi kebijakan bidang sumberdaya alam dan jasa	13.000.000
	DEPUTI BIDANG KOORDINASI INFRASTRUKTUR	**14.500.000**
	PELAYANAN UMUM	**14.500.000**
	Program Dukungan Manajemen dan Pelaksanaan Tugas Teknis Lainnya Kemenko Bidang Kemaritiman	**1.500.000**
	Fasilitasi koordinasi dan sinkronisasi penyusunan arah kebijakan bidang infrastruktur	1.500.000
	Program Koordinasi Pengembangan Kebijakan Bidang Kemaritiman	**13.000.000**
	Peningkatan koordinasi kebijakan bidang infrastruktur	13.000.000
	DEPUTI BIDANG KOORDINASI SUMBERDAYA MANUSIA, IPTEK DAN BUDAYA MARITIM	**14.500.000**
	PELAYANAN UMUM	**14.500.000**
	Program Dukungan Manajemen dan Pelaksanaan Tugas Teknis Lainnya Kemenko Bidang Kemaritiman	**1.500.000**
	Fasilitasi koordinasi dan sinkronisasi penyusunan arah kebijakan bidang SDM, Iptek dan buadaya maritim	1.500.000
	Program Koordinasi Pengembangan Kebijakan Bidang Kemaritiman	**13.000.000**
	Peningkatan koordinasi kebijakan bidang SDM, Iptek dan budaya maritim	13.000.000

PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA,

JOKO WIDODO

www.peraturan.go.id

LAMPIRAN IV

PERATURAN PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA
NOMOR 36 TAHUN 2015

TENTANG
RINCIAN ANGGARAN
PENDAPATAN DAN BELANJA NEGARA
TAHUN ANGGARAN 2015

RINCIAN ANGGARAN BELANJA PEMERINTAH PUSAT PADA BAGIAN ANGGARAN BENDAHARA UMUM NEGARA

www.peraturan.go.id

LAMPIRAN IV

RINCIAN ANGGARAN BELANJA PEMERINTAH PUSAT PADA BAGIAN ANGGARAN BENDAHARA UMUM NEGARA

BAGIAN ANGGARAN (BA) : 999
KEMENTERIAN/LEMBAGA : BENDAHARA UMUM NEGARA

(dalam ribuan rupiah)

UNIT ORGANISASI	FUNGSI	PROGRAM	KEGIATAN	ALOKASI ANGGARAN
999.01 BA BUN PENGELOLAAN UTANG PEMERINTAH				**155.730.658**
	01 PELAYANAN UMUM			**155.730.658**
		999.01.06 Program Pengelolaan Utang Negara		**155.730.658**
			4061 Pengelolaan dan Penyusunan Laporan Utang	155.730.658
			Pembayaran Bunga Utang	155.730.658
			1. Dalam Negeri	141.203.758
			2. Luar Negeri	14.526.900
			a. Pembayaran bunga pinjaman luar negeri	14.326.900
			b. Transaksi lindung nilai (*hedging*)	200.000
999.02 BA BUN PENGELOLAAN HIBAH				**4.644.428**
	01 PELAYANAN UMUM			**4.644.428**
		999.02.07 Program Pengelolaan Hibah Negara		**4.644.428**
			4062 Pengelolaan dan Penyusunan Laporan Hibah	4.644.428
			A. Hibah kepada Pemerintah Daerah	4.621.727
			I. Pinjaman Luar Negeri Yang Diterushibahkan	2.759.848
			1. *Mass Rapid Transit (MRT) Project*	2.583.030
			2. *Water Resources and Irrigation Sector Management Project-Phase II (WISMP-2)*	176.818
			II. Hibah Luar Negeri Yang Diterushibahkan	1.361.879
			1. Hibah Air Minum	411.520
			2. Hibah Air Limbah	41.975
			3. *Development of Seulawah Agam*	54.571
			4. Hibah Australia- Indonesia untuk Pembangunan Sanitasi	334.640
			5. *Provincial Road Improvement and Maintenance (PRIM)*	284.600
			6. Hibah *Microfinance Innovation Fund*	97.073
			7. Peningkatan Kapasitas Penerapan Standar Pelayanan Minimal (PKP-SPM) Pendidikan Dasar	137.500
			III. Penerimaan Dalam Negeri Yang Dihibahkan	500.000
			1. *Nationwide Water Hibah Program*	500.000
			B. Hibah kepada Pemerintah Asing/Lembaga Asing	22.501
			1. Hibah Pembangunan Masjid di Ahmad Shah Baba Mina, Kabul Afganistan	5.000
			2. Hibah Pembangunan Masjid di Queensland, Australia	5.000
			3. Hibah kepada Pemerintah Palau	12.501
			C. Belanja Terkait Pendapatan Hibah	200
			1. Belanja Terkait Pendapatan Hibah *(Banking Commission)*	200
999.07 BA BUN PENGELOLAAN BELANJA SUBSIDI				**212.104.385**
	01 PELAYANAN UMUM			**212.104.385**
		999.07.11 Program Pengelolaan Subsidi		**212.104.385**
			4069 Pengelolaan dan Penyusunan Laporan Subsidi	212.104.385
			A. ENERGI	137.824.036
			1. Subsidi BBM, LGV dan LPG 3 Kg	64.674.799
			a. Subsidi TA Berjalan	44.407.799
			b. Kekurangan Pembayaran TA sebelumnya	33.022.074
			c. *Carry over* ke TA berikutnya	(12.755.074)
			2. Subsidi Listrik	73.149.237
			a. Subsidi TA Berjalan	66.149.237
			b. Kekurangan Pembayaran TA sebelumnya	7.000.000
			B. NON ENERGI	74.280.349
			1. Subsidi Pangan	18.939.930
			2. Subsidi Pupuk	39.475.696
			a. Subsidi Harga	28.565.960
			b. Kekurangan Pembayaran Tahun 2013	7.272.608
			c. Kekurangan Pembayaran Tahun 2012	3.637.128
			3. Subsidi Benih	939.413
			4. PSO	3.261.270
			a. PT KAI	1.523.757
			b. PT Pelni	1.607.195
			c. Perum LKBN Antara	130.318

www.peraturan.go.id

LAMPIRAN IV

RINCIAN ANGGARAN BELANJA PEMERINTAH PUSAT PADA BAGIAN ANGGARAN BENDAHARA UMUM NEGARA

BAGIAN ANGGARAN (BA) : 999
KEMENTERIAN/LEMBAGA : BENDAHARA UMUM NEGARA

(dalam ribuan rupiah)

UNIT ORGANISASI	FUNGSI	PROGRAM	KEGIATAN	ALOKASI ANGGARAN
			5. Subsidi Bunga Kredit Program	2.484.041
			a. Kredit Likuiditas BI (eks Pola KLBI)	2.997
			b. Kredit Ketahanan Pangan dan Energi (KKPE)	275.311
			c. Risk Sharing KKP-E	348
			d. Kredit Pengembangan Energi Nabati dan Revitalisasi Perkebunan (KPENRP)	115.639
			e. Kredit Pemberdayaan Pengusaha NAD dan Nias	147
			f. Imbal Jasa Penjaminan KUR	2.043.782
			g. Kredit Usaha Pembibitan Sapi (KUPS)	32.454
			h. Skema Subsidi Resi Gudang	1.027
			i. Subsidi Bunga Untuk Air Bersih	12.336
			6. Subsidi Pajak	9.180.000
			a. Subsidi Pajak Penghasilan	8.180.000
			1) PPH atas Komoditas Panas Bumi	2.190.000
			2) PPH atas bunga, imbal hasil dan penghasilan pihak ketiga atas jasa yang diberikan kepada Pemerintah dalam penerbitan dan/atau pembelian kembali/penukaran SBN di pasar internasional (tidak termasuk jasa konsultan hukum lokal)	5.990.000
			b. Fasilitas Bea Masuk	1.000.000
999.08 BA BUN PENGELOLAAN BELANJA LAINNYA				**50.147.592**
	01 PELAYANAN UMUM			**50.147.592**
		999.08.12 Program Pengelolaan Belanja Lainnya		**50.147.592**
			4070 Pengelolaan dan Penyusunan Laporan Anggaran Lainnya	50.147.592
			A. Belanja Pegawai	14.501.127
			1. Gaji dan Tunjangan	471.675
			Cadangan Anggaran Gaji untuk Tambahan Pegawai Baru	471.675
			2. Honorarium, Vakasi, dan Lain-Lain	14.029.452
			Honorarium Tunjangan Khusus dan Pegawai Transito	14.029.452
			B. Belanja Bantuan Sosial	4.000.000
			1. Dana Cadangan Bencana Alam	4.000.000
			a. Dana *On Call*	2.500.000
			b. Dana Cadangan Penanggulangan Bencana	1.500.000
			C. Belanja Lain-Lain	31.646.465
			1. Cadangan Risiko	9.633.717
			a. Cadangan Risiko Fiskal	5.393.717
			b. Cadangan Stabilisasi Harga Pangan dan Ketahanan Pangan	2.000.000
			c. Cadangan Risiko Kenaikan Harga Tanah (*Land Capping*)	2.240.000
			2. Operasional Lembaga yang Belum Mempunyai BA	172.600
			a. Kawasan Bintan dan Karimun	72.600
			b. Kawasan Otorita Asahan	100.000
			3. Ongkos Angkut Beras PNS di Distrik Pedalaman Papua	98.300
			a. Provinsi Papua	87.180
			b. Provinsi Papua Barat	11.121
			4. Cadangan Beras Pemerintah	1.500.000
			5. Cadangan Benih Nasional	44.000
			6. Cadangan Keperluan Mendesak	4.052.428
			7. Cadangan Selisih Kurs	500.000
			8. Cadangan Dana Dukungan Kelayakan / *Viability Gap Fund*	1.000.000
			9. Bantuan Operasional Layanan Pos Universal	338.500
			10. Cadangan Bahan Bakar Minyak dan Pelumas (BMP) Kemenhan	4.500.000
			11. Cadangan Kepesertaan PBI JKN	1.384.626
			12. Dana untuk Kegiatan Operasional OJK	1.745.300
			13. Dana Operasional Kegiatan SKK Migas	1.900.000
			14. Cadangan *Reward* Kementerian/Lembaga	62.843
			15. Kekurangan Pembayaran *Outstanding* Biaya Konversi Minyak ke LPG Tahun 2007 - 2012	2.714.150
			16. Cadangan untuk Perubahan Nomenklatur Kementerian/Lembaga	500.000
			17. Cadangan Badan Ekonomi Kreatif	1.500.000

www.peraturan.go.id

LAMPIRAN IV

RINCIAN ANGGARAN BELANJA PEMERINTAH PUSAT PADA BAGIAN ANGGARAN BENDAHARA UMUM NEGARA

BAGIAN ANGGARAN (BA) : 999
KEMENTERIAN/LEMBAGA : BENDAHARA UMUM NEGARA

(dalam ribuan rupiah)

UNIT ORGANISASI	FUNGSI	PROGRAM	KEGIATAN	ALOKASI ANGGARAN
999.99 BA BUN PENGELOLAAN TRANSAKSI KHUSUS				**101.441.510**
	01 PELAYANAN UMUM			**101.441.510**
		999.99.13 Program Pengelolaan Transaksi Khusus		**101.441.510**
			4071 Pengelolaan dan Penyusunan Laporan Transaksi Khusus	101.441.510
			A. Belanja Pegawai	101.112.217
			1. Kontribusi Sosial	101.112.217
			a. Anggaran Manfaat Pensiun (PT TASPEN)	80.666.847
			b. Anggaran Manfaat Pensiun (PT ASABRI)	11.238.436
			c. Jaminan Pelayanan Kesehatan	5.304.290
			d. Cicilan UPSL Program THT (PT TASPEN)	3.000.000
			e. Cicilan UPSL Program THT (PT ASABRI)	375.000
			f. Jamkesmen	56.775
			g. Jamkestama	56.775
			h. IWP Program Jaminan Kecelakaan Kerja	183.330
			i. IWP Program Jaminan Kematian	230.765
			B. Belanja Barang	311.866
			1. *Trust Fund* dan Kontribusi ke Lembaga Internasional	57.728
			a. USAID *Trust Fund*	15.000
			b. *Islamic Solidarity Fund for Development (ISFD)*	32.500
			c. *OPEC Fund for International Development (OFID)*	2.470
			d. *ASEAN +3 Macroeconomic and Research Office (AMRO)*	6.046
			e. *Organization for Economic Cooperation and Development (OECD) BEPS Project*	833
			f. *OECD Global Forum on Transparency and Exchange of Information for Tax Purposes (GFTEI)*	488
			g. *ASEAN Mineral Trust Fund (AMTF)*	390
			2. Dana Dukungan Kelayakan / *Viability Gap Fund* (VGF)	151.839
			a. SPAM Umbulan	14.457
			b. SPAM Lampung	137.382
			3. Penugasan PT SMI atas Fasilitasi Penyiapan Proyek KPS Kereta Api Bandara Soekarno Hatta - Manggarai dan Proyek KPS SPAM Umbulan	102.299
			C. Belanja Lain-lain	17.428
			Pembayaran Selisih Harga Beras Bulog	17.428

***)** Tidak terdapat dalam Pagu APBN 2014.

****)** Pagu DIPA Penerusan Pinjaman TA 2014 sebesar Rp3.480.286.290.000,00, karena terdapat tambahan berupa lanjutan penerusan pinjaman TA 2013 sebesar Rp2.254.008.360.000,00.

PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA,

JOKO WIDODO

www.peraturan.go.id

LAMPIRAN V

PERATURAN PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA
NOMOR 36 TAHUN 2015

TENTANG
RINCIAN ANGGARAN
PENDAPATAN DAN BELANJA NEGARA
TAHUN ANGGARAN 2015

RINCIAN ANGGARAN TRANSFER KE DAERAH DAN DANA DESA

www.peraturan.go.id

LAMPIRAN V
RINCIAN ANGGARAN TRANSFER KE DAERAH DAN DANA DESA

(dalam ribuan rupiah)

URAIAN	JUMLAH
Transfer Ke Daerah	**643.834.541.175**
I. Dana Perimbangan	**521.760.517.233**
A. Dana Bagi Hasil	**110.051.993.705**
1. Pajak	54.216.608.259
a. Pajak Penghasilan (PPh)	26.412.669.178
i. Pasal 21	25.369.653.292
ii. Pasal 25/29 Orang Pribadi	1.043.015.886
b. Pajak Bumi dan Bangunan (PBB)	25.021.583.931
c. Cukai Hasil Tembakau (CHT)	2.782.355.150
2. Sumber Daya Alam	55.835.385.446
- Alokasi Anggaran Tahun Berjalan	43.890.351.755
a. Minyak Bumi dan Gas Bumi	15.578.686.900
i. Minyak Bumi	9.545.521.550
ii. Gas Bumi	6.033.165.350
b. Pertambangan Umum	25.342.780.800
i. Iuran Tetap	1.657.460.800
ii. Royalti	23.685.320.000
c. Kehutanan	2.038.904.648
i. Provisi Sumber Daya Hutan (PSDH)	857.240.000
ii. Iuran Izin Usaha Pemanfaatan Hutan	129.600.000
iii. Dana Reboisasi	1.052.064.648
iv. Kurang Bayar SDA Kehutanan	-
d. Perikanan	463.036.840
e. Pertambangan Panas Bumi (PPB)	466.942.567
- Alokasi Kurang Bayar	11.945.033.691
a. Minyak Bumi dan Gas Bumi	8.971.661.074
i. Kurang Bayar Minyak Bumi	4.367.227.055
ii. Kurang Bayar Gas Bumi	4.604.434.019
b. Pertambangan Umum	2.353.489.947
i. Kurang Bayar Iuran Tetap	95.758.881
ii. Kurang Bayar Royalti	2.257.731.066
c. Kehutanan	337.206.717
i. Kurang Bayar PSDH	116.158.487
ii. Kurang Bayar IIUPH	52.345.334
iii. Kurang Bayar Dana Reboisasi	168.702.896
d. Perikanan	31.161.370
e. Pengusahaan Panas Bumi	251.514.583
B. Dana Alokasi Umum	**352.887.848.528**
C. Dana Alokasi Khusus	**58.820.675.000**
1. Dana Alokasi Khusus	33.000.000.000
a. Bidang Pendidikan	10.041.300.000
i. Pendidikan Sekolah Dasar	3.514.455.000
ii. Pendidikan Sekolah Menengah Pertama	2.510.325.000
iii. Pendidikan Sekolah Menengah Atas	1.606.608.000
iv. Pendidikan Sekolah Menengah Kejuruan	2.409.912.000
b. Bidang Kesehatan	3.356.240.000
i. Pelayanan Kesehatan Dasar	1.603.519.000
ii. Pelayanan Kesehatan Rujukan	977.611.000
iii. Farmasi	775.110.000
c. Bidang Infrastruktur Irigasi	1.881.840.000
d. Bidang Infrastruktur Air Minum dan Sanitasi	1.941.340.000
i. Infrastruktur Air Minum	1.067.737.000
ii. Infrastruktur Sanitasi	873.603.000
e. Bidang Prasarana Pemerintahan Daerah	641.100.000
i. Prasarana Pemerintahan Daerah	360.100.000
ii. Sarpras Pemadam Kebakaran	155.000.000
iii. Sarpras Satuan Polisi Pamong Praja	126.000.000
f. Bidang Kelautan dan Perikanan	1.958.000.000
g. Bidang Pertanian	2.673.200.000
h. Bidang Lingkungan Hidup	639.900.000
i. Bidang Keluarga Berencana	569.300.000
j. Bidang Kehutanan	664.400.000
k. Bidang Perdagangan	819.900.000
i. Pasar	690.000.000
ii. Gudang	36.000.000
iii. Metrologi	93.900.000
l. Bidang Energi Perdesaan	693.640.000
m. Bidang Perumahan dan Permukiman	250.000.000
n. Bidang Transportasi	6.869.840.000
i. Infrastruktur Jalan	6.268.483.800
ii. Transportasi Perdesaan	346.541.000

www.peraturan.go.id

LAMPIRAN V
RINCIAN ANGGARAN TRANSFER KE DAERAH DAN DANA DESA

(dalam ribuan rupiah)

URAIAN	JUMLAH
iii. Keselamatan Transportasi Darat	254.815.200
2. Dana Alokasi Khusus Tambahan :	25.820.675.000
a. DAK Affirmasi Kepada Kabupaten/Kota Daerah Tertinggal dan Perbatasan yang Memiliki Kemampuan Keuangan Relatif Rendah	2.820.675.000
i. Bidang Infrastruktur Irigasi	496.405.000
ii. Bidang Infrastruktur Air Minum dan Sanitasi	512.099.000
1). Infrastruktur Air Minum	281.655.000
2). Infrastruktur Sanitasi	230.444.000
iii. Bidang Transportasi	1.812.171.000
1). Infrastruktur Jalan	564.401.000
2). Transportasi Perdesaan	1.247.770.000
b. DAK Pendukung Program Prioritas Kabinet Kerja (P3K2) dan DAK Usulan Pemerintah Daerah yang Disetujui DPR	23.000.000.000
i. Bidang Kesehatan	2.827.139.364
ii. Bidang Infrastruktur Irigasi	3.126.596.993
iii. Bidang Pertanian	4.000.000.000
iv. Bidang Perdagangan	892.410.300
1). Pasar	892.410.300
v. Bidang Transportasi	12.153.853.344
1). Infrastruktur Jalan	12.153.853.344
II. Dana Otonomi Khusus	**17.115.513.942**
A. Dana Otsus	14.115.513.942
1. Dana Otsus Prov. Papua dan Prov. Papua Barat	7.057.756.971
a. Provinsi Papua	4.940.429.880
b. Provinsi Papua Barat	2.117.327.091
2. Dana Otsus Provinsi Aceh	7.057.756.971
B. Dana tambahan Otsus Infrastruktur	3.000.000.000
1. Provinsi Papua	2.250.000.000
2. Provinsi Papua Barat	750.000.000
III. Dana Keistimewaan D.I. Yogyakarta	**547.450.000**
A. Urusan Kebudayaan	420.800.000
B. Urusan Pertanahan	10.600.000
C. Urusan Kelembagaan Pemerintah DIY	1.650.000
D. Urusan Tata Ruang	114.400.000
IV. Dana Transfer Lainnya	**104.411.060.000**
A. Tunjangan Profesi Guru PNSD	70.252.670.000
1. Tunjangan Profesi Guru PNSD	66.461.782.768
2. Dana Cadangan Tunjangan Profesi Guru PNSD	3.790.887.232
B. Dana Tambahan Penghasilan Guru PNSD	1.096.000.000
1. Dana Tambahan Penghasilan Guru PNSD	802.319.500
2. Dana Cadangan Tambahan Penghasilan Guru PNSD	293.680.500
C. Bantuan Operasional Sekolah (BOS)	31.298.300.000
1. BOS	31.093.357.000
2. Dana Cadangan BOS	204.943.000
D. Dana Insentif Daerah	1.664.510.000
E. Dana Proyek pemerintah Daerah dan Desentralisasi	99.580.000
Dana Desa	**20.766.200.000**
TOTAL	**664.600.741.175**

PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA,

ttd.

JOKO WIDODO

www.peraturan.go.id

LAMPIRAN VI

PERATURAN PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA NOMOR 36 TAHUN 2015

TENTANG RINCIAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA NEGARA TAHUN ANGGARAN 2015

RINCIAN DANA BAGI HASIL PAJAK PENGHASILAN PASAL 25, DAN PASAL 29 WAJIB PAJAK ORANG PRIBADI DALAM NEGERI DAN PAJAK PENGHASILAN PASAL 21 MENURUT PROVINSI/KABUPATEN/KOTA

www.peraturan.go.id

LAMPIRAN VI
RINCIAN DANA BAGI HASIL PAJAK PENGHASILAN
PASAL 25 DAN PASAL 29 WAJIB PAJAK ORANG PRIBADI DALAM NEGERI
DAN PAJAK PENGHASILAN PASAL 21
MENURUT PROVINSI/KABUPATEN/KOTA

(dalam ribuan rupiah)

NO	DAERAH	PPh WPOPDN	PPh Pasal 21	Jumlah
I	**Provinsi Aceh**	**738.549**	**93.621.432**	**94.359.981**
1	Kab. Aceh Barat	73.071	6.271.171	6.344.242
2	Kab. Aceh Besar	22.613	9.044.233	9.066.845
3	Kab. Aceh Selatan	22.192	5.098.711	5.120.903
4	Kab. Aceh Singkil	18.009	3.425.250	3.443.259
5	Kab. Aceh Tengah	45.007	4.993.873	5.038.880
6	Kab. Aceh Tenggara	20.611	3.811.659	3.832.271
7	Kab. Aceh Timur	15.481	3.205.020	3.220.501
8	Kab. Aceh Utara	19.170	7.412.574	7.431.745
9	Kab. Bireuen	39.293	6.911.986	6.951.278
10	Kab. Pidie	23.865	6.440.158	6.464.023
11	Kab. Simeulue	17.386	3.072.593	3.089.978
12	Kota Banda Aceh	445.719	24.959.419	25.405.137
13	Kota Sabang	21.797	3.328.739	3.350.536
14	Kota Langsa	34.797	8.146.902	8.181.699
15	Kota Lhokseumawe	71.538	15.085.134	15.156.672
16	Kab. Nagan Raya	20.184	4.390.170	4.410.355
17	Kab. Aceh Jaya	19.465	2.988.776	3.008.241
18	Kab. Aceh Barat Daya	25.968	3.207.439	3.233.407
19	Kab. Gayo Lues	15.156	2.766.468	2.781.624
20	Kab. Aceh Tamiang	64.579	5.739.383	5.803.962
21	Kab. Bener Meriah	22.387	3.335.458	3.357.844
22	Kota Subulussalam	23.659	3.038.318	3.061.977
23	Kab. Pidie Jaya	25.876	3.758.716	3.784.592
II	**Provinsi Sumatera Utara**	**17.580.635**	**276.212.748**	**293.793.382**
1	Kab. Asahan	610.803	10.901.737	11.512.540
2	Kab. Dairi	248.832	6.240.046	6.488.878
3	Kab. Deli Serdang	1.002.911	19.936.693	20.939.604
4	Kab. Tanah Karo	335.982	7.170.248	7.506.230
5	Kab. Labuhan Batu	550.038	11.281.899	11.831.937
6	Kab. Langkat	378.364	12.925.622	13.303.986
7	Kab. Mandailing Natal	256.518	7.551.527	7.808.046
8	Kab. Nias	240.959	4.959.592	5.200.551
9	Kab. Simalungun	522.978	14.812.227	15.335.205
10	Kab. Tapanuli Selatan	267.608	11.119.904	11.387.512
11	Kab. Tapanuli Tengah	267.382	6.524.428	6.791.811
12	Kab. Tapanuli Utara	253.490	5.949.725	6.203.215
13	Kab. Toba Samosir	251.125	7.517.542	7.768.666
14	Kota Binjai	575.932	6.950.832	7.526.763
15	Kota Medan	13.366.002	156.566.772	169.932.774
16	Kota Pematang Siantar	1.004.009	16.771.734	17.775.743
17	Kota Sibolga	547.032	7.215.497	7.762.529
18	Kota Tanjung Balai	495.775	5.537.597	6.033.372
19	Kota Tebing Tinggi	906.484	6.943.152	7.849.636
20	Kota Padang Sidempuan	360.959	9.893.755	10.254.714
21	Kab. Pakpak Bharat	239.944	4.225.152	4.465.096
22	Kab. Nias Selatan	250.234	4.643.157	4.893.391
23	Kab. Humbang Hasundutan	243.772	4.951.390	5.195.162
24	Kab. Serdang Berdagai	456.546	9.860.454	10.317.000
25	Kab. Samosir	241.930	4.917.944	5.159.874
26	Kab. Batu Bara	366.690	10.342.030	10.708.720

www.peraturan.go.id

LAMPIRAN VI
RINCIAN DANA BAGI HASIL PAJAK PENGHASILAN
PASAL 25 DAN PASAL 29 WAJIB PAJAK ORANG PRIBADI DALAM NEGERI
DAN PAJAK PENGHASILAN PASAL 21
MENURUT PROVINSI/KABUPATEN/KOTA

(dalam ribuan rupiah)

NO	DAERAH	PPh WPOPDN	PPh Pasal 21	Jumlah
27	Kab. Padang Lawas Utara	241.284	5.223.658	5.464.942
28	Kab. Padang Lawas	245.350	5.052.420	5.297.770
29	Kab. Labuhan Batu Selatan	316.357	7.753.240	8.069.598
30	Kab. Labuhan Batu Utara	372.223	6.390.483	6.762.706
31	Kab. Nias Utara	241.762	4.510.130	4.751.893
32	Kab. Nias Barat	240.190	4.358.086	4.598.276
33	Kota Gunungsitoli	471.485	5.320.446	5.791.932
III	**Provinsi Sumatera Barat**	**2.089.747**	**99.484.956**	**101.574.703**
1	Kab. Limapuluh Kota	63.119	5.324.509	5.387.627
2	Kab. Agam	88.452	7.441.423	7.529.874
3	Kab. Kepulauan Mentawai	51.042	3.182.765	3.233.807
4	Kab. Padang Pariaman	63.639	4.002.100	4.065.740
5	Kab. Pasaman	52.022	4.739.745	4.791.766
6	Kab. Pesisir Selatan	52.611	5.848.906	5.901.517
7	Kab. Sijunjung	61.134	4.424.300	4.485.434
8	Kab. Solok	58.394	5.740.134	5.798.529
9	Kab. Tanah Datar	91.566	6.317.003	6.408.568
10	Kota Bukit Tinggi	185.939	8.361.352	8.547.291
11	Kota Padang Panjang	60.714	3.767.334	3.828.048
12	Kota Padang	1.794.690	53.739.833	55.534.523
13	Kota Payakumbuh	129.622	5.047.360	5.176.982
14	Kota Sawahlunto	59.517	4.260.580	4.320.098
15	Kota Solok	91.716	4.713.370	4.805.086
16	Kota Pariaman	52.000	7.245.458	7.297.458
17	Kab. Pasaman Barat	68.598	6.196.741	6.265.339
18	Kab. Dharmasraya	55.599	4.724.112	4.779.711
19	Kab. Solok Selatan	54.248	4.150.408	4.204.656
IV	**Provinsi Riau**	**5.104.093**	**257.468.212**	**262.572.305**
1	Kab. Bengkalis	503.069	78.977.667	79.480.736
2	Kab. Indragiri Hilir	307.705	18.763.500	19.071.205
3	Kab. Indragiri Hulu	404.539	16.919.105	17.323.644
4	Kab. Kampar	228.589	18.154.455	18.383.044
5	Kab. Kuantan Singingi	855.214	14.161.956	15.017.171
6	Kab. Pelalawan	223.720	21.172.609	21.396.329
7	Kab. Rokan Hilir	233.347	17.102.901	17.336.248
8	Kab. Rokan Hulu	212.017	14.135.445	14.347.462
9	Kab. Siak	240.881	38.855.285	39.096.167
10	Kota Dumai	435.640	32.529.164	32.964.804
11	Kota Pekanbaru	3.728.389	102.126.295	105.854.684
12	Kab. Kepulauan Meranti	283.029	13.303.935	13.586.964
V	**Provinsi Kepulauan Riau**	**3.714.237**	**139.010.667**	**142.724.905**
1	Kab. Bintan	372.112	15.646.130	16.018.242
2	Kab. Natuna	240.245	10.389.036	10.629.281
3	Kab. Karimun	486.024	21.185.916	21.671.940
4	Kota Batam	3.277.435	117.321.429	120.598.864
5	Kota Tanjung Pinang	690.641	17.204.356	17.894.997
6	Kab. Lingga	261.662	9.771.781	10.033.443
7	Kab. Kepulauan Anambas	243.237	16.997.352	17.240.590
VI	**Provinsi Jambi**	**2.140.794**	**54.526.076**	**56.666.870**
1	Kab. Batanghari	111.905	4.174.702	4.286.607
2	Kab. Bungo	359.057	7.783.961	8.143.018

www.peraturan.go.id

LAMPIRAN VI
RINCIAN DANA BAGI HASIL PAJAK PENGHASILAN
PASAL 25 DAN PASAL 29 WAJIB PAJAK ORANG PRIBADI DALAM NEGERI
DAN PAJAK PENGHASILAN PASAL 21
MENURUT PROVINSI/KABUPATEN/KOTA

(dalam ribuan rupiah)

NO	DAERAH	PPh WPOPDN	PPh Pasal 21	Jumlah
3	Kab. Kerinci	89.914	2.484.818	2.574.731
4	Kab. Merangin	147.393	5.655.202	5.802.594
5	Kab. Muaro Jambi	155.025	5.933.088	6.088.113
6	Kab. Sarolangun	92.841	4.788.926	4.881.767
7	Kab. Tanjung Jabung Barat	220.787	6.891.616	7.112.403
8	Kab. Tanjung Jabung Timur	97.407	6.730.341	6.827.748
9	Kab. Tebo	113.145	4.398.947	4.512.091
10	Kota Jambi	1.726.753	26.806.877	28.533.630
11	Kota Sungai Penuh	96.965	6.140.638	6.237.603
VII	**Provinsi Sumatera Selatan**	**4.037.304**	**171.774.006**	**175.811.310**
1	Kab. Lahat	205.643	10.873.651	11.079.294
2	Kab. Musi Banyuasin	142.774	21.766.834	21.909.608
3	Kab. Musi Rawas	118.610	7.300.559	7.419.169
4	Kab. Muara Enim	519.509	28.164.241	28.683.750
5	Kab. Ogan Komering Ilir	333.311	10.091.997	10.425.308
6	Kab. Ogan Komering Ulu	210.364	9.520.748	9.731.112
7	Kota Palembang	2.746.958	93.360.740	96.107.698
8	Kota Pagar Alam	106.870	5.662.368	5.769.238
9	Kota Lubuk Linggau	433.863	9.416.497	9.850.359
10	Kota Prabumulih	212.228	13.676.920	13.889.148
11	Kab. Banyuasin	137.455	9.690.558	9.828.013
12	Kab. Ogan Ilir	325.268	7.188.364	7.513.632
13	Kab. OKU Timur	111.724	7.289.333	7.401.057
14	Kab. OKU Selatan	116.881	5.701.871	5.818.752
15	Kab. Empat Lawang	106.870	5.335.240	5.442.110
16	Kab. Penukal Abab Lematang Ilir	119.087	7.340.233	7.459.320
17	Kab. Musi Rawas Utara	108.542	5.280.855	5.389.397
VIII	**Provinsi Bangka Belitung**	**1.021.334**	**25.838.010**	**26.859.343**
1	Kab. Bangka	193.942	5.512.270	5.706.213
2	Kab. Belitung	239.844	4.421.607	4.661.452
3	Kota Pangkal Pinang	554.621	12.376.470	12.931.091
4	Kab. Bangka Selatan	83.842	2.795.584	2.879.425
5	Kab. Bangka Tengah	144.040	3.782.468	3.926.508
6	Kab. Bangka Barat	107.536	5.948.935	6.056.471
7	Kab. Belitung Timur	208.174	3.919.681	4.127.855
IX	**Provinsi Bengkulu**	**335.377**	**28.373.999**	**28.709.376**
1	Kab. Bengkulu Selatan	17.858	3.173.231	3.191.089
2	Kab. Bengkulu Utara	23.319	4.998.021	5.021.340
3	Kab. Rejang Lebong	80.509	3.603.171	3.683.680
4	Kota Bengkulu	255.486	15.155.154	15.410.640
5	Kab. Kaur	15.903	2.007.866	2.023.769
6	Kab. Seluma	24.492	2.744.122	2.768.613
7	Kab. Mukomuko	29.566	3.234.843	3.264.410
8	Kab. Lebong	18.661	2.386.788	2.405.450
9	Kab. Kepahiang	19.601	2.446.332	2.465.933
10	Kab. Bengkulu Tengah	17.669	2.811.471	2.829.140
X	**Provinsi Lampung**	**2.386.829**	**93.789.232**	**96.176.060**
1	Kab. Lampung Barat	73.601	4.390.913	4.464.514
2	Kab. Lampung Selatan	157.401	12.527.494	12.684.895
3	Kab. Lampung Tengah	135.029	13.293.516	13.428.546
4	Kab. Lampung Utara	97.970	8.741.916	8.839.886

www.peraturan.go.id

LAMPIRAN VI
RINCIAN DANA BAGI HASIL PAJAK PENGHASILAN
PASAL 25 DAN PASAL 29 WAJIB PAJAK ORANG PRIBADI DALAM NEGERI
DAN PAJAK PENGHASILAN PASAL 21
MENURUT PROVINSI/KABUPATEN/KOTA

(dalam ribuan rupiah)

NO	DAERAH	PPh WPOPDN	PPh Pasal 21	Jumlah
5	Kab. Lampung Timur	392.131	7.572.605	7.964.737
6	Kab. Tanggamus	106.359	7.141.328	7.247.688
7	Kab. Tulang Bawang	128.016	11.007.737	11.135.753
8	Kab. Way Kanan	72.270	5.309.447	5.381.717
9	Kota Bandar Lampung	1.736.171	39.312.651	41.048.822
10	Kota Metro	266.545	7.308.081	7.574.626
11	Kab. Pesawaran	76.115	5.988.244	6.064.359
12	Kab. Pringsewu	121.897	6.250.299	6.372.196
13	Kab. Mesuji	71.666	4.075.651	4.147.317
14	Kab. Tulang Bawang Barat	73.439	4.480.230	4.553.669
15	Kab. Pesisir Barat	71.635	3.283.733	3.355.368
XI	**Provinsi DKI Jakarta**	**528.640.301**	**11.951.651.261**	**12.480.291.562**
XII	**Provinsi Jawa Barat**	**41.356.167**	**1.019.681.587**	**1.061.037.754**
1	Kab. Bandung	2.518.163	49.803.229	52.321.392
2	Kab. Bekasi	5.477.592	262.585.630	268.063.222
3	Kab. Bogor	2.035.758	115.352.113	117.387.870
4	Kab. Ciamis	868.332	25.017.522	25.885.854
5	Kab. Cianjur	1.541.825	29.872.719	31.414.545
6	Kab. Cirebon	867.661	33.703.548	34.571.210
7	Kab. Garut	990.273	37.020.555	38.010.828
8	Kab. Indramayu	939.703	39.106.633	40.046.335
9	Kab. Karawang	4.755.289	131.070.009	135.825.298
10	Kab. Kuningan	877.112	23.539.944	24.417.056
11	Kab. Majalengka	767.995	24.287.025	25.055.020
12	Kab. Purwakarta	1.442.913	50.874.726	52.317.638
13	Kab. Subang	822.313	30.900.113	31.722.427
14	Kab. Sukabumi	854.592	35.409.298	36.263.890
15	Kab. Sumedang	898.667	31.088.632	31.987.299
16	Kab. Tasikmalaya	825.837	27.179.900	28.005.737
17	Kota Bandung	17.007.365	201.417.415	218.424.780
18	Kota Bekasi	4.302.649	95.452.973	99.755.623
19	Kota Bogor	3.200.294	51.465.147	54.665.440
20	Kota Cirebon	1.520.528	30.895.704	32.416.232
21	Kota Depok	3.149.620	53.431.363	56.580.983
22	Kota Sukabumi	1.112.748	25.194.344	26.307.092
23	Kota Cimahi	936.708	26.463.054	27.399.762
24	Kota Tasikmalaya	1.489.819	29.304.891	30.794.710
25	Kota Banjar	689.269	16.994.693	17.683.963
26	Kab. Bandung Barat	1.440.415	33.522.432	34.962.847
27	Kab. Pangandaran	700.808	18.568.770	19.269.578
XIII	**Provinsi Banten**	**10.237.460**	**473.723.480**	**483.960.940**
1	Kab. Lebak	731.700	32.339.139	33.070.838
2	Kab. Pandeglang	658.171	33.610.534	34.268.705
3	Kab. Serang	1.026.147	50.257.852	51.283.999
4	Kab. Tangerang	2.936.544	154.894.826	157.831.370
5	Kota Cilegon	1.521.835	81.237.528	82.759.363
6	Kota Tangerang	3.286.638	207.207.509	210.494.147
7	Kota Serang	784.755	45.520.287	46.305.042
8	Kota Tangerang Selatan	4.410.400	105.517.545	109.927.946

www.peraturan.go.id

LAMPIRAN VI
RINCIAN DANA BAGI HASIL PAJAK PENGHASILAN
PASAL 25 DAN PASAL 29 WAJIB PAJAK ORANG PRIBADI DALAM NEGERI
DAN PAJAK PENGHASILAN PASAL 21
MENURUT PROVINSI/KABUPATEN/KOTA

(dalam ribuan rupiah)

NO	DAERAH	PPh WPOPDN	PPh Pasal 21	Jumlah
XIV	**Provinsi Jawa Tengah**	**34.339.363**	**425.148.887**	**459.488.250**
1	Kab. Banjarnegara	696.471	11.457.186	12.153.657
2	Kab. Banyumas	1.711.372	28.896.433	30.607.804
3	Kab. Batang	655.249	11.958.975	12.614.224
4	Kab. Blora	737.668	14.608.326	15.345.994
5	Kab. Boyolali	744.387	13.502.882	14.247.269
6	Kab. Brebes	712.973	12.615.813	13.328.786
7	Kab. Cilacap	793.947	34.376.151	35.170.098
8	Kab. Demak	659.158	12.903.705	13.562.863
9	Kab. Grobogan	614.953	13.364.550	13.979.503
10	Kab. Jepara	1.444.696	13.321.929	14.766.625
11	Kab. Karanganyar	852.957	12.656.227	13.509.184
12	Kab. Kebumen	730.862	12.278.113	13.008.975
13	Kab. Kendal	1.008.156	11.805.912	12.814.068
14	Kab. Klaten	820.183	16.198.956	17.019.139
15	Kab. Kudus	8.094.760	47.782.448	55.877.208
16	Kab. Magelang	886.011	11.437.766	12.323.777
17	Kab. Pati	830.340	17.838.804	18.669.144
18	Kab. Pekalongan	558.016	10.985.424	11.543.440
19	Kab. Pemalang	652.792	12.668.338	13.321.130
20	Kab. Purbalingga	726.595	10.286.465	11.013.061
21	Kab. Purworejo	728.484	11.159.482	11.887.967
22	Kab. Rembang	509.051	9.218.257	9.727.308
23	Kab. Semarang	1.054.449	19.722.804	20.777.253
24	Kab. Sragen	553.558	11.401.741	11.955.298
25	Kab. Sukoharjo	696.989	16.266.411	16.963.400
26	Kab. Tegal	982.039	14.170.406	15.152.445
27	Kab. Temanggung	660.692	10.608.850	11.269.543
28	Kab. Wonogiri	607.875	12.603.824	13.211.699
29	Kab. Wonosobo	505.706	9.518.904	10.024.610
30	Kota Magelang	948.601	10.504.029	11.452.631
31	Kota Pekalongan	1.422.857	14.250.950	15.673.807
32	Kota Salatiga	1.157.626	11.091.081	12.248.707
33	Kota Semarang	10.967.808	110.365.937	121.333.745
34	Kota Surakarta	5.077.412	33.446.358	38.523.770
35	Kota Tegal	1.704.352	12.449.891	14.154.243
XV	**Provinsi DI Yogyakarta**	**3.505.878**	**76.192.577**	**79.698.455**
1	Kab. Bantul	715.341	17.010.435	17.725.776
2	Kab. Gunung Kidul	408.291	12.490.143	12.898.434
3	Kab. Kulon Progo	373.557	11.830.518	12.204.075
4	Kab. Sleman	1.501.307	34.373.890	35.875.197
5	Kota Yogyakarta	2.260.322	38.583.879	40.844.201
XVI	**Provinsi Jawa Timur**	**38.620.035**	**633.274.928**	**671.894.963**
1	Kab. Bangkalan	562.422	13.044.824	13.607.246
2	Kab. Banyuwangi	957.923	18.673.745	19.631.668
3	Kab. Blitar	1.234.450	13.836.556	15.071.006
4	Kab. Bojonegoro	918.589	17.055.575	17.974.164
5	Kab. Bondowoso	573.099	11.674.459	12.247.557
6	Kab. Gresik	1.283.560	65.516.993	66.800.553
7	Kab. Jember	1.107.158	25.669.296	26.776.454
8	Kab. Jombang	732.663	15.843.725	16.576.388
9	Kab. Kediri	846.396	16.963.393	17.809.789
10	Kab. Lamongan	601.595	14.204.582	14.806.177
11	Kab. Lumajang	676.811	13.026.437	13.703.249

www.peraturan.go.id

LAMPIRAN VI
RINCIAN DANA BAGI HASIL PAJAK PENGHASILAN
PASAL 25 DAN PASAL 29 WAJIB PAJAK ORANG PRIBADI DALAM NEGERI
DAN PAJAK PENGHASILAN PASAL 21
MENURUT PROVINSI/KABUPATEN/KOTA

(dalam ribuan rupiah)

NO	DAERAH	PPh WPOPDN	PPh Pasal 21	Jumlah
12	Kab. Madiun	517.399	12.320.546	12.837.945
13	Kab. Magetan	594.280	13.065.962	13.660.243
14	Kab. Malang	994.132	23.617.996	24.612.128
15	Kab. Mojokerto	792.080	20.160.210	20.952.290
16	Kab. Nganjuk	761.132	14.427.722	15.188.854
17	Kab. Ngawi	547.417	13.143.488	13.690.905
18	Kab. Pacitan	497.727	11.083.124	11.580.851
19	Kab. Pamekasan	610.608	13.862.551	14.473.159
20	Kab. Pasuruan	1.748.625	27.633.119	29.381.745
21	Kab. Ponorogo	661.773	13.418.415	14.080.188
22	Kab. Probolinggo	623.256	15.744.782	16.368.038
23	Kab. Sampang	475.130	11.007.117	11.482.247
24	Kab. Sidoarjo	3.230.365	73.788.187	77.018.551
25	Kab. Situbondo	604.804	12.169.130	12.773.935
26	Kab. Sumenep	500.629	13.998.133	14.498.763
27	Kab. Trenggalek	551.545	12.897.504	13.449.048
28	Kab. Tuban	677.157	22.638.408	23.315.565
29	Kab. Tulungagung	1.053.705	15.824.826	16.878.531
30	Kota Blitar	1.220.643	10.739.632	11.960.275
31	Kota Kediri	1.391.594	25.493.498	26.885.092
32	Kota Madiun	754.439	17.277.480	18.031.919
33	Kota Malang	2.739.257	38.571.493	41.310.750
34	Kota Mojokerto	798.081	12.953.429	13.751.510
35	Kota Pasuruan	578.605	15.750.977	16.329.582
36	Kota Probolinggo	653.582	12.269.896	12.923.478
37	Kota Surabaya	24.284.943	241.413.871	265.698.814
38	Kota Batu	572.478	9.131.311	9.703.789
XVII	**Provinsi Kalimantan Barat**	**4.084.897**	**79.544.452**	**83.629.349**
1	Kab. Bengkayang	205.756	4.687.696	4.893.452
2	Kab. Landak	158.819	5.440.044	5.598.863
3	Kab. Kapuas Hulu	195.551	3.609.483	3.805.034
4	Kab. Ketapang	428.333	10.223.126	10.651.459
5	Kab. Pontianak	249.187	5.160.041	5.409.227
6	Kab. Sambas	245.889	6.560.812	6.806.700
7	Kab. Sanggau	239.659	8.817.612	9.057.271
8	Kab. Sintang	287.515	8.445.944	8.733.459
9	Kota Pontianak	2.827.393	36.858.988	39.686.381
10	Kota Singkawang	543.416	5.930.156	6.473.571
11	Kab. Sekadau	164.489	4.659.823	4.824.313
12	Kab. Melawi	155.174	6.300.799	6.455.973
13	Kab. Kayong Utara	134.746	3.315.128	3.449.874
14	Kab. Kubu Raya	291.417	9.307.027	9.598.444
XVIII	**Provinsi Kalimantan Tengah**	**1.101.804**	**65.176.742**	**66.278.547**
1	Kab. Barito Selatan	40.790	4.809.358	4.850.148
2	Kab. Barito Utara	40.853	5.804.440	5.845.292
3	Kab. Kapuas	49.532	7.116.775	7.166.307
4	Kab. Kotawaringin Barat	333.527	11.630.319	11.963.846
5	Kab. Kotawaringin Timur	420.638	16.724.172	17.144.810
6	Kota Palangkaraya	355.092	17.440.600	17.795.692
7	Kab. Barito Timur	44.153	6.536.464	6.580.617
8	Kab. Murung Raya	37.993	6.880.048	6.918.041
9	Kab. Pulang Pisau	38.693	3.127.562	3.166.255
10	Kab. Gunung Mas	39.699	3.332.001	3.371.700
11	Kab. Lamandau	78.662	3.274.166	3.352.828

www.peraturan.go.id

LAMPIRAN VI
RINCIAN DANA BAGI HASIL PAJAK PENGHASILAN
PASAL 25 DAN PASAL 29 WAJIB PAJAK ORANG PRIBADI DALAM NEGERI
DAN PAJAK PENGHASILAN PASAL 21
MENURUT PROVINSI/KABUPATEN/KOTA

(dalam ribuan rupiah)

NO	DAERAH	PPh WPOPDN	PPh Pasal 21	Jumlah
12	Kab. Sukamara	69.933	3.099.302	3.169.235
13	Kab. Katingan	58.214	3.427.776	3.485.989
14	Kab. Seruyan	44.928	4.562.132	4.607.060
XIX	**Provinsi Kalimantan Selatan**	**3.139.687**	**112.260.148**	**115.399.835**
1	Kab. Banjar	258.141	13.063.623	13.321.764
2	Kab. Barito Kuala	143.835	6.234.067	6.377.902
3	Kab. Hulu Sungai Selatan	118.678	7.534.333	7.653.010
4	Kab. Hulu Sungai Tengah	134.776	7.964.792	8.099.568
5	Kab. Hulu Sungai Utara	126.190	6.886.926	7.013.116
6	Kab. Kotabaru	211.111	18.150.656	18.361.767
7	Kab. Tabalong	151.753	15.362.399	15.514.152
8	Kab. Tanah Laut	134.162	10.724.966	10.859.128
9	Kab. Tapin	134.681	8.365.662	8.500.343
10	Kota Banjarbaru	219.050	13.158.027	13.377.077
11	Kota Banjarmasin	2.132.982	40.158.181	42.291.163
12	Kab. Balangan	109.182	9.112.885	9.222.066
13	Kab. Tanah Bumbu	834.990	11.673.706	12.508.696
XX	**Provinsi Kalimantan Timur**	**3.778.686**	**380.783.341**	**384.562.027**
1	Kab. Berau	309.068	26.599.065	26.908.133
2	Kab. Kutai Kartanegara	251.680	83.863.393	84.115.073
3	Kab. Kutai Barat	172.487	24.684.344	24.856.831
4	Kab. Kutai Timur	266.040	63.639.305	63.905.345
5	Kab. Pasir	230.406	31.128.326	31.358.732
6	Kota Balikpapan	1.715.969	163.789.682	165.505.651
7	Kota Bontang	536.704	77.178.161	77.714.864
8	Kota Samarinda	1.838.065	60.025.839	61.863.904
9	Kab. Penajam Paser Utara	177.571	20.633.519	20.811.090
10	Kab. Mahakam Ulu	170.041	19.633.378	19.803.418
XXI	Provinsi Kalimantan Utara	726.637	21.767.993	22.494.630
1	Kab. Bulungan	139.319	7.164.495	7.303.814
2	Kab. Malinau	74.526	4.126.064	4.200.590
3	Kab. Nunukan	81.031	4.714.483	4.795.514
4	Kab. Tana Tidung	65.495	2.926.669	2.992.164
5	Kota Tarakan	729.584	13.720.278	14.449.863
XXII	**Provinsi Sulawesi Utara**	**2.358.604**	**56.818.350**	**59.176.955**
1	Kab. Bolaang Mongondow	149.076	2.510.779	2.659.855
2	Kab. Minahasa	115.141	7.170.185	7.285.326
3	Kab. Sangihe	187.441	4.158.502	4.345.942
4	Kota Bitung	248.876	5.814.251	6.063.126
5	Kota Manado	1.814.853	29.737.057	31.551.910
6	Kab. Kepulauan Talaud	120.163	2.868.443	2.988.606
7	Kab. Minahasa Selatan	112.129	3.707.693	3.819.822
8	Kota Tomohon	101.179	4.070.778	4.171.957
9	Kab. Minahasa Utara	100.331	7.198.133	7.298.464
10	Kab. Bolaang Mongondow Utara	72.263	2.330.470	2.402.733
11	Kota Kotamobagu	185.275	5.931.713	6.116.987
12	Kab. Kep. Siau Tagulandang Biaro	111.617	2.690.306	2.801.923
13	Kab. Minahasa Tenggara	71.770	2.556.691	2.628.461
14	Kab. Bolaang Mongondow Timur	75.040	2.312.784	2.387.824
15	Kab. Bolaang Mongondow Selatan	72.755	2.169.742	2.242.497
XXIII	**Provinsi Gorontalo**	**890.803**	**17.784.924**	**18.675.726**
1	Kab. Boalemo	71.950	2.596.125	2.668.075
2	Kab. Gorontalo	138.968	5.989.764	6.128.732
3	Kota Gorontalo	864.186	9.946.043	10.810.229

www.peraturan.go.id

LAMPIRAN VI
RINCIAN DANA BAGI HASIL PAJAK PENGHASILAN
PASAL 25 DAN PASAL 29 WAJIB PAJAK ORANG PRIBADI DALAM NEGERI
DAN PAJAK PENGHASILAN PASAL 21
MENURUT PROVINSI/KABUPATEN/KOTA

(dalam ribuan rupiah)

NO	DAERAH	PPh WPOPDN	PPh Pasal 21	Jumlah
4	Kab. Pohuwato	101.100	3.126.009	3.227.110
5	Kab. Bone Bolango	89.790	3.568.273	3.658.063
6	Kab. Gorontalo Utara	70.210	1.451.171	1.521.381
XXIV	**Provinsi Sulawesi Tengah**	**1.051.167**	**40.709.512**	**41.760.679**
1	Kab. Banggai	272.108	11.847.549	12.119.656
2	Kab. Banggai Kepulauan	44.613	1.653.767	1.698.379
3	Kab. Buol	56.506	2.705.715	2.762.221
4	Kab. ToliToli	95.734	3.061.351	3.157.085
5	Kab. Donggala	104.408	3.466.456	3.570.864
6	Kab. Morowali	47.012	2.098.272	2.145.283
7	Kab. Poso	68.690	4.519.959	4.588.649
8	Kota Palu	648.878	17.280.560	17.929.438
9	Kab. Parigi Moutong	51.134	3.560.796	3.611.930
10	Kab. Tojo Una Una	51.515	2.298.911	2.350.425
11	Kab. Sigi	41.086	3.037.442	3.078.529
12	Kab. Banggai Laut	49.488	2.516.499	2.565.987
13	Kab. Morowali Utara	45.580	3.016.992	3.062.572
XXV	**Provinsi Sulawesi Selatan**	**5.182.510**	**167.017.437**	**172.199.947**
1	Kab. Bantaeng	109.488	4.390.910	4.500.398
2	Kab. Barru	117.416	5.714.099	5.831.515
3	Kab. Bone	231.273	10.339.399	10.570.672
4	Kab. Bulukumba	146.893	8.576.551	8.723.445
5	Kab. Enrekang	109.099	5.567.452	5.676.551
6	Kab. Gowa	219.808	8.253.042	8.472.850
7	Kab. Jeneponto	101.497	5.234.740	5.336.236
8	Kab. Luwu	153.348	3.996.533	4.149.881
9	Kab. Luwu Utara	101.924	4.549.010	4.650.934
10	Kab. Maros	123.887	9.171.603	9.295.490
11	Kab. Pangkajene Kepulauan	136.292	13.359.352	13.495.645
12	Kab. Pinrang	183.727	6.643.570	6.827.296
13	Kab. Kepulauan Selayar	133.352	6.129.481	6.262.833
14	Kab. Sidenreng Rappang	182.593	6.815.997	6.998.591
15	Kab. Sinjai	119.905	4.621.230	4.741.134
16	Kab. Soppeng	122.415	5.969.292	6.091.707
17	Kab. Takalar	100.012	5.632.162	5.732.175
18	Kab. Tana Toraja	102.207	5.275.839	5.378.046
19	Kab. Wajo	159.010	7.766.888	7.925.897

www.peraturan.go.id

LAMPIRAN VI
RINCIAN DANA BAGI HASIL PAJAK PENGHASILAN
PASAL 25 DAN PASAL 29 WAJIB PAJAK ORANG PRIBADI DALAM NEGERI
DAN PAJAK PENGHASILAN PASAL 21
MENURUT PROVINSI/KABUPATEN/KOTA

(dalam ribuan rupiah)

NO	DAERAH	PPh WPOPDN	PPh Pasal 21	Jumlah
20	Kota Parepare	240.512	8.570.868	8.811.380
21	Kota Makassar	4.347.677	81.520.348	85.868.025
22	Kota Palopo	264.300	5.985.692	6.249.993
23	Kab. Luwu Timur	150.867	22.647.247	22.798.114
24	Kab. Toraja Utara	116.262	3.794.851	3.911.113
XXVI	**Provinsi Sulawesi Barat**	**106.075**	**10.618.471**	**10.724.546**
1	Kab. Majene	21.255	2.575.176	2.596.432
2	Kab. Mamuju	59.638	5.156.048	5.215.686
3	Kab. Polewali Mandar	41.815	1.594.416	1.636.231
4	Kab. Mamasa	10.872	3.559.167	3.570.039
5	Kab. Mamuju Utara	14.354	2.164.594	2.178.948
6	Kab. Mamuju Tengah	11.179	878.305	889.484
XXVII	**Provinsi Sulawesi Tenggara**	**772.494**	**30.673.455**	**31.445.948**
1	Kab. Buton	22.655	1.089.835	1.112.490
2	Kab. Konawe	93.448	1.674.233	1.767.681
3	Kab. Kolaka	99.292	6.324.681	6.423.973
4	Kab. Muna	57.033	3.273.379	3.330.412
5	Kota Kendari	375.981	14.792.401	15.168.381
6	Kota Baubau	145.867	3.062.703	3.208.569
7	Kab. Konawe Selatan	81.553	1.483.568	1.565.121
8	Kab. Bombana	21.784	2.056.023	2.077.807
9	Kab. Wakatobi	29.944	1.655.937	1.685.881
10	Kab. Kolaka Utara	21.993	1.464.621	1.486.614
11	Kab. Konawe Utara	59.084	1.412.884	1.471.968
12	Kab. Buton Utara	21.118	1.027.208	1.048.326
13	Kab. Konawe Kepulauan	45.482	1.409.976	1.455.458
14	Kab. Kolaka Timur	21.084	1.160.078	1.181.162
15	Kab. Buton Selatan	20.601	2.390.894	2.411.495
16	Kab. Buton Tengah	21.129	914.667	935.796
17	Kab. Muna Barat	20.694	817.093	837.787
XXVIII	**Provinsi Bali**	**7.862.042**	**143.637.739**	**151.499.781**
1	Kab. Badung	1.986.808	59.550.471	61.537.280
2	Kab. Bangli	499.236	9.202.273	9.701.509
3	Kab. Buleleng	813.172	19.985.742	20.798.914
4	Kab. Gianyar	1.240.927	14.807.115	16.048.042
5	Kab. Jembrana	499.764	10.591.250	11.091.014
6	Kab. Karangasem	464.883	12.503.085	12.967.969
7	Kab. Klungkung	432.821	10.612.383	11.045.204
8	Kab. Tabanan	1.205.763	13.763.930	14.969.693
9	Kota Denpasar	4.649.689	64.440.359	69.090.048
XXIX	**Provinsi Nusa Tenggara Barat**	**1.767.161**	**74.936.076**	**76.703.238**
1	Kab. Bima	87.804	6.657.758	6.745.563
2	Kab. Dompu	104.329	6.320.549	6.424.878
3	Kab. Lombok Barat	130.368	7.804.765	7.935.133
4	Kab. Lombok Tengah	180.796	8.460.991	8.641.787
5	Kab. Lombok Timur	133.916	9.234.268	9.368.184
6	Kab. Sumbawa	352.110	8.241.320	8.593.430
7	Kota Mataram	1.120.392	21.429.680	22.550.072
8	Kota Bima	212.804	7.169.097	7.381.902
9	Kab. Sumbawa Barat	248.420	33.416.187	33.664.607
10	Kab. Lombok Utara	79.803	3.669.500	3.749.302

www.peraturan.go.id

LAMPIRAN VI
RINCIAN DANA BAGI HASIL PAJAK PENGHASILAN
PASAL 25 DAN PASAL 29 WAJIB PAJAK ORANG PRIBADI DALAM NEGERI
DAN PAJAK PENGHASILAN PASAL 21
MENURUT PROVINSI/KABUPATEN/KOTA

(dalam ribuan rupiah)

NO	DAERAH	PPh WPOPDN	PPh Pasal 21	Jumlah
XXX	**Provinsi Nusa Tenggara Timur**	**1.446.966**	**42.516.372**	**43.963.338**
1	Kab. Alor	82.173	2.523.738	2.605.911
2	Kab. Belu	132.574	2.668.481	2.801.055
3	Kab. Ende	142.391	3.036.973	3.179.364
4	Kab. Flores Timur	62.509	3.218.592	3.281.100
5	Kab. Kupang	32.903	2.700.249	2.733.152
6	Kab. Lembata	43.977	1.875.331	1.919.308
7	Kab. Manggarai	179.647	2.688.507	2.868.155
8	Kab. Ngada	42.396	1.699.161	1.741.557
9	Kab. Sikka	254.336	3.902.395	4.156.731
10	Kab. Sumba Barat	78.538	1.839.115	1.917.654
11	Kab. Sumba Timur	147.401	3.292.019	3.439.420
12	Kab. Timor Tengah Selatan	35.449	1.920.196	1.955.645
13	Kab. Timor Tengah Utara	67.313	2.496.701	2.564.014
14	Kota Kupang	562.565	16.740.511	17.303.076
15	Kab. Rote Ndao	30.235	1.240.655	1.270.890
16	Kab. Manggarai Barat	71.375	2.245.604	2.316.979
17	Kab. Nagekeo	35.254	1.999.633	2.034.887
18	Kab. Sumba Tengah	30.691	1.344.915	1.375.607
19	Kab. Sumba Barat Daya	39.180	1.709.942	1.749.123
20	Kab. Manggarai Timur	30.653	1.794.200	1.824.853
21	Kab. Sabu Raijua	29.713	1.118.865	1.148.578
22	Kab. Malaka	39.176	1.718.772	1.757.948
XXXI	**Provinsi Maluku**	**804.501**	**28.532.158**	**29.336.659**
1	Kab. Maluku Tenggara Barat	43.381	3.303.071	3.346.452
2	Kab. Maluku Tengah	95.380	5.071.445	5.166.825
3	Kab. Maluku Tenggara	63.553	2.559.451	2.623.004
4	Kab. Buru	36.962	2.455.750	2.492.712
5	Kota Ambon	680.357	19.640.494	20.320.851
6	Kab. Seram Bagian Barat	53.933	1.754.579	1.808.512
7	Kab. Seram Bagian Timur	40.535	1.770.534	1.811.069
8	Kab. Kepulauan Aru	81.174	1.979.865	2.061.038
9	Kota Tual	45.643	1.395.724	1.441.367
10	Kab. Maluku Barat Daya	32.911	1.607.886	1.640.797
11	Kab. Buru Selatan	32.923	1.259.438	1.292.361
XXXII	**Provinsi Maluku Utara**	**626.513**	**30.080.998**	**30.707.511**
1	Kab. Halmahera Tengah	28.909	2.622.138	2.651.047
2	Kab. Halmahera Barat	38.333	2.341.627	2.379.960
3	Kota Ternate	530.513	8.782.140	9.312.652
4	Kab. Halmahera Timur	38.189	3.282.636	3.320.826
5	Kota Tidore Kepulauan	31.171	3.278.481	3.309.652
6	Kab. Kepulauan Sula	30.822	2.285.033	2.315.855
7	Kab. Halmahera Selatan	42.055	3.171.515	3.213.570
8	Kab. Halmahera Utara	141.220	16.067.483	16.208.703
9	Kab. Pulau Morotai	29.932	1.847.012	1.876.944
10	Kab. Pulau Taliabu	28.626	1.443.432	1.472.058
XXXIII	**Provinsi Papua**	**2.246.994**	**157.121.878**	**159.368.872**
1	Kab. Biak Numfor	160.674	5.583.503	5.744.177
2	Kab. Jayapura	111.477	4.786.653	4.898.130
3	Kab. Jayawijaya	136.140	4.963.742	5.099.882
4	Kab. Merauke	655.900	11.137.519	11.793.419
5	Kab. Mimika	698.482	113.196.926	113.895.408
6	Kab. Nabire	145.503	4.886.635	5.032.138
7	Kab. Paniai	34.867	3.177.478	3.212.345

www.peraturan.go.id

LAMPIRAN VI
RINCIAN DANA BAGI HASIL PAJAK PENGHASILAN
PASAL 25 DAN PASAL 29 WAJIB PAJAK ORANG PRIBADI DALAM NEGERI
DAN PAJAK PENGHASILAN PASAL 21
MENURUT PROVINSI/KABUPATEN/KOTA

(dalam ribuan rupiah)

NO	DAERAH	PPh WPOPDN	PPh Pasal 21	Jumlah
8	Kab. Puncak Jaya	39.452	3.333.535	3.372.987
9	Kab. Kepulauan Yapen	149.494	3.773.670	3.923.164
10	Kota Jayapura	562.813	25.448.184	26.010.996
11	Kab. Sarmi	36.044	2.941.277	2.977.321
12	Kab. Keerom	36.020	3.183.450	3.219.470
13	Kab. Yahukimo	34.867	2.621.477	2.656.344
14	Kab. Pegunungan Bintang	34.867	3.122.980	3.157.847
15	Kab. Tolikara	34.867	2.995.701	3.030.568
16	Kab. Boven Digoel	35.569	3.404.694	3.440.263
17	Kab. Mappi	35.830	3.282.944	3.318.774
18	Kab. Asmat	43.978	3.581.239	3.625.217
19	Kab. Waropen	34.977	2.823.181	2.858.159
20	Kab. Supiori	34.867	2.738.525	2.773.392
21	Kab. Mamberamo Raya	34.867	2.652.496	2.687.363
22	Kab. Mamberamo Tengah	34.867	2.582.359	2.617.226
23	Kab. Yalimo	34.867	2.480.204	2.515.071
24	Kab. Lanny Jaya	34.867	2.872.676	2.907.543
25	Kab. Nduga	34.867	2.856.208	2.891.075
26	Kab. Puncak	34.867	2.768.880	2.803.747
27	Kab. Dogiyai	34.867	2.843.592	2.878.459
28	Kab. Intan Jaya	34.867	2.822.562	2.857.429
29	Kab. Deiyai	34.867	2.820.529	2.855.396
XXXIV	**Provinsi Papua Barat**	**594.892**	**39.099.969**	**39.694.861**
1	Kab. Sorong	33.208	3.557.269	3.590.477
2	Kab. Manokwari	249.462	6.730.597	6.980.059
3	Kab. Fak Fak	37.384	3.445.534	3.482.918
4	Kota Sorong	342.423	11.903.596	12.246.019
5	Kab. Sorong Selatan	26.418	2.387.463	2.413.881
6	Kab. Raja Ampat	23.937	5.297.553	5.321.491
7	Kab. Teluk Bintuni	36.163	15.111.214	15.147.377
8	Kab. Teluk Wondama	23.965	1.674.170	1.698.134
9	Kab. Kaimana	28.848	2.574.979	2.603.827
10	Kab. Tambrauw	24.130	1.583.440	1.607.569
11	Kab. Maybrat	25.073	1.584.831	1.609.904
12	Kab. Manokwari Selatan	20.735	1.421.882	1.442.617
13	Kab. Pegunungan Arfak	20.592	1.377.426	1.398.018
	Total Provinsi	**734.390.535**	**17.318.852.073**	**18.053.242.608**
	Total Kabupaten/Kota	**308.625.351**	**8.050.801.219**	**8.359.426.570**
	Total Nasional	**1.043.015.886**	**25.369.653.292**	**26.412.669.178**

PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA,

JOKO WIDODO

www.peraturan.go.id

LAMPIRAN VII

PERATURAN PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA
NOMOR 36 TAHUN 2015

TENTANG
RINCIAN ANGGARAN
PENDAPATAN DAN BELANJA NEGARA
TAHUN ANGGARAN 2015

RINCIAN DANA BAGI HASIL PAJAK BUMI DAN BANGUNAN MENURUT PROVINSI/KABUPATEN/KOTA

www.peraturan.go.id

LAMPIRAN VII
RINCIAN DANA BAGI HASIL PAJAK BUMI DAN BANGUNAN
MENURUT PROVINSI/KABUPATEN/KOTA

(dalam ribuan rupiah)

No.	Nama Daerah	Bagi Rata	Bagian Daerah					Jumlah	Biaya Pemungutan					Jumlah	Total
			Sektor		Pertambangan				Sektor		Pertambangan				
			Perkebunan	Perhutanan	Minyak Bumi dan Gas Bumi	Panas Bumi	Non Minyak Bumi Gas Bumi Lainnya		Perkebunan	Perhutanan	Minyak Bumi dan Gas Bumi	Panas Bumi	Non Minyak Bumi Gas Bumi Lainnya		
1	2	3	4	5	6	7	8	9 = (4+5+6+7+8)	10	11	12	13	14	15=(10+11+12+13+14)	16=(3+9+15)
I	**Provinsi Aceh**	-	4,745,756	159,204	177,680,334	-	827,493	183,412,787	263,654	7,740	7,403,347	-	34,480	7,709,221	191,122,008
1	Kab. Aceh Barat	3,428,548	1,738,533	-	6,786,556	-	346,870	8,871,959	72,439	-	212,080	-	10,839	295,358	12,595,865
2	Kab. Aceh Besar	3,428,548	2,305	-	8,392,347	-	607,191	9,001,843	96	-	262,261	-	18,975	281,332	12,711,723
3	Kab. Aceh Selatan	3,428,548	338,134	-	9,064,429	-	1,299,921	10,702,484	14,089	-	283,264	-	40,623	337,976	14,469,008
4	Kab. Aceh Singkil	3,428,548	3,361,743	-	6,483,834	-	-	9,845,577	140,073	-	202,620	-	-	342,693	13,616,818
5	Kab. Aceh Tengah	3,428,548	5,195	379,544	8,778,195	-	-	9,162,934	216	13,838	274,319	-	-	288,373	12,879,855
6	Kab. Aceh Tenggara	3,428,548	-	-	8,339,848	-	-	8,339,848	-	-	260,620	-	-	260,620	12,029,016
7	Kab. Aceh Timur	3,428,548	3,458,822	-	60,002,251	-	-	63,461,073	144,117	-	1,875,071	-	-	2,019,188	68,908,809
8	Kab. Aceh Utara	3,428,548	1,064,260	95,735	356,397,298	-	-	357,557,293	44,344	3,491	11,137,415	-	-	11,185,250	372,171,091
9	Kab. Bireuen	3,428,548	195,637	25,572	17,359,577	-	-	17,580,786	8,152	932	542,487	-	-	551,571	21,560,905
10	Kab. Pidie	3,428,548	4,983	-	8,109,132	-	235,825	8,349,940	208	-	253,410	-	7,370	260,988	12,039,476
11	Kab. Simeulue	3,428,548	-	-	7,455,096	-	-	7,455,096	-	-	232,972	-	-	232,972	11,116,616
12	Kota Banda Aceh	3,428,548	-	-	5,918,625	-	-	5,918,625	-	-	184,957	-	-	184,957	9,532,130
13	Kota Sabang	3,428,548	-	-	7,097,697	-	-	7,097,697	-	-	221,803	-	-	221,803	10,748,048
14	Kota Langsa	3,428,548	524,931	-	7,338,699	-	-	7,863,630	21,872	-	229,334	-	-	251,206	11,543,384
15	Kota Lhokseumawe	3,428,548	-	-	58,401,822	-	-	58,401,822	-	-	1,825,057	-	-	1,825,057	63,655,427
16	Kab. Gayo Lues	3,428,548	-	-	11,193,437	-	-	11,193,437	-	-	349,794	-	-	349,794	14,971,779
17	Kab. Aceh Barat Daya	3,428,548	399,690	-	7,175,323	-	110,558	7,685,571	16,654	-	224,229	-	3,455	244,338	11,358,457
18	Kab. Aceh Jaya	3,428,548	491,214	-	8,569,157	-	122,131	9,182,502	20,467	-	267,787	-	3,817	292,071	12,903,121
19	Kab. Nagan Raya	3,428,548	3,547,923	-	8,340,272	-	248,655	12,136,850	147,830	-	260,634	-	7,771	416,235	15,981,633
20	Kab. Aceh Tamiang	3,428,548	3,248,314	-	79,571,837	-	-	82,820,151	135,347	-	2,486,619	-	-	2,621,966	88,870,665
21	Kab. Bener Meriah	3,428,548	5,588	135,965	7,532,411	-	-	7,673,964	233	4,957	235,387	-	-	240,577	11,343,089
22	Kab. Pidie Jaya	3,428,548	12,836	-	6,587,942	-	-	6,600,778	535	-	205,873	-	-	206,408	10,235,734
23	Kota Subulussalam	3,428,548	582,921	-	5,825,560	-	338,822	6,747,303	24,288	-	182,049	-	10,588	216,925	10,392,776
II	**Provinsi Sumatera Utara**	-	49,989,304	1,307,087	101,251,878	1,521,676	912,419	154,982,364	555,438	12,708	843,763	12,680	7,604	1,432,193	156,414,557
1	Kab. Asahan	3,428,548	28,205,832	25,416	9,662,195	-	-	37,893,443	1,488,641	1,173	382,462	-	-	1,872,276	43,194,267
2	Kab. Dairi	3,428,548	94,646	65,257	8,622,411	-	-	8,782,314	4,995	3,014	341,304	-	-	349,313	12,560,175
3	Kab. Deli Serdang	3,428,548	13,263,404	-	23,778,615	103,109	-	37,145,128	700,013	-	941,237	4,081	-	1,645,331	42,219,007
4	Kab. Karo	3,428,548	105,441	-	6,442,267	605,009	-	7,152,717	5,565	-	255,007	23,948	-	284,520	10,865,785
5	Kab. Labuhanbatu	3,428,548	15,245,722	-	11,552,549	-	-	26,798,271	804,635	-	457,288	-	-	1,261,923	31,488,742
6	Kab. Langkat	3,428,548	19,520,780	-	134,362,166	60,150	-	153,943,096	1,030,263	-	5,318,502	2,381	-	6,351,146	163,722,790
7	Kab. Mandailing Natal	3,428,548	27,285,033	275,397	11,113,376	-	620,175	39,293,981	1,440,044	12,718	439,904	-	24,548	1,917,214	44,639,743
8	Kab. Nias	3,428,548	-	-	3,249,883	-	-	3,249,883	-	-	128,641	-	-	128,641	6,807,072
9	Kab. Simalungun	3,428,548	25,696,598	286,159	11,269,124	911	-	37,252,792	1,356,209	13,215	446,069	36	-	1,815,529	42,496,869
10	Kab. Tapanuli Selatan	3,428,548	4,217	338,619	8,393,494	3,677,364	2,043,196	14,456,890	223	15,637	332,243	145,562	80,877	574,542	18,459,980
11	Kab. Tapanuli Tengah	3,428,548	1,780,317	116,481	8,695,076	66,289	361,698	11,019,861	93,962	5,379	344,180	2,624	14,317	460,462	14,908,871
12	Kab. Tapanuli Utara	3,428,548	-	503,287	8,714,967	1,184,316	388,803	10,791,373	-	23,242	344,967	46,879	15,390	430,478	14,650,399
13	Kab. Toba Samosir	3,428,548	132,735	187,982	5,874,862	-	-	6,195,579	7,006	8,681	232,547	-	-	248,234	9,872,361
14	Kota Binjai	3,428,548	493,562	-	14,236,259	-	-	14,729,821	26,049	-	563,518	-	-	589,567	18,747,936
15	Kota Medan	3,428,548	-	-	20,538,522	-	-	20,538,522	-	-	812,983	-	-	812,983	24,780,053
16	Kota Pematang Siantar	3,428,548	28,633	-	3,710,558	-	-	3,739,191	1,511	-	146,876	-	-	148,387	7,316,126
17	Kota Sibolga	3,428,548	-	-	5,504,986	-	-	5,504,986	-	-	217,906	-	-	217,906	9,151,440
18	Kota Tanjung Balai	3,428,548	-	-	4,528,148	-	-	4,528,148	-	-	179,239	-	-	179,239	8,135,935
19	Kota Tebing Tinggi	3,428,548	-	-	4,949,514	-	-	4,949,514	-	-	195,918	-	-	195,918	8,573,980
20	Kota Padang Sidempuan	3,428,548	507	-	7,381,758	18,823	219,755	7,620,843	27	-	292,195	745	8,699	301,666	11,351,057
21	Kab. Pakpak Bharat	3,428,548	93,769	35,150	8,068,324	-	-	8,197,243	4,949	1,623	319,371	-	-	325,943	11,951,734
22	Kab. Nias Selatan	3,428,548	-	1,292,563	8,601,126	-	-	9,893,689	-	59,691	340,461	-	-	400,152	13,722,389
23	Kab. Humbang Hasundutan	3,428,548	-	511,447	9,525,866	-	-	10,037,313	-	23,619	377,065	-	-	400,684	13,866,545
24	Kab. Serdang Bedagai	3,428,548	18,499,020	-	9,289,209	-	16,047	27,804,276	976,337	-	367,697	-	635	1,344,669	32,577,493
25	Kab. Samosir	3,428,548	-	291,838	5,276,124	-	-	5,567,962	-	13,477	208,847	-	-	222,324	9,218,834
26	Kab. Batu Bara	3,428,548	6,206,135	-	5,681,455	-	-	11,887,590	327,546	-	224,891	-	-	552,437	15,868,575
27	Kab. Padang Lawas	3,428,548	9,264	714,695	15,757,233	-	-	16,481,192	489	33,005	623,723	-	-	657,217	20,566,957
28	Kab. Padang Lawas Utara	3,428,548	791,051	142,942	7,863,511	370,728	-	9,168,232	41,750	6,601	311,264	14,674	-	374,289	12,971,069
29	Kab. Labuhanbatu Selatan	3,428,548	29,299,431	441,118	7,040,349	-	-	36,780,898	1,546,359	20,371	278,681	-	-	1,845,411	42,054,857
30	Kab. Labuhanbatu Utara	3,428,548	13,201,116	-	7,606,447	-	-	20,807,563	696,725	-	301,089	-	-	997,814	25,233,925
31	Kab. Nias Utara	3,428,548	-	-	3,358,977	-	-	3,358,977	-	-	132,959	-	-	132,959	6,920,484
32	Kab. Nias Barat	3,428,548	-	-	2,104,452	-	-	2,104,452	-	-	83,301	-	-	83,301	5,616,301
33	Kota Gunungsitoli	3,428,548	-	-	2,253,700	-	-	2,253,700	-	-	89,208	-	-	89,208	5,771,456
III	**Provinsi Sumatera Barat**	-	3,853,231	302,029	31,035,422	8,117	786,807	35,985,606	214,068	25,169	1,724,191	451	43,712	2,007,591	37,993,197
1	Kab. Limapuluh Kota	3,428,548	185,401	-	8,849,383	-	27,714	9,062,498	7,725	-	245,816	-	770	254,311	12,745,357
2	Kab. Agam	3,428,548	939,379	-	7,475,271	-	-	8,414,650	39,141	-	207,646	-	-	246,787	12,089,985
3	Kab. Kepulauan Mentawai	3,428,548	-	885,524	8,444,664	-	-	9,330,188	-	24,597	234,574	-	-	259,171	13,017,907
4	Kab. Padang Pariaman	3,428,548	-	-	6,406,997	-	-	6,406,997	-	-	177,972	-	-	177,972	10,013,517
5	Kab. Pasaman	3,428,548	-	-	7,888,183	-	-	7,888,183	-	-	219,116	-	-	219,116	11,535,847
6	Kab. Pesisir Selatan	3,428,548	3,295,773	-	10,711,585	32,468	-	14,039,826	137,324	-	297,544	902	-	435,770	17,904,144
7	Kab. Sijunjung	3,428,548	371,594	-	7,813,531	-	90,324	8,275,449	15,483	-	217,042	-	2,509	235,034	11,939,031
8	Kab. Solok	3,428,548	81,817	-	8,285,933	-	37,318	8,405,068	3,409	-	230,164	-	1,036	234,609	12,068,225
9	Kab. Tanah Datar	3,428,548	6,613	-	6,103,421	-	9,365	6,119,399	276	-	169,539	-	260	170,075	9,718,022
10	Kota Bukit Tinggi	3,428,548	-	-	2,520,640	-	-	2,520,640	-	-	70,017	-	-	70,017	6,019,205
11	Kota Padang Panjang	3,428,548	-	-	4,238,066	-	-	4,238,066	-	-	117,724	-	-	117,724	7,784,338
12	Kota Padang	3,428,548	-	-	7,550,206	-	1,945,620	9,495,826	-	-	209,728	-	54,045	263,773	13,188,147
13	Kota Payakumbuh	3,428,548	-	-	3,119,415	-	-	3,119,415	-	-	86,650	-	-	86,650	6,634,613
14	Kota Sawahlunto	3,428,548	-	-	3,822,936	-	566,342	4,389,278	-	-	106,192	-	15,731	121,923	7,939,749
15	Kota Solok	3,428,548	-	-	4,130,471	-	-	4,130,471	-	-	114,735	-	-	114,735	7,673,754
16	Kota Pariaman	3,428,548	-	-	5,632,735	-	-	5,632,735	-	-	156,465	-	-	156,465	9,217,748
17	Kab. Pasaman Barat	3,428,548	2,823,691	-	8,341,475	-	-	11,165,166	117,654	-	231,708	-	-	349,362	14,943,076
18	Kab. Dharmasraya	3,428,548	3,830,984	100,491	5,861,496	-	470,546	10,263,517	159,624	2,792	162,820	-	13,071	338,307	14,030,372

www.peraturan.go.id

LAMPIRAN VII
RINCIAN DANA BAGI HASIL PAJAK BUMI DAN BANGUNAN
MENURUT PROVINSI/KABUPATEN/KOTA

(dalam ribuan rupiah)

No.	Nama Daerah	Bagi Rata	Bagian Daerah					Jumlah	Biaya Pemungutan					Jumlah	Total
			Sektor		Pertambangan				Sektor		Pertambangan				
			Perkebunan	Perhutanan	Minyak Bumi dan Gas Bumi	Panas Bumi	Non Minyak Bumi Gas Bumi Lainnya		Perkebunan	Perhutanan	Minyak Bumi dan Gas Bumi	Panas Bumi	Non Minyak Bumi Gas Bumi Lainnya		
1	2	3	4	5	6	7	8	9 = (4+5+6+7+8)	10	11	12	13	14	15=(10+11+12+13+14)	16=(9+15)
19	Kab. Solok Selatan	3,428,548	3,877,672	222,103	6,945,285	-	-	11,045,060	161,569	6,169	192,924	-	-	360,662	14,834,270
IV	**Provinsi Riau**	-	30,883,501	8,094,487	717,155,509	-	2,041,951	758,175,448	1,372,599	314,786	23,905,184	-	68,066	25,660,635	783,836,083
1	Kab. Bengkalis	3,428,548	5,323,685	3,390,537	1,286,690,819	-	-	1,295,405,041	236,608	131,854	42,889,694	-	-	43,258,156	1,342,091,745
2	Kab. Indragiri Hilir	3,428,548	13,722,749	2,697,342	22,831,163	-	390,765	39,642,019	609,900	104,897	761,038	-	13,026	1,488,861	44,559,428
3	Kab. Indragiri Hulu	3,428,548	15,882,280	1,100,407	95,676,868	-	3,544,821	116,204,376	705,879	42,793	3,189,229	-	118,161	4,056,062	123,688,986
4	Kab. Kampar	3,428,548	18,320,686	2,843,048	275,551,693	-	-	296,715,427	814,253	110,563	9,185,057	-	-	10,109,873	310,253,848
5	Kab. Kuantan Singingi	3,428,548	6,899,932	2,310,539	13,763,887	-	299,690	23,274,048	306,664	89,855	458,796	-	9,989	865,304	27,567,900
6	Kab. Pelalawan	3,428,548	18,061,816	10,534,523	147,334,396	-	-	175,930,735	802,747	409,676	4,911,146	-	-	6,123,569	185,482,852
7	Kab. Rokan Hilir	3,428,548	13,761,254	987,510	328,597,109	-	-	343,345,873	611,612	38,403	10,953,237	-	-	11,603,252	358,377,673
8	Kab. Rokan Hulu	3,428,548	19,667,221	555,550	64,746,065	-	-	84,968,836	874,099	21,605	2,158,202	-	-	3,053,906	91,451,290
9	Kab. Siak	3,428,548	10,374,601	5,624,352	511,781,648	-	36,265	527,816,866	461,094	218,725	17,059,389	-	1,209	17,740,417	548,985,831
10	Kota Dumai	3,428,548	453,652	1,294,211	19,913,926	-	-	21,661,789	20,162	50,330	663,797	-	-	734,289	25,824,626
11	Kota Pekanbaru	3,428,548	667,716	34,262	27,463,162	-	-	28,165,140	29,676	1,332	915,439	-	-	946,447	32,540,135
12	Kab. Kepulauan Meranti	3,428,548	398,410	1,005,672	74,271,302	-	3,896,264	79,571,648	17,707	39,110	2,475,710	-	129,875	2,662,402	85,662,598
V	**Provinsi Jambi**	-	6,232,879	2,265,785	181,617,873	120,102	1,090,138	191,326,777	415,524	132,171	9,080,893	6,005	54,507	9,689,100	201,015,877
1	Kab. Batang Hari	3,428,548	3,556,795	3,037,197	127,527,906	-	388,970	134,510,868	138,320	103,349	3,719,564	-	11,344	3,972,577	141,911,993
2	Kab. Bungo	3,428,548	2,766,445	-	26,608,468	-	2,228,619	31,603,532	107,584	-	776,081	-	65,001	948,666	35,980,746
3	Kab. Kerinci	3,428,548	485,472	-	7,125,189	426,472	-	8,037,133	16,879	-	207,818	12,439	-	239,136	11,704,817
4	Kab. Merangin	3,428,548	1,134,215	-	36,615,727	-	1,011,096	38,761,038	44,109	-	1,067,998	-	29,490	1,141,557	43,331,143
5	Kab. Muaro Jambi	3,428,548	5,934,823	708,558	101,477,747	-	-	108,121,128	230,798	24,110	2,959,768	-	-	3,214,676	114,764,352
6	Kab. Sarolangun	3,428,548	3,718,727	737,093	59,509,203	-	359,368	64,324,391	144,618	25,081	1,735,685	-	10,481	1,915,865	69,668,804
7	Kab. Tanjung Jabung Barat	3,428,548	4,112,337	2,858,470	153,692,803	-	12,014	160,675,624	159,924	97,267	4,482,707	-	350	4,740,248	168,844,420
8	Kab. Tanjung Jabung Timur	3,428,548	904,872	1,096,090	113,880,838	-	1,681	115,883,481	35,190	37,297	3,321,524	-	49	3,394,060	122,706,089
9	Kab. Tebo	3,428,548	2,317,820	625,731	61,383,313	-	358,807	64,685,671	90,138	21,293	1,790,346	-	10,465	1,912,242	70,026,461
10	Kota Jambi	3,428,548	-	-	35,624,055	-	-	35,624,055	-	-	1,039,035	-	-	1,039,035	40,091,638
11	Kota Sungai Penuh	3,428,548	-	-	3,026,242	53,936	-	3,080,178	-	-	88,265	1,573	-	89,838	6,598,564
VI	**Provinsi Sumatera Selatan**	-	13,578,241	3,825,710	543,753,625	436,723	32,481,111	594,075,410	603,478	159,405	15,104,266	12,132	902,253	16,781,534	610,856,944
1	Kab. Lahat	3,428,548	4,383,120	726,629	73,678,492	47,705	38,894,105	117,730,051	194,806	27,753	2,558,281	1,656	1,350,490	4,132,986	125,291,585
2	Kab. Musi Banyuasin	3,428,548	12,053,076	5,354,579	838,389,887	-	4,864,313	860,661,855	535,692	204,515	29,110,760	-	168,900	30,019,867	894,110,270
3	Kab. Musi Rawas	3,428,548	10,052,793	1,772,564	147,823,775	5,793	2,911,156	162,566,081	446,791	67,702	5,132,770	201	101,082	5,748,546	171,743,175
4	Kab. Muara Enim	3,428,548	6,091,110	-	469,897,832	1,421,742	74,402,143	551,812,827	270,716	-	16,315,897	49,366	2,583,408	19,219,387	574,460,762
5	Kab. Ogan Komering Ilir	3,428,548	8,905,485	6,114,217	24,810,813	-	6,431,205	46,261,720	395,800	233,529	861,486	-	223,306	1,714,121	51,404,389
6	Kab. Ogan Komering Ulu	3,428,548	1,048,447	105,050	84,333,169	61,892	1,073,645	86,622,203	46,597	4,012	2,928,235	2,149	37,279	3,018,272	93,069,023
7	Kota Palembang	3,428,548	-	-	14,157,020	-	-	14,157,020	-	-	491,563	-	-	491,563	18,077,131
8	Kota Prabumulih	3,428,548	-	-	71,616,112	-	-	71,616,112	-	-	2,486,671	-	-	2,486,671	77,531,331
9	Kota Pagar Alam	3,428,548	265,244	-	10,270,784	-	-	10,536,028	11,789	-	356,625	-	-	368,414	14,332,990
10	Kota Lubuk Linggau	3,428,548	71,670	-	8,898,205	-	-	8,969,875	3,186	-	308,966	-	-	312,152	12,710,575
11	Kab. Banyuasin	3,428,548	6,886,697	972,051	120,053,983	-	333,455	128,246,186	306,076	37,127	4,168,541	-	11,579	4,523,323	136,198,057
12	Kab. Ogan Ilir	3,428,548	2,950,767	-	67,880,199	-	-	70,830,966	131,146	-	2,356,951	-	-	2,488,097	76,747,611
13	Kab. OKU Timur	3,428,548	1,117,396	123,821	12,721,043	-	983,079	14,945,339	49,662	4,729	441,703	-	34,134	530,228	18,904,115
14	Kab. OKU Selatan	3,428,548	92,723	133,927	11,880,305	135,186	31,341	12,273,482	4,121	5,115	412,510	4,694	1,088	427,528	16,129,558
15	Kab. Empat Lawang	3,428,548	394,430	-	10,118,749	-	-	10,513,179	17,530	-	351,346	-	-	368,876	14,310,603
16	Kab. Penukal Abab Lematang Ilir	3,428,548	-	-	140,406,480	-	-	140,406,480	-	-	4,875,225	-	-	4,875,225	148,710,253
17	Kab. Musi Rawas Utara	3,428,548	-	-	68,077,647	74,573	-	68,152,220	-	-	2,363,808	2,590	-	2,366,398	73,947,166
VII	**Provinsi Bengkulu**	-	2,869,999	-	19,495,509	181,242	516,838	23,063,588	127,556	-	649,851	6,041	17,229	800,677	23,864,265
1	Kab. Bengkulu Selatan	3,428,548	13,912	-	6,356,670	-	-	6,370,582	618	-	211,889	-	-	212,507	10,011,637
2	Kab. Bengkulu Utara	3,428,548	3,976,586	-	8,432,905	167,215	1,886,904	14,463,610	176,738	-	281,096	5,574	62,897	526,305	18,418,463
3	Kab. Rejang Lebong	3,428,548	34,771	-	6,979,348	48,156	-	7,062,275	1,545	-	232,645	1,605	-	235,795	10,726,618
4	Kota Bengkulu	3,428,548	-	-	6,131,809	-	-	6,131,809	-	-	204,394	-	-	204,394	9,764,751
5	Kab. Kaur	3,428,548	188	-	9,406,783	36,721	-	9,443,692	8	-	313,560	1,224	-	314,792	13,187,032
6	Kab. Seluma	3,428,548	1,194,944	-	8,780,921	-	-	9,975,865	53,109	-	292,697	-	-	345,806	13,750,219
7	Kab. Mukomuko	3,428,548	4,930,188	-	10,202,328	327	39,079	15,171,922	219,120	-	340,077	11	1,302	560,510	19,160,980
8	Kab. Lebong	3,428,548	28,040	-	9,090,566	472,545	-	9,591,151	1,246	-	303,019	15,751	-	320,016	13,339,715
9	Kab. Kepahiang	3,428,548	71,380	-	7,690,422	-	-	7,761,802	3,173	-	256,347	-	-	259,520	11,449,870
10	Kab. Bengkulu Tengah	3,428,548	1,229,989	-	4,910,286	-	141,365	6,281,640	54,666	-	163,676	-	4,712	223,054	9,933,242
VIII	**Provinsi Lampung**	-	7,728,658	198,574	48,463,324	1,602,355	385,043	58,377,954	343,497	7,723	1,615,443	53,412	12,835	2,032,910	60,410,864
1	Kab. Lampung Barat	3,428,548	209,173	-	6,802,097	-	-	7,011,270	9,297	-	226,737	-	-	236,034	10,675,852
2	Kab. Lampung Selatan	3,428,548	3,247,510	-	11,727,657	-	263,875	15,239,042	144,334	-	390,921	-	8,796	544,051	19,211,641
3	Kab. Lampung Tengah	3,428,548	9,830,970	-	21,319,837	-	-	31,150,807	436,931	-	710,661	-	-	1,147,592	35,726,947
4	Kab. Lampung Utara	3,428,548	2,276,484	-	12,834,403	-	-	15,110,887	101,177	-	427,814	-	-	528,991	19,068,426
5	Kab. Lampung Timur	3,428,548	322,971	-	55,103,595	-	-	55,426,566	14,354	-	1,836,786	-	-	1,851,140	60,706,254
6	Kab. Tanggamus	3,428,548	221,591	-	8,903,048	6,409,422	1,188,295	16,722,356	9,848	-	296,768	213,648	39,610	559,874	20,710,778
7	Kab. Tulang Bawang	3,428,548	6,115,849	-	16,997,198	-	-	23,113,047	271,815	-	566,573	-	-	838,388	27,379,983
8	Kab. Way Kanan	3,428,548	2,724,355	316,979	13,991,788	-	17,956	17,051,078	121,082	12,327	466,393	-	598	600,400	21,080,026
9	Kota Bandar Lampung	3,428,548	-	-	9,360,183	-	-	9,360,183	-	-	312,006	-	-	312,006	13,100,737
10	Kota Metro	3,428,548	-	-	7,899,555	-	-	7,899,555	-	-	263,319	-	-	263,319	11,591,422
11	Kab. Pesawaran	3,428,548	811,556	-	6,424,457	-	70,045	7,306,058	36,069	-	214,149	-	2,335	252,553	10,987,159
12	Kab. Pringsewu	3,428,548	-	-	4,925,606	-	-	4,925,606	-	-	164,187	-	-	164,187	8,518,341
13	Kab. Mesuji	3,428,548	4,187,553	477,321	5,129,398	-	-	9,794,272	186,114	18,562	170,980	-	-	375,656	13,598,476
14	Kab. Tulang Bawang Barat	3,428,548	966,619	-	6,808,215	-	-	7,774,834	42,960	-	226,941	-	-	269,901	11,473,283
15	Kab. Pesisir Barat	3,428,548	-	-	5,626,250	-	-	5,626,250	-	-	187,542	-	-	187,542	9,242,340
IX	**Provinsi DKI Jakarta**	3,428,548	-	-	170,557,550	-	-	170,557,550	-	-	5,685,252	-	-	5,685,252	179,671,350
X	**Provinsi Jawa Barat**	-	9,409,066	2,478,121	191,274,958	23,395,294	3,557,052	230,114,491	104,548	24,094	1,593,957	194,960	29,642	1,947,201	232,061,692
1	Kab. Bandung	3,428,548	7,772,868	33,984	18,244,644	38,591,080	-	64,642,576	410,235	1,569	722,184	1,527,564	-	2,661,552	70,732,676
2	Kab. Bekasi	3,428,548	-	-	88,469,585	-	-	88,469,585	-	-	3,501,921	-	-	3,501,921	95,400,054
3	Kab. Bogor	3,428,548	2,824,434	1,893,292	35,605,885	17,163,952	10,268,036	67,755,599	149,068	87,433	1,409,400	679,406	406,443	2,731,750	73,915,897
4	Kab. Ciamis	3,428,548	582,944	685,630	12,662,356	6,471	-	13,937,401	30,767	31,663	501,219	256	-	563,905	17,929,854

www.peraturan.go.id

LAMPIRAN VII
RINCIAN DANA BAGI HASIL PAJAK BUMI DAN BANGUNAN
MENURUT PROVINSI/KABUPATEN/KOTA

(dalam ribuan rupiah)

No.	Nama Daerah	Bagi Rata	Bagian Daerah					Jumlah	Biaya Pemungutan					Jumlah	Total
			Sektor						Sektor						
			Perkebunan	Perhutanan	Pertambangan				Perkebunan	Perhutanan	Pertambangan				
					Minyak Bumi dan Gas Bumi	Panas Bumi	Non Minyak Bumi Gas Bumi Lainnya				Minyak Bumi dan Gas Bumi	Panas Bumi	Non Minyak Bumi Gas Bumi Lainnya		
1	2	3	4	5	6	7	8	9 = (4+5+6+7+8)	10	11	12	13	14	15=(10+11+12+13+14)	16=(3+9+15)
5	Kab. Cianjur	3,428,548	2,956,929	725,469	22,058,293	67,398	-	25,808,089	156,060	33,502	873,141	2,668	-	1,065,371	30,302,008
6	Kab. Cirebon	3,428,548	-	202,730	27,493,192	-	1,180,983	28,876,905	-	9,362	1,088,272	-	46,747	1,144,381	33,449,834
7	Kab. Garut	3,428,548	4,920,299	214,142	20,970,066	21,728,210	2,779,192	50,611,909	259,683	9,889	830,065	860,075	110,010	2,069,722	56,110,179
8	Kab. Indramayu	3,428,548	2,023,944	1,202,284	138,248,483	-	-	141,474,711	106,819	55,522	5,472,336	-	-	5,634,677	150,537,936
9	Kab. Karawang	3,428,548	-	-	90,230,758	-	-	90,230,758	-	-	3,571,634	-	-	3,571,634	97,230,940
10	Kab. Kuningan	3,428,548	50,072	-	13,030,361	-	-	13,080,433	2,643	-	515,785	-	-	518,428	17,027,409
11	Kab. Majalengka	3,428,548	1,590,690	-	33,141,877	7,388	-	34,739,955	83,953	-	1,311,866	292	-	1,396,111	39,564,614
12	Kab. Purwakarta	3,428,548	519,548	864,715	11,884,022	-	-	13,268,285	27,421	39,933	470,409	-	-	537,763	17,234,596
13	Kab. Subang	3,428,548	5,534,959	460,562	98,661,307	-	-	104,656,828	292,123	21,269	3,905,344	-	-	4,218,736	112,304,112
14	Kab. Sukabumi	3,428,548	5,931,069	1,519,541	21,066,624	15,613,842	-	44,131,076	313,028	70,173	833,887	618,048	-	1,835,136	49,394,760
15	Kab. Sumedang	3,428,548	-	-	12,370,156	4,009	-	12,374,165	-	-	489,652	159	-	489,811	16,292,524
16	Kab. Tasikmalaya	3,428,548	950,963	993,874	17,386,223	357,086	-	19,688,146	50,190	45,898	688,204	14,135	-	798,427	23,915,121
17	Kota Bandung	3,428,548	-	-	16,836,557	-	-	16,836,557	-	-	666,447	-	-	666,447	20,931,552
18	Kota Bekasi	3,428,548	-	-	17,988,768	-	-	17,988,768	-	-	712,056	-	-	712,056	22,129,372
19	Kota Bogor	3,428,548	-	-	8,335,499	336	-	8,335,835	-	-	329,947	13	-	329,960	12,094,343
20	Kota Cirebon	3,428,548	-	-	6,404,907	-	-	6,404,907	-	-	253,527	-	-	253,527	10,086,982
21	Kota Depok	3,428,548	-	-	13,376,599	-	-	13,376,599	-	-	529,491	-	-	529,491	17,334,638
22	Kota Sukabumi	3,428,548	-	-	3,973,414	-	-	3,973,414	-	-	157,281	-	-	157,281	7,559,243
23	Kota Tasikmalaya	3,428,548	-	-	6,358,770	-	-	6,358,770	-	-	251,701	-	-	251,701	10,039,019
24	Kota Cimahi	3,428,548	-	-	5,087,840	-	-	5,087,840	-	-	201,394	-	-	201,394	8,717,782
25	Kota Banjar	3,428,548	89,698	74,747	8,903,276	-	-	9,067,721	4,734	3,452	352,421	-	-	360,607	12,856,876
26	Kab. Bandung Barat	3,428,548	1,579,923	412,680	10,228,095	41,405	-	12,262,103	83,385	19,058	404,862	1,639	-	508,944	16,199,595
27	Kab. Pangandaran	3,428,548	307,928	628,839	6,082,270	-	-	7,019,037	16,252	29,040	240,757	-	-	286,049	10,733,634
XI	**Provinsi Jawa Tengah**	-	5,031,582	8,837,662	109,561,057	1,057,202	332,254	124,819,757	186,447	343,688	3,652,038	35,241	11,075	4,228,489	129,048,246
1	Kab. Banjarnegara	3,428,548	17,704	898,836	9,550,391	1,488,995	-	11,955,926	819	34,955	318,347	49,633	-	403,754	15,788,228
2	Kab. Banyumas	3,428,548	1,400,378	1,229,254	18,352,451	-	-	20,982,083	64,826	47,804	611,749	-	-	724,379	25,135,010
3	Kab. Batang	3,428,548	3,080,564	852,939	8,430,229	21,611	-	12,385,343	142,604	33,170	281,007	720	-	457,501	16,271,392
4	Kab. Blora	3,428,548	-	6,156,382	51,845,237	-	-	58,001,619	-	239,415	1,728,175	-	-	1,967,590	63,397,757
5	Kab. Boyolali	3,428,548	-	1,011,400	9,858,449	-	-	10,869,849	-	39,333	328,615	-	-	367,948	14,666,345
6	Kab. Brebes	3,428,548	646,443	2,281,090	17,822,228	-	12,542	20,762,303	29,925	88,709	594,074	-	418	713,126	24,903,977
7	Kab. Cilacap	3,428,548	2,752,491	2,421,680	23,574,810	-	986,092	29,735,073	127,418	94,177	785,827	-	32,870	1,040,292	34,203,913
8	Kab. Demak	3,428,548	-	317,441	20,831,965	-	-	21,149,406	-	12,345	694,399	-	-	706,744	25,284,698
9	Kab. Grobogan	3,428,548	-	5,001,550	23,085,106	-	-	28,086,656	-	194,505	769,503	-	-	964,008	32,479,212
10	Kab. Jepara	3,428,548	2,179,629	675,938	13,589,605	-	77,430	16,522,602	100,899	26,287	452,987	-	2,581	582,754	20,533,904
11	Kab. Karanganyar	3,428,548	1,101,710	21,545	8,569,505	-	-	9,692,760	51,000	838	285,650	-	-	337,488	13,458,796
12	Kab. Kebumen	3,428,548	-	877,754	13,398,653	-	-	14,276,407	-	34,134	446,622	-	-	480,756	18,185,711
13	Kab. Kendal	3,428,548	3,101,559	1,230,438	13,742,752	8,704	-	18,083,453	143,576	47,850	458,092	290	-	649,808	22,161,809
14	Kab. Klaten	3,428,548	-	59,726	11,042,646	-	-	11,102,372	-	2,323	368,088	-	-	370,411	14,901,331
15	Kab. Kudus	3,428,548	199,054	134,333	16,266,427	-	-	16,599,814	9,215	5,224	542,215	-	-	556,654	20,585,016
16	Kab. Magelang	3,428,548	31,895	234,342	11,047,084	-	-	11,313,321	1,476	9,113	368,236	-	-	378,825	15,120,694
17	Kab. Pati	3,428,548	788,154	1,846,667	14,593,754	-	-	17,228,575	36,485	71,815	486,458	-	-	594,758	21,251,881
18	Kab. Pekalongan	3,428,548	1,033,048	1,000,543	9,621,914	33,166	-	11,688,671	47,821	38,911	320,730	1,105	-	408,567	15,525,786
19	Kab. Pemalang	3,428,548	636,155	1,456,237	13,277,155	-	-	15,369,547	29,448	56,631	442,572	-	-	528,651	19,326,746
20	Kab. Purbalingga	3,428,548	4,449	330,019	8,876,757	-	-	9,211,225	206	12,834	295,892	-	-	308,932	12,948,705
21	Kab. Purworejo	3,428,548	-	468,434	8,532,855	-	-	9,001,289	-	18,217	284,428	-	-	302,645	12,732,482
22	Kab. Rembang	3,428,548	-	1,828,724	12,067,381	-	184,666	14,080,971	-	71,118	402,253	-	6,155	479,526	17,989,045
23	Kab. Semarang	3,428,548	1,701,174	640,024	9,073,161	-	-	11,414,359	78,750	24,889	302,439	-	-	406,078	15,248,985
24	Kab. Sragen	3,428,548	430,980	361,429	9,594,981	-	-	10,387,390	19,950	14,056	319,833	-	-	353,839	14,169,777
25	Kab. Sukoharjo	3,428,548	242,110	5,016	8,462,872	-	-	8,709,998	11,207	195	282,096	-	-	293,498	12,432,044
26	Kab. Tegal	3,428,548	207,111	1,347,124	13,936,565	-	43,281	15,534,081	9,587	52,388	464,553	-	1,442	527,970	19,490,599
27	Kab. Temanggung	3,428,548	335,845	574,947	7,412,940	4,340	-	8,327,472	15,546	22,336	247,098	145	-	285,125	12,041,145
28	Kab. Wonogiri	3,428,548	-	610,578	11,022,559	-	25,002	11,658,139	-	23,745	367,418	-	833	391,996	15,478,683
29	Kab. Wonosobo	3,428,548	218,552	954,463	8,895,152	2,671,989	-	12,740,156	10,117	37,118	296,505	89,066	-	432,806	16,601,510
30	Kota Magelang	3,428,548	-	-	2,315,118	-	-	2,315,118	-	-	77,171	-	-	77,171	5,820,837
31	Kota Pekalongan	3,428,548	-	-	4,473,291	-	-	4,473,291	-	-	149,110	-	-	149,110	8,050,949
32	Kota Salatiga	3,428,548	17,323	-	2,725,165	-	-	2,742,488	802	-	90,839	-	-	91,641	6,262,677
33	Kota Semarang	3,428,548	-	522,387	14,284,841	-	-	14,807,228	-	20,315	476,161	-	-	496,476	18,732,252
34	Kota Surakarta	3,428,548	-	-	4,894,777	-	-	4,894,777	-	-	163,160	-	-	163,160	8,486,485
35	Kota Tegal	3,428,548	-	-	3,175,248	-	-	3,175,248	-	-	105,841	-	-	105,841	6,709,637
XII	**Provinsi DI Yogyakarta**	-	821	-	9,266,552	-	7,956	9,275,329	30	-	308,886	-	265	309,181	9,584,510
1	Kab. Bantul	3,428,548	-	-	8,725,116	-	-	8,725,116	-	-	290,838	-	-	290,838	12,444,502
2	Kab. Gunung Kidul	3,428,548	-	-	8,837,562	-	-	8,837,562	-	-	294,585	-	-	294,585	12,560,695
3	Kab. Kulon Progo	3,428,548	3,287	-	5,274,017	-	31,823	5,309,127	152	-	175,800	-	1,061	177,013	8,914,688
4	Kab. Sleman	3,428,548	-	-	10,121,410	-	-	10,121,410	-	-	337,381	-	-	337,381	13,887,339
5	Kota Yogyakarta	3,428,548	-	-	4,108,110	-	-	4,108,110	-	-	136,937	-	-	136,937	7,673,595
XIII	**Provinsi Jawa Timur**	-	7,622,649	8,989,233	222,457,194	48,319	15,437	239,132,822	211,739	249,702	6,179,367	1,341	429	6,642,578	245,775,400
1	Kab. Bangkalan	3,428,548	-	70,833	40,478,378	-	-	40,549,211	-	2,952	1,405,499	-	-	1,408,451	45,386,210
2	Kab. Banyuwangi	3,428,548	7,111,656	3,066,694	18,007,323	-	-	28,185,673	345,706	127,779	625,255	-	-	1,098,740	32,712,961
3	Kab. Blitar	3,428,548	1,157,294	701,217	11,953,704	-	-	13,812,215	56,257	29,217	415,059	-	-	500,533	17,741,296
4	Kab. Bojonegoro	3,428,548	-	3,934,340	208,930,485	-	-	212,864,825	-	163,931	7,254,531	-	-	7,418,462	223,711,835
5	Kab. Bondowoso	3,428,548	1,297,774	828,828	8,389,757	25,943	-	10,542,302	63,086	34,535	291,311	901	-	389,833	14,360,683
6	Kab. Gresik	3,428,548	-	6,188	55,422,033	-	-	55,428,221	-	258	1,924,377	-	-	1,924,635	60,781,404
7	Kab. Jember	3,428,548	7,248,565	1,141,771	19,874,536	85,007	-	28,349,879	352,361	47,573	690,088	2,952	-	1,092,974	32,871,401
8	Kab. Jombang	3,428,548	70,567	997,912	20,924,927	-	57,742	22,051,148	3,431	41,580	726,560	-	2,004	773,575	26,253,271
9	Kab. Kediri	3,428,548	4,307,469	776,340	15,668,645	-	-	20,752,454	209,391	32,347	544,050	-	-	785,788	24,966,790
10	Kab. Lamongan	3,428,548	-	1,740,119	24,066,127	-	-	25,806,246	-	72,505	835,630	-	-	908,135	30,142,929
11	Kab. Lumajang	3,428,548	3,222,346	717,234	11,288,842	-	-	15,228,422	156,642	29,885	391,974	-	-	578,501	19,235,471

www.peraturan.go.id

LAMPIRAN VII
RINCIAN DANA BAGI HASIL PAJAK BUMI DAN BANGUNAN
MENURUT PROVINSI/KABUPATEN/KOTA

(dalam ribuan rupiah)

No.	Nama Daerah	Bagi Rata	Bagian Daerah					Jumlah	Biaya Pemungutan					Jumlah	Total
			Sektor						Sektor						
			Perkebunan	Perhutanan	Pertambangan				Perkebunan	Perhutanan	Pertambangan				
					Minyak Bumi dan Gas Bumi	Panas Bumi	Non Minyak Bumi Gas Bumi Lainnya				Minyak Bumi dan Gas Bumi	Panas Bumi	Non Minyak Bumi Gas Bumi Lainnya		
1	2	3	4	5	6	7	8	9 = (4+5+6+7+8)	10	11	12	13	14	15=(10+11+12+13+14)	16=(3+9+15)
12	Kab. Madiun	3,428,548	184,113	2,109,150	8,503,595	-	-	10,796,858	8,950	87,881	295,264	-	-	392,095	14,617,501
13	Kab. Magetan	3,428,548	-	200,815	7,642,065	-	-	7,842,880	-	8,367	265,349	-	-	273,716	11,545,144
14	Kab. Malang	3,428,548	3,817,908	5,249,252	20,141,456	-	-	29,208,616	185,593	218,719	699,356	-	-	1,103,668	33,740,832
15	Kab. Mojokerto	3,428,548	47,470	761,273	23,298,831	-	1,160	24,108,734	2,308	31,720	808,987	-	40	843,055	28,380,337
16	Kab. Nganjuk	3,428,548	-	1,753,076	14,713,073	-	-	16,466,149	-	73,045	510,871	-	-	583,916	20,478,613
17	Kab. Ngawi	3,428,548	554,345	2,444,722	10,918,567	-	-	13,917,634	26,947	101,863	379,117	-	-	507,927	17,854,109
18	Kab. Pacitan	3,428,548	-	117,500	8,825,913	-	-	8,943,413	-	4,896	306,455	-	-	311,351	12,683,312
19	Kab. Pamekasan	3,428,548	-	581,826	20,166,502	-	-	20,748,328	-	24,242	700,226	-	-	724,468	24,901,344
20	Kab. Pasuruan	3,428,548	252,497	473,982	25,448,610	-	-	26,175,089	12,274	19,749	883,632	-	-	915,655	30,519,292
21	Kab. Ponorogo	3,428,548	10,067	2,995,864	12,538,917	-	-	15,544,848	489	124,827	435,379	-	-	560,695	19,534,091
22	Kab. Probolinggo	3,428,548	245,644	782,430	19,251,748	61,688	-	20,341,510	11,941	32,601	668,463	2,141	-	715,146	24,485,204
23	Kab. Sampang	3,428,548	-	16,122	27,474,126	-	-	27,490,248	-	672	953,963	-	-	954,635	31,873,431
24	Kab. Sidoarjo	3,428,548	-	-	45,000,464	-	-	45,000,464	-	-	1,562,517	-	-	1,562,517	49,991,529
25	Kab. Situbondo	3,428,548	732,539	903,873	11,788,259	20,638	-	13,445,309	35,610	37,661	409,314	716	-	483,301	17,357,158
26	Kab. Sumenep	3,428,548	-	-	74,524,813	-	-	74,524,813	-	-	2,587,668	-	-	2,587,668	80,541,029
27	Kab. Trenggalek	3,428,548	179,947	-	9,544,571	-	814	9,725,332	8,748	-	331,408	-	28	340,184	13,494,064
28	Kab. Tuban	3,428,548	-	3,199,963	44,356,823	-	-	47,556,786	-	133,332	1,540,168	-	-	1,673,500	52,658,834
29	Kab. Tulungagung	3,428,548	31,939	-	10,222,712	-	-	10,254,651	1,552	-	354,956	-	-	356,508	14,039,707
30	Kota Blitar	3,428,548	-	4,747	3,082,768	-	-	3,087,515	-	198	107,040	-	-	107,238	6,623,301
31	Kota Kediri	3,428,548	-	58,615	3,356,917	-	-	3,415,532	-	2,443	116,559	-	-	119,002	6,963,082
32	Kota Madiun	3,428,548	-	-	3,196,888	-	-	3,196,888	-	-	111,003	-	-	111,003	6,736,439
33	Kota Malang	3,428,548	-	-	7,262,015	-	-	7,262,015	-	-	252,153	-	-	252,153	10,942,716
34	Kota Mojokerto	3,428,548	-	-	4,064,544	-	2,034	4,066,578	-	-	141,130	-	71	141,201	7,636,327
35	Kota Pasuruan	3,428,548	-	-	4,374,116	-	-	4,374,116	-	-	151,879	-	-	151,879	7,954,543
36	Kota Probolinggo	3,428,548	18,461	-	8,239,080	-	-	8,257,541	897	-	286,080	-	-	286,977	11,973,066
37	Kota Surabaya	3,428,548	-	-	21,686,085	-	-	21,686,085	-	-	752,989	-	-	752,989	25,867,622
38	Kota Batu	3,428,548	-	322,238	5,200,521	-	-	5,522,759	-	13,427	180,573	-	-	194,000	9,145,307
XIV	**Provinsi Kalimantan Barat**	-	13,388,299	3,731,784	44,955,122	-	5,441,800	67,517,005	371,896	103,661	1,248,753	-	151,162	1,875,472	69,392,477
1	Kab. Bengkayang	3,428,548	5,050,644	-	10,707,360	-	38,749	15,796,753	245,518	-	371,783	-	1,345	618,646	19,843,947
2	Kab. Landak	3,428,548	5,761,296	161,455	15,963,618	-	286,310	22,172,679	280,063	6,727	554,292	-	9,941	851,023	26,452,250
3	Kab. Kapuas Hulu	3,428,548	1,655,745	1,112,918	23,105,357	-	9,031	25,883,051	80,488	46,371	802,269	-	313	929,441	30,241,040
4	Kab. Ketapang	3,428,548	16,916,533	5,680,069	16,814,121	-	11,129,603	52,540,326	822,332	236,670	653,268	-	386,444	2,098,714	58,067,588
5	Kab. Mempawah	3,428,548	427,445	-	5,810,988	-	145,532	6,383,965	20,779	-	201,770	-	5,053	227,602	10,040,115
6	Kab. Sambas	3,428,548	3,781,881	-	13,838,853	-	1,382,867	19,003,601	183,841	-	480,516	-	48,016	712,373	23,144,522
7	Kab. Sanggau	3,428,548	9,663,139	659,685	15,377,071	-	7,985,573	33,685,468	469,736	27,487	533,926	-	277,277	1,308,426	38,422,442
8	Kab. Sintang	3,428,548	2,270,775	4,230,366	18,106,619	-	766,755	25,374,515	110,385	176,266	628,702	-	26,624	941,977	29,745,040
9	Kota Pontianak	3,428,548	-	-	8,709,792	-	-	8,709,792	-	-	302,423	-	-	302,423	12,440,763
10	Kota Singkawang	3,428,548	-	-	5,691,143	-	241	5,691,384	-	-	197,609	-	8	197,617	9,317,549
11	Kab. Sekadau	3,428,548	3,088,659	267,422	10,633,500	-	-	13,989,581	150,143	11,142	369,219	-	-	530,504	17,948,633
12	Kab. Melawi	3,428,548	498,986	1,819,072	13,537,368	-	-	15,855,426	24,256	75,795	470,048	-	-	570,099	19,854,073
13	Kab. Kayong Utara	3,428,548	1,509,105	459,932	9,109,522	-	-	11,078,559	73,359	19,164	316,303	-	-	408,826	14,915,933
14	Kab. Kubu Raya	3,428,548	2,928,987	536,211	10,415,178	-	22,546	13,902,922	142,381	22,342	361,638	-	783	527,144	17,858,614
XV	**Provinsi Kalimantan Tengah**	-	16,324,606	6,200,017	55,030,308	-	8,015,469	85,570,400	1,088,308	361,666	2,751,516	-	400,775	4,602,265	90,172,665
1	Kab. Barito Selatan	3,428,548	-	351,715	22,543,232	-	2,294,008	25,188,955	-	11,968	657,511	-	66,909	736,388	29,353,891
2	Kab. Barito Utara	3,428,548	2,026,494	2,289,998	27,113,154	-	5,690,259	37,119,905	78,808	77,923	790,800	-	165,966	1,113,497	41,661,950
3	Kab. Kapuas	3,428,548	2,686,973	1,635,994	17,006,736	-	-	21,329,703	104,494	55,669	496,029	-	-	656,192	25,414,443
4	Kab. Kotawaringin Barat	3,428,548	5,187,571	1,484,315	11,132,226	-	306,938	18,111,050	201,739	50,598	324,690	-	8,952	585,889	22,125,487
5	Kab. Kotawaringin Timur	3,428,548	25,615,077	2,275,926	16,023,143	-	-	43,914,146	996,142	77,445	467,342	-	-	1,540,929	48,883,623
6	Kota Palangkaraya	3,428,548	-	-	5,941,744	-	-	5,941,744	-	-	173,301	-	-	173,301	9,543,593
7	Kab. Katingan	3,428,548	5,592,849	3,328,992	14,457,420	-	-	23,379,261	217,500	113,278	421,675	-	-	752,453	27,560,262
8	Kab. Seruyan	3,428,548	17,689,610	5,287,332	17,991,305	-	-	40,968,247	687,929	179,916	524,747	-	-	1,392,592	45,789,387
9	Kab. Sukamara	3,428,548	114,975	-	12,133,684	-	-	12,248,659	4,471	-	353,899	-	-	358,370	16,035,577
10	Kab. Lamandau	3,428,548	3,417,092	3,167,827	12,988,677	-	10,782	19,584,378	132,887	107,795	378,837	-	314	619,833	23,632,759
11	Kab. Gunung Mas	3,428,548	883,032	1,865,698	12,398,423	-	-	15,147,153	34,341	63,486	361,621	-	-	459,448	19,035,149
12	Kab. Pulang Pisau	3,428,548	170,945	-	11,857,834	-	-	12,028,779	6,647	-	345,854	-	-	352,501	15,809,828
13	Kab. Murung Raya	3,428,548	66,285	3,112,268	20,843,652	-	14,421,289	38,443,494	2,578	105,903	607,940	-	420,621	1,137,042	43,009,084
14	Kab. Barito Timur	3,428,548	1,847,514	-	17,690,003	-	9,338,596	28,876,113	71,848	-	515,959	-	272,376	860,183	33,164,844
XVI	**Provinsi Kalimantan Selatan**	-	8,151,209	532,855	56,452,648	-	13,564,006	78,700,718	362,274	20,723	1,881,753	-	452,134	2,716,884	81,417,602
1	Kab. Banjar	3,428,548	1,911,732	225,905	25,280,685	-	6,103,999	33,522,321	84,966	8,785	842,689	-	203,466	1,139,906	38,090,775
2	Kab. Barito Kuala	3,428,548	4,438,896	-	16,280,106	-	-	20,719,002	197,284	-	542,671	-	-	739,955	24,887,505
3	Kab. Hulu Sungai Selatan	3,428,548	565,244	8,850	12,755,442	-	59,934	13,389,470	25,121	344	425,181	-	1,997	452,643	17,270,661
4	Kab. Hulu Sungai Tengah	3,428,548	-	-	10,295,542	-	-	10,295,542	-	-	343,185	-	-	343,185	14,067,275
5	Kab. Hulu Sungai Utara	3,428,548	540,430	-	13,274,985	-	-	13,815,415	24,019	-	442,500	-	-	466,519	17,710,482
6	Kab. Kotabaru	3,428,548	12,430,366	-	11,888,483	-	-	24,318,849	552,461	-	396,283	-	-	948,744	28,696,141
7	Kab. Tabalong	3,428,548	1,336,657	926,524	64,862,691	-	5,288,579	72,414,451	59,407	36,032	2,162,090	-	176,286	2,433,815	78,276,814
8	Kab. Tanah Laut	3,428,548	3,530,291	376,300	10,398,779	-	21,668,238	35,933,608	156,902	14,634	345,292	-	722,275	1,239,103	40,601,259
9	Kab. Tapin	3,428,548	1,793,029	7,595	15,984,385	-	15,572,689	33,357,698	79,690	295	532,812	-	519,089	1,131,886	37,918,132
10	Kota Banjarbaru	3,428,548	-	-	6,300,282	-	136,014	6,436,296	-	-	210,009	-	4,534	214,543	10,079,387
11	Kota Banjarmasin	3,428,548	-	-	7,490,631	-	-	7,490,631	-	-	249,688	-	-	249,688	11,168,867
12	Kab. Balangan	3,428,548	291,407	-	21,677,260	-	5,426,572	27,395,239	12,952	-	722,575	-	180,886	916,413	31,740,200
13	Kab. Tanah Bumbu	3,428,548	5,766,787	586,250	9,361,317	-	-	15,714,354	256,302	22,799	312,044	-	-	591,145	19,734,047
XVII	**Provinsi Kalimantan Timur**	-	14,962,404	4,227,910	470,605,040	-	25,235,729	515,031,083	415,623	117,443	13,072,362	-	700,992	14,306,420	529,337,503
1	Kab. Berau	3,428,548	4,443,645	4,376,582	25,207,675	-	6,001,841	40,029,743	216,010	182,358	875,266	-	208,398	1,482,032	44,940,323
2	Kab. Kutai Kartanegara	3,428,548	13,314,945	3,086,432	1,308,438,027	-	52,562,064	1,377,401,468	647,254	128,601	45,431,876	-	1,825,072	48,032,803	1,428,862,819
3	Kab. Kutai Barat	3,428,548	4,072,805	4,412,523	23,392,830	-	14,308,253	46,186,411	197,983	183,855	812,251	-	496,815	1,690,904	51,305,863
4	Kab. Kutai Timur	3,428,548	22,739,704	2,353,789	120,001,722	-	14,269,844	159,365,059	1,105,403	98,074	4,166,727	-	495,480	5,865,684	168,659,291
5	Kab. Paser	3,428,548	11,285,868	1,408,275	51,057,466	-	5,837,482	69,589,091	548,619	58,678	1,772,828	-	202,690	2,582,815	75,600,454

www.peraturan.go.id

LAMPIRAN VII
RINCIAN DANA BAGI HASIL PAJAK BUMI DAN BANGUNAN
MENURUT PROVINSI/KABUPATEN/KOTA

(dalam ribuan rupiah)

No.	Nama Daerah	Bagi Rata	Bagian Daerah					Jumlah	Biaya Pemungutan					Jumlah	Total
			Sektor						Sektor						
			Perkebunan	Perhutanan	Pertambangan				Perkebunan	Perhutanan	Pertambangan				
					Minyak Bumi dan Gas Bumi	Panas Bumi	Non Minyak Bumi Gas Bumi Lainnya				Minyak Bumi dan Gas Bumi	Panas Bumi	Non Minyak Bumi Gas Bumi Lainnya		
1	2	3	4	5	6	7	8	9 = (4+5+6+7+8)	10	11	12	13	14	15=(10+11+12+13+14)	16=(3+9+15)
6	Kota Balikpapan	3,428,548	-	-	28,737,335	-	4,878	28,742,213	-	-	997,824	-	169	997,993	33,168,754
7	Kota Bontang	3,428,548	-	-	148,394,890	-	-	148,394,890	-	-	5,152,600	-	-	5,152,600	156,976,038
8	Kota Samarinda	3,428,548	-	-	65,940,336	-	6,181,377	72,121,713	-	-	2,289,595	-	214,631	2,504,226	78,054,487
9	Kab. Penajam Paser Utara	3,428,548	3,992,650	1,274,037	100,225,409	-	1,777,181	107,269,277	194,087	53,085	3,480,049	-	61,707	3,788,928	114,486,753
10	Kab. Mahakam Ulu	3,428,548	-	-	11,024,480	-	-	11,024,480	-	-	382,795	-	-	382,795	14,835,823
XVIII	**Provinsi Sulawesi Utara**	-	96,152	21,045	21,137,292	1,412,879	-	22,667,368	5,342	1,169	880,720	58,870	-	946,101	23,613,469
1	Kab. Bolaang Mongondow	3,428,548	90,135	-	5,919,168	160,163	-	6,169,466	3,756	-	184,974	5,005	-	193,735	9,791,749
2	Kab. Minahasa	3,428,548	-	-	7,844,955	1,644,420	-	9,489,375	-	-	245,155	51,388	-	296,543	13,214,466
3	Kab. Kepulauan Sangihe	3,428,548	-	-	3,459,614	-	-	3,459,614	-	-	108,113	-	-	108,113	6,996,275
4	Kota Bitung	3,428,548	11,603	-	5,424,370	-	-	5,435,973	483	-	169,511	-	-	169,994	9,034,515
5	Kota Manado	3,428,548	-	-	5,208,071	5,290	-	5,213,361	-	-	162,753	165	-	162,918	8,804,827
6	Kab. Kepulauan Talaud	3,428,548	-	-	6,910,103	-	-	6,910,103	-	-	215,941	-	-	215,941	10,554,592
7	Kab. Minahasa Selatan	3,428,548	115,947	-	6,794,896	12,929	-	6,923,772	4,831	-	212,340	404	-	217,575	10,569,895
8	Kota Tomohon	3,428,548	-	-	7,177,791	3,355,542	-	10,533,333	-	-	224,306	104,861	-	329,167	14,291,048
9	Kab. Minahasa Utara	3,428,548	91,450	-	6,935,738	31,155	-	7,058,343	3,811	-	216,741	973	-	221,525	10,708,416
10	Kab. Kep. Siau Tagulandang Biaro	3,428,548	-	-	4,271,966	-	-	4,271,966	-	-	133,499	-	-	133,499	7,834,013
11	Kota Kotamobagu	3,428,548	-	-	4,814,737	12,352	-	4,827,089	-	-	150,461	386	-	150,847	8,406,484
12	Kab. Bolaang Mongondow Utara	3,428,548	17,217	-	6,229,483	-	-	6,246,700	717	-	194,672	-	-	195,389	9,870,637
13	Kab. Minahasa Tenggara	3,428,548	40,449	-	6,186,028	998	-	6,227,475	1,685	-	193,313	31	-	195,029	9,851,052
14	Kab. Bolaang Mongondow Timur	3,428,548	14,221	-	3,453,246	428,675	-	3,896,142	592	-	107,914	13,396	-	121,902	7,446,592
15	Kab. Bolaang Mongondow Selatan	3,428,548	3,586	84,179	3,919,004	-	-	4,006,769	149	2,923	122,469	-	-	125,541	7,560,858
XIX	**Provinsi Sulawesi Tengah**	-	1,489,465	-	32,916,841	-	-	34,406,306	66,199	-	1,097,229	-	-	1,163,428	35,569,734
1	Kab. Banggai	3,428,548	1,310,248	-	19,294,110	-	-	20,604,358	58,234	-	643,137	-	-	701,371	24,734,277
2	Kab. Banggai Kepulauan	3,428,548	1,036	-	7,315,852	-	-	7,316,888	46	-	243,861	-	-	243,907	10,989,343
3	Kab. Buol	3,428,548	1,640,296	-	8,412,149	-	-	10,052,445	72,902	-	280,405	-	-	353,307	13,834,300
4	Kab. Toli-Toli	3,428,548	17,820	-	8,358,726	-	-	8,376,546	792	-	278,624	-	-	279,416	12,084,510
5	Kab. Donggala	3,428,548	626,845	-	12,739,112	-	-	13,365,957	27,860	-	424,637	-	-	452,497	17,247,002
6	Kab. Morowali	3,428,548	2,071,889	-	11,924,143	-	-	13,996,032	92,084	-	397,472	-	-	489,556	17,914,136
7	Kab. Poso	3,428,548	282,989	-	12,485,470	-	-	12,768,459	12,578	-	416,182	-	-	428,760	16,625,767
8	Kota Palu	3,428,548	-	-	4,421,860	-	-	4,421,860	-	-	147,395	-	-	147,395	7,997,803
9	Kab. Parigi Moutong	3,428,548	6,731	-	11,548,210	-	-	11,554,941	299	-	384,940	-	-	385,239	15,368,728
10	Kab. Tojo Una Una	3,428,548	-	-	10,662,213	-	-	10,662,213	-	-	355,407	-	-	355,407	14,446,168
11	Kab. Sigi	3,428,548	-	-	7,439,539	-	-	7,439,539	-	-	247,984	-	-	247,984	11,116,071
12	Kab. Banggai Laut	3,428,548	-	-	3,111,995	-	-	3,111,995	-	-	103,734	-	-	103,734	6,644,277
13	Kab. Morowali Utara	3,428,548	-	-	13,953,985	-	-	13,953,985	-	-	465,133	-	-	465,133	17,847,666
XX	**Provinsi Sulawesi Selatan**	-	1,598,829	31,267	68,693,921	-	6,601,075	76,925,092	35,529	608	1,144,899	-	110,018	1,291,054	78,216,146
1	Kab. Bantaeng	3,428,548	-	-	8,711,645	-	-	8,711,645	-	-	326,686	-	-	326,686	12,466,879
2	Kab. Barru	3,428,548	-	-	8,064,352	-	9,837	8,074,189	-	-	302,413	-	369	302,782	11,805,519
3	Kab. Bone	3,428,548	1,267,448	-	23,776,113	-	-	25,043,561	63,373	-	891,604	-	-	954,977	29,427,086
4	Kab. Bulukumba	3,428,548	817,043	-	9,247,577	-	-	10,064,620	40,852	-	346,784	-	-	387,636	13,880,804
5	Kab. Enrekang	3,428,548	105,378	-	11,202,952	-	-	11,308,330	5,269	-	420,111	-	-	425,380	15,162,258
6	Kab. Gowa	3,428,548	197,882	125,066	11,308,018	-	-	11,630,966	9,894	5,471	424,051	-	-	439,416	15,498,930
7	Kab. Jeneponto	3,428,548	276,417	-	9,771,222	-	-	10,047,639	13,821	-	366,421	-	-	380,242	13,856,429
8	Kab. Luwu	3,428,548	3,324	-	8,204,984	-	64,698	8,273,006	166	-	307,687	-	2,427	310,280	12,011,834
9	Kab. Luwu Utara	3,428,548	178,789	-	13,718,382	-	-	13,897,171	8,939	-	514,439	-	-	523,378	17,849,097
10	Kab. Maros	3,428,548	-	-	7,476,477	-	1,982,091	9,458,568	-	-	280,368	-	74,328	354,696	13,241,812
11	Kab. Pangkajene dan Kepulauan	3,428,548	-	-	8,628,200	-	5,729,635	14,357,835	-	-	323,558	-	214,861	538,419	18,324,802
12	Kota Palopo	3,428,548	-	-	4,916,699	-	-	4,916,699	-	-	184,376	-	-	184,376	8,529,623
13	Kab. Luwu Timur	3,428,548	596,857	-	8,694,016	-	18,587,606	27,878,479	29,843	-	326,025	-	697,035	1,052,903	32,359,930
14	Kab. Pinrang	3,428,548	44,917	-	9,024,655	-	5,887	9,075,459	2,245	-	338,425	-	221	340,891	12,844,898
15	Kab. Sinjai	3,428,548	-	-	7,570,931	-	2,327	7,573,258	-	-	283,910	-	87	283,997	11,285,803
16	Kab. Kepulauan Selayar	3,428,548	-	-	8,230,157	-	-	8,230,157	-	-	308,630	-	-	308,630	11,967,335
17	Kab. Sidenreng Rappang	3,428,548	67,322	-	12,675,789	-	-	12,743,111	3,366	-	475,342	-	-	478,708	16,650,367
18	Kab. Soppeng	3,428,548	71,287	-	8,008,025	-	-	8,079,312	3,565	-	300,301	-	-	303,866	11,811,726
19	Kab. Takalar	3,428,548	876,526	-	7,332,304	-	-	8,208,830	43,827	-	274,961	-	-	318,788	11,956,166
20	Kab. Tana Toraja	3,428,548	80,937	-	5,758,764	-	11,105	5,850,806	4,047	-	215,953	-	416	220,416	9,499,770
21	Kab. Wajo	3,428,548	1,769,631	-	58,816,745	-	-	60,586,376	88,481	-	2,205,628	-	-	2,294,109	66,309,033
22	Kota Pare-pare	3,428,548	-	-	5,504,148	-	-	5,504,148	-	-	206,405	-	-	206,405	9,139,101
23	Kota Makassar	3,428,548	-	-	13,191,382	-	-	13,191,382	-	-	494,677	-	-	494,677	17,114,607
24	Kab. Toraja Utara	3,428,548	41,557	-	4,942,150	-	11,105	4,994,812	2,077	-	185,331	-	416	187,824	8,611,184
XXI	**Provinsi Sulawesi Tenggara**	-	145,080	-	25,100,266	-	9,150,303	34,395,649	3,225	-	418,337	-	152,506	574,068	34,969,717
1	Kab. Buton	1,142,850	-	-	4,667,263	-	1,449,940	6,117,203	-	-	175,022	-	54,373	229,395	7,489,448
2	Kab. Konawe	3,428,548	551,576	-	6,837,716	-	170,813	7,560,105	27,579	-	256,414	-	6,405	290,398	11,279,051
3	Kab. Kolaka	3,428,548	28,741	-	6,404,787	-	20,522,215	26,955,743	1,437	-	240,179	-	769,583	1,011,199	31,395,490
4	Kab. Muna	1,714,274	-	-	4,954,798	-	-	4,954,798	-	-	185,805	-	-	185,805	6,854,877
5	Kota Kendari	3,428,548	-	-	6,532,993	-	-	6,532,993	-	-	244,988	-	-	244,988	10,206,529
6	Kota Bau-bau	3,428,548	-	-	7,668,635	-	-	7,668,635	-	-	287,574	-	-	287,574	11,384,757
7	Kab. Konawe Selatan	3,428,548	-	-	11,005,833	-	4,762,135	15,767,968	-	-	412,719	-	178,580	591,299	19,787,815
8	Kab. Bombana	3,428,548	-	-	8,567,313	-	2,184,150	10,751,463	-	-	321,274	-	81,906	403,180	14,583,191
9	Kab. Wakatobi	3,428,548	-	-	7,367,233	-	-	7,367,233	-	-	276,271	-	-	276,271	11,072,052
10	Kab. Kolaka Utara	3,428,548	-	-	8,896,990	-	1,914,662	10,811,652	-	-	333,637	-	71,800	405,437	14,645,637
11	Kab. Konawe Utara	3,428,548	-	-	8,063,432	-	5,597,297	13,660,729	-	-	302,379	-	209,899	512,278	17,601,555
12	Kab. Buton Utara	3,428,548	-	-	4,623,455	-	-	4,623,455	-	-	173,380	-	-	173,380	8,225,383
13	Kab. Konawe Kepulauan	3,428,548	-	-	1,362,584	-	-	1,362,584	-	-	51,097	-	-	51,097	4,842,229
14	Kab. Kolaka Timur	3,428,548	-	-	4,990,367	-	-	4,990,367	-	-	187,139	-	-	187,139	8,606,054
15	Kab. Muna Barat	1,714,274	-	-	1,936,744	-	-	1,936,744	-	-	72,628	-	-	72,628	3,723,646
16	Kab. Buton Tengah	1,142,850	-	-	3,818,412	-	-	3,818,412	-	-	143,190	-	-	143,190	5,104,452

www.peraturan.go.id

LAMPIRAN VII
RINCIAN DANA BAGI HASIL PAJAK BUMI DAN BANGUNAN
MENURUT PROVINSI/KABUPATEN/KOTA

(dalam ribuan rupiah)

No.	Nama Daerah	Bagi Rata	Bagian Daerah					Jumlah	Biaya Pemungutan					Jumlah	Total
			Sektor						Sektor						
			Perkebunan	Perhutanan	Pertambangan				Perkebunan	Perhutanan	Pertambangan				
					Minyak Bumi dan Gas Bumi	Panas Bumi	Non Minyak Bumi Gas Bumi Lainnya				Minyak Bumi dan Gas Bumi	Panas Bumi	Non Minyak Bumi Gas Bumi Lainnya		
1	2	3	4	5	6	7	8	9 = (4+5+6+7+8)	10	11	12	13	14	15=(10+11+12+13+14)	16=(3+9+15)
17	Kab. Buton Selatan	1.142.850	-	-	2.702.515	-	-	2.702.515	-	-	101.344	-	-	101.344	3.946.709
XXII	**Provinsi Bali**	-	135.752	-	11.598.067	98.762	-	11.832.581	3.771	-	322.168	2.744	-	328.683	12.161.264
1	Kab. Badung	3.428.548	-	-	4.342.522	22.445	-	4.364.967	-	-	150.782	779	-	151.561	7.945.076
2	Kab. Bangli	3.428.548	-	-	5.123.687	4.279	-	5.127.966	-	-	177.906	149	-	178.055	8.734.569
3	Kab. Buleleng	3.428.548	89.993	-	6.888.093	57.838	-	7.035.924	4.375	-	239.170	2.008	-	245.553	10.710.025
4	Kab. Gianyar	3.428.548	-	-	4.780.625	9.865	-	4.790.490	-	-	165.994	342	-	166.336	8.385.374
5	Kab. Jembrana	3.428.548	399.603	-	4.989.108	-	-	5.388.711	19.425	-	173.233	-	-	192.658	9.009.917
6	Kab. Karangasem	3.428.548	53.413	-	6.164.035	-	-	6.217.448	2.597	-	214.029	-	-	216.626	9.862.622
7	Kab. Klungkung	3.428.548	-	-	3.825.191	-	-	3.825.191	-	-	132.819	-	-	132.819	7.386.558
8	Kab. Tabanan	3.428.548	-	-	4.624.869	300.619	-	4.925.488	-	-	160.586	10.438	-	171.024	8.525.060
9	Kota Denpasar	3.428.548	-	-	5.654.135	-	-	5.654.135	-	-	196.324	-	-	196.324	9.279.007
XXIII	**Provinsi Nusa Tenggara Barat**	-	21.357	-	18.979.013	-	2.993.773	21.994.143	593	-	527.194	-	83.160	610.947	22.605.090
1	Kab. Bima	3.428.548	-	-	8.610.681	-	18.928	8.629.609	-	-	298.982	-	657	299.639	12.357.796
2	Kab. Dompu	3.428.548	48.345	-	6.977.881	-	24.368	7.050.594	2.351	-	242.288	-	846	245.485	10.724.627
3	Kab. Lombok Barat	3.428.548	-	-	7.034.488	-	-	7.034.488	-	-	244.253	-	-	244.253	10.707.289
4	Kab. Lombok Tengah	3.428.548	-	-	11.011.753	-	-	11.011.753	-	-	382.353	-	-	382.353	14.822.654
5	Kab. Lombok Timur	3.428.548	37.081	-	11.892.388	-	-	11.929.469	1.802	-	412.930	-	-	414.732	15.772.749
6	Kab. Sumbawa	3.428.548	-	-	9.689.205	-	4.561.164	14.250.369	-	-	336.431	-	158.374	494.805	18.173.722
7	Kota Mataram	3.428.548	-	-	5.531.876	-	-	5.531.876	-	-	192.079	-	-	192.079	9.152.503
8	Kota Bima	3.428.548	-	-	6.010.062	-	-	6.010.062	-	-	208.683	-	-	208.683	9.647.293
9	Kab. Sumbawa Barat	3.428.548	-	-	5.154.695	-	7.370.630	12.525.325	-	-	178.982	-	255.925	434.907	16.388.780
10	Kab. Lombok Utara	3.428.548	-	-	4.003.021	-	-	4.003.021	-	-	138.993	-	-	138.993	7.570.562
XXIV	**Provinsi Nusa Tenggara Timur**	-	41.060	-	33.112.025	-	162.831	33.315.916	1.140	-	919.778	-	4.522	925.440	34.241.356
1	Kab. Alor	3.428.548	-	-	6.752.418	-	-	6.752.418	-	-	234.459	-	-	234.459	10.415.425
2	Kab. Belu	3.428.548	-	-	3.955.403	-	-	3.955.403	-	-	137.340	-	-	137.340	7.521.291
3	Kab. Ende	3.428.548	-	-	6.588.429	-	16.009	6.604.438	-	-	228.765	-	556	229.321	10.262.307
4	Kab. Flores Timur	3.428.548	38.883	-	7.735.296	-	-	7.774.179	1.890	-	268.587	-	-	270.477	11.473.204
5	Kab. Kupang	3.428.548	-	-	7.332.227	-	-	7.332.227	-	-	254.592	-	-	254.592	11.015.367
6	Kab. Lembata	3.428.548	-	-	5.574.175	-	-	5.574.175	-	-	193.547	-	-	193.547	9.196.270
7	Kab. Manggarai	3.428.548	-	-	5.476.288	-	225.911	5.702.199	-	-	190.149	-	7.844	197.993	9.328.740
8	Kab. Ngada	3.428.548	14.297	-	4.162.901	-	-	4.177.198	695	-	144.546	-	-	145.241	7.750.987
9	Kab. Sikka	3.428.548	36.507	-	6.543.125	-	-	6.579.632	1.774	-	227.192	-	-	228.966	10.237.146
10	Kab. Sumba Barat	3.428.548	19.427	-	4.028.549	-	-	4.047.976	944	-	139.881	-	-	140.825	7.617.349
11	Kab. Sumba Timur	3.428.548	55.120	-	10.019.934	-	-	10.075.054	2.680	-	347.914	-	-	350.594	13.854.196
12	Kab. Timor Tengah Selatan	3.428.548	-	-	9.700.152	-	-	9.700.152	-	-	336.811	-	-	336.811	13.465.511
13	Kab. Timor Tengah Utara	3.428.548	-	-	7.637.137	-	-	7.637.137	-	-	265.178	-	-	265.178	11.330.863
14	Kota Kupang	3.428.548	-	-	4.385.966	-	-	4.385.966	-	-	152.290	-	-	152.290	7.966.804
15	Kab. Rote Ndao	3.428.548	-	-	6.547.618	-	-	6.547.618	-	-	227.348	-	-	227.348	10.203.514
16	Kab. Manggarai Barat	3.428.548	-	-	6.761.331	-	-	6.761.331	-	-	234.768	-	-	234.768	10.424.647
17	Kab. Nagekeo	3.428.548	-	-	5.628.975	-	-	5.628.975	-	-	195.451	-	-	195.451	9.252.974
18	Kab. Sumba Barat Daya	3.428.548	-	-	6.597.728	-	-	6.597.728	-	-	229.088	-	-	229.088	10.255.364
19	Kab. Sumba Tengah	3.428.548	-	-	5.357.990	-	-	5.357.990	-	-	186.042	-	-	186.042	8.972.580
20	Kab. Manggarai Timur	3.428.548	-	-	5.714.021	-	409.396	6.123.417	-	-	198.403	-	14.215	212.618	9.764.583
21	Kab. Sabu Raijua	3.428.548	-	-	2.440.780	-	-	2.440.780	-	-	84.750	-	-	84.750	5.954.078
22	Kab. Malaka	3.428.548	-	-	3.507.650	-	-	3.507.650	-	-	121.794	-	-	121.794	7.057.992
XXV	**Provinsi Maluku**	-	27.127	431.768	42.302.678	-	-	42.761.573	1.507	23.987	1.762.612	-	-	1.788.106	44.549.679
1	Kab. Maluku Tenggara Barat	3.428.548	-	204.749	11.412.109	-	-	11.616.858	-	7.110	356.628	-	-	363.738	15.409.144
2	Kab. Maluku Tengah	3.428.548	-	-	21.465.528	-	-	21.465.528	-	-	670.798	-	-	670.798	25.564.874
3	Kab. Maluku Tenggara	3.428.548	105.796	-	10.608.666	-	-	10.714.462	4.408	-	331.520	-	-	335.928	14.478.938
4	Kab. Buru	3.428.548	-	886.227	9.009.889	-	-	9.896.116	-	30.772	281.560	-	-	312.332	13.636.996
5	Kota Ambon	3.428.548	-	-	7.844.957	-	-	7.844.957	-	-	245.155	-	-	245.155	11.518.660
6	Kab. Seram Bagian Barat	3.428.548	2.714	-	12.753.401	-	-	12.756.115	113	-	398.544	-	-	398.657	16.583.320
7	Kab. Seram Bagian Timur	3.428.548	-	-	58.901.289	-	-	58.901.289	-	-	1.840.665	-	-	1.840.665	64.170.502
8	Kab. Kepulauan Aru	3.428.548	-	-	14.283.355	-	-	14.283.355	-	-	446.355	-	-	446.355	18.158.258
9	Kota Tual	3.428.548	-	-	5.087.341	-	-	5.087.341	-	-	158.980	-	-	158.980	8.674.869
10	Kab. Maluku Barat Daya	3.428.548	-	-	10.149.182	-	-	10.149.182	-	-	317.162	-	-	317.162	13.894.892
11	Kab. Buru Selatan	3.428.548	-	636.098	7.694.997	-	-	8.331.095	-	22.087	240.469	-	-	262.556	12.022.199
XXVI	**Provinsi Papua**	-	1.159.479	684.435	104.052.987	-	17.640.986	123.537.887	64.415	38.024	4.335.542	-	735.043	5.173.024	128.710.911
1	Kab. Biak Numfor	3.428.548	-	-	8.013.701	-	-	8.013.701	-	-	250.428	-	-	250.428	11.692.677
2	Kab. Jayapura	3.428.548	1.513.711	-	16.511.168	-	444.230	18.469.109	63.071	-	515.974	-	13.882	592.927	22.490.584
3	Kab. Jayawijaya	3.428.548	-	-	11.916.637	-	6.600	11.923.237	-	-	372.394	-	206	372.600	15.724.385
4	Kab. Merauke	3.428.548	194.795	1.114.370	26.354.569	-	-	27.663.734	8.117	38.693	823.580	-	-	870.390	31.962.672
5	Kab. Mimika	3.428.548	328.560	599.769	18.674.252	-	67.435.610	87.038.191	13.690	20.826	583.571	-	2.107.363	2.725.450	93.192.189
6	Kab. Nabire	3.428.548	272.160	-	12.980.935	-	114.027	13.367.122	11.340	-	405.655	-	3.564	420.559	17.216.229
7	Kab. Paniai	3.428.548	-	-	9.268.338	-	212.575	9.480.913	-	-	289.635	-	6.643	296.278	13.205.739
8	Kab. Puncak Jaya	3.428.548	-	-	11.868.271	-	-	11.868.271	-	-	370.883	-	-	370.883	15.667.702
9	Kab. Kepulauan Yapen	3.428.548	-	-	13.673.182	-	-	13.673.182	-	-	427.287	-	-	427.287	17.529.017
10	Kota Jayapura	3.428.548	-	-	4.984.983	-	-	4.984.983	-	-	155.781	-	-	155.781	8.569.312
11	Kab. Sarmi	3.428.548	-	-	16.913.389	-	51.834	16.965.223	-	-	528.544	-	1.619	530.163	20.923.934
12	Kab. Keerom	3.428.548	1.021.900	-	14.581.742	-	428.382	16.032.024	42.579	-	455.680	-	13.387	511.646	19.972.218
13	Kab. Yahukimo	3.428.548	-	-	18.848.255	-	860.895	19.709.150	-	-	589.008	-	26.903	615.911	23.753.609
14	Kab. Pegunungan Bintang	3.428.548	-	-	19.601.068	-	-	19.601.068	-	-	612.534	-	-	612.534	23.642.150
15	Kab. Tolikara	3.428.548	-	-	14.711.195	-	46.844	14.758.039	-	-	459.724	-	1.464	461.188	18.647.775
16	Kab. Boven Digoel	3.428.548	1.306.795	674.490	23.340.940	-	-	25.322.225	54.450	23.420	729.404	-	-	807.274	29.558.047
17	Kab. Mappi	3.428.548	-	-	23.091.251	-	-	23.091.251	-	-	721.602	-	-	721.602	27.241.401
18	Kab. Asmat	3.428.548	-	-	21.401.444	-	-	21.401.444	-	-	668.795	-	-	668.795	25.498.787
19	Kab. Waropen	3.428.548	-	-	21.979.298	-	-	21.979.298	-	-	686.853	-	-	686.853	26.094.699

www.peraturan.go.id

LAMPIRAN VII
RINCIAN DANA BAGI HASIL PAJAK BUMI DAN BANGUNAN
MENURUT PROVINSI/KABUPATEN/KOTA

(dalam ribuan rupiah)

No.	Nama Daerah	Bagi Rata	Bagian Daerah					Jumlah	Biaya Pemungutan					Jumlah	Total
			Sektor						Sektor						
			Perkebunan	Perhutanan	Pertambangan				Perkebunan	Perhutanan	Pertambangan				
					Minyak Bumi dan Gas Bumi	Panas Bumi	Non Minyak Bumi Gas Bumi Lainnya				Minyak Bumi dan Gas Bumi	Panas Bumi	Non Minyak Bumi Gas Bumi Lainnya		
1	2	3	4	5	6	7	8	9 = (4+5+6+7+8)	10	11	12	13	14	15=(10+11+12+13+14)	16=(3+9+15)
20	Kab. Supiori	3,428,548	-	-	7,888,940	-	-	7,888,940	-	-	246,530	-	-	246,530	11,564,018
21	Kab. Mamberamo Raya	3,428,548	-	-	43,167,894	-	-	43,167,894	-	-	1,348,997	-	-	1,348,997	47,945,439
22	Kab. Mamberamo Tengah	3,428,548	-	-	4,424,772	-	-	4,424,772	-	-	138,274	-	-	138,274	7,991,594
23	Kab. Yalimo	3,428,548	-	-	5,178,960	-	-	5,178,960	-	-	161,842	-	-	161,842	8,769,350
24	Kab. Lanny Jaya	3,428,548	-	-	6,459,138	-	-	6,459,138	-	-	201,848	-	-	201,848	10,089,534
25	Kab. Nduga	3,428,548	-	-	4,855,135	-	-	4,855,135	-	-	151,723	-	-	151,723	8,435,406
26	Kab. Dogiyai	3,428,548	-	-	8,564,247	-	402,397	8,966,644	-	-	267,632	-	12,575	280,207	12,675,399
27	Kab. Puncak	3,428,548	-	-	12,551,910	-	40,680	12,592,590	-	-	392,247	-	1,271	393,518	16,414,656
28	Kab. Intan Jaya	3,428,548	-	206,306	7,983,879	-	503,439	8,693,624	-	7,164	249,497	-	15,732	272,393	12,394,565
29	Kab. Deiyai	3,428,548	-	142,798	6,422,466	-	16,429	6,581,693	-	4,958	200,702	-	513	206,173	10,216,414
XXVII	**Provinsi Maluku Utara**	-	36,418	-	26,010,851	-	-	26,047,269	809	-	433,514	-	-	434,323	26,481,592
1	Kab. Halmahera Tengah	3,428,548	-	-	12,982,725	-	-	12,982,725	-	-	486,852	-	-	486,852	16,898,125
2	Kota Ternate	3,428,548	-	-	13,107,862	-	-	13,107,862	-	-	491,544	-	-	491,544	17,027,954
3	Kab. Halmahera Barat	3,428,548	-	-	12,134,191	-	-	12,134,191	-	-	455,032	-	-	455,032	16,017,771
4	Kab. Halmahera Timur	3,428,548	122,284	-	12,247,301	-	-	12,369,585	6,114	-	459,273	-	-	465,387	16,263,520
5	Kab. Halmahera Selatan	3,428,548	-	-	16,976,656	-	-	16,976,656	-	-	636,624	-	-	636,624	21,041,828
6	Kab. Halmahera Utara	3,428,548	23,387	-	8,178,294	-	-	8,201,681	1,169	-	306,686	-	-	307,855	11,938,084
7	Kab. Kepulauan Sula	3,428,548	-	-	8,585,749	-	-	8,585,749	-	-	321,965	-	-	321,965	12,336,262
8	Kota Tidore Kepulauan	3,428,548	-	-	9,940,181	-	-	9,940,181	-	-	372,756	-	-	372,756	13,741,485
9	Kab. Pulau Morotai	3,428,548	-	-	6,032,851	-	-	6,032,851	-	-	226,231	-	-	226,231	9,687,630
10	Kab. Pulau Taliabu	3,428,548	-	-	3,857,600	-	-	3,857,600	-	-	144,660	-	-	144,660	7,430,808
XXVIII	**Provinsi Banten**	-	1,172,839	256,485	26,593,153	85	1,244,796	29,267,358	52,126	9,974	886,438	3	41,493	990,034	30,257,392
1	Kab. Lebak	3,428,548	3,009,032	531,880	20,617,610	341	-	24,158,863	133,735	20,685	687,253	11	-	841,684	28,429,095
2	Kab. Pandeglang	3,428,548	1,401,504	494,062	18,219,914	-	4,979,185	25,094,665	62,289	19,213	607,331	-	165,973	854,806	29,378,019
3	Kab. Serang	3,428,548	280,819	-	13,457,680	-	-	13,738,499	12,481	-	448,589	-	-	461,070	17,628,117
4	Kab. Tangerang	3,428,548	-	-	21,527,951	-	-	21,527,951	-	-	717,599	-	-	717,599	25,674,098
5	Kota Cilegon	3,428,548	-	-	5,070,505	-	-	5,070,505	-	-	169,017	-	-	169,017	8,668,070
6	Kota Tangerang	3,428,548	-	-	13,974,675	-	-	13,974,675	-	-	465,823	-	-	465,823	17,869,046
7	Kota Serang	3,428,548	-	-	5,174,659	-	-	5,174,659	-	-	172,489	-	-	172,489	8,775,696
8	Kota Tangerang Selatan	3,428,548	-	-	8,329,623	-	-	8,329,623	-	-	277,654	-	-	277,654	12,035,825
XXIX	**Provinsi Bangka Belitung**	-	3,533,755	-	16,473,022	-	14,552,448	34,559,225	157,056	-	457,584	-	404,234	1,018,874	35,578,099
1	Kab. Bangka	3,428,548	2,153,433	-	10,737,564	-	12,153,821	25,044,818	95,708	-	372,832	-	422,007	890,547	29,363,913
2	Kab. Belitung	3,428,548	3,399,363	-	8,995,768	-	1,252,776	13,647,907	151,083	-	312,353	-	43,500	506,936	17,583,391
3	Kota Pangkal Pinang	3,428,548	-	-	8,237,335	-	-	8,237,335	-	-	286,019	-	-	286,019	11,951,902
4	Kab. Bangka Selatan	3,428,548	850,649	-	10,465,032	-	15,074,152	26,389,833	37,806	-	363,369	-	523,408	924,583	30,742,964
5	Kab. Bangka Tengah	3,428,548	691,728	-	9,410,142	-	6,578,988	16,680,858	30,744	-	326,741	-	228,437	585,922	20,695,328
6	Kab. Bangka Barat	3,428,548	3,431,083	-	9,289,885	-	15,622,476	28,343,444	152,492	-	322,566	-	542,448	1,017,506	32,789,498
7	Kab. Belitung Timur	3,428,548	3,608,766	-	8,756,361	-	7,527,579	19,892,706	160,390	-	304,040	-	261,374	725,804	24,047,058
XXX	**Provinsi Gorontalo**	-	387,964	126,290	9,178,390	-	-	9,692,644	21,555	7,017	382,434	-	-	411,006	10,103,650
1	Kab. Boalemo	3,428,548	625,076	-	6,467,350	-	-	7,092,426	26,045	-	202,105	-	-	228,150	10,749,124
2	Kab. Gorontalo	3,428,548	391,304	-	4,767,960	-	-	5,159,264	16,305	-	148,999	-	-	165,304	8,753,116
3	Kota Gorontalo	3,428,548	-	-	3,254,726	-	-	3,254,726	-	-	101,710	-	-	101,710	6,784,984
4	Kab. Pohuwato	3,428,548	523,466	-	7,657,639	-	-	8,181,105	21,811	-	239,301	-	-	261,112	11,870,765
5	Kab. Bone Bolango	3,428,548	-	-	8,477,709	-	-	8,477,709	-	-	264,929	-	-	264,929	12,171,186
6	Kab. Gorontalo Utara	3,428,548	12,008	505,157	6,088,178	-	-	6,605,343	500	17,540	190,256	-	-	208,296	10,242,187
XXXI	**Provinsi Kepulauan Riau**	-	256,945	-	105,454,740	-	-	105,711,685	11,419	-	3,515,158	-	-	3,526,577	109,238,262
1	Kab. Natuna	3,428,548	-	-	212,725,795	-	-	212,725,795	-	-	7,090,860	-	-	7,090,860	223,245,203
2	Kab. Kepulauan Anambas	3,428,548	-	-	91,945,040	-	-	91,945,040	-	-	3,064,835	-	-	3,064,835	98,438,423
3	Kab. Karimun	3,428,548	74,557	-	21,188,861	-	-	21,263,418	3,314	-	706,295	-	-	709,609	25,401,575
4	Kota Batam	3,428,548	-	-	32,622,283	-	-	32,622,283	-	-	1,087,410	-	-	1,087,410	37,138,241
5	Kota Tanjung Pinang	3,428,548	-	-	17,979,214	-	-	17,979,214	-	-	599,307	-	-	599,307	22,007,069
6	Kab. Lingga	3,428,548	41,067	-	20,864,624	-	-	20,905,691	1,825	-	695,487	-	-	697,312	25,031,551
7	Kab. Bintan	3,428,548	912,160	-	24,493,139	-	-	25,405,299	40,541	-	816,438	-	-	856,979	29,690,826
XXXII	**Provinsi Papua Barat**	-	516,288	443,241	218,489,679	-	181,735	219,630,943	11,473	9,849	3,641,494	-	3,029	3,665,845	223,296,788
1	Kab. Fak Fak	3,428,548	-	529,033	36,181,967	-	-	36,711,000	-	22,778	1,356,824	-	-	1,379,602	41,519,150
2	Kab. Manokwari	3,428,548	606,944	-	31,683,664	-	726,938	33,017,546	30,348	-	1,188,138	-	27,260	1,245,746	37,691,840
3	Kab. Sorong	3,428,548	1,021,761	137,241	263,874,086	-	-	265,033,088	51,088	5,909	9,895,278	-	-	9,952,275	278,413,911
4	Kota Sorong	3,428,548	-	-	19,266,994	-	-	19,266,994	-	-	722,512	-	-	722,512	23,418,054
5	Kab. Raja Ampat	3,428,548	-	101,391	38,532,152	-	-	38,633,543	-	4,366	1,444,956	-	-	1,449,322	43,511,413
6	Kab. Sorong Selatan	3,428,548	-	129,831	32,085,795	-	-	32,215,626	-	5,590	1,203,217	-	-	1,208,807	36,852,981
7	Kab. Teluk Bintuni	3,428,548	436,446	-	302,580,902	-	-	302,987,348	21,823	-	11,345,659	-	-	11,367,482	317,783,378
8	Kab. Teluk Wondama	3,428,548	-	-	19,868,733	-	-	19,868,733	-	-	745,078	-	-	745,078	24,042,359
9	Kab. Kaimana	3,428,548	-	875,468	22,697,471	-	-	23,572,939	-	37,694	851,155	-	-	888,849	27,890,336
10	Kab. Maybrat	3,428,548	-	-	14,974,735	-	-	14,974,735	-	-	561,553	-	-	561,553	18,964,836
11	Kab. Tambrauw	3,428,548	-	-	13,825,651	-	-	13,825,651	-	-	518,462	-	-	518,462	17,772,661
12	Kab. Manokwari Selatan	3,428,548	-	-	7,057,048	-	-	7,057,048	-	-	264,639	-	-	264,639	10,750,235
13	Kab. Pegunungan Arfak	3,428,548	-	-	71,359,522	-	-	71,359,522	-	-	2,675,982	-	-	2,675,982	77,464,052
XXXIII	**Provinsi Sulawesi Barat**	-	998,650	160,492	19,650,562	-	-	20,809,704	16,645	2,229	272,926	-	-	291,800	21,101,504
1	Kab. Majene	3,428,548	-	-	11,336,677	-	-	11,336,677	-	-	432,998	-	-	432,998	15,198,223
2	Kab. Mamuju	3,428,548	369,591	641,967	15,852,316	-	-	16,863,874	18,993	28,977	605,470	-	-	653,440	20,945,862
3	Kab. Polewali Mandar	3,428,548	-	-	10,520,997	-	-	10,520,997	-	-	401,844	-	-	401,844	14,351,389
4	Kab. Mamasa	3,428,548	-	-	9,728,634	-	-	9,728,634	-	-	371,580	-	-	371,580	13,528,762
5	Kab. Mamuju Utara	3,428,548	3,625,008	-	22,501,348	-	-	26,126,356	186,285	-	859,427	-	-	1,045,712	30,600,616

www.peraturan.go.id

LAMPIRAN VII
RINCIAN DANA BAGI HASIL PAJAK BUMI DAN BANGUNAN
MENURUT PROVINSI/KABUPATEN/KOTA

(dalam ribuan rupiah)

No.	Nama Daerah	Bagi Rata	Bagian Daerah					Jumlah	Biaya Pemungutan					Jumlah	Total
			Sektor						Sektor						
			Perkebunan	Perhutanan	Pertambangan				Perkebunan	Perhutanan	Pertambangan				
					Minyak Bumi dan Gas Bumi	Panas Bumi	Non Minyak Bumi Gas Bumi Lainnya				Minyak Bumi dan Gas Bumi	Panas Bumi	Non Minyak Bumi Gas Bumi Lainnya		
1	2	3	4	5	6	7	8	9 = (4+5+6+7+8)	10	11	12	13	14	15=(10+11+12+13+14)	16=(3+9+15)
6	Kab. Mamuju Tengah	3.428.548	-	-	8.662.278	-	-	8.662.278	-	-	330.851	-	-	330.851	12.421.677
XXXIV	**Provinsi Kalimantan Utara**	-	2.339.151	1.566.195	85.567.991	-	3.066.893	92.540.230	64.976	43.506	2.376.889	-	85.192	2.570.563	95.110.793
1	Kab. Bulungan	3.428.548	2.454.203	1.494.124	128.642.595	-	4.087.587	136.678.509	119.301	62.256	4.466.756	-	141.930	4.790.243	144.897.300
2	Kab. Malinau	3.428.548	331.489	2.766.587	33.019.869	-	4.249.048	40.366.993	16.115	115.274	1.146.524	-	147.536	1.425.449	45.220.990
3	Kab. Nunukan	3.428.548	5.979.095	1.456.434	76.595.207	-	3.624.679	87.655.415	290.651	60.685	2.659.556	-	132.801	3.143.693	94.427.656
4	Kota Tarakan	3.428.548	-	-	83.697.766	-	-	83.697.766	-	-	2.906.172	-	-	2.906.172	90.032.486
5	Kab. Tana Tidung	3.428.548	591.816	547.640	20.316.525	-	106.259	21.562.240	28.769	22.818	705.435	-	3.690	760.712	25.751.500
	Insentif PBB yang tidak Dibagihasilkan														**934.147.206**
	Jumlah	**1.734.845.290**	**1.043.642.562**	**274.358.368**	**19.397.396.680**	**149.413.777**	**754.031.700**	**21.618.843.087**	**46.384.123**	**10.669.497**	**646.579.887**	**4.980.453**	**25.134.388**	**733.748.348**	**25.021.583.931**

PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA,

ttd.

JOKO WIDODO

www.peraturan.go.id

LAMPIRAN VIII

PERATURAN PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA
NOMOR 36 TAHUN 2015

TENTANG
RINCIAN ANGGARAN
PENDAPATAN DAN BELANJA NEGARA
TAHUN ANGGARAN 2015

RINCIAN DANA BAGI HASIL CUKAI HASIL TEMBAKAU MENURUT PROVINSI

www.peraturan.go.id

LAMPIRAN VIII
RINCIAN DANA BAGI HASIL CUKAI HASIL TEMBAKAU
MENURUT PROVINSI

(dalam ribuan rupiah)

NO	NAMA DAERAH	JUMLAH
1	Provinsi Aceh	15.008.690
2	Provinsi Sumatera Utara	23.366.660
3	Provinsi Sumatera Barat	12.341.738
4	Provinsi Jambi	7.236.954
5	Provinsi Sumatera Selatan	6.948.347
6	Provinsi Lampung	13.788.817
7	Provinsi Jawa Barat	306.919.449
8	Provinsi Jawa Tengah	628.227.797
9	Provinsi DI Yogyakarta	23.808.840
10	Provinsi Jawa Timur	1.442.886.582
11	Provinsi Kalimantan Tengah	6.048.024
12	Provinsi Sulawesi Tengah	6.827.091
13	Provinsi Sulawesi Selatan	20.984.740
14	Provinsi Bali	13.492.035
15	Provinsi Nusa Tenggara Barat	234.606.572
16	Provinsi Nusa Tenggara Timur	13.956.046
17	Provinsi Kepulauan Riau	5.906.768
	TOTAL	**2.782.355.150**

PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA,

JOKO WIDODO

www.peraturan.go.id

LAMPIRAN IX

PERATURAN PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA
NOMOR 36 TAHUN 2015

TENTANG
RINCIAN ANGGARAN
PENDAPATAN DAN BELANJA NEGARA
TAHUN ANGGARAN 2015

RINCIAN DANA BAGI HASIL SUMBER DAYA ALAM PERTAMBANGAN MINYAK BUMI DAN GAS BUMI MENURUT PROVINSI/KABUPATEN/KOTA

www.peraturan.go.id

LAMPIRAN IX
RINCIAN DANA BAGI HASIL SUMBER DAYA ALAM PERTAMBANGAN MINYAK BUMI DAN GAS BUMI
MENURUT PROVINSI/KABUPATEN/KOTA

(dalam ribuan rupiah)

NO	NAMA DAERAH	MINYAK BUMI			GAS BUMI			JUMLAH
		15%	0,5%	SUB JUMLAH	30%	0,5%	SUB JUMLAH	
1	2	3	4	5 = 3 + 4	6	7	8 = 6 + 7	9 = 5 + 8
I	**Provinsi Aceh**	**8.405.906**	**-**	**8.405.906**	**9.599.367**	**-**	**9.599.367**	**18.005.273**
	Tambahan Alokasi DBH SDA Migas	-	-	154.107.877	-	-	63.995.822	218.103.699
1	Kab. Aceh Barat	764.171	-	764.171	872.670	-	872.670	1.636.841
2	Kab. Aceh Besar	764.171	-	764.171	872.670	-	872.670	1.636.841
3	Kab. Aceh Selatan	764.171	-	764.171	872.670	-	872.670	1.636.841
4	Kab. Aceh Singkil	764.171	-	764.171	872.670	-	872.670	1.636.841
5	Kab. Aceh Tengah	764.171	-	764.171	872.670	-	872.670	1.636.841
6	Kab. Aceh Tenggara	764.171	-	764.171	872.670	-	872.670	1.636.841
7	Kab. Aceh Timur	764.171	-	764.171	872.670	-	872.670	1.636.841
8	Kab. Aceh Utara	10.299.493	-	10.299.493	19.198.746	-	19.198.746	29.498.239
9	Kab. Bireuen	764.171	-	764.171	872.670	-	872.670	1.636.841
10	Kab. Pidie	764.171	-	764.171	872.670	-	872.670	1.636.841
11	Kab. Simeulue	764.171	-	764.171	872.670	-	872.670	1.636.841
12	Kota Banda Aceh	764.171	-	764.171	872.670	-	872.670	1.636.841
13	Kota Sabang	764.171	-	764.171	872.670	-	872.670	1.636.841
14	Kota Langsa	764.171	-	764.171	872.670	-	872.670	1.636.841
15	Kota Lhokseumawe	764.171	-	764.171	872.670	-	872.670	1.636.841
16	Kab. Gayo Lues	764.171	-	764.171	872.670	-	872.670	1.636.841
17	Kab. Aceh Barat Daya	764.171	-	764.171	872.670	-	872.670	1.636.841
18	Kab. Aceh Jaya	764.171	-	764.171	872.670	-	872.670	1.636.841
19	Kab. Nagan Raya	764.171	-	764.171	872.670	-	872.670	1.636.841
20	Kab. Aceh Tamiang	7.276.446	-	7.276.446	872.670	-	872.670	8.149.116
21	Kab. Bener Meriah	764.171	-	764.171	872.670	-	872.670	1.636.841
22	Kab. Pidie Jaya	764.171	-	764.171	872.670	-	872.670	1.636.841
23	Kota Subulussalam	764.171	-	764.171	872.670	-	872.670	1.636.841
II	**Provinsi Sumatera Utara**	**1.197.985**	**39.933**	**1.237.918**	**1.820.854**	**30.347**	**1.851.201**	**3.089.119**
1	Kab. Asahan	74.874	2.496	77.370	113.803	1.897	115.700	193.070
2	Kab. Dairi	74.874	2.496	77.370	113.803	1.897	115.700	193.070
3	Kab. Deli Serdang	82.353	2.745	85.098	346.901	5.782	352.683	437.781
4	Kab. Karo	74.874	2.496	77.370	113.803	1.897	115.700	193.070
5	Kab. Labuhanbatu	74.874	2.496	77.370	113.803	1.897	115.700	193.070
6	Kab. Langkat	1.642.450	54.748	1.697.198	3.028.931	50.482	3.079.413	4.776.611
7	Kab. Mandailing Natal	74.874	2.496	77.370	113.803	1.897	115.700	193.070
8	Kab. Nias	74.874	2.496	77.370	113.803	1.897	115.700	193.070
9	Kab. Simalungun	74.874	2.496	77.370	113.803	1.897	115.700	193.070
10	Kab. Tapanuli Selatan	74.874	2.496	77.370	113.803	1.897	115.700	193.070
11	Kab. Tapanuli Tengah	74.874	2.496	77.370	113.803	1.897	115.700	193.070
12	Kab. Tapanuli Utara	74.874	2.496	77.370	113.803	1.897	115.700	193.070
13	Kab. Toba Samosir	74.874	2.496	77.370	113.803	1.897	115.700	193.070
14	Kota Binjai	358.631	11.954	370.585	493.483	8.224	501.707	872.292
15	Kota Medan	74.874	2.496	77.370	113.803	1.897	115.700	193.070
16	Kota Pematang Siantar	74.874	2.496	77.370	113.803	1.897	115.700	193.070
17	Kota Sibolga	74.874	2.496	77.370	113.803	1.897	115.700	193.070
18	Kota Tanjung Balai	74.874	2.496	77.370	113.803	1.897	115.700	193.070
19	Kota Tebing Tinggi	74.874	2.496	77.370	113.803	1.897	115.700	193.070
20	Kota Padang Sidempuan	74.874	2.496	77.370	113.803	1.897	115.700	193.070
21	Kab. Pakpak Bharat	74.874	2.496	77.370	113.803	1.897	115.700	193.070
22	Kab. Nias Selatan	74.874	2.496	77.370	113.803	1.897	115.700	193.070
23	Kab. Humbang Hasundutan	74.874	2.496	77.370	113.803	1.897	115.700	193.070
24	Kab. Serdang Bedagai	74.874	2.496	77.370	113.803	1.897	115.700	193.070
25	Kab. Samosir	74.874	2.496	77.370	113.803	1.897	115.700	193.070
26	Kab. Batu Bara	74.874	2.496	77.370	113.803	1.897	115.700	193.070
27	Kab. Padang Lawas	537.160	17.906	555.066	113.803	1.897	115.700	670.766
28	Kab. Padang Lawas Utara	74.874	2.496	77.370	113.803	1.897	115.700	193.070
29	Kab. Labuhanbatu Selatan	74.874	2.496	77.370	113.803	1.897	115.700	193.070
30	Kab. Labuhanbatu Utara	74.874	2.496	77.370	113.803	1.897	115.700	193.070
31	Kab. Nias Utara	74.874	2.496	77.370	113.803	1.897	115.700	193.070
32	Kab. Nias Barat	74.874	2.496	77.370	113.803	1.897	115.700	193.070
33	Kota Gunungsitoli	74.874	2.496	77.370	113.803	1.897	115.700	193.070
III	**Provinsi Riau**	**832.499.939**	**27.749.998**	**860.249.937**	**3.082.763**	**51.379**	**3.134.142**	**863.384.079**
1	Kab. Bengkalis	776.889.333	25.896.311	802.785.644	560.502	9.341	569.843	803.355.487
2	Kab. Indragiri Hilir	151.363.625	5.045.454	156.409.079	560.502	9.341	569.843	156.978.922
3	Kab. Indragiri Hulu	155.737.396	5.191.247	160.928.643	560.502	9.341	569.843	161.498.486
4	Kab. Kampar	378.414.530	12.613.818	391.028.348	1.270.012	21.167	1.291.179	392.319.527
5	Kab. Kuantan Singingi	151.363.625	5.045.454	156.409.079	560.502	9.341	569.843	156.978.922
6	Kab. Pelalawan	154.748.208	5.158.274	159.906.482	3.257.310	54.288	3.311.598	163.218.080
7	Kab. Rokan Hilir	472.125.190	15.737.507	487.862.697	560.502	9.341	569.843	488.432.540
8	Kab. Rokan Hulu	160.398.076	5.346.603	165.744.679	560.502	9.341	569.843	166.314.522
9	Kab. Siak	462.486.558	15.416.219	477.902.777	560.502	9.341	569.843	478.472.620
10	Kota Dumai	151.363.625	5.045.454	156.409.079	560.502	9.341	569.843	156.978.922
11	Kota Pekanbaru	151.363.625	5.045.454	156.409.079	560.502	9.341	569.843	156.978.922
12	Kab. Kepulauan Meranti	163.745.964	5.458.199	169.204.163	2.759.209	45.987	2.805.196	172.009.359
IV	**Provinsi Jambi**	**38.319.135**	**1.277.305**	**39.596.440**	**40.235.033**	**670.584**	**40.905.617**	**80.502.057**
1	Kab. Batanghari	8.843.347	294.778	9.138.125	8.047.006	134.117	8.181.123	17.319.248
2	Kab. Bungo	7.663.827	255.461	7.919.288	8.047.006	134.117	8.181.123	16.100.411
3	Kab. Kerinci	7.663.827	255.461	7.919.288	8.047.006	134.117	8.181.123	16.100.411
4	Kab. Merangin	7.663.827	255.461	7.919.288	8.047.006	134.117	8.181.123	16.100.411
5	Kab. Muaro Jambi	13.762.311	458.744	14.221.055	9.717.401	161.956	9.879.357	24.100.412
6	Kab. Sarolangun	12.574.651	419.155	12.993.806	8.047.006	134.117	8.181.123	21.174.929
7	Kab. Tanjung Jabung Barat	48.785.583	1.626.186	50.411.769	59.783.128	996.385	60.779.513	111.191.282
8	Kab. Tanjung Jabung Timur	20.619.251	687.308	21.306.559	27.063.550	451.059	27.514.609	48.821.168
9	Kab. Tebo	7.885.133	262.838	8.147.971	8.047.006	134.117	8.181.123	16.329.094
10	Kota Jambi	10.150.958	338.366	10.489.324	8.047.006	134.117	8.181.123	18.670.447
11	Kota Sungai Penuh	7.663.827	255.461	7.919.288	8.047.006	134.117	8.181.123	16.100.411
V	**Provinsi Sumatera Selatan**	**94.717.657**	**3.157.255**	**97.874.912**	**257.550.371**	**4.292.506**	**261.842.877**	**359.717.789**
1	Kab. Lahat	12.936.799	431.227	13.368.026	37.377.615	622.960	38.000.575	51.368.601
2	Kab. Musi Banyuasin	106.260.561	3.542.019	109.802.580	396.677.018	6.611.283	403.288.301	513.090.881
3	Kab. Musi Rawas	21.421.118	714.037	22.135.155	98.827.423	1.647.124	100.474.547	122.609.702
4	Kab. Muara Enim	42.063.811	1.402.127	43.465.938	73.511.083	1.225.185	74.736.268	118.202.206
5	Kab. Ogan Komering Ilir	11.839.707	394.657	12.234.364	32.193.796	536.563	32.730.359	44.964.723
6	Kab. Ogan Komering Ulu	17.136.603	571.220	17.707.823	34.170.049	569.501	34.739.550	52.447.373
7	Kota Palembang	11.839.707	394.657	12.234.364	32.193.796	536.563	32.730.359	44.964.723
8	Kota Prabumulih	17.805.228	593.508	18.398.736	35.096.720	584.945	35.681.665	54.080.401
9	Kota Pagar Alam	11.839.707	394.657	12.234.364	32.193.796	536.563	32.730.359	44.964.723
10	Kota Lubuk Linggau	11.839.707	394.657	12.234.364	32.193.796	536.563	32.730.359	44.964.723
11	Kab. Banyuasin	25.716.211	857.207	26.573.418	32.193.796	536.563	32.730.359	59.303.777
12	Kab. Ogan Ilir	19.479.873	649.329	20.129.202	32.199.557	536.659	32.736.216	52.865.418
13	Kab. Ogan Komering Ulu Timur	11.839.707	394.657	12.234.364	32.193.796	536.563	32.730.359	44.964.723
14	Kab. Ogan Komering Ulu Selatan	11.839.707	394.657	12.234.364	32.193.796	536.563	32.730.359	44.964.723
15	Kab. Empat Lawang	11.839.707	394.657	12.234.364	32.193.796	536.563	32.730.359	44.964.723
16	Kab. Penukal Abab Lematang Ilir	18.784.840	626.162	19.411.002	32.597.851	543.297	33.141.148	52.552.150
17	Kab. Musi Rawas Utara	14.387.635	479.588	14.867.223	32.193.796	536.563	32.730.359	47.597.582
VI	**Provinsi Lampung**	**40.253.730**	**1.361.707**	**41.615.437**	**1.785.932**	**30.361**	**1.816.293**	**43.431.730**
1	Kab. Lampung Barat	5.466.019	180.873	5.646.892	238.124	3.929	242.053	5.888.945
2	Kab. Lampung Selatan	5.466.019	180.873	5.646.892	238.124	3.929	242.053	5.888.945
3	Kab. Lampung Tengah	5.466.019	180.873	5.646.892	238.124	3.929	242.053	5.888.945
4	Kab. Lampung Utara	5.466.019	180.873	5.646.892	238.124	3.929	242.053	5.888.945
5	Kab. Lampung Timur	24.742.791	823.432	25.566.223	238.124	3.929	242.053	25.808.276
6	Kab. Tanggamus	5.466.019	180.873	5.646.892	238.124	3.929	242.053	5.888.945
7	Kab. Tulang Bawang	5.466.019	180.873	5.646.892	238.124	3.929	242.053	5.888.945
8	Kab. Way Kanan	5.466.019	180.873	5.646.892	238.124	3.929	242.053	5.888.945
9	Kota Bandar Lampung	5.466.019	180.873	5.646.892	238.124	3.929	242.053	5.888.945
10	Kota Metro	5.466.019	180.873	5.646.892	238.124	3.929	242.053	5.888.945
11	Kab. Pesawaran	5.466.019	180.873	5.646.892	238.124	3.929	242.053	5.888.945
12	Kab. Pringsewu	5.466.019	180.873	5.646.892	238.124	3.929	242.053	5.888.945
13	Kab. Mesuji	5.466.019	180.873	5.646.892	238.124	3.929	242.053	5.888.945
14	Kab. Tulang Bawang Barat	5.466.019	180.873	5.646.892	238.124	3.929	242.053	5.888.945
15	Kab. Pesisir Barat	5.466.019	180.873	5.646.892	238.124	3.929	242.053	5.888.945
VII	**Provinsi DKI Jakarta**	**90.966.447**	**3.032.215**	**93.998.662**	**5.497.846**	**91.630**	**5.589.476**	**99.588.138**
VIII	**Provinsi Jawa Barat**	**65.419.440**	**2.214.240**	**67.633.680**	**48.944.226**	**818.585**	**49.762.811**	**117.396.491**
1	Kab. Bandung	4.888.710	161.713	5.050.423	3.740.599	62.238	3.802.837	8.853.260
2	Kab. Bekasi	14.899.489	495.406	15.394.895	18.403.593	306.621	18.710.214	34.105.109
3	Kab. Bogor	4.888.710	161.713	5.050.423	3.740.599	62.238	3.802.837	8.853.260
4	Kab. Ciamis	4.888.710	161.713	5.050.423	3.740.599	62.238	3.802.837	8.853.260
5	Kab. Cianjur	4.888.710	161.713	5.050.423	3.740.599	62.238	3.802.837	8.853.260
6	Kab. Cirebon	4.888.710	161.713	5.050.423	3.740.599	62.238	3.802.837	8.853.260
7	Kab. Garut	4.888.710	161.713	5.050.423	3.740.599	62.238	3.802.837	8.853.260
8	Kab. Indramayu	19.069.962	634.421	19.704.383	19.697.097	328.179	20.025.276	39.729.659

www.peraturan.go.id

(dalam ribuan rupiah)

NO	NAMA DAERAH	MINYAK BUMI			GAS BUMI			JUMLAH
		15%	0,5%	SUB JUMLAH	30%	0,5%	SUB JUMLAH	
1	2	3	4	5 = 3 + 4	6	7	8 = 6 + 7	9 = 5 + 8
9	Kab. Karawang	8.102.586	268.842	8.371.428	16.334.768	272.140	16.606.908	24.978.336
10	Kab. Kuningan	4.888.710	161.713	5.050.423	3.740.599	62.238	3.802.837	8.853.260
11	Kab. Majalengka	5.269.181	174.395	5.443.576	4.364.273	72.632	4.436.905	9.880.481
12	Kab. Purwakarta	4.888.710	161.713	5.050.423	3.740.599	62.238	3.802.837	8.853.260
13	Kab. Subang	6.009.628	199.077	6.208.705	37.596.273	626.499	38.222.772	44.431.477
14	Kab. Sukabumi	4.888.710	161.713	5.050.423	3.740.599	62.238	3.802.837	8.853.260
15	Kab. Sumedang	4.888.710	161.713	5.050.423	3.740.599	62.238	3.802.837	8.853.260
16	Kab. Tasikmalaya	4.888.710	161.713	5.050.423	3.740.599	62.238	3.802.837	8.853.260
17	Kota Bandung	4.888.710	161.713	5.050.423	3.740.599	62.238	3.802.837	8.853.260
18	Kota Bekasi	4.888.710	161.713	5.050.423	3.740.599	62.238	3.802.837	8.853.260
19	Kota Bogor	4.888.710	161.713	5.050.423	3.740.599	62.238	3.802.837	8.853.260
20	Kota Cirebon	4.888.710	161.713	5.050.423	3.740.599	62.238	3.802.837	8.853.260
21	Kota Depok	4.888.710	161.713	5.050.423	3.740.599	62.238	3.802.837	8.853.260
22	Kota Sukabumi	4.888.710	161.713	5.050.423	3.740.599	62.238	3.802.837	8.853.260
23	Kota Tasikmalaya	4.888.710	161.713	5.050.423	3.740.599	62.238	3.802.837	8.853.260
24	Kota Cimahi	4.888.710	161.713	5.050.423	3.740.599	62.238	3.802.837	8.853.260
25	Kota Banjar	4.888.710	161.713	5.050.423	3.740.599	62.238	3.802.837	8.853.260
26	Kab. Bandung Barat	4.888.710	161.713	5.050.423	3.740.599	62.238	3.802.837	8.853.260
27	Kab. Pangandaran	4.888.710	161.713	5.050.423	3.740.599	62.238	3.802.837	8.853.260
IX	**Provinsi Jawa Tengah**	**1.343.696**	**44.790**	**1.388.486**	**536.600**	**8.943**	**545.543**	**1.934.029**
1	Kab. Banjarnegara	79.041	2.634	81.675	31.565	526	32.091	113.766
2	Kab. Banyumas	79.041	2.634	81.675	31.565	526	32.091	113.766
3	Kab. Batang	79.041	2.634	81.675	31.565	526	32.091	113.766
4	Kab. Blora	2.687.393	89.579	2.776.972	66.131	1.102	67.233	2.844.205
5	Kab. Boyolali	79.041	2.634	81.675	31.565	526	32.091	113.766
6	Kab. Brebes	79.041	2.634	81.675	31.565	526	32.091	113.766
7	Kab. Cilacap	79.041	2.634	81.675	31.565	526	32.091	113.766
8	Kab. Demak	79.041	2.634	81.675	31.565	526	32.091	113.766
9	Kab. Grobogan	79.041	2.634	81.675	31.565	526	32.091	113.766
10	Kab. Jepara	79.041	2.634	81.675	31.565	526	32.091	113.766
11	Kab. Karanganyar	79.041	2.634	81.675	31.565	526	32.091	113.766
12	Kab. Kebumen	79.041	2.634	81.675	31.565	526	32.091	113.766
13	Kab. Kendal	79.041	2.634	81.675	31.565	526	32.091	113.766
14	Kab. Klaten	79.041	2.634	81.675	31.565	526	32.091	113.766
15	Kab. Kudus	79.041	2.634	81.675	31.565	526	32.091	113.766
16	Kab. Magelang	79.041	2.634	81.675	31.565	526	32.091	113.766
17	Kab. Pati	79.041	2.634	81.675	31.565	526	32.091	113.766
18	Kab. Pekalongan	79.041	2.634	81.675	31.565	526	32.091	113.766
19	Kab. Pemalang	79.041	2.634	81.675	31.565	526	32.091	113.766
20	Kab. Purbalingga	79.041	2.634	81.675	31.565	526	32.091	113.766
21	Kab. Purworejo	79.041	2.634	81.675	31.565	526	32.091	113.766
22	Kab. Rembang	79.041	2.634	81.675	31.565	526	32.091	113.766
23	Kab. Semarang	79.041	2.634	81.675	31.565	526	32.091	113.766
24	Kab. Sragen	79.041	2.634	81.675	31.565	526	32.091	113.766
25	Kab. Sukoharjo	79.041	2.634	81.675	31.565	526	32.091	113.766
26	Kab. Tegal	79.041	2.634	81.675	31.565	526	32.091	113.766
27	Kab. Temanggung	79.041	2.634	81.675	31.565	526	32.091	113.766
28	Kab. Wonogiri	79.041	2.634	81.675	31.565	526	32.091	113.766
29	Kab. Wonosobo	79.041	2.634	81.675	31.565	526	32.091	113.766
30	Kota Magelang	79.041	2.634	81.675	31.565	526	32.091	113.766
31	Kota Pekalongan	79.041	2.634	81.675	31.565	526	32.091	113.766
32	Kota Salatiga	79.041	2.634	81.675	31.565	526	32.091	113.766
33	Kota Semarang	79.041	2.634	81.675	1.038.635	17.311	1.055.946	1.137.621
34	Kota Surakarta	79.041	2.634	81.675	31.565	526	32.091	113.766
35	Kota Tegal	79.041	2.634	81.675	31.565	526	32.091	113.766
X	**Provinsi Jawa Timur**	**464.209.852**	**15.476.572**	**479.686.424**	**11.282.354**	**191.161**	**11.473.515**	**491.159.939**
1	Kab. Bangkalan	27.338.406	911.204	28.249.610	1.224.825	20.332	1.245.157	29.494.767
2	Kab. Banyuwangi	25.086.214	836.131	25.922.345	596.535	9.860	606.395	26.528.740
3	Kab. Blitar	25.086.214	836.131	25.922.345	596.535	9.860	606.395	26.528.740
4	Kab. Bojonegoro	913.153.268	30.438.366	943.591.634	3.359.020	55.901	3.414.921	947.006.555
5	Kab. Bondowoso	25.086.214	836.131	25.922.345	596.535	9.860	606.395	26.528.740
6	Kab. Gresik	25.097.848	836.518	25.934.366	659.677	10.912	670.589	26.604.955
7	Kab. Jember	25.086.214	836.131	25.922.345	596.535	9.860	606.395	26.528.740
8	Kab. Jombang	25.086.214	836.131	25.922.345	596.535	9.860	606.395	26.528.740
9	Kab. Kediri	25.086.214	836.131	25.922.345	596.535	9.860	606.395	26.528.740
10	Kab. Lamongan	25.086.214	836.131	25.922.345	596.535	9.860	606.395	26.528.740
11	Kab. Lumajang	25.086.214	836.131	25.922.345	596.535	9.860	606.395	26.528.740
12	Kab. Madiun	25.086.214	836.131	25.922.345	596.535	9.860	606.395	26.528.740
13	Kab. Magetan	25.086.214	836.131	25.922.345	596.535	9.860	606.395	26.528.740
14	Kab. Malang	25.086.214	836.131	25.922.345	596.535	9.860	606.395	26.528.740
15	Kab. Mojokerto	25.086.214	836.131	25.922.345	596.535	9.860	606.395	26.528.740
16	Kab. Nganjuk	25.086.214	836.131	25.922.345	596.535	9.860	606.395	26.528.740
17	Kab. Ngawi	25.086.214	836.131	25.922.345	596.535	9.860	606.395	26.528.740
18	Kab. Pacitan	25.086.214	836.131	25.922.345	596.535	9.860	606.395	26.528.740
19	Kab. Pamekasan	25.086.214	836.131	25.922.345	596.535	9.860	606.395	26.528.740
20	Kab. Pasuruan	25.086.214	836.131	25.922.345	596.535	9.860	606.395	26.528.740
21	Kab. Ponorogo	25.086.214	836.131	25.922.345	596.535	9.860	606.395	26.528.740
22	Kab. Probolinggo	25.086.214	836.131	25.922.345	596.535	9.860	606.395	26.528.740
23	Kab. Sampang	25.086.214	836.131	25.922.345	596.535	9.860	606.395	26.528.740
24	Kab. Sidoarjo	25.261.062	841.959	26.103.021	872.686	14.462	887.148	26.990.169
25	Kab. Situbondo	25.086.214	836.131	25.922.345	596.535	9.860	606.395	26.528.740
26	Kab. Sumenep	25.086.214	836.131	25.922.345	596.535	9.860	606.395	26.528.740
27	Kab. Trenggalek	25.086.214	836.131	25.922.345	596.535	9.860	606.395	26.528.740
28	Kab. Tuban	29.412.215	980.331	30.392.546	596.535	9.860	606.395	30.998.941
29	Kab. Tulungagung	25.086.214	836.131	25.922.345	596.535	9.860	606.395	26.528.740
30	Kota Blitar	25.086.214	836.131	25.922.345	596.535	9.860	606.395	26.528.740
31	Kota Kediri	25.086.214	836.131	25.922.345	596.535	9.860	606.395	26.528.740
32	Kota Madiun	25.086.214	836.131	25.922.345	596.535	9.860	606.395	26.528.740
33	Kota Malang	25.086.214	836.131	25.922.345	596.535	9.860	606.395	26.528.740
34	Kota Mojokerto	25.086.214	836.131	25.922.345	596.535	9.860	606.395	26.528.740
35	Kota Pasuruan	25.086.214	836.131	25.922.345	596.535	9.860	606.395	26.528.740
36	Kota Probolinggo	25.086.214	836.131	25.922.345	596.535	9.860	606.395	26.528.740
37	Kota Surabaya	25.086.214	836.131	25.922.345	596.535	9.860	606.395	26.528.740
38	Kota Batu	25.086.214	836.131	25.922.345	596.535	9.860	606.395	26.528.740
XI	**Provinsi Kalimantan Tengah**	**209.177**	**6.972**	**216.149**	**628.084**	**10.468**	**638.552**	**854.701**
1	Kab. Barito Selatan	32.181	1.073	33.254	96.628	1.610	98.238	131.492
2	Kab. Barito Utara	400.431	13.347	413.778	1.256.168	20.936	1.277.104	1.690.882
3	Kab. Kapuas	32.181	1.073	33.254	96.628	1.610	98.238	131.492
4	Kab. Kotawaringin Barat	32.181	1.073	33.254	96.628	1.610	98.238	131.492
5	Kab. Kotawaringin Timur	32.181	1.073	33.254	96.628	1.610	98.238	131.492
6	Kota Palangkaraya	32.181	1.073	33.254	96.628	1.610	98.238	131.492
7	Kab. Katingan	32.181	1.073	33.254	96.628	1.610	98.238	131.492
8	Kab. Seruyan	32.181	1.073	33.254	96.628	1.610	98.238	131.492
9	Kab. Sukamara	32.181	1.073	33.254	96.628	1.610	98.238	131.492
10	Kab. Lamandau	32.181	1.073	33.254	96.628	1.610	98.238	131.492
11	Kab. Gunung Mas	32.181	1.073	33.254	96.628	1.610	98.238	131.492
12	Kab. Pulang Pisau	32.181	1.073	33.254	96.628	1.610	98.238	131.492
13	Kab. Murung Raya	32.181	1.073	33.254	96.628	1.610	98.238	131.492
14	Kab. Barito Timur	50.104	1.670	51.774	96.628	1.610	98.238	150.012
XII	**Provinsi Kalimantan Selatan**	**4.180.265**	**139.342**	**4.319.607**	-	-	-	**4.319.607**
1	Kab. Banjar	696.711	23.224	719.935	-	-	-	719.935
2	Kab. Barito Kuala	696.711	23.224	719.935	-	-	-	719.935
3	Kab. Hulu Sungai Selatan	696.711	23.224	719.935	-	-	-	719.935
4	Kab. Hulu Sungai Tengah	696.711	23.224	719.935	-	-	-	719.935
5	Kab. Hulu Sungai Utara	696.711	23.224	719.935	-	-	-	719.935
6	Kab. Kotabaru	696.711	23.224	719.935	-	-	-	719.935
7	Kab. Tabalong	8.158.108	271.937	8.430.045	-	-	-	8.430.045
8	Kab. Tanah Laut	696.711	23.224	719.935	-	-	-	719.935
9	Kab. Tapin	696.711	23.224	719.935	-	-	-	719.935
10	Kota Banjarbaru	696.711	23.224	719.935	-	-	-	719.935
11	Kota Banjarmasin	696.711	23.224	719.935	-	-	-	719.935
12	Kab. Balangan	899.133	29.971	929.104	-	-	-	929.104
13	Kab. Tanah Bumbu	696.711	23.224	719.935	-	-	-	719.935
XIII	**Provinsi Kalimantan Timur**	**225.219.846**	**7.583.015**	**232.802.861**	**685.822.913**	**11.539.683**	**697.362.596**	**930.165.457**
1	Kab. Berau	47.525.976	1.576.631	49.102.607	145.118.200	2.407.706	147.525.906	196.628.513
2	Kab. Kutai Kartanegara	228.440.506	7.607.115	236.047.621	769.433.161	12.812.956	782.246.117	1.018.293.738
3	Kab. Kutai Barat	47.525.976	1.576.631	49.102.607	145.118.200	2.407.706	147.525.906	196.628.513
4	Kab. Kutai Timur	50.004.898	1.659.261	51.664.159	145.118.200	2.407.706	147.525.906	199.190.065
5	Kab. Paser	47.525.976	1.576.631	49.102.607	145.118.200	2.407.706	147.525.906	196.628.513
6	Kota Balikpapan	47.525.976	1.576.631	49.102.607	145.118.200	2.407.706	147.525.906	196.628.513
7	Kota Bontang	54.018.449	1.793.047	55.811.496	145.286.884	2.410.518	147.697.402	203.508.898
8	Kota Samarinda	48.861.760	1.621.157	50.482.917	145.947.268	2.421.524	148.368.792	198.851.709

www.peraturan.go.id

LAMPIRAN IX
RINCIAN DANA BAGI HASIL SUMBER DAYA ALAM PERTAMBANGAN MINYAK BUMI DAN GAS BUMI
MENURUT PROVINSI/KABUPATEN/KOTA

(dalam ribuan rupiah)

NO	NAMA DAERAH	MINYAK BUMI			GAS BUMI			JUMLAH
		15%	0,5%	SUB JUMLAH	30%	0,5%	SUB JUMLAH	
1	2	3	4	5 = 3 + 4	6	7	8 = 6 + 7	9 = 5 + 8
9	Kab. Penajam Paser Utara	54.864.792	1.821.258	56.686.050	156.096.491	2.590.678	158.687.169	215.373.219
10	Kab. Mahakam Ulu	47.525.976	1.576.631	49.102.607	145.118.200	2.407.706	147.525.906	196.628.513
XIV	**Provinsi Sulawesi Tengah**	**2.895.427**	**96.514**	**2.991.941**	**8.889.264**	**148.154**	**9.037.418**	**12.029.359**
1	Kab. Banggai	482.571	16.086	498.657	17.778.528	296.308	18.074.836	18.573.493
2	Kab. Banggai Kepulauan	482.571	16.086	498.657	1.481.544	24.692	1.506.236	2.004.893
3	Kab. Buol	482.571	16.086	498.657	1.481.544	24.692	1.506.236	2.004.893
4	Kab. Toli-Toli	482.571	16.086	498.657	1.481.544	24.692	1.506.236	2.004.893
5	Kab. Donggala	482.571	16.086	498.657	1.481.544	24.692	1.506.236	2.004.893
6	Kab. Morowali	482.571	16.086	498.657	1.481.544	24.692	1.506.236	2.004.893
7	Kab. Poso	482.571	16.086	498.657	1.481.544	24.692	1.506.236	2.004.893
8	Kota Palu	482.571	16.086	498.657	1.481.544	24.692	1.506.236	2.004.893
9	Kab. Parigi Moutong	482.571	16.086	498.657	1.481.544	24.692	1.506.236	2.004.893
10	Kab. Tojo Una Una	482.571	16.086	498.657	1.481.544	24.692	1.506.236	2.004.893
11	Kab. Sigi	482.571	16.086	498.657	1.481.544	24.692	1.506.236	2.004.893
12	Kab. Banggai Laut	482.571	16.086	498.657	1.481.544	24.692	1.506.236	2.004.893
13	Kab. Morowali Utara	5.790.853	193.028	5.983.881	1.481.544	24.692	1.506.236	7.490.117
XV	**Provinsi Sulawesi Selatan**	**-**	**-**	**-**	**1.871.758**	**31.196**	**1.902.954**	**1.902.954**
1	Kab. Bantaeng	-	-	-	162.761	2.712	165.473	165.473
2	Kab. Barru	-	-	-	162.761	2.712	165.473	165.473
3	Kab. Bone	-	-	-	162.761	2.712	165.473	165.473
4	Kab. Bulukumba	-	-	-	162.761	2.712	165.473	165.473
5	Kab. Enrekang	-	-	-	162.761	2.712	165.473	165.473
6	Kab. Gowa	-	-	-	162.761	2.712	165.473	165.473
7	Kab. Jeneponto	-	-	-	162.761	2.712	165.473	165.473
8	Kab. Luwu	-	-	-	162.761	2.712	165.473	165.473
9	Kab. Luwu Utara	-	-	-	162.761	2.712	165.473	165.473
10	Kab. Maros	-	-	-	162.761	2.712	165.473	165.473
11	Kab. Pangkajene Kepulauan	-	-	-	162.761	2.712	165.473	165.473
12	Kota Palopo	-	-	-	162.761	2.712	165.473	165.473
13	Kab. Luwu Timur	-	-	-	162.761	2.712	165.473	165.473
14	Kab. Pinrang	-	-	-	162.761	2.712	165.473	165.473
15	Kab. Sinjai	-	-	-	162.761	2.712	165.473	165.473
16	Kab. Kepulauan Selayar	-	-	-	162.761	2.712	165.473	165.473
17	Kab. Sidenreng Rappang	-	-	-	162.761	2.712	165.473	165.473
18	Kab. Soppeng	-	-	-	162.761	2.712	165.473	165.473
19	Kab. Takalar	-	-	-	162.761	2.712	165.473	165.473
20	Kab. Tana Toraja	-	-	-	162.761	2.712	165.473	165.473
21	Kab. Wajo	-	-	-	3.743.515	62.392	3.805.907	3.805.907
22	Kota Pare-pare	-	-	-	162.761	2.712	165.473	165.473
23	Kota Makassar	-	-	-	162.761	2.712	165.473	165.473
24	Kab. Toraja Utara	-	-	-	162.761	2.712	165.473	165.473
XVI	**Provinsi Maluku**	**99.648**	**3.321**	**102.969**	**-**	**-**	**-**	**102.969**
1	Kab. Maluku Tenggara Barat	19.929	664	20.593	-	-	-	20.593
2	Kab. Maluku Tengah	19.929	664	20.593	-	-	-	20.593
3	Kab. Maluku Tenggara	19.929	664	20.593	-	-	-	20.593
4	Kab. Buru	19.929	664	20.593	-	-	-	20.593
5	Kota Ambon	19.929	664	20.593	-	-	-	20.593
6	Kab. Seram Bagian Barat	19.929	664	20.593	-	-	-	20.593
7	Kab. Seram Bagian Timur	199.296	6.643	205.939	-	-	-	205.939
8	Kab. Kepulauan Aru	19.929	664	20.593	-	-	-	20.593
9	Kota Tual	19.929	664	20.593	-	-	-	20.593
10	Kab. Maluku Barat Daya	19.929	664	20.593	-	-	-	20.593
11	Kab. Buru Selatan	19.929	664	20.593	-	-	-	20.593
XVII	**Provinsi Bangka Belitung**	**3.737.207**	**127.065**	**3.864.272**	**-**	**-**	**-**	**3.864.272**
1	Kab. Bangka	1.067.773	35.236	1.103.009	-	-	-	1.103.009
2	Kab. Belitung	1.067.773	35.236	1.103.009	-	-	-	1.103.009
3	Kota Pangkal Pinang	1.067.773	35.236	1.103.009	-	-	-	1.103.009
4	Kab. Bangka Selatan	1.067.773	35.236	1.103.009	-	-	-	1.103.009
5	Kab. Bangka Tengah	1.067.773	35.236	1.103.009	-	-	-	1.103.009
6	Kab. Bangka Barat	1.067.773	35.236	1.103.009	-	-	-	1.103.009
7	Kab. Belitung Timur	1.067.773	35.236	1.103.009	-	-	-	1.103.009
XVIII	**Provinsi Kepulauan Riau**	**57.081.996**	**1.905.821**	**58.987.817**	**151.285.347**	**2.550.890**	**153.836.237**	**212.824.054**
1	Kab. Natuna	73.627.750	2.520.484	78.148.234	114.341.880	1.901.488	116.243.368	194.391.602
2	Kab. Kepulauan Anambas	49.402.681	1.646.315	51.048.996	82.900.464	1.377.465	84.277.929	135.326.925
3	Kab. Karimun	18.806.767	626.451	19.433.218	46.218.805	766.103	46.984.908	66.418.126
4	Kota Batam	18.806.767	626.451	19.433.218	46.218.805	766.103	46.984.908	66.418.126
5	Kota Tanjung Pinang	18.806.767	626.451	19.433.218	46.218.805	766.103	46.984.908	66.418.126
6	Kab. Lingga	18.806.767	626.451	19.433.218	46.218.805	766.103	46.984.908	66.418.126
7	Kab. Bintan	18.806.767	626.451	19.433.218	46.218.805	766.103	46.984.908	66.418.126
XIX	**Provinsi Papua Barat**	**6.724.809**	**-**	**6.724.809**	**53.578.604**	**-**	**53.578.604**	**60.303.413**
	DBH SDA Migas dalam rangka Otsus	-	-	123.288.177	-	-	357.190.693	480.478.870
1	Kab. Fak Fak	1.120.801	-	1.120.801	8.929.767	-	8.929.767	10.050.568
2	Kab. Manokwari	1.120.801	-	1.120.801	8.929.767	-	8.929.767	10.050.568
3	Kab. Sorong	8.359.451	-	8.359.451	9.861.746	-	9.861.746	18.221.197
4	Kota Sorong	1.120.801	-	1.120.801	8.929.767	-	8.929.767	10.050.568
5	Kab. Raja Ampat	1.120.801	-	1.120.801	8.929.767	-	8.929.767	10.050.568
6	Kab. Sorong Selatan	1.120.801	-	1.120.801	8.929.767	-	8.929.767	10.050.568
7	Kab. Teluk Bintuni	6.210.970	-	6.210.970	106.225.229	-	106.225.229	112.436.199
8	Kab. Teluk Wondama	1.120.801	-	1.120.801	8.929.767	-	8.929.767	10.050.568
9	Kab. Kaimana	1.120.801	-	1.120.801	8.929.767	-	8.929.767	10.050.568
10	Kab. Maybrat	1.120.801	-	1.120.801	8.929.767	-	8.929.767	10.050.568
11	Kab. Tambrauw	1.120.801	-	1.120.801	8.929.767	-	8.929.767	10.050.568
12	Kab. Manokwari Selatan	1.120.801	-	1.120.801	8.929.767	-	8.929.767	10.050.568
13	Kab. Pegunungan Arfak	1.120.801	-	1.120.801	8.929.767	-	8.929.767	10.050.568
XX	**Provinsi Kalimantan Utara**	**12.220.229**	**407.341**	**12.627.570**	**1.421.369**	**23.689**	**1.445.058**	**14.072.628**
1	Kab. Bulungan	16.140.024	538.001	16.678.025	1.719.734	28.662	1.748.396	18.426.421
2	Kab. Malinau	6.110.115	203.671	6.313.786	710.684	11.845	722.529	7.036.315
3	Kab. Nunukan	8.470.645	282.355	8.753.000	1.478.110	24.635	1.502.745	10.255.745
4	Kota Tarakan	11.959.470	398.649	12.358.119	1.066.263	17.771	1.084.034	13.442.153
5	Kab. Tana Tidung	6.200.662	206.689	6.407.352	710.684	11.845	722.529	7.129.881
	TOTAL	**8.971.594.127**	**296.531.368**	**9.545.521.550**	**5.525.157.749**	**86.821.086**	**6.033.165.350**	**15.578.686.900**

PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA,

JOKO WIDODO

www.peraturan.go.id

LAMPIRAN X

PERATURAN PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA
NOMOR 36 TAHUN 2015

TENTANG
RINCIAN ANGGARAN
PENDAPATAN DAN BELANJA NEGARA
TAHUN ANGGARAN 2015

RINCIAN DANA BAGI HASIL SUMBER DAYA ALAM PERTAMBANGAN UMUM MENURUT PROVINSI/KABUPATEN/KOTA

www.peraturan.go.id

LAMPIRAN X
RINCIAN DANA BAGI HASIL SUMBER DAYA ALAM PERTAMBANGAN UMUM
MENURUT PROVINSI/KABUPATEN/KOTA

(Dalam Ribuan Rupiah)

NO	NAMA DAERAH	IURAN TETAP	ROYALTI	JUMLAH
1	2	3	4	5 = 3 + 4
I	**Provinsi Aceh**	**7.001.450**	**2.220.507**	**9.221.957**
1	Kab. Aceh Barat	2.797.251	3.132.336	5.929.587
2	Kab. Aceh Besar	370.546	1.285.737	1.656.283
3	Kab. Aceh Selatan	1.827.569	201.864	2.029.433
4	Kab. Aceh Singkil	1.354.303	201.864	1.556.167
5	Kab. Aceh Tengah	6.817.198	201.864	7.019.062
6	Kab. Aceh Tenggara	1.152.265	201.864	1.354.129
7	Kab. Aceh Timur	173.860	201.864	375.724
8	Kab. Aceh Utara	-	201.864	201.864
9	Kab. Bireuen	295.680	201.864	497.544
10	Kab. Pidie	3.846.584	201.864	4.048.448
11	Kab. Simeulue	-	201.864	201.864
12	Kota Banda Aceh	-	201.864	201.864
13	Kota Sabang	-	201.864	201.864
14	Kota Langsa	-	201.864	201.864
15	Kota Lhokseumawe	-	201.864	201.864
16	Kab. Gayo Lues	2.685.957	201.864	2.887.821
17	Kab. Aceh Barat Daya	76.818	201.864	278.682
18	Kab. Aceh Jaya	977.193	201.864	1.179.057
19	Kab. Nagan Raya	4.889.660	426.668	5.316.328
20	Kab. Aceh Tamiang	94.115	201.864	295.979
21	Kab. Bener Meriah	-	201.864	201.864
22	Kab. Pidie Jaya	78.710	201.864	280.574
23	Kota Subulussalam	568.090	201.864	769.954
II	**Provinsi Sumatera Utara**	**5.991.637**	**6.565.549**	**12.557.186**
1	Kab. Asahan	-	410.347	410.347
2	Kab. Dairi	2.074.195	410.347	2.484.542
3	Kab. Deli Serdang	-	410.347	410.347
4	Kab. Karo	241.748	410.347	652.095
5	Kab. Labuhanbatu	-	410.347	410.347
6	Kab. Langkat	-	410.347	410.347
7	Kab. Mandailing Natal	7.396.760	410.347	7.807.107
8	Kab. Nias	-	410.347	410.347
9	Kab. Simalungun	-	410.347	410.347
10	Kab. Tapanuli Selatan	3.607.000	13.131.099	16.738.099
11	Kab. Tapanuli Tengah	1.554.685	410.347	1.965.032
12	Kab. Tapanuli Utara	5.248.083	410.347	5.658.430
13	Kab. Toba Samosir	471.314	410.347	881.661
14	Kota Binjai	-	410.347	410.347
15	Kota Medan	-	410.347	410.347
16	Kota Pematang Siantar	-	410.347	410.347
17	Kota Sibolga	-	410.347	410.347
18	Kota Tanjung Balai	-	410.347	410.347
19	Kota Tebing Tinggi	-	410.347	410.347
20	Kota Padang Sidempuan	3.253.958	410.347	3.664.305
21	Kab. Pakpak Bharat	57.598	410.347	467.945
22	Kab. Nias Selatan	-	410.347	410.347
23	Kab. Humbang Hasundutan	-	410.347	410.347
24	Kab. Serdang Bedagai	-	410.347	410.347
25	Kab. Samosir	-	410.347	410.347
26	Kab. Batu Bara	-	410.347	410.347
27	Kab. Padang Lawas	-	410.347	410.347
28	Kab. Padang Lawas Utara	-	410.347	410.347
29	Kab. Labuhanbatu Selatan	-	410.347	410.347
30	Kab. Labuhanbatu Utara	61.206	410.347	471.553
31	Kab. Nias Utara	-	410.347	410.347
32	Kab. Nias Barat	-	410.347	410.347
33	Kota Gunungsitoli	-	410.347	410.347
III	**Provinsi Sumatera Barat**	**2.241.809**	**11.662.455**	**13.904.264**
1	Kab. Limapuluh Kota	222.473	1.343.491	1.565.964
2	Kab. Agam	33.294	1.295.828	1.329.122
3	Kab. Kepulauan Mentawai	-	1.295.828	1.295.828
4	Kab. Padang Pariaman	-	1.295.828	1.295.828
5	Kab. Pasaman	2.868.217	1.295.828	4.164.045
6	Kab. Pesisir Selatan	708.585	1.295.828	2.004.413
7	Kab. Sijunjung	1.280.265	5.129.672	6.409.937

www.peraturan.go.id

LAMPIRAN X
RINCIAN DANA BAGI HASIL SUMBER DAYA ALAM PERTAMBANGAN UMUM
MENURUT PROVINSI/KABUPATEN/KOTA

(Dalam Ribuan Rupiah)

8	Kab. Solok	1.832.486	2.334.471	4.166.957
9	Kab. Tanah Datar	60.227	1.295.828	1.356.055
10	Kota Bukit Tinggi	-	1.295.828	1.295.828
11	Kota Padang Panjang	-	1.295.828	1.295.828
12	Kota Padang	-	1.295.828	1.295.828
13	Kota Payakumbuh	-	1.295.828	1.295.828
14	Kota Sawahlunto	342.953	6.727.077	7.070.030
15	Kota Solok	-	1.295.828	1.295.828
16	Kota Pariaman	-	1.295.828	1.295.828
17	Kab. Pasaman Barat	716.462	2.457.599	3.174.061
18	Kab. Dharmasraya	708.650	8.405.468	9.114.118
19	Kab. Solok Selatan	193.623	4.702.100	4.895.723
IV	**Provinsi Riau**	**3.836.990**	**17.056.688**	**20.893.678**
1	Kab. Bengkalis	-	3.101.216	3.101.216
2	Kab. Indragiri Hilir	520.574	11.091.676	11.612.250
3	Kab. Indragiri Hulu	8.713.660	16.581.772	25.295.432
4	Kab. Kampar	2.026.591	3.199.090	5.225.681
5	Kab. Kuantan Singingi	2.563.463	12.544.487	15.107.950
6	Kab. Pelalawan	103.488	3.101.216	3.204.704
7	Kab. Rokan Hilir	-	3.101.216	3.101.216
8	Kab. Rokan Hulu	327.022	3.101.216	3.428.238
9	Kab. Siak	-	3.101.216	3.101.216
10	Kota Dumai	-	3.101.216	3.101.216
11	Kota Pekanbaru	-	3.101.216	3.101.216
12	Kab. Kepulauan Meranti	752.299	3.101.216	3.853.515
V	**Provinsi Jambi**	**7.987.985**	**32.546.657**	**40.534.642**
1	Kab. Batang Hari	7.536.247	11.961.558	19.497.805
2	Kab. Bungo	1.535.975	33.030.508	34.566.483
3	Kab. Kerinci	-	6.509.331	6.509.331
4	Kab. Merangin	1.820.768	11.926.813	13.747.581
5	Kab. Muaro Jambi	4.393.420	8.219.373	12.612.793
6	Kab. Sarolangun	8.576.825	17.235.135	25.811.960
7	Kab. Tanjung Jabung Barat	3.901.172	9.291.273	13.192.445
8	Kab. Tanjung Jabung Timur	-	6.509.331	6.509.331
9	Kab. Tebo	4.187.533	12.484.639	16.672.172
10	Kota Jambi	-	6.509.331	6.509.331
11	Kota Sungai Penuh	-	6.509.331	6.509.331
VI	**Provinsi Sumatera Selatan**	**26.247.659**	**291.728.164**	**317.975.823**
1	Kab. Lahat	4.634.252	201.032.766	205.667.018
2	Kab. Musi Banyuasin	22.137.437	104.768.164	126.905.601
3	Kab. Musi Rawas	9.819.095	46.196.508	56.015.603
4	Kab. Muara Enim	16.410.092	320.588.121	336.998.213
5	Kab. Ogan Komering Ilir	14.166.676	36.466.021	50.632.697
6	Kab. Ogan Komering Ulu	6.080.275	40.543.856	46.624.131
7	Kota Palembang	-	36.466.021	36.466.021
8	Kota Prabumulih	734.351	36.466.021	37.200.372
9	Kota Pagar Alam	-	36.466.021	36.466.021
10	Kota Lubuk Linggau	-	36.466.021	36.466.021
11	Kab. Banyuasin	8.859.756	49.781.097	58.640.853
12	Kab. Ogan Ilir	2.429.011	36.466.021	38.895.032
13	Kab. Ogan Komering Ulu Timur	5.489.796	36.466.021	41.955.817
14	Kab. Ogan Komering Ulu Selatan	2.890.124	36.466.021	39.356.145
15	Kab. Empat Lawang	3.861.492	36.466.021	40.327.513
16	Kab. Penukal Abab Lematang Ilir	3.110.885	36.779.210	39.890.095
17	Kab. Musi Rawas Utara	4.367.394	39.028.751	43.396.145
VII	**Provinsi Bengkulu**	**4.434.985**	**77.229.537**	**81.664.522**
1	Kab. Bengkulu Selatan	534.294	17.162.119	17.696.413
2	Kab. Bengkulu Utara	6.992.548	97.462.154	104.454.702
3	Kab. Rejang Lebong	-	17.162.119	17.162.119
4	Kota Bengkulu	-	17.162.119	17.162.119
5	Kab. Kaur	2.833.844	17.162.119	19.995.963
6	Kab. Seluma	2.821.778	19.172.538	21.994.316
7	Kab. Mukomuko	1.632.893	17.162.119	18.795.012
8	Kab. Lebong	692.719	20.840.587	21.533.306
9	Kab. Kepahiang	-	17.162.119	17.162.119
10	Kab. Bengkulu Tengah	2.231.864	68.470.153	70.702.017
VIII	**Provinsi Lampung**	**1.765.625**	**942.180**	**2.707.805**
1	Kab. Lampung Barat	94.860	134.597	229.457
2	Kab. Lampung Selatan	76.404	134.597	211.001
3	Kab. Lampung Tengah	129.804	224.512	354.316

www.peraturan.go.id

LAMPIRAN X
RINCIAN DANA BAGI HASIL SUMBER DAYA ALAM PERTAMBANGAN UMUM
MENURUT PROVINSI/KABUPATEN/KOTA

(Dalam Ribuan Rupiah)

4	Kab. Lampung Utara	202.904	134.597	337.501
5	Kab. Lampung Timur	-	134.597	134.597
6	Kab. Tanggamus	1.122.307	1.794.446	2.916.753
7	Kab. Tulang Bawang	1.713.199	134.597	1.847.796
8	Kab. Way Kanan	236.062	134.597	370.659
9	Kota Bandar Lampung	-	134.597	134.597
10	Kota Metro	-	134.597	134.597
11	Kab. Pesawaran	422.166	134.597	556.763
12	Kab. Pringsewu	65.653	134.597	200.250
13	Kab. Mesuji	2.999.141	134.597	3.133.738
14	Kab. Tulang Bawang Barat	-	134.597	134.597
15	Kab. Pesisir Barat	-	134.597	134.597
IX	**Provinsi Jawa Barat**	**1.385.976**	**12.770.785**	**14.156.761**
1	Kab. Bandung	-	982.368	982.368
2	Kab. Bekasi	-	982.368	982.368
3	Kab. Bogor	570.763	22.398.025	22.968.788
4	Kab. Ciamis	1.231.980	982.368	2.214.348
5	Kab. Cianjur	1.327.727	3.291.048	4.618.775
6	Kab. Cirebon	-	982.368	982.368
7	Kab. Garut	1.349.631	1.075.227	2.424.858
8	Kab. Indramayu	-	982.368	982.368
9	Kab. Karawang	-	982.368	982.368
10	Kab. Kuningan	-	982.368	982.368
11	Kab. Majalengka	-	982.368	982.368
12	Kab. Purwakarta	13.767	982.368	996.135
13	Kab. Subang	-	982.368	982.368
14	Kab. Sukabumi	919.500	985.573	1.905.073
15	Kab. Sumedang	-	982.368	982.368
16	Kab. Tasikmalaya	111.959	1.721.170	1.833.129
17	Kota Bandung	-	982.368	982.368
18	Kota Bekasi	-	982.368	982.368
19	Kota Bogor	-	982.368	982.368
20	Kota Cirebon	-	982.368	982.368
21	Kota Depok	-	982.368	982.368
22	Kota Sukabumi	-	982.368	982.368
23	Kota Tasikmalaya	-	982.368	982.368
24	Kota Cimahi	-	982.368	982.368
25	Kota Banjar	-	982.368	982.368
26	Kab. Bandung Barat	18.575	982.368	1.000.943
27	Kab. Pangandaran	-	982.368	982.368
X	**Provinsi Jawa Tengah**	**331.805**	**294.354**	**626.159**
1	Kab. Banjarnegara	-	17.315	17.315
2	Kab. Banyumas	624.831	17.315	642.146
3	Kab. Batang	-	17.315	17.315
4	Kab. Blora	-	17.315	17.315
5	Kab. Boyolali	-	17.315	17.315
6	Kab. Brebes	-	17.315	17.315
7	Kab. Cilacap	72.397	423.833	496.230
8	Kab. Demak	-	17.315	17.315
9	Kab. Grobogan	-	17.315	17.315
10	Kab. Jepara	18.569	88.747	107.316
11	Kab. Karanganyar	-	17.315	17.315
12	Kab. Kebumen	59.970	17.315	77.285
13	Kab. Kendal	-	17.315	17.315
14	Kab. Klaten	-	17.315	17.315
15	Kab. Kudus	-	17.315	17.315
16	Kab. Magelang	-	17.315	17.315
17	Kab. Pati	-	17.315	17.315
18	Kab. Pekalongan	-	17.315	17.315
19	Kab. Pemalang	-	17.315	17.315
20	Kab. Purbalingga	-	17.315	17.315
21	Kab. Purworejo	-	17.315	17.315
22	Kab. Rembang	-	17.315	17.315
23	Kab. Semarang	-	17.315	17.315
24	Kab. Sragen	-	17.315	17.315
25	Kab. Sukoharjo	-	17.315	17.315
26	Kab. Tegal	-	17.315	17.315
27	Kab. Temanggung	-	17.315	17.315
28	Kab. Wonogiri	551.452	110.756	662.208
29	Kab. Wonosobo	-	17.315	17.315

www.peraturan.go.id

LAMPIRAN X
RINCIAN DANA BAGI HASIL SUMBER DAYA ALAM PERTAMBANGAN UMUM
MENURUT PROVINSI/KABUPATEN/KOTA

(Dalam Ribuan Rupiah)

30	Kota Magelang	-	17.315	17.315
31	Kota Pekalongan	-	17.315	17.315
32	Kota Salatiga	-	17.315	17.315
33	Kota Semarang	-	17.315	17.315
34	Kota Surakarta	-	17.315	17.315
35	Kota Tegal	-	17.315	17.315
XI	**Provinsi DI Yogyakarta**	**139.194**	**-**	**139.194**
1	Kab. Bantul	-	-	-
2	Kab. Gunung Kidul	-	-	-
3	Kab. Kulon Progo	556.777	-	556.777
4	Kab. Sleman	-	-	-
5	Kota Yogyakarta	-	-	-
XII	**Provinsi Jawa Timur**	**330.080**	**158.086**	**488.166**
1	Kab. Bangkalan	-	8.545	8.545
2	Kab. Banyuwangi	491.775	18.186	509.961
3	Kab. Blitar	5.050	17.880	22.930
4	Kab. Bojonegoro	-	8.545	8.545
5	Kab. Bondowoso	-	8.545	8.545
6	Kab. Gresik	-	8.545	8.545
7	Kab. Jember	120.324	18.540	138.864
8	Kab. Jombang	-	8.545	8.545
9	Kab. Kediri	-	8.545	8.545
10	Kab. Lamongan	-	8.545	8.545
11	Kab. Lumajang	455.205	264.442	719.647
12	Kab. Madiun	-	8.545	8.545
13	Kab. Magetan	-	8.545	8.545
14	Kab. Malang	-	8.545	8.545
15	Kab. Mojokerto	-	8.545	8.545
16	Kab. Nganjuk	-	8.545	8.545
17	Kab. Ngawi	-	8.545	8.545
18	Kab. Pacitan	124.984	8.545	133.529
19	Kab. Pamekasan	-	8.545	8.545
20	Kab. Pasuruan	-	8.545	8.545
21	Kab. Ponorogo	-	8.545	8.545
22	Kab. Probolinggo	-	8.545	8.545
23	Kab. Sampang	-	8.545	8.545
24	Kab. Sidoarjo	-	8.545	8.545
25	Kab. Situbondo	-	8.545	8.545
26	Kab. Sumenep	-	8.545	8.545
27	Kab. Trenggalek	122.024	8.545	130.569
28	Kab. Tuban	-	8.545	8.545
29	Kab. Tulungagung	958	31.303	32.261
30	Kota Blitar	-	8.545	8.545
31	Kota Kediri	-	8.545	8.545
32	Kota Madiun	-	8.545	8.545
33	Kota Malang	-	8.545	8.545
34	Kota Mojokerto	-	8.545	8.545
35	Kota Pasuruan	-	8.545	8.545
36	Kota Probolinggo	-	8.545	8.545
37	Kota Surabaya	-	8.545	8.545
38	Kota Batu	-	8.545	8.545
XIII	**Provinsi Kalimantan Barat**	**31.452.934**	**4.817.624**	**36.270.558**
1	Kab. Bengkayang	1.357.437	741.173	2.098.610
2	Kab. Landak	10.628.853	741.173	11.370.026
3	Kab. Kapuas Hulu	17.168.198	1.135.663	18.303.861
4	Kab. Ketapang	41.102.361	6.892.126	47.994.487
5	Kab. Mempawah	2.128.689	741.173	2.869.862
6	Kab. Sambas	491.538	741.173	1.232.711
7	Kab. Sanggau	21.833.768	3.089.807	24.923.575
8	Kab. Sintang	8.839.058	741.173	9.580.231
9	Kota Pontianak	-	741.173	741.173
10	Kota Singkawang	-	741.173	741.173
11	Kab. Sekadau	280.896	741.173	1.022.069
12	Kab. Melawi	14.352.668	741.173	15.093.841
13	Kab. Kayong Utara	5.013.689	741.173	5.754.862
14	Kab. Kubu Raya	2.614.580	741.173	3.355.753
XIV	**Provinsi Kalimantan Tengah**	**35.389.341**	**186.514.619**	**221.903.960**
1	Kab. Barito Selatan	5.734.359	44.319.626	50.053.985
2	Kab. Barito Utara	30.971.064	74.348.457	105.319.521
3	Kab. Kapuas	18.345.820	61.509.920	79.855.740

www.peraturan.go.id

LAMPIRAN X
RINCIAN DANA BAGI HASIL SUMBER DAYA ALAM PERTAMBANGAN UMUM
MENURUT PROVINSI/KABUPATEN/KOTA

(Dalam Ribuan Rupiah)

4	Kab. Kotawaringin Barat	733.671	28.694.557	29.428.228
5	Kab. Kotawaringin Timur	2.406.983	29.770.393	32.177.376
6	Kota Palangkaraya	638.077	28.694.557	29.332.634
7	Kab. Katingan	6.530.723	46.831.479	53.362.202
8	Kab. Seruyan	2.163.077	34.927.535	37.090.612
9	Kab. Sukamara	1.931.562	28.694.557	30.626.119
10	Kab. Lamandau	4.523.106	28.694.557	33.217.663
11	Kab. Gunung Mas	15.181.370	28.694.557	43.875.927
12	Kab. Pulang Pisau	-	28.694.557	28.694.557
13	Kab. Murung Raya	40.852.095	216.957.563	257.809.658
14	Kab. Barito Timur	11.545.458	65.226.163	76.771.621
XV	**Provinsi Kalimantan Selatan**	**14.036.954**	**1.038.212.409**	**1.052.249.363**
1	Kab. Banjar	3.369.939	303.669.875	307.039.814
2	Kab. Barito Kuala	-	173.035.401	173.035.401
3	Kab. Hulu Sungai Selatan	816.905	196.782.487	197.599.392
4	Kab. Hulu Sungai Tengah	198.874	173.035.401	173.234.275
5	Kab. Hulu Sungai Utara	-	173.035.401	173.035.401
6	Kab. Kotabaru	19.289.717	423.391.233	442.680.950
7	Kab. Tabalong	8.348.016	424.500.079	432.848.095
8	Kab. Tanah Laut	6.001.887	490.082.263	496.084.150
9	Kab. Tapin	1.455.851	406.704.477	408.160.328
10	Kota Banjarbaru	501.414	173.035.401	173.536.815
11	Kota Banjarmasin	-	173.035.401	173.035.401
12	Kab. Balangan	2.747.917	474.184.842	476.932.759
13	Kab. Tanah Bumbu	13.417.296	568.357.374	581.774.670
XVI	**Provinsi Kalimantan Timur**	38.439.548	2.218.288.052	2.256.727.600
1	Kab. Berau	14.367.827	1.023.710.452	1.038.078.279
2	Kab. Kutai Kartanegara	43.401.723	1.561.193.079	1.604.594.802
3	Kab. Kutai Barat	16.052.438	769.090.885	785.143.323
4	Kab. Kutai Timur	50.161.609	2.054.213.610	2.104.375.219
5	Kab. Paser	12.226.282	830.513.283	842.739.565
6	Kota Balikpapan	-	492.952.896	492.952.896
7	Kota Bontang	48.846	492.952.896	493.001.742
8	Kota Samarinda	2.039.027	648.369.863	650.408.890
9	Kab. Penajam Paser Utara	7.685.921	507.202.270	514.888.191
10	Kab. Mahakam Ulu	7.774.486	492.952.896	500.727.382
XVII	**Provinsi Sulawesi Utara**	**4.287.450**	**15.917.096**	**20.204.546**
1	Kab. Bolaang Mongondow	1.085.222	2.273.871	3.359.093
2	Kab. Minahasa	-	2.273.871	2.273.871
3	Kab. Kepulauan Sangihe	147.840	2.273.871	2.421.711
4	Kota Bitung	117.740	6.226.834	6.344.574
5	Kota Manado	3.844	2.273.871	2.277.715
6	Kab. Kepulauan Talaud	1.412.582	2.273.871	3.686.453
7	Kab. Minahasa Selatan	1.579.679	2.273.871	3.853.550
8	Kota Tomohon	-	2.273.871	2.273.871
9	Kab. Minahasa Utara	1.651.905	24.885.430	26.537.335
10	Kab. Kep. Siau Tagulandang Biaro	-	2.273.871	2.273.871
11	Kota Kotamobagu	-	2.273.871	2.273.871
12	Kab. Bolaang Mongondow Utara	2.535.633	2.273.871	4.809.504
13	Kab. Minahasa Tenggara	827.638	2.273.871	3.101.509
14	Kab. Bolaang Mongondow Timur	4.560.075	2.273.871	6.833.946
15	Kab. Bolaang Mongondow Selatan	3.227.643	5.269.669	8.497.312
XVIII	**Provinsi Sulawesi Tengah**	**22.628.055**	**7.457.328**	**30.085.383**
1	Kab. Banggai	6.668.382	1.242.888	7.911.270
2	Kab. Banggai Kepulauan	-	1.242.888	1.242.888
3	Kab. Buol	2.286.751	1.242.888	3.529.639
4	Kab. Toli-Toli	5.270.141	1.242.888	6.513.029
5	Kab. Donggala	4.266.781	1.242.888	5.509.669
6	Kab. Morowali	25.481.944	9.546.890	35.028.834
7	Kab. Poso	4.259.063	1.242.888	5.501.951
8	Kota Palu	1.100.210	1.242.888	2.343.098
9	Kab. Parigi Moutong	22.459.616	1.242.888	23.702.504
10	Kab. Tojo Una Una	9.591.895	1.242.888	10.834.783
11	Kab. Sigi	1.923.960	1.242.888	3.166.848
12	Kab. Banggai Laut	-	1.242.888	1.242.888
13	Kab. Morowali Utara	7.203.474	6.610.655	13.814.129
XIX	**Provinsi Sulawesi Selatan**	**6.409.752**	**16.761.954**	**23.171.706**
1	Kab. Bantaeng	-	1.457.561	1.457.561
2	Kab. Barru	347.601	1.457.561	1.805.162
3	Kab. Bone	1.429.018	1.769.318	3.198.336

www.peraturan.go.id

LAMPIRAN X
RINCIAN DANA BAGI HASIL SUMBER DAYA ALAM PERTAMBANGAN UMUM
MENURUT PROVINSI/KABUPATEN/KOTA

(Dalam Ribuan Rupiah)

4	Kab. Bulukumba	591.360	1.457.561	2.048.921
5	Kab. Enrekang	558.173	1.457.561	2.015.734
6	Kab. Gowa	-	1.457.561	1.457.561
7	Kab. Jeneponto	-	1.457.561	1.457.561
8	Kab. Luwu	3.294.472	1.457.561	4.752.033
9	Kab. Luwu Utara	5.808.101	1.457.561	7.265.662
10	Kab. Maros	273.814	1.457.561	1.731.375
11	Kab. Pangkajene Kepulauan	60.768	1.520.315	1.581.083
12	Kota Palopo	384.384	1.457.561	1.841.945
13	Kab. Luwu Timur	8.212.148	33.149.400	41.361.548
14	Kab. Pinrang	-	1.457.561	1.457.561
15	Kab. Sinjai	1.228.462	1.457.561	2.686.023
16	Kab. Kepulauan Selayar	2.345.978	1.457.561	3.803.539
17	Kab. Sidenreng Rappang	786.804	1.457.561	2.244.365
18	Kab. Soppeng	5.914	1.457.561	1.463.475
19	Kab. Takalar	444	1.457.561	1.458.005
20	Kab. Tana Toraja	227.674	1.457.561	1.685.235
21	Kab. Wajo	55.056	1.457.561	1.512.617
22	Kota Pare-pare	-	1.457.561	1.457.561
23	Kota Makassar	-	1.457.561	1.457.561
24	Kab. Toraja Utara	28.835	1.457.561	1.486.396
XX	**Provinsi Sulawesi Tenggara**	**10.798.946**	**42.993.517**	**53.792.463**
1	Kab. Buton	1.316.375	2.819.510	4.135.885
2	Kab. Konawe	6.944.142	7.126.815	14.070.957
3	Kab. Kolaka	3.388.126	71.444.091	74.832.217
4	Kab. Muna	207.534	3.307.194	3.514.728
5	Kota Kendari	-	6.614.387	6.614.387
6	Kota Bau-bau	213.135	6.614.387	6.827.522
7	Kab. Konawe Selatan	3.014.357	10.016.964	13.031.321
8	Kab. Bombana	8.580.261	11.369.843	19.950.104
9	Kab. Wakatobi	-	6.614.387	6.614.387
10	Kab. Kolaka Utara	3.122.026	10.012.694	13.134.720
11	Kab. Konawe Utara	11.550.914	8.675.731	20.226.645
12	Kab. Buton Utara	739.856	6.614.387	7.354.243
13	Kab. Konawe Kepulauan	1.875.109	6.614.387	8.489.496
14	Kab. Kolaka Timur	189.590	6.614.387	6.803.977
15	Kab. Muna Barat	89.861	3.307.194	3.397.055
16	Kab. Buton Tengah	1.177.530	2.522.123	3.699.653
17	Kab. Buton Selatan	786.968	1.685.588	2.472.556
XXI	**Provinsi Nusa Tenggara Barat**	**5.012.191**	**14.099.169**	**19.111.360**
1	Kab. Bima	3.639.333	3.133.149	6.772.482
2	Kab. Dompu	1.855.079	3.133.149	4.988.228
3	Kab. Lombok Barat	551.902	3.198.568	3.750.470
4	Kab. Lombok Tengah	-	3.133.149	3.133.149
5	Kab. Lombok Timur	591	3.133.149	3.133.740
6	Kab. Sumbawa	8.949.347	3.133.149	12.082.496
7	Kota Mataram	-	3.133.149	3.133.149
8	Kota Bima	-	3.133.149	3.133.149
9	Kab. Sumbawa Barat	5.052.515	28.132.920	33.185.435
10	Kab. Lombok Utara	-	3.133.149	3.133.149
XXII	**Provinsi Nusa Tenggara Timur**	**5.285.320**	**95.675**	**5.380.995**
1	Kab. Alor	538.285	9.111	547.396
2	Kab. Belu	3.273.949	80.605	3.354.554
3	Kab. Ende	1.261.992	9.111	1.271.103
4	Kab. Flores Timur	-	9.111	9.111
5	Kab. Kupang	1.442.948	9.111	1.452.059
6	Kab. Lembata	-	9.111	9.111
7	Kab. Manggarai	660.685	9.111	669.796
8	Kab. Ngada	939.464	9.111	948.575
9	Kab. Sikka	-	9.111	9.111
10	Kab. Sumba Barat	820.512	9.111	829.623
11	Kab. Sumba Timur	1.462.788	9.111	1.471.899
12	Kab. Timor Tengah Selatan	1.882.051	119.857	2.001.908
13	Kab. Timor Tengah Utara	3.161.186	9.111	3.170.297
14	Kota Kupang	-	9.111	9.111
15	Kab. Rote Ndao	456.837	9.111	465.948
16	Kab. Manggarai Barat	-	9.111	9.111
17	Kab. Nagekeo	2.040.559	9.111	2.049.670
18	Kab. Sumba Barat Daya	1.370.181	9.111	1.379.292
19	Kab. Sumba Tengah	1.207.261	9.111	1.216.372

www.peraturan.go.id

LAMPIRAN X
RINCIAN DANA BAGI HASIL SUMBER DAYA ALAM PERTAMBANGAN UMUM
MENURUT PROVINSI/KABUPATEN/KOTA

(Dalam Ribuan Rupiah)

20	Kab. Manggarai Timur	386.037	9.111	395.148
21	Kab. Sabu Raijua	118.272	9.111	127.383
22	Kab. Malaka	118.272	9.111	127.383
XXIII	**Provinsi Maluku**	**341.419**	**180.955**	**522.374**
1	Kab. Maluku Tenggara Barat	-	36.191	36.191
2	Kab. Maluku Tengah	51.714	36.191	87.905
3	Kab. Maluku Tenggara	-	36.191	36.191
4	Kab. Buru	-	36.191	36.191
5	Kota Ambon	-	36.191	36.191
6	Kab. Seram Bagian Barat	235.332	36.191	271.523
7	Kab. Seram Bagian Timur	45.830	36.191	82.021
8	Kab. Kepulauan Aru	-	36.191	36.191
9	Kota Tual	-	36.191	36.191
10	Kab. Maluku Barat Daya	747.497	361.909	1.109.406
11	Kab. Buru Selatan	285.302	36.191	321.493
XXIV	**Provinsi Papua**	**29.994.456**	**414.543.747**	**444.538.203**
1	Kab. Biak Numfor	-	29.610.268	29.610.268
2	Kab. Jayapura	1.878.419	29.610.268	31.488.687
3	Kab. Jayawijaya	380.244	29.610.268	29.990.512
4	Kab. Merauke	-	29.610.268	29.610.268
5	Kab. Mimika	12.486.892	828.673.610	841.160.502
6	Kab. Nabire	8.156.126	30.024.153	38.180.279
7	Kab. Paniai	11.766.675	29.610.268	41.376.943
8	Kab. Puncak Jaya	10.553.382	29.610.268	40.163.650
9	Kab. Kepulauan Yapen	-	29.610.268	29.610.268
10	Kota Jayapura	-	29.610.268	29.610.268
11	Kab. Sarmi	14.893.565	29.610.268	44.503.833
12	Kab. Keerom	6.027.292	29.610.268	35.637.560
13	Kab. Yahukimo	16.132.449	29.610.268	45.742.717
14	Kab. Pegunungan Bintang	7.427.926	29.610.268	37.038.194
15	Kab. Tolikara	2.288.859	29.610.268	31.899.127
16	Kab. Boven Digoel	2.131.261	29.610.268	31.741.529
17	Kab. Mappi	-	29.610.268	29.610.268
18	Kab. Asmat	-	29.610.268	29.610.268
19	Kab. Waropen	5.224.370	29.610.268	34.834.638
20	Kab. Supiori	944.106	29.610.268	30.554.374
21	Kab. Mamberamo Raya	19.686.257	29.610.268	49.296.525
22	Kab. Mamberamo Tengah	-	29.610.268	29.610.268
23	Kab. Yalimo	-	29.610.268	29.610.268
24	Kab. Lanny Jaya	-	29.610.268	29.610.268
25	Kab. Nduga	-	29.610.268	29.610.268
26	Kab. Dogiyai	-	29.610.268	29.610.268
27	Kab. Puncak	-	29.610.268	29.610.268
28	Kab. Intan Jaya	-	29.610.268	29.610.268
29	Kab. Deiyai	-	29.610.268	29.610.268
XXV	**Provinsi Maluku Utara**	**10.762.696**	**41.724.240**	**52.486.936**
1	Kab. Halmahera Tengah	5.919.848	14.895.094	20.814.942
2	Kota Ternate	-	9.272.053	9.272.053
3	Kab. Halmahera Barat	1.239.609	9.272.053	10.511.662
4	Kab. Halmahera Timur	6.980.440	33.140.632	40.121.072
5	Kab. Halmahera Selatan	9.137.807	18.849.391	27.987.198
6	Kab. Halmahera Utara	5.337.831	44.379.525	49.717.356
7	Kab. Kepulauan Sula	12.709.128	9.272.053	21.981.181
8	Kota Tidore Kepulauan	1.300.075	9.272.053	10.572.128
9	Kab. Pulau Morotai	426.045	9.272.053	9.698.098
10	Kab. Pulau Taliabu	-	9.272.053	9.272.053
XXVI	**Provinsi Banten**	**503.950**	**5.427.169**	**5.931.119**
1	Kab. Lebak	1.744.722	1.557.288	3.302.010
2	Kab. Pandeglang	271.079	10.847.671	11.118.750
3	Kab. Serang	-	1.550.620	1.550.620
4	Kab. Tangerang	-	1.550.620	1.550.620
5	Kota Cilegon	-	1.550.620	1.550.620
6	Kota Tangerang	-	1.550.620	1.550.620
7	Kota Serang	-	1.550.620	1.550.620
8	Kota Tangerang Selatan	-	1.550.620	1.550.620
XXVII	**Provinsi Bangka Belitung**	**29.370.566**	**130.267.007**	**159.637.573**
1	Kab. Bangka	6.051.062	136.041.423	142.092.485
2	Kab. Belitung	2.001.680	59.786.407	61.788.087
3	Kota Pangkal Pinang	14.122	43.197.091	43.211.213
4	Kab. Bangka Selatan	4.120.812	60.606.130	64.726.942

www.peraturan.go.id

LAMPIRAN X
RINCIAN DANA BAGI HASIL SUMBER DAYA ALAM PERTAMBANGAN UMUM
MENURUT PROVINSI/KABUPATEN/KOTA

(Dalam Ribuan Rupiah)

5	Kab. Bangka Tengah	2.133.491	49.550.089	51.683.580
6	Kab. Bangka Barat	6.910.822	98.857.872	105.768.694
7	Kab. Belitung Timur	4.540.217	61.203.662	65.743.879
XXVIII	**Provinsi Gorontalo**	**2.410.663**	**-**	**2.410.663**
1	Kab. Boalemo	146.628	-	146.628
2	Kab. Gorontalo	2.442.607	-	2.442.607
3	Kota Gorontalo	-	-	-
4	Kab. Pohuwato	3.163.303	-	3.163.303
5	Kab. Bone Bolango	2.109.233	-	2.109.233
6	Kab. Gorontalo Utara	1.780.881	-	1.780.881
XXIX	**Provinsi Kepulauan Riau**	**12.930.863**	**27.553.037**	**40.483.900**
1	Kab. Natuna	-	8.846.404	8.846.404
2	Kab. Kepulauan Anambas	-	8.846.404	8.846.404
3	Kab. Karimun	2.598.285	28.717.416	31.315.701
4	Kota Batam	-	8.846.404	8.846.404
5	Kota Tanjung Pinang	169.901	9.301.999	9.471.900
6	Kab. Lingga	4.296.556	12.685.483	16.982.039
7	Kab. Bintan	234.770	15.226.066	15.460.836
XXX	**Provinsi Papua Barat**	**21.052.089**	**641.550**	**21.693.639**
1	Kab. Fak Fak	10.491.763	106.925	10.598.688
2	Kab. Manokwari	17.723.357	106.925	17.830.282
3	Kab. Sorong	5.794.740	148.559	5.943.299
4	Kota Sorong	4.783.511	106.925	4.890.436
5	Kab. Raja Ampat	5.616.765	1.241.465	6.858.230
6	Kab. Sorong Selatan	3.692.927	106.925	3.799.852
7	Kab. Teluk Bintuni	15.497.442	106.925	15.604.367
8	Kab. Teluk Wondama	10.785.314	106.925	10.892.239
9	Kab. Kaimana	5.746.956	106.925	5.853.881
10	Kab. Maybrat	240.368	106.925	347.293
11	Kab. Tambrauw	3.835.213	106.925	3.942.138
12	Kab. Manokwari Selatan	-	106.925	106.925
13	Kab. Pegunungan Arfak	-	106.925	106.925
XXXI	**Provinsi Sulawesi Barat**	**1.009.313**	**-**	**1.009.313**
1	Kab. Majene	121.436	-	121.436
2	Kab. Mamuju	893.663	-	893.663
3	Kab. Polewali Mandar	376.844	-	376.844
4	Kab. Mamasa	893.663	-	893.663
5	Kab. Mamuju Utara	861.020	-	861.020
6	Kab. Mamuju Tengah	890.626	-	890.626
XXXII	**Provinsi Kalimantan Utara**	**14.975.439**	**124.307.373**	**139.282.812**
1	Kab. Bulungan	22.209.660	79.241.180	101.450.840
2	Kab. Malinau	17.511.737	104.001.092	121.512.829
3	Kab. Nunukan	18.029.532	180.635.699	198.665.231
4	Kota Tarakan	-	62.153.687	62.153.687
5	Kab. Tana Tidung	2.150.830	71.197.836	73.348.666
TOTAL		**1.657.460.800**	**23.685.320.000**	**25.342.780.800**

PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA,

JOKO WIDODO

www.peraturan.go.id

LAMPIRAN XI

PERATURAN PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA
NOMOR 36 TAHUN 2015

TENTANG
RINCIAN ANGGARAN
PENDAPATAN DAN BELANJA NEGARA
TAHUN ANGGARAN 2015

RINCIAN DANA BAGI HASIL SUMBER DAYA ALAM HASIL KEHUTANAN MENURUT PROVINSI/KABUPATEN/KOTA

www.peraturan.go.id

LAMPIRAN XI
RINCIAN ALOKASI DANA BAGI HASIL SUMBER DAYA ALAM HASIL KEHUTANAN
MENURUT PROVINSI/KABUPATEN/KOTA

(Dalam Ribuan Rupiah)

NO	NAMA DAERAH	IIUPH	PSDH	DR	JUMLAH
1	2	3	4	5	6=3+4+5
I	**Provinsi Aceh**	**-**	**56.040**	**-**	**56.040**
1	Kab. Aceh Barat	-	6.011	-	6.011
2	Kab. Aceh Besar	-	7.844	-	7.844
3	Kab. Aceh Selatan	-	17.313	-	17.313
4	Kab. Aceh Singkil	-	5.324	-	5.324
5	Kab. Aceh Tengah	-	6.011	-	6.011
6	Kab. Aceh Tenggara	-	5.095	-	5.095
7	Kab. Aceh Timur	-	18.840	-	18.840
8	Kab. Aceh Utara	-	6.775	-	6.775
9	Kab. Bireuen	-	5.247	-	5.247
10	Kab. Pidie	-	5.553	-	5.553
11	Kab. Simeulue	-	7.385	-	7.385
12	Kota Banda Aceh	-	5.095	-	5.095
13	Kota Sabang	-	5.095	-	5.095
14	Kota Langsa	-	7.385	-	7.385
15	Kota Lhokseumawe	-	5.095	-	5.095
16	Kab. Gayo Lues	-	5.705	-	5.705
17	Kab. Aceh Barat Daya	-	23.422	-	23.422
18	Kab. Aceh Jaya	-	12.731	-	12.731
19	Kab. Nagan Raya	-	18.840	-	18.840
20	Kab. Aceh Tamiang	-	29.531	-	29.531
21	Kab. Bener Meriah	-	5.095	-	5.095
22	Kab. Pidie Jaya	-	5.095	-	5.095
23	Kota Subulussalam	-	9.676	-	9.676
II	**Provinsi Sumatera Utara**	**-**	**12.315.014**	**-**	**12.315.014**
1	Kab. Asahan	-	769.688	-	769.688
2	Kab. Dairi	-	882.519	489.279	1.371.798
3	Kab. Deli Serdang	-	769.688	-	769.688
4	Kab. Karo	-	2.480.888	-	2.480.888
5	Kab. Labuhanbatu	-	790.768	125.973	916.741
6	Kab. Langkat	-	769.688	-	769.688
7	Kab. Mandailing Natal	-	1.377.288	2.277.593	3.654.881
8	Kab. Nias	-	769.688	-	769.688
9	Kab. Simalungun	-	4.379.561	20.637.538	25.017.099
10	Kab. Tapanuli Selatan	-	4.130.088	14.641.220	18.771.308
11	Kab. Tapanuli Tengah	-	769.688	-	769.688
12	Kab. Tapanuli Utara	-	880.799	629.865	1.510.664
13	Kab. Toba Samosir	-	1.567.599	1.194.225	2.761.824
14	Kota Binjai	-	769.688	-	769.688
15	Kota Medan	-	769.688	-	769.688
16	Kota Pematang Siantar	-	769.688	-	769.688
17	Kota Sibolga	-	769.688	-	769.688
18	Kota Tanjung Balai	-	769.688	-	769.688
19	Kota Tebing Tinggi	-	769.688	-	769.688
20	Kota Padang Sidempuan	-	769.688	-	769.688
21	Kab. Pakpak Bharat	-	2.101.758	6.087.649	8.189.407
22	Kab. Nias Selatan	-	6.488.039	28.951.760	35.439.799
23	Kab. Humbang Hasundutan	-	3.826.288	10.678.107	14.504.395
24	Kab. Serdang Bedagai	-	769.688	-	769.688
25	Kab. Samosir	-	856.798	27.966	884.764
26	Kab. Batu Bara	-	769.688	-	769.688
27	Kab. Padang Lawas	-	1.774.088	-	1.774.088
28	Kab. Padang Lawas Utara	-	769.688	-	769.688
29	Kab. Labuhanbatu Selatan	-	3.099.493	-	3.099.493
30	Kab. Labuhanbatu Utara	-	769.688	-	769.688
31	Kab. Nias Utara	-	769.688	-	769.688
32	Kab. Nias Barat	-	769.688	-	769.688
33	Kota Gunungsitoli	-	769.688	-	769.688
III	**Provinsi Sumatera Barat**	**-**	**2.190.162**	**-**	**2.190.162**
1	Kab. Limapuluh Kota	-	247.746	2.865	250.611
2	Kab. Agam	-	254.969	65.605	320.574
3	Kab. Kepulauan Mentawai	-	3.475.957	12.413.528	15.889.485
4	Kab. Padang Pariaman	-	243.351	-	243.351
5	Kab. Pasaman	-	250.042	33.664	283.706
6	Kab. Pesisir Selatan	-	327.184	387.601	714.785
7	Kab. Sijunjung	-	258.462	63.516	321.978
8	Kab. Solok	-	251.144	29.285	280.429
9	Kab. Tanah Datar	-	252.087	22.108	274.195
10	Kota Bukit Tinggi	-	243.351	-	243.351
11	Kota Padang Panjang	-	243.351	-	243.351
12	Kota Padang	-	243.351	-	243.351
13	Kota Payakumbuh	-	243.351	-	243.351
14	Kota Sawahlunto	-	245.165	-	245.165
15	Kota Solok	-	243.351	-	243.351
16	Kota Pariaman	-	243.351	-	243.351
17	Kab. Pasaman Barat	-	389.487	833.773	1.223.260
18	Kab. Dharmasraya	-	526.791	583.842	1.110.633

www.peraturan.go.id

LAMPIRAN XI
RINCIAN ALOKASI DANA BAGI HASIL SUMBER DAYA ALAM HASIL KEHUTANAN
MENURUT PROVINSI/KABUPATEN/KOTA

(Dalam Ribuan Rupiah)

19	Kab. Solok Selatan	-	578.155	1.209.459	1.787.614
IV	**Provinsi Riau**	**-**	**14.106.332**	**-**	**14.106.332**
1	Kab. Bengkalis	-	4.664.585	-	4.664.585
2	Kab. Indragiri Hilir	-	5.706.606	-	5.706.606
3	Kab. Indragiri Hulu	-	4.135.697	-	4.135.697
4	Kab. Kampar	-	6.492.060	-	6.492.060
5	Kab. Kuantan Singingi	-	5.235.333	-	5.235.333
6	Kab. Pelalawan	-	8.062.969	-	8.062.969
7	Kab. Rokan Hilir	-	5.078.242	-	5.078.242
8	Kab. Rokan Hulu	-	2.590.007	592.891	3.182.898
9	Kab. Siak	-	4.624.665	-	4.624.665
10	Kota Dumai	-	4.097.297	4.170.212	8.267.509
11	Kota Pekanbaru	-	2.564.788	-	2.564.788
12	Kab. Kepulauan Meranti	-	3.173.078	-	3.173.078
V	**Provinsi Jambi**	**62.400**	**4.176.223**	**-**	**4.238.623**
1	Kab. Batang Hari	172.800	1.979.826	182.560	2.335.186
2	Kab. Bungo	-	1.060.151	1.114.081	2.174.232
3	Kab. Kerinci	-	835.245	-	835.245
4	Kab. Merangin	76.800	1.067.257	345.166	1.489.223
5	Kab. Muaro Jambi	-	1.509.931	1.916.308	3.426.239
6	Kab. Sarolangun	-	1.234.447	1.422.992	2.657.439
7	Kab. Tanjung Jabung Barat	-	3.323.565	-	3.323.565
8	Kab. Tanjung Jabung Timur	-	2.124.765	1.817.175	3.941.940
9	Kab. Tebo	-	1.895.344	1.690.810	3.586.154
10	Kota Jambi	-	839.118	15.495	854.613
11	Kota Sungai Penuh	-	835.245	-	835.245
VI	**Provinsi Sumatera Selatan**	**124.800**	**16.620.584**	**-**	**16.745.384**
1	Kab. Lahat	-	3.591.887	-	3.591.887
2	Kab. Musi Banyuasin	-	11.761.773	20.503.040	32.264.813
3	Kab. Musi Rawas	297.806	2.379.762	-	2.677.568
4	Kab. Muara Enim	-	4.186.583	-	4.186.583
5	Kab. Ogan Komering Ilir	-	2.374.369	-	2.374.369
6	Kab. Ogan Komering Ulu	-	2.374.369	-	2.374.369
7	Kota Palembang	-	2.374.369	-	2.374.369
8	Kota Prabumulih	-	2.374.369	-	2.374.369
9	Kota Pagar Alam	-	2.374.369	-	2.374.369
10	Kota Lubuk Linggau	-	2.374.369	-	2.374.369
11	Kab. Banyuasin	-	12.074.192	22.622.632	34.696.824
12	Kab. Ogan Ilir	-	8.355.840	-	8.355.840
13	Kab. OKU Timur	-	2.385.850	-	2.385.850
14	Kab. OKU Selatan	-	2.374.369	-	2.374.369
15	Kab. Empat Lawang	-	2.374.369	-	2.374.369
16	Kab. Penukal Abab Lematang Ilir	-	1.142.163	-	1.142.163
17	Kab. Musi Rawas Utara	201.394	1.609.333	-	1.810.727
VII	**Provinsi Bengkulu**	**-**	**237.916**	**-**	**237.916**
1	Kab. Bengkulu Selatan	-	165.536	107.532	273.068
2	Kab. Bengkulu Utara	-	166.648	741.018	907.666
3	Kab. Rejang Lebong	-	60.513	39.740	100.253
4	Kota Bengkulu	-	52.870	-	52.870
5	Kab. Kaur	-	241.747	462.675	704.422
6	Kab. Seluma	-	52.870	-	52.870
7	Kab. Mukomuko	-	52.870	-	52.870
8	Kab. Lebong	-	52.870	-	52.870
9	Kab. Kepahiang	-	52.870	-	52.870
10	Kab. Bengkulu Tengah	-	52.870	-	52.870
VIII	**Provinsi Lampung**	**21.600**	**369.456**	**-**	**391.056**
1	Kab. Lampung Barat	-	31.292	-	31.292
2	Kab. Lampung Selatan	-	56.839	-	56.839
3	Kab. Lampung Tengah	-	56.839	-	56.839
4	Kab. Lampung Utara	-	56.839	-	56.839
5	Kab. Lampung Timur	-	56.839	-	56.839
6	Kab. Tanggamus	-	56.839	-	56.839
7	Kab. Tulang Bawang	-	56.839	-	56.839
8	Kab. Way Kanan	86.400	146.341	-	232.741
9	Kota Bandar Lampung	-	56.839	-	56.839
10	Kota Metro	-	56.839	-	56.839
11	Kab. Pesawaran	-	56.839	-	56.839
12	Kab. Pringsewu	-	56.839	-	56.839
13	Kab. Mesuji	-	649.410	-	649.410
14	Kab. Tulang Bawang Barat	-	56.839	-	56.839
15	Kab. Pesisir Barat	-	25.547	-	25.547
IX	**Provinsi Jawa Barat**	**-**	**7.454.081**	**-**	**7.454.081**
1	Kab. Bandung	-	617.626	-	617.626
2	Kab. Bekasi	-	596.327	-	596.327
3	Kab. Bogor	-	619.278	-	619.278
4	Kab. Ciamis	-	2.597.615	-	2.597.615
5	Kab. Cianjur	-	866.916	-	866.916
6	Kab. Cirebon	-	601.735	-	601.735
7	Kab. Garut	-	626.528	-	626.528
8	Kab. Indramayu	-	752.429	-	752.429

www.peraturan.go.id

LAMPIRAN XI
RINCIAN ALOKASI DANA BAGI HASIL SUMBER DAYA ALAM HASIL KEHUTANAN
MENURUT PROVINSI/KABUPATEN/KOTA

(Dalam Ribuan Rupiah)

9	Kab. Karawang	-	606.440	-	606.440
10	Kab. Kuningan	-	663.706	-	663.706
11	Kab. Majalengka	-	635.761	-	635.761
12	Kab. Purwakarta	-	825.764	-	825.764
13	Kab. Subang	-	784.859	-	784.859
14	Kab. Sukabumi	-	1.376.655	-	1.376.655
15	Kab. Sumedang	-	9.298.736	-	9.298.736
16	Kab. Tasikmalaya	-	805.753	-	805.753
17	Kota Bandung	-	596.327	-	596.327
18	Kota Bekasi	-	596.327	-	596.327
19	Kota Bogor	-	596.327	-	596.327
20	Kota Cirebon	-	596.327	-	596.327
21	Kota Depok	-	596.327	-	596.327
22	Kota Sukabumi	-	596.327	-	596.327
23	Kota Tasikmalaya	-	599.338	-	599.338
24	Kota Cimahi	-	596.327	-	596.327
25	Kota Banjar	-	754.269	-	754.269
26	Kab. Bandung Barat	-	731.387	-	731.387
27	Kab. Pangandaran	-	1.280.921	-	1.280.921
X	**Provinsi Jawa Tengah**	**-**	**5.813.679**	**-**	**5.813.679**
1	Kab. Banjarnegara	-	354.532	-	354.532
2	Kab. Banyumas	-	707.560	-	707.560
3	Kab. Batang	-	863.901	-	863.901
4	Kab. Blora	-	5.156.572	-	5.156.572
5	Kab. Boyolali	-	439.817	-	439.817
6	Kab. Brebes	-	788.101	-	788.101
7	Kab. Cilacap	-	789.848	-	789.848
8	Kab. Demak	-	344.111	-	344.111
9	Kab. Grobogan	-	1.184.003	-	1.184.003
10	Kab. Jepara	-	550.822	-	550.822
11	Kab. Karanganyar	-	341.981	-	341.981
12	Kab. Kebumen	-	347.207	-	347.207
13	Kab. Kendal	-	834.270	-	834.270
14	Kab. Klaten	-	341.981	-	341.981
15	Kab. Kudus	-	410.159	-	410.159
16	Kab. Magelang	-	342.168	-	342.168
17	Kab. Pati	-	825.190	-	825.190
18	Kab. Pekalongan	-	371.389	-	371.389
19	Kab. Pemalang	-	1.035.888	-	1.035.888
20	Kab. Purbalingga	-	350.715	-	350.715
21	Kab. Purworejo	-	354.774	-	354.774
22	Kab. Rembang	-	1.546.783	-	1.546.783
23	Kab. Semarang	-	381.216	-	381.216
24	Kab. Sragen	-	392.551	-	392.551
25	Kab. Sukoharjo	-	341.981	-	341.981
26	Kab. Tegal	-	692.142	-	692.142
27	Kab. Temanggung	-	347.638	-	347.638
28	Kab. Wonogiri	-	368.101	-	368.101
29	Kab. Wonosobo	-	358.196	-	358.196
30	Kota Magelang	-	341.981	-	341.981
31	Kota Pekalongan	-	341.981	-	341.981
32	Kota Salatiga	-	341.981	-	341.981
33	Kota Semarang	-	381.216	-	381.216
34	Kota Surakarta	-	341.981	-	341.981
35	Kota Tegal	-	341.981	-	341.981
XI	**Provinsi DI Yogyakarta**	**-**	**3.590**	**-**	3.590
1	Kab. Bantul	-	2.224	-	2.224
2	Kab. Gunung Kidul	-	6.528	-	6.528
3	Kab. Kulon Progo	-	2.019	-	2.019
4	Kab. Sleman	-	1.795	-	1.795
5	Kota Yogyakarta	-	1.795	-	1.795
XII	**Provinsi Jawa Timur**	**-**	**5.007.336**	**-**	**5.007.336**
1	Kab. Bangkalan	-	279.540	-	279.540
2	Kab. Banyuwangi	-	2.750.961	-	2.750.961
3	Kab. Blitar	-	780.480	-	780.480
4	Kab. Bojonegoro	-	1.221.093	-	1.221.093
5	Kab. Bondowoso	-	371.296	-	371.296
6	Kab. Gresik	-	291.963	-	291.963
7	Kab. Jember	-	1.050.778	-	1.050.778
8	Kab. Jombang	-	397.722	-	397.722
9	Kab. Kediri	-	551.387	-	551.387
10	Kab. Lamongan	-	692.672	-	692.672
11	Kab. Lumajang	-	455.898	-	455.898
12	Kab. Madiun	-	925.897	-	925.897
13	Kab. Magetan	-	274.836	-	274.836
14	Kab. Malang	-	609.609	-	609.609
15	Kab. Mojokerto	-	292.113	-	292.113
16	Kab. Nganjuk	-	529.960	-	529.960
17	Kab. Ngawi	-	829.959	-	829.959
18	Kab. Pacitan	-	281.689	-	281.689

www.peraturan.go.id

LAMPIRAN XI
RINCIAN ALOKASI DANA BAGI HASIL SUMBER DAYA ALAM HASIL KEHUTANAN
MENURUT PROVINSI/KABUPATEN/KOTA

(Dalam Ribuan Rupiah)

19	Kab. Pamekasan	-	270.667	-	270.667
20	Kab. Pasuruan	-	317.762	-	317.762
21	Kab. Ponorogo	-	499.001	-	499.001
22	Kab. Probolinggo	-	363.820	-	363.820
23	Kab. Sampang	-	270.667	-	270.667
24	Kab. Sidoarjo	-	270.667	-	270.667
25	Kab. Situbondo	-	337.582	-	337.582
26	Kab. Sumenep	-	370.144	-	370.144
27	Kab. Trenggalek	-	326.897	-	326.897
28	Kab. Tuban	-	1.565.789	-	1.565.789
29	Kab. Tulungagung	-	408.141	-	408.141
30	Kota Blitar	-	270.667	-	270.667
31	Kota Kediri	-	270.667	-	270.667
32	Kota Madiun	-	270.667	-	270.667
33	Kota Malang	-	270.667	-	270.667
34	Kota Mojokerto	-	270.667	-	270.667
35	Kota Pasuruan	-	270.667	-	270.667
36	Kota Probolinggo	-	270.667	-	270.667
37	Kota Surabaya	-	270.667	-	270.667
38	Kota Batu	-	275.020	-	275.020
XIII	**Provinsi Kalimantan Barat**	**28.800**	**12.237.395**	**-**	**12.266.195**
1	Kab. Bengkayang	-	1.882.676	-	1.882.676
2	Kab. Landak	-	2.169.043	951.883	3.120.926
3	Kab. Kapuas Hulu	-	2.483.046	10.164.325	12.647.371
4	Kab. Ketapang	-	9.610.891	37.970.365	47.581.256
5	Kab. Mempawah	-	1.882.676	-	1.882.676
6	Kab. Sambas	-	3.138.386	3.053.083	6.191.469
7	Kab. Sanggau	76.800	6.622.005	16.187.305	22.886.110
8	Kab. Sintang	38.400	4.469.692	18.465.754	22.973.846
9	Kota Pontianak	-	1.882.676	-	1.882.676
10	Kota Singkawang	-	1.882.676	-	1.882.676
11	Kab. Sekadau	-	1.948.393	-	1.948.393
12	Kab. Melawi	-	4.417.607	19.061.506	23.479.113
13	Kab. Kayong Utara	-	1.882.676	-	1.882.676
14	Kab. Kubu Raya	-	4.677.136	19.804.688	24.481.824
XIV	**Provinsi Kalimantan Tengah**	**4.879.200**	**14.461.887**	**-**	**19.341.087**
1	Kab. Barito Selatan	-	2.424.733	2.459.625	4.884.358
2	Kab. Barito Utara	-	6.843.125	25.097.505	31.940.630
3	Kab. Kapuas	316.800	4.031.081	10.585.972	14.933.853
4	Kab. Kotawaringin Barat	-	3.577.501	13.099.074	16.676.575
5	Kab. Kotawaringin Timur	18.000.000	2.508.475	15.563.863	36.072.338
6	Kota Palangkaraya	-	2.224.906	-	2.224.906
7	Kab. Katingan	-	5.331.830	18.626.263	23.958.093
8	Kab. Seruyan	681.600	6.575.527	16.467.199	23.724.326
9	Kab. Sukamara	-	2.224.906	-	2.224.906
10	Kab. Lamandau	-	4.824.024	17.612.185	22.436.209
11	Kab. Gunung Mas	134.400	6.877.952	18.935.642	25.947.994
12	Kab. Pulang Pisau	-	2.224.906	-	2.224.906
13	Kab. Murung Raya	-	5.953.678	16.675.942	22.629.620
14	Kab. Barito Timur	384.000	2.224.906	-	2.608.906
XV	**Provinsi Kalimantan Selatan**	**36.000**	**1.538.656**	**-**	**1.574.656**
1	Kab. Banjar	144.000	294.782	-	438.782
2	Kab. Barito Kuala	-	311.003	120.934	431.937
3	Kab. Hulu Sungai Selatan	-	256.443	-	256.443
4	Kab. Hulu Sungai Tengah	-	256.443	-	256.443
5	Kab. Hulu Sungai Utara	-	256.443	-	256.443
6	Kab. Kotabaru	-	714.629	2.280.743	2.995.372
7	Kab. Tabalong	-	1.028.643	2.993.120	4.021.763
8	Kab. Tanah Laut	-	352.099	90.449	442.548
9	Kab. Tapin	-	256.443	-	256.443
10	Kota Banjarbaru	-	256.443	-	256.443
11	Kota Banjarmasin	-	256.443	-	256.443
12	Kab. Balangan	-	256.443	-	256.443
13	Kab. Tanah Bumbu	-	1.658.370	3.065.177	4.723.547
XVI	**Provinsi Kalimantan Timur**	**11.870.414**	**21.039.856**	**-**	**32.910.270**
1	Kab. Berau	67.200	14.070.140	42.763.321	56.900.661
2	Kab. Kutai Kartanegara	-	6.287.056	3.471.818	9.758.874
3	Kab. Kutai Barat	35.868.090	10.318.829	34.525.930	80.712.849
4	Kab. Kutai Timur	-	11.937.184	26.718.887	38.656.071
5	Kab. Paser	13.392.000	6.148.672	5.721.697	25.262.369
6	Kota Balikpapan	-	4.521.824	-	4.521.824
7	Kota Bontang	-	4.521.824	-	4.521.824
8	Kota Samarinda	-	4.521.824	-	4.521.824
9	Kab. Penajam Paser Utara	-	5.692.028	3.013.906	8.705.934
10	Kab. Mahakam Ulu	15.050.310	4.329.798	14.487.138	33.867.246
XVII	**Provinsi Sulawesi Utara**	**-**	**127.285**	**-**	**127.285**
1	Kab. Bolaang Mongondow	-	18.184	-	18.184
2	Kab. Minahasa	-	18.184	-	18.184
3	Kab. Kepulauan Sangihe	-	18.184	-	18.184
4	Kota Bitung	-	18.184	-	18.184

www.peraturan.go.id

LAMPIRAN XI
RINCIAN ALOKASI DANA BAGI HASIL SUMBER DAYA ALAM HASIL KEHUTANAN
MENURUT PROVINSI/KABUPATEN/KOTA

(Dalam Ribuan Rupiah)

5	Kota Manado	-	18.184	-	18.184
6	Kab. Kepulauan Talaud	-	18.184	-	18.184
7	Kab. Minahasa Selatan	-	18.184	-	18.184
8	Kota Tomohon	-	18.184	-	18.184
9	Kab. Minahasa Utara	-	18.184	-	18.184
10	Kab. Kep. Siau Tagulandang Biaro	-	18.184	-	18.184
11	Kota Kotamobagu	-	18.184	-	18.184
12	Kab. Bolaang Mongondow Utara	-	247.851	405.386	653.237
13	Kab. Minahasa Tenggara	-	18.184	-	18.184
14	Kab. Bolaang Mongondow Timur	-	20.598	3.357	23.955
15	Kab. Bolaang Mongondow Selatan	-	22.488	5.985	28.473
XVIII	**Provinsi Sulawesi Tengah**	**2.160.000**	**1.782.384**	**-**	**3.942.384**
1	Kab. Banggai	8.640.000	772.954	972.512	10.385.466
2	Kab. Banggai Kepulauan	-	254.611	-	254.611
3	Kab. Buol	-	667.085	578.720	1.245.805
4	Kab. Toli-Toli	-	586.387	366.834	953.221
5	Kab. Donggala	-	556.090	350.709	906.799
6	Kab. Morowali	-	364.033	302.568	666.601
7	Kab. Poso	-	1.153.459	1.854.324	3.007.783
8	Kota Palu	-	356.477	-	356.477
9	Kab. Parigi Moutong	-	886.800	562.344	1.449.144
10	Kab. Tojo Una Una	-	530.803	328.538	859.341
11	Kab. Sigi	-	396.970	24.439	421.409
12	Kab. Banggai Laut	-	101.866	-	101.866
13	Kab. Morowali Utara	-	502.002	417.242	919.244
XIX	**Provinsi Sulawesi Selatan**	**-**	**6.123**	**-**	**6.123**
1	Kab. Bantaeng	-	532	-	532
2	Kab. Barru	-	532	-	532
3	Kab. Bone	-	532	-	532
4	Kab. Bulukumba	-	532	-	532
5	Kab. Enrekang	-	2.454	-	2.454
6	Kab. Gowa	-	532	-	532
7	Kab. Jeneponto	-	532	-	532
8	Kab. Luwu	-	2.797	-	2.797
9	Kab. Luwu Utara	-	2.023	-	2.023
10	Kab. Maros	-	532	-	532
11	Kab. Pangkajene Kepulauan	-	532	-	532
12	Kota Palopo	-	532	-	532
13	Kab. Luwu Timur	-	1.125	-	1.125
14	Kab. Pinrang	-	532	-	532
15	Kab. Sinjai	-	532	-	532
16	Kab. Kepulauan Selayar	-	532	-	532
17	Kab. Sidenreng Rappang	-	2.522	-	2.522
19	Kab. Soppeng	-	532	-	532
20	Kab. Takalar	-	532	-	532
21	Kab. Tana Toraja	-	3.986	-	3.986
22	Kab. Wajo	-	532	-	532
23	Kota Pare-pare	-	532	-	532
24	Kota Makassar	-	532	-	532
25	Kab. Toraja Utara	-	532	-	532
XX	**Provinsi Sulawesi Tenggara**	**244.800**	**605.019**	**-**	**849.819**
1	Kab. Buton	-	50.167	-	50.167
2	Kab. Konawe	633.266	182.415	375.561	1.191.242
3	Kab. Kolaka	-	115.622	307.853	423.475
4	Kab. Muna	-	162.355	429.354	591.709
5	Kota Kendari	-	110.003	-	110.003
6	Kota Bau-bau	-	114.949	31.493	146.442
7	Kab. Konawe Selatan	-	171.429	166.536	337.965
8	Kab. Bombana	240.000	131.385	104.054	475.439
9	Kab. Wakatobi	-	110.003	-	110.003
10	Kab. Kolaka Utara	-	131.065	106.825	237.890
11	Kab. Konawe Utara	-	410.193	1.315.159	1.725.352
12	Kab. Buton Utara	-	467.473	1.170.290	1.637.763
13	Kab. Konawe Kepulauan	105.934	30.515	62.825	199.274
14	Kab. Kolaka Timur	-	87.348	232.571	319.919
15	Kab. Muna Barat	-	70.295	185.899	256.194
16	Kab. Buton Tengah	-	44.872	-	44.872
17	Kab. Buton Selatan	-	29.987	-	29.987
XXI	**Provinsi Nusa Tenggara Barat**	**-**	**83.835**	**-**	**83.835**
1	Kab. Bima	-	18.630	-	18.630
2	Kab. Dompu	-	18.630	-	18.630
3	Kab. Lombok Barat	-	18.630	-	18.630
4	Kab. Lombok Tengah	-	18.630	-	18.630
5	Kab. Lombok Timur	-	18.630	-	18.630
6	Kab. Sumbawa	-	84.271	338.112	422.383
7	Kota Mataram	-	18.630	-	18.630
8	Kota Bima	-	18.630	-	18.630
9	Kab. Sumbawa Barat	-	102.028	322.164	424.192
10	Kab. Lombok Utara	-	18.630	-	18.630
XXII	**Provinsi Nusa Tenggara Timur**	**-**	**57.512**	**-**	**57.512**

www.peraturan.go.id

LAMPIRAN XI
RINCIAN ALOKASI DANA BAGI HASIL SUMBER DAYA ALAM HASIL KEHUTANAN
MENURUT PROVINSI/KABUPATEN/KOTA

(Dalam Ribuan Rupiah)

1	Kab. Alor	-	49.024	-	49.024
2	Kab. Belu	-	3.054	-	3.054
3	Kab. Ende	-	30.743	-	30.743
4	Kab. Flores Timur	-	5.751	-	5.751
5	Kab. Kupang	-	5.751	-	5.751
6	Kab. Lembata	-	5.751	-	5.751
7	Kab. Manggarai	-	5.751	-	5.751
8	Kab. Ngada	-	5.751	-	5.751
9	Kab. Sikka	-	46.759	-	46.759
10	Kab. Sumba Barat	-	5.751	-	5.751
11	Kab. Sumba Timur	-	5.751	-	5.751
12	Kab. Timor Tengah Selatan	-	5.751	-	5.751
13	Kab. Timor Tengah Utara	-	5.751	-	5.751
14	Kota Kupang	-	5.751	-	5.751
15	Kab. Rote Ndao	-	5.751	-	5.751
16	Kab. Manggarai Barat	-	5.751	-	5.751
17	Kab. Nagekeo	-	5.751	-	5.751
18	Kab. Sumba Barat Daya	-	5.751	-	5.751
19	Kab. Sumba Tengah	-	5.751	-	5.751
20	Kab. Manggarai Timur	-	5.751	-	5.751
21	Kab. Sabu Raijua	-	5.751	-	5.751
22	Kab. Malaka	-	2.697	-	2.697
XXIII	**Provinsi Maluku**	**1.848.000**	**11.907.771**	**-**	**13.755.771**
1	Kab. Maluku Tenggara Barat	-	2.852.887	2.162.633	5.015.520
2	Kab. Maluku Tengah	-	3.004.884	2.707.266	5.712.150
3	Kab. Maluku Tenggara	-	2.381.554	-	2.381.554
4	Kab. Buru	192.000	5.694.939	20.067.687	25.954.626
5	Kota Ambon	-	2.381.554	-	2.381.554
6	Kab. Seram Bagian Barat	-	6.911.046	18.431.134	25.342.180
7	Kab. Seram Bagian Timur	7.200.000	7.238.722	18.431.134	32.869.856
8	Kab. Kepulauan Aru	-	5.370.587	13.988.603	19.359.190
9	Kota Tual	-	2.381.554	-	2.381.554
10	Kab. Maluku Barat Daya	-	2.381.554	-	2.381.554
11	Kab. Buru Selatan	-	7.031.801	18.962.849	25.994.650
XXIV	**Provinsi Papua**	**168.000**	**11.208.134**	**-**	**11.376.134**
1	Kab. Biak Numfor	-	810.609	-	810.609
2	Kab. Jayapura	-	1.943.073	2.736.486	4.679.559
3	Kab. Jayawijaya	-	800.581	-	800.581
4	Kab. Merauke	672.000	4.485.409	15.068.755	20.226.164
5	Kab. Mimika	-	2.176.290	5.254.275	7.430.565
6	Kab. Nabire	-	3.909.831	16.607.439	20.517.270
7	Kab. Paniai	-	800.581	-	800.581
8	Kab. Puncak Jaya	-	800.581	-	800.581
9	Kab. Kepulauan Yapen	-	800.581	-	800.581
10	Kota Jayapura	-	800.581	-	800.581
11	Kab. Sarmi	-	4.976.411	14.930.146	19.906.557
12	Kab. Keerom	-	3.784.622	11.569.985	15.354.607
13	Kab. Yahukimo	-	800.581	-	800.581
14	Kab. Pegunungan Bintang	-	800.581	-	800.581
15	Kab. Tolikara	-	800.581	-	800.581
16	Kab. Boven Digoel	-	3.603.699	17.604.637	21.208.336
17	Kab. Mappi	-	1.155.114	-	1.155.114
18	Kab. Asmat	-	1.081.672	-	1.081.672
19	Kab. Waropen	-	821.627	-	821.627
20	Kab. Supiori	-	800.581	-	800.581
21	Kab. Mamberamo Raya	-	2.474.302	-	2.474.302
22	Kab. Mamberamo Tengah	-	800.581	-	800.581
23	Kab. Yalimo	-	800.581	-	800.581
24	Kab. Lanny Jaya	-	800.581	-	800.581
25	Kab. Nduga	-	800.581	-	800.581
26	Kab. Dogiyai	-	800.581	-	800.581
27	Kab. Puncak	-	800.581	-	800.581
28	Kab. Intan Jaya	-	800.581	-	800.581
29	Kab. Deiyai	-	800.581	-	800.581
XXV	**Provinsi Maluku Utara**	**-**	**1.063.522**	**-**	**1.063.522**
1	Kab. Halmahera Tengah	-	403.780	585.775	989.555
2	Kota Ternate	-	265.880	-	265.880
3	Kab. Halmahera Barat	-	265.880	-	265.880
4	Kab. Halmahera Timur	-	1.090.589	3.193.978	4.284.567
5	Kab. Halmahera Selatan	-	754.480	2.002.972	2.757.452
6	Kab. Halmahera Utara	-	265.880	-	265.880
7	Kab. Kepulauan Sula	-	424.346	1.341.087	1.765.433
8	Kota Tidore Kepulauan	-	333.640	302.335	635.975
9	Kab. Pulau Morotai	-	265.880	-	265.880
10	Kab. Pulau Taliabu	-	183.730	580.654	764.384
XXVI	**Provinsi Banten**	**-**	**645.394**	**-**	**645.394**
1	Kab. Lebak	-	284.979	-	284.979
2	Kab. Pandeglang	-	1.190.208	-	1.190.208
3	Kab. Serang	-	184.398	-	184.398
4	Kab. Tangerang	-	184.398	-	184.398

www.peraturan.go.id

LAMPIRAN XI
RINCIAN ALOKASI DANA BAGI HASIL SUMBER DAYA ALAM HASIL KEHUTANAN
MENURUT PROVINSI/KABUPATEN/KOTA

(Dalam Ribuan Rupiah)

5	Kota Cilegon	-	184.398	-	184.398
6	Kota Tangerang	-	184.398	-	184.398
7	Kota Serang	-	184.398	-	184.398
8	Kota Tangerang Selatan	-	184.398	-	184.398
XXVII	**Provinsi Bangka Belitung**	**216.000**	**-**	**-**	**216.000**
1	Kab. Bangka	-	-	-	-
2	Kab. Belitung	-	-	-	-
3	Kota Pangkal Pinang	-	-	-	-
4	Kab. Bangka Selatan	480.000	-	-	480.000
5	Kab. Bangka Tengah	-	-	-	-
6	Kab. Bangka Barat	-	-	-	-
7	Kab. Belitung Timur	384.000	-	-	384.000
XXVIII	**Provinsi Gorontalo**	**-**	**94.055**	**-**	**94.055**
1	Kab. Boalemo	-	97.127	257.326	354.453
2	Kab. Gorontalo	-	41.293	12.093	53.386
3	Kota Gorontalo	-	37.622	-	37.622
4	Kab. Pohuwato	-	78.004	174.629	252.633
5	Kab. Bone Bolango	-	44.745	30.804	75.549
6	Kab. Gorontalo Utara	-	77.429	172.145	249.574
XXIX	**Provinsi Kepulauan Riau**	**-**	**84.000**	**-**	**84.000**
1	Kab. Natuna	-	28.000	-	28.000
2	Kab. Kepulauan Anambas	-	28.000	-	28.000
3	Kab. Karimun	-	101.333	67.750	169.083
4	Kota Batam	-	41.333	-	41.333
5	Kota Tanjung Pinang	-	28.000	-	28.000
6	Kab. Lingga	-	81.333	105.860	187.193
7	Kab. Bintan	-	28.000	-	28.000
XXX	**Provinsi Papua Barat**	**-**	**18.000.808**	**-**	**18.000.808**
1	Kab. Fak Fak	-	6.824.417	11.959.880	18.784.297
2	Kab. Manokwari	-	4.020.770	2.090.993	6.111.763
3	Kab. Sorong	-	6.054.619	9.061.212	15.115.831
4	Kota Sorong	-	3.600.162	-	3.600.162
5	Kab. Raja Ampat	-	8.711.879	58.403.470	67.115.349
6	Kab. Sorong Selatan	-	4.276.129	2.652.096	6.928.225
7	Kab. Teluk Bintuni	-	9.506.395	29.235.104	38.741.499
8	Kab. Teluk Wondama	-	7.785.035	15.545.859	23.330.894
9	Kab. Kaimana	-	7.717.282	8.069.497	15.786.779
10	Kab. Maybrat	-	5.350.203	2.445.375	7.795.578
11	Kab. Tambrauw	-	6.487.440	3.937.164	10.424.604
12	Kab. Manokwari Selatan	-	806.274	419.301	1.225.575
13	Kab. Pegunungan Arfak	-	862.629	448.608	1.311.237
XXXI	**Provinsi Sulawesi Barat**	**-**	**603.287**	**-**	**603.287**
1	Kab. Majene	-	301.643	-	301.643
2	Kab. Mamuju	-	780.618	1.811.496	2.592.114
3	Kab. Polewali Mandar	-	301.643	-	301.643
4	Kab. Mamasa	-	301.756	81.591	383.347
5	Kab. Mamuju Utara	-	301.643	-	301.643
6	Kab. Mamuju Tengah	-	425.843	988.210	1.414.053
XXXII	**Provinsi Kalimantan Utara**	**4.259.986**	**7.550.681**	**-**	**11.810.667**
1	Kab. Bulungan	-	9.296.392	24.727.004	34.023.396
2	Kab. Malinau	144.000	10.944.772	19.358.072	30.446.844
3	Kab. Nunukan	-	8.551.948	22.317.917	30.869.865
4	Kota Tarakan	-	5.251.612	-	5.251.612
5	Kab. Tana Tidung	-	7.968.172	15.311.923	23.280.095
ALOKASI DBH SDA KEHUTANAN		**129.600.000**	**857.240.000**	**1.006.702.910**	**1.993.542.910**
Dana Cadangan		-	-	45.361.738	45.361.738
TOTAL DBH SDA KEHUTANAN		**129.600.000**	**857.240.000**	**1.052.064.648**	**2.038.904.648**

PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA,

JOKO WIDODO

www.peraturan.go.id

LAMPIRAN XI
RINCIAN ALOKASI DANA BAGI HASIL SUMBER DAYA ALAM KEHUTANAN
MENURUT PROVINSI/KABUPATEN/KOTA

(Dalam Ribuan Rupiah)

NO	NAMA DAERAH	IIUPH	PSDH	DR	JUMLAH
1	2	3	4	5	6=3+4+5
5	Kota Cilegon	-	184.398	-	184.398
6	Kota Tangerang	-	184.398	-	184.398
7	Kota Serang	-	184.398	-	184.398
8	Kota Tangerang Selatan	-	184.398	-	184.398
XXVII	**Provinsi Bangka Belitung**	**216.000**	**-**	**-**	**216.000**
1	Kab. Bangka	-	-	-	-
2	Kab. Belitung	-	-	-	-
3	Kota Pangkal Pinang	-	-	-	-
4	Kab. Bangka Selatan	480.000	-	-	480.000
5	Kab. Bangka Tengah	-	-	-	-
6	Kab. Bangka Barat	-	-	-	-
7	Kab. Belitung Timur	384.000	-	-	384.000
XXVIII	**Provinsi Gorontalo**	**-**	**94.055**	**-**	**94.055**
1	Kab. Boalemo	-	97.127	257.326	354.453
2	Kab. Gorontalo	-	41.293	12.093	53.386
3	Kota Gorontalo	-	37.622	-	37.622
4	Kab. Pohuwato	-	78.004	174.629	252.633
5	Kab. Bone Bolango	-	44.745	30.804	75.549
6	Kab. Gorontalo Utara	-	77.429	172.145	249.574
XXIX	**Provinsi Kepulauan Riau**	**-**	**84.000**	**-**	**84.000**
1	Kab. Natuna	-	28.000	-	28.000
2	Kab. Kepulauan Anambas	-	28.000	-	28.000
3	Kab. Karimun	-	101.333	67.750	169.083
4	Kota Batam	-	41.333	-	41.333
5	Kota Tanjung Pinang	-	28.000	-	28.000
6	Kab. Lingga	-	81.333	105.860	187.193
7	Kab. Bintan	-	28.000	-	28.000
XXX	**Provinsi Papua Barat**	**-**	**18.000.808**	**-**	**18.000.808**
1	Kab. Fak Fak	-	6.824.417	11.959.880	18.784.297
2	Kab. Manokwari	-	4.020.770	2.090.993	6.111.763
3	Kab. Sorong	-	6.054.619	9.061.212	15.115.831
4	Kota Sorong	-	3.600.162	-	3.600.162
5	Kab. Raja Ampat	-	8.711.879	58.403.470	67.115.349
6	Kab. Sorong Selatan	-	4.276.129	2.652.096	6.928.225
7	Kab. Teluk Bintuni	-	9.506.395	29.235.104	38.741.499
8	Kab. Teluk Wondama	-	7.785.035	15.545.859	23.330.894
9	Kab. Kaimana	-	7.717.282	8.069.497	15.786.779
10	Kab. Maybrat	-	5.350.203	2.445.375	7.795.578
11	Kab. Tambrauw	-	6.487.440	3.937.164	10.424.604
12	Kab. Manokwari Selatan	-	806.274	419.301	1.225.575
13	Kab. Pegunungan Arfak	-	862.629	448.608	1.311.237
XXXI	**Provinsi Sulawesi Barat**	**-**	**603.287**	**-**	**603.287**
1	Kab. Majene	-	301.643	-	301.643
2	Kab. Mamuju	-	780.618	1.811.496	2.592.114
3	Kab. Polewali Mandar	-	301.643	-	301.643
4	Kab. Mamasa	-	301.756	81.591	383.347
5	Kab. Mamuju Utara	-	301.643	-	301.643
6	Kab. Mamuju Tengah	-	425.843	988.210	1.414.053
XXXII	**Provinsi Kalimantan Utara**	**4.259.986**	**7.550.681**	**-**	**11.810.667**
1	Kab. Bulungan	-	9.296.392	24.727.004	34.023.396
2	Kab. Malinau	144.000	10.944.772	19.358.072	30.446.844
3	Kab. Nunukan	-	8.551.948	22.317.917	30.869.865
4	Kota Tarakan	-	5.251.612	-	5.251.612
5	Kab. Tana Tidung	-	7.968.172	15.311.923	23.280.095
ALOKASI DBH SDA KEHUTANAN		**129.600.000**	**857.240.000**	**1.006.702.910**	**1.993.542.910**
Dana Cadangan		-	-	45.361.738	45.361.738
TOTAL DBH SDA KEHUTANAN		**129.600.000**	**857.240.000**	**1.052.064.648**	**2.038.904.648**

PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA,

JOKO WIDODO

www.peraturan.go.id

LAMPIRAN XII

PERATURAN PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA
NOMOR 36 TAHUN 2015

TENTANG
RINCIAN ANGGARAN
PENDAPATAN DAN BELANJA NEGARA
TAHUN ANGGARAN 2015

RINCIAN DANA BAGI HASIL SUMBER DAYA ALAM PERIKANAN MENURUT PROVINSI/KABUPATEN/KOTA

www.peraturan.go.id

LAMPIRAN XII
RINCIAN ALOKASI DANA BAGI HASIL SUMBER DAYA ALAM PERIKANAN
MENURUT KABUPATEN/KOTA

(Dalam Ribuan Rupiah)

NO	NAMA DAERAH	JUMLAH
1	2	3
I	**Provinsi Aceh**	-
1	Kab. Aceh Barat	915.093
2	Kab. Aceh Besar	915.093
3	Kab. Aceh Selatan	915.093
4	Kab. Aceh Singkil	915.093
5	Kab. Aceh Tengah	915.093
6	Kab. Aceh Tenggara	915.093
7	Kab. Aceh Timur	915.093
8	Kab. Aceh Utara	915.093
9	Kab. Bireuen	915.093
10	Kab. Pidie	915.093
11	Kab. Simeulue	915.093
12	Kota Banda Aceh	915.093
13	Kota Sabang	915.093
14	Kota Langsa	915.093
15	Kota Lhokseumawe	915.093
16	Kab. Gayo Lues	915.093
17	Kab. Aceh Barat Daya	915.093
18	Kab. Aceh Jaya	915.093
19	Kab. Nagan Raya	915.093
20	Kab. Aceh Tamiang	915.093
21	Kab. Bener Meriah	915.093
22	Kab. Pidie Jaya	915.093
23	Kota Subulussalam	915.093
II	**Provinsi Sumatera Utara**	-
1	Kab. Asahan	915.093
2	Kab. Dairi	915.093
3	Kab. Deli Serdang	915.093
4	Kab. Karo	915.093
5	Kab. Labuhanbatu	915.093
6	Kab. Langkat	915.093
7	Kab. Mandailing Natal	915.093
8	Kab. Nias	915.093
9	Kab. Simalungun	915.093
10	Kab. Tapanuli Selatan	915.093
11	Kab. Tapanuli Tengah	915.093
12	Kab. Tapanuli Utara	915.093
13	Kab. Toba Samosir	915.093
14	Kota Binjai	915.093
15	Kota Medan	915.093
16	Kota Pematang Siantar	915.093
17	Kota Sibolga	915.093
18	Kota Tanjung Balai	915.093
19	Kota Tebing Tinggi	915.093
20	Kota Padang Sidempuan	915.093
21	Kab. Pakpak Bharat	915.093
22	Kab. Nias Selatan	915.093
23	Kab. Humbang Hasundutan	915.093
24	Kab. Serdang Bedagai	915.093
25	Kab. Samosir	915.093
26	Kab. Batu Bara	915.093
27	Kab. Padang Lawas	915.093
28	Kab. Padang Lawas Utara	915.093
29	Kab. Labuhanbatu Selatan	915.093
30	Kab. Labuhanbatu Utara	915.093
31	Kab. Nias Utara	915.093
32	Kab. Nias Barat	915.093
33	Kota Gunungsitoli	915.093
III	**Provinsi Sumatera Barat**	-
1	Kab. Limapuluh Kota	915.093
2	Kab. Agam	915.093
3	Kab. Kepulauan Mentawai	915.093
4	Kab. Padang Pariaman	915.093

www.peraturan.go.id

LAMPIRAN XII
RINCIAN ALOKASI DANA BAGI HASIL SUMBER DAYA ALAM PERIKANAN
MENURUT KABUPATEN/KOTA

(Dalam Ribuan Rupiah)

5	Kab. Pasaman	915.093
6	Kab. Pesisir Selatan	915.093
7	Kab. Sijunjung	915.093
8	Kab. Solok	915.093
9	Kab. Tanah Datar	915.093
10	Kota Bukit Tinggi	915.093
11	Kota Padang Panjang	915.093
12	Kota Padang	915.093
13	Kota Payakumbuh	915.093
14	Kota Sawahlunto	915.093
15	Kota Solok	915.093
16	Kota Pariaman	915.093
17	Kab. Pasaman Barat	915.093
18	Kab. Dharmasraya	915.093
19	Kab. Solok Selatan	915.093
IV	**Provinsi Riau**	-
1	Kab. Bengkalis	915.093
2	Kab. Indragiri Hilir	915.093
3	Kab. Indragiri Hulu	915.093
4	Kab. Kampar	915.093
5	Kab. Kuantan Singingi	915.093
6	Kab. Pelalawan	915.093
7	Kab. Rokan Hilir	915.093
8	Kab. Rokan Hulu	915.093
9	Kab. Siak	915.093
10	Kota Dumai	915.093
11	Kota Pekanbaru	915.093
12	Kab. Kepulauan Meranti	915.093
V	**Provinsi Jambi**	-
1	Kab. Batang Hari	915.093
2	Kab. Bungo	915.093
3	Kab. Kerinci	915.093
4	Kab. Merangin	915.093
5	Kab. Muaro Jambi	915.093
6	Kab. Sarolangun	915.093
7	Kab. Tanjung Jabung Barat	915.093
8	Kab. Tanjung Jabung Timur	915.093
9	Kab. Tebo	915.093
10	Kota Jambi	915.093
11	Kota Sungai Penuh	915.093
VI	**Provinsi Sumatera Selatan**	-
1	Kab. Lahat	915.093
2	Kab. Musi Banyuasin	915.093
3	Kab. Musi Rawas	915.093
4	Kab. Muara Enim	915.093
5	Kab. Ogan Komering Ilir	915.093
6	Kab. Ogan Komering Ulu	915.093
7	Kota Palembang	915.093
8	Kota Prabumulih	915.093
9	Kota Pagar Alam	915.093
10	Kota Lubuk Linggau	915.093
11	Kab. Banyuasin	915.093
12	Kab. Ogan Ilir	915.093
13	Kab. Ogan Komering Ulu Timur	915.093
14	Kab. Ogan Komering Ulu Selatan	915.093
15	Kab. Empat Lawang	915.093
16	Kab. Penukal Abab Lematang Ilir	915.093
17	Kab. Musi Rawas Utara	915.093
VII	**Provinsi Bengkulu**	-
1	Kab. Bengkulu Selatan	915.093
2	Kab. Bengkulu Utara	915.093
3	Kab. Rejang Lebong	915.093
4	Kota Bengkulu	915.093
5	Kab. Kaur	915.093
6	Kab. Seluma	915.093
7	Kab. Mukomuko	915.093

www.peraturan.go.id

LAMPIRAN XII
RINCIAN ALOKASI DANA BAGI HASIL SUMBER DAYA ALAM PERIKANAN
MENURUT KABUPATEN/KOTA

(Dalam Ribuan Rupiah)

8	Kab. Lebong	915.093
9	Kab. Kepahiang	915.093
10	Kab. Bengkulu Tengah	915.093
VIII	**Provinsi Lampung**	-
1	Kab. Lampung Barat	915.093
2	Kab. Lampung Selatan	915.093
3	Kab. Lampung Tengah	915.093
4	Kab. Lampung Utara	915.093
5	Kab. Lampung Timur	915.093
6	Kab. Tanggamus	915.093
7	Kab. Tulang Bawang	915.093
8	Kab. Way Kanan	915.093
9	Kota Bandar Lampung	915.093
10	Kota Metro	915.093
11	Kab. Pesawaran	915.093
12	Kab. Pringsewu	915.093
13	Kab. Mesuji	915.093
14	Kab. Tulang Bawang Barat	915.093
15	Kab. Pesisir Barat	915.093
IX	**Provinsi DKI Jakarta**	914.875
X	**Provinsi Jawa Barat**	-
1	Kab. Bandung	915.093
2	Kab. Bekasi	915.093
3	Kab. Bogor	915.093
4	Kab. Ciamis	915.093
5	Kab. Cianjur	915.093
6	Kab. Cirebon	915.093
7	Kab. Garut	915.093
8	Kab. Indramayu	915.093
9	Kab. Karawang	915.093
10	Kab. Kuningan	915.093
11	Kab. Majalengka	915.093
12	Kab. Purwakarta	915.093
13	Kab. Subang	915.093
14	Kab. Sukabumi	915.093
15	Kab. Sumedang	915.093
16	Kab. Tasikmalaya	915.093
17	Kota Bandung	915.093
18	Kota Bekasi	915.093
19	Kota Bogor	915.093
20	Kota Cirebon	915.093
21	Kota Depok	915.093
22	Kota Sukabumi	915.093
23	Kota Tasikmalaya	915.093
24	Kota Cimahi	915.093
25	Kota Banjar	915.093
26	Kab. Bandung Barat	915.093
27	Kab. Pangandaran	915.093
XI	**Provinsi Jawa Tengah**	-
1	Kab. Banjarnegara	915.093
2	Kab. Banyumas	915.093
3	Kab. Batang	915.093
4	Kab. Blora	915.093
5	Kab. Boyolali	915.093
6	Kab. Brebes	915.093
7	Kab. Cilacap	915.093
8	Kab. Demak	915.093
9	Kab. Grobogan	915.093
10	Kab. Jepara	915.093
11	Kab. Karanganyar	915.093
12	Kab. Kebumen	915.093
13	Kab. Kendal	915.093
14	Kab. Klaten	915.093
15	Kab. Kudus	915.093
16	Kab. Magelang	915.093
17	Kab. Pati	915.093

www.peraturan.go.id

LAMPIRAN XII
RINCIAN ALOKASI DANA BAGI HASIL SUMBER DAYA ALAM PERIKANAN
MENURUT KABUPATEN/KOTA

(Dalam Ribuan Rupiah)

18	Kab. Pekalongan	915.093
19	Kab. Pemalang	915.093
20	Kab. Purbalingga	915.093
21	Kab. Purworejo	915.093
22	Kab. Rembang	915.093
23	Kab. Semarang	915.093
24	Kab. Sragen	915.093
25	Kab. Sukoharjo	915.093
26	Kab. Tegal	915.093
27	Kab. Temanggung	915.093
28	Kab. Wonogiri	915.093
29	Kab. Wonosobo	915.093
30	Kota Magelang	915.093
31	Kota Pekalongan	915.093
32	Kota Salatiga	915.093
33	Kota Semarang	915.093
34	Kota Surakarta	915.093
35	Kota Tegal	915.093
XII	**Provinsi DI Yogyakarta**	-
1	Kab. Bantul	915.093
2	Kab. Gunung Kidul	915.093
3	Kab. Kulon Progo	915.093
4	Kab. Sleman	915.093
5	Kota Yogyakarta	915.093
XIII	**Provinsi Jawa Timur**	-
1	Kab. Bangkalan	915.093
2	Kab. Banyuwangi	915.093
3	Kab. Blitar	915.093
4	Kab. Bojonegoro	915.093
5	Kab. Bondowoso	915.093
6	Kab. Gresik	915.093
7	Kab. Jember	915.093
8	Kab. Jombang	915.093
9	Kab. Kediri	915.093
10	Kab. Lamongan	915.093
11	Kab. Lumajang	915.093
12	Kab. Madiun	915.093
13	Kab. Magetan	915.093
14	Kab. Malang	915.093
15	Kab. Mojokerto	915.093
16	Kab. Nganjuk	915.093
17	Kab. Ngawi	915.093
18	Kab. Pacitan	915.093
19	Kab. Pamekasan	915.093
20	Kab. Pasuruan	915.093
21	Kab. Ponorogo	915.093
22	Kab. Probolinggo	915.093
23	Kab. Sampang	915.093
24	Kab. Sidoarjo	915.093
25	Kab. Situbondo	915.093
26	Kab. Sumenep	915.093
27	Kab. Trenggalek	915.093
28	Kab. Tuban	915.093
29	Kab. Tulungagung	915.093
30	Kota Blitar	915.093
31	Kota Kediri	915.093
32	Kota Madiun	915.093
33	Kota Malang	915.093
34	Kota Mojokerto	915.093
35	Kota Pasuruan	915.093
36	Kota Probolinggo	915.093
37	Kota Surabaya	915.093
38	Kota Batu	915.093
XIV	**Provinsi Kalimantan Barat**	-
1	Kab. Bengkayang	915.093
2	Kab. Landak	915.093

www.peraturan.go.id

LAMPIRAN XII
RINCIAN ALOKASI DANA BAGI HASIL SUMBER DAYA ALAM PERIKANAN
MENURUT KABUPATEN/KOTA

(Dalam Ribuan Rupiah)

3	Kab. Kapuas Hulu	915.093
4	Kab. Ketapang	915.093
5	Kab. Mempawah	915.093
6	Kab. Sambas	915.093
7	Kab. Sanggau	915.093
8	Kab. Sintang	915.093
9	Kota Pontianak	915.093
10	Kota Singkawang	915.093
11	Kab. Sekadau	915.093
12	Kab. Melawi	915.093
13	Kab. Kayong Utara	915.093
14	Kab. Kubu Raya	915.093
XV	**Provinsi Kalimantan Tengah**	-
1	Kab. Barito Selatan	915.093
2	Kab. Barito Utara	915.093
3	Kab. Kapuas	915.093
4	Kab. Kotawaringin Barat	915.093
5	Kab. Kotawaringin Timur	915.093
6	Kota Palangkaraya	915.093
7	Kab. Katingan	915.093
8	Kab. Seruyan	915.093
9	Kab. Sukamara	915.093
10	Kab. Lamandau	915.093
11	Kab. Gunung Mas	915.093
12	Kab. Pulang Pisau	915.093
13	Kab. Murung Raya	915.093
14	Kab. Barito Timur	915.093
XVI	**Provinsi Kalimantan Selatan**	-
1	Kab. Banjar	915.093
2	Kab. Barito Kuala	915.093
3	Kab. Hulu Sungai Selatan	915.093
4	Kab. Hulu Sungai Tengah	915.093
5	Kab. Hulu Sungai Utara	915.093
6	Kab. Kotabaru	915.093
7	Kab. Tabalong	915.093
8	Kab. Tanah Laut	915.093
9	Kab. Tapin	915.093
10	Kota Banjarbaru	915.093
11	Kota Banjarmasin	915.093
12	Kab. Balangan	915.093
13	Kab. Tanah Bumbu	915.093
XVII	**Provinsi Kalimantan Timur**	-
1	Kab. Berau	915.093
2	Kab. Kutai Kartanegara	915.093
3	Kab. Kutai Barat	915.093
4	Kab. Kutai Timur	915.093
5	Kab. Paser	915.093
6	Kota Balikpapan	915.093
7	Kota Bontang	915.093
8	Kota Samarinda	915.093
9	Kab. Penajam Paser Utara	915.093
10	Kab. Mahakam Ulu	915.093
XVIII	**Provinsi Sulawesi Utara**	-
1	Kab. Bolaang Mongondow	915.093
2	Kab. Minahasa	915.093
3	Kab. Kepulauan Sangihe	915.093
4	Kota Bitung	915.093
5	Kota Manado	915.093
6	Kab. Kepulauan Talaud	915.093
7	Kab. Minahasa Selatan	915.093
8	Kota Tomohon	915.093
9	Kab. Minahasa Utara	915.093
10	Kab. Kep. Siau Tagulandang Biaro	915.093
11	Kota Kotamobagu	915.093
12	Kab. Bolaang Mongondow Utara	915.093
13	Kab. Minahasa Tenggara	915.093

www.peraturan.go.id

LAMPIRAN XII
RINCIAN ALOKASI DANA BAGI HASIL SUMBER DAYA ALAM PERIKANAN
MENURUT KABUPATEN/KOTA

(Dalam Ribuan Rupiah)

14	Kab. Bolaang Mongondow Timur	915.093
15	Kab. Bolaang Mongondow Selatan	915.093
XIX	**Provinsi Sulawesi Tengah**	-
1	Kab. Banggai	915.093
2	Kab. Banggai Kepulauan	915.093
3	Kab. Buol	915.093
4	Kab. Toli-Toli	915.093
5	Kab. Donggala	915.093
6	Kab. Morowali	915.093
7	Kab. Poso	915.093
8	Kota Palu	915.093
9	Kab. Parigi Moutong	915.093
10	Kab. Tojo Una Una	915.093
11	Kab. Sigi	915.093
12	Kab. Banggai Laut	915.093
13	Kab. Morowali Utara	915.093
XX	**Provinsi Sulawesi Selatan**	-
1	Kab. Bantaeng	915.093
2	Kab. Barru	915.093
3	Kab. Bone	915.093
4	Kab. Bulukumba	915.093
5	Kab. Enrekang	915.093
6	Kab. Gowa	915.093
7	Kab. Jeneponto	915.093
8	Kab. Luwu	915.093
9	Kab. Luwu Utara	915.093
10	Kab. Maros	915.093
11	Kab. Pangkajene dan Kepulauan	915.093
12	Kota Palopo	915.093
13	Kab. Luwu Timur	915.093
14	Kab. Pinrang	915.093
15	Kab. Sinjai	915.093
16	Kab. Kepulauan Selayar	915.093
17	Kab. Sidenreng Rappang	915.093
18	Kab. Soppeng	915.093
19	Kab. Takalar	915.093
20	Kab. Tana Toraja	915.093
21	Kab. Wajo	915.093
22	Kota Pare-pare	915.093
23	Kota Makassar	915.093
24	Kab. Toraja Utara	915.093
XXI	**Provinsi Sulawesi Tenggara**	-
1	Kab. Buton	305.031
2	Kab. Konawe	915.093
3	Kab. Kolaka	915.093
4	Kab. Muna	457.547
5	Kota Kendari	915.093
6	Kota Bau-bau	915.093
7	Kab. Konawe Selatan	915.093
8	Kab. Bombana	915.093
9	Kab. Wakatobi	915.093
10	Kab. Kolaka Utara	915.093
11	Kab. Konawe Utara	915.093
12	Kab. Buton Utara	915.093
13	Kab. Konawe Kepulauan	915.093
14	Kab. Kolaka Timur	915.093
15	Kab. Muna Barat	457.547
16	Kab. Buton Tengah	305.031
17	Kab. Buton Selatan	305.031
XXII	**Provinsi Bali**	-
1	Kab. Badung	915.093
2	Kab. Bangli	915.093
3	Kab. Buleleng	915.093
4	Kab. Gianyar	915.093
5	Kab. Jembrana	915.093
6	Kab. Karangasem	915.093

www.peraturan.go.id

LAMPIRAN XII
RINCIAN ALOKASI DANA BAGI HASIL SUMBER DAYA ALAM PERIKANAN MENURUT KABUPATEN/KOTA

(Dalam Ribuan Rupiah)

7	Kab. Klungkung	915.093
8	Kab. Tabanan	915.093
9	Kota Denpasar	915.093
XXIII	**Provinsi Nusa Tenggara Barat**	-
1	Kab. Bima	915.093
2	Kab. Dompu	915.093
3	Kab. Lombok Barat	915.093
4	Kab. Lombok Tengah	915.093
5	Kab. Lombok Timur	915.093
6	Kab. Sumbawa	915.093
7	Kota Mataram	915.093
8	Kota Bima	915.093
9	Kab. Sumbawa Barat	915.093
10	Kab. Lombok Utara	915.093
XXIV	**Provinsi Nusa Tenggara Timur**	-
1	Kab. Alor	915.093
2	Kab. Belu	915.093
3	Kab. Ende	915.093
4	Kab. Flores Timur	915.093
5	Kab. Kupang	915.093
6	Kab. Lembata	915.093
7	Kab. Manggarai	915.093
8	Kab. Ngada	915.093
9	Kab. Sikka	915.093
10	Kab. Sumba Barat	915.093
11	Kab. Sumba Timur	915.093
12	Kab. Timor Tengah Selatan	915.093
13	Kab. Timor Tengah Utara	915.093
14	Kota Kupang	915.093
15	Kab. Rote Ndao	915.093
16	Kab. Manggarai Barat	915.093
17	Kab. Nagekeo	915.093
18	Kab. Sumba Barat Daya	915.093
19	Kab. Sumba Tengah	915.093
20	Kab. Manggarai Timur	915.093
21	Kab. Sabu Raijua	915.093
22	Kab. Malaka	915.093
XXV	**Provinsi Maluku**	-
1	Kab. Maluku Tenggara Barat	915.093
2	Kab. Maluku Tengah	915.093
3	Kab. Maluku Tenggara	915.093
4	Kab. Buru	915.093
5	Kota Ambon	915.093
6	Kab. Seram Bagian Barat	915.093
7	Kab. Seram Bagian Timur	915.093
8	Kab. Kepulauan Aru	915.093
9	Kota Tual	915.093
10	Kab. Maluku Barat Daya	915.093
11	Kab. Buru Selatan	915.093
XXVI	**Provinsi Papua**	-
1	Kab. Biak Numfor	915.093
2	Kab. Jayapura	915.093
3	Kab. Jayawijaya	915.093
4	Kab. Merauke	915.093
5	Kab. Mimika	915.093
6	Kab. Nabire	915.093
7	Kab. Paniai	915.093
8	Kab. Puncak Jaya	915.093
9	Kab. Kepulauan Yapen	915.093
10	Kota Jayapura	915.093
11	Kab. Sarmi	915.093
12	Kab. Keerom	915.093
13	Kab. Yahukimo	915.093
14	Kab. Pegunungan Bintang	915.093
15	Kab. Tolikara	915.093
16	Kab. Boven Digoel	915.093

www.peraturan.go.id

LAMPIRAN XII
RINCIAN ALOKASI DANA BAGI HASIL SUMBER DAYA ALAM PERIKANAN
MENURUT KABUPATEN/KOTA

(Dalam Ribuan Rupiah)

17	Kab. Mappi	915.093
18	Kab. Asmat	915.093
19	Kab. Waropen	915.093
20	Kab. Supiori	915.093
21	Kab. Mamberamo Raya	915.093
22	Kab. Mamberamo Tengah	915.093
23	Kab. Yalimo	915.093
24	Kab. Lanny Jaya	915.093
25	Kab. Nduga	915.093
26	Kab. Dogiyai	915.093
27	Kab. Puncak	915.093
28	Kab. Intan Jaya	915.093
29	Kab. Deiyai	915.093
XXVII	**Provinsi Maluku Utara**	-
1	Kab. Halmahera Tengah	915.093
2	Kota Ternate	915.093
3	Kab. Halmahera Barat	915.093
4	Kab. Halmahera Timur	915.093
5	Kab. Halmahera Selatan	915.093
6	Kab. Halmahera Utara	915.093
7	Kab. Kepulauan Sula	915.093
8	Kota Tidore Kepulauan	915.093
9	Kab. Pulau Morotai	915.093
10	Kab. Pulau Taliabu	915.093
XXVIII	**Provinsi Banten**	-
1	Kab. Lebak	915.093
2	Kab. Pandeglang	915.093
3	Kab. Serang	915.093
4	Kab. Tangerang	915.093
5	Kota Cilegon	915.093
6	Kota Tangerang	915.093
7	Kota Serang	915.093
8	Kota Tangerang Selatan	915.093
XXIX	**Provinsi Bangka Belitung**	-
1	Kab. Bangka	915.093
2	Kab. Belitung	915.093
3	Kota Pangkal Pinang	915.093
4	Kab. Bangka Selatan	915.093
5	Kab. Bangka Tengah	915.093
6	Kab. Bangka Barat	915.093
7	Kab. Belitung Timur	915.093
XXX	**Provinsi Gorontalo**	-
1	Kab. Boalemo	915.093
2	Kab. Gorontalo	915.093
3	Kota Gorontalo	915.093
4	Kab. Pohuwato	915.093
5	Kab. Bone Bolango	915.093
6	Kab. Gorontalo Utara	915.093
XXXI	**Provinsi Kepulauan Riau**	-
1	Kab. Natuna	915.093
2	Kab. Kepulauan Anambas	915.093
3	Kab. Karimun	915.093
4	Kota Batam	915.093
5	Kota Tanjung Pinang	915.093
6	Kab. Lingga	915.093
7	Kab. Bintan	915.093
XXXII	**Provinsi Papua Barat**	-
1	Kab. Fak Fak	915.093
2	Kab. Manokwari	915.093
3	Kab. Sorong	915.093
4	Kota Sorong	915.093
5	Kab. Raja Ampat	915.093
6	Kab. Sorong Selatan	915.093
7	Kab. Teluk Bintuni	915.093
8	Kab. Teluk Wondama	915.093
9	Kab. Kaimana	915.093

www.peraturan.go.id

LAMPIRAN XII
RINCIAN ALOKASI DANA BAGI HASIL SUMBER DAYA ALAM PERIKANAN
MENURUT KABUPATEN/KOTA

(Dalam Ribuan Rupiah)

NO	NAMA DAERAH	JUMLAH
1	2	3
10	Kab. Maybrat	915.093
11	Kab. Tambrauw	915.093
12	Kab. Manokwari Selatan	915.093
13	Kab. Pegunungan Arfak	915.093
XXXIII	**Provinsi Sulawesi Barat**	-
1	Kab. Majene	915.093
2	Kab. Mamuju	915.093
3	Kab. Polewali Mandar	915.093
4	Kab. Mamasa	915.093
5	Kab. Mamuju Utara	915.093
6	Kab. Mamuju Tengah	915.093
XXXIV	**Provinsi Kalimantan Utara**	-
1	Kab. Bulungan	915.093
2	Kab. Malinau	915.093
3	Kab. Nunukan	915.093
4	Kota Tarakan	915.093
5	Kab. Tana Tidung	915.093
	Total	**463.036.840**

PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA,

JOKO WIDODO

www.peraturan.go.id

LAMPIRAN XIII

PERATURAN PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA
NOMOR 36 TAHUN 2015

TENTANG
RINCIAN ANGGARAN
PENDAPATAN DAN BELANJA NEGARA
TAHUN ANGGARAN 2015

RINCIAN DANA BAGI HASIL SUMBER DAYA ALAM PENGUSAHAAN PANAS BUMI MENURUT PROVINSI/KABUPATEN/KOTA

www.peraturan.go.id

LAMPIRAN XIII

RINCIAN ALOKASI DANA BAGI HASIL SUMBER DAYA ALAM PENGUSAHAAN PANAS BUMI

MENURUT PROVINSI/KABUPATEN/KOTA

(Dalam Ribuan Rupiah)

NO	NAMA DAERAH	IURAN TETAP	SETORAN BAGIAN PEMERINTAH	JUMLAH
1	2	3	4	5=3+4
I	Provinsi Aceh	26.462	-	26.462
1	Kab. Aceh Barat	2.406	-	2.406
2	Kab. Aceh Besar	2.406	-	2.406
3	Kab. Aceh Selatan	2.406	-	2.406
4	Kab. Aceh Singkil	2.406	-	2.406
5	Kab. Aceh Tengah	2.406	-	2.406
6	Kab. Aceh Tenggara	2.406	-	2.406
7	Kab. Aceh Timur	2.406	-	2.406
8	Kab. Aceh Utara	2.406	-	2.406
9	Kab. Bireuen	2.406	-	2.406
10	Kab. Pidie	2.406	-	2.406
11	Kab. Simeulue	2.406	-	2.406
12	Kota Banda Aceh	2.406	-	2.406
13	Kota Sabang	52.924	-	52.924
14	Kota Langsa	2.406	-	2.406
15	Kota Lhokseumawe	2.406	-	2.406
16	Kab. Gayo Lues	2.406	-	2.406
17	Kab. Aceh Barat Daya	2.406	-	2.406
18	Kab. Aceh Jaya	2.406	-	2.406
19	Kab. Nagan Raya	2.406	-	2.406
20	Kab. Aceh Tamiang	2.406	-	2.406
21	Kab. Bener Meriah	2.406	-	2.406
22	Kab. Pidie Jaya	2.406	-	2.406
23	Kota Subulussalam	2.406	-	2.406
II	Provinsi Sumatera Utara	239.523	-	239.523
1	Kab. Asahan	14.970	-	14.970
2	Kab. Dairi	14.970	-	14.970
3	Kab. Deli Serdang	14.970	-	14.970
4	Kab. Karo	14.970	-	14.970
5	Kab. Labuhanbatu	14.970	-	14.970
6	Kab. Langkat	14.970	-	14.970
7	Kab. Mandailing Natal	479.046	-	479.046
8	Kab. Nias	14.970	-	14.970
9	Kab. Simalungun	14.970	-	14.970
10	Kab. Tapanuli Selatan	14.970	-	14.970
11	Kab. Tapanuli Tengah	14.970	-	14.970
12	Kab. Tapanuli Utara	14.970	-	14.970
13	Kab. Toba Samosir	14.970	-	14.970
14	Kota Binjai	14.970	-	14.970
15	Kota Medan	14.970	-	14.970
16	Kota Pematang Siantar	14.970	-	14.970
17	Kota Sibolga	14.970	-	14.970
18	Kota Tanjung Balai	14.970	-	14.970
19	Kota Tebing Tinggi	14.970	-	14.970
20	Kota Padang Sidempuan	14.970	-	14.970
21	Kab. Pakpak Bharat	14.970	-	14.970
22	Kab. Nias Selatan	14.970	-	14.970
23	Kab. Humbang Hasundutan	14.970	-	14.970
24	Kab. Serdang Bedagai	14.970	-	14.970
25	Kab. Samosir	14.970	-	14.970
26	Kab. Batu Bara	14.970	-	14.970
27	Kab. Padang Lawas	14.970	-	14.970
28	Kab. Padang Lawas Utara	14.970	-	14.970
29	Kab. Labuhanbatu Selatan	14.970	-	14.970
30	Kab. Labuhanbatu Utara	14.970	-	14.970
31	Kab. Nias Utara	14.970	-	14.970
32	Kab. Nias Barat	14.970	-	14.970
33	Kota Gunungsitoli	14.970	-	14.970
III	Provinsi Sumatera Barat	237.238	-	237.238
1	Kab. Limapuluh Kota	26.360	-	26.360
2	Kab. Agam	26.360	-	26.360
3	Kab. Kepulauan Mentawai	26.360	-	26.360
4	Kab. Padang Pariaman	26.360	-	26.360
5	Kab. Pasaman	26.360	-	26.360
6	Kab. Pesisir Selatan	26.360	-	26.360
7	Kab. Sijunjung	26.360	-	26.360

www.peraturan.go.id

LAMPIRAN XIII

RINCIAN ALOKASI DANA BAGI HASIL SUMBER DAYA ALAM PENGUSAHAAN PANAS BUMI

MENURUT PROVINSI/KABUPATEN/KOTA

(Dalam Ribuan Rupiah)

NO	NAMA DAERAH	IURAN TETAP	SETORAN BAGIAN PEMERINTAH	JUMLAH
8	Kab. Solok	26.360	-	26.360
9	Kab. Tanah Datar	26.360	-	26.360
10	Kota Bukit Tinggi	26.360	-	26.360
11	Kota Padang Panjang	26.360	-	26.360
12	Kota Padang	26.360	-	26.360
13	Kota Payakumbuh	26.360	-	26.360
14	Kota Sawahlunto	26.360	-	26.360
15	Kota Solok	26.360	-	26.360
16	Kota Pariaman	26.360	-	26.360
17	Kab. Pasaman Barat	26.360	-	26.360
18	Kab. Dharmasraya	26.360	-	26.360
19	Kab. Solok Selatan	474.477	-	474.477
IV	Provinsi Sumatera Selatan	135.032	-	135.032
1	Kab. Lahat	79.542	-	79.542
2	Kab. Musi Banyuasin	16.879	-	16.879
3	Kab. Musi Rawas	16.879	-	16.879
4	Kab. Muara Enim	178.233	-	178.233
5	Kab. Ogan Komering Ilir	16.879	-	16.879
6	Kab. Ogan Komering Ulu	16.879	-	16.879
7	Kota Palembang	16.879	-	16.879
8	Kota Prabumulih	16.879	-	16.879
9	Kota Pagar Alam	46.046	-	46.046
10	Kota Lubuk Linggau	16.879	-	16.879
11	Kab. Banyuasin	16.879	-	16.879
12	Kab. Ogan Ilir	16.879	-	16.879
13	Kab. Ogan Komering Ulu Timur	16.879	-	16.879
14	Kab. Ogan Komering Ulu Selatan	16.879	-	16.879
15	Kab. Empat Lawang	16.879	-	16.879
16	Kab. Penukal Abab Lematang Ilir	16.879	-	16.879
17	Kab. Musi Rawas Utara	16.879	-	16.879
V	Provinsi Lampung	195.842	1.454.089	1.649.931
1	Kab. Lampung Barat	253.638	207.727	461.365
2	Kab. Lampung Selatan	166.023	207.727	373.750
3	Kab. Lampung Tengah	27.977	207.727	235.704
4	Kab. Lampung Utara	27.977	207.727	235.704
5	Kab. Lampung Timur	27.977	207.727	235.704
6	Kab. Tanggamus	27.977	2.908.178	2.936.155
7	Kab. Tulang Bawang	27.977	207.727	235.704
8	Kab. Way Kanan	27.977	207.727	235.704
9	Kota Bandar Lampung	27.977	207.727	235.704
10	Kota Metro	27.977	207.727	235.704
11	Kab. Pesawaran	27.977	207.727	235.704
12	Kab. Pringsewu	27.977	207.727	235.704
13	Kab. Mesuji	27.977	207.727	235.704
14	Kab. Tulang Bawang Barat	27.977	207.727	235.704
15	Kab. Pesisir Barat	27.977	207.727	235.704
VI	Provinsi Jawa Barat	332.438	86.265.334	86.597.772
1	Kab. Bandung	25.572	67.525.603	67.551.175
2	Kab. Bekasi	25.572	6.635.795	6.661.367
3	Kab. Bogor	25.572	58.541.862	58.567.434
4	Kab. Ciamis	25.572	6.635.795	6.661.367
5	Kab. Cianjur	25.572	6.635.795	6.661.367
6	Kab. Cirebon	25.572	6.635.795	6.661.367
7	Kab. Garut	25.572	15.518.509	15.544.081
8	Kab. Indramayu	25.572	6.635.795	6.661.367
9	Kab. Karawang	25.572	6.635.795	6.661.367
10	Kab. Kuningan	25.572	6.635.795	6.661.367
11	Kab. Majalengka	25.572	6.635.795	6.661.367
12	Kab. Purwakarta	101.205	6.635.795	6.737.000
13	Kab. Subang	187.781	6.635.795	6.823.576
14	Kab. Sukabumi	139.666	50.852.074	50.991.740
15	Kab. Sumedang	216.485	6.635.795	6.852.280
16	Kab. Tasikmalaya	25.572	6.635.795	6.661.367
17	Kota Bandung	25.572	6.635.795	6.661.367
18	Kota Bekasi	25.572	6.635.795	6.661.367
19	Kota Bogor	25.572	6.635.795	6.661.367
20	Kota Cirebon	25.572	6.635.795	6.661.367

www.peraturan.go.id

LAMPIRAN XIII
RINCIAN ALOKASI DANA BAGI HASIL SUMBER DAYA ALAM PENGUSAHAAN PANAS BUMI
MENURUT PROVINSI/KABUPATEN/KOTA

(Dalam Ribuan Rupiah)

NO	NAMA DAERAH	IURAN TETAP	SETORAN BAGIAN PEMERINTAH	JUMLAH
21	Kota Depok	25.572	6.635.795	6.661.367
22	Kota Sukabumi	25.572	6.635.795	6.661.367
23	Kota Tasikmalaya	25.572	6.635.795	6.661.367
24	Kota Cimahi	25.572	6.635.795	6.661.367
25	Kota Banjar	25.572	6.635.795	6.661.367
26	Kab. Bandung Barat	122.029	6.635.795	6.757.824
27	Kab. Pangandaran	25.572	6.635.795	6.661.367
VII	Provinsi Jawa Tengah	262.067	-	262.067
1	Kab. Banjarnegara	15.416	-	15.416
2	Kab. Banyumas	138.058	-	138.058
3	Kab. Batang	15.416	-	15.416
4	Kab. Blora	15.416	-	15.416
5	Kab. Boyolali	15.416	-	15.416
6	Kab. Brebes	71.230	-	71.230
7	Kab. Cilacap	15.416	-	15.416
8	Kab. Demak	15.416	-	15.416
9	Kab. Grobogan	15.416	-	15.416
10	Kab. Jepara	15.416	-	15.416
11	Kab. Karanganyar	15.416	-	15.416
12	Kab. Kebumen	15.416	-	15.416
13	Kab. Kendal	38.105	-	38.105
14	Kab. Klaten	15.416	-	15.416
15	Kab. Kudus	15.416	-	15.416
16	Kab. Magelang	15.416	-	15.416
17	Kab. Pati	15.416	-	15.416
18	Kab. Pekalongan	15.416	-	15.416
19	Kab. Pemalang	41.163	-	41.163
20	Kab. Purbalingga	34.975	-	34.975
21	Kab. Purworejo	15.416	-	15.416
22	Kab. Rembang	15.416	-	15.416
23	Kab. Semarang	213.008	-	213.008
24	Kab. Sragen	15.416	-	15.416
25	Kab. Sukoharjo	15.416	-	15.416
26	Kab. Tegal	80.088	-	80.088
27	Kab. Temanggung	15.416	-	15.416
28	Kab. Wonogiri	15.416	-	15.416
29	Kab. Wonosobo	15.416	-	15.416
30	Kota Magelang	15.416	-	15.416
31	Kota Pekalongan	15.416	-	15.416
32	Kota Salatiga	15.416	-	15.416
33	Kota Semarang	15.416	-	15.416
34	Kota Surakarta	15.416	-	15.416
35	Kota Tegal	15.416	-	15.416
VIII	Provinsi Jawa Timur	359.856	-	359.856
1	Kab. Bangkalan	19.452	-	19.452
2	Kab. Banyuwangi	327.657	-	327.657
3	Kab. Blitar	19.452	-	19.452
4	Kab. Bojonegoro	19.452	-	19.452
5	Kab. Bondowoso	172.673	-	172.673
6	Kab. Gresik	19.452	-	19.452
7	Kab. Jember	19.452	-	19.452
8	Kab. Jombang	19.452	-	19.452
9	Kab. Kediri	19.452	-	19.452
10	Kab. Lamongan	19.452	-	19.452
11	Kab. Lumajang	19.452	-	19.452
12	Kab. Madiun	99.040	-	99.040
13	Kab. Magetan	19.452	-	19.452
14	Kab. Malang	19.452	-	19.452
15	Kab. Mojokerto	19.452	-	19.452
16	Kab. Nganjuk	19.452	-	19.452
17	Kab. Ngawi	19.452	-	19.452
18	Kab. Pacitan	19.452	-	19.452
19	Kab. Pamekasan	19.452	-	19.452
20	Kab. Pasuruan	19.452	-	19.452
21	Kab. Ponorogo	176.100	-	176.100
22	Kab. Probolinggo	19.452	-	19.452
23	Kab. Sampang	19.452	-	19.452

www.peraturan.go.id

LAMPIRAN XIII

RINCIAN ALOKASI DANA BAGI HASIL SUMBER DAYA ALAM PENGUSAHAAN PANAS BUMI

MENURUT PROVINSI/KABUPATEN/KOTA

(Dalam Ribuan Rupiah)

NO	NAMA DAERAH	IURAN TETAP	SETORAN BAGIAN PEMERINTAH	JUMLAH
24	Kab. Sidoarjo	19.452	-	19.452
25	Kab. Situbondo	22.050	-	22.050
26	Kab. Sumenep	19.452	-	19.452
27	Kab. Trenggalek	19.452	-	19.452
28	Kab. Tuban	19.452	-	19.452
29	Kab. Tulungagung	19.452	-	19.452
30	Kota Blitar	19.452	-	19.452
31	Kota Kediri	19.452	-	19.452
32	Kota Madiun	19.452	-	19.452
33	Kota Malang	19.452	-	19.452
34	Kota Mojokerto	19.452	-	19.452
35	Kota Pasuruan	19.452	-	19.452
36	Kota Probolinggo	19.452	-	19.452
37	Kota Surabaya	19.452	-	19.452
38	Kota Batu	19.452	-	19.452
IX	Provinsi Sulawesi Utara	-	2.647.456	2.647.456
1	Kab. Bolaang Mongondow	-	378.208	378.208
2	Kab. Minahasa	-	2.069.554	2.069.554
3	Kab. Kepulauan Sangihe	-	378.208	378.208
4	Kota Bitung	-	378.208	378.208
5	Kota Manado	-	405.250	405.250
6	Kab. Kepulauan Talaud	-	378.208	378.208
7	Kab. Minahasa Selatan	-	396.892	396.892
8	Kota Tomohon	-	3.395.098	3.395.098
9	Kab. Minahasa Utara	-	536.034	536.034
10	Kab. Kep. Siau Tagulandang Biaro	-	378.208	378.208
11	Kota Kotamobagu	-	378.208	378.208
12	Kab. Bolaang Mongondow Utara	-	378.208	378.208
13	Kab. Minahasa Tenggara	-	383.125	383.125
14	Kab. Bolaang Mongondow Timur	-	378.208	378.208
15	Kab. Bolaang Mongondow Selatan	-	378.208	378.208
X	Provinsi Nusa Tenggara Barat	73.532	-	73.532
1	Kab. Bima	16.341	-	16.341
2	Kab. Dompu	147.065	-	147.065
3	Kab. Lombok Barat	16.341	-	16.341
4	Kab. Lombok Tengah	16.341	-	16.341
5	Kab. Lombok Timur	16.341	-	16.341
6	Kab. Sumbawa	16.341	-	16.341
7	Kota Mataram	16.341	-	16.341
8	Kota Bima	16.341	-	16.341
9	Kab. Sumbawa Barat	16.341	-	16.341
10	Kab. Lombok Utara	16.341	-	16.341
XI	Provinsi Nusa Tenggara Timur	280.916	-	280.916
1	Kab. Alor	26.754	-	26.754
2	Kab. Belu	26.754	-	26.754
3	Kab. Ende	335.528	-	335.528
4	Kab. Flores Timur	26.754	-	26.754
5	Kab. Kupang	26.754	-	26.754
6	Kab. Lembata	253.058	-	253.058
7	Kab. Manggarai	26.754	-	26.754
8	Kab. Ngada	26.754	-	26.754
9	Kab. Sikka	26.754	-	26.754
10	Kab. Sumba Barat	26.754	-	26.754
11	Kab. Sumba Timur	26.754	-	26.754
12	Kab. Timor Tengah Selatan	26.754	-	26.754
13	Kab. Timor Tengah Utara	26.754	-	26.754
14	Kota Kupang	26.754	-	26.754
15	Kab. Rote Ndao	26.754	-	26.754
16	Kab. Manggarai Barat	26.754	-	26.754
17	Kab. Nagekeo	26.754	-	26.754
18	Kab. Sumba Barat Daya	26.754	-	26.754
19	Kab. Sumba Tengah	26.754	-	26.754
20	Kab. Manggarai Timur	26.754	-	26.754
21	Kab. Sabu Raijua	26.754	-	26.754
22	Kab. Malaka	26.754	-	26.754

www.peraturan.go.id

LAMPIRAN XIII

RINCIAN ALOKASI DANA BAGI HASIL SUMBER DAYA ALAM PENGUSAHAAN PANAS BUMI MENURUT PROVINSI/KABUPATEN/KOTA

(Dalam Ribuan Rupiah)

NO	NAMA DAERAH	IURAN TETAP	SETORAN BAGIAN PEMERINTAH	JUMLAH
XII	Provinsi Maluku Utara	51.713	-	51.713
1	Kab. Halmahera Tengah	11.492	-	11.492
2	Kota Ternate	11.492	-	11.492
3	Kab. Halmahera Barat	103.425	-	103.425
4	Kab. Halmahera Timur	11.492	-	11.492
5	Kab. Halmahera Selatan	11.492	-	11.492
6	Kab. Halmahera Utara	11.492	-	11.492
7	Kab. Kepulauan Sula	11.492	-	11.492
8	Kota Tidore Kepulauan	11.492	-	11.492
9	Kab. Pulau Morotai	11.492	-	11.492
10	Kab. Pulau Taliabu	11.492	-	11.492
XIII	Provinsi Banten	396.794	-	396.794
1	Kab. Lebak	113.370	-	113.370
2	Kab. Pandeglang	456.675	-	456.675
3	Kab. Serang	450.281	-	450.281
4	Kab. Tangerang	113.370	-	113.370
5	Kota Cilegon	113.370	-	113.370
6	Kota Tangerang	113.370	-	113.370
7	Kota Serang	113.370	-	113.370
8	Kota Tangerang Selatan	113.370	-	113.370
ALOKASI DBH SDA PANAS BUMI		**12.957.091**	**451.834.393**	**464.791.484**
DANA CADANGAN		**-**	**-**	**2.151.083**
TOTAL DBH SDA PANAS BUMI		**-**	**-**	**466.942.567**

PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA,

JOKO WIDODO

www.peraturan.go.id

LAMPIRAN XIV

PERATURAN PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA
NOMOR 36 TAHUN 2015

TENTANG
RINCIAN ANGGARAN
PENDAPATAN DAN BELANJA NEGARA
TAHUN ANGGARAN 2015

RINCIAN DANA ALOKASI UMUM
MENURUT PROVINSI/KABUPATEN/KOTA

www.peraturan.go.id

LAMPIRAN XIV
RINCIAN ALOKASI DANA ALOKASI UMUM TA 2015
MENURUT PROVINSI / KABUPATEN /KOTA

(Dalam Ribuan Rupiah)

NO.	NAMA DAERAH	DAU 2015
1	2	3
I	**Provinsi Aceh**	**1.237.894.986**
1	Kab. Aceh Barat	565.634.080
2	Kab. Aceh Besar	698.185.445
3	Kab. Aceh Selatan	604.474.808
4	Kab. Aceh Singkil	399.966.120
5	Kab. Aceh Tengah	579.832.765
6	Kab. Aceh Tenggara	539.245.123
7	Kab. Aceh Timur	730.055.738
8	Kab. Aceh Utara	738.765.524
9	Kab. Bireuen	780.023.926
10	Kab. Pidie	766.392.994
11	Kab. Simeulue	403.115.791
12	Kota Banda Aceh	612.503.568
13	Kota Sabang	332.562.082
14	Kota Langsa	425.446.753
15	Kota Lhokseumawe	469.107.319
16	Kab. Gayo Lues	416.868.039
17	Kab. Aceh Barat Daya	416.171.312
18	Kab. Aceh Jaya	400.638.553
19	Kab. Nagan Raya	503.087.763
20	Kab. Aceh Tamiang	486.741.323
21	Kab. Bener Meriah	432.742.891
22	Kab. Pidie Jaya	402.160.221
23	Kota Subulussalam	292.296.821
II	**Provinsi Sumatera Utara**	**1.139.261.371**
1	Kab. Asahan	817.746.952
2	Kab. Dairi	560.602.194
3	Kab. Deli Serdang	1.396.297.620
4	Kab. Karo	697.458.392
5	Kab. Labuhanbatu	593.025.840
6	Kab. Langkat	1.099.486.754
7	Kab. Mandailing Natal	722.942.098
8	Kab. Nias	365.879.173
9	Kab. Simalungun	1.084.973.726
10	Kab. Tapanuli Selatan	592.764.058
11	Kab. Tapanuli Tengah	558.241.964
12	Kab. Tapanuli Utara	616.216.474
13	Kab. Toba Samosir	506.843.572
14	Kota Binjai	541.895.577
15	Kota Medan	1.232.071.365
16	Kota Pematang Siantar	536.792.310
17	Kota Sibolga	380.075.078
18	Kota Tanjung Balai	398.405.838
19	Kota Tebing Tinggi	400.236.724
20	Kota Padang Sidempuan	481.834.636
21	Kab. Pakpak Bharat	326.899.366
22	Kab. Nias Selatan	468.405.844
23	Kab. Humbang Hasundutan	511.805.111
24	Kab. Serdang Bedagai	720.551.907
25	Kab. Samosir	447.470.935
26	Kab. Batu Bara	578.874.665
27	Kab. Padang Lawas	427.773.483
28	Kab. Padang Lawas Utara	444.806.362
29	Kab. Labuhanbatu Selatan	427.015.380
30	Kab. Labuhanbatu Utara	531.602.310
31	Kab. Nias Utara	359.841.943
32	Kab. Nias Barat	301.537.799
33	Kota Gunungsitoli	397.362.423
III	**Provinsi Sumatera Barat**	**1.221.128.606**
1	Kab. Limapuluh Kota	725.615.816
2	Kab. Agam	767.750.679
3	Kab. Kepulauan Mentawai	546.798.618
4	Kab. Padang Pariaman	724.226.441
5	Kab. Pasaman	562.775.575
6	Kab. Pesisir Selatan	784.825.492
7	Kab. Sijunjung	516.685.152
8	Kab. Solok	676.074.363
9	Kab. Tanah Datar	667.139.623

www.peraturan.go.id

LAMPIRAN XIV

RINCIAN ALOKASI DANA ALOKASI UMUM TA 2015
MENURUT PROVINSI / KABUPATEN /KOTA

(Dalam Ribuan Rupiah)

NO.	NAMA DAERAH	DAU 2015
1	2	3
10	Kota Bukit Tinggi	408.640.651
11	Kota Padang Panjang	343.008.704
12	Kota Padang	1.072.429.395
13	Kota Payakumbuh	425.111.374
14	Kota Sawahlunto	344.941.712
15	Kota Solok	360.719.232
16	Kota Pariaman	389.745.497
17	Kab. Pasaman Barat	611.155.638
18	Kab. Dharmasraya	477.807.496
19	Kab. Solok Selatan	433.585.911
IV	**Provinsi Riau**	**654.220.250**
1	Kab. Bengkalis	-
2	Kab. Indragiri Hilir	841.133.812
3	Kab. Indragiri Hulu	609.433.272
4	Kab. Kampar	671.809.364
5	Kab. Kuantan Singingi	602.796.123
6	Kab. Pelalawan	518.942.022
7	Kab. Rokan Hilir	320.515.985
8	Kab. Rokan Hulu	570.751.535
9	Kab. Siak	185.019.984
10	Kota Dumai	343.254.509
11	Kota Pekanbaru	776.411.106
12	Kab. Kepulauan Meranti	347.404.428
V	**Provinsi Jambi**	**1.009.165.864**
1	Kab. Batang Hari	517.978.869
2	Kab. Bungo	580.998.294
3	Kab. Kerinci	550.843.627
4	Kab. Merangin	642.011.056
5	Kab. Muaro Jambi	572.622.998
6	Kab. Sarolangun	517.687.718
7	Kab. Tanjung Jabung Barat	386.128.267
8	Kab. Tanjung Jabung Timur	432.097.281
9	Kab. Tebo	507.153.153
10	Kota Jambi	668.201.807
11	Kota Sungai Penuh	370.113.129
VI	**Provinsi Sumatera Selatan**	**931.915.470**
1	Kab. Lahat	622.781.695
2	Kab. Musi Banyuasin	131.033.381
3	Kab. Musi Rawas	578.786.009
4	Kab. Muara Enim	610.384.296
5	Kab. Ogan Komering Ilir	958.999.224
6	Kab. Ogan Komering Ulu	568.562.532
7	Kota Palembang	1.210.604.984
8	Kota Prabumulih	406.701.018
9	Kota Pagar Alam	351.582.212
10	Kota Lubuk Linggau	415.549.771
11	Kab. Banyuasin	829.437.390
12	Kab. Ogan Ilir	557.402.625
13	Kab. Ogan Komering Ulu Timur	693.714.985
14	Kab. Ogan Komering Ulu Selatan	523.633.902
15	Kab. Empat Lawang	366.775.204
16	Kab. Penukal Abab Lematang Ilir	284.332.921
17	Kab. Musi Rawas Utara	324.442.113
VII	**Provinsi Bengkulu**	**1.046.080.820**
1	Kab. Bengkulu Selatan	511.116.682
2	Kab. Bengkulu Utara	584.660.029
3	Kab. Rejang Lebong	566.446.460
4	Kota Bengkulu	610.294.533
5	Kab. Kaur	393.623.581
6	Kab. Seluma	460.578.378
7	Kab. Mukomuko	479.075.773
8	Kab. Lebong	382.681.510
9	Kab. Kepahiang	415.341.353
10	Kab. Bengkulu Tengah	397.017.701
VIII	**Provinsi Lampung**	**1.097.129.439**
1	Kab. Lampung Barat	491.134.702

www.peraturan.go.id

LAMPIRAN XIV

RINCIAN ALOKASI DANA ALOKASI UMUM TA 2015
MENURUT PROVINSI / KABUPATEN /KOTA

(Dalam Ribuan Rupiah)

NO.	NAMA DAERAH	DAU 2015
1	2	3
2	Kab. Lampung Selatan	881.977.998
3	Kab. Lampung Tengah	1.220.616.169
4	Kab. Lampung Utara	861.223.023
5	Kab. Lampung Timur	974.792.193
6	Kab. Tanggamus	698.708.398
7	Kab. Tulang Bawang	548.942.825
8	Kab. Way Kanan	639.549.226
9	Kota Bandar Lampung	950.106.009
10	Kota Metro	422.921.330
11	Kab. Pesawaran	601.857.515
12	Kab. Pringsewu	570.582.781
13	Kab. Mesuji	402.889.285
14	Kab. Tulang Bawang Barat	442.703.859
15	Kab. Pesisir Barat	363.080.538
IX	**Provinsi DKI Jakarta**	**-**
X	**Provinsi Jawa Barat**	**1.303.654.355**
1	Kab. Bandung	1.957.538.845
2	Kab. Bekasi	1.256.103.775
3	Kab. Bogor	2.163.439.062
4	Kab. Ciamis	1.156.989.995
5	Kab. Cianjur	1.443.963.022
6	Kab. Cirebon	1.431.944.562
7	Kab. Garut	1.743.136.836
8	Kab. Indramayu	1.287.606.401
9	Kab. Karawang	1.246.484.473
10	Kab. Kuningan	1.127.612.951
11	Kab. Majalengka	1.115.055.702
12	Kab. Purwakarta	808.114.494
13	Kab. Subang	1.173.194.335
14	Kab. Sukabumi	1.496.070.332
15	Kab. Sumedang	1.118.845.812
16	Kab. Tasikmalaya	1.380.490.312
17	Kota Bandung	1.574.737.891
18	Kota Bekasi	1.198.049.800
19	Kota Bogor	737.833.158
20	Kota Cirebon	577.764.436
21	Kota Depok	879.459.283
22	Kota Sukabumi	487.739.457
23	Kota Tasikmalaya	741.693.302
24	Kota Cimahi	548.703.908
25	Kota Banjar	352.697.608
26	Kab. Bandung Barat	1.030.024.270
27	Kab. Pangandaran	523.966.081
XI	**Provinsi Jawa Tengah**	**1.629.429.283**
1	Kab. Banjarnegara	862.810.552
2	Kab. Banyumas	1.277.833.796
3	Kab. Batang	706.782.246
4	Kab. Blora	848.823.612
5	Kab. Boyolali	968.089.632
6	Kab. Brebes	1.234.338.079
7	Kab. Cilacap	1.332.536.848
8	Kab. Demak	833.041.455
9	Kab. Grobogan	1.008.901.500
10	Kab. Jepara	935.771.120
11	Kab. Karanganyar	906.446.527
12	Kab. Kebumen	1.146.008.708
13	Kab. Kendal	884.901.572
14	Kab. Klaten	1.164.196.398
15	Kab. Kudus	784.919.177
16	Kab. Magelang	996.070.014
17	Kab. Pati	1.086.645.667
18	Kab. Pekalongan	862.011.706
19	Kab. Pemalang	1.058.982.530
20	Kab. Purbalingga	805.222.229
21	Kab. Purworejo	875.528.049
22	Kab. Rembang	723.091.447
23	Kab. Semarang	876.672.925
24	Kab. Sragen	977.443.589

www.peraturan.go.id

LAMPIRAN XIV

RINCIAN ALOKASI DANA ALOKASI UMUM TA 2015
MENURUT PROVINSI / KABUPATEN /KOTA

(Dalam Ribuan Rupiah)

NO.	NAMA DAERAH	DAU 2015
1	2	3
25	Kab. Sukoharjo	854.457.636
26	Kab. Tegal	1.085.549.293
27	Kab. Temanggung	731.733.741
28	Kab. Wonogiri	1.031.393.472
29	Kab. Wonosobo	748.447.761
30	Kota Magelang	418.257.922
31	Kota Pekalongan	421.276.527
32	Kota Salatiga	400.176.755
33	Kota Semarang	1.126.847.634
34	Kota Surakarta	713.300.856
35	Kota Tegal	405.831.088
XII	**Provinsi DI Yogyakarta**	**920.544.722**
1	Kab. Bantul	942.850.827
2	Kab. Gunung Kidul	872.566.961
3	Kab. Kulon Progo	657.260.489
4	Kab. Sleman	984.410.612
5	Kota Yogyakarta	622.365.351
XIII	**Provinsi Jawa Timur**	**1.587.261.707**
1	Kab. Bangkalan	888.673.426
2	Kab. Banyuwangi	1.288.940.680
3	Kab. Blitar	1.037.911.125
4	Kab. Bojonegoro	895.987.113
5	Kab. Bondowoso	862.599.540
6	Kab. Gresik	873.265.959
7	Kab. Jember	1.586.836.602
8	Kab. Jombang	1.032.325.237
9	Kab. Kediri	1.177.392.295
10	Kab. Lamongan	1.064.300.915
11	Kab. Lumajang	923.492.395
12	Kab. Madiun	832.357.223
13	Kab. Magetan	856.278.521
14	Kab. Malang	1.613.161.777
15	Kab. Mojokerto	923.747.632
16	Kab. Nganjuk	1.024.223.014
17	Kab. Ngawi	995.119.303
18	Kab. Pacitan	714.847.233
19	Kab. Pamekasan	817.903.633
20	Kab. Pasuruan	1.089.359.282
21	Kab. Ponorogo	993.319.105
22	Kab. Probolinggo	956.969.595
23	Kab. Sampang	788.345.170
24	Kab. Sidoarjo	1.206.659.789
25	Kab. Situbondo	787.728.919
26	Kab. Sumenep	1.010.159.421
27	Kab. Trenggalek	839.497.985
28	Kab. Tuban	955.939.873
29	Kab. Tulungagung	1.111.457.117
30	Kota Blitar	400.654.035
31	Kota Kediri	634.461.169
32	Kota Madiun	509.817.165
33	Kota Malang	818.758.893
34	Kota Mojokerto	382.373.637
35	Kota Pasuruan	399.095.322
36	Kota Probolinggo	463.649.666
37	Kota Surabaya	1.147.385.486
38	Kota Batu	413.219.693
XIV	**Provinsi Kalimantan Barat**	**1.405.594.169**
1	Kab. Bengkayang	529.863.441
2	Kab. Landak	619.248.444
3	Kab. Kapuas Hulu	913.007.845
4	Kab. Ketapang	1.070.459.827
5	Kab. Mempawah	527.927.949
6	Kab. Sambas	793.128.760
7	Kab. Sanggau	760.206.338
8	Kab. Sintang	868.071.560
9	Kota Pontianak	686.035.831
10	Kota Singkawang	478.943.765

www.peraturan.go.id

LAMPIRAN XIV

RINCIAN ALOKASI DANA ALOKASI UMUM TA 2015
MENURUT PROVINSI / KABUPATEN /KOTA

(Dalam Ribuan Rupiah)

NO.	NAMA DAERAH	DAU 2015
1	2	3
11	Kab. Sekadau	442.188.681
12	Kab. Melawi	584.820.744
13	Kab. Kayong Utara	415.875.881
14	Kab. Kubu Raya	732.770.242
XV	**Provinsi Kalimantan Tengah**	**1.280.595.848**
1	Kab. Barito Selatan	570.135.858
2	Kab. Barito Utara	517.551.314
3	Kab. Kapuas	820.035.397
4	Kab. Kotawaringin Barat	614.824.773
5	Kab. Kotawaringin Timur	788.804.313
6	Kota Palangkaraya	599.588.799
7	Kab. Katingan	668.100.108
8	Kab. Seruyan	563.570.718
9	Kab. Sukamara	407.283.888
10	Kab. Lamandau	433.768.085
11	Kab. Gunung Mas	533.355.913
12	Kab. Pulang Pisau	522.284.767
13	Kab. Murung Raya	593.989.575
14	Kab. Barito Timur	468.744.476
XVI	**Provinsi Kalimantan Selatan**	**571.244.699**
1	Kab. Banjar	656.161.364
2	Kab. Barito Kuala	524.143.237
3	Kab. Hulu Sungai Selatan	482.751.537
4	Kab. Hulu Sungai Tengah	486.103.207
5	Kab. Hulu Sungai Utara	458.316.398
6	Kab. Kotabaru	599.980.077
7	Kab. Tabalong	431.954.810
8	Kab. Tanah Laut	438.283.639
9	Kab. Tapin	414.358.027
10	Kota Banjarbaru	393.734.908
11	Kota Banjarmasin	677.982.845
12	Kab. Balangan	312.301.730
13	Kab. Tanah Bumbu	445.258.297
XVII	**Provinsi Kalimantan Timur**	**-**
1	Kab. Berau	450.655.808
2	Kab. Kutai Kartanegara	-
3	Kab. Kutai Barat	493.715.342
4	Kab. Kutai Timur	341.077.077
5	Kab. Paser	260.435.716
6	Kota Balikpapan	388.230.396
7	Kota Bontang	104.682.726
8	Kota Samarinda	590.233.541
9	Kab. Penajam Paser Utara	138.285.466
10	Kab. Mahakam Ulu	298.733.660
XVIII	**Provinsi Sulawesi Utara**	**1.026.948.809**
1	Kab. Bolaang Mongondow	509.338.818
2	Kab. Minahasa	612.985.664
3	Kab. Kepulauan Sangihe	488.661.839
4	Kota Bitung	437.048.958
5	Kota Manado	750.810.852
6	Kab. Kepulauan Talaud	443.925.813
7	Kab. Minahasa Selatan	494.327.305
8	Kota Tomohon	360.894.361
9	Kab. Minahasa Utara	439.777.199
10	Kab. Kep. Siau Tagulandang Biaro	356.321.695
11	Kota Kotamobagu	354.997.037
12	Kab. Bolaang Mongondow Utara	344.417.453
13	Kab. Minahasa Tenggara	385.145.539
14	Kab. Bolaang Mongondow Timur	307.544.042
15	Kab. Bolaang Mongondow Selatan	306.923.904
XIX	**Provinsi Sulawesi Tengah**	**1.221.602.865**
1	Kab. Banggai	835.942.814
2	Kab. Banggai Kepulauan	410.850.710
3	Kab. Buol	472.180.193
4	Kab. Toli-Toli	562.249.669
5	Kab. Donggala	604.513.881
6	Kab. Morowali	432.831.984

www.peraturan.go.id

LAMPIRAN XIV

RINCIAN ALOKASI DANA ALOKASI UMUM TA 2015
MENURUT PROVINSI / KABUPATEN /KOTA

(Dalam Ribuan Rupiah)

NO.	NAMA DAERAH	DAU 2015
1	2	3
7	Kab. Poso	678.031.865
8	Kota Palu	652.407.682
9	Kab. Parigi Moutong	692.805.521
10	Kab. Tojo Una Una	509.717.712
11	Kab. Sigi	595.913.672
12	Kab. Banggai Laut	325.941.229
13	Kab. Morowali Utara	499.809.149
XX	**Provinsi Sulawesi Selatan**	**1.180.010.167**
1	Kab. Bantaeng	444.919.431
2	Kab. Barru	488.014.810
3	Kab. Bone	977.807.065
4	Kab. Bulukumba	712.895.671
5	Kab. Enrekang	526.156.287
6	Kab. Gowa	795.078.108
7	Kab. Jeneponto	571.867.452
8	Kab. Luwu	624.131.623
9	Kab. Luwu Utara	601.496.441
10	Kab. Maros	645.209.768
11	Kab. Pangkajene dan Kepulauan	650.132.194
12	Kota Palopo	476.408.524
13	Kab. Luwu Timur	473.135.918
14	Kab. Pinrang	654.520.422
15	Kab. Sinjai	541.097.983
16	Kab. Kepulauan Selayar	479.393.610
17	Kab. Sidenreng Rappang	574.364.767
18	Kab. Soppeng	589.049.244
19	Kab. Takalar	554.136.141
20	Kab. Tana Toraja	510.857.220
21	Kab. Wajo	652.585.413
22	Kota Pare-pare	430.750.753
23	Kota Makassar	1.198.866.380
24	Kab. Toraja Utara	471.481.781
XXI	**Provinsi Sulawesi Tenggara**	**1.176.423.577**
1	Kab. Buton	252.280.186
2	Kab. Konawe	639.180.850
3	Kab. Kolaka	572.933.352
4	Kab. Muna	502.390.813
5	Kota Kendari	629.906.640
6	Kota Bau-bau	485.032.228
7	Kab. Konawe Selatan	598.467.031
8	Kab. Bombana	435.541.498
9	Kab. Wakatobi	402.871.101
10	Kab. Kolaka Utara	451.597.322
11	Kab. Konawe Utara	433.074.127
12	Kab. Buton Utara	379.995.219
13	Kab. Konawe Kepulauan	299.813.757
14	Kab. Kolaka Timur	373.775.832
15	Kab. Muna Barat	217.533.016
16	Kab. Buton Tengah	225.671.011
17	Kab. Buton Selatan	150.820.654
XXII	**Provinsi Bali**	**831.597.268**
1	Kab. Badung	286.763.106
2	Kab. Bangli	499.734.801
3	Kab. Buleleng	868.511.959
4	Kab. Gianyar	641.915.439
5	Kab. Jembrana	486.895.030
6	Kab. Karangasem	633.241.287
7	Kab. Klungkung	484.541.151
8	Kab. Tabanan	722.004.642
9	Kota Denpasar	625.978.507
XXIII	**Provinsi Nusa Tenggara Barat**	**1.088.633.717**
1	Kab. Bima	806.493.334
2	Kab. Dompu	546.420.245
3	Kab. Lombok Barat	716.888.890
4	Kab. Lombok Tengah	906.054.748
5	Kab. Lombok Timur	1.079.810.803

www.peraturan.go.id

LAMPIRAN XIV

RINCIAN ALOKASI DANA ALOKASI UMUM TA 2015
MENURUT PROVINSI / KABUPATEN /KOTA

(Dalam Ribuan Rupiah)

NO.	NAMA DAERAH	DAU 2015
1	2	3
6	Kab. Sumbawa	757.530.420
7	Kota Mataram	593.930.707
8	Kota Bima	435.279.239
9	Kab. Sumbawa Barat	380.327.621
10	Kab. Lombok Utara	362.867.848
XXIV	**Provinsi Nusa Tenggara Timur**	**1.300.445.875**
1	Kab. Alor	534.145.520
2	Kab. Belu	461.698.140
3	Kab. Ende	580.052.378
4	Kab. Flores Timur	560.668.629
5	Kab. Kupang	622.237.030
6	Kab. Lembata	418.139.104
7	Kab. Manggarai	533.852.022
8	Kab. Ngada	434.333.102
9	Kab. Sikka	575.677.254
10	Kab. Sumba Barat	373.105.900
11	Kab. Sumba Timur	591.063.048
12	Kab. Timor Tengah Selatan	699.696.847
13	Kab. Timor Tengah Utara	529.736.673
14	Kota Kupang	623.321.955
15	Kab. Rote Ndao	384.157.631
16	Kab. Manggarai Barat	469.802.864
17	Kab. Nagekeo	392.268.801
18	Kab. Sumba Barat Daya	441.514.119
19	Kab. Sumba Tengah	316.115.258
20	Kab. Manggarai Timur	448.559.879
21	Kab. Sabu Raijua	331.421.675
22	Kab. Malaka	412.497.589
XXV	**Provinsi Maluku**	**1.177.774.674**
1	Kab. Maluku Tenggara Barat	503.538.977
2	Kab. Maluku Tengah	885.791.029
3	Kab. Maluku Tenggara	420.265.646
4	Kab. Buru	426.257.952
5	Kota Ambon	620.624.670
6	Kab. Seram Bagian Barat	521.779.419
7	Kab. Seram Bagian Timur	440.078.172
8	Kab. Kepulauan Aru	492.968.171
9	Kota Tual	330.426.984
10	Kab. Maluku Barat Daya	567.308.065
11	Kab. Buru Selatan	381.666.874
XXVI	**Provinsi Papua**	**2.277.932.698**
1	Kab. Biak Numfor	550.027.939
2	Kab. Jayapura	621.019.550
3	Kab. Jayawijaya	638.050.412
4	Kab. Merauke	1.215.753.740
5	Kab. Mimika	599.825.386
6	Kab. Nabire	675.594.612
7	Kab. Paniai	528.268.843
8	Kab. Puncak Jaya	659.625.244
9	Kab. Kepulauan Yapen	490.124.080
10	Kota Jayapura	641.368.319
11	Kab. Sarmi	699.065.955
12	Kab. Keerom	522.597.271
13	Kab. Yahukimo	649.719.896
14	Kab. Pegunungan Bintang	818.632.490
15	Kab. Tolikara	687.457.196
16	Kab. Boven Digoel	783.185.708
17	Kab. Mappi	781.105.420
18	Kab. Asmat	869.676.687
19	Kab. Waropen	496.470.578
20	Kab. Supiori	421.569.970
21	Kab. Mamberamo Raya	676.240.840
22	Kab. Mamberamo Tengah	598.199.149
23	Kab. Yalimo	595.901.117
24	Kab. Lanny Jaya	614.605.407
25	Kab. Nduga	536.200.115

www.peraturan.go.id

LAMPIRAN XIV

RINCIAN ALOKASI DANA ALOKASI UMUM TA 2015
MENURUT PROVINSI / KABUPATEN /KOTA

(Dalam Ribuan Rupiah)

NO.	NAMA DAERAH	DAU 2015
1	2	3
26	Kab. Dogiyai	498.022.707
27	Kab. Puncak	764.949.109
28	Kab. Intan Jaya	660.758.604
29	Kab. Deiyai	436.570.139
XXVII	**Provinsi Maluku Utara**	**1.061.177.950**
1	Kab. Halmahera Tengah	410.814.584
2	Kota Ternate	547.124.097
3	Kab. Halmahera Barat	425.455.874
4	Kab. Halmahera Timur	386.052.045
5	Kab. Halmahera Selatan	553.257.144
6	Kab. Halmahera Utara	442.320.594
7	Kab. Kepulauan Sula	409.259.640
8	Kota Tidore Kepulauan	514.588.698
9	Kab. Pulau Morotai	558.632.124
10	Kab. Pulau Taliabu	312.261.017
XXVIII	**Provinsi Banten**	**640.981.003**
1	Kab. Lebak	1.029.228.685
2	Kab. Pandeglang	1.107.070.138
3	Kab. Serang	970.418.459
4	Kab. Tangerang	1.212.934.842
5	Kota Cilegon	514.376.024
6	Kota Tangerang	887.033.912
7	Kota Serang	584.907.276
8	Kota Tangerang Selatan	609.519.143
XXIX	**Provinsi Bangka Belitung**	**897.887.443**
1	Kab. Bangka	500.006.221
2	Kab. Belitung	442.340.798
3	Kota Pangkal Pinang	419.863.119
4	Kab. Bangka Selatan	433.411.852
5	Kab. Bangka Tengah	404.287.787
6	Kab. Bangka Barat	424.317.594
7	Kab. Belitung Timur	412.859.933
XXX	**Provinsi Gorontalo**	**845.395.651**
1	Kab. Boalemo	405.948.366
2	Kab. Gorontalo	625.486.841
3	Kota Gorontalo	474.499.749
4	Kab. Pohuwato	456.663.680
5	Kab. Bone Bolango	426.858.306
6	Kab. Gorontalo Utara	341.978.471
XXXI	**Provinsi Kepulauan Riau**	**695.943.711**
1	Kab. Natuna	145.433.895
2	Kab. Kepulauan Anambas	184.263.823
3	Kab. Karimun	299.313.329
4	Kota Batam	529.988.410
5	Kota Tanjung Pinang	325.258.855
6	Kab. Lingga	308.643.756
7	Kab. Bintan	290.035.577
XXXII	**Provinsi Papua Barat**	**1.284.079.495**
1	Kab. Fak Fak	641.657.329
2	Kab. Manokwari	512.974.361
3	Kab. Sorong	444.367.750
4	Kota Sorong	439.065.009
5	Kab. Raja Ampat	604.040.198
6	Kab. Sorong Selatan	404.798.751
7	Kab. Teluk Bintuni	514.638.361
8	Kab. Teluk Wondama	378.341.362
9	Kab. Kaimana	579.511.714
10	Kab. Maybrat	392.146.729
11	Kab. Tambrauw	510.974.246
12	Kab. Manokwari Selatan	350.489.309
13	Kab. Pegunungan Arfak	364.517.544

www.peraturan.go.id

LAMPIRAN XIV

RINCIAN ALOKASI DANA ALOKASI UMUM TA 2015
MENURUT PROVINSI / KABUPATEN /KOTA

(Dalam Ribuan Rupiah)

NO.	NAMA DAERAH	DAU 2015
1	2	3
XXXIII	**Provinsi Sulawesi Barat**	**895.580.933**
1	Kab. Majene	504.387.592
2	Kab. Mamuju	563.982.678
3	Kab. Polewali Mandar	639.371.455
4	Kab. Mamasa	468.897.770
5	Kab. Mamuju Utara	407.795.549
6	Kab. Mamuju Tengah	320.285.095
XXXIV	**Provinsi Kalimantan Utara**	**651.247.428**
1	Kab. Bulungan	305.134.612
2	Kab. Malinau	643.965.213
3	Kab. Nunukan	282.437.662
4	Kota Tarakan	208.879.172
5	Kab. Tana Tidung	171.596.612
JUMLAH ALOKASI DAU PROVINSI		**35.288.784.853**
JUMLAH ALOKASI DAU KAB/KOTA		**317.599.063.675**
JUMLAH ALOKASI DAU NASIONAL		**352.887.848.528**

PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA,

JOKO WIDODO

www.peraturan.go.id

LAMPIRAN XV

PERATURAN PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA
NOMOR 36 TAHUN 2015

TENTANG
RINCIAN ANGGARAN
PENDAPATAN DAN BELANJA NEGARA
TAHUN ANGGARAN 2015

RINCIAN DANA ALOKASI KHUSUS
MENURUT PROVINSI/KABUPATEN/KOTA

www.peraturan.go.id

LAMPIRAN XV
RINCIAN DANA ALOKASI KHUSUS
MENURUT PROVINSI/KABUPATEN/KOTA

(Dalam Rupiah)

NO	NAMA DAERAH	PENDIDIKAN					KESEHATAN			INFRASTRUKTUR JALAN		PERUMAHAN DAN PERMUKIMAN			PERTANIAN			KELAUTAN DAN PERIKANAN	PERDESAAN				TRANSPORTASI			TOTAL
		PENGELOLAAN SISTEM	PENGELOLAAN KURIKULUM	PENGELOLAAN GTK	PENGELOLAAN SARPRAS	PENGELOLAAN PENDIDIKAN NON FORMAL	PELAYANAN KESEHATAN DASAR	PELAYANAN KESEHATAN RUJUKAN	PENGELOLAAN SISTEM KESEHATAN	PENGELOLAAN INFRASTRUKTUR JALAN PROVINSI	PENGELOLAAN INFRASTRUKTUR JALAN KABUPATEN/KOTA	PENGELOLAAN PERMUKIMAN DAERAH	PENGELOLAAN PENYEHATAN LINGKUNGAN DAERAH	PENGELOLAAN SANITASI DAERAH	PENGELOLAAN PERTANIAN	PENGELOLAAN SISTEM PENYULUHAN	PENGELOLAAN KETAHANAN PANGAN	PENGELOLAAN KELAUTAN DAN PERIKANAN	PENGELOLAAN PERDESAAN	PENGELOLAAN KAWASAN PERBATASAN	PENGELOLAAN KAWASAN PERTANAHAN	PENGELOLAAN KAWASAN PERTAMBANGAN	PENGELOLAAN INFRASTRUKTUR JALAN	PENGELOLAAN SISTEM PENGELOLAAN	PENGELOLAAN INFRASTRUKTUR SUNGAI	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)	(18)	(19)	(20)	(21)	(22)	(23)	(24)	(25)	(26)	(27)	(28)
1	Provinsi Aceh	5.440.801	847.100	17.225.238						5.746.700	13.525.488	1.301.500											36.286.218	1.319.800	99.582.575
2	Kab. Aceh Barat	9.438.445	4.581.800	2.309.162	2.984.482	3.947.450	2.986.742	1.986.756	2.842.248	1.286.552	2.192.880	4.692.500	2.720.620	2.126.730	3.611.620	4.530.880	1.391.980	1.349.788	1.446.145	1.945.778	-	2.436.450	3.089.742	13.170.888	-	441.980	71.845.000
3	Kab. Aceh Barat Daya	5.878.960	5.884.800	4.176.280	3.229.380	2.827.270	4.436.200	1.511.800	2.842.248	1.274.552	2.192.880	-	-	-	3.598.620	4.472.880	1.464.980	1.343.088	1.279.620	1.814.948	-	-	3.474.382	-	11.344.618	-	444.870	69.138.000
4	Kab. Aceh Besar	6.960.158	4.861.078	2.959.400	3.125.350	4.241.678	5.777.800	1.241.850	3.890.618	1.731.200	2.429.640	-	2.701.850	2.988.700	3.842.110	4.747.618	1.478.980	1.472.548	1.359.080	1.978.480	-	-	-	-	11.700.028	-	441.870	67.818.778
5	Kab. Aceh Jaya	5.378.960	5.779.560	3.193.280	3.033.930	3.033.930	5.240.300	1.241.850	3.050.088	1.767.200	2.429.640	-	-	-	4.298.980	3.924.140	1.391.780	1.398.788	1.359.080	1.814.080	-	-	-	-	11.700.028	-	441.870	66.650.000
6	Kab. Aceh Singkil	6.738.678	4.581.620	2.432.280	2.984.482	3.541.530	3.541.530	1.581.148	2.890.758	1.258.048	1.960.350	-	-	-	2.820.570	3.882.110	1.391.980	1.359.088	1.279.620	1.814.948	-	2.051.200	2.954.580	2.958.780	9.144.450	924.178	70.475.000
7	Kab. Aceh Tamiang	6.438.445	4.581.620	2.432.280	2.984.482	3.541.530	3.541.530	1.581.148	2.890.758	1.258.048	1.960.350	4.678.540	2.470.480	-	2.820.570	3.882.110	1.391.980	1.359.088	1.279.620	1.814.948	-	-	2.954.580	-	9.144.450	-	441.780	70.475.000
8	Kab. Aceh Tengah	6.758.445	5.919.040	4.158.880	4.887.180	4.389.310	4.159.140	2.184.880	3.290.218	2.244.230	3.020.480	-	2.790.280	2.497.880	3.297.820	4.628.080	1.478.980	1.344.980	1.844.780	2.121.928	1.844.780	3.614.880	-	-	11.700.028	-	441.780	70.980.180
9	Kab. Aceh Utara	10.758.445	5.581.620	3.432.280	3.984.482	-	-	-	3.290.218	2.244.230	3.020.480	-	-	-	3.297.820	4.628.080	1.478.980	1.344.980	-	2.121.928	1.844.780	-	-	-	11.700.028	-	-	70.980.180
10	Kab. Bener Meriah	6.438.445	5.581.620	3.014.331	3.230.910	3.230.910	1.929.440	2.021.978	3.138.218	2.244.230	2.429.330	-	2.711.620	2.120.300	3.297.820	4.628.080	1.478.980	1.344.980	1.844.780	2.121.928	-	4.814.480	-	-	11.700.028	-	441.780	67.818.778
11	Kab. Bireuen	6.960.158	5.919.040	3.432.280	3.230.910	3.230.910	3.929.440	1.970.048	3.290.218	2.244.230	2.429.330	-	-	-	3.297.820	4.628.080	1.478.980	1.344.980	1.844.780	2.121.928	-	3.614.880	-	-	11.700.028	-	441.780	67.818.778
12	Kab. Simeulue	6.407.258	4.861.620	2.307.220	3.229.380	4.244.910	3.174.140	1.581.148	3.138.218	2.187.780	2.192.810	-	-	-	4.812.820	5.836.780	1.628.980	1.472.548	1.377.620	1.814.948	1.844.780	3.614.880	3.089.742	4.958.780	11.700.028	-	441.780	73.818.778
13	Kota Banda Aceh	4.375.418	3.851.320	1.038.270	2.014.180	2.781.950	1.571.140	1.311.438	1.814.018	1.778.640	4.514.450	3.750.650	-	-	1.385.180	2.210.880	1.328.870	1.140.980	1.065.970	1.462.080	-	-	-	-	7.452.028	-	504.480	42.780.948
14	Kota Sabang	4.960.878	3.672.960	2.080.680	2.082.960	3.084.708	2.171.280	1.311.988	-	1.788.848	3.960.260	-	-	-	3.960.848	3.780.218	1.868.980	928.088	1.068.980	1.870.018	-	3.218.480	7.452.128	-	8.182.860	47.218.788
15	Kota Lhokseumawe	4.960.878	3.672.960	2.080.680	2.082.960	3.084.708	2.171.280	1.311.988	-	1.788.848	3.960.260	-	-	-	3.960.848	3.780.218	1.868.980	928.088	1.068.980	1.870.018	-	3.218.480	7.452.128	-	8.182.860	47.218.788
16	Kota Langsa	4.960.878	3.672.960	2.080.680	2.082.960	3.084.708	2.171.280	1.311.988	-	1.788.848	3.960.260	-	-	-	3.960.848	3.780.218	1.868.980	928.088	1.068.980	1.870.018	-	3.218.480	7.452.128	-	8.182.860	47.218.788
17	Kota Lhokseumawe	3.717.158	3.615.960	1.752.780	2.084.740	2.883.930	1.929.778	-	-	1.672.048	3.767.780	-	-	-	3.614.700	3.532.218	1.751.180	1.552.180	1.852.180	1.922.918	-	-	-	-	7.788.748	-	429.240	42.914.978
18	Kab. Nagan Raya	5.144.578	4.369.978	2.436.780	2.779.980	4.475.710	3.190.270	1.764.798	3.490.218	2.068.178	2.964.010	-	-	-	3.914.800	5.124.428	1.647.280	1.472.548	1.359.080	1.938.078	-	-	-	-	11.944.648	-	441.870	62.715.788
19	Kab. Aceh Jaya	5.144.578	4.369.978	2.436.780	2.779.980	4.475.710	3.190.270	1.764.798	3.490.218	2.068.178	2.964.010	-	-	-	3.914.800	5.124.428	1.647.280	1.472.548	1.359.080	1.938.078	-	3.614.240	-	-	11.944.648	-	441.870	62.715.788
20	Kab. Aceh Barat Daya	5.412.958	4.211.458	2.307.240	2.768.770	4.351.958	3.297.210	1.762.948	2.437.138	1.962.948	2.837.138	2.040.450	-	-	3.711.200	5.447.488	1.823.980	1.619.548	1.359.780	1.830.758	-	-	-	-	10.230.788	-	429.870	62.200.988
21	Kab. Gayo Lues	4.238.448	3.681.620	2.179.480	2.389.880	3.893.810	1.959.830	1.281.118	2.278.848	1.678.780	2.360.820	2.482.860	2.032.080	-	2.745.780	3.611.748	860.880	1.824.648	1.359.080	1.734.918	-	3.742.120	-	-	9.347.888	-	426.450	56.232.988
22	Kab. Aceh Tamiang	5.644.218	4.961.920	2.998.180	3.288.670	4.386.670	3.786.730	1.701.530	3.422.168	2.174.180	2.967.170	-	-	-	3.598.180	5.812.068	1.598.440	1.824.648	1.359.080	1.844.258	-	3.468.580	-	-	12.744.088	-	433.818	59.828.498
23	Kab. Bener Meriah	4.751.148	4.950.958	2.521.080	2.681.310	3.981.698	1.959.410	1.459.918	2.784.778	1.918.098	2.432.750	2.084.630	-	-	2.988.320	3.792.118	1.298.880	1.294.180	1.359.780	2.028.840	1.832.778	3.614.880	-	-	8.192.778	-	430.978	59.978.788
24	Kab. Pidie Jaya	4.602.088	3.523.958	1.963.480	2.307.550	3.170.058	1.889.790	1.241.078	2.342.858	1.964.178	2.432.750	-	2.171.890	-	2.926.218	3.792.118	1.298.880	1.294.180	1.359.780	1.844.258	1.832.778	-	-	-	7.998.778	-	430.978	57.741.788
25	Kota Subulussalam	4.238.148	3.764.440	1.914.170	2.201.450	2.230.648	1.977.100	980.450	-	1.294.520	1.960.350	-	-	-	2.612.450	2.914.420	874.280	1.048.120	1.359.080	1.520.018	-	-	-	-	7.132.488	-	417.280	36.810.018
26	Provinsi Sumatera Utara									1.193.620					12.742.000							4.330.418	-	-	40.630.018			54.866.038
24	Kab. Asahan	11.930.298	6.389.905	6.969.982	7.920.870	4.286.468	3.944.280	1.491.350	2.598.428	2.731.248	3.979.280	-	2.786.280	-	4.960.818	4.999.058	944.720	1.414.248	1.258.080	1.837.038	-	-	-	-	13.828.428	-	416.280	77.448.778
25	Kab. Dairi	11.930.298	6.389.905	6.969.982	7.920.870	4.286.468	3.944.280	1.491.350	2.598.428	2.731.248	3.979.280	-	-	-	4.960.818	4.999.058	944.720	1.414.248	1.258.080	1.837.038	-	-	-	-	13.828.428	3.091.880	416.280	77.448.778
26	Kab. Deli Serdang	7.988.718	6.892.450	5.836.360	6.780.080	3.024.508	3.242.630	1.400.908	1.870.788	1.918.498	3.700.610	5.071.500	-	-	2.698.780	3.678.078	809.080	1.762.018	1.359.180	1.760.718	-	-	-	-	12.842.780	5.004.180	400.080	71.252.780
27	Kab. Humbang Hasundutan	4.960.018	4.761.618	2.614.080	2.895.510	2.881.818	2.191.240	1.491.478	2.180.678	1.618.018	2.700.770	-	-	-	3.298.780	3.458.418	1.024.180	1.318.180	1.359.180	1.760.718	-	-	-	-	11.458.080	-	416.280	71.618.280
28	Kab. Langkat	14.465.118	6.340.058	6.271.080	7.680.450	4.597.028	3.277.048	1.731.000	-	4.298.100	-	-	-	-	4.298.100	-	-	-	-	11.950.088	-	-	-	-	3.750.080	-	60.828.188
29	Kab. Mandailing Natal	5.920.758	5.084.508	4.314.980	5.329.880	3.703.978	2.917.458	1.295.688	3.298.988	2.087.798	3.193.940	-	-	-	4.920.498	5.318.388	1.458.980	1.472.548	1.359.080	1.818.088	1.868.688	-	-	-	11.218.328	3.978.080	421.818	79.288.088
31	Kab. Nias	6.177.198	5.687.118	2.418.930	5.455.480	2.874.988	3.641.298	1.384.148	3.498.448	1.898.378	3.980.740	-	-	-	4.598.298	5.898.478	838.680	1.298.648	1.374.680	1.861.098	-	3.798.980	3.236.278	11.748.148	4.161.280	409.180	71.647.188
32	Kab. Padang Lawas	5.760.098	4.671.598	3.761.780	4.780.280	3.329.120	3.172.298	1.384.148	3.498.448	1.898.378	3.980.740	-	-	-	3.413.980	5.898.478	838.680	1.298.648	1.374.680	1.861.098	-	-	-	-	11.748.148	-	409.180	70.980.180
33	Kab. Tapanuli Selatan	7.978.628	6.812.198	5.242.780	5.750.280	3.742.558	3.442.280	1.562.588	4.978.178	2.238.498	3.780.780	-	-	-	3.902.440	5.898.488	1.458.980	1.414.248	1.359.080	2.012.078	1.868.688	-	-	-	11.978.328	5.868.780	421.780	81.680.078
34	Kab. Tapanuli Tengah	6.738.298	5.551.868	4.501.780	4.750.280	3.742.558	3.442.280	1.562.588	4.978.178	2.238.498	3.780.780	4.548.440	2.612.080	2.088.780	3.902.440	5.898.488	1.458.980	1.414.248	1.359.080	2.012.078	1.868.688	3.614.880	-	-	11.978.328	-	421.780	81.680.078
35	Kab. Tapanuli Utara	4.718.298	3.551.868	2.501.780	2.750.280	2.080.468	2.142.280	1.562.588	2.978.178	1.238.718	1.412.780	2.527.280	2.527.280	2.027.280	2.171.440	3.898.478	1.458.980	1.414.248	1.359.080	1.844.258	1.868.688	-	-	-	11.748.148	3.924.280	409.180	70.980.180
36	Kab. Toba Samosir	6.367.758	4.671.118	2.918.980	3.699.480	2.882.928	1.801.948	1.418.978	2.898.978	1.798.980	2.980.180	-	-	-	3.916.798	5.837.488	1.987.280	1.387.648	1.878.880	1.898.188	-	-	-	-	14.497.018	3.978.980	444.780	63.898.038
37	Kab. Nias Barat	3.838.988	3.361.918	2.017.880	2.429.968	1.588.498	845.018	1.798.988	-	1.267.818	1.231.180	-	-	-	2.798.298	-	1.818.380	1.298.118	1.878.880	1.891.718	-	-	-	-	9.898.018	-	362.780	41.898.118
38	Kota Gunungsitoli	7.429.088	6.869.348	3.774.620	4.765.880	2.981.378	1.927.780	1.662.918	-	2.734.128	4.769.880	-	-	-	3.430.120	2.291.088	1.318.380	1.218.680	1.129.880	1.834.080	-	-	-	-	6.898.018	-	490.170	44.180.088
39	Kota Sibolga	4.897.178	3.875.378	1.978.780	3.720.480	2.789.558	2.007.780	1.662.918	-	1.267.818	4.769.880	-	-	-	3.952.180	-	1.818.380	1.298.118	1.878.880	1.891.718	-	-	-	-	6.898.018	-	479.780	42.979.048
40	Kota Tanjung Balai	5.610.218	3.920.218	1.940.780	3.670.880	1.345.328	1.306.830	870.788	-	1.670.110	1.560.880	-	-	-	2.540.440	-	1.110.018	1.018.120	1.128.080	1.838.018	-	-	-	-	9.818.018	-	458.880	36.838.118
41	Kota Tebing Tinggi	4.897.168	3.920.958	1.901.780	3.241.280	2.820.858	2.256.258	870.018	1.810.018	1.188.208	1.241.780	4.743.148	-	-	2.447.358	2.252.018	1.211.080	852.178	1.128.080	1.146.258	-	-	-	-	7.828.758	3.008.100	520.218	45.958.018
42	Kota Padang Sidempuan	3.960.218	3.120.868	2.284.280	3.029.670	2.824.358	1.802.868	914.668	2.249.018	1.188.128	1.741.430	-	-	-	2.418.280	2.128.088	874.080	1.298.648	1.128.080	1.838.018	-	-	-	-	9.838.048	-	479.480	44.804.188
43	Kota Pematang Siantar	4.960.218	3.920.218	1.940.780	3.670.880	1.345.328	1.306.830	870.788	1.810.018	1.188.128	1.741.430	5.678.820	-	-	2.540.440	2.252.018	1.211.080	852.178	1.128.080	1.146.258	-	-	-	-	7.828.758	3.008.100	520.218	45.958.018
44	Kab. Karo	5.346.468	11.894.618	5.417.780	13.769.780	5.482.978	3.478.718	1.872.758	4.878.228	1.738.648	1.958.370	-	-	-	4.328.178	5.928.628	1.648.477	1.411.080	1.359.080	1.870.488	-	4.077.080	-	-	13.498.478	4.767.380	434.480	89.178.778
45	Kab. Labuhan Batu Selatan	5.470.178	4.078.078	2.157.780	2.933.770	3.526.328	2.130.658	890.018	2.420.088	1.570.980	2.628.780	-	-	-	3.148.140	3.878.478	1.314.180	1.178.548	1.359.180	1.870.788	1.748.980	-	-	-	10.570.758	3.748.980	430.980	67.807.088
46	Kab. Labuhan Batu Utara	5.810.098	5.810.718	2.544.080	3.300.980	4.020.818	2.345.118	1.381.718	2.678.118	1.728.178	2.891.058	-	-	-	3.463.358	4.266.418	1.445.598	1.296.208	1.359.180	1.870.788	-	-	-	-	11.627.838	-	473.780	74.478.078
47	Kab. Simalungun	5.550.758	4.526.598	2.419.080	3.054.970	3.820.948	2.257.538	1.381.718	2.591.718	1.668.178	2.784.918	-	-	-	3.340.158	4.094.418	1.394.598	1.247.208	1.359.180	1.870.788	-	2.956.080	-	-	11.588.838	-	452.780	72.780.078
48	Kab. Batu Bara	5.170.218	4.984.778	3.108.680	4.371.180	3.780.988	3.111.868	1.381.718	2.591.718	1.668.178	2.784.918	-	-	-	4.298.898	5.672.898	1.394.598	1.247.208	1.359.180	1.870.788	-	-	-	-	11.588.838	-	452.780	69.980.178
49	Kab. Padang Lawas	6.478.698	4.897.298	2.028.180	3.234.980	3.234.928	1.920.778	1.393.668	1.812.298	1.280.648	1.280.848	-	-	-	2.138.780	3.448.648	1.061.280	937.628	1.358.780	1.817.068	-	-	-	-	9.287.988	-	399.740	46.712.298
50	Kab. Padang Lawas Utara	4.870.458	3.761.758	2.427.780	3.275.780	2.982.758	2.038.740	914.668	1.798.988	1.264.178	1.429.650	-	-	-	2.028.980	3.678.788	827.478	1.298.208	1.359.180	1.870.788	-	-	-	-	9.287.988	-	452.780	47.978.778
51	Kab. Labuhanbatu Selatan	5.678.778	4.823.018	2.801.780	3.854.180	3.820.778	2.007.780	1.381.718	1.812.298	1.280.648	1.280.848	-	-	-	2.138.780	3.448.648	1.061.280	937.628	1.358.780	1.817.068	-	-	-	-	9.287.988	-	399.740	46.712.298
52	Kab. Labuhanbatu Utara	5.678.778	4.823.018	2.801.780	3.854.180	3.820.778	2.007.780	1.381.718	1.812.298	1.280.648	1.280.848	-	-	-	2.138.780	3.448.648	1.061.280	937.628	1.358.780	1.817.068	-	-	-	-	9.287.988	-	399.740	46.712.298
53	Kab. Nias Selatan	5.795.078	5.340.858	2.956.180	4.350.340	3.811.458	-	1.727.338	2.898.458	1.728.498	1.457.370	-	-	-	2.298.730	3.678.478	1.010.080	1.018.198	1.359.180	1.870.788	-	3.914.080	-	-	9.644.288	-	426.480	51.298.078
54	Kab. Nias Utara	5.238.798	5.974.558	3.499.980	3.811.280	4.741.558	-	1.811.858	3.498.998	2.178.398	1.627.770	-	-	-	4.198.138	4.798.998	2.910.080	1.118.198	1.359.180	1.898.088	-	4.191.080	-	-	13.417.138	-	444.480	76.798.088
55	Kota Gunungsitoli	5.720.898	4.825.898	3.152.180	3.384.780	3.884.998	-	921.858	-	1.888.898	1.280.870	-	-	-	2.298.170	3.298.088	910.180	918.198	1.359.880	-	3.834.080	-	3.129.482	-	6.788.138	-	417.870	43.827.238
III	Provinsi Sumatera Barat	7.980.398	3.847.078	2.913.280	3.920.908	4.130.930	897.998	10.278.018	-	3.115.898	3.870.078	-	-	-	2.950.980	3.898.078	2.997.780	1.128.488	1.598.080	1.795.088	-	3.458.080	-	-	10.408.018	-	1.168.818	62.780.188
56	Kab. Lima Puluh Kota	7.980.398	3.847.078	2.913.280	3.920.908	4.130.930	897.998	10.278.018	-	3.115.898	3.870.078	-	-	-	2.950.980	3.898.078	2.997.780	1.128.488	1.598.080	1.795.088	-	3.458.080	-	-	10.408.018	-	1.168.818	62.780.188
57	Kab. Agam	9.472.018	5.224.298	4.263.648	4.284.730	4.030.558	1.926.148	1.619.858	3.478.298	2.678.498	3.870.498	5.078.980	-	-	4.418.458	5.818.798	1.828.580	1.298.018	1.248.458	1.870.178	-	3.458.080	-	-	10.618.018	2.332.980	418.380	81.350.138
58	Kab. Kepulauan Mentawai	6.538.018	3.850.298	3.263.648	4.284.730	4.030.558	2.926.148	1.619.858	3.478.298	2.678.498	3.870.498	-	-	-	3.948.148	5.818.798	1.828.580	1.298.018	1.248.458	1.870.178	-	3.458.080	-	-	10.618.018	-	418.380	68.350.138
59	Kab. Padang Pariaman	10.845.498	5.811.818	4.128.980	5.380.780	3.884.688	1.948.280	1.961.868	3.941.298	2.234.498	3.788.280	9.187.480	-	-	5.018.298	6.818.918	1.848.980	1.298.148	1.378.980	1.898.088	-	-	-	-	10.818.298	-	980.818	93.477.788
60	Kab. Pasaman	6.538.018	3.850.298	3.263.648	4.284.730	4.030.558	2.926.148	1.619.858	3.478.298	2.678.498	3.870.498	-	-	-	3.948.148	5.818.798	1.828.580	1.298.018	1.248.458	1.870.178	-	3.458.080	-	-	10.618.018	-	418.380	68.350.138
61	Kab. Pasaman Barat	7.464.018	4.814.298	3.504.780	4.614.480	4.284.558	2.926.148	1.961.868	3.941.298	2.234.498	3.788.280	-	-	-	5.018.298	6.818.918	1.848.980	1.298.148	1.378.980	1.898.088	-	-	-	-	10.818.298	-	980.818	93.477.788
62	Kab. Pesisir Selatan	6.538.018	3.850.298	3.263.648	4.284.730	4.030.558	2.926.148	1.619.858	3.478.298	2.678.498	3.870.498	-	-	-	3.948.148	5.818.798	1.828.580	1.298.018	1.248.458	1.870.178	-	3.458.080	-	-	10.618.018	-	418.380	68.350.138
63	Kab. Sijunjung	6.538.018	3.850.298	3.263.648	4.284.730	4.030.558	2.926.148	1.619.858	3.478.298	2.678.498	3.870.498	-	-	-	3.948.148	5.818.798	1.828.580	1.298.018	1.248.458	1.870.178	-	3.458.080	-	-	10.618.018	-	418.380	68.350.138
64	Kab. Solok	6.538.018	3.850.298	3.263.648	4.284.730	4.030.558	2.926.148	1.619.858	3.478.298	2.678.498	3.870.498	-	-	-	3.948.148	5.818.798	1.828.580	1.298.018	1.248.458	1.870.178	-	3.458.080	-	-	10.618.018	-	418.380	68.350.138
65	Kab. Solok Selatan	6.538.018	3.850.298	3.263.648	4.284.730	4.030.558	2.926.148	1.619.858	3.478.298	2.678.498	3.870.498	-	-	-	3.948.148	5.818.798	1.828.580	1.298.018	1.248.458	1.870.178	-	3.458.080	-	-	10.618.018	-	418.380	68.350.138
66	Kab. Tanah Datar	6.538.018	3.850.298	3.263.648	4.284.730	4.030.558	2.926.148	1.619.858	3.478.298	2.678.498	3.870.498	-	-	-	3.948.148	5.818.798	1.828.580	1.298.018	1.248.458	1.870.178	-	3.458.080	-	-	10.618.018	-	418.380	68.350.138
IV	Provinsi Riau	7.663.178	4.581.620	2.432.280	2.984.482	3.541.530	3.541.530	1.581.148	2.890.758	1.258.048	1.960.350	-	-	-	2.820.570	3.882.110	1.391.980	1.359.088	1.279.620	1.814.948	-	2.051.200	2.954.580	2.958.780	9.144.450	924.178	70.475.000
67	Kab. Bengkalis	6.438.445	5.244.760	6.008.450	7.952.540	3.874.658	1.906.870	1.844.018	4.234.978	1.072.400	2.202.440	5.078.070	-	-	4.000.810	5.824.788	1.418.070	1.838.758	1.853.080	1.810.028	-	1.385.200	-	-	11.418.258	-	618.980	67.718.080
68	Kab. Indragiri Hilir	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	11.338.648	-	812.880	12.151.528
69	Kab. Indragiri Hulu	-	-	9.888.180	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	8.797.278	-	-	-	-	2.851.480	-	-	-	-	11.338.648	-	-	23.036.988
70	Kab. Kuantan Singingi	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	11.500.098	-	-	-	-	11.338.648	-	-	22.838.748
71	Kab. Pelalawan	7.180.018	4.885.620	3.248.780	3.950.180	3.833.748	2.010.958	1.281.258	2.938.388	1.383.718	1.958.870	-	2.810.810	-	3.997.748	-	1.018.480	1.288.048	-	1.810.178	1.404.048	-	1.960.800	-	10.408.258	-	413.380	67.898.708
80	Kab. Rokan Hilir	-	7.777.098	5.244.080	6.654.680	-	-	-	-	4.298.278	-	-	-	-	4.000.138	-	1.818.080	-	-	11.508.418	-	-	-	-	11.338.648	-	812.880	56.170.218
81	Kab. Rokan Hulu	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	11.500.098	-	-	-	-	11.338.648	-	-	22.838.748
82	Kab. Siak	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	11.500.098	-	-	-	-	11.338.648	-	-	22.838.748
83	Kota Dumai	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	11.500.098	-	-	-	-	11.338.648	-	-	22.838.748
84	Kota Pekanbaru	-	-	-	-	-	-	-	-	2.628.908	-	-	-	-	-	-	-	-	-	11.500.098	-	-	-	-	12.678.038	-	-	26.807.048
85	Kab. Kepulauan Meranti	-	-	-	-	-	-	-	-	4.298.278	-	-	-	-	4.298.278	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	8.596.558
87	Kab. Kampar	6.438.445	5.244.760	6.008.450	7.952.540	3.874.658	1.906.870	1.844.018	4.234.978	1.072.400	2.202.440	5.078.070	-	-	4.000.810	5.824.788	1.418.070	1.838.758	1.853.080	1.810.028	-	1.385.200	-	-	11.418.258	-	618.980	67.718.080
86	Kab. Kuantan Sengingi	-	-	9.888.180	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	8.797.278	-	-	-	-	2.851.480	-	-	-	-	11.338.648	-	-	23.036.988
87	Kab. Pelalawan	7.180.018	4.885.620	3.248.780	3.950.180	3.833.748	2.010.958	1.281.258	2.938.388	1.383.718	1.958.870	-	2.810.810	-	3.997.748	-	1.018.480	1.288.048	-	1.810.178	1.404.048	-	1.960.800	-	10.408.258	-	413.380	67.898.708
80	Kab. Rokan Hilir	-	7.777.098	5.244.080	6.654.680	-	-	-	-	4.298.278	-	-	-	-	4.000.138	-	1.818.080	-	-	11.508.418	-	-	-	-	11.338.648	-	812.880	56.170.218
81	Kab. Rokan Hulu	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	11.500.098	-	-	-	-	11.338.648	-	-	22.838.748
82	Kab. Siak	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	11.500.098	-	-

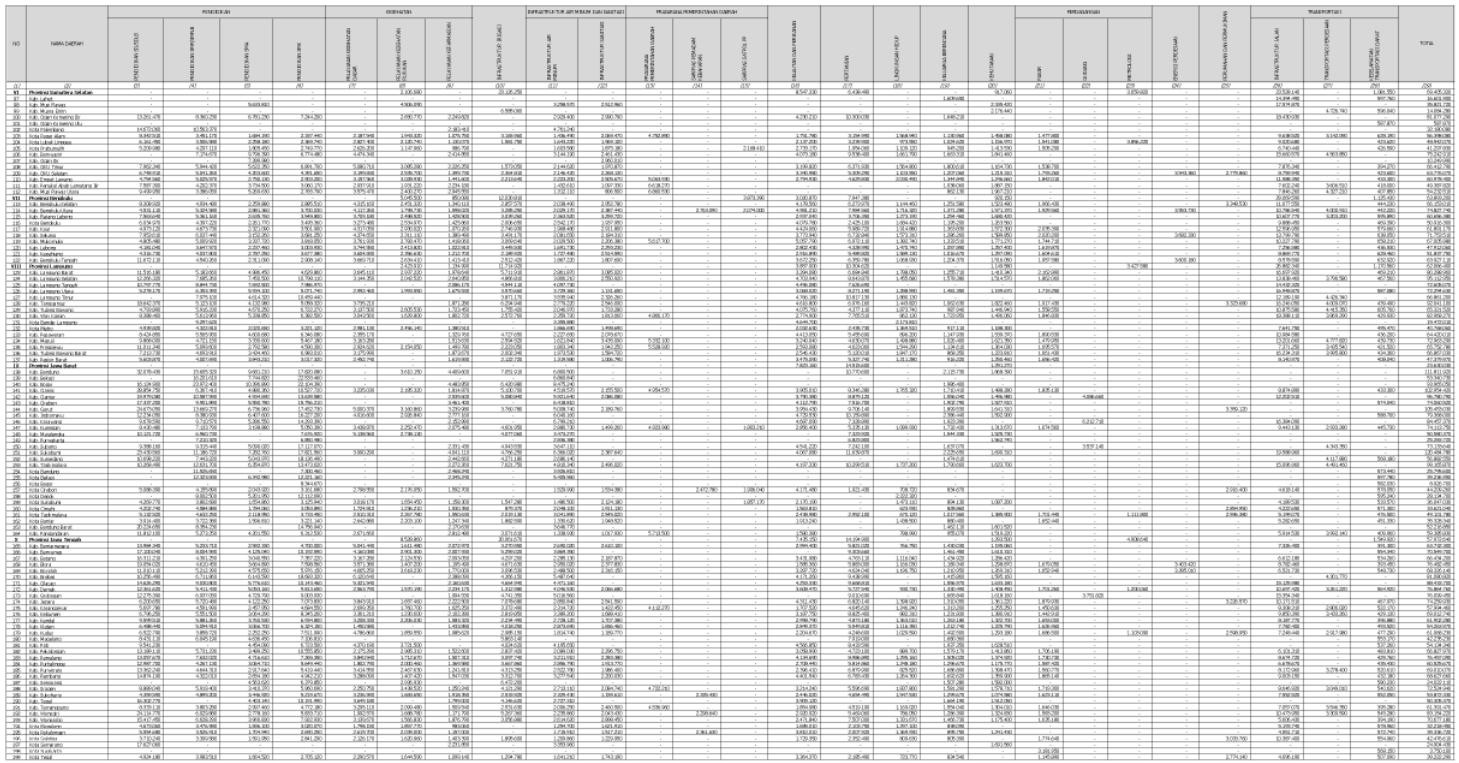

www.peraturan.go.id

NO	NAMA DAERAH	PENDIDIKAN				KESEHATAN			PEMBANGUNAN PERUMAHAN DAN PERMUKIMAN				PENANGGULANGAN PENYANDANG CACAT		PERLINDUNGAN SOSIAL			PERMASYARAKATAN				TRANSMIGRASI			TOTAL
		PENDIDIKAN ANAK USIA DINI	PENDIDIKAN NONFORMAL	PENDIDIKAN DASAR	PENDIDIKAN MENENGAH	PELAYANAN KESEHATAN DASAR	PELAYANAN KESEHATAN RUJUKAN	PELAYANAN KESEHATAN PENUNJANG	PENGEMBANGAN PERUMAHAN	PENGEMBANGAN KAWASAN PERMUKIMAN	PENGEMBANGAN PENATAAN PERUMAHAN DAN KAWASAN PERMUKIMAN	PENGEMBANGAN PERUMAHAN DAN KAWASAN PERMUKIMAN LAINNYA	PENGEMBANGAN PENYANDANG CACAT DAN LANJUT USIA	PENGEMBANGAN PENYANDANG CACAT LAINNYA	PENANGANAN KEMISKINAN	PENANGANAN KEDARURATAN	PENANGANAN KORBAN BENCANA ALAM	PENANGANAN KORBAN BENCANA SOSIAL	PENGEMBANGAN	PENGELOLAAN	PENGENDALIAN	PENGEMBANGAN PERMUKIMAN TRANSMIGRASI	PENGELOLAAN PERMUKIMAN TRANSMIGRASI	PENGENDALIAN PERMUKIMAN TRANSMIGRASI	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)	(18)	(19)	(20)	(21)	(22)	(23)	(24)	(25)	(26)
33	**Provinsi Di Yogyakarta**						1.036.780	3.917.088							4.640.512	5.870.278	1.900.000	1.110.000					14.000.000	1.354.280	33.824.948
3201	Kab. Gunung Kidul	6.999.296	4.971.600	3.296.640	9.984.480	2.864.400	1.248.000	1.611.120	2.727.000	-	-	-	-	-	3.128.000	5.870.278	1.900.000	1.110.000	1.738.000	2.228.680	-	-	8.000.000	1.039.280	475.120	64.420.000
3202	Kab. Sleman Kota	9.672.240	4.979.000	3.811.680	6.241.680	2.864.400	1.861.200	2.897.280	2.192.760	4.772.240	-	-	-	-	3.308.000	7.825.000	1.520.000	1.188.000	1.892.000	-	-	-	8.000.000	1.384.280	424.770	70.779.000
3203	Kab. Bantul Kota	9.475.920	4.199.700	3.051.000	9.600.360	3.081.000	1.233.120	1.360.920	2.190.000	-	1.018.000	-	-	-	3.300.120	6.650.000	1.041.700	1.126.150	1.892.300	-	-	-	6.674.380	2.995.000	514.840	70.870.000
3204	Kab. Kulon Progo	-	-	-	-	-	-	-	1.800.000	-	-	-	-	-	-	6.644.700	-	-	-	-	-	-	-	-	-	14.470.700
3205	Kab. Gunung Kidul	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
3206	Kota Yogyakarta	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	900.000
33	**Provinsi Jawa Timur**						10.307.670	20.673.548							7.995.300	15.000.048		1.306.000								55.282.566
3301	Kab. Pacitan	10.600.000	11.994.400	7.194.000	8.287.680	4.647.000	2.796.600	2.203.560	3.242.130	3.011.900	2.560.000	-	-	-	4.197.750	5.410.048	1.400.000	1.600.000	1.894.000	1.879.000	-	-	4.000.000	1.600.000	464.980	91.260.000
3302	Kab. Ponorogo	11.994.000	7.994.400	5.995.200	8.287.680	3.859.000	1.909.170	1.989.270	3.497.000	3.011.900	2.560.000	-	-	-	3.172.400	5.410.048	1.351.420	1.600.000	1.600.000	-	-	-	4.000.000	1.600.000	430.820	73.944.000
3303	Kab. Trenggalek	11.994.000	7.994.400	5.995.200	8.287.680	3.859.000	1.909.170	1.989.270	3.497.000	3.011.900	2.560.000	-	-	-	3.172.400	5.410.048	1.351.420	1.600.000	1.600.000	-	-	-	4.000.000	1.600.000	430.820	73.944.000
3304	Kab. Tulungagung	9.818.280	7.271.340	3.418.740	9.450.360	3.510.000	1.726.800	1.989.270	2.190.000	-	-	-	-	-	2.958.000	4.810.048	1.200.000	1.504.150	1.767.000	1.703.000	-	-	11.958.000	1.600.240	432.240	72.950.760
3305	Kab. Blitar	9.818.280	6.997.020	4.200.000	-	-	-	-	4.753.150	-	-	-	-	-	5.000.000	7.726.048	-	1.704.240	1.024.000	-	-	-	-	1.047.700	-	42.971.088
3306	Kab. Kediri	13.119.000	10.499.000	9.014.400	13.389.360	4.747.000	2.537.860	1.962.600	6.808.420	4.981.600	2.240.000	-	-	-	3.997.000	-	-	1.960.000	1.896.700	-	-	-	13.817.140	-	-	88.177.780
3307	Kab. Malang	13.811.100	7.946.950	-	-	-	-	-	5.274.000	4.126.450	-	-	-	-	-	1.804.470	-	1.896.000	-	-	-	-	-	-	-	35.130.970
3308	Kab. Lumajang	12.978.000	-	4.208.160	13.909.270	-	-	-	5.274.000	4.126.450	-	-	-	-	-	-	7.787.000	-	-	-	-	-	-	-	-	53.082.760
3309	Kab. Jember	12.827.700	9.990.000	-	-	-	2.570.000	1.962.600	4.800.000	4.126.450	-	-	-	-	4.987.120	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	41.263.870
3310	Kab. Banyuwangi	12.827.700	9.990.000	6.403.560	9.960.360	3.870.450	1.671.000	1.962.600	4.800.000	4.126.450	-	-	-	-	4.000.120	6.810.000	750.000	1.920.000	1.920.000	-	-	-	3.452.380	-	496.450	71.274.230
3311	Kab. Bondowoso	12.827.700	9.990.000	4.263.000	9.345.360	3.761.000	1.668.300	1.962.600	3.971.540	2.028.120	1.800.000	-	-	-	2.852.000	5.458.120	875.000	1.504.150	1.904.450	1.760.230	2.118.000	-	97.000	11.110.000	421.370	67.758.130
3312	Kab. Situbondo	10.400.780	9.240.000	4.242.960	9.075.280	3.736.350	1.077.820	1.401.860	4.200.000	2.028.120	1.800.000	-	2.920.780	-	4.476.120	5.355.480	1.400.000	1.401.000	1.777.000	-	-	-	7.231.380	5.836.980	424.920	69.136.430
3313	Kab. Probolinggo	15.417.670	11.550.400	6.867.360	13.796.820	-	2.646.420	2.181.760	5.616.676	5.041.780	-	-	-	-	4.476.750	6.850.780	-	1.920.000	1.810.000	-	-	-	14.672.000	-	549.750	93.636.746
3314	Kab. Pasuruan	10.643.570	-	-	8.077.680	-	-	-	5.474.750	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	23.195.780
3315	Kab. Sidoarjo	12.827.700	9.990.000	-	9.597.840	-	-	-	4.800.000	4.126.450	-	-	-	-	-	-	-	1.920.000	-	-	-	-	-	-	-	43.261.990
3316	Kab. Mojokerto	12.827.700	9.990.000	-	9.597.840	-	-	-	4.800.000	4.126.450	-	-	-	-	-	-	-	1.920.000	-	-	-	-	-	-	-	43.261.990
3317	Kab. Jombang	12.827.700	9.990.000	-	9.597.840	-	-	-	4.800.000	4.126.450	-	-	-	-	-	-	-	1.920.000	-	-	-	-	-	-	-	43.261.990
3318	Kab. Nganjuk	12.827.700	9.990.000	-	9.597.840	-	-	-	4.800.000	4.126.450	-	-	-	-	-	-	-	1.920.000	-	-	-	-	-	-	-	43.261.990
3319	Kab. Madiun	12.827.700	9.990.000	-	9.597.840	-	-	-	4.800.000	4.126.450	-	-	-	-	-	-	-	1.920.000	-	-	-	-	-	-	-	43.261.990
3320	Kab. Magetan	12.827.700	9.990.000	-	9.597.840	-	-	-	4.800.000	4.126.450	-	-	-	-	-	-	-	1.920.000	-	-	-	-	-	-	-	43.261.990
3321	Kab. Ngawi	12.827.700	9.990.000	-	9.597.840	-	-	-	4.800.000	4.126.450	-	-	-	-	-	-	-	1.920.000	-	-	-	-	-	-	-	43.261.990
3322	Kab. Bojonegoro	12.827.700	9.990.000	-	9.597.840	-	-	-	4.800.000	4.126.450	-	-	-	-	-	-	-	1.920.000	-	-	-	-	-	-	-	43.261.990
3323	Kab. Tuban	12.827.700	9.990.000	-	9.597.840	-	-	-	4.800.000	4.126.450	-	-	-	-	-	-	-	1.920.000	-	-	-	-	-	-	-	43.261.990
3324	Kab. Lamongan	12.827.700	9.990.000	-	9.597.840	-	-	-	4.800.000	4.126.450	-	-	-	-	-	-	-	1.920.000	-	-	-	-	-	-	-	43.261.990
3325	Kab. Gresik	12.827.700	9.990.000	-	9.597.840	-	-	-	4.800.000	4.126.450	-	-	-	-	-	-	-	1.920.000	-	-	-	-	-	-	-	43.261.990
3326	Kab. Bangkalan	12.827.700	9.990.000	-	9.597.840	-	-	-	4.800.000	4.126.450	-	-	-	-	-	-	-	1.920.000	-	-	-	-	-	-	-	43.261.990
3327	Kab. Sampang	12.827.700	9.990.000	-	9.597.840	-	-	-	4.800.000	4.126.450	-	-	-	-	-	-	-	1.920.000	-	-	-	-	-	-	-	43.261.990
3328	Kab. Pamekasan	12.827.700	9.990.000	-	9.597.840	-	-	-	4.800.000	4.126.450	-	-	-	-	-	-	-	1.920.000	-	-	-	-	-	-	-	43.261.990
3329	Kab. Sumenep	12.827.700	9.990.000	-	9.597.840	-	-	-	4.800.000	4.126.450	-	-	-	-	-	-	-	1.920.000	-	-	-	-	-	-	-	43.261.990
3371	Kota Kediri	5.971.170	3.960.000	1.707.560	2.490.360	2.587.000	1.156.700	782.150	1.815.000	1.443.200	-	-	-	-	2.004.000	3.311.000	-	1.200.000	1.780.000	-	-	-	1.000.000	-	424.980	30.610.130
3372	Kota Blitar	4.044.000	3.241.110	2.018.400	1.830.480	1.810.000	1.058.700	1.464.420	2.177.250	1.958.100	1.200.000	-	-	-	2.005.120	4.412.110	-	1.200.000	1.760.000	-	-	-	1.302.160	-	777.130	32.670.740
3373	Kota Malang	14.400.000	11.520.000	7.200.000	14.400.000	5.040.000	2.520.000	2.160.000	6.000.000	5.040.000	3.600.000	-	-	-	5.000.000	7.000.000	-	2.400.000	2.400.000	-	-	-	15.000.000	-	1.000.000	84.000.000
3374	Kota Probolinggo	5.971.170	3.960.000	1.707.560	2.490.360	2.587.000	1.156.700	782.150	1.815.000	1.443.200	-	-	-	-	2.004.000	3.311.000	-	1.200.000	1.780.000	-	-	-	1.000.000	-	424.980	30.610.130
3375	Kota Blitar	4.044.000	3.241.110	2.018.400	1.830.480	1.810.000	1.058.700	1.464.420	2.177.250	1.958.100	1.200.000	-	-	-	2.005.120	4.412.110	-	1.200.000	1.760.000	-	-	-	1.302.160	-	777.130	32.670.740
3376	Kota Malang	14.400.000	11.520.000	7.200.000	14.400.000	5.040.000	2.520.000	2.160.000	6.000.000	5.040.000	3.600.000	-	-	-	5.000.000	7.000.000	-	2.400.000	2.400.000	-	-	-	15.000.000	-	1.000.000	84.000.000
3377	Kota Pasuruan	5.971.170	3.960.000	1.707.560	2.490.360	2.587.000	1.156.700	782.150	1.815.000	1.443.200	-	-	-	-	2.004.000	3.311.000	-	1.200.000	1.780.000	-	-	-	1.000.000	-	424.980	30.610.130
3378	Kota Kediri	4.044.000	3.241.110	2.018.400	1.830.480	1.810.000	1.058.700	1.464.420	2.177.250	1.958.100	1.200.000	-	-	-	2.005.120	4.412.110	-	1.200.000	1.760.000	-	-	-	1.302.160	-	777.130	32.670.740
3379	Kota Malang	14.400.000	11.520.000	7.200.000	14.400.000	5.040.000	2.520.000	2.160.000	6.000.000	5.040.000	3.600.000	-	-	-	5.000.000	7.000.000	-	2.400.000	2.400.000	-	-	-	15.000.000	-	1.000.000	84.000.000
3380	Kota Pasuruan	5.971.170	3.960.000	1.707.560	2.490.360	2.587.000	1.156.700	782.150	1.815.000	1.443.200	-	-	-	-	2.004.000	3.311.000	-	1.200.000	1.780.000	-	-	-	1.000.000	-	424.980	30.610.130
3381	Kota Batu	4.044.000	3.241.110	2.018.400	1.830.480	1.810.000	1.058.700	1.464.420	2.177.250	1.958.100	1.200.000	-	-	-	2.005.120	4.412.110	-	1.200.000	1.760.000	-	-	-	1.302.160	-	777.130	32.670.740
3382	Kota Pamekasan	5.971.170	3.960.000	1.707.560	2.490.360	2.587.000	1.156.700	782.150	1.815.000	1.443.200	-	-	-	-	2.004.000	3.311.000	-	1.200.000	1.780.000	-	-	-	1.000.000	-	424.980	30.610.130
3383	Kota Probolinggo	5.971.170	3.960.000	1.707.560	2.490.360	2.587.000	1.156.700	782.150	1.815.000	1.443.200	-	-	-	-	2.004.000	3.311.000	-	1.200.000	1.780.000	-	-	-	1.000.000	-	424.980	30.610.130
3384	Kota Blitar	4.044.000	3.241.110	2.018.400	1.830.480	1.810.000	1.058.700	1.464.420	2.177.250	1.958.100	1.200.000	-	-	-	2.005.120	4.412.110	-	1.200.000	1.760.000	-	-	-	1.302.160	-	777.130	32.670.740
3385	Kota Malang	14.400.000	11.520.000	7.200.000	14.400.000	5.040.000	2.520.000	2.160.000	6.000.000	5.040.000	3.600.000	-	-	-	5.000.000	7.000.000	-	2.400.000	2.400.000	-	-	-	15.000.000	-	1.000.000	84.000.000
3386	Kota Pasuruan	5.971.170	3.960.000	1.707.560	2.490.360	2.587.000	1.156.700	782.150	1.815.000	1.443.200	-	-	-	-	2.004.000	3.311.000	-	1.200.000	1.780.000	-	-	-	1.000.000	-	424.980	30.610.130
3387	Kota Batu	4.044.000	3.241.110	2.018.400	1.830.480	1.810.000	1.058.700	1.464.420	2.177.250	1.958.100	1.200.000	-	-	-	2.005.120	4.412.110	-	1.200.000	1.760.000	-	-	-	1.302.160	-	777.130	32.670.740
3388	Kota Pamekasan	5.971.170	3.960.000	1.707.560	2.490.360	2.587.000	1.156.700	782.150	1.815.000	1.443.200	-	-	-	-	2.004.000	3.311.000	-	1.200.000	1.780.000	-	-	-	1.000.000	-	424.980	30.610.130
3389	Kota Probolinggo	5.971.170	3.960.000	1.707.560	2.490.360	2.587.000	1.156.700	782.150	1.815.000	1.443.200	-	-	-	-	2.004.000	3.311.000	-	1.200.000	1.780.000	-	-	-	1.000.000	-	424.980	30.610.130
3390	Kota Blitar	4.044.000	3.241.110	2.018.400	1.830.480	1.810.000	1.058.700	1.464.420	2.177.250	1.958.100	1.200.000	-	-	-	2.005.120	4.412.110	-	1.200.000	1.760.000	-	-	-	1.302.160	-	777.130	32.670.740
3391	Kota Malang	14.400.000	11.520.000	7.200.000	14.400.000	5.040.000	2.520.000	2.160.000	6.000.000	5.040.000	3.600.000	-	-	-	5.000.000	7.000.000	-	2.400.000	2.400.000	-	-	-	15.000.000	-	1.000.000	84.000.000
3392	Kota Pasuruan	5.971.170	3.960.000	1.707.560	2.490.360	2.587.000	1.156.700	782.150	1.815.000	1.443.200	-	-	-	-	2.004.000	3.311.000	-	1.200.000	1.780.000	-	-	-	1.000.000	-	424.980	30.610.130
3393	Kota Batu	4.044.000	3.241.110	2.018.400	1.830.480	1.810.000	1.058.700	1.464.420	2.177.250	1.958.100	1.200.000	-	-	-	2.005.120	4.412.110	-	1.200.000	1.760.000	-	-	-	1.302.160	-	777.130	32.670.740
3394	Kota Pamekasan	5.971.170	3.960.000	1.707.560	2.490.360	2.587.000	1.156.700	782.150	1.815.000	1.443.200	-	-	-	-	2.004.000	3.311.000	-	1.200.000	1.780.000	-	-	-	1.000.000	-	424.980	30.610.130
3395	Kota Probolinggo	5.971.170	3.960.000	1.707.560	2.490.360	2.587.000	1.156.700	782.150	1.815.000	1.443.200	-	-	-	-	2.004.000	3.311.000	-	1.200.000	1.780.000	-	-	-	1.000.000	-	424.980	30.610.130
3396	Kota Blitar	4.044.000	3.241.110	2.018.400	1.830.480	1.810.000	1.058.700	1.464.420	2.177.250	1.958.100	1.200.000	-	-	-	2.005.120	4.412.110	-	1.200.000	1.760.000	-	-	-	1.302.160	-	777.130	32.670.740
3397	Kota Malang	14.400.000	11.520.000	7.200.000	14.400.000	5.040.000	2.520.000	2.160.000	6.000.000	5.040.000	3.600.000	-	-	-	5.000.000	7.000.000	-	2.400.000	2.400.000	-	-	-	15.000.000	-	1.000.000	84.000.000
3398	Kota Pasuruan	5.971.170	3.960.000	1.707.560	2.490.360	2.587.000	1.156.700	782.150	1.815.000	1.443.200	-	-	-	-	2.004.000	3.311.000	-	1.200.000	1.780.000	-	-	-	1.000.000	-	424.980	30.610.130
3399	Kota Kediri	4.044.000	3.241.110	2.018.400	1.830.480	1.810.000	1.058.700	1.464.420	2.177.250	1.958.100	1.200.000	-	-	-	2.005.120	4.412.110	-	1.200.000	1.760.000	-	-	-	1.302.160	-	777.130	32.670.740
3471	Kab. Pacitan	6.999.296	4.971.600	3.296.640	9.984.480	2.864.400	1.248.000	1.611.120	2.727.000	-	-	-	-	-	3.128.000	5.870.278	1.900.000	1.110.000	1.738.000	2.228.680	-	-	8.000.000	1.039.280	475.120	64.420.000
3472	Kab. Kediri	9.672.240	4.979.000	3.811.680	6.241.680	2.864.400	1.861.200	2.897.280	2.192.760	4.772.240	-	-	-	-	3.308.000	7.825.000	1.520.000	1.188.000	1.892.000	-	-	-	8.000.000	1.384.280	424.770	70.779.000
3473	Kab. Blitar	9.475.920	4.199.700	3.051.000	9.600.360	3.081.000	1.233.120	1.360.920	2.190.000	-	1.018.000	-	-	-	3.300.120	6.650.000	1.041.700	1.126.150	1.892.300	-	-	-	6.674.380	2.995.000	514.840	70.870.000
3474	Kab. Malang	6.999.296	4.971.600	3.296.640	9.984.480	2.864.400	1.248.000	1.611.120	2.727.000	-	-	-	-	-	3.128.000	5.870.278	1.900.000	1.110.000	1.738.000	2.228.680	-	-	8.000.000	1.039.280	475.120	64.420.000
3475	Kab. Probolinggo	9.672.240	4.979.000	3.811.680	6.241.680	2.864.400	1.861.200	2.897.280	2.192.760	4.772.240	-	-	-	-	3.308.000	7.825.000	1.520.000	1.188.000	1.892.000	-	-	-	8.000.000	1.384.280	424.770	70.779.000
3476	Kab. Pasuruan	9.475.920	4.199.700	3.051.000	9.600.360	3.081.000	1.233.120	1.360.920	2.190.000	-	1.018.000	-	-	-	3.300.120	6.650.000	1.041.700	1.126.150	1.892.300	-	-	-	6.674.380	2.995.000	514.840	70.870.000
3477	Kab. Sidoarjo	6.999.296	4.971.600	3.296.640	9.984.480	2.864.400	1.248.000	1.611.120	2.727.000	-	-	-	-	-	3.128.000	5.870.278	1.900.000	1.110.000	1.738.000	2.228.680	-	-	8.000.000	1.039.280	475.120	64.420.000
3478	Kab. Mojokerto	9.672.240	4.979.000	3.811.680	6.241.680	2.864.400	1.861.200	2.897.280	2.192.760	4.772.240	-	-	-	-	3.308.000	7.825.000	1.520.000	1.188.000	1.892.000	-	-	-	8.000.000	1.384.280	424.770	70.779.000
3479	Kab. Jombang	9.475.920	4.199.700	3.051.000	9.600.360	3.081.000	1.233.120	1.360.920	2.190.000	-	1.018.000	-	-	-	3.300.120	6.650.000	1.041.700	1.126.150	1.892.300	-	-	-	6.674.380	2.995.000	514.840	70.870.000
3480	Kab. Nganjuk	6.999.296	4.971.600	3.296.640	9.984.480	2.864.400	1.248.000	1.611.120	2.727.000	-	-	-	-	-	3.128.000	5.870.278	1.900.000	1.110.000	1.738.000	2.228.680	-	-	8.000.000	1.039.280	475.120	64.420.000
3481	Kab. Madiun	9.672.240	4.979.000	3.811.680	6.241.680	2.864.400	1.861.200	2.897.280	2.192.760	4.772.240	-	-	-	-	3.308.000	7.825.000	1.520.000	1.188.000	1.892.000	-	-	-	8.000.000	1.384.280	424.770	70.779.000
3482	Kab. Magetan	9.475.920	4.199.700	3.051.000	9.600.360	3.081.000	1.233.120	1.360.920	2.190.000	-	1.018.000	-	-	-	3.300.120	6.650.000	1.041.700	1.126.150	1.892.300	-	-	-	6.674.380	2.995.000	514.840	70.870.000
3483	Kab. Ngawi	6.999.296	4.971.600	3.296.640	9.984.480	2.864.400	1.248.000	1.611.120	2.727.000	-	-	-	-	-	3.128.000	5.870.278	1.900.000	1.110.000	1.738.000	2.228.680	-	-	8.000.000	1.039.280	475.120	64.420.000
3484	Kab. Bojonegoro	9.672.240	4.979.000	3.811.680	6.241.680	2.864.400	1.861.200	2.897.280	2.192.760	4.772.240	-	-	-	-	3.308.000	7.825.000	1.520.000	1.188.000	1.892.000	-	-	-	8.000.000	1.384.280	424.770	70.779.000
3485	Kab. Tuban	9.475.920	4.199.700	3.051.000	9.600.360	3.081.000	1.233.120	1.360.920	2.190.000	-	1.018.000	-	-	-	3.300.120	6.650.000	1.041.700	1.126.150	1.892.300	-	-	-	6.674.380	2.995.000	514.840	70.870.000
3486	Kab. Lamongan	6.999.296	4.971.600	3.296.640	9.984.480	2.864.400	1.248.000	1.611.120	2.727.000	-	-	-	-	-	3.128.000	5.870.278	1.900.000	1.110.000	1.738.000	2.228.680	-	-	8.000.000	1.039.280	475.120	64.420.000
3487	Kab. Gresik	9.672.240	4.979.000	3.811.680	6.241.680	2.864.400	1.861.200	2.897.280	2.192.760	4.772.240	-	-	-	-	3.308.000	7.825.000	1.520.000	1.188.000	1.892.000	-	-	-	8.000.000	1.384.280	424.770	70.779.000
3488	Kab. Bangkalan	9.475.920	4.199.700	3.051.000	9.600.360	3.081.000	1.233.120	1.360.920	2.190.000	-	1.018.000	-	-	-	3.300.120	6.650.000	1.041.700	1.126.150	1.892.300	-	-	-	6.674.380	2.995.000	514.840	70.870.000
3489	Kab. Sampang	6.999.296	4.971.600	3.296.640	9.984.480	2.864.400	1.248.000	1.611.120	2.727.000	-	-	-	-	-	3.128.000	5.870.278	1.900.000	1.110.000	1.738.000	2.228.680	-	-	8.000.000	1.039.280	475.120	64.420.000
3490	Kab. Pamekasan	9.672.240	4.979.000	3.811.680	6.241.680	2.864.400	1.861.200	2.897.280	2.192.760	4.772.240	-	-	-	-	3.308.000	7.825.000	1.520.000	1.188.000	1.892.000	-	-	-	8.000.000	1.384.280	424.770	70.779.000
3491	Kab. Sumenep	9.475.920	4.199.700	3.051.000	9.600.360	3.081.000	1.233.120	1.360.920	2.190.000	-	1.018.000	-	-	-	3.300.120	6.650.000	1.041.700	1.126.150	1.892.300	-	-	-	6.674.380	2.995.000	514.840	70.870.000
3471	Kota Kediri	5.971.170	3.960.000	1.707.560	2.490.360	2.587.000	1.156.700	782.150	1.815.000	1.443.200	-	-	-	-	2.004.000	3.311.000	-	1.200.000	1.780.000	-	-	-	1.000.000	-	424.980	30.610.130
3472	Kota Blitar	4.044.000	3.241.110	2.018.400	1.830.480	1.810.000	1.058.700	1.464.420	2.177.250	1.958.100	1.200.000	-	-	-	2.005.120	4.412.110	-	1.200.000	1.760.000	-	-	-	1.302.160	-	777.130	32.670.740
3473	Kota Malang	14.400.000	11.520.000	7.200.000	14.400.000	5.040.000	2.520.000	2.160.000	6.000.000	5.040.000	3.600.000	-	-	-	5.000.000	7.000.000	-	2.400.000	2.400.000	-	-	-	15.000.000	-	1.000.000	84.000.000
3474	Kota Probolinggo	5.971.170	3.960.000	1.707.560	2.490.360	2.587.000	1.156.700	782.150	1.815.000	1.443.200	-	-	-	-	2.004.000	3.311.000	-	1.200.000	1.780.000	-	-	-	1.000.000	-	424.980	30.610.130
3475	Kota Pasuruan	5.971.170	3.960.000	1.707.560	2.490.360	2.587.000	1.156.700	782.150	1.815.000	1.443.200	-	-	-	-	2.004.000	3.311.000	-	1.200.000	1.780.000	-	-	-	1.000.000	-	424.980	30.610.130
3476	Kota Kediri	4.044.000	3.241.110	2.018.400	1.830.480	1.810.000	1.058.700	1.464.420	2.177.250	1.958.100	1.200.000	-	-	-	2.005.120	4.412.110	-	1.200.000	1.760.000	-	-	-	1.302.160	-	777.130	32.670.740
3477	Kota Malang	14.400.000	11.520.000	7.200.000	14.400.000	5.040.000	2.520.000	2.160.000	6.000.000	5.040.000	3.600.000	-	-	-	5.000.000	7.000.000	-	2.400.000	2.400.000	-	-	-	15.000.000	-	1.000.000	84.000.000
3478	Kota Pasuruan	5.971.170	3.960.000	1.707.560	2.490.360	2.587.000	1.156.700	782.150	1.815.000	1.443.200	-	-	-	-	2.004.000	3.311.000	-	1.200.000	1.780.000	-	-	-	1.000.000	-	424.980	30.610.130
3479	Kota Blitar	4.044.000	3.241.110	2.018.400	1.830.480	1.810.000	1.058.700	1.464.420	2.177.250	1.958.100	1.200.000	-	-	-	2.005.120	4.412.110	-	1.200.000	1.760.000	-	-	-	1.302.160	-	777.130	32.670.740
3480	Kota Malang	14.400.000	11.520.000	7.200.000	14.400.000	5.040.000	2.520.000	2.160.000	6.000.000	5.040.000	3.600.000	-	-	-	5.000.000	7.000.000	-	2.400.000	2.400.000	-	-	-	15.000.000	-	1.000.000	84.000.000
3481	Kota Pasuruan	5.971.170	3.960.000	1.707.560	2.490.360	2.587.000	1.156.700	782.150	1.815.000	1.443.200	-	-	-	-	2.004.000	3.311.000	-	1.200.000	1.780.000	-	-	-	1.000.000	-	424.980	30.610.130
3482	Kota Batu	4.044.000	3.241.110	2.018.400	1.830.480	1.810.000	1.058.700	1.464.420	2.177.250	1.958.100	1.200.000	-	-	-	2.005.120	4.412.110	-	1.200.000	1.760.000	-	-	-	1.302.160	-	777.130	32.670.740
3483	Kota Pamekasan	5.971.170	3.960.000	1.707.560	2.490.360	2.587.000	1.156.700	782.150	1.815.000	1.443.200	-	-	-	-	2.004.000	3.311.000	-	1.200.000	1.780.

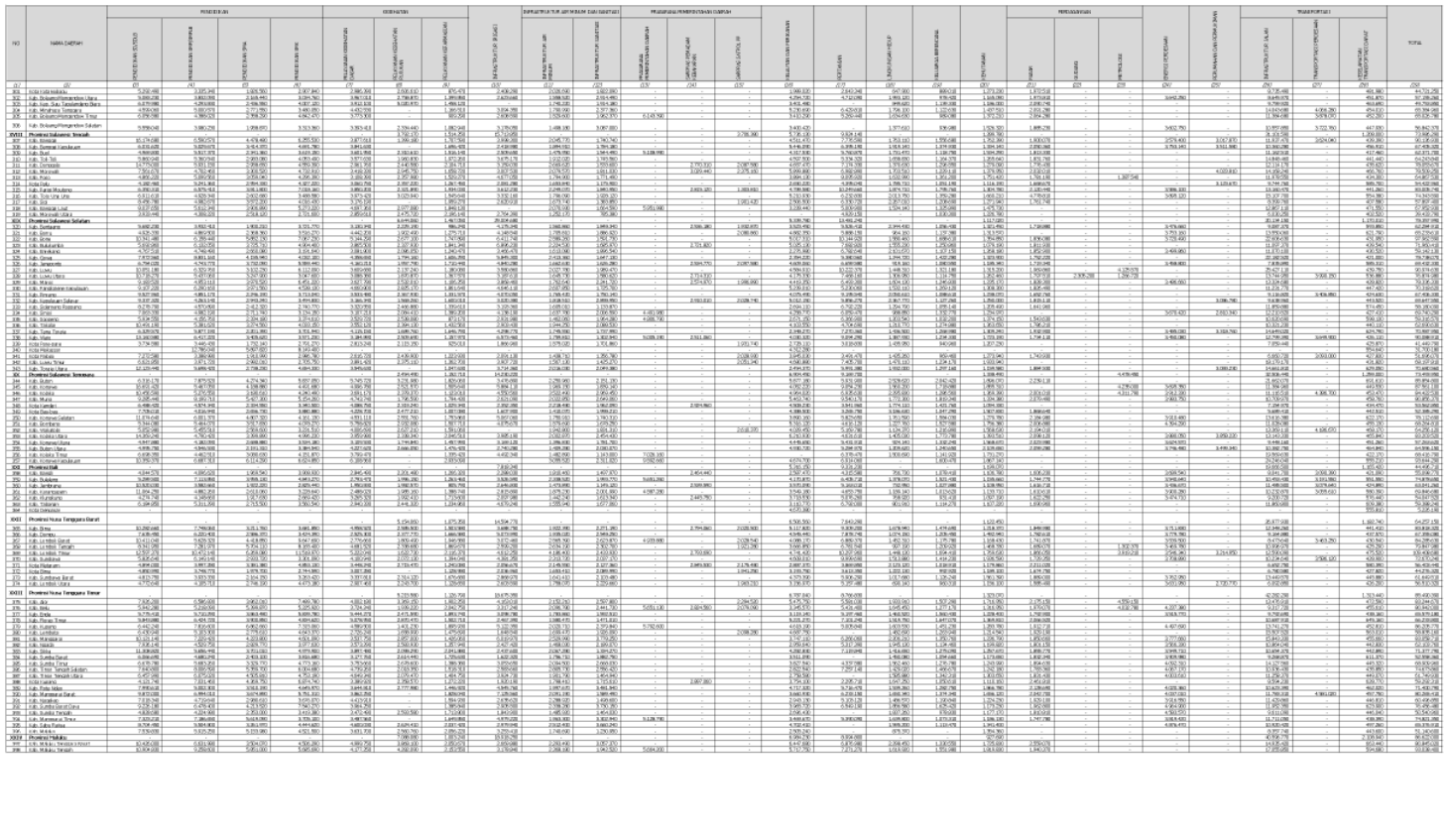

www.peraturan.go.id

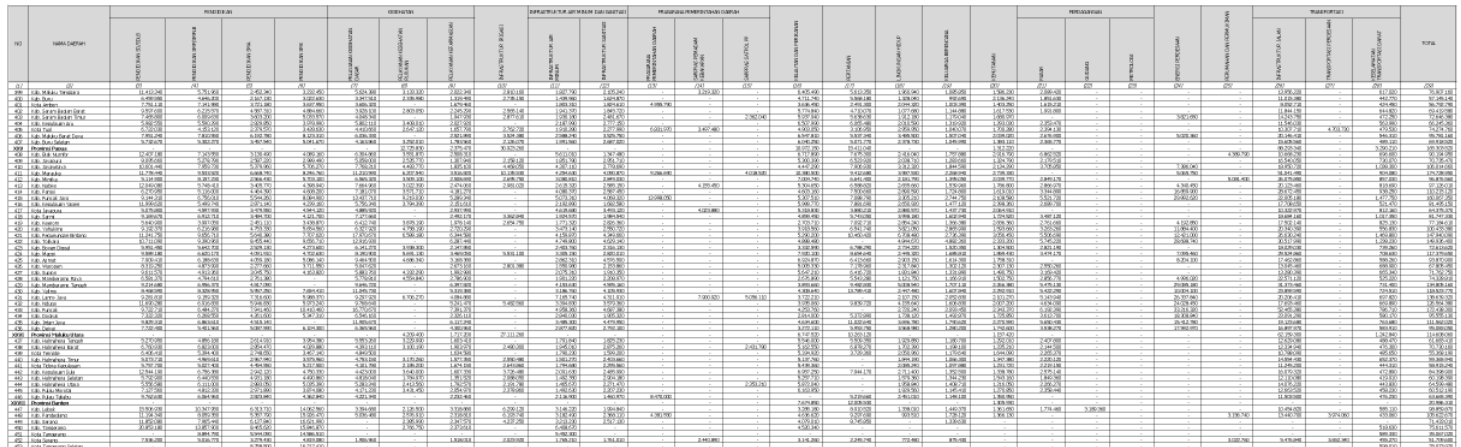

www.peraturan.go.id

LAMPIRAN XV
RINCIAN DANA ALOKASI KHUSUS
MENURUT PROVINSI/KABUPATEN/KOTA

(Dalam Ribuan Rupiah)

| NO | NAMA DAERAH | KEGIATAN | | |

LAMPIRAN XVI

PERATURAN PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA NOMOR 36 TAHUN 2015

TENTANG RINCIAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA NEGARA TAHUN ANGGARAN 2015

RINCIAN DANA ALOKASI KHUSUS TAMBAHAN AFIRMASI KEPADA KABUPATEN/KOTA DAERAH TERTINGGAL DAN PERBATASAN YANG MEMILIKI KEMAMPUAN KEUANGAN RELATIF RENDAH MENURUT KABUPATEN/KOTA

www.peraturan.go.id

LAMPIRAN XVI
RINCIAN DANA ALOKASI KHUSUS TAMBAHAN AFIRMASI
KEPADA KABUPATEN/KOTA DAERAH TERTINGGAL DAN PERBATASAN
YANG MEMILIKI KEMAMPUAN KEUANGAN RELATIF RENDAH MENURUT KABUPATEN/KOTA

(Dalam Ribuan Rupiah)

NO	NAMA DAERAH	INFRASTRUKTUR IRIGASI	INFRASTRUKTUR AIR MINUM DAN SANITASI		TRANSPORTASI		TOTAL	STATUS KEMAMPUAN KEUANGAN DAERAH (KKD)
			INFRASTRUKTUR AIR MINUM	INFRASTRUKTUR SANITASI	INFRASTRUKTUR JALAN	TRANSPORTASI PERDESAAN		
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)
1	Kab. Aceh Barat	2.534.010	1.279.020	1.183.830	2.740.290	5.354.550	13.091.700	Rendah Sekali
2	Kab. Aceh Besar	4.891.790	1.395.680	1.075.350	2.695.410	4.853.140	14.911.370	Rendah Sekali
3	Kab. Aceh Selatan	3.462.480	1.134.340	1.217.080	2.380.980	4.918.480	13.113.360	Rendah Sekali
4	Kab. Aceh Singkil	1.624.490	1.120.770	1.196.750	2.165.740	5.589.550	11.697.300	Rendah Sekali
5	Kab. Aceh Timur	2.838.380	1.478.440	1.463.960	4.100.300	5.785.920	15.667.000	Rendah Sekali
6	Kab. Simeulue	2.025.660	1.294.000	1.164.410	2.641.160	5.825.640	12.950.870	Rendah Sekali
7	Kota Sabang	-	1.147.580	1.024.340	1.414.840	4.770.930	8.357.690	Rendah Sekali
8	Kab. Nagan Raya	2.980.670	1.827.080	1.200.460	2.777.370	5.811.100	14.596.680	Rendah Sekali
9	Kab. Aceh Jaya	3.820.070	1.205.780	891.580	2.045.210	5.321.830	13.284.470	Rendah Sekali
10	Kab. Aceh Barat Daya	2.095.330	1.030.850	1.166.280	3.144.650	4.744.710	12.181.820	Rendah Sekali
11	Kab. Gayo Lues	2.937.960	1.144.850	1.123.340	1.913.710	4.920.620	12.040.480	Rendah Sekali
12	Kab. Bener Meriah	3.868.630	1.041.520	825.900	2.106.400	5.002.180	12.844.630	Rendah Sekali
13	Kab. Pidie Jaya	2.477.520	1.212.970	1.249.600	1.496.580	4.968.910	11.405.580	Rendah Sekali
14	Kab. Nias	2.958.660	1.202.940	1.038.470	2.371.640	5.310.810	12.882.520	Rendah Sekali
15	Kab. Tapanuli Tengah	3.819.290	1.365.820	921.440	2.092.970	5.026.780	13.226.300	Rendah Sekali
16	Kab. Pakpak Bharat	2.422.590	905.080	738.290	2.276.930	5.067.030	11.409.920	Rendah Sekali
17	Kab. Nias Selatan	4.248.360	1.323.940	846.800	2.782.200	5.980.780	15.182.080	Rendah Sekali
18	Kab. Serdang Bedagai	4.671.610	1.395.800	639.390	2.387.750	5.697.800	14.792.350	Rendah Sekali
19	Kab. Nias Barat	-	1.024.430	821.720	1.759.460	6.018.740	9.624.350	Rendah Sekali
20	Kab. Nias Utara	3.234.260	1.323.350	876.670	2.657.050	5.768.860	13.860.190	Rendah Sekali
21	Kab. Kepulauan Mentawai	2.310.940	1.347.550	1.684.710	5.116.860	7.785.760	18.245.820	Rendah Sekali
22	Kab. Padang Pariaman	5.438.680	1.369.140	1.358.530	4.360.380	5.577.840	18.104.570	Rendah Sekali
23	Kab. Pesisir Selatan	5.497.640	1.389.320	1.263.670	3.620.130	5.074.150	16.844.910	Rendah Sekali
24	Kab. Sijunjung	3.584.490	1.325.570	1.362.300	2.377.920	4.952.210	13.602.490	Rendah Sekali
25	Kab. Solok	5.589.360	1.195.100	1.426.840	2.400.190	5.103.950	15.715.440	Rendah Sekali
26	Kab. Pasaman Barat	4.213.230	1.638.030	1.255.750	3.011.290	6.446.710	16.565.010	Rendah Sekali
27	Kab. Dharmasraya	2.279.200	1.214.480	1.126.550	2.182.310	5.803.290	12.605.830	Rendah Sekali
28	Kab. Solok Selatan	3.465.670	1.184.920	1.191.510	4.391.700	5.339.010	15.572.810	Rendah Sekali
29	Kab. Indragiri Hilir	3.757.340	1.283.810	1.144.460	2.966.490	5.986.170	15.138.270	Rendah
30	Kab. Pelalawan	1.879.690	1.500.380	929.440	3.404.410	5.626.250	13.340.170	Rendah
31	Kab. Rokan Hilir	2.306.190	1.684.390	826.360	3.864.220	5.709.300	14.390.460	Sedang
32	Kota Dumai	-	1.662.420	767.490	1.732.730	4.725.500	8.888.140	Rendah
33	Kab. Kepulauan Meranti	2.051.230	1.703.480	829.400	2.775.220	4.662.360	12.021.690	Rendah
34	Kab. Lahat	2.567.450	1.426.190	889.210	3.033.160	4.506.090	12.422.100	Rendah
35	Kab. Musi Rawas	2.665.590	2.024.240	1.270.750	3.695.530	5.257.780	14.913.890	Rendah
36	Kab. Ogan Komering Ilir	1.592.380	1.828.500	1.459.440	3.856.800	5.298.280	14.035.400	Rendah
37	Kab. Banyuasin	2.669.080	1.933.130	1.240.470	3.245.710	5.889.200	14.977.590	Rendah
38	Kab. Ogan Ilir	3.002.540	1.381.480	1.453.500	2.474.500	5.228.330	13.540.350	Rendah
39	Kab. OKU Selatan	2.114.520	1.417.920	1.171.730	1.808.440	5.136.850	11.649.460	Rendah Sekali
40	Kab. Empat Lawang	1.928.030	1.447.710	1.264.160	2.397.580	4.714.970	11.752.450	Rendah Sekali
41	Kab. Kaur	2.220.410	1.242.560	1.407.380	2.522.110	5.147.090	12.539.550	Rendah Sekali
42	Kab. Seluma	2.946.120	1.306.800	1.112.950	2.783.190	5.634.220	13.783.280	Rendah Sekali
43	Kab. Mukomuko	2.587.020	1.292.410	1.126.510	2.037.450	5.637.470	12.680.860	Rendah Sekali
44	Kab. Lebong	3.053.100	1.138.830	1.171.850	1.443.680	4.826.100	11.633.560	Rendah Sekali
45	Kab. Kepahiang	1.819.240	1.151.410	1.259.420	1.779.680	4.716.630	10.726.380	Rendah Sekali
46	Kab. Bengkulu Tengah	2.059.850	1.206.780	965.690	1.688.270	5.182.870	11.103.460	Rendah Sekali
47	Kab. Lampung Barat	4.951.720	1.692.520	1.465.290	3.348.160	5.661.170	17.118.860	Rendah Sekali
48	Kab. Lampung Utara	3.249.160	2.274.040	707.800	3.551.310	5.007.710	14.790.020	Rendah Sekali
49	Kab. Way Kanan	2.259.070	1.517.740	981.600	3.848.090	5.152.040	13.758.540	Rendah Sekali
50	Kab. Pesawaran	4.251.360	1.420.210	1.081.090	2.226.750	5.165.270	14.144.680	Rendah Sekali
51	Kab. Garut	3.465.710	2.982.610	1.140.440	1.999.610	4.916.160	14.504.530	Rendah
52	Kab. Sukabumi	4.395.450	3.712.020	1.216.880	4.114.270	5.102.510	18.541.130	Rendah
53	Kab. Bangkalan	2.942.250	2.342.470	1.282.950	1.777.090	4.923.350	13.268.110	Rendah Sekali
54	Kab. Bondowoso	5.365.450	1.799.760	1.278.900	2.483.620	4.600.600	15.528.330	Rendah Sekali
55	Kab. Pamekasan	2.480.250	1.902.080	1.147.020	2.063.550	5.104.670	12.697.570	Rendah Sekali
56	Kab. Sampang	2.143.830	2.528.030	1.103.610	1.652.220	5.314.480	12.742.170	Rendah Sekali
57	Kab. Situbondo	3.625.080	1.851.710	1.224.070	2.115.860	4.890.450	13.707.170	Rendah Sekali
58	Kab. Bengkayang	2.690.070	1.219.200	1.024.160	3.121.680	6.429.080	14.484.190	Rendah Sekali
59	Kab. Landak	5.906.870	1.375.760	1.131.120	3.003.240	5.630.420	17.047.410	Rendah Sekali
60	Kab. Kapuas Hulu	2.970.440	1.321.130	1.527.350	5.110.860	6.173.290	17.103.070	Rendah
61	Kab. Ketapang	5.551.930	2.091.900	2.163.850	7.531.930	8.208.420	25.548.030	Rendah
62	Kab. Sambas	6.501.240	1.299.460	1.076.540	2.381.930	5.561.670	16.820.840	Rendah Sekali
63	Kab. Sanggau	2.970.300	1.492.370	1.551.850	2.714.580	6.113.540	14.842.640	Rendah Sekali
64	Kab. Sintang	4.906.600	1.775.740	1.552.930	4.934.900	6.868.360	20.038.530	Rendah
65	Kab. Sekadau	2.731.170	1.047.720	1.219.110	2.558.040	5.978.470	13.534.510	Rendah Sekali
66	Kab. Melawi	3.440.080	1.870.790	1.687.510	5.534.010	7.927.610	20.460.000	Rendah Sekali
67	Kab. Kayong Utara	3.749.550	1.047.350	1.188.100	1.909.370	5.923.810	13.818.180	Rendah Sekali
68	Kab. Seruyan	2.596.710	1.024.770	928.380	1.600.680	5.618.750	11.769.290	Rendah
69	Kab. Barito Kuala	5.889.610	1.501.730	1.071.450	1.929.630	5.154.050	15.546.470	Rendah Sekali
70	Kab. Hulu Sungai Utara	3.885.420	1.386.950	1.193.720	1.912.880	5.269.870	13.648.840	Rendah Sekali
71	Kab. Kutai Barat	4.436.440	999.490	1.035.280	4.194.350	5.520.820	16.186.380	Rendah
72	Kab. Mahakam Ulu	-	1.004.660	614.580	2.073.420	5.833.450	9.526.110	Rendah
73	Kab. Kepulauan Sangihe	2.461.030	1.280.160	1.295.160	3.105.600	5.541.460	13.683.410	Rendah Sekali
74	Kab. Kepulauan Talaud	2.211.730	1.173.560	1.243.040	1.722.060	6.597.430	12.947.820	Rendah Sekali
75	Kab. Kep. Siau Tagulandang	-	1.118.590	1.002.750	1.915.250	5.015.970	9.052.560	Rendah Sekali
76	Kab. Banggai	3.530.370	1.315.590	942.210	2.423.540	4.854.340	13.066.050	Rendah Sekali
77	Kab. Banggai Kepulauan	1.849.440	1.186.060	944.430	2.020.310	5.135.040	11.135.280	Rendah Sekali
78	Kab. Buol	2.066.420	995.860	859.780	2.245.660	5.001.530	11.169.250	Rendah Sekali
79	Kab. Toli-Toli	3.171.680	1.228.500	939.580	3.027.730	4.924.490	13.291.980	Rendah Sekali

www.peraturan.go.id

LAMPIRAN XVI
RINCIAN DANA ALOKASI KHUSUS TAMBAHAN AFIRMASI
KEPADA KABUPATEN/KOTA DAERAH TERTINGGAL DAN PERBATASAN
YANG MEMILIKI KEMAMPUAN KEUANGAN RELATIF RENDAH MENURUT KABUPATEN/KOTA

(Dalam Ribuan Rupiah)

NO	NAMA DAERAH	INFRASTRUKTUR IRIGASI	INFRASTRUKTUR AIR MINUM DAN SANITASI		TRANSPORTASI		TOTAL	STATUS KEMAMPUAN KEUANGAN DAERAH (KKD)
			INFRASTRUKTUR AIR MINUM	INFRASTRUKTUR SANITASI	INFRASTRUKTUR JALAN	TRANSPORTASI PERDESAAN		
80	Kab. Donggala	2.703.090	1.650.880	856.390	2.453.920	4.779.710	12.443.990	Rendah Sekali
81	Kab. Morowali	2.321.010	1.258.350	946.000	2.796.560	5.762.360	13.084.280	Rendah Sekali
82	Kab. Poso	4.218.570	1.188.650	957.990	2.446.300	4.798.300	13.609.810	Rendah Sekali
83	Kab. Parigi Moutong	3.123.980	1.416.430	979.560	2.671.460	4.678.950	12.870.380	Rendah Sekali
84	Kab. Tojo Una Una	2.758.480	1.140.620	1.005.630	3.049.220	5.385.990	13.339.940	Rendah Sekali
85	Kab. Sigi	2.275.630	1.134.230	804.510	1.695.850	4.622.340	10.532.560	Rendah Sekali
86	Kab. Jeneponto	4.348.590	1.108.270	896.390	1.547.480	4.634.520	12.535.250	Rendah Sekali
87	Kab. Pangkajene Kepulauan	4.119.700	1.612.040	932.680	2.257.810	4.812.170	13.734.400	Rendah Sekali
88	Kab. Kepulauan Selayar	2.555.160	1.181.840	1.409.090	1.917.750	5.082.060	12.145.900	Rendah Sekali
89	Kab. Toraja Utara	3.306.820	1.314.300	1.072.360	3.027.930	5.156.130	13.877.540	Rendah Sekali
90	Kab. Buton	2.855.690	1.376.420	1.092.010	4.435.960	5.276.500	15.036.580	Rendah Sekali
91	Kab. Konawe	5.288.100	1.255.750	976.270	2.280.230	5.687.950	15.488.300	Rendah Sekali
92	Kab. Muna	2.070.860	1.263.840	1.298.010	2.106.190	5.468.740	12.207.640	Rendah Sekali
93	Kab. Konawe Selatan	4.535.930	1.147.160	939.620	2.772.980	5.667.960	15.063.650	Rendah Sekali
94	Kab. Bombana	3.503.050	1.030.700	906.930	2.186.640	6.093.440	13.720.760	Rendah Sekali
95	Kab. Wakatobi	-	1.209.640	962.720	2.661.360	5.472.090	10.305.810	Rendah Sekali
96	Kab. Kolaka Utara	3.383.770	1.252.260	1.218.800	2.626.590	6.108.920	14.590.340	Rendah Sekali
97	Kab. Konawe Utara	2.698.150	951.430	955.640	1.876.690	5.772.710	12.254.620	Rendah Sekali
98	Kab. Buton Utara	2.195.150	931.560	1.047.720	2.039.960	6.183.910	12.398.300	Rendah Sekali
99	Kab. Bima	3.164.550	1.228.140	1.150.930	2.483.740	4.819.950	12.847.310	Rendah Sekali
100	Kab. Dompu	4.526.290	1.242.840	1.265.920	1.812.550	4.893.590	13.741.190	Rendah Sekali
101	Kab. Lombok Barat	2.645.610	1.601.690	1.301.380	1.684.700	4.869.860	12.103.240	Rendah Sekali
102	Kab. Lombok Tengah	2.243.060	1.655.270	1.176.270	2.247.480	4.980.760	12.302.840	Rendah Sekali
103	Kab. Lombok Timur	4.087.480	2.474.220	1.220.140	2.548.990	5.485.970	15.816.800	Rendah Sekali
104	Kab. Sumbawa	3.915.680	1.466.680	1.064.070	2.065.340	4.945.700	13.457.470	Rendah Sekali
105	Kab. Sumbawa Barat	2.366.120	1.072.290	1.082.080	2.716.360	4.977.060	12.213.910	Rendah Sekali
106	Kab. Lombok Utara	2.183.780	1.157.900	1.140.450	1.170.600	4.715.100	10.367.830	Rendah Sekali
107	Kab. Alor	3.411.510	1.291.010	1.263.000	2.638.740	6.003.130	14.607.390	Rendah Sekali
108	Kab. Belu	2.669.570	1.282.630	1.206.810	1.778.000	5.766.640	12.703.650	Rendah Sekali
109	Kab. Ende	2.620.300	1.159.800	877.890	1.946.370	4.937.200	11.541.560	Rendah Sekali
110	Kab. Flores Timur	1.938.090	1.026.850	821.430	2.107.830	5.418.410	11.312.610	Rendah Sekali
111	Kab. Kupang	4.448.410	1.252.550	1.185.440	2.741.600	5.820.570	15.448.570	Rendah Sekali
112	Kab. Lembata	1.151.760	1.092.760	1.006.410	3.141.670	5.432.930	11.825.530	Rendah Sekali
113	Kab. Manggarai	5.405.420	1.557.950	1.761.870	3.229.760	5.643.510	17.598.510	Rendah Sekali
114	Kab. Ngada	1.951.030	980.770	1.117.850	2.166.810	4.826.410	11.042.870	Rendah Sekali
115	Kab. Sikka	1.970.950	1.311.030	771.930	2.126.060	4.807.570	10.987.540	Rendah Sekali
116	Kab. Sumba Barat	1.163.890	1.135.170	992.470	1.820.560	5.461.660	10.573.750	Rendah Sekali
117	Kab. Sumba Timur	2.523.910	1.313.690	1.309.210	2.853.240	5.333.720	13.333.770	Rendah Sekali
118	Kab. Timor Tengah Selatan	2.165.890	1.730.430	1.273.180	2.208.840	5.544.180	12.922.520	Rendah Sekali
119	Kab. Timor Tengah Utara	3.325.460	1.197.060	817.240	2.222.750	5.591.630	13.154.140	Rendah Sekali
120	Kab. Rote Ndao	3.835.730	1.223.060	1.627.010	2.050.180	5.940.640	14.676.620	Rendah Sekali
121	Kab. Manggarai Barat	6.384.410	1.292.430	865.150	2.324.050	6.022.470	16.888.510	Rendah Sekali
122	Kab. Nagekeo	2.140.520	1.425.720	836.550	2.283.400	5.262.940	11.949.130	Rendah Sekali
123	Kab. Sumba Barat Daya	2.384.990	1.447.990	1.740.630	2.388.840	5.932.520	13.894.970	Rendah Sekali
124	Kab. Sumba Tengah	1.358.740	981.700	820.710	1.886.120	5.059.270	10.106.540	Rendah Sekali
125	Kab. Manggarai Timur	4.423.330	1.254.840	1.571.060	2.353.260	5.557.010	15.159.500	Rendah Sekali
126	Kab. Sabu Raijua	2.132.120	1.446.380	1.680.650	2.033.750	6.496.390	13.789.290	Rendah Sekali
127	Kab. Malaka	2.535.690	1.066.620	708.400	1.542.470	6.351.670	12.204.850	Rendah Sekali
128	Kab. Maluku Tenggara Barat	1.780.710	1.311.210	1.430.880	2.872.260	7.034.710	14.429.770	Rendah Sekali
129	Kab. Maluku Tengah	2.589.100	1.446.620	1.009.380	3.457.690	5.463.110	13.965.900	Rendah Sekali
130	Kab. Buru	2.237.760	962.480	887.910	2.195.130	5.160.140	11.443.420	Rendah Sekali
131	Kab. Seram Bagian Barat	1.988.140	1.210.780	969.190	2.337.300	5.893.290	12.398.700	Rendah Sekali
132	Kab. Seram Bagian Timur	2.229.870	1.186.930	1.221.480	2.826.820	7.036.820	14.501.920	Rendah Sekali
133	Kab. Kepulauan Aru	-	1.281.980	1.326.440	2.185.460	7.048.940	11.842.820	Rendah Sekali
134	Kab. Maluku Barat Daya	2.389.570	1.408.140	1.600.020	3.899.930	6.764.100	16.061.760	Rendah Sekali
135	Kab. Buru Selatan	1.478.000	1.212.320	1.302.160	3.107.310	7.124.460	14.224.250	Rendah Sekali
136	Kab. Biak Numfor	-	3.152.280	746.560	1.998.770	5.786.060	11.683.670	Rendah Sekali
137	Kab. Jayawijaya	3.545.420	2.420.100	1.320.800	3.745.320	11.461.800	22.493.440	Rendah
138	Kab. Merauke	8.709.700	2.302.120	1.824.120	10.496.680	9.901.820	33.234.440	Rendah
139	Kab. Mimika	2.180.440	1.852.790	1.382.820	5.413.710	8.220.370	19.050.130	Rendah
140	Kab. Nabire	2.153.160	1.508.550	1.246.290	4.013.670	7.506.100	16.427.770	Rendah Sekali
141	Kab. Paniai	-	2.312.790	1.248.590	5.851.000	10.476.860	19.889.240	Rendah Sekali
142	Kab. Puncak Jaya	-	2.670.940	1.789.380	4.167.450	22.063.260	30.691.030	Rendah
143	Kab. Kepulauan Yapen	-	1.268.740	877.030	3.483.690	6.872.270	12.501.730	Rendah Sekali
144	Kota Jayapura	-	2.680.070	1.639.930	2.020.650	6.662.190	13.002.840	Rendah
145	Kab. Sarmi	2.410.650	1.098.380	991.780	3.659.640	9.808.690	17.969.140	Rendah
146	Kab. Keerom	2.062.890	1.114.440	1.366.020	3.544.660	8.125.780	16.213.790	Rendah Sekali
147	Kab. Yahukimo	-	1.933.290	1.218.030	3.999.560	11.765.960	18.916.840	Rendah
148	Kab. Pegunungan Bintang	-	2.004.810	1.848.850	4.926.460	14.865.790	23.645.910	Rendah
149	Kab. Tolikara	-	2.323.880	1.961.260	5.755.080	17.766.530	27.806.750	Rendah Sekali
150	Kab. Boven Digoel	-	1.422.380	1.146.720	3.605.660	8.589.820	14.764.580	Rendah
151	Kab. Mappi	4.393.130	1.820.150	1.320.320	5.937.590	8.907.750	22.378.940	Rendah
152	Kab. Asmat	-	1.558.760	2.026.750	3.326.310	10.365.450	17.277.270	Rendah
153	Kab. Waropen	2.062.940	952.020	1.079.350	2.531.530	8.037.620	14.663.460	Rendah Sekali
154	Kab. Supiori	-	1.158.570	954.440	2.471.280	6.913.820	11.498.110	Rendah Sekali
155	Kab. Mamberamo Raya	-	1.149.020	1.103.590	4.580.260	8.940.910	15.773.780	Rendah
156	Kab. Mamberamo Tengah	-	2.149.040	1.996.760	6.147.260	14.447.180	24.740.240	Rendah
157	Kab. Yalimo	-	1.621.890	1.798.500	4.538.690	14.059.640	22.018.720	Rendah Sekali
158	Kab. Lanny Jaya	-	3.817.450	1.889.490	3.787.410	13.330.390	22.824.740	Rendah
159	Kab. Nduga	4.037.200	1.777.050	1.598.380	3.275.200	10.052.310	20.740.140	Rendah Sekali
160	Kab. Puncak	-	2.537.680	2.017.560	10.595.580	16.253.930	31.404.750	Rendah
161	Kab. Dogiyai	-	1.585.420	955.410	4.585.960	9.845.670	16.972.460	Rendah Sekali

www.peraturan.go.id

LAMPIRAN XVI
RINCIAN DANA ALOKASI KHUSUS TAMBAHAN AFIRMASI
KEPADA KABUPATEN/KOTA DAERAH TERTINGGAL DAN PERBATASAN
YANG MEMILIKI KEMAMPUAN KEUANGAN RELATIF RENDAH MENURUT KABUPATEN/KOTA

(Dalam Ribuan Rupiah)

NO	NAMA DAERAH	INFRASTRUKTUR IRIGASI	INFRASTRUKTUR AIR MINUM DAN SANITASI		TRANSPORTASI		TOTAL	STATUS KEMAMPUAN KEUANGAN DAERAH (KKD)
			INFRASTRUKTUR AIR MINUM	INFRASTRUKTUR SANITASI	INFRASTRUKTUR JALAN	TRANSPORTASI PERDESAAN		
162	Kab. Intan Jaya	-	1.745.140	1.937.270	3.468.930	13.584.700	20.736.040	Rendah
163	Kab. Deiyai	-	1.572.980	1.304.480	3.213.250	9.694.550	15.785.260	Rendah Sekali
164	Kab. Halmahera Tengah	-	1.107.300	953.740	2.475.230	6.348.670	10.884.940	Rendah Sekali
165	Kab. Halmahera Barat	1.835.300	1.191.600	1.380.080	2.413.120	5.553.180	12.373.280	Rendah Sekali
166	Kab. Halmahera Timur	2.021.530	984.590	1.200.240	2.937.570	5.943.780	13.087.710	Rendah Sekali
167	Kab. Kepulauan Sula	2.876.020	1.223.790	1.206.460	3.148.960	7.219.010	15.674.240	Rendah Sekali
168	Kab. Halmahera Selatan	1.652.640	1.002.640	1.410.860	2.445.660	5.743.070	12.254.870	Rendah Sekali
169	Kab. Halmahera Utara	1.621.710	949.070	1.141.340	2.812.830	6.002.550	12.527.500	Rendah Sekali
170	Kab. Pulau Morotai	1.659.280	921.260	1.101.370	2.451.220	6.946.080	13.079.210	Rendah Sekali
171	Kab. Lebak	5.836.920	1.942.840	1.053.930	2.142.340	5.183.770	16.159.800	Rendah
172	Kab. Pandeglang	5.672.430	1.943.920	1.199.290	2.756.080	5.352.980	16.924.700	Rendah Sekali
173	Kab. Bangka Selatan	2.396.500	1.110.210	1.343.890	2.290.920	4.932.390	12.073.910	Rendah Sekali
174	Kab. Boalemo	2.347.850	1.239.920	1.042.020	2.426.130	5.430.940	12.486.860	Rendah Sekali
175	Kab. Pohuwato	2.065.680	1.168.640	971.620	2.410.840	5.173.850	11.790.630	Rendah Sekali
176	Kab. Gorontalo Utara	2.870.750	1.257.400	1.277.160	2.017.310	5.345.520	12.768.140	Rendah Sekali
177	Kab. Bintan	-	1.211.000	896.070	2.481.100	4.855.480	9.443.650	Rendah
178	Kab. Natuna	2.914.720	1.119.500	1.093.930	2.505.910	5.814.370	13.448.430	Rendah
179	Kab. Karimun	1.595.140	1.128.670	848.990	2.444.320	4.892.480	10.909.600	Rendah
180	Kota Batam	-	3.794.650	1.015.270	2.558.890	5.495.330	12.864.140	Rendah
181	Kab. Kepulauan Anambas	2.866.260	1.021.730	975.060	2.231.620	4.544.760	11.639.430	Rendah
182	Kab. Sorong	3.339.010	1.209.360	1.073.800	3.763.180	6.650.890	16.036.240	Rendah
183	Kab. Sorong Selatan	-	939.700	858.240	1.484.870	6.284.870	9.567.680	Rendah Sekali
184	Kab. Raja Ampat	3.244.180	1.324.480	1.078.200	3.397.570	8.183.450	17.227.880	Rendah
185	Kab. Teluk Bintuni	-	1.320.100	905.350	3.911.840	8.696.300	14.833.590	Rendah
186	Kab. Teluk Wondama	-	914.700	686.110	2.083.450	8.970.190	12.654.450	Rendah Sekali
187	Kab. Kaimana	-	971.720	864.060	2.157.900	7.227.610	11.221.290	Rendah
188	Kab. Maybrat	-	1.242.610	908.910	2.656.440	6.270.950	11.078.910	Rendah Sekali
189	Kab. Tambrauw	-	1.378.480	1.259.250	4.478.190	8.381.840	15.497.760	Rendah Sekali
190	Kab. Majene	2.464.820	1.064.090	1.273.570	1.430.230	5.219.240	11.451.950	Rendah Sekali
191	Kab. Mamuju	2.838.480	1.287.560	1.365.310	2.382.550	6.132.900	14.006.800	Rendah Sekali
192	Kab. Polewali Mandar	2.132.230	1.322.240	1.228.270	2.028.610	5.109.160	11.820.510	Rendah Sekali
193	Kab. Mamasa	4.456.810	1.171.050	1.574.750	1.974.320	6.336.440	15.513.370	Rendah Sekali
194	Kab. Mamuju Utara	1.866.930	1.078.660	1.235.930	3.311.090	6.081.520	13.574.130	Rendah Sekali
195	Kab. Malinau	1.379.810	859.350	1.219.290	3.760.050	5.709.980	12.928.480	Rendah
196	Kab. Nunukan	1.708.120	995.820	1.100.990	2.109.800	5.733.430	11.648.160	Rendah
	Jumlah Kab/Kota	**161**	**196**	**196**	**196**	**196**	**196**	
	Jumlah Total	**496.405.000**	**281.655.000**	**230.444.000**	**564.401.000**	**1.247.770.000**	**2.820.675.000**	
	Jumlah Provinsi	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	
	Jumlah Total	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	
	Total Daerah	**161**	**196**	**196**	**196**	**196**	**196**	
	Jumlah Total Nasional	**496.405.000**	**281.655.000**	**230.444.000**	**564.401.000**	**1.247.770.000**	**2.820.675.000**	

PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA,

JOKO WIDODO

www.peraturan.go.id

LAMPIRAN XVII

PERATURAN PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA NOMOR 36 TAHUN 2015

TENTANG RINCIAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA NEGARA TAHUN ANGGARAN 2015

RINCIAN DANA ALOKASI KHUSUS TAMBAHAN PENDUKUNG PROGRAM PRIORITAS KABINET KERJA (P3K2) DAN RINCIAN DANA ALOKASI KHUSUS TAMBAHAN USULAN DAERAH YANG DISETUJUI OLEH DPR RI MENURUT PROVINSI/KABUPATEN/KOTA

www.peraturan.go.id

LAMPIRAN XVII
RINCIAN ALOKASI
DANA ALOKASI KHUSUS TAMBAHAN PENDUKUNG PROGRAM PRIORITAS KABINET KERJA (P3K2)
DAN RINCIAN DANA ALOKASI KHUSUS TAMBAHAN USULAN DAERAH YANG DISETUJUI DPR RI TA 2015
MENURUT PROVINSI/KABUPATEN/KOTA

(dalam ribuan rupiah)

NO	DAERAH	BIDANG KESEHATAN	BIDANG INFRASTRUKTUR IRIGASI	BIDANG PERTANIAN	BIDANG SARANA PERDAGANGAN SUBBIDANG PASAR	BIDANG TRANSPORTASI SUBBIDANG INFRASTRUKTUR JALAN	TOTAL
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)
1	Kab. Aceh Besar	-	-	15.456.200	20.122.375	29.877.625	65.456.200
2	Kab. Aceh Selatan	30.000.000	13.000.000	12.569.800	11.000.000	50.000.000	116.569.800
3	Kab. Aceh Singkil	17.531.300	14.987.600	-	16.924.500	79.998.800	129.442.200
4	Kab. Aceh Tengah	-	20.000.000	11.656.800	-	80.000.000	111.656.800
5	Kab. Aceh Tenggara	-	78.000.000	13.269.900	-	49.996.600	141.266.500
6	Kab. Aceh Timur	-	-	16.310.300	-	-	16.310.300
7	Kab. Aceh Utara	-	1.899.500	22.644.400	2.002.700		26.546.600
8	Kab. Bireuen	-	35.000.000	15.401.600	22.600.545	35.000.000	108.002.145
9	Kab. Pidie	10.000.000	69.998.000	16.857.200	-	10.000.000	106.855.200
10	Kota Sabang	-	35.000.000	-	-	10.000.000	45.000.000
11	Kota Langsa	-	-	-	20.122.375	-	20.122.375
12	Kota Lhokseumawe	-	-	4.432.000	-	40.000.000	44.432.000
13	Kab. Nagan Raya	-	-	15.246.600	-	-	15.246.600
14	Kab. Aceh Jaya	10.000.000	49.877.625	11.989.400	-	40.122.375	111.989.400
15	Kab. Aceh Barat Daya	-	19.997.700	15.269.700	-	79.989.500	115.256.900
16	Kab. Gayo Lues	-	30.000.000	11.189.100	-	80.000.000	121.189.100
17	Kab. Aceh Tamiang	-	-	12.790.000	1.929.600	80.000.000	94.719.600
18	Kab. Bener Meriah	-	-	11.016.700	-	-	11.016.700
19	Kab. Pidie Jaya	-	25.000.000	12.284.100	-	80.000.000	117.284.100
20	Kota Subulussalam	-	20.000.000	-	30.000.000	79.200.000	129.200.000
21	Kab. Asahan	12.457.700	-	12.950.000	-	-	25.407.700
22	Kab. Deli Serdang	12.211.100	4.100.000	-	1.875.200	-	18.186.300
23	Kab. Karo	-	35.000.000	13.696.300	-	15.000.000	63.696.300
24	Kab. Labuhanbatu	-	-	-	-	25.000.000	25.000.000
25	Kab. Langkat	11.224.400	20.000.000	16.355.200	1.848.100	30.000.000	79.427.700
26	Kab. Nias	15.000.000	10.000.000	11.761.200	5.000.000	25.000.000	66.761.200
27	Kab. Simalungun	-	2.694.200	20.342.900	-	-	23.037.100
28	Kab. Tapanuli Selatan	11.653.800	-	14.090.300	-	-	25.744.100
29	Kab. Tapanuli Tengah	-	70.000.000	12.858.600	-	-	82.858.600
30	Kab. Tapanuli Utara	-	20.000.000	12.967.300	-	20.000.000	52.967.300
31	Kab. Toba Samosir	-	-	14.619.100	-	-	14.619.100
32	Kota Pematang Siantar	-	-	4.485.300	1.798.600	-	6.283.900
33	Kota Sibolga	-	-	-	-	50.000.000	50.000.000
34	Kota Tanjung Balai	-	-	-	-	20.000.000	20.000.000
35	Kota Tebing Tinggi	-	-	-	1.826.200	-	1.826.200
36	Kab. Pakpak Bharat	-	-	10.879.500	-	-	10.879.500
37	Kab. Nias Selatan	11.814.300	-	12.172.600	-	-	23.986.900
38	Kab. Humbang Hasundutan	-	-	13.469.700	-	-	13.469.700
39	Kab. Serdang Bedagai	-	2.281.000	20.454.300	-	-	22.735.300
40	Kab. Padang Lawas	-	-	-	-	24.999.800	24.999.800
41	Kab. Labuhanbatu Selatan	-	-	-	-	39.998.900	39.998.900
42	Kab. Labuhanbatu Utara	-	-	-	-	20.000.000	20.000.000
43	Kab. Nias Barat	-	-	10.328.300	-	-	10.328.300
44	Kab. Nias Utara	22.000.000	-	-	-	38.000.000	60.000.000
45	Kota Gunungsitoli	20.000.000	10.000.000	-	-	30.000.000	60.000.000
46	Kab. Limapuluh Kota	-	-	15.821.600	-	-	15.821.600
47	Kab. Agam	-	5.600.400	17.343.600	-	-	22.944.000
48	Kab. Kepulauan Mentawai	-	-	-	2.178.100	-	2.178.100
49	Kab. Padang Pariaman	-	2.716.500	16.771.300	-	-	19.487.800
50	Kab. Pasaman	-	-	15.799.300	-	-	15.799.300
51	Kab. Pesisir Selatan	-	1.928.600	18.398.300	-	-	20.326.900
52	Kab. Sijunjung	-	-	11.947.400	-	-	11.947.400
53	Kab. Solok	-	3.677.800	16.558.100	-	-	20.235.900
54	Kab. Tanah Datar	-	4.229.700	15.990.600	-	-	20.220.300
55	Kota Padang	-	-	6.167.100	1.907.100	-	8.074.200
56	Kota Payakumbuh	-	-	4.800.900	-	20.000.000	24.800.900
57	Kota Sawahlunto	-	-	4.398.200	-	-	4.398.200
58	Kota Solok	-	-	4.283.200	-	-	4.283.200
59	Kota Pariaman	-	-	4.674.500	-	-	4.674.500
60	Kab. Pasaman Barat	11.544.700	-	13.990.800	-	-	25.535.500
61	Kab. Dharmasraya	-	-	11.963.600	-	25.000.000	36.963.600
62	Kab. Solok Selatan	21.868.600	-	12.989.500	-	-	34.858.100
63	Kab. Indragiri Hilir	-	-	-	-	69.798.700	69.798.700
64	Kab. Indragiri Hulu	-	-	-	1.976.900	-	1.976.900
65	Kab. Kampar	-	40.000.000	11.479.200	1.904.700	50.000.000	103.383.900
66	Kab. Kuantan Singingi	-	-	-	1.942.700	-	1.942.700
67	Kab. Rokan Hilir	-	-	-	1.979.700	80.000.000	81.979.700
68	Kab. Rokan Hulu	15.000.000	-	10.884.800	1.832.200	-	27.717.000
69	Kab. Siak	-	-	-	1.891.100	-	1.891.100
70	Kota Dumai	-	-	-	1.834.800	-	1.834.800
71	Kota Pekanbaru	-	-	-	1.870.900	-	1.870.900
72	Kab. Batang Hari	-	-	-	1.809.000	-	1.809.000
73	Kab. Merangin	-	-	11.945.100	-	50.000.000	61.945.100
74	Kab. Sarolangun	-	-	11.048.200	-	-	11.048.200
75	Kab. Tanjung Jabung Barat	-	-	-	1.956.200	-	1.956.200
76	Kab. Tanjung Jabung Timur	-	-	-	1.827.900	79.996.700	81.824.600
77	Kota Jambi	-	-	-	1.836.200	98.000.000	99.836.200
78	Kab. Lahat	14.997.800	-	13.722.000	1.882.400	-	30.602.200
79	Kab. Musi Banyuasin	-	-	-	1.977.700	-	1.977.700
80	Kab. Musi Rawas	18.243.800	-	16.767.100	50.000.000	50.000.000	135.010.900
81	Kab. Muara Enim	10.000.000	-	13.641.000	16.891.900	-	40.532.900
82	Kab. Ogan Komering Ilir	13.735.400	-	29.150.100	-	-	42.885.500
83	Kab. Ogan Komering Ulu	-	-	10.989.500	1.837.900	-	12.827.400
84	Kota Palembang	-	-	-	-	50.000.000	50.000.000
85	Kota Lubuk Linggau	-	-	4.573.800	-	-	4.573.800
86	Kab. Banyuasin	-	-	47.932.900	16.962.500	10.000.000	74.895.400
87	Kab. OKU Timur	-	4.800.000	-	-	70.000.000	74.800.000
88	Kab. Musi Rawas Utara	13.599.800	-	-	-	-	13.599.800
89	Kab. Bengkulu Utara	7.000.000	-	12.384.900	-	-	19.384.900
90	Kab. Rejang Lebong	-	-	13.000.000	-	-	13.000.000
91	Kab. Kaur	-	-	12.160.600	-	94.000.000	106.160.600
92	Kab. Seluma	10.785.100	-	13.520.700	-	-	24.305.800
93	Kab. Mukomuko	-	-	11.980.400	-	-	11.980.400
94	Kab. Lebong	-	16.500.000	12.366.100	-	-	28.866.100
95	Kab. Kepahiang	-	-	-	15.122.375	-	15.122.375
96	Kab. Bengkulu Tengah	-	-	11.323.600	-	-	11.323.600
97	Provinsi Lampung	38.000.000	-	-	-	145.000.000	183.000.000
98	Kab. Lampung Barat	14.168.800	-	12.474.800	-	-	26.643.600
99	Kab. Lampung Selatan	10.940.300	2.791.600	-	-	-	13.731.900
100	Kab. Lampung Tengah	11.327.400	2.765.200	29.181.300	1.856.900	-	45.130.800
101	Kab. Lampung Utara	12.168.700	-	-	-	-	12.168.700
102	Kab. Lampung Timur	11.895.600	1.442.100	24.260.500	1.859.700	-	39.457.900
103	Kab. Tanggamus	-	-	15.410.100	-	40.000.000	55.410.100
104	Kab. Tulang Bawang	-	47.000.000	-	-	47.828.000	94.828.000
105	Kab. Way Kanan	-	-	13.925.800	-	-	13.925.800

www.peraturan.go.id

LAMPIRAN XVII
RINCIAN ALOKASI
DANA ALOKASI KHUSUS TAMBAHAN PENDUKUNG PROGRAM PRIORITAS KABINET KERJA (P3K2)
DAN RINCIAN DANA ALOKASI KHUSUS TAMBAHAN USULAN DAERAH YANG DISETUJUI DPR RI TA 2015
MENURUT PROVINSI/KABUPATEN/KOTA

(dalam ribuan rupiah)

NO	DAERAH	BIDANG KESEHATAN	BIDANG INFRASTRUKTUR IRIGASI	BIDANG PERTANIAN	BIDANG SARANA PERDAGANGAN SUBBIDANG PASAR	BIDANG TRANSPORTASI SUBBIDANG INFRASTRUKTUR JALAN	TOTAL
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)
106	Kota Bandar Lampung	38.000.000	-	-	1.866.800	-	39.866.800
107	Kota Metro	-	-	4.872.000	1.819.100	-	6.691.100
108	Kab. Pringsewu	-	3.000.000	12.854.100	-	67.000.000	82.854.100
109	Kab. Tulang Bawang Barat	45.000.000	-	13.214.600	-	50.000.000	108.214.600
110	Kab. Pesisir Barat	-	-	11.961.800	-	-	11.961.800
111	Kab. Bandung	17.292.400	-	22.620.500	1.868.800	-	41.781.700
112	Kab. Bekasi	-	-	30.423.800	1.857.000	-	32.280.800
113	Kab. Bogor	13.951.200	5.279.000	-	1.953.100	83.000.000	104.183.300
114	Kab. Ciamis	-	2.882.000	21.764.900	-	-	24.646.900
115	Kab. Cianjur	11.356.600	40.000.000	23.532.000	1.850.500	40.000.000	116.739.100
116	Kab. Cirebon	12.575.900	-	25.278.500	1.791.800	90.000.000	129.646.200
117	Kab. Garut	14.219.900	929.400	24.436.100	1.853.200	-	41.438.600
118	Kab. Indramayu	12.452.600	1.098.700	46.054.200	-	60.000.000	119.605.500
119	Kab. Karawang	-	2.309.200	43.650.700	1.960.000	-	47.919.900
120	Kab. Kuningan	-	46.800.000	17.879.900	-	53.200.000	117.879.900
121	Kab. Majalengka	13.858.600	1.438.800	-	1.806.400	98.000.000	115.103.800
122	Kab. Purwakarta	-	2.247.200	14.619.100	1.805.300	-	18.671.600
123	Kab. Subang	-	3.203.000	37.175.300	1.815.100	-	42.193.400
124	Kab. Sukabumi	11.334.800	3.627.000	22.512.600	1.835.000	-	39.309.400
125	Kab. Sumedang	-	2.035.400	18.377.300	1.825.800	-	22.238.500
126	Kab. Tasikmalaya	11.153.100	5.188.700	22.112.100	1.809.400	50.000.000	90.263.300
127	Kota Bandung	-	-	4.483.400	1.919.800	-	6.403.200
128	Kota Bogor	-	55.000.000	-	1.844.000	-	56.844.000
129	Kota Cirebon	-	-	-	1.863.000	96.000.000	97.863.000
130	Kota Tasikmalaya	-	-	5.741.400	-	-	5.741.400
131	Kab. Bandung Barat	-	1.172.200	14.082.800	1.817.000	-	17.072.000
132	Kab. Pangandaran	-	-	13.952.400	-	-	13.952.400
133	Kab. Banjarnegara	11.948.800	-	13.337.200	11.850.500	50.000.000	87.136.500
134	Kab. Banyumas	16.162.000	2.909.400	17.905.700	1.881.700	-	38.858.800
135	Kab. Batang	13.064.200	-	-	-	-	13.064.200
136	Kab. Blora	-	3.995.900	23.450.300	-	-	27.046.200
137	Kab. Boyolali	-	1.309.800	19.327.000	-	-	20.636.800
138	Kab. Brebes	12.768.000	3.955.700	27.748.900	1.915.200	-	46.387.800
139	Kab. Cilacap	11.897.600	3.414.500	29.639.900	15.000.000	25.000.000	84.952.000
140	Kab. Demak	-	907.700	28.087.100	-	-	28.994.800
141	Kab. Grobogan	14.310.200	3.046.300	35.936.500	1.853.500	-	55.146.500
142	Kab. Jepara	-	-	17.823.900	-	48.000.000	65.823.900
143	Kab. Karanganyar	-	2.533.800	16.336.400	-	25.000.000	43.870.200
144	Kab. Kebumen	-	1.698.800	20.601.700	15.000.000	60.000.000	97.300.500
145	Kab. Kendal	11.048.100	-	-	-	-	11.048.100
146	Kab. Klaten	-	3.942.600	19.172.600	-	-	23.115.200
147	Kab. Kudus	-	-	15.479.500	-	-	15.479.500
148	Kab. Magelang	-	4.429.400	16.969.600	-	-	21.399.000
149	Kab. Pati	13.464.100	3.349.900	29.480.300	1.934.500	-	48.228.800
150	Kab. Pekalongan	12.593.600	-	15.924.700	-	-	28.518.300
151	Kab. Pemalang	12.199.800	1.502.000	20.458.100	-	-	34.159.900
152	Kab. Purbalingga	-	-	14.657.700	-	-	14.657.700
153	Kab. Purworejo	-	2.969.400	18.044.500	-	-	21.013.900
154	Kab. Rembang	-	-	19.399.800	9.998.900	24.997.900	54.396.600
155	Kab. Semarang	-	-	14.720.200	1.912.000	-	16.632.200
156	Kab. Sragen	-	2.267.600	24.944.800	10.000.000	40.000.000	77.212.400
157	Kab. Sukoharjo	-	1.197.300	17.426.900	-	-	18.624.200
158	Kab. Tegal	13.526.600	-	19.946.200	1.833.400	43.000.000	78.306.200
159	Kab. Temanggung	-	-	14.171.400	-	-	14.171.400
160	Kab. Wonogiri	-	2.963.300	-	-	-	2.963.300
161	Kota Pekalongan	-	-	4.244.600	1.826.800	-	6.071.400
162	Kota Semarang	22.408.300	-	4.787.600	-	-	27.195.900
163	Kab. Bantul	-	-	14.070.100	-	-	14.070.100
164	Kab. Gunung Kidul	-	-	15.247.400	-	-	15.247.400
165	Kab. Sleman	-	3.099.900	15.635.200	-	-	18.735.100
166	Kota Yogyakarta	-	-	-	1.781.600	-	1.781.600
167	Kab. Bangkalan	13.936.200	25.000.000	18.674.800	-	50.000.000	107.611.000
168	Kab. Banyuwangi	-	20.000.000	23.469.100	1.800.100	45.000.000	90.269.200
169	Kab. Blitar	-	29.976.400	17.232.000	-	24.998.800	72.207.200
170	Kab. Bojonegoro	-	1.356.500	30.040.900	1.899.200	15.000.000	48.296.600
171	Kab. Bondowoso	11.397.600	2.982.600	20.352.300	-	-	34.732.500
172	Kab. Gresik	-	2.833.600	22.073.000	1.966.300	40.000.000	66.872.900
173	Kab. Jember	13.830.000	25.000.000	29.311.100	1.835.100	50.000.000	119.976.200
174	Kab. Jombang	12.152.500	-	23.732.600	1.872.600	-	37.757.700
175	Kab. Kediri	12.655.000	5.283.000	21.520.800	1.863.100	-	41.321.900
176	Kab. Lamongan	20.000.000	33.000.000	35.180.300	1.890.600	24.000.000	114.070.900
177	Kab. Lumajang	-	3.769.400	19.197.300	-	-	22.966.700
178	Kab. Madiun	-	15.000.000	20.418.600	-	35.000.000	70.418.600
179	Kab. Magetan	-	2.611.500	17.713.800	-	-	20.325.300
180	Kab. Malang	14.092.800	5.271.500	23.881.400	1.914.300	-	45.160.000
181	Kab. Mojokerto	-	4.324.700	18.891.900	1.823.400	40.000.000	65.040.000
182	Kab. Nganjuk	12.975.100	10.000.000	22.240.900	1.882.700	-	47.098.700
183	Kab. Ngawi	-	5.074.200	27.045.200	-	-	32.119.400
184	Kab. Pacitan	-	-	13.518.400	-	20.000.000	33.518.400
185	Kab. Pamekasan	-	-	14.503.400	-	30.000.000	44.503.400
186	Kab. Pasuruan	12.054.600	3.327.000	21.379.200	1.813.300	-	38.574.100
187	Kab. Ponorogo	-	2.277.600	20.816.600	-	-	23.094.200
188	Kab. Probolinggo	-	3.371.100	22.152.400	1.875.400	-	27.398.900
189	Kab. Sampang	18.230.800	30.000.000	18.691.600	-	59.950.000	126.872.400
190	Kab. Sidoarjo	13.785.400	-	16.884.800	1.830.200	-	32.500.400
191	Kab. Situbondo	12.419.400	-	20.968.900	-	-	33.388.300
192	Kab. Sumenep	5.000.000	25.000.000	14.863.000	-	60.000.000	104.863.000
193	Kab. Trenggalek	-	-	13.613.000	-	-	13.613.000
194	Kab. Tuban	-	1.395.900	23.504.000	1.849.400	-	26.749.300
195	Kab. Tulungagung	-	1.991.100	17.784.200	-	-	19.775.300
196	Kota Blitar	-	-	4.274.800	-	-	4.274.800
197	Kota Kediri	-	-	-	1.843.300	-	1.843.300
198	Kota Madiun	-	-	4.320.400	1.850.400	-	6.170.800
199	Kota Malang	-	-	4.450.800	1.810.700	15.000.000	21.261.500
200	Kota Mojokerto	-	-	-	1.820.500	-	1.820.500
201	Kota Pasuruan	-	-	4.372.900	-	-	4.372.900
202	Kota Probolinggo	-	-	4.731.600	-	-	4.731.600
203	Kota Surabaya	12.955.800	-	-	-	-	12.955.800
204	Kota Batu	-	-	4.583.900	-	-	4.583.900
205	Provinsi Kalimantan Barat	-	-	-	-	35.000.000	35.000.000
206	Kab. Bengkayang	13.928.300	17.000.000	-	-	65.000.000	95.928.300
207	Kab. Landak	10.811.200	-	16.872.900	-	15.000.000	42.684.100
208	Kab. Kapuas Hulu	11.239.500	-	12.150.300	2.068.200	42.433.700	67.891.700
209	Kab. Ketapang	-	-	16.275.300	-	-	16.275.300
210	Kab. Mempawah	-	-	-	10.000.000	80.000.000	90.000.000
211	Kab. Sambas	13.845.500	23.852.200	-	20.000.000	25.000.000	82.697.700

www.peraturan.go.id

LAMPIRAN XVII
RINCIAN ALOKASI
DANA ALOKASI KHUSUS TAMBAHAN PENDUKUNG PROGRAM PRIORITAS KABINET KERJA (P3K2)
DAN RINCIAN DANA ALOKASI KHUSUS TAMBAHAN USULAN DAERAH YANG DISETUJUI DPR RI TA 2015
MENURUT PROVINSI/KABUPATEN/KOTA

(dalam ribuan rupiah)

NO	DAERAH	BIDANG KESEHATAN	BIDANG INFRASTRUKTUR IRIGASI	BIDANG PERTANIAN	BIDANG SARANA PERDAGANGAN SUBBIDANG PASAR	BIDANG TRANSPORTASI SUBBIDANG INFRASTRUKTUR JALAN	TOTAL
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)
212	Kab. Sanggau	4.996.900	-	13.542.100	-	5.000.000	23.539.000
213	Kab. Sintang	19.999.500	19.998.500	13.264.000	-	60.000.000	113.262.000
214	Kota Pontianak	-	-	-	2.001.500	-	2.001.500
215	Kab. Melawi	15.129.000	24.995.700	-	-	95.798.300	135.923.000
216	Kab. Kayong Utara	-	-	-	-	9.500.000	9.500.000
217	Kab. Kubu Raya	-	-	21.081.400	-	-	21.081.400
218	Kab. Barito Utara	-	-	-	-	67.200.000	67.200.000
219	Kab. Kapuas	-	2.285.900	31.178.900	1.840.500	92.250.000	127.555.300
220	Kab. Kotawaringin Barat	14.995.700	-	-	1.849.000	-	16.844.700
221	Kab. Kotawaringin Timur	-	-	-	1.929.300	-	1.929.300
222	Kota Palangkaraya	9.967.900	-	-	1.885.200	-	11.853.100
223	Kab. Barito Timur	-	-	11.617.400	-	-	11.617.400
224	Kab. Murung Raya	-	-	-	1.830.000	-	1.830.000
225	Kab. Pulang Pisau	-	-	-	-	87.550.000	87.550.000
226	Kab. Lamandau	-	20.000.000	-	-	99.876.000	119.876.000
227	Kab. Sukamara	-	-	-	-	85.776.126	85.776.126
228	Kab. Seruyan	11.646.000	-	-	1.906.200	-	13.552.200
229	Kab. Banjar	5.122.374	10.122.374	-	1.916.800	30.122.374	47.283.922
230	Kab. Barito Kuala	-	3.868.900	-	-	97.850.000	101.718.900
231	Kab. Hulu Sungai Selatan	-	2.814.000	-	-	87.350.000	90.164.000
232	Kab. Hulu Sungai Tengah	-	20.122.374	16.398.200	-	65.150.000	101.670.574
233	Kab. Hulu Sungai Utara	-	-	-	-	80.700.000	80.700.000
234	Kab. Kotabaru	-	-	-	1.947.400	-	1.947.400
235	Kab. Tabalong	17.000.000	-	-	2.015.500	75.177.000	94.192.500
236	Kab. Tanah Laut	-	-	-	1.893.300	90.250.000	92.143.300
237	Kab. Tapin	9.989.900	-	-	-	85.750.000	95.739.900
238	Kota Banjarbaru	-	-	-	-	70.250.000	70.250.000
239	Kota Banjarmasin	-	-	-	1.873.100	-	1.873.100
240	Kab. Balangan	-	-	14.617.300	-	-	14.617.300
241	Kab. Tanah Bumbu	9.987.500	-	-	1.950.700	-	11.938.200
242	Provinsi Kalimantan Timur	-	-	-	-	210.000.000	210.000.000
243	Kab. Berau	-	-	-	1.924.700	-	1.924.700
244	Kota Balikpapan	15.000.000	-	-	1.911.000	-	16.911.000
245	Kab. Kutai Barat	-	-	-	1.968.900	-	1.968.900
246	Kab. Kutai Timur	-	-	-	-	25.000.000	25.000.000
247	Kota Bontang	-	-	-	-	98.000.000	98.000.000
248	Kota Samarinda	15.122.374	-	-	1.851.700	80.000.000	96.974.074
249	Kab. Paser	-	-	-	1.928.700	-	1.928.700
250	Kab. Penajam Paser Utara	-	-	-	1.946.900	-	1.946.900
251	Provinsi Sulawesi Utara	-	-	-	-	9.852.900	9.852.900
252	Kab. Bolaang Mongondow	-	-	17.442.000	-	-	17.442.000
253	Kab. Minahasa	5.000.000	5.000.000	12.653.500	-	55.000.000	77.653.500
254	Kab. Kepulauan Sangihe	5.000.000	-	-	-	20.000.000	25.000.000
255	Kota Bitung	-	-	-	1.866.700	-	1.866.700
256	Kota Manado	-	-	-	1.870.400	100.000.000	101.870.400
257	Kab. Kepulauan Talaud	-	-	-	5.000.000	15.000.000	20.000.000
258	Kab. Minahasa Selatan	-	5.000.000	12.227.600	20.000.000	50.000.000	87.227.600
259	Kota Tomohon	-	-	-	1.824.400	15.000.000	16.824.400
260	Kab. Minahasa Utara	5.000.000	10.000.000	11.103.700	5.000.000	35.000.000	66.103.700
261	Kota Kotamobagu	15.000.000	-	-	6.882.200	35.000.000	56.882.200
262	Kab. Bolaang Mongondow Utara	-	-	11.667.800	-	35.000.000	46.667.800
263	Kab. Kep. Siau Tagulandang Biaro	5.000.000	-	-	5.000.000	15.000.000	25.000.000
264	Kab. Minahasa Tenggara	15.000.000	-	11.233.300	5.000.000	45.000.000	76.233.300
265	Kab. Bolaang Mongondow Timur	-	5.000.000	10.648.300	5.000.000	15.153.000	35.801.300
266	Kab. Bolaang Mongondow Selatan	10.000.000	-	10.520.800	-	40.000.000	60.520.800
267	Provinsi Sulawesi Tengah	27.000.000	-	-	-	150.000.000	177.000.000
268	Kab. Banggai	20.000.000	-	14.355.200	-	-	34.355.200
269	Kab. Buol	13.133.900	17.750.000	10.930.200	8.000.000	75.055.000	124.869.100
270	Kab. Toli-Toli	-	-	12.229.100	-	-	12.229.100
271	Kab. Donggala	22.314.225	37.057.089	11.822.000	21.865.400	31.643.077	124.701.791
272	Kab. Morowali	-	20.000.000	12.079.800	-	40.000.000	72.079.800
273	Kab. Poso	-	-	12.411.400	10.000.000	90.000.000	112.411.400
274	Kota Palu	-	10.720.000	-	-	89.280.000	100.000.000
275	Kab. Parigi Moutong	27.000.000	917.000	15.202.900	-	-	43.119.900
276	Kab. Tojo Una Una	14.893.800	8.000.000	-	1.954.400	92.000.000	116.848.200
277	Kab. Sigi	-	37.000.000	-	-	63.000.000	100.000.000
278	Kab. Banggai Laut	12.005.800	-	-	-	-	12.005.800
279	Kab. Morowali Utara	12.411.300	-	-	-	5.617.209	18.028.509
280	Provinsi Sulawesi Selatan	49.000.000	26.000.000	-	-	125.000.000	200.000.000
281	Kab. Bantaeng	30.000.000	-	-	-	70.000.000	100.000.000
282	Kab. Barru	30.000.000	48.700.000	12.481.900	11.862.000	10.000.000	113.043.900
283	Kab. Bone	25.000.000	2.714.400	27.318.800	1.914.200	75.000.000	131.947.400
284	Kab. Bulukumba	-	-	14.613.100	14.996.900	60.000.000	89.610.000
285	Kab. Enrekang	10.000.000	39.000.000	11.856.400	11.927.000	40.600.000	113.383.400
286	Kab. Gowa	12.523.000	29.900.000	17.790.200	-	-	60.213.200
287	Kab. Jeneponto	32.486.700	18.000.000	13.049.000	-	60.000.000	123.535.700
288	Kab. Luwu	13.066.100	1.956.500	18.913.600	20.000.000	80.000.000	133.936.200
289	Kab. Luwu Utara	-	-	13.839.700	-	-	13.839.700
290	Kab. Maros	-	1.886.100	15.178.900	-	-	17.065.000
291	Kab. Pangkajene Kepulauan	10.000.000	5.000.000	-	-	90.000.000	105.000.000
292	Kab. Pinrang	5.000.000	-	21.731.700	60.925.000	24.900.000	112.556.700
293	Kab. Kepulauan Selayar	15.000.000	-	-	-	10.000.000	25.000.000
294	Kab. Sidenreng Rappang	-	25.000.000	19.973.900	-	75.000.000	119.973.900
295	Kab. Sinjai	30.000.000	20.100.000	12.437.000	1.793.400	49.800.000	114.130.400
296	Kab. Soppeng	20.000.000	1.208.500	15.298.600	-	49.750.000	86.257.100
297	Kab. Takalar	27.000.000	29.900.000	13.231.500	-	43.000.000	113.131.500
298	Kab. Tana Toraja	10.000.000	4.595.331	12.004.600	8.488.730	80.000.000	115.088.661
299	Kab. Wajo	10.000.000	3.634.000	25.061.800	11.898.100	80.000.000	130.593.900
300	Kota Pare-pare	41.000.000	-	-	10.000.000	50.000.000	101.000.000
301	Kota Makassar	30.000.000	-	4.555.400	1.878.200	70.000.000	106.433.600
302	Kota Palopo	20.000.000	-	4.620.800	-	80.000.000	104.620.800
303	Kab. Luwu Timur	-	-	14.913.900	-	-	14.913.900
304	Kab. Toraja Utara	10.000.000	-	13.268.500	-	14.535.483	37.803.983
305	Provinsi Sulawesi Tenggara	-	-	-	-	12.906.000	12.906.000
306	Kab. Buton	-	-	-	-	35.000.000	35.000.000
307	Kab. Konawe	12.960.000	-	20.587.500	-	-	33.547.500
308	Kab. Kolaka	-	32.000.000	13.072.800	1.953.200	50.000.000	97.026.000
309	Kab. Muna	-	20.000.000	-	-	90.000.000	110.000.000
310	Kota Kendari	-	-	-	1.915.600	55.000.000	56.915.600
311	Kota Bau-bau	-	10.000.000	4.394.700	-	77.955.000	92.349.700
312	Kab. Konawe Selatan	-	28.000.000	13.176.700	1.898.300	25.000.000	68.075.000
313	Kab. Bombana	13.787.300	-	-	1.941.800	-	15.729.100
314	Kab. Wakatobi	-	10.000.000	-	-	41.000.000	51.000.000
315	Kab. Kolaka Utara	-	-	10.577.100	-	-	10.577.100
316	Kab. Konawe Utara	5.000.000	-	-	-	35.000.000	40.000.000

www.peraturan.go.id

LAMPIRAN XVII
RINCIAN ALOKASI
DANA ALOKASI KHUSUS TAMBAHAN PENDUKUNG PROGRAM PRIORITAS KABINET KERJA (P3K2)
DAN RINCIAN DANA ALOKASI KHUSUS TAMBAHAN USULAN DAERAH YANG DISETUJUI DPR RI TA 2015
MENURUT PROVINSI/KABUPATEN/KOTA

(dalam ribuan rupiah)

NO	DAERAH	BIDANG KESEHATAN	BIDANG INFRASTRUKTUR IRIGASI	BIDANG PERTANIAN	BIDANG SARANA PERDAGANGAN SUBBIDANG PASAR	BIDANG TRANSPORTASI SUBBIDANG INFRASTRUKTUR JALAN	TOTAL
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)
317	Kab. Kolaka Timur	-	-	13.318.500	-	-	13.318.500
318	Kab. Konawe Kepulauan	-	10.000.000	-	-	15.000.000	25.000.000
319	Kab. Muna Barat	-	30.000.000	11.007.600	-	80.000.000	121.007.600
320	Kab. Buton Tengah	19.941.000	-	-	-	50.000.000	69.941.000
321	Provinsi Bali	-	10.000.000	-	-	90.000.000	100.000.000
322	Kab. Badung	-	-	-	1.803.100	-	1.803.100
323	Kab. Bangli	12.000.000	-	-	-	-	12.000.000
324	Kab. Buleleng	-	-	13.678.500	-	-	13.678.500
325	Kab. Gianyar	-	-	14.025.800	1.811.100	-	15.836.900
326	Kab. Jembrana	12.000.000	-	11.837.200	-	-	23.837.200
327	Kab. Tabanan	-	-	17.011.600	-	-	17.011.600
328	Provinsi Nusa Tenggara Barat	-	-	-	-	150.000.000	150.000.000
329	Kab. Bima	11.684.800	-	18.955.700	-	-	30.640.500
330	Kab. Dompu	12.417.800	-	14.197.100	-	-	26.614.900
331	Kab. Lombok Barat	11.255.200	-	12.659.300	-	-	23.914.500
332	Kab. Lombok Tengah	13.159.500	-	21.246.300	-	-	34.405.800
333	Kab. Lombok Timur	11.269.400	-	21.662.500	-	25.700.000	58.631.900
334	Kab. Sumbawa	11.897.200	1.277.900	21.168.600	-	-	34.243.700
335	Kota Mataram	-	-	4.780.600	-	50.000.000	54.780.600
336	Kota Bima	-	-	4.598.700	-	50.000.000	54.598.700
337	Kab. Sumbawa Barat	12.495.600	-	12.114.000	-	-	24.609.600
338	Kab. Lombok Utara	12.383.200	-	11.762.300	-	-	24.145.500
339	Provinsi Nusa Tenggara Timur	20.000.000	-	-	-	18.955.400	38.955.400
340	Kab. Alor	13.762.600	-	-	1.949.000	-	15.711.600
341	Kab. Belu	-	-	11.794.700	-	-	11.794.700
342	Kab. Ende	28.306.000	-	11.011.100	-	50.000.000	89.317.100
343	Kab. Kupang	-	-	11.800.100	-	98.000.000	109.800.100
344	Kab. Manggarai	-	-	13.281.300	-	90.000.000	103.281.300
345	Kab. Ngada	-	-	10.993.300	-	25.000.000	35.993.300
346	Kab. Sikka	-	-	10.510.200	-	-	10.510.200
347	Kab. Sumba Barat	13.090.000	-	11.131.100	-	-	24.221.100
348	Kab. Sumba Timur	15.000.000	20.000.000	12.410.400	-	60.000.000	107.410.400
349	Kab. Timor Tengah Selatan	13.080.800	-	11.098.100	-	-	24.178.900
350	Kab. Timor Tengah Utara	26.362.100	-	11.178.500	-	-	37.540.600
351	Kota Kupang	15.000.000	24.900.000	-	-	-	39.900.000
352	Kab. Rote Ndao	11.075.700	-	11.829.300	-	-	22.905.000
353	Kab. Manggarai Barat	-	-	12.819.900	-	-	12.819.900
354	Kab. Nagekeo	10.000.000	-	11.584.900	-	50.000.000	71.584.900
355	Kab. Sumba Barat Daya	-	5.900.000	11.558.700	-	49.600.000	67.058.700
356	Kab. Sumba Tengah	11.545.000	-	10.705.200	-	-	22.250.200
357	Kab. Manggarai Timur	-	-	12.420.400	-	-	12.420.400
358	Kab. Sabu Raijua	10.920.900	-	-	-	-	10.920.900
359	Provinsi Maluku	20.000.000	-	-	-	110.292.600	130.292.600
360	Kab. Maluku Tenggara Barat	15.485.900	-	-	-	50.000.000	65.485.900
361	Kab. Maluku Tengah	10.837.500	-	-	-	-	10.837.500
362	Kab. Maluku Tenggara	20.000.000	16.000.000	-	14.000.000	50.000.000	100.000.000
363	Kab. Buru	-	17.500.000	11.624.400	2.500.000	-	31.624.400
364	Kota Ambon	-	-	-	-	35.000.000	35.000.000
365	Kab. Seram Bagian Barat	12.498.300	-	10.261.200	-	-	22.759.500
366	Kab. Seram Bagian Timur	-	40.000.000	10.355.700	1.959.300	50.000.000	102.315.000
367	Kab. Kepulauan Aru	12.136.800	-	-	-	42.200.000	54.336.800
368	Kota Tual	-	-	-	-	25.000.000	25.000.000
369	Kab. Buru Selatan	11.544.000	15.000.000	-	-	65.000.000	91.544.000
370	Provinsi Papua	-	95.000.000	-	-	200.000.000	295.000.000
371	Kab. Biak Numfor	-	-	-	-	99.000.000	99.000.000
372	Kab. Jayapura	-	15.000.000	-	-	80.000.000	95.000.000
373	Kab. Jayawijaya	-	-	-	-	100.000.000	100.000.000
374	Kab. Merauke	-	-	-	2.530.900	89.500.000	92.030.900
375	Kab. Mimika	-	50.000.000	-	-	95.200.000	145.200.000
376	Kab. Nabire	-	-	10.444.200	-	-	10.444.200
377	Kab. Paniai	13.628.400	-	-	-	-	13.628.400
378	Kab. Puncak Jaya	18.748.000	-	-	-	-	18.748.000
379	Kab. Kepulauan Yapen	14.203.900	20.500.000	-	-	79.000.000	113.703.900
380	Kab. Sarmi	-	42.000.000	-	15.000.000	42.000.000	99.000.000
381	Kab. Keerom	17.153.800	-	-	-	-	17.153.800
382	Kab. Yahukimo	17.279.200	30.000.000	-	-	30.000.000	77.279.200
383	Kab. Pegunungan Bintang	18.400.000	-	-	-	-	18.400.000
384	Kab. Tolikara	-	99.592.100	-	10.000.000	-	109.592.100
385	Kab. Boven Digoel	13.054.100	-	-	-	-	13.054.100
386	Kab. Mappi	18.243.900	-	-	-	-	18.243.900
387	Kab. Asmat	16.149.100	-	-	-	86.000.000	102.149.100
388	Kab. Waropen	-	15.000.000	-	15.000.000	20.000.000	50.000.000
389	Kab. Supiori	12.128.100	-	-	-	-	12.128.100
390	Kab. Mamberamo Raya	-	99.400.000	-	-	10.000.000	109.400.000
391	Kab. Mamberamo Tengah	-	99.300.000	-	-	13.000.000	112.300.000
392	Kab. Yalimo	-	99.800.000	-	-	-	99.800.000
393	Kab. Lanny Jaya	14.088.300	-	-	-	100.000.000	114.088.300
394	Kab. Nduga	-	9.998.700	-	-	-	9.998.700
395	Kab. Puncak	-	-	-	-	20.000.000	20.000.000
396	Provinsi Maluku Utara	-	-	-	-	100.000.000	100.000.000
397	Kab. Halmahera Barat	38.209.300	-	-	-	19.800.000	58.009.300
398	Kab. Halmahera Timur	12.519.800	-	11.653.400	-	-	24.173.200
399	Kab. Kepulauan Sula	14.969.000	30.000.000	-	-	70.000.000	114.969.000
400	Kab. Halmahera Selatan	-	15.000.000	-	-	65.000.000	80.000.000
401	Kab. Pulau Morotai	13.225.100	-	-	-	-	13.225.100
402	Kab. Pulau Taliabu	-	20.000.000	-	-	80.000.000	100.000.000
403	Kab. Lebak	11.922.100	3.020.800	19.733.500	-	-	34.676.400
404	Kab. Pandeglang	13.425.200	5.061.100	23.670.800	-	-	42.157.100
405	Kab. Serang	-	-	23.475.800	1.880.500	-	25.356.300
406	Kab. Tangerang	13.869.700	-	-	1.906.000	-	15.775.700
407	Kota Cilegon	-	-	4.483.900	1.847.900	-	6.331.800
408	Kota Serang	-	-	6.373.700	1.828.300	-	8.202.000
409	Kab. Bangka	20.077.323	16.000.000	-	-	41.000.000	77.077.323
410	Kota Pangkal Pinang	5.303.403	26.000.000	-	10.500.000	20.305.000	62.108.403
411	Kab. Bangka Selatan	-	-	11.145.500	-	-	11.145.500
412	Kab. Bangka Tengah	-	10.000.000	-	-	40.000.000	50.000.000
413	Provinsi Gorontalo	-	-	-	-	9.426.200	9.426.200
414	Kab. Boalemo	-	15.000.000	11.422.700	-	65.000.000	91.422.700
415	Kab. Gorontalo	-	-	13.947.700	-	-	13.947.700
416	Kota Gorontalo	10.000.000	15.000.000	4.269.300	-	65.000.000	94.269.300
417	Kab. Pohuwato	12.937.300	-	11.023.300	-	-	23.960.600
418	Kab. Bone Bolango	-	-	10.685.800	1.919.000	-	12.604.800
419	Kab. Gorontalo Utara	-	-	11.223.000	-	-	11.223.000
420	Kab. Kepulauan Meranti	28.000.000	-	-	16.959.200	-	44.959.200
421	Kab. Natuna	-	-	-	-	50.000.000	50.000.000

www.peraturan.go.id

LAMPIRAN XVII
RINCIAN ALOKASI
DANA ALOKASI KHUSUS TAMBAHAN PENDUKUNG PROGRAM PRIORITAS KABINET KERJA (P3K2)
DAN RINCIAN DANA ALOKASI KHUSUS TAMBAHAN USULAN DAERAH YANG DISETUJUI DPR RI TA 2015
MENURUT PROVINSI/KABUPATEN/KOTA

(dalam ribuan rupiah)

NO	DAERAH	BIDANG KESEHATAN	BIDANG INFRASTRUKTUR IRIGASI	BIDANG PERTANIAN	BIDANG SARANA PERDAGANGAN SUBBIDANG PASAR	BIDANG TRANSPORTASI SUBBIDANG INFRASTRUKTUR JALAN	TOTAL
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)
422	Kab. Karimun	-	-	-	1.830.100	-	1.830.100
423	Kota Batam	20.000.000	-	-	1.891.400	10.000.000	31.891.400
424	Kab. Lingga	-	-	-	1.880.700	-	1.880.700
425	Kab. Kepulauan Anambas	9.999.700	-	-	1.988.200	-	11.987.900
426	Provinsi Papua Barat	-	-	-	-	16.498.300	16.498.300
427	Kab. Sorong	-	39.110.000	-	-	80.000.000	119.110.000
428	Kab. Manokwari	-	-	10.775.900	-	-	10.775.900
429	Kab. Fak Fak	-	-	-	-	100.000.000	100.000.000
430	Kab. Sorong Selatan	13.827.600	35.000.000	-	-	65.000.000	113.827.600
431	Kab. Raja Ampat	13.044.400	-	-	-	95.000.000	108.044.400
432	Kab. Teluk Bintuni	15.275.700	20.000.000	-	-	80.000.000	115.275.700
433	Kab. Teluk Wondama	12.006.700	-	-	-	-	12.006.700
434	Kab. Tambrauw	-	-	-	-	80.000.000	80.000.000
435	Provinsi Sulawesi Barat	-	-	-	-	12.068.600	12.068.600
436	Kab. Majene	-	20.000.000	-	1.916.600	-	21.916.600
437	Kab. Mamuju	-	39.700.000	-	-	10.200.000	49.900.000
438	Kab. Polewali Mandar	22.882.739	-	13.771.400	1.778.000	-	38.432.139
439	Kab. Mamasa	15.000.000	40.000.000	13.233.700	16.962.300	30.000.000	115.196.000
440	Kab. Mamuju Utara	20.000.000	-	-	-	80.000.000	100.000.000
441	Kab. Mamuju Tengah	15.000.000	48.000.000	-	1.905.800	-	64.905.800
442	Kab. Bulungan	-	-	-	1.959.300	-	1.959.300
443	Kab. Malinau	19.877.625	-	-	2.061.800	30.122.375	52.061.800
444	Kab. Nunukan	10.936.600	-	-	1.908.700	-	12.845.300
445	Kab. Tana Tidung	-	-	-	2.334.800	-	2.334.800
446	Kota Tarakan	-	-	-	1.924.900	-	1.924.900
	Jumlah Kab/Kota	**179**	**169**	**259**	**167**	**204**	**430**
	Jumlah Total	**2.673.139.364**	**2.995.596.993**	**4.000.000.000**	**892.410.300**	**10.758.853.344**	**21.320.000.000**
	Jumlah Provinsi	**5**	**3**	**-**	**-**	**16**	**16**
	Jumlah Total	**154.000.000**	**131.000.000**	**-**	**-**	**1.395.000.000**	**1.680.000.000**
	Total Daerah	**184**	**172**	**259**	**167**	**220**	**446**
	Jumlah Total Nasional	**2.827.139.364**	**3.126.596.993**	**4.000.000.000**	**892.410.300**	**12.153.853.344**	**23.000.000.000**

PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA,

ttd.

JOKO WIDODO

www.peraturan.go.id

LAMPIRAN XVIII

PERATURAN PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA
NOMOR 36 TAHUN 2015

TENTANG
RINCIAN ANGGARAN
PENDAPATAN DAN BELANJA NEGARA
TAHUN ANGGARAN 2015

RINCIAN TUNJANGAN PROFESI GURU PEGAWAI NEGERI SIPIL DAERAH MENURUT PROVINSI/KABUPATEN/KOTA

www.peraturan.go.id

LAMPIRAN XVIII
RINCIAN TUNJANGAN PROFESI GURU PEGAWAI NEGERI SIPIL DAERAH
MENURUT PROVINSI/KABUPATEN/KOTA

(Dalam Ribuan Rupiah)

NO	NAMA DAERAH	JUMLAH
I	**Provinsi Aceh**	-
1	Kab. Aceh Barat	69.449.415
2	Kab. Aceh Besar	156.332.292
3	Kab. Aceh Selatan	97.155.661
4	Kab. Aceh Singkil	26.735.411
5	Kab. Aceh Tengah	96.825.607
6	Kab. Aceh Tenggara	78.362.570
7	Kab. Aceh Timur	105.624.295
8	Kab. Aceh Utara	191.998.250
9	Kab. Bireuen	190.632.546
10	Kab. Pidie	176.992.847
11	Kab. Simeulue	23.957.800
12	Kota Banda Aceh	129.490.406
13	Kota Sabang	18.590.462
14	Kota Langsa	70.021.748
15	Kota Lhokseumawe	68.006.678
16	Kab. Gayo Lues	21.774.902
17	Kab. Aceh Barat Daya	54.688.704
18	Kab. Aceh Jaya	22.772.276
19	Kab. Nagan Raya	58.434.846
20	Kab. Aceh Tamiang	80.579.631
21	Kab. Bener Meriah	47.155.143
22	Kab. Pidie Jaya	66.240.689
23	Kota Subulussalam	18.672.604
II	**Provinsi Sumatera Utara**	-
1	Kab. Asahan	174.828.146
2	Kab. Dairi	118.212.037
3	Kab. Deli Serdang	439.565.474
4	Kab. Karo	161.732.913
5	Kab. Labuhanbatu	115.066.633
6	Kab. Langkat	308.480.659
7	Kab. Mandailing Natal	147.225.760
8	Kab. Nias	20.478.019
9	Kab. Simalungun	332.208.680
10	Kab. Tapanuli Selatan	91.091.008
11	Kab. Tapanuli Tengah	91.176.352
12	Kab. Tapanuli Utara	136.929.381
13	Kab. Toba Samosir	98.465.060
14	Kota Binjai	107.605.204
15	Kota Medan	431.873.314
16	Kota Pematang Siantar	119.784.134
17	Kota Sibolga	41.748.945
18	Kota Tanjung Balai	42.543.989
19	Kota Tebing Tinggi	66.062.873
20	Kota Padang Sidempuan	105.391.944
21	Kab. Pakpak Bharat	17.287.417
22	Kab. Nias Selatan	23.178.705
23	Kab. Humbang Hasundutan	85.120.374
24	Kab. Serdang Bedagai	177.995.706
25	Kab. Samosir	64.756.992
26	Kab. Batu Bara	103.463.924
27	Kab. Padang Lawas	48.183.783
28	Kab. Padang Lawas Utara	50.619.685
29	Kab. Labuhanbatu Selatan	50.355.804
30	Kab. Labuhanbatu Utara	84.970.382
31	Kab. Nias Utara	25.607.878
32	Kab. Nias Barat	20.087.024
33	Kota Gunungsitoli	50.462.157
III	**Provinsi Sumatera Barat**	-
1	Kab. Limapuluh Kota	178.622.981
2	Kab. Agam	213.071.979
3	Kab. Kepulauan Mentawai	12.799.089
4	Kab. Padang Pariaman	188.842.240
5	Kab. Pasaman	99.476.106

www.peraturan.go.id

LAMPIRAN XVIII
RINCIAN TUNJANGAN PROFESI GURU PEGAWAI NEGERI SIPIL DAERAH
MENURUT PROVINSI/KABUPATEN/KOTA

(Dalam Ribuan Rupiah)

NO	NAMA DAERAH	JUMLAH
6	Kab. Pesisir Selatan	205.183.210
7	Kab. Sijunjung	86.214.633
8	Kab. Solok	159.357.791
9	Kab. Tanah Datar	185.034.852
10	Kota Bukit Tinggi	62.087.073
11	Kota Padang Panjang	37.112.129
12	Kota Padang	356.066.451
13	Kota Payakumbuh	68.425.507
14	Kota Sawahlunto	41.958.760
15	Kota Solok	49.937.232
16	Kota Pariaman	61.119.783
17	Kab. Pasaman Barat	104.824.950
18	Kab. Dharmasraya	69.119.403
19	Kab. Solok Selatan	56.025.788
IV	**Provinsi Riau**	-
1	Kab. Bengkalis	156.528.849
2	Kab. Indragiri Hilir	153.736.051
3	Kab. Indragiri Hulu	126.381.276
4	Kab. Kampar	247.284.903
5	Kab. Kuantan Singingi	152.480.378
6	Kab. Pelalawan	78.779.732
7	Kab. Rokan Hilir	100.645.447
8	Kab. Rokan Hulu	114.885.873
9	Kab. Siak	96.441.284
10	Kota Dumai	84.264.093
11	Kota Pekanbaru	250.951.585
12	Kab. Kepulauan Meranti	49.447.682
V	**Provinsi Jambi**	-
1	Kab. Batang Hari	84.345.507
2	Kab. Bungo	102.961.622
3	Kab. Kerinci	117.208.369
4	Kab. Merangin	104.279.884
5	Kab. Muaro Jambi	127.489.608
6	Kab. Sarolangun	74.979.635
7	Kab. Tanjung Jabung Barat	69.102.890
8	Kab. Tanjung Jabung Timur	79.269.111
9	Kab. Tebo	81.565.055
10	Kota Jambi	182.508.791
11	Kota Sungai Penuh	67.620.524
VI	**Provinsi Sumatera Selatan**	-
1	Kab. Lahat	149.941.383
2	Kab. Musi Banyuasin	111.977.258
3	Kab. Musi Rawas	97.444.673
4	Kab. Muara Enim	163.982.250
5	Kab. Ogan Komering Ilir	175.696.073
6	Kab. Ogan Komering Ulu	104.118.193
7	Kota Palembang	475.324.745
8	Kota Prabumulih	65.418.106
9	Kota Pagar Alam	48.253.518
10	Kota Lubuk Linggau	75.728.203
11	Kab. Banyuasin	156.175.601
12	Kab. Ogan Ilir	126.057.975
13	Kab. Ogan Komering Ulu Timur	151.259.792
14	Kab. Ogan Komering Ulu Selatan	52.889.825
15	Kab. Empat Lawang	42.563.966
16	Kab. Penukal Abab Lematang Ilir	22.442.909
17	Kab. Musi Rawas Utara	18.246.075
VII	**Provinsi Bengkulu**	-
1	Kab. Bengkulu Selatan	98.554.538
2	Kab. Bengkulu Utara	96.233.393
3	Kab. Rejang Lebong	105.453.245
4	Kota Bengkulu	139.890.966
5	Kab. Kaur	39.153.151
6	Kab. Seluma	69.742.689

www.peraturan.go.id

LAMPIRAN XVIII
RINCIAN TUNJANGAN PROFESI GURU PEGAWAI NEGERI SIPIL DAERAH
MENURUT PROVINSI/KABUPATEN/KOTA

(Dalam Ribuan Rupiah)

NO	NAMA DAERAH	JUMLAH
7	Kab. Mukomuko	45.887.963
8	Kab. Lebong	37.884.765
9	Kab. Kepahiang	46.255.857
10	Kab. Bengkulu Tengah	50.197.676
VIII	Provinsi Lampung	-
1	Kab. Lampung Barat	67.274.022
2	Kab. Lampung Selatan	219.051.221
3	Kab. Lampung Tengah	366.250.808
4	Kab. Lampung Utara	196.186.333
5	Kab. Lampung Timur	281.090.969
6	Kab. Tanggamus	157.980.081
7	Kab. Tulang Bawang	68.452.358
8	Kab. Way Kanan	109.315.492
9	Kota Bandar Lampung	282.542.222
10	Kota Metro	82.292.428
11	Kab. Pesawaran	123.328.376
12	Kab. Pringsewu	162.331.928
13	Kab. Mesuji	25.084.226
14	Kab. Tulang Bawang Barat	63.621.817
15	Kab. Pesisir Barat	42.505.655
IX	**Provinsi DKI Jakarta**	1.746.656.471
X	**Provinsi Jawa Barat**	-
1	Kab. Bandung	647.450.106
2	Kab. Bekasi	344.189.710
3	Kab. Bogor	511.526.939
4	Kab. Ciamis	373.351.707
5	Kab. Cianjur	456.849.426
6	Kab. Cirebon	466.270.457
7	Kab. Garut	576.742.222
8	Kab. Indramayu	392.295.829
9	Kab. Karawang	389.268.623
10	Kab. Kuningan	398.342.139
11	Kab. Majalengka	365.888.936
12	Kab. Purwakarta	231.233.008
13	Kab. Subang	344.858.429
14	Kab. Sukabumi	383.633.879
15	Kab. Sumedang	407.904.457
16	Kab. Tasikmalaya	441.888.744
17	Kota Bandung	628.331.108
18	Kota Bekasi	275.366.338
19	Kota Bogor	199.998.344
20	Kota Cirebon	120.882.326
21	Kota Depok	184.227.086
22	Kota Sukabumi	95.210.098
23	Kota Tasikmalaya	225.766.265
24	Kota Cimahi	146.009.580
25	Kota Banjar	58.785.154
26	Kab. Bandung Barat	291.638.020
27	Kab. Pangandaran	152.704.461
XI	**Provinsi Jawa Tengah**	-
1	Kab. Banjarnegara	244.203.674
2	Kab. Banyumas	385.836.657
3	Kab. Batang	196.228.922
4	Kab. Blora	255.398.131
5	Kab. Boyolali	319.469.721
6	Kab. Brebes	358.810.793
7	Kab. Cilacap	434.197.635
8	Kab. Demak	216.490.048
9	Kab. Grobogan	298.302.282
10	Kab. Jepara	252.177.626
11	Kab. Karanganyar	303.429.964
12	Kab. Kebumen	346.575.321
13	Kab. Kendal	255.390.341
14	Kab. Klaten	413.181.317

www.peraturan.go.id

LAMPIRAN XVIII
RINCIAN TUNJANGAN PROFESI GURU PEGAWAI NEGERI SIPIL DAERAH
MENURUT PROVINSI/KABUPATEN/KOTA

(Dalam Ribuan Rupiah)

NO	NAMA DAERAH	JUMLAH
15	Kab. Kudus	227.776.691
16	Kab. Magelang	333.213.025
17	Kab. Pati	315.445.942
18	Kab. Pekalongan	237.695.327
19	Kab. Pemalang	295.959.400
20	Kab. Purbalingga	248.495.085
21	Kab. Purworejo	275.963.174
22	Kab. Rembang	188.362.620
23	Kab. Semarang	231.795.715
24	Kab. Sragen	336.625.962
25	Kab. Sukoharjo	287.860.263
26	Kab. Tegal	350.179.981
27	Kab. Temanggung	178.393.689
28	Kab. Wonogiri	367.604.106
29	Kab. Wonosobo	196.191.182
30	Kota Magelang	76.034.704
31	Kota Pekalongan	80.988.598
32	Kota Salatiga	64.574.160
33	Kota Semarang	350.615.952
34	Kota Surakarta	249.447.709
35	Kota Tegal	93.648.427
XII	**Provinsi DI Yogyakarta**	-
1	Kab. Bantul	301.336.087
2	Kab. Gunung Kidul	263.258.598
3	Kab. Kulon Progo	208.841.571
4	Kab. Sleman	317.777.102
5	Kota Yogyakarta	188.613.999
XIII	**Provinsi Jawa Timur**	-
1	Kab. Bangkalan	219.943.939
2	Kab. Banyuwangi	388.515.273
3	Kab. Blitar	361.497.606
4	Kab. Bojonegoro	312.542.329
5	Kab. Bondowoso	206.392.147
6	Kab. Gresik	233.212.552
7	Kab. Jember	467.188.346
8	Kab. Jombang	303.877.641
9	Kab. Kediri	356.112.947
10	Kab. Lamongan	307.580.040
11	Kab. Lumajang	259.088.965
12	Kab. Madiun	235.925.011
13	Kab. Magetan	281.727.549
14	Kab. Malang	470.101.642
15	Kab. Mojokerto	276.338.793
16	Kab. Nganjuk	342.490.070
17	Kab. Ngawi	300.993.317
18	Kab. Pacitan	212.832.373
19	Kab. Pamekasan	220.475.175
20	Kab. Pasuruan	300.839.153
21	Kab. Ponorogo	310.342.095
22	Kab. Probolinggo	226.963.302
23	Kab. Sampang	168.568.504
24	Kab. Sidoarjo	379.631.707
25	Kab. Situbondo	202.368.117
26	Kab. Sumenep	237.734.235
27	Kab. Trenggalek	272.129.117
28	Kab. Tuban	302.566.453
29	Kab. Tulungagung	367.072.885
30	Kota Blitar	78.085.392
31	Kota Kediri	114.960.439
32	Kota Madiun	131.899.241
33	Kota Malang	202.304.350
34	Kota Mojokerto	49.875.419
35	Kota Pasuruan	60.306.944
36	Kota Probolinggo	84.169.421

www.peraturan.go.id

LAMPIRAN XVIII
RINCIAN TUNJANGAN PROFESI GURU PEGAWAI NEGERI SIPIL DAERAH
MENURUT PROVINSI/KABUPATEN/KOTA

(Dalam Ribuan Rupiah)

NO	NAMA DAERAH	JUMLAH
37	Kota Surabaya	462.323.217
38	Kota Batu	55.476.876
XIV	**Provinsi Kalimantan Barat**	-
1	Kab. Bengkayang	65.946.918
2	Kab. Landak	83.895.979
3	Kab. Kapuas Hulu	86.291.392
4	Kab. Ketapang	116.380.841
5	Kab. Mempawah	89.605.151
6	Kab. Sambas	180.558.202
7	Kab. Sanggau	113.090.828
8	Kab. Sintang	99.489.764
9	Kota Pontianak	158.485.102
10	Kota Singkawang	71.107.941
11	Kab. Sekadau	41.254.850
12	Kab. Melawi	35.963.554
13	Kab. Kayong Utara	20.823.334
14	Kab. Kubu Raya	134.977.342
XV	**Provinsi Kalimantan Tengah**	-
1	Kab. Barito Selatan	66.269.201
2	Kab. Barito Utara	80.834.778
3	Kab. Kapuas	159.915.466
4	Kab. Kotawaringin Barat	68.187.880
5	Kab. Kotawaringin Timur	92.468.359
6	Kota Palangkaraya	131.812.222
7	Kab. Katingan	55.384.258
8	Kab. Seruyan	30.394.751
9	Kab. Sukamara	15.786.235
10	Kab. Lamandau	27.042.840
11	Kab. Gunung Mas	51.411.520
12	Kab. Pulang Pisau	70.380.896
13	Kab. Murung Raya	46.577.624
14	Kab. Barito Timur	58.963.545
XVI	**Provinsi Kalimantan Selatan**	-
1	Kab. Banjar	139.993.646
2	Kab. Barito Kuala	95.314.293
3	Kab. Hulu Sungai Selatan	107.187.456
4	Kab. Hulu Sungai Tengah	116.340.415
5	Kab. Hulu Sungai Utara	84.340.010
6	Kab. Kotabaru	60.152.464
7	Kab. Tabalong	91.485.125
8	Kab. Tanah Laut	95.194.651
9	Kab. Tapin	67.718.564
10	Kota Banjarbaru	71.641.287
11	Kota Banjarmasin	179.326.855
12	Kab. Balangan	50.518.401
13	Kab. Tanah Bumbu	62.397.740
XVII	**Provinsi Kalimantan Timur**	-
1	Kab. Berau	55.617.301
2	Kab. Kutai Kartanegara	274.484.757
3	Kab. Kutai Barat	43.111.968
4	Kab. Kutai Timur	60.515.330
5	Kab. Paser	72.150.629
6	Kota Balikpapan	122.407.124
7	Kota Bontang	35.329.490
8	Kota Samarinda	207.551.526
9	Kab. Penajam Paser Utara	48.612.022
10	Kab. Mahakam Ulu	3.695.775
XVIII	**Provinsi Sulawesi Utara**	-
1	Kab. Bolaang Mongondow	72.216.907
2	Kab. Minahasa	174.656.870
3	Kab. Kepulauan Sangihe	67.585.014
4	Kota Bitung	63.783.946
5	Kota Manado	186.806.073
6	Kab. Kepulauan Talaud	50.750.085

www.peraturan.go.id

LAMPIRAN XVIII
RINCIAN TUNJANGAN PROFESI GURU PEGAWAI NEGERI SIPIL DAERAH
MENURUT PROVINSI/KABUPATEN/KOTA

(Dalam Ribuan Rupiah)

NO	NAMA DAERAH	JUMLAH
7	Kab. Minahasa Selatan	111.903.366
8	Kota Tomohon	51.080.259
9	Kab. Minahasa Utara	82.914.704
10	Kab. Kep. Siau Tagulandang Biaro	36.140.364
11	Kota Kotamobagu	54.578.738
12	Kab. Bolaang Mongondow Utara	22.966.661
13	Kab. Minahasa Tenggara	45.188.558
14	Kab. Bolaang Mongondow Timur	15.793.737
15	Kab. Bolaang Mongondow Selatan	11.629.221
XIX	**Provinsi Sulawesi Tengah**	-
1	Kab. Banggai	143.008.313
2	Kab. Banggai Kepulauan	39.229.403
3	Kab. Buol	42.355.442
4	Kab. Toli-Toli	61.291.142
5	Kab. Donggala	88.866.512
6	Kab. Morowali	40.707.620
7	Kab. Poso	103.992.454
8	Kota Palu	165.553.469
9	Kab. Parigi Moutong	98.240.827
10	Kab. Tojo Una Una	34.165.363
11	Kab. Sigi	78.324.647
12	Kab. Banggai Laut	13.463.770
13	Kab. Morowali Utara	37.676.115
XX	**Provinsi Sulawesi Selatan**	-
1	Kab. Bantaeng	75.385.592
2	Kab. Barru	103.350.311
3	Kab. Bone	293.713.533
4	Kab. Bulukumba	169.320.766
5	Kab. Enrekang	94.614.549
6	Kab. Gowa	190.444.834
7	Kab. Jeneponto	123.717.198
8	Kab. Luwu	108.373.114
9	Kab. Luwu Utara	78.714.737
10	Kab. Maros	126.025.153
11	Kab. Pangkajene Kepulauan	138.752.023
12	Kota Palopo	71.776.292
13	Kab. Luwu Timur	59.324.043
14	Kab. Pinrang	134.783.773
15	Kab. Sinjai	126.679.383
16	Kab. Kepulauan Selayar	63.553.374
17	Kab. Sidenreng Rappang	117.660.367
18	Kab. Soppeng	144.666.270
19	Kab. Takalar	119.754.513
20	Kab. Tana Toraja	91.174.516
21	Kab. Wajo	149.628.009
22	Kota Pare-pare	84.517.102
23	Kota Makassar	377.762.924
24	Kab. Toraja Utara	88.095.046
XXI	**Provinsi Sulawesi Tenggara**	-
1	Kab. Buton	110.782.249
2	Kab. Konawe	92.909.029
3	Kab. Kolaka	75.893.762
4	Kab. Muna	160.447.072
5	Kota Kendari	137.318.633
6	Kota Bau-bau	83.522.263
7	Kab. Konawe Selatan	86.939.313
8	Kab. Bombana	49.210.792
9	Kab. Wakatobi	46.918.382
10	Kab. Kolaka Utara	34.055.540
11	Kab. Konawe Utara	19.483.325
12	Kab. Buton Utara	21.623.076
13	Kab. Konawe Kepulauan	8.175.766
14	Kab. Kolaka Timur	25.963.547
15	Kab. Muna Barat	-

www.peraturan.go.id

LAMPIRAN XVIII
RINCIAN TUNJANGAN PROFESI GURU PEGAWAI NEGERI SIPIL DAERAH
MENURUT PROVINSI/KABUPATEN/KOTA

(Dalam Ribuan Rupiah)

NO	NAMA DAERAH	JUMLAH
16	Kab. Buton Tengah	-
17	Kab. Buton Selatan	-
XXII	**Provinsi Bali**	-
1	Kab. Badung	148.281.399
2	Kab. Bangli	76.141.352
3	Kab. Buleleng	263.243.582
4	Kab. Gianyar	179.160.148
5	Kab. Jembrana	81.183.988
6	Kab. Karangasem	154.415.223
7	Kab. Klungkung	89.697.275
8	Kab. Tabanan	188.228.044
9	Kota Denpasar	153.395.932
XXIII	**Provinsi Nusa Tenggara Barat**	-
1	Kab. Bima	202.091.185
2	Kab. Dompu	93.586.761
3	Kab. Lombok Barat	162.246.727
4	Kab. Lombok Tengah	237.533.007
5	Kab. Lombok Timur	319.906.200
6	Kab. Sumbawa	141.971.884
7	Kota Mataram	130.740.598
8	Kota Bima	96.219.157
9	Kab. Sumbawa Barat	43.888.190
10	Kab. Lombok Utara	46.188.115
XXIV	**Provinsi Nusa Tenggara Timur**	-
1	Kab. Alor	55.633.438
2	Kab. Belu	47.650.595
3	Kab. Ende	88.750.843
4	Kab. Flores Timur	78.696.378
5	Kab. Kupang	97.666.084
6	Kab. Lembata	31.483.178
7	Kab. Manggarai	74.355.262
8	Kab. Ngada	47.726.567
9	Kab. Sikka	77.283.951
10	Kab. Sumba Barat	23.071.641
11	Kab. Sumba Timur	53.789.752
12	Kab. Timor Tengah Selatan	98.540.156
13	Kab. Timor Tengah Utara	62.638.840
14	Kota Kupang	126.127.423
15	Kab. Rote Ndao	32.221.382
16	Kab. Manggarai Barat	48.456.417
17	Kab. Nagekeo	41.532.238
18	Kab. Sumba Barat Daya	29.658.349
19	Kab. Sumba Tengah	14.074.407
20	Kab. Manggarai Timur	50.663.804
21	Kab. Sabu Raijua	15.934.141
22	Kab. Malaka	49.792.228
XXV	**Provinsi Maluku**	-
1	Kab. Maluku Tenggara Barat	56.579.803
2	Kab. Maluku Tengah	142.361.786
3	Kab. Maluku Tenggara	37.735.757
4	Kab. Buru	35.558.138
5	Kota Ambon	165.833.716
6	Kab. Seram Bagian Barat	50.162.120
7	Kab. Seram Bagian Timur	13.907.476
8	Kab. Kepulauan Aru	14.137.613
9	Kota Tual	16.656.006
10	Kab. Maluku Barat Daya	17.886.534
11	Kab. Buru Selatan	13.052.017
XXVI	**Provinsi Papua**	-
1	Kab. Biak Numfor	35.787.305
2	Kab. Jayapura	47.652.481
3	Kab. Jayawijaya	20.630.955
4	Kab. Merauke	57.043.694
5	Kab. Mimika	25.573.958

www.peraturan.go.id

LAMPIRAN XVIII
RINCIAN TUNJANGAN PROFESI GURU PEGAWAI NEGERI SIPIL DAERAH
MENURUT PROVINSI/KABUPATEN/KOTA

(Dalam Ribuan Rupiah)

NO	NAMA DAERAH	JUMLAH
6	Kab. Nabire	37.385.354
7	Kab. Paniai	8.859.211
8	Kab. Puncak Jaya	2.405.460
9	Kab. Kepulauan Yapen	33.628.261
10	Kota Jayapura	83.009.468
11	Kab. Sarmi	4.844.410
12	Kab. Keerom	19.820.640
13	Kab. Yahukimo	3.520.268
14	Kab. Pegunungan Bintang	3.476.390
15	Kab. Tolikara	1.645.367
16	Kab. Boven Digoel	5.762.653
17	Kab. Mappi	9.872.044
18	Kab. Asmat	8.708.668
19	Kab. Waropen	6.039.239
20	Kab. Supiori	4.717.360
21	Kab. Mamberamo Raya	1.796.608
22	Kab. Mamberamo Tengah	346.735
23	Kab. Yalimo	148.792
24	Kab. Lanny Jaya	1.584.173
25	Kab. Nduga	199.437
26	Kab. Dogiyai	6.489.375
27	Kab. Puncak	781.095
28	Kab. Intan Jaya	669.837
29	Kab. Deiyai	1.785.187
XXVII	**Provinsi Maluku Utara**	-
1	Kab. Halmahera Tengah	15.644.635
2	Kota Ternate	78.104.765
3	Kab. Halmahera Barat	41.973.411
4	Kab. Halmahera Timur	14.670.620
5	Kab. Halmahera Selatan	41.022.164
6	Kab. Halmahera Utara	38.330.788
7	Kab. Kepulauan Sula	32.795.615
8	Kota Tidore Kepulauan	45.976.226
9	Kab. Pulau Morotai	6.360.404
10	Kab. Pulau Taliabu	6.636.982
XXVIII	**Provinsi Banten**	-
1	Kab. Lebak	337.405.705
2	Kab. Pandeglang	321.737.710
3	Kab. Serang	265.249.629
4	Kab. Tangerang	304.041.731
5	Kota Cilegon	100.197.782
6	Kota Tangerang	240.257.189
7	Kota Serang	138.258.470
8	Kota Tangerang Selatan	128.457.038
XXIX	**Provinsi Bangka Belitung**	-
1	Kab. Bangka	74.022.354
2	Kab. Belitung	60.751.501
3	Kota Pangkal Pinang	53.368.979
4	Kab. Bangka Selatan	42.820.781
5	Kab. Bangka Tengah	44.002.661
6	Kab. Bangka Barat	41.360.335
7	Kab. Belitung Timur	50.999.987
XXX	**Provinsi Gorontalo**	-
1	Kab. Boalemo	37.439.371
2	Kab. Gorontalo	143.180.136
3	Kota Gorontalo	103.589.651
4	Kab. Pohuwato	35.223.173
5	Kab. Bone Bolango	63.028.992
6	Kab. Gorontalo Utara	32.151.408
XXXI	**Provinsi Kepulauan Riau**	-
1	Kab. Natuna	20.800.449
2	Kab. Kepulauan Anambas	10.041.301
3	Kab. Karimun	60.324.862
4	Kota Batam	78.902.882

www.peraturan.go.id

LAMPIRAN XVIII
RINCIAN TUNJANGAN PROFESI GURU PEGAWAI NEGERI SIPIL DAERAH
MENURUT PROVINSI/KABUPATEN/KOTA

(Dalam Ribuan Rupiah)

NO	NAMA DAERAH	JUMLAH
5	Kota Tanjung Pinang	64.086.117
6	Kab. Lingga	24.730.419
7	Kab. Bintan	40.724.487
XXXII	**Provinsi Papua Barat**	-
1	Kab. Fak Fak	23.734.288
2	Kab. Manokwari	48.437.288
3	Kab. Sorong	38.398.474
4	Kota Sorong	48.945.959
5	Kab. Raja Ampat	10.840.627
6	Kab. Sorong Selatan	8.963.482
7	Kab. Teluk Bintuni	5.577.487
8	Kab. Teluk Wondama	1.695.592
9	Kab. Kaimana	17.818.237
10	Kab. Maybrat	3.743.939
11	Kab. Tambrauw	1.046.034
12	Kab. Manokwari Selatan	2.975.905
13	Kab. Pegunungan Arfak	1.768.066
XXXIII	**Provinsi Sulawesi Barat**	-
1	Kab. Majene	79.407.155
2	Kab. Mamuju	74.248.851
3	Kab. Polewali Mandar	135.439.160
4	Kab. Mamasa	46.566.647
5	Kab. Mamuju Utara	22.167.318
6	Kab. Mamuju Tengah	23.377.837
XXXIV	**Provinsi Kalimantan Utara**	-
1	Kab. Bulungan	48.898.865
2	Kab. Malinau	18.604.741
3	Kab. Nunukan	30.814.091
4	Kota Tarakan	51.063.755
5	Kab. Tana Tidung	4.679.761
	TOTAL ALOKASI TPG PNSD PROVINSI	**1.746.656.471**
	TOTAL ALOKASI TPG PNSD KAB/KOTA	**64.715.126.297**
	DANA CADANGAN TPG PNSD	**3.790.887.232**
	TOTAL ALOKASI TPG PNSD NASIONAL	**70.252.670.000**

PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA,

JOKO WIDODO

www.peraturan.go.id

LAMPIRAN XIX

PERATURAN PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA
NOMOR 36 TAHUN 2015

TENTANG
RINCIAN ANGGARAN
PENDAPATAN DAN BELANJA NEGARA
TAHUN ANGGARAN 2015

RINCIAN DANA TAMBAHAN PENGHASILAN GURU PEGAWAI NEGERI SIPIL DAERAH MENURUT PROVINSI/KABUPATEN/KOTA

www.peraturan.go.id

LAMPIRAN XIX

RINCIAN DANA TAMBAHAN PENGHASILAN GURU PEGAWAI NEGERI SIPIL DAERAH

MENURUT PROVINSI/KABUPATEN/KOTA

(dalam ribuan rupiah)

NO	NAMA DAERAH	JUMLAH
I	Provinsi Aceh	189.000
1	Kab. Aceh Barat	3.249.500
2	Kab. Aceh Besar	1.785.200
3	Kab. Aceh Selatan	2.112.000
4	Kab. Aceh Singkil	3.382.100
5	Kab. Aceh Tengah	1.850.200
6	Kab. Aceh Tenggara	2.077.000
7	Kab. Aceh Timur	2.231.900
8	Kab. Aceh Utara	442.900
9	Kab. Bireuen	1.716.000
10	Kab. Pidie	1.995.600
11	Kab. Simeulue	3.755.400
12	Kota Banda Aceh	936.500
13	Kota Sabang	565.200
14	Kota Langsa	537.500
15	Kota Lhokseumawe	957.000
16	Kab. Gayo Lues	3.292.900
17	Kab. Aceh Barat Daya	111.200
18	Kab. Aceh Jaya	2.047.000
19	Kab. Nagan Raya	2.001.000
20	Kab. Aceh Tamiang	2.574.600
21	Kab. Bener Meriah	2.091.200
22	Kab. Pidie Jaya	1.461.000
23	Kota Subulussalam	1.774.500
II	Provinsi Sumatera Utara	135.700
1	Kab. Asahan	2.390.500
2	Kab. Dairi	2.171.200
3	Kab. Deli Serdang	-
4	Kab. Karo	3.136.200
5	Kab. Labuhanbatu	2.296.200
6	Kab. Langkat	6.306.000
7	Kab. Mandailing Natal	-
8	Kab. Nias	927.000
9	Kab. Simalungun	5.101.400
10	Kab. Tapanuli Selatan	-
11	Kab. Tapanuli Tengah	1.989.400
12	Kab. Tapanuli Utara	2.103.500
13	Kab. Toba Samosir	2.732.700
14	Kota Binjai	-
15	Kota Medan	3.804.000
16	Kota Pematang Siantar	459.200

www.peraturan.go.id

(dalam ribuan rupiah)

NO	NAMA DAERAH	JUMLAH
17	Kota Sibolga	907.000
18	Kota Tanjung Balai	636.000
19	Kota Tebing Tinggi	277.200
20	Kota Padang Sidempuan	500.700
21	Kab. Pakpak Bharat	499.500
22	Kab. Nias Selatan	2.601.000
23	Kab. Humbang Hasundutan	2.897.200
24	Kab. Serdang Bedagai	1.392.700
25	Kab. Samosir	3.962.200
26	Kab. Batu Bara	1.200.000
27	Kab. Padang Lawas	3.716.200
28	Kab. Padang Lawas Utara	4.527.000
29	Kab. Labuhanbatu Selatan	-
30	Kab. Labuhanbatu Utara	1.011.000
31	Kab. Nias Utara	1.389.200
32	Kab. Nias Barat	456.000
33	Kota Gunungsitoli	1.403.200
III	Provinsi Sumatera Barat	396.000
1	Kab. Limapuluh Kota	1.791.900
2	Kab. Agam	1.826.700
3	Kab. Kepulauan Mentawai	1.946.500
4	Kab. Padang Pariaman	2.618.000
5	Kab. Pasaman	2.018.200
6	Kab. Pesisir Selatan	-
7	Kab. Sijunjung	1.422.000
8	Kab. Solok	2.786.700
9	Kab. Tanah Datar	1.390.000
10	Kota Bukit Tinggi	321.500
11	Kota Padang Panjang	569.200
12	Kota Padang	-
13	Kota Payakumbuh	956.200
14	Kota Sawahlunto	566.000
15	Kota Solok	1.296.700
16	Kota Pariaman	1.797.000
17	Kab. Pasaman Barat	4.172.300
18	Kab. Dharmasraya	1.696.000
19	Kab. Solok Selatan	1.814.900
IV	Provinsi Riau	198.000
1	Kab. Bengkalis	4.617.000
2	Kab. Indragiri Hilir	2.751.000

www.peraturan.go.id

(dalam ribuan rupiah)

NO	NAMA DAERAH	JUMLAH
3	Kab. Indragiri Hulu	2.159.200
4	Kab. Kampar	8.634.400
5	Kab. Kuantan Singingi	2.835.200
6	Kab. Pelalawan	1.982.000
7	Kab. Rokan Hilir	12.300.800
8	Kab. Rokan Hulu	7.578.000
9	Kab. Siak	3.335.200
10	Kota Dumai	2.674.200
11	Kota Pekanbaru	-
12	Kab. Kepulauan Meranti	2.843.400
V	Provinsi Jambi	-
1	Kab. Batang Hari	2.376.700
2	Kab. Bungo	4.137.500
3	Kab. Kerinci	2.645.000
4	Kab. Merangin	-
5	Kab. Muaro Jambi	8.768.200
6	Kab. Sarolangun	3.602.200
7	Kab. Tanjung Jabung Barat	-
8	Kab. Tanjung Jabung Timur	3.572.800
9	Kab. Tebo	2.874.000
10	Kota Jambi	-
11	Kota Sungai Penuh	1.086.300
VI	Provinsi Sumatera Selatan	363.000
1	Kab. Lahat	3.534.500
2	Kab. Musi Banyuasin	2.538.100
3	Kab. Musi Rawas	3.109.000
4	Kab. Muara Enim	1.521.500
5	Kab. Ogan Komering Ilir	3.956.000
6	Kab. Ogan Komering Ulu	3.301.200
7	Kota Palembang	-
8	Kota Prabumulih	1.437.200
9	Kota Pagar Alam	2.056.500
10	Kota Lubuk Linggau	2.589.500
11	Kab. Banyuasin	2.322.000
12	Kab. Ogan Ilir	-
13	Kab. Ogan Komering Ulu Timur	3.198.700
14	Kab. Ogan Komering Ulu Selatan	4.101.500
15	Kab. Empat Lawang	1.753.500
16	Kab. Penukal Abab Lematang Ilir	414.000
17	Kab. Musi Rawas Utara	1.287.000

www.peraturan.go.id

(dalam ribuan rupiah)

NO	NAMA DAERAH	JUMLAH
VII	Provinsi Bengkulu	111.000
1	Kab. Bengkulu Selatan	4.864.200
2	Kab. Bengkulu Utara	820.500
3	Kab. Rejang Lebong	-
4	Kota Bengkulu	3.859.000
5	Kab. Kaur	-
6	Kab. Seluma	794.900
7	Kab. Mukomuko	2.469.200
8	Kab. Lebong	2.193.000
9	Kab. Kepahiang	307.500
10	Kab. Bengkulu Tengah	2.306.400
VIII	Provinsi Lampung	192.000
1	Kab. Lampung Barat	-
2	Kab. Lampung Selatan	3.206.700
3	Kab. Lampung Tengah	25.000
4	Kab. Lampung Utara	1.748.700
5	Kab. Lampung Timur	2.818.000
6	Kab. Tanggamus	1.085.500
7	Kab. Tulang Bawang	2.098.200
8	Kab. Way Kanan	2.462.100
9	Kota Bandar Lampung	1.152.300
10	Kota Metro	975.200
11	Kab. Pesawaran	984.200
12	Kab. Pringsewu	1.441.000
13	Kab. Mesuji	1.304.700
14	Kab. Tulang Bawang Barat	-
15	Kab. Pesisir Barat	1.027.500
IX	Provinsi DKI Jakarta	-
X	Provinsi Jawa Barat	2.799.000
1	Kab. Bandung	-
2	Kab. Bekasi	-
3	Kab. Bogor	4.042.700
4	Kab. Ciamis	-
5	Kab. Cianjur	-
6	Kab. Cirebon	946.200
7	Kab. Garut	866.200
8	Kab. Indramayu	2.295.600
9	Kab. Karawang	1.821.000
10	Kab. Kuningan	621.200
11	Kab. Majalengka	524.200

www.peraturan.go.id

(dalam ribuan rupiah)

NO	NAMA DAERAH	JUMLAH
12	Kab. Purwakarta	145.700
13	Kab. Subang	571.000
14	Kab. Sukabumi	-
15	Kab. Sumedang	1.298.900
16	Kab. Tasikmalaya	-
17	Kota Bandung	841.500
18	Kota Bekasi	-
19	Kota Bogor	2.801.000
20	Kota Cirebon	635.900
21	Kota Depok	-
22	Kota Sukabumi	601.800
23	Kota Tasikmalaya	1.588.500
24	Kota Cimahi	-
25	Kota Banjar	624.500
26	Kab. Bandung Barat	2.202.000
27	Kab. Pangandaran	75.000
XI	Provinsi Jawa Tengah	951.000
1	Kab. Banjarnegara	2.048.500
2	Kab. Banyumas	-
3	Kab. Batang	3.690.000
4	Kab. Blora	-
5	Kab. Boyolali	-
6	Kab. Brebes	-
7	Kab. Cilacap	696.600
8	Kab. Demak	704.200
9	Kab. Grobogan	-
10	Kab. Jepara	854.100
11	Kab. Karanganyar	286.200
12	Kab. Kebumen	-
13	Kab. Kendal	508.000
14	Kab. Klaten	-
15	Kab. Kudus	724.700
16	Kab. Magelang	-
17	Kab. Pati	-
18	Kab. Pekalongan	354.100
19	Kab. Pemalang	-
20	Kab. Purbalingga	760.000
21	Kab. Purworejo	5.539.800
22	Kab. Rembang	564.500
23	Kab. Semarang	1.420.500

www.peraturan.go.id

(dalam ribuan rupiah)

NO	NAMA DAERAH	JUMLAH
24	Kab. Sragen	-
25	Kab. Sukoharjo	268.000
26	Kab. Tegal	-
27	Kab. Temanggung	1.198.200
28	Kab. Wonogiri	961.900
29	Kab. Wonosobo	1.660.300
30	Kota Magelang	3.953.500
31	Kota Pekalongan	326.000
32	Kota Salatiga	454.400
33	Kota Semarang	4.683.000
34	Kota Surakarta	774.300
35	Kota Tegal	789.900
XII	Provinsi DI Yogyakarta	-
1	Kab. Bantul	1.300.500
2	Kab. Gunung Kidul	2.008.300
3	Kab. Kulon Progo	-
4	Kab. Sleman	-
5	Kota Yogyakarta	-
XIII	Provinsi Jawa Timur	-
1	Kab. Bangkalan	-
2	Kab. Banyuwangi	-
3	Kab. Blitar	-
4	Kab. Bojonegoro	-
5	Kab. Bondowoso	3.478.000
6	Kab. Gresik	75.200
7	Kab. Jember	-
8	Kab. Jombang	-
9	Kab. Kediri	208.900
10	Kab. Lamongan	-
11	Kab. Lumajang	967.000
12	Kab. Madiun	1.034.700
13	Kab. Magetan	-
14	Kab. Malang	-
15	Kab. Mojokerto	705.000
16	Kab. Nganjuk	1.714.300
17	Kab. Ngawi	965.900
18	Kab. Pacitan	-
19	Kab. Pamekasan	1.435.700
20	Kab. Pasuruan	-
21	Kab. Ponorogo	1.094.500
22	Kab. Probolinggo	3.743.000
23	Kab. Sampang	1.013.000

www.peraturan.go.id

(dalam ribuan rupiah)

NO	NAMA DAERAH	JUMLAH
24	Kab. Sidoarjo	-
25	Kab. Situbondo	947.500
26	Kab. Sumenep	2.238.000
27	Kab. Trenggalek	-
28	Kab. Tuban	21.500
29	Kab. Tulungagung	-
30	Kota Blitar	212.800
31	Kota Kediri	-
32	Kota Madiun	639.700
33	Kota Malang	-
34	Kota Mojokerto	-
35	Kota Pasuruan	415.500
36	Kota Probolinggo	-
37	Kota Surabaya	702.100
38	Kota Batu	-
XIV	Provinsi Kalimantan Barat	135.000
1	Kab. Bengkayang	2.065.500
2	Kab. Landak	2.881.500
3	Kab. Kapuas Hulu	3.337.500
4	Kab. Ketapang	3.662.700
5	Kab. Mempawah	917.500
6	Kab. Sambas	1.605.400
7	Kab. Sanggau	2.618.500
8	Kab. Sintang	1.163.900
9	Kota Pontianak	1.773.700
10	Kota Singkawang	1.372.000
11	Kab. Sekadau	1.589.500
12	Kab. Melawi	2.647.700
13	Kab. Kayong Utara	2.815.900
14	Kab. Kubu Raya	1.064.100
XV	Provinsi Kalimantan Tengah	-
1	Kab. Barito Selatan	1.714.000
2	Kab. Barito Utara	1.717.800
3	Kab. Kapuas	912.000
4	Kab. Kotawaringin Barat	1.355.000
5	Kab. Kotawaringin Timur	2.005.500
6	Kota Palangkaraya	6.191.800
7	Kab. Katingan	2.849.500

www.peraturan.go.id

(dalam ribuan rupiah)

NO	NAMA DAERAH	JUMLAH
8	Kab. Seruyan	1.411.700
9	Kab. Sukamara	1.194.000
10	Kab. Lamandau	2.374.800
11	Kab. Gunung Mas	1.700.700
12	Kab. Pulang Pisau	1.671.900
13	Kab. Murung Raya	2.263.100
14	Kab. Barito Timur	1.808.200
XVI	Provinsi Kalimantan Selatan	105.000
1	Kab. Banjar	2.516.900
2	Kab. Barito Kuala	1.804.500
3	Kab. Hulu Sungai Selatan	1.772.900
4	Kab. Hulu Sungai Tengah	2.817.200
5	Kab. Hulu Sungai Utara	1.955.200
6	Kab. Kotabaru	3.405.800
7	Kab. Tabalong	5.874.500
8	Kab. Tanah Laut	1.796.500
9	Kab. Tapin	1.735.200
10	Kota Banjarbaru	1.862.800
11	Kota Banjarmasin	1.993.800
12	Kab. Balangan	2.214.300
13	Kab. Tanah Bumbu	1.683.700
XVII	Provinsi Kalimantan Timur	-
1	Kab. Berau	2.014.200
2	Kab. Kutai Kartanegara	-
3	Kab. Kutai Barat	-
4	Kab. Kutai Timur	5.501.500
5	Kab. Paser	582.000
6	Kota Balikpapan	-
7	Kota Bontang	624.100
8	Kota Samarinda	999.000
9	Kab. Penajam Paser Utara	1.946.600
10	Kab. Mahakam Ulu	-
XVIII	Provinsi Sulawesi Utara	105.000
1	Kab. Bolaang Mongondow	1.534.600
2	Kab. Minahasa	745.000
3	Kab. Kepulauan Sangihe	-
4	Kota Bitung	-
5	Kota Manado	1.724.500
6	Kab. Kepulauan Talaud	1.074.200
7	Kab. Minahasa Selatan	207.900

www.peraturan.go.id

(dalam ribuan rupiah)

NO	NAMA DAERAH	JUMLAH
8	Kota Tomohon	-
9	Kab. Minahasa Utara	894.500
10	Kab. Kep. Siau Tagulandang Biaro	1.623.800
11	Kota Kotamobagu	655.200
12	Kab. Bolaang Mongondow Utara	2.637.500
13	Kab. Minahasa Tenggara	403.400
14	Kab. Bolaang Mongondow Timur	901.000
15	Kab. Bolaang Mongondow Selatan	1.147.900
XIX	Provinsi Sulawesi Tengah	15.000
1	Kab. Banggai	1.692.200
2	Kab. Banggai Kepulauan	1.021.200
3	Kab. Buol	1.739.700
4	Kab. Toli-Toli	5.743.500
5	Kab. Donggala	2.094.000
6	Kab. Morowali	1.017.000
7	Kab. Poso	1.227.500
8	Kota Palu	1.240.500
9	Kab. Parigi Moutong	1.893.500
10	Kab. Tojo Una Una	3.121.500
11	Kab. Sigi	2.130.700
12	Kab. Banggai Laut	1.113.000
13	Kab. Morowali Utara	3.141.000
XX	Provinsi Sulawesi Selatan	393.000
1	Kab. Bantaeng	1.177.000
2	Kab. Barru	1.403.400
3	Kab. Bone	2.193.400
4	Kab. Bulukumba	785.000
5	Kab. Enrekang	1.865.700
6	Kab. Gowa	-
7	Kab. Jeneponto	-
8	Kab. Luwu	-
9	Kab. Luwu Utara	1.736.700
10	Kab. Maros	-
11	Kab. Pangkajene dan Kepulauan	-
12	Kota Palopo	422.000
13	Kab. Luwu Timur	-
14	Kab. Pinrang	-
15	Kab. Sinjai	1.331.200
16	Kab. Kepulauan Selayar	907.300
17	Kab. Sidenreng Rappang	-
18	Kab. Soppeng	751.300

www.peraturan.go.id

(dalam ribuan rupiah)

NO	NAMA DAERAH	JUMLAH
19	Kab. Takalar	1.069.700
20	Kab. Tana Toraja	2.623.100
21	Kab. Wajo	245.500
22	Kota Pare-pare	877.500
23	Kota Makassar	1.319.900
24	Kab. Toraja Utara	952.400
XXI	Provinsi Sulawesi Tenggara	-
1	Kab. Buton	1.910.900
2	Kab. Konawe	1.985.200
3	Kab. Kolaka	616.700
4	Kab. Muna	1.771.400
5	Kota Kendari	2.671.100
6	Kota Bau-bau	1.335.000
7	Kab. Konawe Selatan	1.403.200
8	Kab. Bombana	619.400
9	Kab. Wakatobi	1.228.400
10	Kab. Kolaka Utara	-
11	Kab. Konawe Utara	489.000
12	Kab. Buton Utara	711.000
13	Kab. Konawe Kepulauan	-
14	Kab. Kolaka Timur	1.299.000
15	Kab. Muna Barat	-
16	Kab. Buton Tengah	-
17	Kab. Buton Selatan	-
XXII	Provinsi Bali	1.314.000
1	Kab. Badung	1.210.000
2	Kab. Bangli	1.238.700
3	Kab. Buleleng	1.363.700
4	Kab. Gianyar	636.000
5	Kab. Jembrana	1.910.200
6	Kab. Karangasem	1.800.500
7	Kab. Klungkung	896.200
8	Kab. Tabanan	4.786.500
9	Kota Denpasar	827.700
XXIII	Provinsi Nusa Tenggara Barat	414.000
1	Kab. Bima	2.328.700
2	Kab. Dompu	-
3	Kab. Lombok Barat	1.121.500
4	Kab. Lombok Tengah	1.738.400

www.peraturan.go.id

(dalam ribuan rupiah)

NO	NAMA DAERAH	JUMLAH
5	Kab. Lombok Timur	4.878.700
6	Kab. Sumbawa	1.812.200
7	Kota Mataram	249.000
8	Kota Bima	2.184.000
9	Kab. Sumbawa Barat	1.896.500
10	Kab. Lombok Utara	988.700
XXIV	Provinsi Nusa Tenggara Timur	-
1	Kab. Alor	3.166.500
2	Kab. Belu	2.484.000
3	Kab. Ende	2.488.600
4	Kab. Flores Timur	3.411.400
5	Kab. Kupang	6.762.500
6	Kab. Lembata	5.424.600
7	Kab. Manggarai	989.200
8	Kab. Ngada	2.598.000
9	Kab. Sikka	4.700.700
10	Kab. Sumba Barat	1.413.200
11	Kab. Sumba Timur	2.349.700
12	Kab. Timor Tengah Selatan	3.847.500
13	Kab. Timor Tengah Utara	3.479.500
14	Kota Kupang	2.051.400
15	Kab. Rote Ndao	1.345.000
16	Kab. Manggarai Barat	2.615.900
17	Kab. Nagekeo	2.172.400
18	Kab. Sumba Barat Daya	4.752.800
19	Kab. Sumba Tengah	1.542.500
20	Kab. Manggarai Timur	3.895.800
21	Kab. Sabu Raijua	-
22	Kab. Malaka	933.000
XXV	Provinsi Maluku	333.000
1	Kab. Maluku Tenggara Barat	7.120.800
2	Kab. Maluku Tengah	10.025.000
3	Kab. Maluku Tenggara	2.487.500
4	Kab. Buru	1.859.400
5	Kota Ambon	1.263.200
6	Kab. Seram Bagian Barat	4.245.200
7	Kab. Seram Bagian Timur	-
8	Kab. Kepulauan Aru	4.066.400
9	Kota Tual	830.900
10	Kab. Maluku Barat Daya	2.591.200
11	Kab. Buru Selatan	4.011.900

www.peraturan.go.id

(dalam ribuan rupiah)

NO	NAMA DAERAH	JUMLAH
XXVI	Provinsi Papua	-
1	Kab. Biak Numfor	-
2	Kab. Jayapura	-
3	Kab. Jayawijaya	1.969.200
4	Kab. Merauke	3.858.500
5	Kab. Mimika	1.785.000
6	Kab. Nabire	1.758.000
7	Kab. Paniai	-
8	Kab. Puncak Jaya	159.700
9	Kab. Kepulauan Yapen	1.396.400
10	Kota Jayapura	2.616.000
11	Kab. Sarmi	789.000
12	Kab. Keerom	2.690.000
13	Kab. Yahukimo	1.444.800
14	Kab. Pegunungan Bintang	843.200
15	Kab. Tolikara	922.600
16	Kab. Boven Digoel	1.356.700
17	Kab. Mappi	628.000
18	Kab. Asmat	521.500
19	Kab. Waropen	-
20	Kab. Supiori	474.700
21	Kab. Mamberamo Raya	1.365.000
22	Kab. Mamberamo Tengah	270.500
23	Kab. Yalimo	393.000
24	Kab. Lanny Jaya	846.000
25	Kab. Nduga	1.800.000
26	Kab. Dogiyai	173.200
27	Kab. Puncak	-
28	Kab. Intan Jaya	398.100
29	Kab. Deiyai	61.500
XXVII	Provinsi Maluku Utara	138.000
1	Kab. Halmahera Tengah	1.624.600
2	Kota Ternate	-
3	Kab. Halmahera Barat	2.832.300
4	Kab. Halmahera Timur	2.244.700
5	Kab. Halmahera Selatan	5.627.000
6	Kab. Halmahera Utara	3.427.000
7	Kab. Kepulauan Sula	1.090.500
8	Kota Tidore Kepulauan	4.082.700
9	Kab. Pulau Morotai	1.458.000
10	Kab. Pulau Taliabu	1.101.000

www.peraturan.go.id

(dalam ribuan rupiah)

NO	NAMA DAERAH	JUMLAH
XXVIII	Provinsi Banten	411.000
1	Kab. Lebak	5.708.000
2	Kab. Pandeglang	1.835.700
3	Kab. Serang	2.565.600
4	Kab. Tangerang	-
5	Kota Cilegon	323.400
6	Kota Tangerang	-
7	Kota Serang	1.001.900
8	Kota Tangerang Selatan	151.000
XXIX	Provinsi Bangka Belitung	-
1	Kab. Bangka	1.317.100
2	Kab. Belitung	1.117.200
3	Kota Pangkal Pinang	728.500
4	Kab. Bangka Selatan	1.033.700
5	Kab. Bangka Tengah	1.544.200
6	Kab. Bangka Barat	1.205.700
7	Kab. Belitung Timur	981.700
XXX	Provinsi Gorontalo	-
1	Kab. Boalemo	1.378.500
2	Kab. Gorontalo	947.000
3	Kota Gorontalo	680.700
4	Kab. Pohuwato	1.477.700
5	Kab. Bone Bolango	582.500
6	Kab. Gorontalo Utara	641.200
XXXI	Provinsi Kepulauan Riau	36.000
1	Kab. Natuna	1.818.400
2	Kab. Kepulauan Anambas	924.900
3	Kab. Karimun	2.748.700
4	Kota Batam	4.153.500
5	Kota Tanjung Pinang	887.800
6	Kab. Lingga	1.091.600
7	Kab. Bintan	2.150.600
XXXII	Provinsi Papua Barat	69.000
1	Kab. Fak Fak	1.751.900
2	Kab. Manokwari	147.000
3	Kab. Sorong	1.686.200
4	Kota Sorong	917.900
5	Kab. Raja Ampat	888.000
6	Kab. Sorong Selatan	559.200
7	Kab. Teluk Bintuni	1.044.000
8	Kab. Teluk Wondama	1.078.300

www.peraturan.go.id

LAMPIRAN XIX

RINCIAN DANA TAMBAHAN PENGHASILAN GURU PEGAWAI NEGERI SIPIL DAERAH

MENURUT PROVINSI/KABUPATEN/KOTA

(Dalam Ribuan Rupiah)

NO	NAMA DAERAH	JUMLAH
9	Kab. Kaimana	-
10	Kab. Maybrat	337.500
11	Kab. Tambrauw	224.900
12	Kab. Manokwari Selatan	-
13	Kab. Pegunungan Arfak	-
XXXIII	Provinsi Sulawesi Barat	162.000
1	Kab. Majene	1.636.500
2	Kab. Mamuju	1.104.700
3	Kab. Polewali Mandar	2.691.200
4	Kab. Mamasa	1.653.500
5	Kab. Mamuju Utara	1.385.200
6	Kab. Mamuju Tengah	-
XXXIV	Provinsi Kalimantan Utara	-
1	Kab. Bulungan	1.338.200
2	Kab. Malinau	1.364.700
3	Kab. Nunukan	-
4	Kota Tarakan	712.100
5	Kab. Tana Tidung	1.611.000
TOTAL ALOKASI TAMSIL GURU PNSD PROVINSI		**8.964.700**
TOTAL ALOKASI TAMSIL GURU PNSD KABUPATEN/KOTA		**793.354.800**
TOTAL DANA CADANGAN TAMSIL GURU PNSD		**293.680.500**
TOTAL ALOKASI TAMSIL GURU PNSD NASIONAL		**1.096.000.000**

PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA,

JOKO WIDODO

www.peraturan.go.id

LAMPIRAN XX

PERATURAN PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA
NOMOR 36 TAHUN 2015

TENTANG
RINCIAN ANGGARAN
PENDAPATAN DAN BELANJA NEGARA
TAHUN ANGGARAN 2015

RINCIAN BANTUAN OPERASIONAL SEKOLAH MENURUT PROVINSI

www.peraturan.go.id

LAMPIRAN XX
RINCIAN BANTUAN OPERASIONAL SEKOLAH
MENURUT PROVINSI

(dalam ribuan rupiah)

NO	PROVINSI	BANTUAN OPERASIONAL SEKOLAH		
		DAERAH TIDAK TERPENCIL	DAERAH TERPENCIL	JUMLAH
1	Provinsi Aceh	604.148.800	-	604.148.800
2	Provinsi Sumatera Utara	2.080.632.800	-	2.080.632.800
3	Provinsi Sumatera Barat	741.787.600	-	741.787.600
4	Provinsi Riau	868.876.400	-	868.876.400
5	Provinsi Jambi	450.019.000	-	450.019.000
6	Provinsi Sumatera Selatan	1.090.167.800	-	1.090.167.800
7	Provinsi Bengkulu	266.863.800	-	266.863.800
8	Provinsi Lampung	1.013.964.400	-	1.013.964.400
9	Provinsi DKI Jakarta	1.012.857.200	-	1.012.857.200
10	Provinsi Jawa Barat	5.497.340.000	-	5.497.340.000
11	Provinsi Jawa Tengah	3.640.637.400	-	3.640.637.400
12	Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta	364.272.400	-	364.272.400
13	Provinsi Jawa Timur	3.676.551.600	-	3.676.551.600
14	Provinsi Kalimantan Barat	709.928.400	-	709.928.400
15	Provinsi Kalimantan Tengah	306.873.400	30.774.200	337.647.600
16	Provinsi Kalimantan Selatan	423.965.000	-	423.965.000
17	Provinsi Kalimantan Timur	469.030.800	-	469.030.800
18	Provinsi Sulawesi Utara	337.189.000	-	337.189.000
19	Provinsi Sulawesi Tengah	434.977.400	-	434.977.400
20	Provinsi Sulawesi Selatan	1.221.700.600	-	1.221.700.600
21	Provinsi Sulawesi Tenggara	405.064.800	-	405.064.800
22	Provinsi Bali	521.009.000	-	521.009.000
23	Provinsi Nusa Tenggara Barat	606.377.800	-	606.377.800
24	Provinsi Nusa Tenggara Timur	954.743.400	-	954.743.400
25	Provinsi Maluku	24.610.400	268.148.000	292.758.400
26	Provinsi Papua		457.146.400	457.146.400
27	Provinsi Maluku Utara	75.019.000	124.153.200	199.172.200
28	Provinsi Banten	1.382.280.600	-	1.382.280.600
29	Provinsi Kepulauan Bangka Belitung	179.626.400	-	179.626.400
30	Provinsi Gorontalo	162.028.800	-	162.028.800
31	Provinsi Kepulauan Riau	235.083.000	-	235.083.000
32	Provinsi Papua Barat	159.006.600	-	159.006.600
33	Provinsi Sulawesi Barat	203.701.800	-	203.701.800
34	Provinsi Kalimantan Utara	92.799.800	-	92.799.800
Alokasi Dasar BOS		**30.213.135.200**	**880.221.800**	**31.093.357.000**
Dana Cadangan BOS				**204.943.000**
TOTAL BOS				**31.298.300.000**

PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA,

JOKO WIDODO

www.peraturan.go.id

LAMPIRAN XXI

PERATURAN PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA
NOMOR 36 TAHUN 2015

TENTANG
RINCIAN ANGGARAN
PENDAPATAN DAN BELANJA NEGARA
TAHUN ANGGARAN 2015

RINCIAN DANA INSENTIF DAERAH MENURUT PROVINSI/KABUPATEN/KOTA

www.peraturan.go.id

LAMPIRAN XXI
RINCIAN DANA INSENTIF DAERAH
MENURUT PROVINSI/KABUPATEN/KOTA

(Dalam Ribuan Rupiah)

NO	NAMA DAERAH	JUMLAH
1	Kab. Aceh Besar	3.000.000
2	Kota Banda Aceh	24.354.333
3	Kab. Nagan Raya	21.926.404
4	Kota Medan	22.289.498
5	Kab. Pakpak Bharat	3.000.000
6	Kab. Humbang Hasundutan	3.000.000
7	Kab. Padang Pariaman	3.000.000
8	Kab. Pasaman	3.000.000
9	Kab. Pesisir Selatan	22.695.355
10	Kab. Tanah Datar	3.000.000
11	Kota Bukit Tinggi	3.000.000
12	Kab. Kuantan Singingi	3.000.000
13	Kab. Pelalawan	3.000.000
14	Kab. Siak	3.000.000
15	Provinsi Jambi	24.129.930
16	Kab. Batang Hari	3.000.000
17	Kab. Muaro Jambi	21.885.432
18	Kab. Tanjung Jabung Timur	3.000.000
19	Kab. Ogan Komering Ilir	3.000.000
20	Kota Palembang	2.000.000
21	Kota Prabumulih	3.000.000
22	Kota Lubuk Linggau	3.000.000
23	Kab. Ogan Komering Ulu Timur	3.000.000
24	Provinsi Bengkulu	2.000.000
25	Kab. Kaur	2.000.000
26	Kab. Mukomuko	2.000.000
27	Kab. Lebong	2.000.000
28	Kab. Bengkulu Tengah	2.000.000
29	Kab. Lampung Barat	3.000.000
30	Kab. Way Kanan	3.000.000
31	Kota Bandar Lampung	22.515.975
32	Kab. Tulang Bawang Barat	3.000.000
33	Provinsi Jawa Barat	3.000.000
34	Kab. Ciamis	3.000.000
35	Kab. Majalengka	3.000.000
36	Kota Depok	23.956.399
37	Kota Banjar	3.000.000
38	Provinsi Jawa Tengah	24.327.536
39	Kab. Banjarnegara	3.000.000
40	Kab. Banyumas	20.892.777
41	Kab. Boyolali	21.106.584
42	Kab. Demak	3.000.000
43	Kab. Jepara	3.000.000
44	Kab. Pekalongan	18.401.082
45	Kab. Purworejo	24.363.201
46	Kab. Temanggung	3.000.000
47	Kota Semarang	20.730.023
48	Kota Surakarta	25.350.120
49	Provinsi DI Yogyakarta	3.000.000
50	Kab. Bantul	24.595.788
51	Kab. Kulon Progo	3.000.000
52	Kab. Sleman	23.089.697
53	Provinsi Jawa Timur	24.925.427
54	Kab. Bangkalan	3.000.000
55	Kab. Banyuwangi	3.000.000
56	Kab. Gresik	18.042.729
57	Kab. Jombang	20.874.612
58	Kab. Lamongan	19.496.393
59	Kab. Madiun	3.000.000
60	Kab. Ngawi	23.341.107
61	Kab. Pacitan	20.626.355
62	Kab. Ponorogo	3.000.000
63	Kab. Probolinggo	22.857.714
64	Kab. Sidoarjo	23.082.598

www.peraturan.go.id

LAMPIRAN XXI
RINCIAN DANA INSENTIF DAERAH
MENURUT PROVINSI/KABUPATEN/KOTA

(Dalam Ribuan Rupiah)

NO	NAMA DAERAH	JUMLAH
65	Kab. Tulungagung	20.794.505
66	Kota Blitar	3.000.000
67	Kota Madiun	18.568.418
68	Kota Malang	21.698.151
69	Kota Mojokerto	24.927.681
70	Kota Probolinggo	21.354.402
71	Kota Surabaya	24.802.882
72	Kab. Landak	3.000.000
73	Kab. Sintang	2.000.000
74	Kota Pontianak	21.850.290
75	Kab. Sekadau	2.000.000
76	Kab. Katingan	2.000.000
77	Kab. Sukamara	2.000.000
78	Kab. Lamandau	2.000.000
79	Provinsi Kalimantan Selatan	22.869.176
80	Kab. Banjar	2.000.000
81	Kab. Hulu Sungai Selatan	3.000.000
82	Kota Banjarmasin	21.133.293
83	Kab. Balangan	2.000.000
84	Kab. Tanah Bumbu	2.000.000
85	Kab. Paser	25.369.328
86	Kota Balikpapan	23.616.847
87	Kota Bitung	21.425.806
88	Kota Tomohon	21.193.417
89	Kab. Bolaang Mongondow Timur	3.000.000
90	Kab. Bolaang Mongondow Selatan	17.963.620
91	Kab. Banggai	3.000.000
92	Kab. Donggala	20.939.655
93	Kab. Tojo Una Una	20.917.336
94	Provinsi Sulawesi Selatan	26.162.830
95	Kab. Barru	21.003.169
96	Kab. Bulukumba	22.565.622
97	Kab. Gowa	22.078.877
98	Kab. Luwu Utara	22.041.098
99	Kab. Maros	23.260.604
100	Kab. Pangkajene Kepulauan	22.331.848
101	Kab. Pinrang	23.437.006
102	Kota Makassar	19.421.033
103	Provinsi Sulawesi Tenggara	3.000.000
104	Kab. Buton	22.017.615
105	Kab. Konawe	18.845.510
106	Kota Kendari	23.990.420
107	Kab. Bombana	24.484.472
108	Kab. Wakatobi	19.221.115
109	Kab. Kolaka Utara	18.782.841
110	Kab. Buton Utara	19.142.601
111	Provinsi Bali	3.000.000
112	Kab. Tabanan	17.912.194
113	Kota Denpasar	24.823.057
114	Provinsi Nusa Tenggara Barat	24.036.101
115	Kab. Lombok Tengah	23.341.866
116	Kab. Sumbawa	23.543.992
117	Kota Jayapura	21.684.816
118	Kab. Asmat	3.000.000
119	Kota Ternate	18.424.092
120	Kab. Serang	3.000.000
121	Kota Cilegon	3.000.000
122	Kab. Bangka	3.000.000
123	Kab. Bangka Tengah	3.000.000
124	Kab. Bangka Barat	2.000.000
125	Provinsi Gorontalo	3.000.000
126	Kab. Boalemo	3.000.000
127	Kab. Gorontalo	20.875.393
128	Kab. Pohuwato	23.051.565
129	Provinsi Kepulauan Riau	3.000.000

www.peraturan.go.id

130	Kota Batam	22.748.387
131	Kab. Bintan	3.000.000
132	Kab. Sorong	2.000.000
133	Kab. Kaimana	2.000.000
134	Kab. Mamuju	2.000.000
135	Kota Tarakan	3.000.000
	TOTAL ALOKASI DID PROVINSI	**166.451.000**
	TOTAL ALOKASI DID KAB/KOTA	**1.498.059.000**
	TOTAL ALOKASI DID NASIONAL	**1.664.510.000**

PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA,

JOKO WIDODO

www.peraturan.go.id

LAMPIRAN XXII

PERATURAN PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA
NOMOR 36 TAHUN 2015

TENTANG
RINCIAN ANGGARAN
PENDAPATAN DAN BELANJA NEGARA
TAHUN ANGGARAN 2015

RINCIAN DANA DESA MENURUT KABUPATEN/KOTA

www.peraturan.go.id

LAMPIRAN XXII
RINCIAN DANA DESA
MENURUT KABUPATEN/KOTA

(Dalam Ribuan Rupiah)

NO	NAMA DAERAH	Alokasi
1	*2*	*3*
I	**Provinsi Aceh**	
1	Kab. Aceh Barat	84.303.641
2	Kab. Aceh Besar	156.476.096
3	Kab. Aceh Selatan	68.915.039
4	Kab. Aceh Singkil	31.643.403
5	Kab. Aceh Tengah	77.468.513
6	Kab. Aceh Tenggara	100.335.885
7	Kab. Aceh Timur	134.684.927
8	Kab. Aceh Utara	222.413.168
9	Kab. Bireuen	158.871.893
10	Kab. Pidie	189.166.786
11	Kab. Simeulue	37.347.391
12	Kota Banda Aceh	24.890.569
13	Kota Sabang	6.064.106
14	Kota Langsa	18.888.145
15	Kota Lhokseumawe	19.510.027
16	Kab. Gayo Lues	36.857.215
17	Kab. Aceh Barat Daya	35.865.784
18	Kab. Aceh Jaya	45.777.959
19	Kab. Nagan Raya	59.167.104
20	Kab. Aceh Tamiang	56.926.486
21	Kab. Bener Meriah	61.077.168
22	Kab. Pidie Jaya	58.753.649
23	Kota Subulussalam	22.413.041
	Jumlah	**1.707.817.995**
II	**Provinsi Sumatera Utara**	
1	Kab. Asahan	49.651.593
2	Kab. Dairi	36.494.629
3	Kab. Deli Serdang	105.940.761
4	Kab. Karo	67.583.746
5	Kab. Labuhanbatu	21.663.628
6	Kab. Langkat	67.300.828
7	Kab. Mandailing Natal	99.394.520
8	Kab. Nias	46.241.140
9	Kab. Simalungun	102.699.807
10	Kab. Tapanuli Selatan	57.679.485
11	Kab. Tapanuli Tengah	43.043.384
12	Kab. Tapanuli Utara	64.235.734
13	Kab. Toba Samosir	60.617.160
14	Kota Padang Sidempuan	12.256.060
15	Kab. Pakpak Bharat	15.040.704
16	Kab. Nias Selatan	121.416.580
17	Kab. Humbang Hasundutan	41.284.514
18	Kab. Serdang Bedagai	64.319.789
19	Kab. Samosir	35.153.931
20	Kab. Batu Bara	39.707.460
21	Kab. Padang Lawas	79.483.465
22	Kab. Padang Lawas Utara	100.361.763
23	Kab. Labuhanbatu Selatan	16.387.486
24	Kab. Labuhanbatu Utara	23.982.021
25	Kab. Nias Utara	32.208.325
26	Kab. Nias Barat	29.154.095
27	Kota Gunungsitoli	27.854.226
	Jumlah	**1.461.156.834**
III	**Provinsi Sumatera Barat**	
1	Kab. Limapuluh Kota	23.740.813
2	Kab. Agam	24.751.325
3	Kab. Kepulauan Mentawai	14.962.271

www.peraturan.go.id

(Dalam Ribuan Rupiah)

NO	NAMA DAERAH	Alokasi
1	2	3
4	Kab. Padang Pariaman	18.823.668
5	Kab. Pasaman	11.629.286
6	Kab. Pesisir Selatan	50.359.931
7	Kab. Sijunjung	18.156.858
8	Kab. Solok	22.378.076
9	Kab. Tanah Datar	21.830.755
10	Kota Sawahlunto	8.191.432
11	Kota Pariaman	15.339.016
12	Kab. Pasaman Barat	8.728.910
13	Kab. Dharmasraya	15.755.270
14	Kab. Solok Selatan	12.356.228
	Jumlah	**267.003.839**
IV	**Provinsi Riau**	
1	Kab. Bengkalis	38.177.892
2	Kab. Indragiri Hilir	54.910.380
3	Kab. Indragiri Hulu	48.532.612
4	Kab. Kampar	67.249.511
5	Kab. Kuantan Singingi	58.239.832
6	Kab. Pelalawan	29.612.340
7	Kab. Rokan Hilir	46.037.731
8	Kab. Rokan Hulu	39.425.763
9	Kab. Siak	34.379.883
10	Kab. Kepulauan Meranti	29.081.021
	Jumlah	**445.646.965**
V	**Provinsi Jambi**	
1	Kab. Batang Hari	30.352.367
2	Kab. Bungo	38.514.584
3	Kab. Kerinci	74.743.267
4	Kab. Merangin	55.105.381
5	Kab. Muaro Jambi	41.034.901
6	Kab. Sarolangun	40.982.606
7	Kab. Tanjung Jabung Barat	31.860.718
8	Kab. Tanjung Jabung Timur	21.043.597
9	Kab. Tebo	30.028.254
10	Kota Sungai Penuh	17.894.481
	Jumlah	**381.560.156**
VI	**Provinsi Sumatera Selatan**	
1	Kab. Lahat	95.317.372
2	Kab. Musi Banyuasin	62.825.270
3	Kab. Musi Rawas	51.324.892
4	Kab. Muara Enim	67.422.614
5	Kab. Ogan Komering Ilir	80.128.511
6	Kab. Ogan Komering Ulu	39.402.354
7	Kota Prabumulih	5.251.221
8	Kab. Banyuasin	80.574.536
9	Kab. Ogan Ilir	61.530.628
10	Kab. OKU Timur	81.680.235
11	Kab. OKU Selatan	67.322.758
12	Kab. Empat Lawang	41.475.592
13	Kab. Penukal Abab Lematang Ilir	16.704.390
14	Kab. Musi Rawas Utara	24.083.445
	Jumlah	**775.043.818**
VII	**Provinsi Bengkulu**	
1	Kab. Bengkulu Selatan	38.790.715
2	Kab. Bengkulu Utara	58.318.640
3	Kab. Rejang Lebong	33.338.960
4	Kab. Kaur	51.138.239
5	Kab. Seluma	48.899.525
6	Kab. Mukomuko	40.360.009
7	Kab. Lebong	25.447.255
8	Kab. Kepahiang	28.660.854
9	Kab. Bengkulu Tengah	38.008.042
	Jumlah	**362.962.239**

www.peraturan.go.id

(Dalam Ribuan Rupiah)

NO	NAMA DAERAH	Alokasi
1	2	3
VIII	**Provinsi Lampung**	
1	Kab. Lampung Barat	36.292.903
2	Kab. Lampung Selatan	73.656.914
3	Kab. Lampung Tengah	84.410.047
4	Kab. Lampung Utara	65.563.245
5	Kab. Lampung Timur	76.156.736
6	Kab. Tanggamus	81.744.367
7	Kab. Tulang Bawang	41.463.133
8	Kab. Way Kanan	61.098.757
9	Kab. Pesawaran	41.542.850
10	Kab. Pringsewu	34.831.337
11	Kab. Mesuji	29.397.590
12	Kab. Tulang Bawang Barat	26.394.427
13	Kab. Pesisir Barat	32.175.347
	Jumlah	**684.727.653**
IX	**Provinsi Jawa Barat**	
1	Kab. Bandung	87.133.625
2	Kab. Bekasi	60.185.546
3	Kab. Bogor	130.262.061
4	Kab. Ciamis	74.777.160
5	Kab. Cianjur	106.824.450
6	Kab. Cirebon	125.829.723
7	Kab. Garut	124.926.980
8	Kab. Indramayu	93.551.952
9	Kab. Karawang	89.233.910
10	Kab. Kuningan	100.359.733
11	Kab. Majalengka	93.193.552
12	Kab. Purwakarta	51.699.059
13	Kab. Subang	72.775.009
14	Kab. Sukabumi	113.975.106
15	Kab. Sumedang	77.442.881
16	Kab. Tasikmalaya	101.340.713
17	Kota Banjar	5.623.610
18	Kab. Bandung Barat	53.101.326
19	Kab. Pangandaran	27.475.200
	Jumlah	**1.589.711.596**
X	**Provinsi Jawa Tengah**	
1	Kab. Banjarnegara	74.810.054
2	Kab. Banyumas	89.291.645
3	Kab. Batang	66.579.163
4	Kab. Blora	74.816.870
5	Kab. Boyolali	72.548.977
6	Kab. Brebes	94.563.325
7	Kab. Cilacap	81.060.083
8	Kab. Demak	73.852.473
9	Kab. Grobogan	80.175.760
10	Kab. Jepara	55.540.072
11	Kab. Karanganyar	46.196.873
12	Kab. Kebumen	125.844.565
13	Kab. Kendal	74.239.102
14	Kab. Klaten	108.674.969
15	Kab. Kudus	36.178.610
16	Kab. Magelang	101.155.122
17	Kab. Pati	110.946.620
18	Kab. Pekalongan	77.762.725
19	Kab. Pemalang	66.619.532
20	Kab. Purbalingga	66.606.973
21	Kab. Purworejo	124.419.463
22	Kab. Rembang	79.709.975
23	Kab. Semarang	57.840.951
24	Kab. Sragen	56.174.163
25	Kab. Sukoharjo	43.045.054
26	Kab. Tegal	81.620.159
27	Kab. Temanggung	72.423.652
28	Kab. Wonogiri	69.330.086
29	Kab. Wonosobo	66.862.280
	Jumlah	**2.228.889.296**
XI	**Provinsi DI Yogyakarta**	

www.peraturan.go.id

(Dalam Ribuan Rupiah)

NO	NAMA DAERAH	Alokasi
1	2	3
1	Kab. Bantul	26.962.671
2	Kab. Gunung Kidul	46.117.057
3	Kab. Kulon Progo	26.948.074
4	Kab. Sleman	28.048.816
	Jumlah	**128.076.618**
XII	**Provinsi Jawa Timur**	
1	Kab. Bangkalan	79.115.023
2	Kab. Banyuwangi	59.888.614
3	Kab. Blitar	62.103.692
4	Kab. Bojonegoro	116.539.758
5	Kab. Bondowoso	60.687.619
6	Kab. Gresik	91.691.495
7	Kab. Jember	71.400.973
8	Kab. Jombang	85.437.433
9	Kab. Kediri	97.418.474
10	Kab. Lamongan	127.056.805
11	Kab. Lumajang	57.562.288
12	Kab. Madiun	55.287.810
13	Kab. Magetan	56.708.716
14	Kab. Malang	109.423.772
15	Kab. Mojokerto	82.636.892
16	Kab. Nganjuk	75.231.367
17	Kab. Ngawi	61.959.247
18	Kab. Pacitan	46.754.834
19	Kab. Pamekasan	54.023.090
20	Kab. Pasuruan	96.110.603
21	Kab. Ponorogo	78.829.344
22	Kab. Probolinggo	94.777.663
23	Kab. Sampang	58.384.564
24	Kab. Sidoarjo	91.414.871
25	Kab. Situbondo	38.962.693
26	Kab. Sumenep	94.880.517
27	Kab. Trenggalek	44.080.846
28	Kab. Tuban	88.124.523
29	Kab. Tulungagung	71.037.288
30	Kota Batu	6.484.041
	Jumlah	**2.214.014.855**
XIII	**Provinsi Kalimantan Barat**	
1	Kab. Bengkayang	33.788.893
2	Kab. Landak	44.721.021
3	Kab. Kapuas Hulu	76.494.349
4	Kab. Ketapang	68.620.651
5	Kab. Mempawah	17.748.753
6	Kab. Sambas	53.305.112
7	Kab. Sanggau	45.474.645
8	Kab. Sintang	77.054.687
9	Kab. Sekadau	24.783.186
10	Kab. Melawi	47.145.610
11	Kab. Kayong Utara	13.492.118
12	Kab. Kubu Raya	34.437.653
	Jumlah	**537.066.678**
XIV	**Provinsi Kalimantan Tengah**	
1	Kab. Barito Selatan	24.398.744
2	Kab. Barito Utara	25.996.772
3	Kab. Kapuas	58.492.211
4	Kab. Kotawaringin Barat	23.437.745
5	Kab. Kotawaringin Timur	46.933.725
6	Kab. Katingan	42.703.960
7	Kab. Seruyan	28.115.888
8	Kab. Sukamara	9.547.068
9	Kab. Lamandau	23.727.120
10	Kab. Gunung Mas	31.860.684
11	Kab. Pulang Pisau	26.925.265
12	Kab. Murung Raya	33.420.862
13	Kab. Barito Timur	27.790.971
	Jumlah	**403.351.015**
XV	**Provinsi Kalimantan Selatan**	
1	Kab. Banjar	73.258.762

www.peraturan.go.id

(Dalam Ribuan Rupiah)

NO	NAMA DAERAH	Alokasi
1	2	3
2	Kab. Barito Kuala	52.010.789
3	Kab. Hulu Sungai Selatan	38.943.517
4	Kab. Hulu Sungai Tengah	43.184.366
5	Kab. Hulu Sungai Utara	56.084.281
6	Kab. Kotabaru	53.625.140
7	Kab. Tabalong	33.589.672
8	Kab. Tanah Laut	35.675.465
9	Kab. Tapin	34.008.058
10	Kab. Balangan	41.053.554
11	Kab. Tanah Bumbu	39.686.346
	Jumlah	**501.119.950**
XVI	**Provinsi Kalimantan Timur**	
1	Kab. Berau	28.721.995
2	Kab. Kutai Kartanegara	54.496.584
3	Kab. Kutai Barat	52.527.959
4	Kab. Kutai Timur	40.718.564
5	Kab. Paser	38.399.181
6	Kab. Penajam Paser Utara	9.638.388
7	Kab. Mahakam Ulu	16.039.742
	Jumlah	**240.542.413**
XVII	**Provinsi Sulawesi Utara**	
1	Kab. Bolaang Mongondow	53.458.431
2	Kab. Minahasa	59.997.140
3	Kab. Kepulauan Sangihe	38.998.397
4	Kab. Kepulauan Talaud	38.154.408
5	Kab. Minahasa Selatan	40.965.353
6	Kab. Minahasa Utara	33.975.540
7	Kab. Kep. Siau Tagulandang Biaro	22.707.402
8	Kota Kotamobagu	4.572.649
9	Kab. Bolaang Mongondow Utara	28.677.046
10	Kab. Minahasa Tenggara	36.264.822
11	Kab. Bolaang Mongondow Timur	22.289.277
12	Kab. Bolaang Mongondow Selatan	22.485.895
	Jumlah	**402.546.360**
XVIII	**Provinsi Sulawesi Tengah**	
1	Kab. Banggai	77.141.362
2	Kab. Banggai Kepulauan	37.892.471
3	Kab. Buol	29.674.005
4	Kab. Toli-Toli	27.830.580
5	Kab. Donggala	43.584.978
6	Kab. Morowali	33.975.467
7	Kab. Poso	39.300.655
8	Kab. Parigi Moutong	75.150.157
9	Kab. Tojo Una Una	36.811.879
10	Kab. Sigi	47.575.811
11	Kab. Banggai Laut	17.487.476
12	Kab. Morowali Utara	33.876.339
	Jumlah	**500.301.180**
XIX	**Provinsi Sulawesi Selatan**	
1	Kab. Bantaeng	13.498.150
2	Kab. Barru	12.268.270
3	Kab. Bone	89.567.100
4	Kab. Bulukumba	30.541.273
5	Kab. Enrekang	31.146.263
6	Kab. Gowa	35.072.370
7	Kab. Jeneponto	24.485.264
8	Kab. Luwu	56.815.500
9	Kab. Luwu Utara	46.305.735
10	Kab. Maros	23.469.704
11	Kab. Pangkajene dan Kepulauan	19.640.248
12	Kab. Luwu Timur	34.652.327
13	Kab. Pinrang	19.740.803
14	Kab. Sinjai	19.228.881
15	Kab. Kepulauan Selayar	22.660.884
16	Kab. Sidenreng Rappang	19.131.108
17	Kab. Soppeng	14.664.052
18	Kab. Takalar	22.042.672
19	Kab. Tana Toraja	31.630.699

www.peraturan.go.id

(Dalam Ribuan Rupiah)

NO	NAMA DAERAH	Alokasi
1	2	3
20	Kab. Wajo	38.795.602
21	Kab. Toraja Utara	29.998.890
	Jumlah	**635.355.795**
XX	**Provinsi Sulawesi Tenggara**	
1	Kab. Buton	23.227.383
2	Kab. Konawe	63.869.953
3	Kab. Kolaka	27.606.292
4	Kab. Muna	34.213.502
5	Kab. Konawe Selatan	89.654.622
6	Kab. Bombana	31.987.923
7	Kab. Wakatobi	21.225.856
8	Kab. Kolaka Utara	34.846.479
9	Kab. Konawe Utara	36.351.532
10	Kab. Buton Utara	21.772.589
11	Kab. Konawe Kepulauan	20.221.651
12	Kab. Kolaka Timur	32.103.301
13	Kab. Muna Barat	22.486.428
14	Kab. Buton Tengah	19.082.107
15	Kab. Buton Selatan	17.427.616
	Jumlah	**496.077.234**
XXI	**Provinsi Bali**	
1	Kab. Badung	13.826.342
2	Kab. Bangli	19.197.775
3	Kab. Buleleng	36.812.689
4	Kab. Gianyar	19.166.561
5	Kab. Jembrana	12.410.047
6	Kab. Karangasem	21.962.811
7	Kab. Klungkung	15.260.570
8	Kab. Tabanan	37.068.941
9	Kota Denpasar	9.723.248
	Jumlah	**185.428.984**
XXII	**Provinsi Nusa Tenggara Barat**	
1	Kab. Bima	54.246.373
2	Kab. Dompu	21.271.707
3	Kab. Lombok Barat	37.847.411
4	Kab. Lombok Tengah	41.362.392
5	Kab. Lombok Timur	73.250.763
6	Kab. Sumbawa	45.128.772
7	Kab. Sumbawa Barat	16.665.225
8	Kab. Lombok Utara	12.024.877
	Jumlah	**301.797.520**
XXIII	**Provinsi Nusa Tenggara Timur**	
1	Kab. Alor	42.780.821
2	Kab. Belu	19.579.257
3	Kab. Ende	67.298.428
4	Kab. Flores Timur	60.703.668
5	Kab. Kupang	44.657.895
6	Kab. Lembata	38.765.533
7	Kab. Manggarai	40.800.442
8	Kab. Ngada	36.127.922
9	Kab. Sikka	40.665.589
10	Kab. Sumba Barat	18.631.166
11	Kab. Sumba Timur	39.135.917
12	Kab. Timor Tengah Selatan	73.623.173
13	Kab. Timor Tengah Utara	43.016.882
14	Kab. Rote Ndao	23.228.248
15	Kab. Manggarai Barat	45.001.552

www.peraturan.go.id

(Dalam Ribuan Rupiah)

NO	NAMA DAERAH	Alokasi
1	2	3
16	Kab. Nagekeo	26.514.050
17	Kab. Sumba Barat Daya	37.936.834
18	Kab. Sumba Tengah	18.745.657
19	Kab. Manggarai Timur	43.897.626
20	Kab. Sabu Raijua	17.106.693
21	Kab. Malaka	34.658.212
	Jumlah	**812.875.565**
XXIV	**Provinsi Maluku**	
1	Kab. Maluku Tenggara Barat	23.319.917
2	Kab. Maluku Tengah	52.081.977
3	Kab. Maluku Tenggara	50.503.068
4	Kab. Buru	23.297.582
5	Kota Ambon	9.641.534
6	Kab. Seram Bagian Barat	26.556.640
7	Kab. Seram Bagian Timur	51.627.535
8	Kab. Kepulauan Aru	32.643.375
9	Kota Tual	8.899.343
10	Kab. Maluku Barat Daya	32.889.690
11	Kab. Buru Selatan	22.543.856
	Jumlah	**334.004.517**
XXV	**Provinsi Papua**	
1	Kab. Biak Numfor	66.825.622
2	Kab. Jayapura	38.486.394
3	Kab. Jayawijaya	87.553.175
4	Kab. Merauke	54.227.836
5	Kab. Mimika	38.343.160
6	Kab. Nabire	21.742.664
7	Kab. Paniai	23.764.265
8	Kab. Puncak Jaya	82.653.414
9	Kab. Kepulauan Yapen	42.916.866
10	Kota Jayapura	5.556.096
11	Kab. Sarmi	28.321.170
12	Kab. Keerom	26.383.329
13	Kab. Yahukimo	134.054.919
14	Kab. Pegunungan Bintang	76.822.089
15	Kab. Tolikara	142.664.313
16	Kab. Boven Digoel	33.879.316
17	Kab. Mappi	46.666.716
18	Kab. Asmat	62.684.425
19	Kab. Waropen	28.568.445
20	Kab. Supiori	12.131.809
21	Kab. Mamberamo Raya	22.577.198
22	Kab. Mamberamo Tengah	20.344.811
23	Kab. Yalimo	80.810.128
24	Kab. Lanny Jaya	94.956.301
25	Kab. Nduga	67.355.546
26	Kab. Dogiyai	23.830.061
27	Kab. Puncak	27.550.317
28	Kab. Intan Jaya	30.654.825
29	Kab. Deiyai	10.901.532
	Jumlah	**1.433.226.742**
XXVI	**Provinsi Maluku Utara**	
1	Kab. Halmahera Tengah	17.887.619
2	Kab. Halmahera Barat	45.329.588
3	Kab. Halmahera Timur	28.552.219
4	Kab. Halmahera Selatan	65.643.788
5	Kab. Halmahera Utara	52.527.804
6	Kab. Kepulauan Sula	22.223.945
7	Kota Tidore Kepulauan	14.362.701

www.peraturan.go.id

(Dalam Ribuan Rupiah)

NO	NAMA DAERAH	Alokasi
1	*2*	*3*
8	Kab. Pulau Morotai	24.417.517
9	Kab. Pulau Taliabu	20.126.021
	Jumlah	**291.071.202**
XXVII	**Provinsi Banten**	
1	Kab. Lebak	95.972.125
2	Kab. Pandeglang	91.602.411
3	Kab. Serang	89.813.784
4	Kab. Tangerang	75.128.048
	Jumlah	**352.516.368**
XXVIII	**Provinsi Bangka Belitung**	
1	Kab. Bangka	18.136.526
2	Kab. Belitung	12.892.222
3	Kab. Bangka Selatan	14.901.133
4	Kab. Bangka Tengah	16.429.343
5	Kab. Bangka Barat	17.494.100
6	Kab. Belitung Timur	12.074.236
	Jumlah	**91.927.560**
XXIX	**Provinsi Gorontalo**	
1	Kab. Boalemo	23.290.447
2	Kab. Gorontalo	52.393.232
3	Kab. Pohuwato	28.156.847
4	Kab. Bone Bolango	42.750.131
5	Kab. Gorontalo Utara	33.367.182
	Jumlah	**179.957.839**
XXX	**Provinsi Kepulauan Riau**	
1	Kab. Natuna	19.765.951
2	Kab. Kepulauan Anambas	15.188.644
3	Kab. Karimun	12.272.922
4	Kab. Lingga	21.165.424
5	Kab. Bintan	10.806.783
	Jumlah	79.199.724
XXXI	**Provinsi Papua Barat**	
1	Kab. Fak Fak	39.696.943
2	Kab. Manokwari	44.593.078
3	Kab. Sorong	31.301.530
4	Kab. Raja Ampat	32.820.754
5	Kab. Sorong Selatan	33.143.700
6	Kab. Teluk Bintuni	33.758.721
7	Kab. Teluk Wondama	21.383.441
8	Kab. Kaimana	25.134.815
9	Kab. Maybrat	68.583.837
10	Kab. Tambrauw	57.246.113
11	Kab. Manokwari Selatan	16.736.116
12	Kab. Pegunungan Arfak	44.927.914
	Jumlah	**449.326.962**
XXXII	**Provinsi Sulawesi Barat**	
1	Kab. Majene	17.781.684
2	Kab. Mamuju	25.500.095
3	Kab. Polewali Mandar	40.561.642
4	Kab. Mamasa	45.245.426
5	Kab. Mamuju Utara	17.006.037
6	Kab. Mamuju Tengah	15.924.750
	Jumlah	**162.019.634**

www.peraturan.go.id

LAMPIRAN XXII
RINCIAN DANA DESA
MENURUT KABUPATEN/KOTA

(Dalam Ribuan Rupiah)

NO	NAMA DAERAH	Alokasi
1	*2*	*3*
XXXIII	**Provinsi Kalimantan Utara**	
1	Kab. Bulungan	22.248.322
2	Kab. Malinau	34.456.562
3	Kab. Nunukan	62.022.821
4	Kab. Tana Tidung	11.147.189
	Jumlah	**129.874.894**
	TOTAL NASIONAL	**20.766.200.000**

PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA,

JOKO WIDODO

www.peraturan.go.id

LAMPIRAN XXIII

PERATURAN PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA
NOMOR 36 TAHUN 2015

TENTANG
RINCIAN ANGGARAN
PENDAPATAN DAN BELANJA NEGARA
TAHUN ANGGARAN 2015

RINCIAN ANGGARAN PENDIDIKAN

www.peraturan.go.id

LAMPIRAN XXIII
RINCIAN ANGGARAN PENDIDIKAN

(dalam ribuan rupiah)

NO	URAIAN	JUMLAH
1.	**Anggaran Pendidikan Melalui Belanja Pemerintah Pusat**	**154.363.750.304**
1.1	Anggaran Pendidikan Pada Kementerian Negara / Lembaga	154.363.750.304
1.1.1	Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan	53.278.549.097
1.1.2	Kementerian Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi	42.707.764.607
1.1.3	Kementerian Agama	49.409.851.022
1.1.4	Kementerian Keuangan	802.645.545
1.1.5	Kementerian Pertanian	59.003.019
1.1.6	Kementerian Perindustrian	431.194.278
1.1.7	Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral	165.344.161
1.1.8	Kementerian Perhubungan	3.182.520.526
1.1.9	Kementerian Kesehatan	1.450.000.000
1.1.10	Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan	60.362.452
1.1.11	Kementerian Kelautan dan Perikanan	301.280.000
1.1.12	Kementerian Pariwisata	271.201.085
1.1.13	Badan Tenaga Nuklir Nasional	16.281.500
1.1.14	Kementerian Pemuda dan Olahraga	1.006.207.200
1.1.15	Kementerian Pertahanan	172.541.679
1.1.16	Kementerian Ketenagakerjaan	437.043.904
1.1.17	Perpustakaan Nasional Republik Indonesia	331.081.301
1.1.18	Kementerian Koperasi dan Usaha Kecil dan Menengah	215.000.000
1.1.19	Kementerian Komunikasi dan Informatika	50.465.100
1.1.20	Kementerian Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi	15.413.828
1.2	Anggaran Pendidikan melalui BA BUN	-
1.2.1	Cadangan Anggaran Pendidikan	-
2.	**Anggaran Pendidikan Melalui Transfer ke Daerah dan Dana Desa**	**254.180.934.000**
2.1.1	DBH yang diperkirakan untuk anggaran pendidikan	623.186.000
2.1.2	DAK Pendidikan	10.041.300.000
2.1.3	DAU yang diperkirakan untuk anggaran pendidikan	134.970.314.000
2.1.4	Dana Tambahan Penghasilan Guru PNSD	1.096.000.000
2.1.5	Tunjangan Profesi Guru PNSD	70.252.670.000
2.1.6	Otsus yang diperkirakan untuk anggaran pendidikan	4.234.654.000
2.1.7	Dana insentif daerah	1.664.510.000
2.1.8	Bantuan Operasional Sekolah	31.298.300.000
JUMLAH		**408.544.684.304**

Keterangan:
Rincian anggaran pendidikan belum termasuk pergeseran fungsi pendidikan pada beberapa Kementerian Negara/Lembaga sesuai hasil penelaahan RKA-K/L setelah pengesahan APBNP 2015 oleh DPR RI.

PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA,

JOKO WIDODO

www.peraturan.go.id

LAMPIRAN XXIV

PERATURAN PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA
NOMOR 36 TAHUN 2015

TENTANG
RINCIAN ANGGARAN
PENDAPATAN DAN BELANJA NEGARA
TAHUN ANGGARAN 2015

RINCIAN PEMBIAYAAN ANGGARAN

www.peraturan.go.id

Lampiran XXIV
Rincian Pembiayaan Anggaran

(dalam ribuan rupiah)

Kode	Uraian	APBN	APBNP
I.	**Pembiayaan Dalam Negeri**	**269.709.700.514**	**242.515.005.350**
1	**Perbankan Dalam Negeri**	**4.467.479.293**	**4.785.365.489**
1.1	Penerimaan Cicilan Pengembalian Penerusan Pinjaman	4.467.479.293	4.785.365.489
2	**Non Perbankan Dalam Negeri**	**265.242.221.221**	**237.729.639.861**
2.1	Hasil Pengelolaan Aset	350.000.000	350.000.000
2.2	Surat Berharga Negara (neto)	277.049.800.000	297.698.382.000
2.3	Pinjaman Dalam Negeri (neto)	1.621.190.000	1.690.600.000
2.3.1	Penarikan Pinjaman Dalam Negeri (bruto)	2.000.000.000	2.000.000.000
2.3.2	Pembayaran Cicilan Pokok Pinjaman Dalam Negeri	**- 378.810.000**	- 309.400.000
2.4	Dana Investasi Pemerintah	- 12.647.146.779	- 58.844.130.927
2.4.1	Penerimaan kembali Investasi	778.320.274	19.134.920.274
2.4.2	Penyertaan Modal Negara	- 7.319.167.053	- 70.372.751.201
2.4.2.1	PMN kepada BUMN	- 5.107.307.000	- 64.883.907.000
2.4.2.1.1	PT PAL Indonesia	- 1.500.000.000	- 1.500.000.000
2.4.2.1.2	PT Sarana Multigriya Finansial	- 1.000.000.000	- 1.000.000.000
2.4.2.1.3	PT Geo Dipa Energi	- 607.307.000	- 607.307.000
2.4.2.1.4	PT Sarana Multi Infrastruktur	- 2.000.000.000	- 20.356.600.000
2.4.2.1.5	PT Penjaminan Infrastruktur Indonesia	-	- 1.500.000.000
2.4.2.1.6	Perum Bulog	-	- 3.000.000.000
2.4.2.1.7	PT Pertani	-	- 470.000.000
2.4.2.1.8	PT Sang Hyang Seri	-	- 400.000.000
2.4.2.1.9	PT Perikanan Nusantara	-	- 200.000.000
2.4.2.1.10	Perum Perikanan Indonseia	-	- 300.000.000
2.4.2.1.11	PT Garam	-	- 300.000.000
2.4.2.1.12	PT Perkebunan Nusantara III	-	- 3.150.000.000
2.4.2.1.13	PT Perkebunan Nusantara VII	-	- 17.500.000
2.4.2.1.14	PT Perkebunan Nusantara IX	-	- 100.000.000
2.4.2.1.15	PT Perkebunan Nusantara X	-	- 97.500.000
2.4.2.1.16	PT Perkebunan Nusantara XI	-	- 65.000.000
2.4.2.1.17	PT Perkebunan Nusantara XII	-	- 70.000.000
2.4.2.1.18	PT Permodalan Nasional Madani	-	- 1.000.000.000
2.4.2.1.19	PT Angkasa Pura II	-	- 2.000.000.000
2.4.2.1.20	PT Angkutan Sungai, Danau, dan Penyeberangan	-	- 1.000.000.000
2.4.2.1.21	PT Pelni	-	- 500.000.000
2.4.2.1.22	PT Djakarta Lloyd	-	- 350.000.000
2.4.2.1.23	PT Hutama Karya	-	- 3.600.000.000
2.4.2.1.24	Perum Perumnas	-	- 1.000.000.000
2.4.2.1.25	PT Waskita Karya Tbk.	-	- 3.500.000.000
2.4.2.1.26	PT Adhi Karya Tbk.	-	- 1.400.000.000
2.4.2.1.27	PT Dok dan Perkapalan Surabaya	-	- 200.000.000
2.4.2.1.28	PT Dok dan Perkapalan Kodja Bahari	-	- 900.000.000
2.4.2.1.29	PT Industri Kapal Indonesia	-	- 200.000.000
2.4.2.1.30	PT Dirgantara Indonesia	-	- 400.000.000
2.4.2.1.31	PT Aneka Tambang Tbk.	-	- 3.500.000.000
2.4.2.1.32	PT Pindad	-	- 700.000.000
2.4.2.1.33	PT Kereta Api Indonesia	-	- 2.000.000.000
2.4.2.1.34	PT Perusahaan Pengelola Aset	-	- 1.000.000.000
2.4.2.1.35	PT Pelabuhan Indonesia IV	-	- 2.000.000.000
2.4.2.1.36	PT Bahana Pembinaan Usaha Indonesia	-	- 250.000.000
2.4.2.1.37	PT Pengembangan Pariwisata Indonesia	-	- 250.000.000
2.4.2.1.38	PT Perusahaan Listrik Negara	-	- 5.000.000.000
2.4.2.1.39	PT Askrindo dan Perum Jamkrindo	-	- 1.000.000.000
2.4.2.2	PMN kepada Organisasi/Lembaga Keuangan Internasional	- 433.539.779	- 250.523.927
2.4.2.2.1	International Bank for Reconstruction and Development (IBRD)	- 169.359.779	- 177.898.927
2.4.2.2.2	International Fund for Agricultural Development (IFAD)	- 47.600.000	- 50.000.000
2.4.2.2.3	International Development Association (IDA)	- 216.580.000	- 22.625.000
2.4.2.3	PMN Lainnya	- 1.778.320.274	- 5.238.320.274
2.4.2.3.1	Lembaga Pembiayaan Ekspor Indonesia	- 1.000.000.000	- 1.000.000.000
2.4.2.3.2	Bank Indonesia	- 778.320.274	- 778.320.274
2.4.2.3.3	Badan Penyelenggara Jaminan Sosial (BPJS) Kesehatan	-	- 3.460.000.000
2.4.3	Dana Bergulir	- 6.106.300.000	- 6.106.300.000
2.4.3.1	LPDB KUMKM	- 1.000.000.000	- 1.000.000.000
2.4.3.2	Pusat Pembiayaan Perumahan	- 5.106.300.000	- 5.106.300.000
2.4.4	Pembiayaan Investasi dalam rangka Pembentukan BLU Manajemen Aset	-	- 1.500.000.000
2.5	Kewajiban Penjaminan	- 1.131.622.000	- 843.523.000
2.5.1	Percepatan pembangunan pembangkit tenaga listrik yang menggunakan batubara	- 833.230.000	- 792.026.000
2.5.2	Percepatan penyediaan air minum	- 1.903.000	- 1.772.000
2.5.3	Proyek Kerjasama Pemerintah dengan badan usaha melalui Badan Usaha Penjaminan Infrastruk	- 296.489.000	- 49.725.000
2.6	Dana Antisipasi untuk PT Lapindo Brantas Inc./ PT Minarak Lapindo Jaya	-	- 781.688.212
2.7	Cadangan Pembiayaan kepada BPJS Kesehatan untuk Program DJS Kesehatan	-	- 1.540.000.000
II.	**Pembiayaan Luar Negeri (Neto)**	**- 23.815.010.452**	**- 20.008.107.720**
1	**Penarikan Pinjaman Luar Negeri (Bruto)**	**47.037.121.419**	**48.647.035.745**
1.1	Pinjaman Program	7.140.000.000	7.500.000.000
1.2	Pinjaman Proyek	39.897.121.419	41.147.035.745
1.2.1	Pinjaman Proyek Pemerintah Pusat	35.577.749.548	36.675.092.280
1.2.1.1	Pinjaman Proyek Kementerian Negara/Lembaga	32.881.457.258	33.915.244.340
1.2.1.2	Pinjaman Proyek Diterushibahkan	2.696.292.290	2.759.847.940
1.2.2	Penerimaan Penerusan Pinjaman	4.319.371.871	4.471.943.465

www.peraturan.go.id

2	**Penerusan Pinjaman kepada Badan Usaha Milik Negara/Pemerintah Daerah**	**- 4.319.371.871**	**- 4.471.943.465**
2.1	PT Perusahaan Listrik Negara (PLN)	- 3.287.910.863	- 3.393.551.202
2.2	PT Sarana Multi Infrastruktur (SMI)	- 41.650.000	- 43.750.000
2.3	PT Penjaminan Infrastruktur Indonesia (PII)	- 13.685.000	- 14.375.000
2.4	PT Pertamina	- 677.555.008	- 706.642.263
2.5	Pemerintah Provinsi DKI Jakarta	- 298.571.000	- 313.625.000
3	**Pembayaran Cicilan Pokok Utang Luar Negeri**	**- 66.532.760.000**	**- 64.183.200.000**
Jumlah		**245.894.690.062**	**222.506.897.630**

PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA,

JOKO WIDODO

www.peraturan.go.id